



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG >>>>>

RD IMD
2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH



www.sigikab.go.id



082290682005



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang, perlu menetapkan Undang-Undang, h tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN
2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sigi periode Tahun 2025-2029 terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sigi untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
18. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
21. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
22. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, lembaga sosial

masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat Daerah/desa, dunia usaha/ investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Kabupaten adalah Kabupaten Sigi.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Sigi.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) RPJMD Kabupaten merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih tahun 2025-2029.
- (3) RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi :
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Pasal 3

Perangkat Daerah melaksanakan program RPJMD Kabupaten yang dituangkan dalam Renstra PD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Perangkat Daerah melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dalam menyusun Renstra PD.

Pasal 5

- (1) RPJMD Kabupaten disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
 - c. BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Kabupaten dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Daerah.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya RPJMD Kabupaten kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah;

- g. perubahan kebijakan nasional
- (4) Merugikan kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan Daerah.
 - (5) Perubahan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.
 - (6) Apabila terjadi perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf f, dan huruf g dilakukan penyesuaian dalam RTRW Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD untuk tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Agustus 2025


BUPATI SIGI,
MOHAMAD RIZAL INTJENAE

DAFTAR ISI

		<i>Hal</i>
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dan Dokumen Lainnya.....	I-5
	1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-9
	1.5 Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
	2.1 KONDISI DAERAH.....	II-1
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-66
	2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-87
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-98
	2.1.5 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026	II-103
	2.2 KEUANGAN DAERAH.....	II-106
	2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020-2024	II-106
	2.2.2 Proyeksi keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030	II-112
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II-118
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
	3.1 MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	III-1
	3.1.1 Visi dan Misi.....	III-1
	3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-7
	3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-31
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.	III-31
	3.2.2 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	III-157
	3.2.3 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-170
	3.2.4 Program lintas perangkat daerah dan kewilayahan	III-190
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
	4.1 Program Perangkat Daerah.....	IV-1
	4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	IV-79
	4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-79
	4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	IV-82
	4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	IV-94
BAB V	5.1 PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Tabel 2.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Sigi.....	II-1
Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Sigi.....	II-4
Tabel 2.3 Kelas Ketinggian Kabupaten Sigi.....	II-4
Tabel 2.4 Formasi Geologi Kabupaten Sigi.....	II-7
Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Sigi.....	II-9
Tabel 2.6 Iklim Kabupaten Sigi.....	II-11
Tabel 2.7 Pola Ruang Kabupaten Sigi.....	II-15
Tabel 2.8 Potensi Sumber Daya Alam.....	II-16
Tabel 2.9 Tanaman Pangan Kabupaten Sigi 2024.....	II-18
Tabel 2.10 Tanaman Pangan Kabupaten Sigi 2024.....	II-20
Tabel 2.11 Hortikultura Kabupaten Sigi 2024.....	II-21
Tabel 2.12 Perkebunan Kabupaten Sigi 2024.....	II-22
Tabel 2.13 Luas LP2B dan LP2B Cadangan di Kabupaten Sigi.....	II-23
Tabel 2.14 Desa Wisata yang Ditetapkan Melalui SK Bupati di Kabupaten Sigi	II-24
Tabel 2.15 Populasi Ternak Tahun 2024 di Kabupaten Sigi	II-27
Tabel 2.16 Populasi Ternak Tahun 2024 di Kabupaten Sigi	II-29
Tabel 2.17 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Sigi Berdasarkan Administrasi Kecamatan	II-33
Tabel 2.18 Status Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan ..	II-34
Tabel 2.19 Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan	II-36
Tabel 2.20 Status Penyedia Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan	II-37
Tabel 2.21 Kelompok Etnis dan Lokasinya di Kabupaten Sigi	II-62
Tabel 2.22 Data Perkawinan Usia Anak Kabupaten Sigi	II-77
Tabel 2.23 Fokus Intervensi Kelompok Sasaran Stunting	II-79
Tabel 2.24 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sigi	II-80
Tabel 2.25 Jumlah Sekolah , Murid dan Guru Kabupaten Sigi.....	II-80
Tabel 2.26 Data Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sigi	II-89
Tabel 2.27 Data Koperasi Aktif dan UMKM Kabupaten Sigi	II-90
Tabel 2.28 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sigi Tahun 2021-2024	II-104
Tabel 2.29 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2021-2024	II-105
Tabel 2.30 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 s.d 2024	II-107
Tabel 2.31 Neraca Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 s.d 2024.....	II-108
Tabel 2.32 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030	II-114
Tabel 2.33 Rumusan Permasalahan.....	II-137
Tabel 2.34 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah Kabupaten Sigi.....	II-148
Tabel 3.1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	III-1
Tabel 3.2 Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3.3 Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	III-3
Tabel 3.4 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025 – 2029.....	III-4
Tabel 3.5 Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, Misi RPJMN (Asta Cita/Prioritas Nasional) Tahun 2025-2029 dan Misi /Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045.....	III-4
Tabel 3.6 Teknik Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator	III-20
Tabel 3.7 Penahapan Pembangunan RPJMD Misi 1	III-32
Tabel 3.8 Penahapan Pembangunan RPJMD Misi 2	III-36
Tabel 3.9 Penahapan Pembangunan RPJMD Misi 3.....	III-48
Tabel 3.10 Penahapan Pembangunan RPJMD Misi 4	III-65
Tabel 3.11 Penahapan Pembangunan RPJMD Misi 5	III-82
Tabel 3.12 Arah Kebijakan Pencapaian RPJMD Misi 1	III-102
Tabel 3.12 Arah Kebijakan Pencapaian RPJMD Misi 2	III-103

Tabel 3.13	Arah Kebijakan Pencapaian RPJMD Misi 3	III-107
Tabel 3.14	Arah Kebijakan Pencapaian RPJMD Misi 4	III-111
Tabel 3.15	Arah Kebijakan Pencapaian RPJMD Misi 5.....	III-114
Tabel 3.16	Keselarasan Antara Misi, Janji Politik dengan Implementasi Program dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.....	III-119
Tabel 3.17	Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Cerdas” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi.....	III-172
Tabel 3.18	Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Sehat” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi.....	III-174
Tabel 3.19	Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Sejahtera” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi	III-176
Tabel 3.20	Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Makmur” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi.....	III-178
Tabel 3.21	Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Harmoni” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi.....	III-182
Tabel 3.22	Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Lancar” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi.....	III-185
Tabel 3.23	Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Menyala” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi.....	III-186
Tabel 3.24	Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berkah” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi.....	III-187
Tabel 3.25	Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Berintegrasi” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi.....	III-188
Tabel 3.26	Cross Cutting Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi....	III-192
Tabel 3.27	Cross Cutting Program Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi	III-196
Tabel 3.28	Cross Cutting Program Ketahanan Pangan	III-199
Tabel 3.29	Cross Cutting Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi	III-202
Tabel 3.30	Cross Cutting Program Pengarusutamaan GEDSI Terintegrasi.....	III-205
Tabel 3.31	Logical Framework Kontribusi Kabupaten Sigi terhadap Pencapaian Indeks Ekonomi Biru (IEB).....	III-208
Tabel 3.31	Logical Framework Kontribusi Kabupaten Sigi terhadap Pencapaian Indeks Ekonomi Hijau (IEH).....	III-232
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kab.Sigi	IV-1
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab. Sigi	IV-80
Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kab.Sigi.....	IV-82
Tabel 4.4	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab.Sigi.....	IV-94

DAFTAR GAMBAR

		<i>Hal</i>
Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen.....	5
Gambar 2.1	Grafik Persentase Luas wilayah per Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Sigi	II-2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Sigi.....	II-3
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Sigi.....	II-5
Gambar 2.4	Kelas Lereng Kabupaten Sigi.....	II-5
Gambar 2.5	Peta Sesar Palu-Koro.....	II-7
Gambar 2.6	Peta Geologi Kabupaten Sigi.....	II-8
Gambar 2.7	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Sigi.....	II-9
Gambar 2.8	Peta Curah Hujan Kabupaten Sigi.....	II-11
Gambar 2.9	Tren Sektor Wisata Kabupaten Sigi	II-25
Gambar 2.10	Perbandingan Populasi Awal dan Akhir Ternak Tahun 2024 di Kabupaten Sigi	II-27
Gambar 2.11	Produksi perikanan Kabupaten Sigi	II-31
Gambar 2.12	Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Sigi Berdasarkan Administrasi Kecamatan.....	II-33
Gambar 2.13	Grafik Status Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sigi.....	II-35
Gambar 2.14	Diagram Presentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Sigi Berdasarkan Administrasi Kecamatan.....	II-36
Gambar 2.15	Status Penyedia Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Sigi.....	II-37
Gambar 2.16	Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Serat (Fiber) berdasarkan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sigi.....	II-38
Gambar 2.17	Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sigi.....	II-39
Gambar 2.18	Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Sigi.....	II-40
Gambar 2.19	Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Sigi.....	II-41
Gambar 2.20	Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Berdasarkan Administrasi Kabupaten Sigi.....	II-42
Gambar 2.21	Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Kebakaran hutan dan Lahan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Sigi.....	II-43
Gambar 2.22	Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Sigi.....	II-44
Gambar 2.23	Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Sigi.....	II-45
Gambar 2.24	Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Berdasarkan Administrasi Kabupaten Kota KabupatenSigi.....	II-46
Gambar 2.25	Jumlah Cadangan Pangan Labupaten Sigi	II-49
Gambar 2.26	Indeks Ketahanan Pangan dan Nexus Air-Energi-Pangan Kabupaten Sigi.....	II-50
Gambar 2.27	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Sigi	II-51
Gambar 2.28	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Kabupaten Sigi	II-51
Gambar 2.29	Listrik Terpakai/Terjual Kabupaten Sigi	II-52
Gambar 2.30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Sigi.....	II-54
Gambar 2.31	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Sigi.....	II-55

Gambar 2.32	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Sampah di Kabupaten Sigi	II-56
Gambar 2.33	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Sigi	II-56
Gambar 2.34	Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Sigi.....	II-60
Gambar 2.35	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Sigi	II-60
Gambar 2.36	Penduduk Kabupaten Sigi Berdasarkan Jenis Kelamin	II-63
Gambar 2.37	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Sigi	II-64
Gambar 2.38	Grafik Visual Komparatif Tren Demografi Kabupaten Sigi	II-64
Gambar 2.39	Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi	II-65
Gambar 2.40	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.....	II-67
Gambar 2.41	PDRB Per Kapita Kabupaten Sigi.....	II-68
Gambar 2.42	Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sigi.....	II-69
Gambar 2.43	Grafik Persentase Miskin Ekstrem di Kabupaten Sigi	II-70
Gambar 2.44	Grafik Distribusi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sigi	II-72
Gambar 2.45	Grafik Distribusi Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sigi	II-73
Gambar 2.46	Grafik Prevalensi Stunting di Kabupaten Sigi Berdasarkan SSGI-SKI	II-74
Gambar 2.47	Grafik Prevalensi Stunting di Kabupaten Sigi Berdasarkan e PPBGM.....	II-75
Gambar 2.48	Data Perkawinan Usia Anak Kabupaten Sigi	II-77
Gambar 2.49	Grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sigi	II-81
Gambar 2.50	Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sigi	II-81
Gambar 2.51	Grafik Tenaga Kerja yang Memiliki Jaminan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sigi.....	II-83
Gambar 2.52	Grafik Distribusi Tempat Ibadah berdasarkan Agama Kabupaten Sigi.....	II-85
Gambar 2.53	Grafik Partisipasi Gender dalam berbagai Sektor di Kabupaten Sigi.....	II-86
Gambar 2.54	Grafik Partisipasi dan Keterlibatan Kerja Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Sigi.....	II-88
Gambar 2.55	Grafik Kontribusi Sektro Berbasis Iptek Terhadap PDRB di Kabupaten Sigi.....	II-91
Gambar 2.56	Grafik Kontribusi Sektor Ekonomi Hiaju terhadap PDRB di Kabupaten Sigi	II-92
Gambar 2.57	Alokasi Kinerja Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Sigi.....	II-94
Gambar 2.58	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-101
Gambar 2.59	Grafik Indeks Pembangunan Manusia	II-102
Gambar 2.60	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	II-102
Gambar 2.61	Loop rehabilitasi lahan kritis dan agroforestri.....	II-140
Gambar 2.62	Loop Lingkungan.....	II-141
Gambar 2.63	Loop Ekonomi Sosial dan Budaya.....	II-145
Gambar 3.1	Logframe Tujuan 1 dan Sasaran Misi 1	III-8
Gambar 3.2	Logframe Tujuan 1 dan Sasaran Misi 2	III-10
Gambar 3.3	Logframe Tujuan 2 dan Sasaran Misi 2	III-11
Gambar 3.4	Logframe Tujuan 3 dan Sasaran Misi 2	III-11
Gambar 3.5	Logframe Tujuan 1 dan Sasaran Misi 3	III-13
Gambar 3.6	Logframe Tujuan 1 dan Sasaran Misi 4	III-14
Gambar 3.7	Logframe Tujuan 2 dan Sasaran Misi 4	III-15
Gambar 3.8	Logframe Tujuan 3 dan Sasaran Misi 4	III-16
Gambar 3.9	Logframe Tujuan 1 dan Sasaran (sasaran 1/6) Misi 5.....	III-18
Gambar 3.10	Logframe Tujuan 1 dan Sasaran (sasaran 7/11) Misi 5	III-18
Gambar 3.11	Arah Pembangunan Kewilayahan, Kawasan dan Lokasi Prioritas Kabupaten Sigi dalam RPJMN Tahun 2025-2029	III-158
Gambar 3.12	Arah Pembangunan Kewilayahan PASIGALA	III-161
Gambar 3.13	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sigi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	III-162
Gambar 3.14	Arah Pembangunan CLUSTER POTENSIAL Pertanian dalam RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	III-165
Gambar 3.15	Cross Cutting Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi ..	III-191

Gambar 3.16	Cross Cutting Program Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.....	III-195
Gambar 3.17	Cross Cutting Program Ketahanan Pangan	III-198
Gambar 3.18	Cross Cutting Program Pengembangan Pariwisata	III-201
Gambar 3.19	Cross Cutting Program Pengarusutamaan GEDSI.....	III-203
Gambar 3.20	Cross Cutting Kontribusi Kabupaten Sigi terhadap pencapaian Indeks Ekonomi Biru Indonesi (IBEI).....	III-208
Gambar 3.21	Cross Cutting Kontribusi Kabupaten Sigi terhadap Pencapaian Indeks Ekonomi Hijau.....	III-232

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sigi diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2025-2029. Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantikanya Bupati Kabupaten Sigi Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos.,M.Si dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Dr.Samuel Yansen Pongi, S.E.,M.Si pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sigi berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045. Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Kabupaten Sigi selama lima tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
- 1.3 Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kabupaten Sigi. RPJMD juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sigi, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sigi
Nantinya dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025- 2029 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Periode I (2025-2029) pada arah kebijakan Perkuatan Pondasi Transformasi Kabupaten Sigi. Oleh sebab itu, penyusunan dokumen RPJMD selain memuat kondisi umum daerah, pengelolaan keuangan daerah, masalah pembangunan dan isu-is strategis, visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, pagu indikatif, indikator kinerja daerah, dan pedoman transisi.
2. Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi dan RPJM Nasional 2025- 2029
Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sigi memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2025-2029 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat. Prioritas pembangunan nasional Periode 2025-2029 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Kabupaten Sigi adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
3. Dokumen RPJMD Sigi dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi juga memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025- 2029. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi pertimbangan utama.

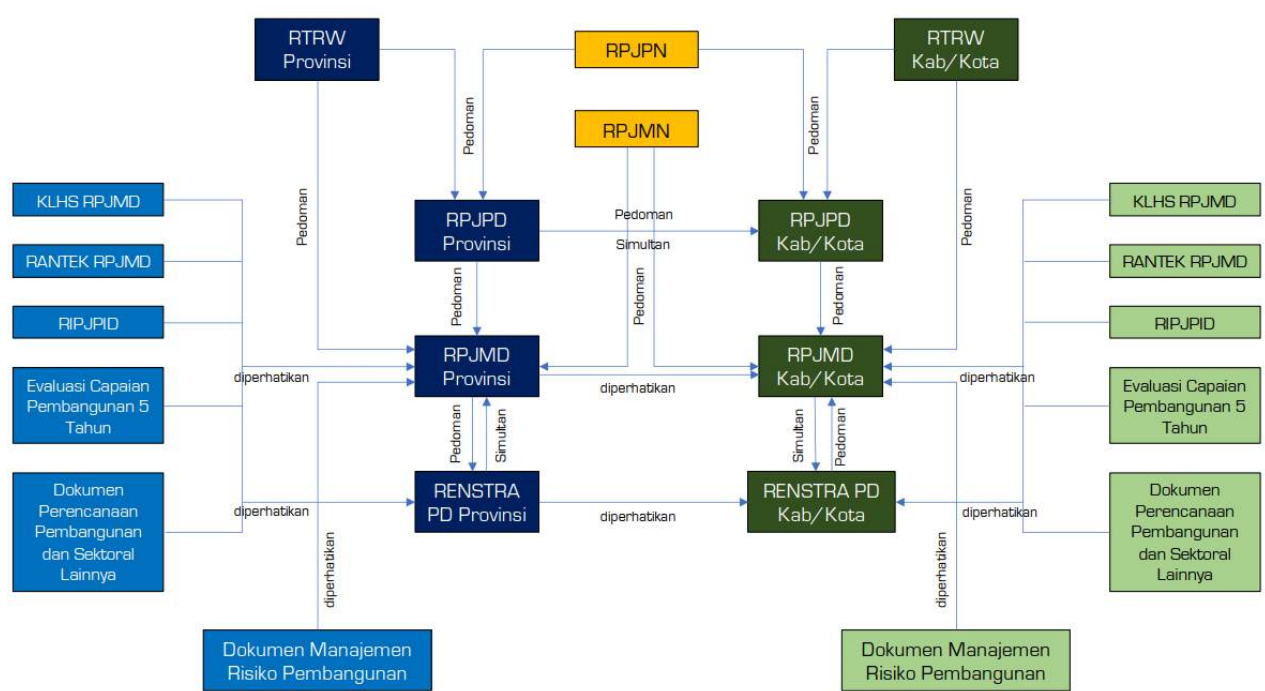
4. Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sigi. Selain itu, Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi juga memuat arah pembangunan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.
5. Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi dan Renstra PD
Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (Renja- PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.
6. Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Sigi
Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Sigi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran (KUA-PPAS); serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
7. Dokumen RPJMD, KLHS RPJMD dan RPKD Kabupaten Sigi
RPJMD Kabupaten Sigi akan akan mengakomodasi berbagai kebijakan dan rekomendasi arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sigi Tahun 2025- 2029.

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2021-2024, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, meliputi substansi isu strategis, dan arah kebijakan;
3. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

RPJMD Kabupaten Sigi yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambar I.1
Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Maksud
Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sigi yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029.
- b. Tujuan
Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:
 - 1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sigi;
 - 2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai tugas dan fungsi;
 - 3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi Kabupaten Sigi, mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah, sekaligus mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode RPJMD 2025–2029. Selain itu, bab ini juga menguraikan arah kebijakan serta proyeksi keuangan daerah guna memberikan gambaran kapasitas riil pendanaan pembangunan. Identifikasi permasalahan

daerah berdasarkan urusan pemerintahan, tantangan nasional dan global, serta isu kampanye kepala daerah terpilih juga dibahas sebagai dasar perumusan isu strategis yang akan diselesaikan melalui RPJMD, sehingga pembangunan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DERAH
Bab ini menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, serta program prioritas pembangunan daerah 2025–2029, disertai indikator kinerja dan target yang dirancang untuk menjawab isu strategis selama periode RPJMD. Selain itu, bab ini memuat strategi dan arah kebijakan guna memfokuskan program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta mengarahkan pengembangan wilayah secara terencana dan berkelanjutan.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Bab ini memuat kebijakan dan program perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029, yang menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Setiap program dilengkapi indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan penanggung jawab. Selain itu, ditetapkan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah, terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dievaluasi pada akhir masa jabatan.

BAB V PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang harapan RPJMD bagi pembangunan daerah lima tahun kedepan.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

□ Posisi Strategis Daerah

Secara astronomis Kabupaten Sigi terletak antara 0°51'24,02" - 2°03'20,24" Lintang Selatan dan 119°38'46,7" - 120°22'12,07" Bujur Timur. Secara geostrategik, Kabupaten Sigi memiliki wilayah seluas 521818,56 Ha atau sekitar 8,48 % dari total luas wilayah Sulawesi Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Donggala dan Kota Palu;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebelah Barat : Kabupaten Donggala, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso

Kabupaten Sigi merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008. Secara administratif, pemerintahan Kabupaten Sigi terdiri dari 16 kecamatan, 176 desa dan 1 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).

Adapun luas tiap kecamatan dan presentasenya terhadap luas Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sigi

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak dari ibukota Kab (Km)
Pipikoro	Peana	101.284,98	19,41	19	931	123
Kulawi Selatan	Lawua	41.171,48	7,89	12	425	96
Kulawi	Bolapapu	112.973,72	21,65	16	567	62
Lindu	Tomado	59.226,41	11,35	5	995	89
Nokilalaki	Kamarora A	7.409,82	1,42	5	651	35
Palolo	Makmur	61.157,14	11,72	21	585	25
Gumbasa	Pakuli	17.063,47	3,27	7	131	32
Dolo Selatan	Baluase	39.292,94	7,53	12	131	13
Dolo Barat	Kaleke	12.106,19	2,32	12	46	7
Tanambulava	Sibalaya Utara	5.635,64	1,08	5	76	17
Dolo	Kotapulu	2.661,27	0,51	9	32	7
Sigi Biromaru	Mpanau	21.446,74	4,11	10	65	14
Sigi Kota	Bora	14.558,74	2,79	11*	0	0
Marawola	Binagga	3.757,09	0,72	11	71	18
Marawola Barat	Dombu	14.350,01	2,75	12	1350	33
Kinovaro	Porame	7.722,91	1,48	10	201	20
		521.818,56	100	177		

Catatan : *1 desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)
Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041; Publikasi BPS, 2025 (data diolah)

Dari data tersebut terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kulawi (21,65%) dan Pipikoro (19,41%). Bersama Palolo (11,72%), Lindu (11,35%), dan Kulawi Selatan (7,89%) kelimanya mencakup lebih dari tiga perempat dari total luas wilayah Kabupaten Sigi yang juga merupakan daerah dengan topografi pegunungan. Wilayah dengan luas kecil umumnya berada di bagian tengah dan utara, berdekatan dengan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi utama, seperti Sigi Biromaru, Dolo, dan Sigi Kota.

Gambar 2.1
Grafik Persentase Luas wilayah per Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Sigi



Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041; Publikasi BPS, 2025 (data diolah)

Berdasarkan aspek geografis dan topografis, Kecamatan seperti Kulawi, Pipikoro, Palolo, Lindu dan Kulawi Selatan memiliki luas yang besar karena berada di kawasan pegunungan dan hutan lindung. Hal ini membuat pemekaran wilayah tidak banyak dilakukan karena keterbatasan akses dan konsentrasi penduduk yang rendah. Sebaliknya, wilayah seperti Dolo dan Sigi Kota memiliki luas kecil karena merupakan kawasan yang relatif datar dan dekat dengan pusat administrasi, sehingga kepadatan penduduk lebih tinggi dan wilayahnya lebih terkonsentrasi secara spasial.

Berdasarkan aspek ekonomi, Kecamatan Kulawi dan Pipikoro merupakan dua wilayah terluas dengan potensi besar di sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata alam namun menghadapi tantangan besar dalam konektivitas dan akses pasar akibat jarak dan kondisi geografis yang sulit. Kecamatan Palolo, Lindu, dan Kulawi Selatan juga memiliki potensi besar dalam komoditas unggulan seperti kakao, kopi, dan hortikultura. Sementara itu, kecamatan seperti Dolo dan Sigi Kota yang memiliki luas wilayah terkecil merupakan wilayah strategis dalam pengembangan ekonomi jasa karena kedekatannya dengan pusat pemerintahan.

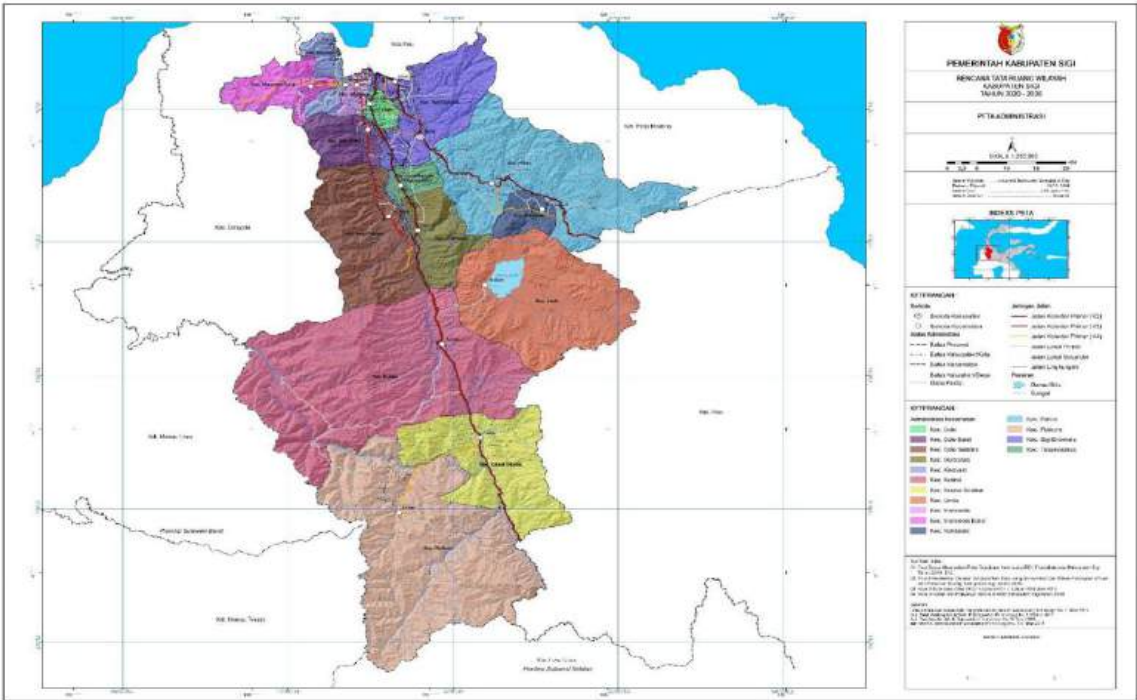
Berdasarkan aspek sosial, jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Palolo (21 desa) dan Kecamatan Pipikoro (19 desa), mengindikasikan pemerataan penduduk di wilayah-wilayah tersebut. Namun, kondisi geografis membuat penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi tantangan tersendiri. Kecamatan seperti Sigi Biromaru, Dolo, dan Sigi Kota memiliki kemudahan akses dan kedekatan terhadap pusat layanan publik, yang menjadikan wilayah tersebut merupakan wilayah dengan akses sosial yang lebih baik. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar menjadi hal yang perlu diperhatikan dan harus diatasi melalui pendekatan berbasis kebutuhan lokal.

Berdasarkan aspek lingkungan, kecamatan dengan elevasi tinggi seperti Marawola Barat (1.350 mdpl), Lindu (995 mdpl), dan Pipikoro (931 mdpl) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, terutama sebagai daerah tangkapan air dan kawasan konservasi. Wilayah ini juga menyimpan potensi ekowisata dan pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, wilayah ini rentan terhadap deforestasi dan alih fungsi lahan jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan pengelolaan lingkungan

berbasis masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di wilayah hulu.

Berdasarkan aspek kelembagaan, sebaran desa yang tinggi, seperti di Kecamatan Palolo dan Kecamatan Pipikoro, memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat kecamatan dan desa. Kecamatan yang berada jauh dari pusat kabupaten, seperti Pipikoro (123 km) dan Kulawi Selatan (96 km), membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan layanan pemerintahan dan pendampingan pembangunan desa. Penguatan sistem administrasi digital, pengembangan SDM lokal, dan tata kelola berbasis data menjadi kunci keberhasilan pembangunan kelembagaan yang inklusif dan adaptif di wilayah-wilayah tersebut.

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Sigi



Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041

1. Topografi
Secara karakteristik fisik wilayah, Kabupaten Sigi berada di wilayah pegunungan dan Lembah yang memiliki tantangan spasial yang kompleks dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan topografi wilayah kecamatan, dari total 16 kecamatan, Sebagian besar wilayah berada di lereng atau puncak bukit (121 desa), dibandingkan dengan dataran rendah (56 desa). Kecamatan seperti Kulawi, Pipikoro, Marawola Barat, dan Kulawi Selatan memiliki dominasi wilayah lereng/puncak, sedangkan Dolo, Sigi Biromaru, dan Marawola memiliki proporsi dataran yang lebih besar seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Topografi Kabupaten Sigi

No	Kecamatan	Topografi Wilayah		
		Lembah	Lereng/ Puncak	Dataran
1	Pipikoro	-	19	0
2	Kulawi Selatan	-	10	2
3	Kulawi	-	16	0
4	Lindu	-	1	4
5	Nokilalaki	-	5	0
6	Palolo	-	10	11
7	Gumbasa	-	6	1
8	Dolo Selatan	-	9	3
9	Dolo Barat	-	8	4
10	Tanambulava	-	4	1
11	Dolo	-	0	9
12	Sigi Biromaru	-	3	7
13	Sigi Kota	-	5	6
14	Marawola	-	3	8
15	Marawola Barat	-	12	0
16	Kinovaro	-	10	0
			121	56

Sumber : Publikasi BPS 2025

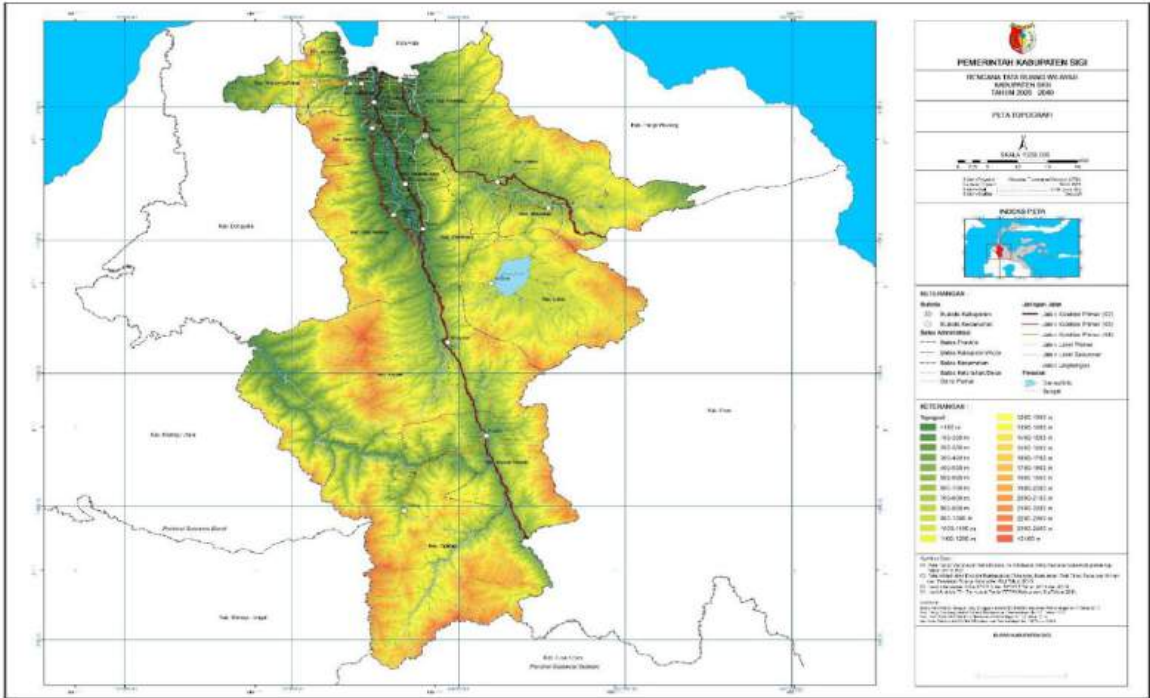
Berdasarkan kelas ketinggian, sebaran wilayah berdasarkan ketinggian menunjukkan bahwa hanya 19,06% wilayah berada di bawah 500 meter dpl, sedangkan lebih dari 80% wilayah berada di ketinggian 600–2000 meter dpl. Wilayah ketinggian tertinggi (>2000 m) mencakup 103,05 km² atau 1,97% dari total wilayah, yang umumnya berada di pegunungan seperti pegunungan Nokilalaki dan Kulawi-Pipikoro.

Tabel 2.3
Kelas Ketinggian Kabupaten Sigi

Kelas Ketinggian	Luas (Ha)	%
<500 m	99.433,74	19,06
600-700 m	31.094,01	5,96
700-800 m	30.943,78	5,93
800-900 m	32.535,97	6,24
900-1000 m	43.028,28	8,25
1000-1100 m	46.449,50	8,9
1100-1200 m	38.776,06	7,43
1200-1300 m	36.438,77	6,98
1300-1400 m	33.525,98	6,42
1400-1500 m	30.935,43	5,93
1500-1600 m	27.189,10	5,21
1600-1700 m	22.875,45	4,38
1700-1800 m	17.522,43	3,36
1800-1900 m	12.500,93	2,4
1900-2000 m	8.262,78	1,58
>2000 m	10305,46	1,98
	521.818,56	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041

Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Sigi



Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041

Berdasarkan kelas lereng, sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi memiliki kemiringan dengan klasifikasi landai 5–15% (52,23%) dan relatif landai 2–5% (31%). Wilayah sangat landai (0–2%) hanya mencakup 16,62%. Lereng cukup curam dan curam (>15%) sangat kecil (hanya 0,16%) namun dapat menjadi area rawan longsor jika dimanfaatkan tanpa konservasi seperti yang terlihat pada tabel dan gambar berikut.

Gambar 2.4
Kelas Lereng Kabupaten Sigi



Kelas Lereng	Klasifikasi	%
0-2 %	Sangat Landai	16,62
2-5 %	Relatif Landai	31,00
5-15 %	Landai	52,23
15-40 %	Cukup Curam	0,16
>40%	Curam	0,001

Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041

Berdasarkan topografi wilayah maka secara aspek ekonomi, wilayah datar dan rendah yang terbatas menyebabkan konsentrasi kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa terpusat di daerah seperti Dolo, Sigi Biromaru, dan Sigi Kota. Sebaliknya, wilayah lereng dan tinggi seperti Kulawi dan Pipikoro, memiliki keterbatasan akses pasar, infrastruktur jalan, dan keterjangkauan teknologi, menyebabkan rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat, meskipun memiliki potensi besar di bidang pertanian lahan kering dan kehutanan.

Secara aspek sosial, kondisi geografi menyebabkan kesenjangan layanan dasar antarwilayah. Desa-desa di lereng tinggi mengalami kesulitan akses pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Hal ini juga berdampak pada tingkat partisipasi sekolah, mobilitas sosial, dan kualitas hidup yang relatif lebih rendah.

Secara aspek lingkungan, tingginya persentase wilayah dengan lereng curam dan elevasi tinggi membuat Kabupaten Sigi sangat rentan terhadap bencana alam seperti longsor, banjir bandang, dan degradasi tanah. Penggunaan lahan di lereng tanpa teknik konservasi dapat mempercepat kerusakan lingkungan dan sedimentasi sungai.

Secara aspek kelembagaan, keterbatasan kelembagaan dalam pengawasan penggunaan lahan dan konservasi kawasan rawan menyebabkan degradasi wilayah hulu masih terjadi. Pendekatan pembangunan masih berpusat pada wilayah dataran, sehingga wilayah berbasis pegunungan perlu mendapat perhatian proporsional dalam perencanaan pembangunan.

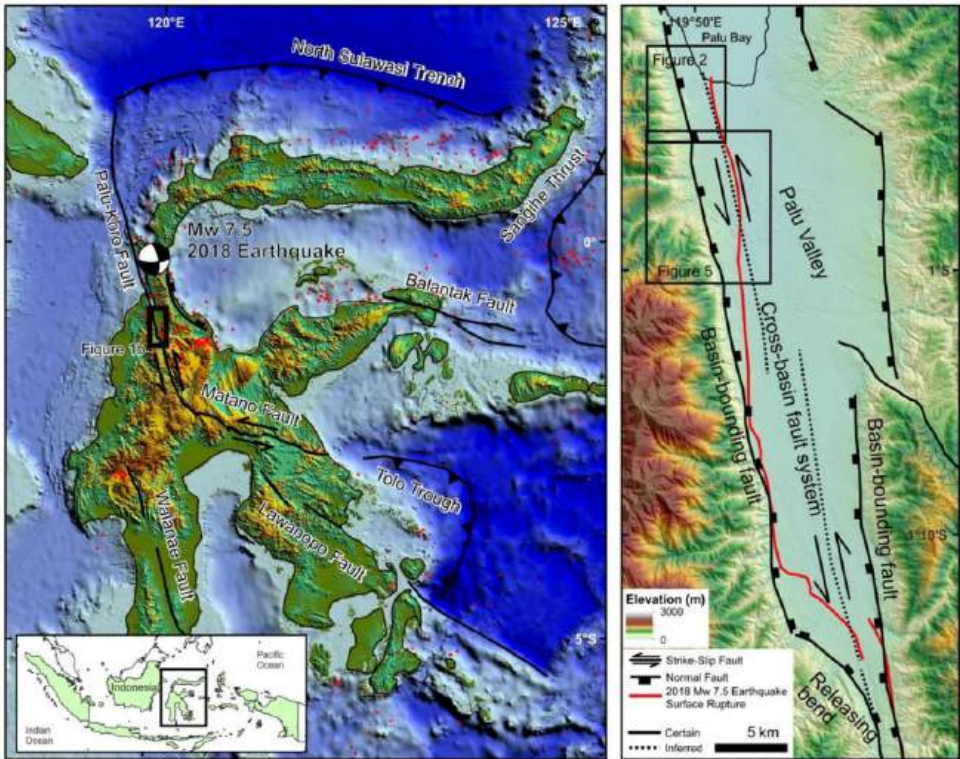
2. Geologi

Kabupaten Sigi secara geologis berada di kawasan rawan bencana karena dilintasi oleh salah satu struktur tektonik aktif utama di Sulawesi, yaitu Sesar Palu-Koro. Keberadaan sesar ini menjadikan wilayah Sigi memiliki kerentanan tinggi terhadap gempa bumi tektonik, deformasi permukaan, serta potensi bencana ikutan seperti longsor dan likuefaksi. Sesar Palu-Koro merupakan sesar mendatar (*strike-slip fault*) dengan arah pergeseran timur laut–barat daya, yang memanjang hingga ke Teluk Palu (Sulawesi Tengah), dan melewati langsung wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Panjang total sesar ini sekitar 500 km dan memiliki laju pergeseran sekitar 30–40 mm per tahun. Sesar ini tergolong aktif dan berpotensi memicu gempa besar dengan $\geq 7,0$ Mw (Magnitudo Momen) yang terbagi menjadi 5 segmen, yaitu Segmen Palu, Segmen Gumbasa, Segmen Saluki, Segmen Moa dan Segmen Graben Meloi.

Wilayah Kabupaten Sigi, berada di jalur langsung atau dekat zona patahan. Hal ini menyebabkan wilayah ini sering mengalami gempa bumi dangkal dengan intensitas sedang hingga kuat. Gempa bumi besar yang terjadi pada 28 September 2018, yang memicu likuefaksi di Lolu, Biromaru, Jono Oge, Sidondo dan Sibalaya, merupakan bukti nyata dampak langsung aktivitas Sesar Palu-Koro terhadap wilayah Sigi. Zona bahaya sesar mencakup wilayah berdasarkan definisi kriterianya untuk Zona Merah (Zona Terlarang) yaitu zona likuefaksi masih pasca gempa, Zona sempadan pantai rawan tsunami, zona sempadan patahan aktif Palu-Koro 0-10m dan zona rawan gerakan tanah tinggi. Zona Kuning Tua (Zona Terbatas) didefinisikan untuk zona sempadan aktif Palu-Koro (10-50m), zona rawan likuefaksi sangat tinggi, zona rawan tsunami tinggi diluar sempadan pantai, dan zona gerakan tanah tinggi. Zona Kuning (bersyarat) meliputi zona rawan likuefaksi tinggi, zona rawan tsunami menengah, zona rawan gerakan tanah menengah, zona rawan banjir tinggi

Aktivitas sesar telah menyebabkan gangguan besar pada aktivitas sosial-ekonomi, termasuk rusaknya jaringan jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, dan saluran irigasi. Banyak wilayah di Kabupaten Sigi masih berada di jalur rawan patahan, sehingga menjadi tantangan serius dalam penataan ruang, pembangunan permukiman, dan investasi infrastruktur. Biaya pemulihan dan rehabilitasi akibat bencana geologi sangat tinggi dan menjadi beban fiskal daerah dalam jangka panjang. Keberadaan Sesar Palu-Koro memerlukan pembatasan pemanfaatan ruang di zona sesar aktif, sesuai arahan kebijakan mitigasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Zona bahaya sesar mencakup wilayah dengan radius 50–500 meter dari jalur patahan utama, yang seharusnya dijadikan zona non-permanen atau kawasan terbuka hijau.

Gambar 2.5
Peta Sesar Palu-Koro



Sumber : 1. Compiled from Hamilton 1979; Hall and Wilson 2000; Hinschberger et al. 2005; Hall 2012. 2. Bellier et al. 2001; Watkinson and Hall 2017; Socquet et al. 2019 dalam Patria and Putra, 2020

Selain itu, kabupaten Sigi memiliki keragaman geologi yang kompleks, yang memengaruhi arah pembangunan, konservasi lingkungan, serta tata ruang kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi. Batuan Terobosan (48,57%) mendominasi wilayah Sigi, mencerminkan sejarah aktivitas intrusi magmatik di masa lalu. Formasi Latu Mojong (23,93%) dan Molasa Celebes Sarasin (5,16%) menunjukkan penyebaran sedimen tua berumur tersier. Formasi alluvial (2,80%) dan endapan danau (4,77%) memiliki potensi tinggi untuk pertanian intensif dan konservasi sumber daya air. Kehadiran Kompleks Metamorfosis, Gumbasa, dan Wana mencerminkan proses geodinamika yang kompleks dan kaya akan potensi geowisata serta keragaman mineral. Adapun komposisi formasi geologi sebagai berikut.

Tabel 2.4
Formasi Geologi Kabupaten Sigi

Formasi Geologi	Luas (Ha)	%
Alluvium	14.621,88	2,80
Batuan Gunung Api Talaya	14.528,88	2,78
Batuan Terobosan	253.447,38	48,57
Danau	3.455,78	0,66
Endapan Danau	24.876,48	4,77
Formasi Lariang	5.035,58	0,96
Formasi Latu Mojong	124.856,78	23,93
Formasi Molasa Celebes Sarasin	26.904,88	5,16
Kompleks Batuan Metamorfosis	12.797,38	2,45
Kompleks Gumbasa	16.052,58	3,08
Kompleks Wana	25.240,96	4,84
	521818,56	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041

3. Hidrologi

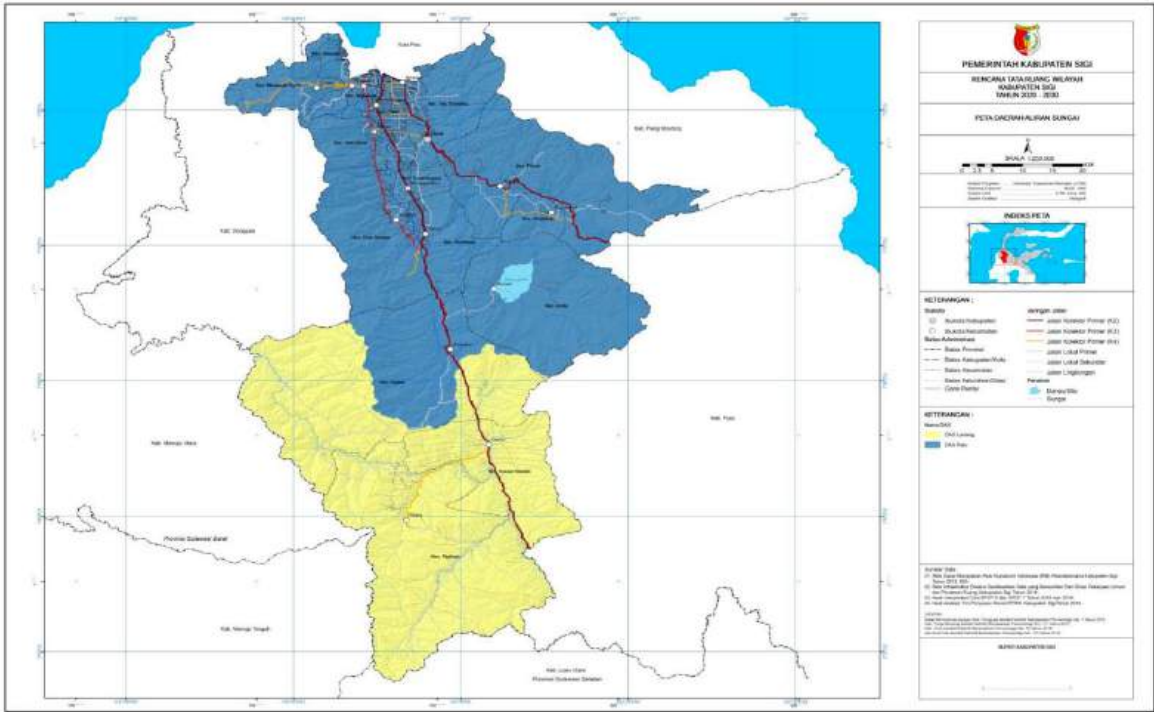
Kabupaten Sigi secara geografis terbagi ke dalam dua DAS utama, yakni DAS Palu dan DAS Lariang, yang bersama-sama membentuk kerangka hidrologis utama wilayah kabupaten. Keberadaan sungai yang ada di Kabupaten Sigi sebagian besar adalah anak-anak sungai dari DAS Palu dan DAS Lariang. Berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Palu-Lariang, Das Palu merupakan DAS prioritas pengembangan daerah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pusat perekonomian, sedangkan DAS Lariang sebagai prioritas Pengendalian daya rusak dan potensi PLTA.

Tabel 2.5
Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Sigi

Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)
DAS Palu	307.555,44
DAS Lariang	214.263,12

Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Sigi



Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041

DAS Palu mencakup mayoritas wilayah Kabupaten Sigi, terutama wilayah tengah hingga timur laut, termasuk kecamatan Sigi Biromaru, Dolo, Gumbasa, dan Palolo. DAS Lariang mencakup bagian barat dan selatan Kabupaten Sigi, seperti kecamatan Kulawi, Pipikoro, dan sebagian wilayah Lindu.

Secara aspek lingkungan, DAS Palu merupakan DAS strategis yang bermuara di Teluk Palu dan memiliki hubungan langsung dengan kawasan perkotaan Palu-Sigi. Aliran utama Sungai Gumbasa, Sungai Palu, dan beberapa anak sungai lainnya berfungsi sebagai sumber air permukaan, irigasi pertanian, dan kebutuhan domestik. DAS Lariang lebih luas secara topografi dan cenderung berhutan, dengan potensi besar sebagai kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem hulu. DAS ini memiliki aliran sungai yang bermuara ke wilayah Sulawesi Barat dan memiliki arti penting dalam pengendalian banjir lintas kabupaten. Kerusakan hutan di wilayah hulu (terutama di bagian DAS Lariang dan

Hulu Palu) berisiko meningkatkan banjir bandang, erosi, dan sedimentasi yang berdampak pada pertanian dan infrastruktur.

Secara aspek sosial, masyarakat di sekitar DAS Lariang, terutama di wilayah terpencil seperti Kulawi dan Pipikoro, sangat bergantung pada sungai sebagai sumber air bersih, transportasi lokal, dan irigasi sederhana. Sementara itu, wilayah DAS Palu yang lebih berkembang secara infrastruktur menghadapi tantangan polusi air, alih fungsi lahan, dan konflik tata ruang akibat urbanisasi.

Secara aspek ekonomi, DAS Palu menopang pertanian irigasi teknis dan menjadi tulang punggung ekonomi pangan Sigi bagian utara. Sistem irigasi Gumbasa yang berada di DAS Palu sangat strategis untuk sawah produktif. DAS Lariang berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi berbasis ekosistem (ekowisata, hasil hutan bukan kayu), namun terbatas karena aksesibilitas rendah dan belum optimalnya tata kelola hulu DAS.

Secara aspek kelembagaan, pengelolaan DAS masih terfragmentasi secara kelembagaan. DAS Palu yang strategis lintas kabupaten membutuhkan sinergi antara Pemkab Sigi dan Pemkot Palu serta pemerintah provinsi untuk mencegah degradasi lebih lanjut. DAS Lariang memerlukan perhatian lebih dalam mengenai penegakan aturan konservasi, pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, serta integrasi kebijakan lintas batas wilayah administrasi.

4. Klimatologi

Kabupaten Sigi memiliki iklim tropis dengan karakteristik yang bervariasi antar wilayah, dipengaruhi oleh topografi pegunungan dan daratan sekitarnya. Kabupaten Sigi cenderung memiliki suhu udara hangat hingga panas, dengan suhu maksimum rata-rata mencapai 28°C, dan suhu terendah berkisar antara 27°C. Tingkat kelembaban udara cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 89,25% pada tahun 2024.

Kabupaten Sigi juga mengalami curah hujan tahunan yang fluktuatif, berkisar antara 48 mm hingga 83 mm per bulan. Rata-rata curah hujan ini menunjukkan potensi ketersediaan air yang cukup, namun distribusinya tidak merata, terutama pada periode musim kemarau dan transisi. Penyinaran matahari mengalami variasi cukup ekstrem, mulai dari hanya 18,33 jam hingga 69,08 jam per bulan, yang memengaruhi pola pertumbuhan tanaman dan aktivitas pertanian masyarakat.

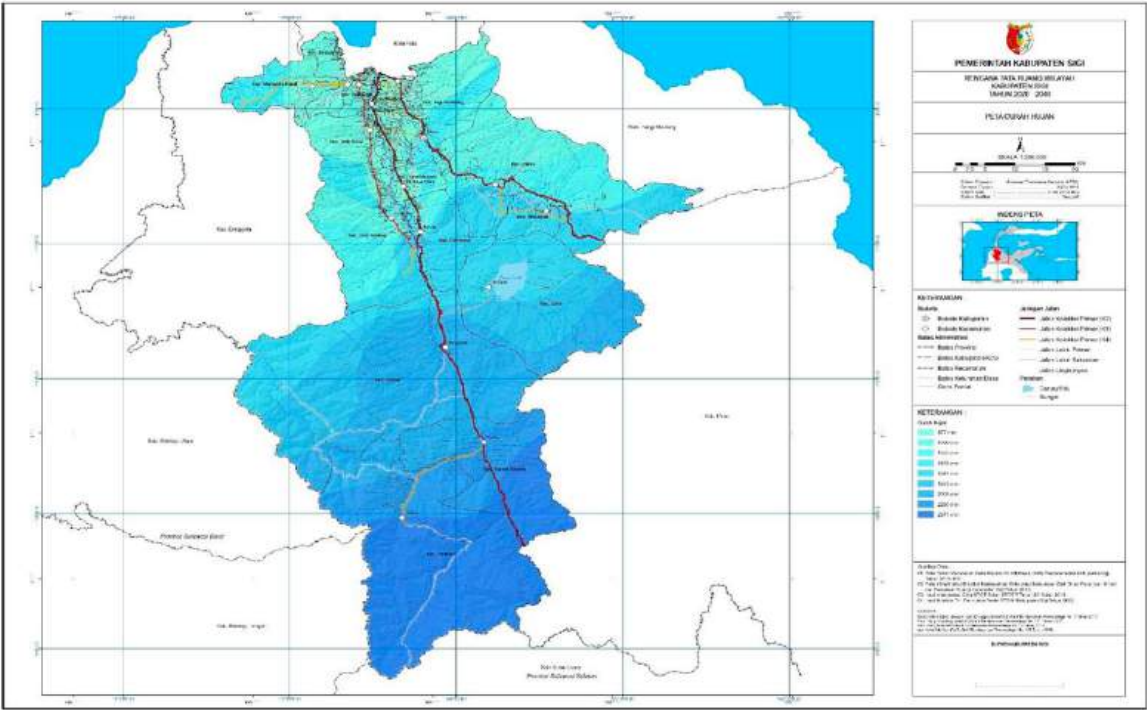
Kecepatan angin juga menunjukkan tren peningkatan, mencapai 5,50 knot pada tahun 2024, yang dapat memengaruhi kenyamanan iklim mikro serta potensi bahaya kebakaran lahan pada musim kering. Fluktuasi iklim ini, khususnya kombinasi antara curah hujan yang tidak menentu, suhu tinggi, dan penyinaran rendah, perlu mendapat perhatian serius, terutama di wilayah lereng dan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), karena dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir bandang, longsor, maupun kekeringan lokal. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Iklim Kabupaten Sigi

Parameter Iklim (Rata-rata Per Tahun)	2020	2021	2022	2023	2024
Suhu Udara (°C)	28,03	27,47	27,42	28,35	28,32
Tekanan Udara (mbar)	1010,33	1010,93	1010,51	1011,28	1013,19
Kelembaban Udara (%)	88,14	78,92	77,92	74,00	89,25
Penyinaran Matahari (jam)	69,08	21,17	60,00	67,25	18,33
Curah Hujan (mm)	53,79	83,03	72,61	48,85	70,79
Kecepatan Angin (knot)	3,58	3,92	3,92	4,07	5,50

Sumber : Publikasi BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.8
Peta Curah Hujan Kabupaten Sigi



Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041

Secara aspek lingkungan, kenaikan suhu ekstrem di 2024 dapat dihubungkan dengan fenomena El Niño kuat atau perubahan penutup lahan yang signifikan (deforestasi, urbanisasi). Penurunan kelembaban dan curah hujan tahun 2023 berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih di wilayah rentan. Fluktuasi penyinaran matahari dan kelembaban mengindikasikan anomali iklim yang berdampak langsung pada kestabilan mikroklimat dan produktivitas pertanian.

Secara aspek sosial, masyarakat rentan (petani, nelayan, warga desa pegunungan) terpapar langsung terhadap dampak cuaca ekstrem, seperti gagal panen akibat kemarau panjang atau perubahan pola tanam. Krisis iklim berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama kelompok usia rentan, dengan meningkatnya risiko infeksi, penyakit kulit, dan ISPA selama suhu tinggi.

Secara aspek ekonomi, fluktuasi curah hujan dan suhu memengaruhi produktivitas komoditas pertanian utama Sigi seperti padi, kopi, kakao, dan hortikultura. Penyinaran matahari dan kelembaban yang tidak stabil juga berdampak pada produksi tanaman hortikultura, perikanan darat, dan pengeringan hasil panen. Kenaikan kecepatan angin dapat mempercepat penyebaran kebakaran hutan dan mengganggu transportasi

udara ringan serta operasional pertanian. Secara aspek kelembagaan, belum optimalnya sistem peringatan dini dan pemantauan iklim lokal menyebabkan keterlambatan dalam antisipasi dampak cuaca ekstrem. Kurangnya integrasi data iklim dalam dokumen perencanaan menyebabkan respons kebijakan cenderung reaktif, bukan preventif.

□ **Peran Strategis Daerah**

Berdasarkan posisi astronomis dan geostrategik, Kabupaten Sigi merupakan daerah strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan regional. Kabupaten Sigi juga dapat berperan sebagai jantung ekologi, penyangga pangan, dan kawasan penyeimbang urbanisasi ibukota provinsi serta konektivitas provinsi Sulawesi Tengah. Kontribusi Kabupaten Sigi berupa:

1. Kontribusi Ekonomi

- Pertanian dan Perkebunan
Sigi dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Tengah, terutama dalam komoditas padi, jagung, kakao, kopi, dan kelapa. Durian juga menjadi salah satu komoditas unggulan Sigi. Kecamatan seperti Kulawi dan Lindu menjadi pusat produksi kopi robusta dan arabika, sementara daerah dataran rendah seperti Dolo dan Marawola produktif untuk padi dan hortikultura.
- Peternakan dan Perikanan Darat
Kontribusi dari sektor peternakan (sapi, kambing, ayam) dan perikanan darat, terutama di wilayah dengan danau dan sungai seperti Danau Lindu, turut mendukung ketahanan pangan regional.
- Pasokan ke ibukota Provinsi Sulawesi Tengah
Sigi berperan penting sebagai daerah penyangga bagi ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam penyediaan bahan pangan segar, air bersih, dan tenaga kerja.

2. Kontribusi Infrastruktur dan Konektivitas

- Transportasi dan Aksesibilitas:
Jalur darat (Jalur trans Sulawesi) yang menghubungkan Palu dengan Sulawesi Selatan melewati Sigi dan Poso, menjadikannya jalur penting untuk logistik dan mobilitas orang/barang.
- Pengembangan Infrastruktur Pascagempa (2018)
Banyak proyek infrastruktur dilakukan di Sigi sebagai bagian dari pemulihan, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap), jembatan, irigasi, dan jalan, yang juga memperkuat konektivitas antarwilayah.

3. Konservasi dan Lingkungan Hidup

- Taman Nasional Lore Lindu (TNLL):
Sebagian besar kawasan TNLL berada di Sigi. Wilayah ini menjadi penyangga ekosistem penting yang mendukung keanekaragaman hayati Sulawesi, seperti Anoa, Babirusa, dan burung endemik.
- Sumber Air:
Pegunungan dan hutan Sigi merupakan hulu dari beberapa sungai besar yang mengalir ke Palu dan sekitarnya, berfungsi sebagai penyedia air bersih dan pengendali banjir.
- Pengelolaan Risiko Bencana:
Setelah bencana gempa dan likuefaksi 2018, Sigi menjadi contoh daerah dengan fokus baru pada mitigasi bencana, deforestasi, dan pembangunan tangguh bencana.

4. Sosial Budaya dan Pariwisata

- Budaya Adat Kulawi dan Lindu:
Sigi memiliki warisan budaya masyarakat adat yang unik dan masih terjaga, termasuk rumah adat, tarian, dan hukum adat.
- Wisata Alam dan Budaya:
Dengan keindahan alam seperti Danau Lindu, Gunung Nokilalaki, air terjun, dan keanekaragaman flora-fauna, Sigi menyimpan potensi besar dalam pengembangan ekowisata.

5. Kontribusi terhadap Stabilitas Regional
- Daerah Penyangga Urbanisasi Palu:
Sigi menjadi tempat berkembangnya perumahan dan kawasan agropolitan yang menopang pertumbuhan Kota Palu secara tidak langsung.
 - Distribusi Kependudukan:
Migrasi pascabencana dari Palu dan Donggala ke wilayah Sigi turut mendorong pertumbuhan dan perubahan pola permukiman serta ekonomi lokal.



Pola ruang wilayah Kabupaten Sigi disusun dengan mengacu pada prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan efisiensi pemanfaatan ruang, yang terbagi ke dalam dua struktur utama: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pembagian ini mencerminkan orientasi kebijakan tata ruang yang seimbang antara perlindungan fungsi ekologis dan pengembangan ekonomi wilayah.

1. Kawasan Lindung
- Kawasan lindung merupakan bagian wilayah yang ditetapkan untuk melindungi fungsi lingkungan hidup guna mendukung kelangsungan

kehidupan. Total luas kawasan lindung yang telah teridentifikasi mencapai 270.055,42 ha atau sekitar 51,74 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sigi. Komponen utama dari kawasan lindung meliputi:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung) seluas 139.658,57 ha, yang berfungsi menjaga keseimbangan tata air dan mencegah erosi serta bencana alam.
- Kawasan konservasi seluas 117.333,33 ha, yang berperan dalam pelestarian keanekaragaman hayati.
- Kawasan perlindungan setempat seluas 6.531,76 ha, termasuk sempadan sungai sebesar 6.420,87 ha dan kawasan sekitar danau atau waduk sebesar 110,89 ha, yang berfungsi sebagai zona penyangga kawasan ekosistem perairan.

Beberapa elemen penting dalam pengelolaan risiko bencana seperti kawasan rawan likuifaksi, gerakan tanah, banjir, serta sempadan sesar aktif belum tercatat secara kuantitatif dalam data luasan RTRW.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya mencerminkan wilayah yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Luas kawasan budidaya yang teridentifikasi mencapai 251.763,14 ha, atau sekitar 48,26 persen dari total wilayah Kabupaten Sigi.

Kawasan budidaya terdiri dari:

- Kawasan hutan produksi seluas 128.214,14 ha, yang terbagi atas hutan produksi terbatas (116.467,62 ha), hutan produksi yang dapat dikonversi (8.865,32 ha), serta kawasan hutan produksi tetap yang sebagian dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan.
- Kawasan pertanian seluas 115.018,67 ha, yang terdiri atas kawasan tanaman pangan (29.253,26 ha), hortikultura (919,64 ha), dan perkebunan (84.845,77 ha). Luas kawasan pertanian ini menegaskan sektor agrikultur sebagai salah satu basis utama ekonomi daerah.
- Kawasan perikanan seluas 3.474,29 ha, meskipun data perikanan tangkap belum tersedia secara spesifik.
- Kawasan industri tercatat seluas 252,06 ha, sedangkan kawasan sentra industri kecil dan menengah belum tercatat dalam data luasan.
- Kawasan pariwisata masih sangat terbatas, yakni sebesar 45,27 ha, yang menunjukkan perlunya strategi pengembangan potensi pariwisata lokal.
- Kawasan permukiman mencakup 11.290,48 ha, terdiri dari kawasan permukiman perkotaan sebesar 7.123,27 ha dan kawasan permukiman perdesaan sebesar 4.167,21 ha.

Beberapa kawasan strategis lainnya seperti kawasan pertambangan dan energi, serta kawasan industri kecil dan menengah belum tersedia data luasan secara rinci dalam RTRW.

Tabel 2.7
Pola Ruang Kabupaten Sigi

POLA RUANG	PERUNTUKAN	LUAS
Kawasan lindung	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya / kawasan hutan lindung	139658,5715
	Kawasan konservasi	117333,3254
	Kawasan perlindungan setempat	6531,757573
	kawasan sekitar danau atau waduk	110,88559
	sempadan sungai	6420,871984
	Kawasan rawan bencana	N/A
	rawan bencana likuifaksi tinggi	N/A
	rawan bencana gerakan tanah tinggi	N/A
	rawan bencana banjir	N/A
	sempadan sesar aktif	N/A
Kawasan budidaya	Kawasan hutan produksi	128214,1382
	kawasan hutan produksi tetap / kawasan perkebunan	2881,189689
	kawasan hutan produksi terbatas perkebunan dan permukiman perdesaan	116467,6243
	kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	8865,324139
	Kawasan pertanian	115018,6686
	kawasan tanaman pangan	29253,26321
	kawasan hortikultura	919,63754
	kawasan perkebunan	84845,76786
	Kawasan perikanan	3474,29201
	kawasan perikanan tangkap	3474,29201
	Kawasan pertambangan dan energi	N/A
	kawasan pertambangan mineral logam	N/A
	Kawasan industri	252,059051
	kawasan sentra industri kecil dan menengah	252,059051
	Kawasan pariwisata	45,270505
	Kawasan permukiman	11290,48178
	kawasan permukiman perkotaan	7123,267928
	kawasan permukiman perdesaan	4167,213852
	Total	521818,5646

Sumber : RTRW Kabupaten Sigi 2021-2041

B. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam (SDA) Kabupaten Sigi yang menjadi keunggulan komparatif dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Potensi sumber daya alam Kabupaten Sigi sangat kaya dan berkarakter ekologis kuat, menjadikannya keunggulan komparatif yang layak dikembangkan sebagai potensi ekonomi hijau dengan pendekatan berbasis komunitas, berorientasi lingkungan, dan berkeadilan sosial. Kabupaten Sigi dapat menjadi model daerah tangkas bencana dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Berikut adalah uraian potensi sumber daya alam Kabupaten Sigi beserta relevansinya terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.8
Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Sigi

Keunggulan	Potensi	Prinsip Berkelanjutan
1. Pertanian dan Perkebunan		
Tanah subur di dataran tinggi dan rendah, cocok untuk berbagai tanaman pangan dan hortikultura.	Padi, kakao, kopi, kelapa, durian, hortikultura (cabai, tomat, jeruk, pisang), dan tanaman pangan organik.	Agroforestri, irigasi hemat, pupuk organik, koperasi tani, pasar lokal, sertifikasi organik, dan indikasi geografis.
2. Kehutanan dan Ekosistem Alam		
Hutan tropis di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dan sekitarnya, kaya biodiversitas, dan penyedia jasa lingkungan.	HHBK: rotan, damar, madu, tanaman obat. Biodiversitas: anoa, babirusa, tarsius, burung endemik. Jasa lingkungan: karbon dan air.	PHBM, ekowisata edukatif, konservasi spesies, tata kelola hutan adat, dan skema PES (<i>Payment for Ecosystem Services</i>).
3. Sumber Daya Air		
Hulu sungai utama (Gumbasa, Palu) dan Danau Lindu sebagai pengatur iklim mikro, sumber air, dan potensi wisata air.	Sungai Gumbasa, Palu, Danau Lindu. Potensi PLTMH, irigasi teknis, ekowisata berbasis air, dan konservasi DAS.	Perlindungan tangkapan air, irigasi partisipatif, konservasi DAS, reboisasi, dan pemanfaatan wisata alam.
4. Energi Baru dan Terbarukan		
Potensi energi hidro, panas bumi (geothermal), dan surya di kawasan pegunungan dan desa terpencil.	Energi hidro (PLTM/PLTA), panas bumi (Bora, Lindu, Kulawi), energi surya untuk sekolah, Puskesmas, dan irigasi.	Energi rendah emisi, transisi energi bersih, elektrifikasi desa, dan pengurangan emisi karbon.
5. Perikanan Darat dan Peternakan		
Dataran tinggi potensial untuk perikanan air tawar dan peternakan, serta integrasi pertanian-perikanan.	Budidaya ikan air tawar (nila, lele, mas, sogili), peternakan (sapi, kambing, ayam kampung), dan pemanfaatan limbah untuk biogas.	Budidaya ramah lingkungan, diversifikasi ekonomi, kemandirian pakan lokal, dan <i>circular economy</i> dari limbah ternak.

Sumber : Hasil Analisa, 2025

Kabupaten Sigi merupakan wilayah yang dikaruniai dengan kekayaan sumber daya alam yang beragam, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, air, energi, hingga perikanan dan peternakan. Potensi tersebut merupakan keunggulan komparatif yang strategis untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah uraian potensi berdasarkan lima klaster utama:

1. Pertanian dan Perkebunan
- Kabupaten Sigi memiliki tanah subur di dataran tinggi dan rendah sehingga memungkinkan budidaya berbagai komoditas pangan dan hortikultura seperti padi, kakao, kopi, kelapa, durian, serta sayuran dan buah-buahan tropis (cabai, tomat, mangga, pisang). Potensi ini dapat diperkuat dengan praktik agroforestri, penerapan irigasi hemat air, serta penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan. Untuk memperkuat daya saing, pengembangan dapat dilakukan melalui penguatan koperasi pertanian, perluasan akses pasar lokal, serta sertifikasi organik dan indikasi geografis guna meningkatkan nilai tambah produk.
2. Kehutanan dan Ekosistem Alam
- Sebagian besar wilayah Sigi berada di dalam dan sekitar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), yang merupakan kawasan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi. Potensi ekonomi berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, damar, madu hutan, dan tanaman obat sangat menjanjikan. Selain itu, Sigi menjadi habitat bagi spesies endemik seperti Anoa, Babi rusa, Tarsius, dan berbagai jenis burung langka. Prinsip keberlanjutan di sektor ini mencakup pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), pengembangan ekowisata edukatif, serta penerapan skema pembayaran jasa lingkungan (PES) untuk konservasi karbon dan air.

3. Sumber Daya Air

Kabupaten Sigi memiliki sistem hidrologi yang vital, dengan sungai-sungai utama seperti Gumbasa dan Palu, serta Danau Lindu sebagai kawasan penyimpan air alami dan pengatur iklim mikro. Potensi ini dapat mendukung irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), serta wisata alam berbasis sungai dan danau. Untuk menjaga keberlanjutannya, diperlukan perlindungan daerah tangkapan air, penguatan irigasi partisipatif oleh petani, dan program konservasi DAS dan reboisasi untuk mencegah banjir dan kekeringan.

4. Energi Baru dan Terbarukan

Kabupaten Sigi memiliki potensi energi terbarukan yang besar, seperti energi hidro dari sungai-sungai pegunungan, energi panas bumi (*geothermal*) di wilayah Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Desa Kadidia Kecamatan Nokilalaki, dan Desa Lawua, Kecamatan Kulawi Selatan serta energi surya yang ideal untuk wilayah desa terpencil. Pemanfaatan potensi ini mendukung agenda transisi energi bersih nasional, menyediakan akses energi rendah emisi bagi masyarakat, dan memperkuat ketahanan energi lokal, khususnya untuk kebutuhan sarana publik (sekolah, puskesmas), dan irigasi pertanian.

5. Perikanan Darat dan Peternakan

Wilayah dataran tinggi dan perbukitan Sigi sangat cocok untuk pengembangan budidaya ikan air tawar (Nila, Lele, Mas), serta pengembangan ikan endemik seperti Sogili yang bernilai tinggi. Selain itu, potensi peternakan lokal seperti sapi, kambing, dan ayam kampung menjadi sumber ekonomi rumah tangga. Prinsip berkelanjutan di sektor ini difokuskan pada budidaya ramah lingkungan (tanpa pakan kimia), diversifikasi ekonomi desa, serta pemanfaatan limbah peternakan untuk biogas dan pupuk organik sebagai bagian dari *circular economy*.

Adapun mengenai data pertanian (tanaman pangan, hortikultura) dan perkebunan kabupaten Sigi lebih jelasnya sebagai berikut.

1. Tanaman Pangan

Kabupaten Sigi memiliki struktur ekonomi yang cukup bertumpu pada sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Hal ini tercermin dari komoditas-komoditas unggulan yang masih menjadi andalan petani lokal, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk pasar regional. Berdasarkan data yang tersedia, berikut ini adalah uraian naratif mengenai performa lima komoditas utama: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu.

a. Padi: Komoditas Utama Ketahanan Pangan

Padi merupakan komoditas pertanian utama di Kabupaten Sigi, dengan luas panen mencapai 21.053,5 hektare dan total produksi sebesar 110.290,3 ton. Produktivitas rata-rata sebesar 5,1 ton per hektar (gabah kering panen) mencerminkan tingkat efisiensi lahan yang cukup baik. Capaian ini menempatkan padi sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah. Dengan demikian, padi tidak hanya menopang konsumsi lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas pasokan pangan untuk wilayah sekitar, termasuk Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

b. Jagung: Pilar Pengembangan Industri Pangan dan Peternakan

Jagung menduduki posisi strategis sebagai komoditas kedua terpenting dengan luas panen 11.705,5 hektare dan produksi sebesar 52.132,1 ton. Produktivitas sebesar 4,3 ton per hektare menunjukkan adanya potensi yang dapat lebih dioptimalkan, terutama melalui intervensi benih unggul, manajemen lahan, dan teknologi pascapanen. Jagung sangat berpotensi mendukung sektor peternakan sebagai bahan baku pakan, serta industri pangan lokal.

c. Kedelai: Komoditas Strategis yang Masih Terpinggirkan

Kedelai memiliki luas panen dan produksi yang sangat rendah, yakni hanya 53 hektare dengan produksi 76 ton. Produktivitas sebesar 1,5 ton per hektare tergolong rendah bila dibandingkan dengan potensi

- optimal tanaman ini di daerah lain. Minimnya kontribusi kedelai menunjukkan lemahnya daya tarik komoditas ini bagi petani, yang kemungkinan disebabkan oleh harga pasar yang kurang kompetitif serta risiko kegagalan panen yang tinggi. Namun demikian, kedelai memiliki nilai strategis sebagai sumber protein nabati dan bahan baku industri tempe-tahu, sehingga perlu penguatan kelembagaan petani dan kemitraan dengan pelaku usaha hilir.
- d. Kacang Tanah: Alternatif Diversifikasi Pangan
Kacang tanah memiliki luas panen sebesar 152,5 ha dan produksi 169,3 ton, dengan produktivitas yang masih rendah yakni hanya 1,01 ton per hektare. Meskipun bukan komoditas utama, kacang tanah berperan penting dalam diversifikasi pangan dan mendukung pola tanam rotasi. Rendahnya produktivitas menjadi perhatian utama yang dapat ditangani melalui penyediaan varietas unggul lokal, pelatihan teknik budidaya, dan dukungan pembiayaan mikro berbasis kelompok tani.
- e. Ubi Kayu: Komoditas Bernilai Tinggi dengan Lahan Terbatas
Ubi kayu (singkong) meskipun hanya ditanam di lahan seluas 54,4 hektare, namun mampu menghasilkan produksi sebesar 1.138,2 ton dengan produktivitas tertinggi dari semua komoditas, yaitu 19,8 ton per hektare. Tingginya produktivitas menunjukkan potensi besar untuk pengembangan skala luas dan hilirisasi industri, baik sebagai sumber pangan lokal, bahan pembuatan tepung, maupun energi terbarukan (bioetanol). Perluasan lahan tanam dan kemitraan dengan industri pengolahan menjadi strategi utama untuk mendorong ubi kayu menjadi komoditas unggulan baru di Kabupaten Sigi.

Tabel 2.9
Tanaman Pangan Kabupaten Sigi 2024

Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
Padi	21053,5	5,1	110290,3
Jagung	11705,5	4,3	52132,1
Kedelai	53,0	1,5	76,0
Kacang Tanah	152,5	1.01	169,3
Ubi Kayu	54,4	19,8	1138,2

Sumber : Profil Statistik Pertanian Kabupaten Sigi, 2024

Data komoditas pertanian Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa sektor tanaman pangan masih memiliki peran sentral dalam ekonomi lokal. Komoditas padi dan jagung menjadi andalan utama yang mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan industri. Sementara itu, komoditas seperti kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu memerlukan pendekatan kebijakan berbasis klaster dan peningkatan nilai tambah.

Untuk memperkuat daya saing sektor pertanian di Kabupaten Sigi, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Penguatan Infrastruktur Pertanian: Meliputi irigasi, jalan tani, dan fasilitas pengolahan pascapanen untuk meningkatkan efisiensi produksi.
- Diversifikasi Komoditas dan Rotasi Tanam: Untuk mencegah degradasi lahan dan meningkatkan pendapatan petani.
- Peningkatan Kapasitas Petani: Melalui pelatihan GAP (*Good Agricultural Practices*) dan akses pada teknologi pertanian tepat guna.
- Pengembangan Hilirisasi dan Industri Olahan: Khususnya untuk jagung, kedelai, dan ubi kayu agar memiliki nilai tambah ekonomi lebih besar.
- Kemitraan dan Kelembagaan Tani: Mendorong terbentuknya koperasi atau BUMDes sebagai agregator produksi dan akses pasar.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal, sektor pertanian Kabupaten Sigi dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

2. Hortikultura

a. Buah dan Sayuran Semusim

Sektor hortikultura di Kabupaten Sigi menunjukkan potensi yang besar dan beragam, dengan komoditas yang mencakup sayuran daun, buah, hingga tanaman rempah. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa komoditas unggulan yang layak mendapatkan perhatian lebih dalam upaya peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal.

- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produksi dan Produktivitas
 - Cabai rawit merupakan komoditas hortikultura paling dominan dalam hal produksi. Tingginya luas panen dan produktivitas yang kompetitif menjadikan cabai rawit berperan strategis dalam mendukung sektor agribisnis lokal serta memasok pasar regional. Dukungan teknologi pascapanen dan sistem distribusi akan semakin memperkuat posisi cabai rawit sebagai komoditas ekspansif.
 - Tomat adalah komoditas dengan produktivitas tinggi dan luas tanam yang cukup besar. Sebagai bahan pangan yang sangat dibutuhkan sehari-hari, tomat memiliki nilai ekonomi dan gizi tinggi. Potensi ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan budidaya intensif dan kemitraan dengan pelaku industri pengolahan.
 - Produktivitas terung sangat tinggi, melebihi banyak komoditas hortikultura lainnya. Ini menandakan adanya efisiensi lahan yang sangat baik, menjadikannya komoditas prospektif untuk pengembangan agrowisata dan pasar ekspor domestik.
- Komoditas Potensial yang Perlu Penguatan
 - Mentimun dan Labu Siam berpotensi sebagai bahan baku agroindustri rumah tangga (misalnya acar, sayuran kemasan) dan dapat dikembangkan melalui program UMKM tani berbasis hortikultura.
 - Perluasan area tanam dan pengembangan sentra hortikultura dataran tinggi untuk kentang dan kembang kol dapat mendorong peningkatan produksi dan diversifikasi pangan daerah.
- Komoditas Sayuran Daun
 - Komoditas Bayam, Kangkung, Petsai/Sawi, Bawang Daun memiliki perputaran pasar yang cepat dan bernilai gizi tinggi. Diperlukan dukungan terhadap sistem distribusi lokal dan pengelolaan lahan yang adaptif terhadap siklus tanam pendek.

Tabel 2.10
Tanaman Pangan Kabupaten Sigi 2024

Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Tahunan (Ha)	Produktivitas (Kw)	Produksi (Kw/Ha)
Bawang Daun	47,15	55,9	29,54	1651,25
Bawang Merah	159	120,1	44,76	5375,95
Bayam	44,7	51,3	37,74	1936
Cabai Besar (Group)	70,9	85,6	43,66	3737,71
Cabai Keriting	70,9	85,6	43,66	3737,71
Cabai Rawit	322,35	435,26	60,44	26306,33
Kacang Panjang	90,3	104,4	8460,39	81,04
Kangkung	54,05	63	3316,5	52,64
Kembang Kol	32,5	30,1	1197,8	39,79
Labu Siam	42,25	73,75	7073,79	95,92
Mentimun	68,1	73,25	11237,48	153,41
Petsai/Sawi	54	53,3	1951	36,6
Terung	108,05	133,7	22700,6	169,79
Tomat	204,85	228,17	19320,61	84,68

Sumber : Profil Statistik Pertanian Kabupaten Sigi, 2024

- a. Hortikultura Tahunan
- Kabupaten Sigi memiliki potensi hortikultura yang luas, terutama pada subsektor buah-buahan. Data menunjukkan keberagaman komoditas buah dengan tingkat produktivitas yang bervariasi, mencerminkan tantangan dan peluang dalam pengembangan agribisnis buah lokal. Beberapa komoditas menunjukkan keunggulan dalam hal skala produksi, sementara lainnya menawarkan efisiensi produksi yang tinggi meski jumlah pohon terbatas.
- Komoditas Skala Besar dan Produktif
 - Durian
Durian merupakan komoditas buah utama di Kabupaten Sigi, baik dari segi produksi maupun jumlah pohon. Tingginya jumlah tanaman produktif menunjukkan kematangan budidaya dan potensi besar untuk pengembangan industri pengolahan durian, seperti dodol durian atau frozen durian untuk pasar ekspor.
 - Pisang
Pisang merupakan buah konsumsi harian dengan nilai gizi tinggi dan pasar stabil. Meskipun produktivitasnya masih sedang, luas tanam yang besar menunjukkan kontribusi penting terhadap ketahanan pangan lokal. Perluasan tanaman produktif menjadi strategi utama peningkatan output.
 - Nanas
Komoditas nanas di Kabupaten Sigi terkonsentrasi di Desa Doda, Kecamatan Kinovaro, yang secara geografis terletak pada kawasan bertopografi perbukitan bergelombang dengan karakteristik drainase yang baik serta tingkat intensitas cahaya matahari yang tinggi. Kondisi agroklimat yang optimal, dikombinasikan dengan luasnya skala budidaya, menjadikan Desa Doda sebagai salah satu kawasan strategis dalam pengembangan komoditas nanas unggulan berbasis pemberdayaan masyarakat tani.
 - Komoditas Bernilai Ekonomis Tinggi
 - Nangka/Cempedak dan Jambu Biji menunjukkan produktivitas tertinggi dibanding buah lainnya, menandakan efisiensi tinggi per pohon. Meskipun skala tanamnya kecil, potensi pengembangan sangat besar jika ditingkatkan dalam bentuk kebun rakyat atau mitra BUMDes dan UMKM pengolahan pangan.

Tabel 2.11
Hortikultura Tahunan Kabupaten Sigi 2024

Komoditas	Jumlah Tanaman (Batas)	Tanaman Produktif (Pohon)	Produksi (kw)	Produktivitas (kw/pohon)
Alpukat	34779	7729	5074,82	0,66
Belimbing	166	114	80,02	0,7
Duku/Langsar	5031	3028	1710,42	0,56
Durian	107783	41342	50444,32	1,22
Jambu Air	1773	1014	2276,17	2,24
Mangga	15330	1633	1124,8	0,69
Manggis	4053	935	761,25	0,81
Nanas	2549903	1256952	47123,21	0,04
Nangka/Cempedak	1495	1264	5747,23	4,55
Pepaya	3893	1979	4449,91	2,25
Pisang	76272	14110	12512,63	0,89
Rambutan	8302	1569	947,11	0,6
Sirsak	1550	1450	1873,54	1,29

Sumber : Profil Statistik Pertanian Kabupaten Sigi, 2024

3. Perkebunan
- Kabupaten Sigi merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan lahan yang cukup luas untuk pengembangan subsektor perkebunan. Dengan kondisi agroklimat yang variatif dari dataran rendah hingga tinggi, wilayah ini memungkinkan budidaya beragam tanaman perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi, seperti kakao, kopi, kelapa, kemiri, dan pala. Perkebunan menjadi tumpuan mata pencaharian bagi banyak masyarakat pedesaan dan berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- Subsektor perkebunan merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi berbasis agraria di Kabupaten Sigi. Selain sebagai sumber penghidupan bagi lebih dari 20 ribu KK, perkebunan juga berperan dalam penyediaan bahan baku industri, ketahanan pangan, dan pelestarian ekosistem melalui sistem agroforestri. Data tahun 2024 mencatat bahwa luas total areal perkebunan mencapai 41.367 ha, dengan produksi total sebesar 23.396.308 kg dan rata-rata produktivitas 888 kg/Ha.
- a. Komoditas Perkebunan Utama
- Kakao
Kakao adalah komoditas unggulan Kabupaten Sigi dengan luas areal 28.258 Ha dan produksi mencapai 19.499.065 kg. Produktivitasnya cukup tinggi (968 kg/Ha) dan melibatkan 11.968 KK petani.
 - Kelapa
Kelapa menempati urutan kedua dengan luas areal 6.312 Ha dan produksi 3.069.450 kg. Tantangan utama terletak pada tanaman tidak produktif (741 Ha) yang perlu diremajakan.
 - Kopi Robusta
Kopi robusta berperan penting sebagai komoditas ekspor dengan areal 3.532 Ha dan produksi 500.606 kg. Namun, 919 Ha merupakan tanaman tidak menghasilkan, membutuhkan rehabilitasi.
- b. Komoditas Pendukung dan Potensial
- Komoditas seperti Kemiri, Jambu Mete, dan Kopi Arabika masih tergolong minor namun memiliki nilai ekonomi tinggi. Misalnya, Jambu Mete memiliki produktivitas 500 kg/Ha meskipun luas tanamnya hanya 10 Ha. Kopi Arabika memiliki potensi *branding* seperti "Kopi Sigi", meski produktivitasnya masih sangat rendah yaitu 41 kg/Ha.

Tabel 2.12
Perkebunan Kabupaten Sigi 2024

Komoditi	Luas Areal PR/PBS/PBN (Ha)				Produksi (Kg)	Produktivitas (Kg/Ha)
	TBM	TM	TR/ TTM	Jumlah		
Kelapa Dalam	1,135	4,287	737	6,159	3,070,300	716
Cengkeh	196	60	73	329	23,875	398
Kakao	5,906	20,14	1,874	27,92	19,498,650	968
Kemiri	353	598	138	1,089	259,974	435
Kopi Robusta	1,388	962	912	3,262	500,556	520
Panili	25	30	100	155	7,605	254
Kopi Arabika	286	183	N/A	469	7,383	40

Sumber : Profil Statistik Pertanian Kabupaten Sigi, 2024

Subsektor perkebunan Kabupaten Sigi memiliki kekuatan utama pada komoditas kakao, kelapa, dan kopi. Untuk mewujudkan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, diperlukan intervensi dari aspek produktivitas, kelembagaan, hingga digitalisasi. Pendekatan berbasis data akan memperkuat daya saing perkebunan daerah.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah maka dibutuhkan instrumen khusus dalam pelaksanaannya. Untuk itu dibutuhkan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sigi. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki peran strategis di Kabupaten Sigi sebagai instrumen utama dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, terutama pada lahan yang telah dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, dan sarana produksi lainnya. Penetapan LP2B menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah serta melindungi investasi pembangunan pertanian yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya LP2B, lahan pertanian yang produktif dapat dipertahankan secara hukum dan tata ruang, sekaligus mencegah konversi lahan subur menjadi permukiman atau industri yang tidak sejalan dengan kepentingan ketahanan pangan daerah. Upaya ini sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan

Kabupaten Sigi telah menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perda ini dibuat sebagai tindak lanjut UU No.41 Tahun 2009 di tingkat daerah, dan berfungsi mengamankan lahan pertanian penting agar tidak dialihfungsikan secara tidak teratur. Ketentuan LP2B di Sigi juga diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi. RTRW terbaru Sigi (Perda No. 1 Tahun 2021 untuk periode 2021–2041) memuat zonasi lahan pertanian berkelanjutan, sehingga aturan tata ruang sejalan dengan perlindungan LP2B. Dengan integrasi ini, setiap rencana pembangunan permukiman atau non-pertanian harus mengacu pada peta LP2B di RTRW.

Pada tahun 2023–2024, DPRD Sigi membahas Rancangan Perda untuk merevisi Perda No.8 Tahun 2018, yang bertujuan untuk memperbarui data dan peta lahan pertanian yang dilindungi. Pembahasan ditunda karena data luas lahan pertanian yang pasti belum tersedia. Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang (PUTR) kemudian menyiapkan revisi RTRW 2021–2041 khususnya terkait luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan ulang lahan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hasil pemetaan terbaru akan dimasukkan ke dalam revisi RTRW agar regulasi spasial benar-benar sesuai kondisi terkini yang berbasis data aktual.

Perda LP2B Kabupaten Sigi Tahun 2018 telah menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 17.393 ha, dengan lahan

pertanian pangan berkelanjutan cadangan (LP2B C) seluas 22.432 ha. Lahan tersebut akan diproyeksikan untuk pertanian pangan berkelanjutan, baik sebagai lahan yang dilindungi saat ini maupun disiapkan sebagai cadangan untuk kebutuhan mendatang. Lahan cadangan ini penting untuk memastikan ketersediaan ruang ekspansi pertanian di masa depan tanpa harus membuka kawasan baru di luar rencana. Penetapan LP2B dan lahan cadangan tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Sigi yang masuk dalam zona budidaya pertanian menurut RTRW.

Tabel 2.13
Luas LP2B dan LP2B Cadangan di Kabupaten Sigi

Nama Kecamatan	Luas LP2B Paling Rendah (dalam hektar)	Luas LP2B Cadangan Paling Rendah (Ha)
Pipikoro	530	1000
Kulawi Selatan	547	1945
Lindu	1559	9472
Nokilalaki	616	0
Palolo	2707	4400
Gumbasa	1021	2500
Dolo Selatan	939	300
Dolo Barat	1055	0
Dolo	1803	10
Tanambulava	1155	397
Sigi Biromaru	3402	1090
Marawola	819	530
Marawola Barat	0	621
Kulawi	790	0
Kinovaro	450	167
Jumlah	17393	22432

Sumber : Perda No. 8 Tahun 2018

Sebaran lokasi LP2B mengikuti area lahan subur di Sigi. Secara geografis, sekitar 75% wilayah Sigi adalah kawasan hutan lindung, dan hanya 25% yang merupakan kawasan budidaya dan pemukiman. Lahan pertanian pangan berkelanjutan umumnya berada pada kawasan 25% tersebut, meliputi dataran-dataran subur dan lembah. Contohnya, kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Palu seperti Sigi Biromaru, Dolo, Marawola, dan Kinovaro memiliki banyak lahan sawah produktif dan menjadi sentra pertanian pangan Sigi. Demikian pula, daerah lembah dan dataran tinggi subur lainnya (misalnya sebagian Palolo dan Kulawi) menyimpan lahan pertanian penting. Sesuai ketentuan Perda No. 8 Tahun 2018, seluruh lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sigi berada dalam zona yang telah ditetapkan.

Di samping peran strategis sektor pertanian dan perkebunan sebagai penggerak utama ekonomi lokal dan penopang ketahanan pangan daerah, Kabupaten Sigi juga memiliki potensi unggulan lainnya di sektor pariwisata, khususnya berbasis alam dan budaya lokal. Pemanfaatan potensi wisata yang terintegrasi dengan kekayaan agraris dan kearifan lokal menjadi peluang sinergis untuk mendorong diversifikasi ekonomi daerah serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa melalui pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan berbasis desa. Penetapan 11 desa wisata melalui SK Bupati Sigi Nomor 556-296 Tahun

2020 menjadi pijakan awal dalam upaya penguatan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan pembangunan berkelanjutan.

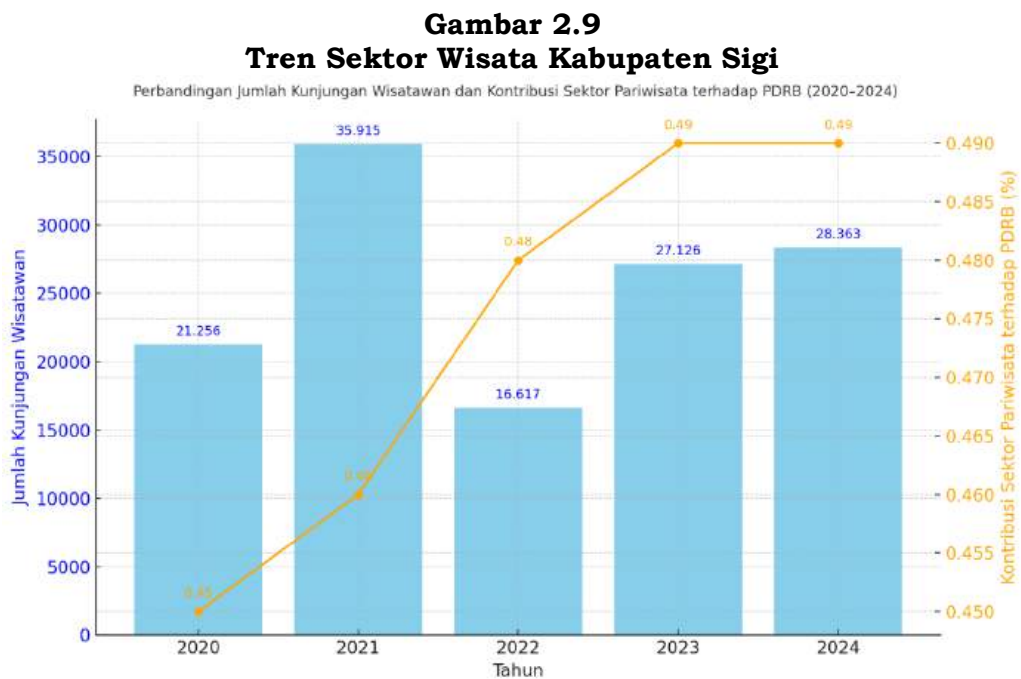
Tabel 2.14
Desa Wisata yang Ditetapkan Melalui SK Bupati
di Kabupaten Sigi

Lokasi	Daya Tarik (Atraksi)
Desa Sibedi Kecamatan Marawola	Bukit 1 Pohon; Air Terjun; Embung Desa
Desa Kaluku Tinggu Kecamatan Dolo Barat	Air Terjun Wera; Hutan Pinus
Desa Toro Kecamatan Kulawi	Wisata Budaya (Tari Raego, Kerajinan Kulit Kayu); Wisata Alam (Hutan dan Air Panas); Rumah Adat (Lobo); Kelompok Musik Bambu
Desa Lawua Kecamatan Kulawi Selatan	Wisata Alam Air Terjun (Air Panas), Kerajinan Kain Kulit Kayu, Kelompok Musik Bambu
Desa Motaue Kecamatan Kulawi	Wisata Budaya: Tari Raego, Kerajinan Kulit Kayu
Desa Balane Kecamatan Kinovaro	Bendungan, Tangga Seribu
Desa Karunia Kecamatan Palolo	Wisata (Air Terjun); Taman Anggrek
Desa Wayu Kecamatan Marawola Barat	Wisata Paralayang; Menara Pandang; Teropong
Desa Tomado Kecamatan Lindu	Wisata Alam Danau Lindu; Wisata Alam TN Lore Lindu
Desa Bora Kecamatan Sigi Kota	Wisata Air Panas; Terapi Kesehatan
Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat	Pemandian Bionga; Wisata Alam

Sumber : SK Bupati Sigi Nomor 556-296 Tahun 2020

Untuk mencermati dinamika sektor pariwisata, digunakan data jumlah kunjungan wisatawan serta kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB selama kurun waktu 2020–2024. Data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sigi bersifat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat 21.256 kunjungan yang meningkat signifikan menjadi 35.915 pada 2021. Namun, tahun 2022 mengalami penurunan drastis hingga 16.617 kunjungan, yang kemudian kembali meningkat menjadi 27.126 pada 2023 dan 28.363 pada 2024.

Meskipun tren kunjungan tidak stabil, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB melalui subsektor penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan kecenderungan peningkatan yang konsisten, dari 0,45% pada 2020 menjadi 0,49% pada 2024. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun jumlah kunjungan belum optimal, sektor ini mulai memberikan nilai tambah ekonomi secara gradual.



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi-Publikasi BPS, 2025 (data diolah)

Berdasarkan aspek ekonomi, Sektor pariwisata di Kabupaten Sigi memiliki potensi untuk mendiversifikasi basis ekonomi daerah yang selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Meskipun kontribusi terhadap PDRB masih relatif kecil (<1%), tren peningkatan pada subsektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengindikasikan adanya geliat ekonomi lokal, khususnya di sekitar desa-desa wisata. Keberadaan 11 desa wisata memungkinkan terjadinya perputaran ekonomi berbasis komunitas, yang dapat memberdayakan pelaku UMKM, perajin lokal, serta pelaku jasa wisata lainnya.

Berdasarkan aspek sosial, keberadaan desa wisata menjadi instrumen penguatan identitas budaya lokal. Beberapa desa seperti Desa Toro dan Desa Matuae menonjol dengan atraksi budaya seperti Tari Raego, kerajinan kulit kayu, dan rumah adat lobo, yang menjadi bagian integral dari warisan sosial masyarakat Kulawi. Selain itu, aktivitas pelestarian tradisi dan seni musik bambu secara tidak langsung memperkuat nilai-nilai gotong royong, memperluas partisipasi perempuan dan pemuda dalam aktivitas produktif, serta meningkatkan kohesi sosial antarwarga.

Berdasarkan aspek lingkungan, Sebagian besar objek wisata di Kabupaten Sigi bersifat alamiah, seperti Air Terjun Wera, Danau Lindu, Hutan Pinus, dan Pemandian Bionga, yang menunjukkan tingginya ketergantungan sektor ini pada kualitas ekosistem. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata di wilayah ini harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Konsep ekowisata menjadi sangat relevan untuk diterapkan agar dampak negatif seperti kerusakan kawasan konservasi, pencemaran, dan degradasi lahan dapat diminimalisasi.

Berdasarkan aspek kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Sigi telah menetapkan kerangka regulatif melalui SK Bupati tentang Desa Wisata, yang menjadi dasar penguatan pengelolaan destinasi berbasis komunitas. Namun, tantangan utama masih terletak pada kapasitas lembaga pengelola desa wisata (seperti Pokdarwis), koordinasi lintas sektor, serta minimnya dukungan infrastruktur digital dan promosi. Diperlukan integrasi program antar-perangkat daerah, serta penguatan ekosistem kelembagaan di tingkat desa agar keberlanjutan pariwisata dapat terjaga secara sistemik.

Untuk mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berdampak luas, pengembangan sektor ini perlu dirancang secara terpadu melalui pendekatan konseptual 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) yang merupakan kerangka kerja fundamental dalam pembangunan pariwisata.

- Atraksi

Atraksi merupakan daya tarik utama yang menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung. Kabupaten Sigi memiliki atraksi wisata yang bersifat multidimensi, mencakup:

- Wisata alam seperti Air Terjun Wera, Danau Lindu, Hutan Pinus, dan Pemandian Air Panas Bionga.
- Wisata budaya dan sosial seperti Tari Raego, rumah adat Lobo, kerajinan kulit kayu, serta musik bambu.
- Wisata minat khusus dan petualangan, seperti paralayang, menara pandang, dan wisata berbasis konservasi di kawasan TN Lore Lindu.

Keanekaragaman atraksi ini mencerminkan kekuatan karakter lokal yang berpeluang dikembangkan menjadi paket wisata tematik dan terintegrasi, yang pada akhirnya dapat memperkuat identitas pariwisata Kabupaten Sigi di tingkat regional maupun nasional.

- Amenitas

Amenitas mencakup seluruh fasilitas pendukung yang menunjang kenyamanan dan kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi. Saat ini, kondisi amenities di beberapa desa wisata di Kabupaten Sigi masih terbatas, baik dari sisi kualitas layanan, kapasitas akomodasi, maupun ketersediaan fasilitas publik seperti sanitasi, ruang kuliner, dan pusat informasi wisata. Untuk mengakselerasi peningkatan amenities, diperlukan intervensi kebijakan berupa:

- Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar wisata.
- Pengembangan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan *hospitality*.
- Kolaborasi pemerintah, BUMDes, dan sektor swasta dalam penyediaan *homestay* dan warung makan berbasis kearifan lokal.
- Insentif untuk pengembangan fasilitas wisata ramah lingkungan dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan.

- Aksesibilitas

Aksesibilitas mencakup kemudahan wisatawan dalam mencapai lokasi destinasi, baik secara fisik maupun digital. Beberapa desa wisata di Kabupaten Sigi masih menghadapi tantangan konektivitas yang memiliki kondisi topografi menantang. Peningkatan aksesibilitas dapat ditempuh melalui:

- Penguatan konektivitas infrastruktur jalan strategis dan jalan desa menuju destinasi wisata.
- Penyediaan transportasi penunjang wisata (*feeder transport*).
- Pengembangan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi digital.
- Penyusunan peta digital desa wisata dan integrasi dengan *platform* promosi daring (*online*).

Pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Sigi perlu dirancang secara holistik dan terstruktur melalui penguatan dimensi atraksi, amenities, dan aksesibilitas. Integrasi potensi lokal dengan konsep 3A akan menciptakan ekosistem pariwisata yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat pelestarian budaya, memperluas partisipasi masyarakat, serta meningkatkan ketahanan lingkungan.

Selanjutnya, untuk memperkuat struktur ekonomi wilayah dan diversifikasi sumber penghidupan masyarakat, sektor peternakan juga

memegang peranan penting. Kabupaten Sigi memiliki potensi pengembangan peternakan yang cukup signifikan, terutama pada komoditas sapi potong, kambing, dan unggas. Data tahun 2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif pada sebagian besar populasi ternak, yang mencerminkan adanya dinamika usaha peternakan rakyat yang terus berkembang. Peningkatan produktivitas ternak, jika didukung oleh sistem budidaya yang adaptif, penguatan kelembagaan peternak, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan, akan semakin memperkuat ketahanan pangan hewani dan membuka peluang hilirisasi produk ternak. Oleh karena itu, pengembangan sektor peternakan secara terpadu dengan sektor pertanian dan pariwisata menjadi salah satu strategi pembangunan yang memiliki nilai strategis dalam mewujudkan visi Kabupaten Sigi yang maju dan berkelanjutan.

Tabel 2.15
Populasi Ternak Tahun 2024 di Kabupaten Sigi

Komoditas	Populasi Awal 2024	Populasi Akhir 2024	Pertumbuhan (%)
Sapi Potong	23770	26010	9,42
Kerbau Potong	160	166	4,02
Kuda	42	44	5
Kambing Potong	12178	14218	16,75
Kambing Perah	182	212	16,75
Domba Potong	124	135	9
Babi	12375	13489	9
Ayam Buras	220165	222460	1,04
Ayam Ras Petelur	288088	329772	14,47
Ayam Ras Pedaging	2385826	0	-100
Itik	2166	1083	-50
Kelinci	1	0	-100

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2025 (Data diolah)

Gambar 2.10
Perbandingan Populasi Awal dan Akhir Ternak Tahun 2024 di Kabupaten Sigi



Sumber : DPKH Kabupaten Sigi , 2025 (Data diolah)

Sektor peternakan memiliki peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penyediaan bahan pangan asal hewani yang bergizi. Kabupaten Sigi, menunjukkan dinamika populasi ternak dan unggas yang beragam sepanjang tahun 2024.

- Ternak Besar
 - Populasi sapi potong menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sebesar 9,42%, dari 23.770 ekor menjadi 26.010 ekor. Pertumbuhan ini didukung oleh angka kelahiran yang tinggi (16%) dan pemasukan ternak (6%), dengan tingkat pemotongan dan kematian relatif terkendali. Hal ini mengindikasikan bahwa sapi potong merupakan salah satu komoditas unggulan yang layak diprioritaskan dalam strategi pengembangan agribisnis lokal.
 - Kerbau potong mengalami peningkatan populasi sebesar 4,02%, dari 160 menjadi 166 ekor. Meskipun kontribusinya terhadap keseluruhan populasi ternak relatif kecil, keberadaan kerbau tetap penting, khususnya untuk mendukung sistem pertanian tradisional dan sumber protein hewani masyarakat pedesaan.
 - Kuda, sebagai komoditas minor, mencatat pertumbuhan sebesar 5%, dari 42 menjadi 44 ekor. Namun, angka kelahiran dan kematian yang hampir seimbang menunjukkan perlunya perhatian terhadap manajemen kesehatan dan reproduksi ternak jenis ini.
- Ternak Kecil
 - Komoditas kambing potong mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 16,75%, dari 12.178 ekor menjadi 14.218 ekor. Pertumbuhan ini ditopang oleh angka kelahiran (36%) dan pemasukan (10%). Namun demikian, angka pemotongan dan kematian yang relatif tinggi (20,5% dan 3,75%) memerlukan peningkatan intervensi pada aspek manajemen ternak dan pelayanan kesehatan hewan.
 - Kambing perah juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 16,75%, menandakan potensi besar untuk pengembangan subsektor peternakan perah. Penambahan populasi ini dapat diarahkan untuk diversifikasi produk hasil ternak seperti susu segar, yang berkontribusi terhadap peningkatan gizi masyarakat.
 - Domba potong mengalami pertumbuhan sebesar 9%, dengan kelahiran mencapai 30% dari populasi awal. Angka pemotongan dan kematian yang masih cukup tinggi menunjukkan perlunya strategi penguatan populasi dasar melalui penyediaan pakan, bibit unggul, dan penyuluhan berkelanjutan.
 - Babi, sebagai sumber protein alternatif, mencatat pertumbuhan populasi sebesar 9%, dengan tingkat kelahiran tertinggi (38%). Namun, angka pemotongan dan pengeluaran juga cukup besar, yang menunjukkan intensitas budidaya yang tinggi dan perlu didukung oleh sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan.
 - Kelinci, yang sebelumnya hanya berpopulasi satu ekor, tercatat mengalami kematian sehingga populasinya menjadi nol. Meski secara kuantitatif tidak signifikan, hal ini menunjukkan perlunya pelestarian diversifikasi ternak kecil.
- Unggas
 - Ayam buras mencatat pertumbuhan positif sebesar 1,04%, dengan kelahiran yang sangat tinggi (170%). Meski demikian, tingginya angka kematian (27,82%) dan pemotongan (140%) menunjukkan bahwa sistem produksi masih bersifat subsisten dan belum sepenuhnya efisien.
 - Ayam ras petelur mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 14,47%, dari 288.088 ekor menjadi 329.772 ekor. Pertumbuhan ini didukung oleh pemasukan besar (17,36%) yang menandakan meningkatnya minat masyarakat atau

- pelaku usaha terhadap sektor peternakan unggas modern berbasis telur.
- Sebaliknya, populasi ayam ras pedaging mengalami penurunan drastis sebesar 100% (dari 2.385.826 menjadi nol). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh populasi ayam pedaging telah dipotong selama siklus produksi dan tidak dilakukan replenishment, atau terdapat kendala dalam pencatatan populasi akhir. Hal ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan sistem produksi dan rantai pasok ayam pedaging di wilayah ini.
 - Itik mengalami penurunan populasi sebesar 50%, dengan kematian dan pengeluaran sebagai faktor utama. Tidak terdapat catatan kelahiran maupun pemasukan, menandakan bahwa komoditas ini kurang mendapat perhatian dalam sistem pengembangan peternakan.

Berikut tabel populasi ternak periode 2020-2024.

Tabel 2.16
Populasi Ternak Periode 2020-2024 di Kabupaten Sigi

Jenis Ternak	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi	45.053	47.011	51.52	56.146	54.840	26.010
Kerbau	519	537	559	581	598	166
Kambing	58.030	65.348	73.536	82.706	81.587	14.430
Kuda	238	243	248	253	262	44
Domba	4.985	4.816	4.979	5.147	5.228	135
Babi	32.905	38.189	45.295	52.705	22.279	13.489
Ayam Buras	212.886	226.315	243.556	260.956	245.348	222.460
Ayam Petelur	89.840	108.528	127.528	149.858	141.556	329.772
Ayam Pedaging	97.000	109.000	143.64	143.54	159.440	0
Itik	10.765	13.367	1.757	1.23	6.777	1.083

Sumber : DPKH Kabupaten Sigi, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan aspek ekonomi, Pertumbuhan positif pada komoditas utama seperti sapi potong, kambing, dan ayam petelur menunjukkan potensi untuk peningkatan nilai tambah ekonomi lokal. Namun, sektor ayam pedaging yang menurun drastis perlu dikaji ulang untuk menjamin keberlanjutan rantai pasok dan pasokan protein hewani masyarakat.

Berdasarkan aspek sosial, Tingginya angka pemotongan dan pengeluaran mengindikasikan bahwa peternakan masih menjadi salah satu sumber utama penghasilan rumah tangga, khususnya pada masa kebutuhan ekonomi meningkat. Peningkatan kapasitas peternak melalui pelatihan teknis dan akses ke pasar menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan aspek lingkungan, Kepadatan populasi unggas dan ternak besar dapat berdampak pada lingkungan, terutama terkait limbah ternak, penggunaan pakan, dan konversi lahan. Oleh karena itu, praktik budidaya berkelanjutan berbasis lingkungan perlu diperkuat melalui penyuluhan dan adopsi teknologi ramah lingkungan.

Berdasarkan aspek kelembagaan, ditemukannya celah data pada beberapa komoditas seperti ayam pedaging, itik, dan kelinci (data

pertumbuhan minus) menunjukkan pentingnya penguatan sistem pencatatan dan pelaporan populasi ternak secara berjenjang dari tingkat desa ke kabupaten. Sistem monitoring berbasis digital juga perlu mulai diperkenalkan untuk akurasi data dan perencanaan pembangunan sektor peternakan.

Secara umum, sektor peternakan di Kabupaten Sigi menunjukkan dinamika yang cukup positif, dengan beberapa komoditas mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun demikian, sejumlah tantangan struktural seperti tingginya tingkat kematian, pemotongan, dan belum optimalnya manajemen data perlu segera diatasi.

Kabupaten Sigi memiliki potensi peternakan yang cukup besar, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang menghambat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, sejak 2017, Pemerintah Kabupaten Sigi menggagas Sekolah Inovatif Giat Inklusif untuk Peternakan (Sigi Ternak) dengan *tagline* Peternak Maju, Desa Tangguh, Sigi Mandiri sebagai program unggulan yang diawali dengan mengadopsi metode Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan kemudian diikuti dengan bekerja sama dengan Universitas Tadulako (Untad) untuk membangun kelembagaan peternak yang modern dan kolektif.

Tantangan mendasar yang menghambat tersebut yaitu pola beternak yang masih bersifat tradisional mengakibatkan rendahnya produktivitas ternak dan kurang efisiennya sistem usaha peternakan. Kualitas pakan yang belum terstandar dan minimnya perhatian terhadap kesehatan ternak juga turut memperburuk performa produksi. Selain itu, keterbatasan literasi peternak terhadap teknologi, manajemen usaha, dan akses pasar menyebabkan peternak sulit bersaing secara ekonomi. Tidak adanya integrasi antara proses produksi, pengolahan, dan distribusi menjadikan nilai tambah peternakan rakyat tetap rendah dan tidak berkelanjutan.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi menghadirkan Sigi Ternak sebagai program unggulan yang mengusung pendekatan pendidikan, kolektivitas, dan penguatan sistem produksi secara menyeluruh. Program ini memberikan pelatihan berbasis praktik langsung yang membekali peternak dengan keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. Para peserta tidak hanya belajar beternak, tetapi juga didorong membentuk usaha kolektif melalui koperasi atau forum peternak. Lebih dari itu, program ini dilengkapi dengan pendampingan berkelanjutan mulai dari proses pembibitan, pemeliharaan, hingga pascapanen. Fasilitas pendukung seperti bibit unggul, rumah potong hewan (RPH) modern, dan sistem reproduksi ternak juga disediakan guna memastikan keberlanjutan produksi. Dalam upaya ekspansi, program telah berkembang di lima kecamatan hingga tahun 2024 dan terus diperluas untuk menjangkau peternak di kecamatan lain. Pelaksanaan program di lima kecamatan prioritas yaitu Dolo Selatan, Palolo, Sigi Kota yang bekerjasama dengan IPB, Marawola yang bekerjasama dengan Untad, dan Dolo Barat yang merupakan sekolah untuk perikanan.

Pada sektor peternakan juga turut tumbuh melalui peningkatan populasi dan produksi ternak rakyat yang menyebar di sentra-sentra desa. Sebagai pelengkap ekosistem pangan dan penghidupan, sektor perikanan juga memainkan peran penting.

Budidaya ikan air tawar yang terus berkembang serta potensi perikanan tangkap di Danau Lindu menjadikan perikanan sebagai salah satu sektor yang strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sigi. Berdasarkan data produksi lima tahun terakhir, perikanan di Kabupaten Sigi terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu perikanan budidaya air tawar dan perikanan tangkap yang berpusat di Danau Lindu.

Gambar 2.11
Produksi perikanan Kabupaten Sigi



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2025 (Data diolah)

Perikanan budidaya menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, total produksi tercatat sebesar 597,3 ton, kemudian meningkat menjadi 729,39 ton pada 2021 dan 729,55 ton pada 2022. Kenaikan lebih lanjut terjadi pada tahun 2023 dengan produksi mencapai 852,3 ton, sebelum sedikit menurun namun tetap tinggi di angka 843,36 ton pada tahun 2024. Sejak tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Sigi telah mendistribusikan lebih dari 1,3 juta ekor benih ikan kepada masyarakat pembudidaya, dengan total anggaran sekitar Rp 650 juta.

Peningkatan ini mencerminkan efektivitas intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam mendorong budidaya ikan air tawar khususnya komoditas unggulan seperti ikan mas, nila/mujair, dan lele melalui penyediaan sarana dan prasarana seperti kolam tanah, kolam beton, hingga teknologi bioflok yang terbukti efisien dan ramah lingkungan, distribusi benih ikan unggul, penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya melalui pembentukan dan pembinaan 186 kelompok budidaya serta 13 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tersebar di seluruh 16 kecamatan, dan adopsi teknologi modern seperti sistem bioflok yang mampu meningkatkan produktivitas hingga tiga kali lipat, dengan kepadatan tebar 100 ekor per meter kubik menghasilkan sekitar 25 kilogram panen per siklus dalam rentang 80–90 hari, dengan potensi pendapatan mencapai satu juta rupiah per siklus. Program pembangunan dan revitalisasi Balai Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Desa Baluase (Kecamatan Dolo Selatan), Desa Kotarindau (Kecamatan Dolo), Desa Mpanau (Kecamatan Sigi Biromaru), Desa Banasu (Kecamatan Pipikoro), serta satu BBI di Lindu yang saat ini belum

berfungsi optimal akibat keterbatasan infrastruktur pasca-bencana, turut memperkuat ekosistem budidaya yang produktif dan berkelanjutan.

Sebaliknya, produksi perikanan tangkap di Danau Lindu mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, produksi hanya sebesar 20,2 ton, namun melonjak drastis menjadi 161,9 ton pada 2021 dan 165,7 ton pada 2022. Lonjakan ini kemungkinan dipengaruhi oleh program *restocking* dan meningkatnya aktivitas penangkapan saat populasi ikan mencapai puncaknya. Namun sejak tahun 2023, terjadi penurunan produksi menjadi 146,45 ton, dan penurunan yang lebih tajam pada 2024 dengan hanya 65,53 ton. Penurunan tersebut mengindikasikan tekanan berlebih terhadap populasi ikan dan degradasi lingkungan perairan Danau Lindu.

Tantangan ekologis seperti perubahan iklim, sedimentasi, serta praktik penangkapan yang belum sepenuhnya berkelanjutan turut menjadi faktor penyebab penurunan produktivitas. Dalam hal ini, penting untuk mengedepankan pendekatan konservasi berbasis kearifan lokal. Salah satu contoh praktik tradisional yang relevan adalah tradisi “Ombo” di masyarakat Lindu, yaitu sistem pengelolaan penangkapan ikan secara bergilir untuk menjaga keberlanjutan sumber daya. Selain itu, pendekatan ilmiah juga dilakukan melalui penelitian terhadap ikan endemik seperti *climbing perch* (*Anabas testudineus*), khususnya di wilayah Sigi Biromaru, dengan fokus pada aspek reproduksi dan domestikasi sebagai bagian dari upaya konservasi dan pemulihan plasma nutfah lokal.

Melalui kombinasi pendekatan produktif, kelembagaan, konservatif, dan kolaboratif, sektor perikanan budidaya Kabupaten Sigi terus diarahkan untuk tumbuh secara berkelanjutan, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan iklim maupun dinamika ekonomi.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung adalah konsep penting dalam perencanaan wilayah dan pengelolaan lingkungan, terutama di Kabupaten Sigi. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sedangkan daya tampung adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalamnya. Dalam konteks Kabupaten Sigi, penting untuk memahami dan mengelola daya dukung dan daya tampung lingkungan agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Pengelolaan daya dukung dan daya tampung yang baik sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sigi.

Untuk mengukur Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup suatu wilayah dibutuhkan data mengenai Jasa Lingkungan yang merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam perhitungan secara indikatif kinerja fungsi-fungsi ekosistem. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Jasa Lingkungan Hidup dapat menggambarkan mengenai manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

Untuk mengetahui kondisi kinerja jasa ekosistem di wilayah Kabupaten Sigi, berikut uraian dan sebaran luas kelas kapasitas daya dukung daya

tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan berdasarkan wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Sigi.

1. Jasa Lingkungan Penyedia (*Provisioning*)

Jasa lingkungan penyedia adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia yang terdiri dari:

a. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

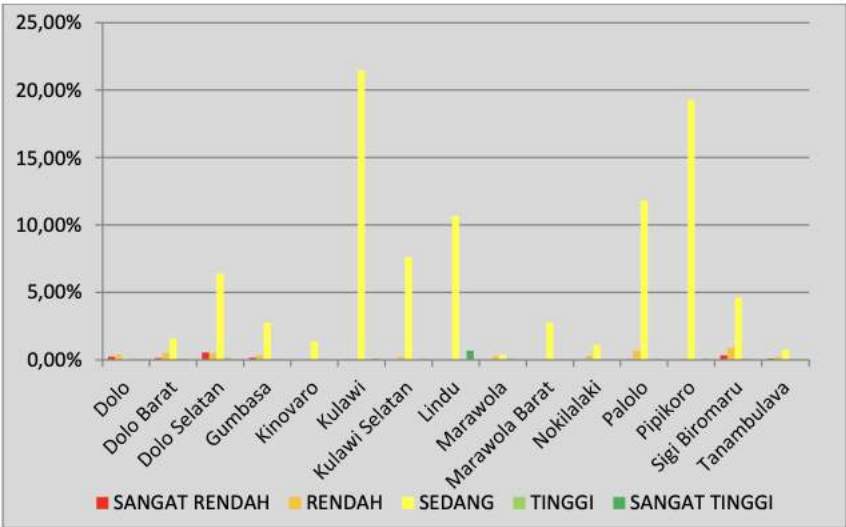
Fungsi ekosistem yang memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Tabel 2.17
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan
Kabupaten Sigi Berdasarkan Administrasi Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH (Ha)	SANGAT RENDAH (%)	RENDAH (Ha)	RENDAH (%)	SEDANG (Ha)	SEDANG (%)	TINGGI (Ha)	TINGGI (%)	SANGAT TINGGI (Ha)	SANGAT TINGGI (%)	TOTAL (Ha)	TOTAL (%)
Dolo	1201,45	0,23	1861,04	0,36	500,64	0,1	7,74	0	30,44	0,01	3601,32	0,69
Dolo Barat	705,55	0,14	2648,29	0,51	8364,57	1,6	353,76	0,07	20,27	0	12092,44	2,32
Dolo Selatan	2788,54	0,53	2437,79	0,47	33341,01	6,39	719,17	0,14	9,42	0	39295,92	7,53
Gumbasa	800,28	0,15	1690,1	0,32	14352,67	2,75	149,07	0,03	61,74	0,01	17053,86	3,27
Kinovaro	0	0	370,03	0,07	7199,63	1,38	119,99	0,02	2,86	0,01	7722,51	1,48
Kulawi	8,15	0	434,72	0,08	112194,79	21,5	9,62	0	3,02	0,06	112960,3	21,65
Kulawi Selatan	0	0	1092,4	0,21	39909,05	7,65	0	0	17,11	0,03	41148,56	7,89
Lindu	0	0	66,6	0,01	55642,34	10,66	0	0	3771,57	0,67	59196,51	11,35
Marawola	0	0	1353,94	0,26	1875,08	0,36	520,5	0,1	9,05	0,01	3778,57	0,72
Marawola Barat	0	0	2,22	0	14364,83	2,75	0	0	0	0	14375,87	2,76
Nokilalaki	0	0	1494,12	0,29	5844,29	1,12	0	0	5,36	0,01	7393,77	1,42
Palolo	83,77	0,02	3435,51	0,66	61625,96	11,81	8,61	0	8,61	0	65264,54	12,51
Pipikoro	0	0	460,91	0,09	100531,72	19,27	0	0	55,55	0,05	101258,17	19,41
Sigi Biromaru	1727,65	0,33	4678,51	0,9	24035,85	4,61	448,13	0,09	8,33	0,01	30948,26	5,93
Tanambulava	430	0,08	1060,87	0,2	3888,34	0,75	260,95	0,05	3,47	0	5644,14	1,08
Total	7745,38	1,48	23086,85	4,43	483670,78	92,7	2597,54	0,5	4634,19	0,89	521734,73	100

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Sigi 2021 dalam Dokumen KLHS RPJMD

Gambar 2.12
Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan
Penyedia Pangan Kabupaten Sigi Berdasarkan Administrasi
Kecamatan



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

Secara umum kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Sigi berada di rentang kelas berpotensi Sedang dengan total luas 92,70%. Berpotensi Rendah (sangat rendah-rendah) seluas 5,91% dan berpotensi Tinggi (tinggi-sangat tinggi) seluas 1,39% dari total luas Kabupaten Sigi. Kelas berpotensi Sedang dalam memberikan layanan ekosistem penyedia pangan tersebar di seluruh Kecamatan namun luas dominan berada di Kecamatan Kulawi dengan luas 21,50%, Kecamatan Pipikoro dengan luas 19,27% dan Kecamatan Palolo dengan luas 11,81%. Sementara itu sebesar 5,91% luas wilayah yang berpotensi Rendah (sangat rendah-rendah) di Kabupaten Sigi terdistribusi dominan di Kecamatan Dolo Selatan 1,00% dan di Kecamatan Dolo Barat seluas 0,64%. Untuk kelas Tinggi (tinggi-sangat tinggi) dalam memberikan layanan penyedia pangan seluas 1,39% terdistribusi dominan di Kecamatan Lindu seluas 0,67% dan di Kecamatan Dolo Selatan dengan luas 0,14% dari total luas total wilayah Kabupaten Sigi

Tabel 2.18
Status Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan

NO	KECAMATAN	MODEL DENSITAS POPULASI SISTEM GRID		KETERSEDIAAN PANGAN	KEBUTUHAN PANGAN	SELISIH	AMBANG BATAS PENDUDUK	SELISIH AMBANG BATAS	KETERANGAN
		LUAS (Ha)	PENDUDUK (Jiwa)	(Kkal/Tahun)	(Kkal/Tahun)	(Kkal/Tahun)	(Jiwa)	(Jiwa)	
1	Dolo	3.601,32	22.926	36.777.641.843,74	17.991.178.341	18.786.463.503,20	46.882	23.977	BELUM TERLAMPAUI
2	Dolo Barat	12.092,44	14.008	27.982.076.932,19	10.992.777.935	16.989.298.996,92	35.693	28.613	BELUM TERLAMPAUI
3	Dolo Selatan	39.295,92	16.083	34.361.323.900,73	12.621.134.288	21.740.189.612,48	43.868	27.716	BELUM TERLAMPAUI
4	Gumbasa	17.053,86	13.011	27.784.830.002,90	10.210.382.406	17.574.447.597,21	35.672	22.662	BELUM TERLAMPAUI
5	Kinovaro	7.722,51	10.541	22.226.616.346,35	8.272.049.861	13.954.566.485,35	28.431	17.936	BELUM TERLAMPAUI
6	Kulawi	112.960,30	5.806	37.090.836.082,36	12.403.758.243	24.687.077.839,46	45.233	29.583	BELUM TERLAMPAUI
7	Kulawi Selatan	41.148,56	9.436	21.233.059.438,39	7.404.901.045	13.828.158.393,32	27.244	17.855	BELUM TERLAMPAUI
8	Lindu	59.196,51	5.254	11.604.131.667,25	4.123.076.555	7.481.055.112,44	15.120	9.862	BELUM TERLAMPAUI
9	Marawola	3.778,57	23.356	42.012.220.533,26	18.328.620.883	23.683.599.650,36	53.531	30.149	BELUM TERLAMPAUI
10	Marawola Barat	14.375,87	7.097	15.652.483.055,20	5.569.370.863	10.083.112.192,67	20.055	12.913	BELUM TERLAMPAUI
11	Nokilalaki	7.393,77	6.262	12.527.583.282,29	4.914.104.641	7.613.478.641,55	16.039	9.799	BELUM TERLAMPAUI
12	Palolo	65.264,54	30.443	65.871.595.451,57	23.890.144.276	41.981.451.175,63	84.471	53.972	BELUM TERLAMPAUI
13	Pipikoro	101.258,18	8.716	20.399.600.557,75	6.839.880.947	13.559.719.610,51	25.092	16.317	BELUM TERLAMPAUI
14	Sigi Biromaru	30.948,26	47.709	99.617.223.324,92	37.439.637.696	62.177.585.628,69	126.927	79.202	BELUM TERLAMPAUI
15	Tanambulava	5.644,14	8.773	16.557.087.439,61	6.884.611.706	9.672.475.733,45	21.082	12.318	BELUM TERLAMPAUI
TOTAL		521.734,73	239.421	491.698.309.858,44	187.885.629.685	303.812.680.173,28	625.340	392.874	BELUM TERLAMPAUI

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Sigi 2021 dalam Dokumen KLHS RPJMD

Gambar 2.13
Grafik Status Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sigi



Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Sigi 2021 dalam Dokumen KLHS RPJMD

Seperti yang terlihat di grafik, ketersediaan pangan seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi secara umum sangat mencukupi jika dibandingkan dengan kebutuhan pangan penduduk. Hal ini tercermin dari panjang bar ketersediaan pangan (warna hijau) yang secara signifikan lebih panjang daripada bar kebutuhan pangan (warna merah) di hampir semua kecamatan. Kecamatan dengan surplus ketersediaan pangan terbesar di Kecamatan Kulawi dengan ketersediaan sebesar 37.090.836.082,36 Kkal/tahun dibandingkan dengan kebutuhan sebesar 12.403.758.248 Kkal/tahun. Kecamatan Dolo memiliki ketersediaan 56.777.641.843,74 Kkal/tahun dibandingkan dengan kebutuhan sebesar 17.991.178.341 Kkal/tahun. Kecamatan Palolo memiliki ketersediaan 65.871.595.451,57 Kkal/tahun dibandingkan dengan kebutuhan sebesar 23.890.144.276 Kkal/tahun. Kecamatan dengan ketersediaan dan kebutuhan pangan paling kecil adalah Kecamatan Lindu dan Tanambulava, namun tetap menunjukkan surplus ketersediaan pangan yang signifikan. Semua kecamatan di Kabupaten Sigi masih berada pada status “Belum Terlampaui”, yang berarti ketersediaan pangan mencukupi dan tidak ada indikasi defisit.

Kabupaten Sigi memiliki daya dukung penyediaan pangan yang sangat memadai, dengan total ketersediaan pangan sebesar 491.698.309.858,44 Kkal/tahun untuk mencukupi kebutuhan 625.340 jiwa, sementara jumlah penduduk hanya sekitar 239.421 jiwa (pada tahun 2021). Ini menunjukkan adanya surplus daya dukung pangan sebesar 392.874 jiwa. Potensi pangan terbesar didukung oleh lahan pertanian luas di kecamatan-kecamatan seperti Kecamatan Kulawi, Pipikoro, dan Palolo. Hal ini menunjukkan bahwa produksi pangan lokal yang mendukung ketahanan pangan daerah.

- b. **Jasa Lingkungan Penyedia Air**
Jasa lingkungan memberikan manfaat penyedia air yaitu ketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Jasa penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*akuifer*) serta faktor yang dapat

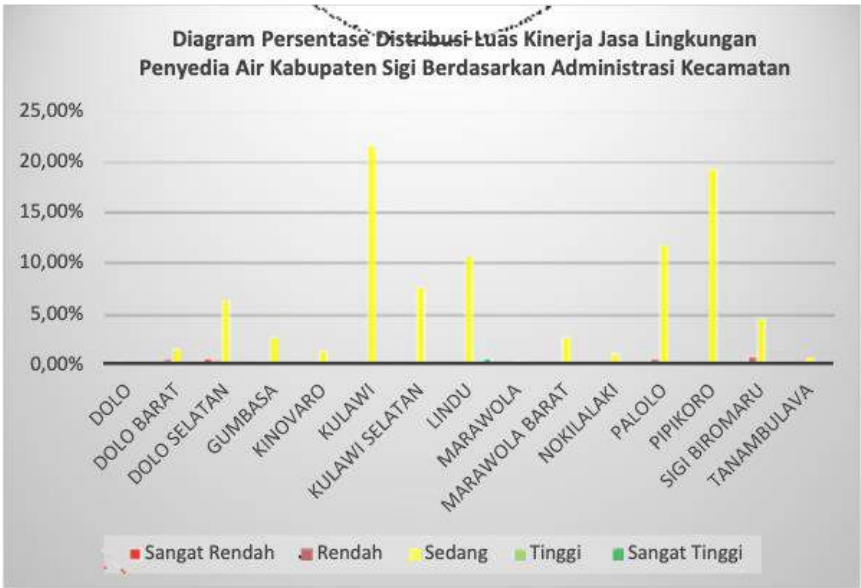
mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutupan lahan.

Tabel 2.19
Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Kec. Dolo	1.201,45	0,23	1.861,04	0,36	500,64	0,1	7,74	0	30,44	0,01	3.601,32	0,69
Kec. Dolo Barat	705,55	0,14	2.648,29	0,51	8.364,57	1,6	353,76	0,07	20,27	0	12.092,44	2,32
Kec. Dolo Selatan	2.788,54	0,53	2.437,79	0,47	33.341,01	6,39	719,17	0,14	9,42	0	39.295,92	7,53
Kec. Gumbasa	800,28	0,15	1.690,10	0,32	14.352,67	2,75	149,07	0,03	61,74	0,01	17.053,86	3,27
Kec. Kinovaro	0	0	370,03	0,07	7.199,63	1,38	119,99	0,02	32,86	0,01	7.722,51	1,48
Kec. Kulawi	8,15	0	434,72	0,08	112.194,79	21,5	9,62	0	313,02	0,06	112.960,30	21,7
Kec. Kulawi Selatan	0	0	1.092,40	0,21	39.909,05	7,65	0	0	147,11	0,03	41.148,56	7,89
Kec. Lindu	0	0	66,6	0,01	55.642,34	10,7	0	0	3.487,57	0,67	59.196,51	11,3
Kec. Marawola	0	0	1.353,94	0,26	1.875,08	0,36	520,5	0,1	29,05	0,01	3.778,57	0,72
Kec. Marawola Barat	0	0	2,22	0	14.364,33	2,75	0	0	9,31	0	14.375,87	2,76
Kec. Nokilalaki	0	0	1.494,12	0,29	5.844,29	1,12	0	0	55,36	0,01	7.393,77	1,42
Kec. Palolo	83,77	0,02	3.435,51	0,66	61.625,96	11,8	8,61	0	110,69	0,02	65.264,54	12,5
Kec. Pipikoro	0	0	460,91	0,09	100.531,72	19,3	0	0	265,55	0,05	101.258,17	19,4
Kec. Sigi Biromaru	1.727,65	0,33	4.678,31	0,9	24.035,85	4,61	448,13	0,09	58,33	0,01	30.948,26	5,93
Kec. Tanambulava	430	0,08	1.060,87	0,2	3.888,84	0,75	260,95	0,05	3,47	0	5.644,14	1,08
Total	7.745,38	1,48	23.086,85	4,43	483.670,78	92,7	2.597,54	0,5	4.634,19	0,89	521.734,73	100

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Sigi 2021 dalam Dokumen KLHS RPJMD

Gambar 2.14
Diagram Presentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Sigi Berdasarkan Administrasi Kecamatan



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

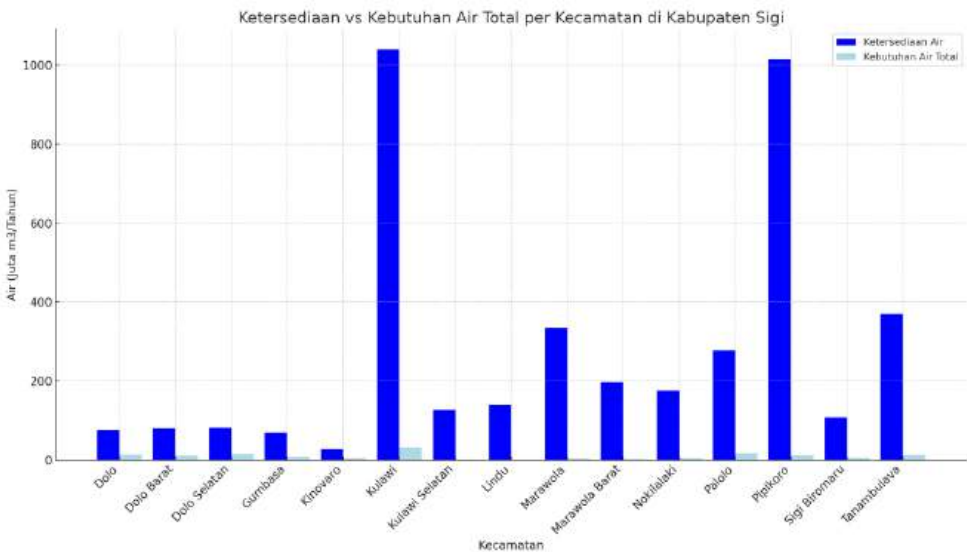
secara umum kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan ekosistem penyedia air di Kabupaten Sigi berada di rentang kelas berpotensi Sedang dengan luas 92,70%. Kelas dengan potensi Rendah (sangat rendah-rendah) seluas 5,91% dan berpotensi Tinggi (tinggi-sangat tinggi) hanya seluas 1,39% dari total luas Kabupaten Sigi. Kelas berpotensi Sedang dalam memberikan layanan ekosistem penyedia air tersebar di seluruh Kecamatan namun luas dominan berada di Kecamatan Kulawi dengan luas 21,5%, Kecamatan Pipikoro dengan luas 19,3% dan Kecamatan Palolo dengan luas 11,8%. Sementara itu sebesar 5,91% luas wilayah yang berpotensi Rendah (sangat rendah-rendah) di Kabupaten Sigi terdistribusi dominan di Kecamatan Sigi Biromaru seluas 1,23% dan di Dolo Selatan seluas 1,00%. Untuk kelas berpotensi Tinggi (tinggi-sangat tinggi) dalam memberikan layanan penyedia air hanya seluas 1,39% dan terdistribusi dominan di Kecamatan Lindu seluas 0,67% dan di Kecamatan Dolo Selatan dengan luas 0,14% dari total luas total wilayah Kabupaten Sigi.

Tabel 2.20
Status Penyedia Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan

KECAMATAN	MODEL DENSITAS POPULASI SISTEM GRID		KETERSEDIAAN AIR	KEBUTUHAN AIR UNTUK LAHAN	KEBUTUHAN AIR UNTUK DOMESTIK	KEBUTUHAN AIR TOTAL	SELISIH	AMBANG BATAS PENDUDUK	SELISIH AMBANG BATAS	KETERANGAN
	LUAS (Ha)	PENDUDUK (Jiwa)	(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(Jiwa)	(Jiwa)	
Kec. Dolo	3.601	22.926	74.950.406	10.801.668	1.980.806	12.782.475	62.167.932	74.450.328	74.404.518	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Dolo Barat	12.092	14.008	73.950.302	9.572.742	1.210.291	10.783.034	63.167.268	73.507.084	73.479.132	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Dolo Selatan	39.296	16.083	806.604.482	13.489.299	1.389.571	14.878.870	791.725.611	805.979.941	805.947.637	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Gumbasa	17.054	13.011	836.022.555	6.881.812	1.124.150	8.005.962	828.016.593	835.703.869	835.677.849	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Kinovaro	7.723	10.541	26.925.083	3.929.254	910.742	4.839.996	22.085.087	26.743.129	26.722.139	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Kulawi	112.960	15.806	1.039.505.731	31.628	1.365.638	1.397.266	1.038.108.465	1.039.505.479	1.039.474.179	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Kulawi Selatan	41.149	9.436	125.317.665	443.849	815.270	1.259.120	124.058.546	125.297.870	125.279.092	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Lindu	59.197	5.254	14.003.424.482	221.898	453.946	675.843	14.002.748.639	109.373.879	109.363.363	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Marawola	3.779	23.356	335.535.815	7.734.416	2.017.958	9.752.374	325.783.440	335.177.738	335.130.974	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Marawola Barat	14.376	7.097	97.136.458	1.220.353	613.181	1.833.534	95.302.924	97.079.997	97.065.713	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Nokilalaki	7.394	6.262	1.748.997.893	5.428.456	541.037	5.969.492	1.743.028.400	1.748.746.592	1.748.734.112	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Palolo	65.265	30.443	276.249.901	5.188.419	2.630.275	7.818.694	268.431.207	276.009.407	275.948.409	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Pipikoro	101.258	8.716	275.995.767	665.656	753.062	1.418.719	274.577.048	275.966.965	275.949.415	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Sigi Biromaru	30.948	47.709	10.753.158.138	44.755.353	4.122.058	48.877.411	10.704.280.727	545.509.341	545.413.891	BELUM TERLAMPAUI
Kec. Tanambulava	5.644	8.773	369.064.041	11.172.545	757.987	11.930.532	357.133.509	368.546.789	368.529.261	BELUM TERLAMPAUI
Total	521.735	239.421	30.842.838.718	121.537.348	20.685.974	142.223.322	30.700.615.396	6.737.598.408	6.737.119.684	BELUM TERLAMPAUI

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Sigi 2021 dalam Dokumen KLHS RPJMD

Gambar 2.15
Status Penyedia Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan
Kabupaten Sigi



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

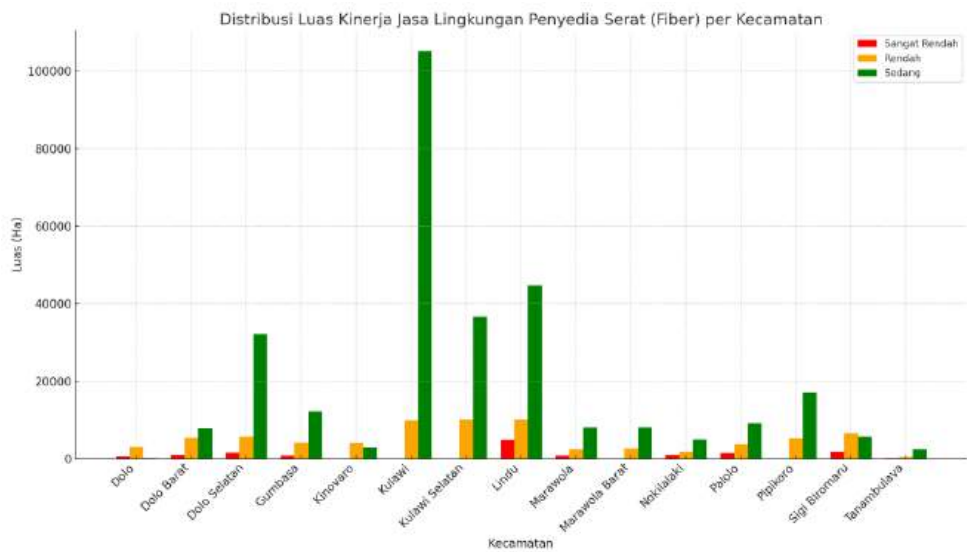
Ketersediaan air di seluruh kecamatan Kabupaten Sigi secara umum sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk lahan maupun kebutuhan domestik masyarakat. Hampir semua kecamatan menunjukkan selisih yang sangat besar antara ketersediaan air (warna biru) dan kebutuhan air total (warna biru muda) dalam grafik, menunjukkan surplus daya dukung yang signifikan. Kecamatan dengan ketersediaan air tertinggi yaitu Kecamatan Kulawi ketersediaan mencapai ±1,04 miliar m³/tahun, jauh di atas kebutuhan total 31 juta m³/tahun. Kecamatan Pipikoro dengan ketersediaan ±1,02 miliar m³/tahun dengan kebutuhan

hanya ±11 juta m³/tahun. Kecamatan Palolo dengan ketersediaan ±276 juta m³/tahun dengan kebutuhan hanya ±17 juta m³/tahun. Kecamatan dengan ketersediaan air terendah adalah Tanambulava, namun tetap memiliki surplus besar terhadap kebutuhan.

Total ketersediaan air Kabupaten Sigi mencapai 30,84 miliar m³/tahun, sementara total kebutuhan air hanya 142,92 juta m³/tahun, menghasilkan surplus luar biasa sebesar 30,70 miliar m³/tahun. Semua kecamatan dinyatakan "Belum Terlampaui", artinya kapasitas daya dukung penyediaan air masih sangat mencukupi bahkan untuk proyeksi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi di masa depan. Meskipun ketersediaan air tinggi, persebaran air tidak merata. Beberapa wilayah dengan topografi pegunungan (Kulawi, Pipikoro, Lindu) memiliki potensi air yang melimpah, tetapi akses fisik terhadap air bersih tetap menjadi tantangan.

- c. Jasa Lingkungan Penyedia Serat (*Fiber*)
Serat (*fiber*) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam serat tumbuhan /serat pangan, serat kayu, serat hewan, dan serat mineral seperti logam dan karbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta *bio-chemical*.

Gambar 2.16
Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Serat (*Fiber*) berdasarkan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sigi



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

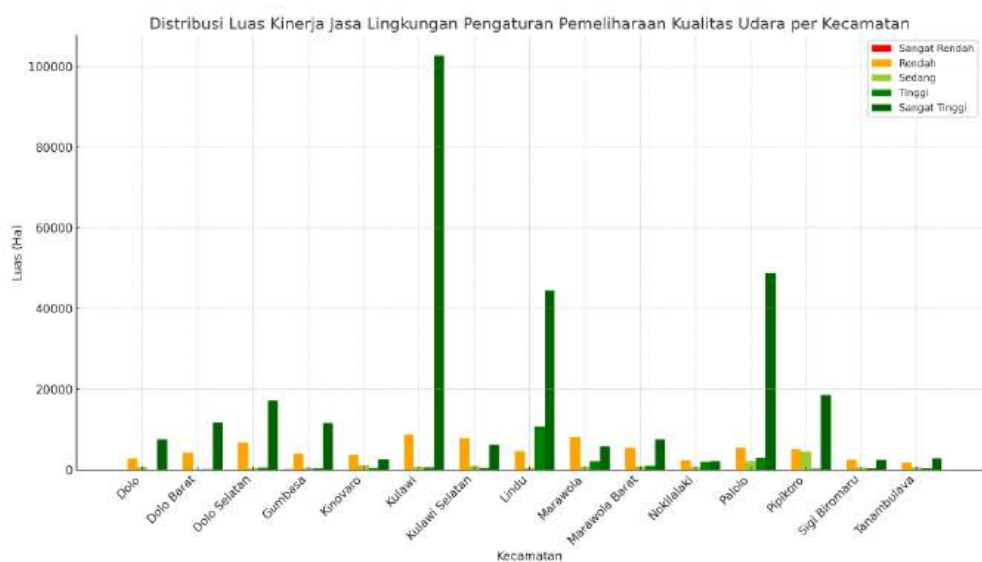
Sebagian besar wilayah di Kabupaten Sigi berada dalam kategori Kinerja "Sedang" (warna hijau). Kategori ini mendominasi luas lahan penyedia serat, mencakup sekitar 79,12% dari total luas lahan (sekitar 412.810,92 Ha dari 521.734,73 Ha). Kecamatan dengan luas kategori "Sedang" terbesar adalah Kecamatan Kulawi (105.138,10 Ha) dengan proporsi signifikan terhadap total luasan kategori sedang. Kecamatan Lindu (44.696,29 Ha) dan Kulawi Selatan (36.582,41 Ha) juga memiliki luasan signifikan. Kecamatan dengan kategori "Rendah" yang mencolok di antaranya Kecamatan Kulawi (9.841,30 Ha), Kulawi Selatan (10.179,06 Ha), Lindu

(10.179,06 Ha). Kategori “Sangat Rendah” relatif kecil, mendominasi di beberapa kecamatan seperti Lindu (4.821,16 Ha) dan Palolo (1.390,54 Ha). Beberapa kecamatan dengan total luasan penyedia serat terbatas seperti Kecamatan Tanambulava dan Kinovaro, menunjukkan keterbatasan kapasitas ekosistem penyedia serat di wilayah ini.

Wilayah Pegunungan dan Hulu (Kulawi, Lindu, Pipikoro, Palolo) mendominasi kategori “Sedang”, mencerminkan potensi tinggi untuk konservasi dan produksi bahan serat alam (misalnya rotan, bambu, dan hasil hutan bukan kayu). Wilayah Dataran Rendah (Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat) cenderung memiliki proporsi luas yang lebih kecil dan dominasi kategori “Sangat Rendah” atau “Rendah”. Keterbatasan di wilayah seperti Tanambulava dan Kinovaro menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap perlindungan vegetasi dan pemulihan fungsi ekosistem.

2. Jasa Lingkungan Pengatur (*Regulating*)
- Jasa lingkungan pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem. Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia.
- a. Jasa Lingkungan Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara
- Secara alamiah jasa lingkungan ini memiliki fungsi yang erat dengan jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan 40 karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan.

Gambar 2.17
Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sigi



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

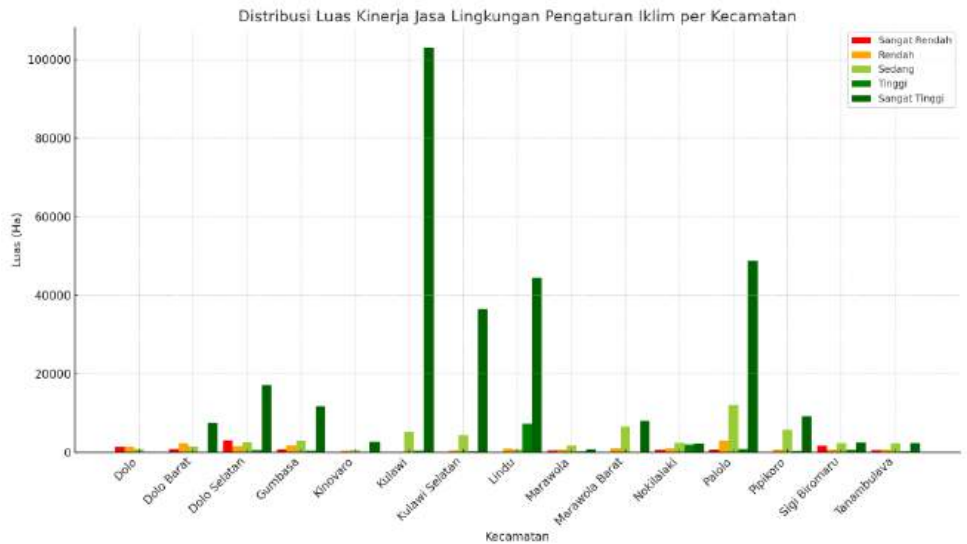
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi memiliki kelas kinerja jasa lingkungan kualitas udara pada kategori "Sangat Tinggi" (warna hijau tua). Hal ini menunjukkan kapasitas wilayah yang besar dalam menjaga dan mengatur kualitas udara. Kecamatan dengan luasan kategori "Sangat Tinggi" terbesar adalah Kecamatan Kulawi dengan luas ±102.654,95 Ha (19,68% total luas kabupaten). Kecamatan Lindu dengan luas ±44.388,90 Ha. Kecamatan Palolo dengan luas ±48.780,93 Ha. Kecamatan Pipikoro dengan luas

±18.578,18 Ha. Kategori "Tinggi" (warna hijau muda) juga tersebar cukup merata di hampir semua kecamatan, mendukung peran ekologis dalam pemeliharaan kualitas udara. Kategori "Sedang", "Rendah", dan "Sangat Rendah" memiliki luas lahan yang jauh lebih kecil, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Sigi memiliki potensi pengaturan kualitas udara yang baik.

Wilayah pegunungan seperti Kecamatan Kulawi, Lindu, Palolo, Pipikoro mendominasi kelas "Sangat Tinggi". Hal ini menunjukkan peran penting kawasan hulu dan konservasi dalam penyediaan kualitas udara yang baik melalui ekosistem hutan dan vegetasi alami. Wilayah dataran rendah (Dolo, Dolo Barat, Dolo Selatan) didominasi oleh kategori "Rendah" hingga "Sedang", yang mencerminkan keterbatasan dalam fungsi ekologis untuk kualitas udara. Wilayah dengan kelas "Sangat Rendah" sangat terbatas, seperti di Dolo (12,99 Ha), Dolo Selatan (79,57 Ha), Gumbasa (157,97 Ha).

- b. Jasa Lingkungan Pengatur Iklim
- Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor -faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Kapasitas ekosistem untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer, pada kawasan bervegetasi dan pada daerah yang memiliki topografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.

Gambar 2.18
Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Sigi



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

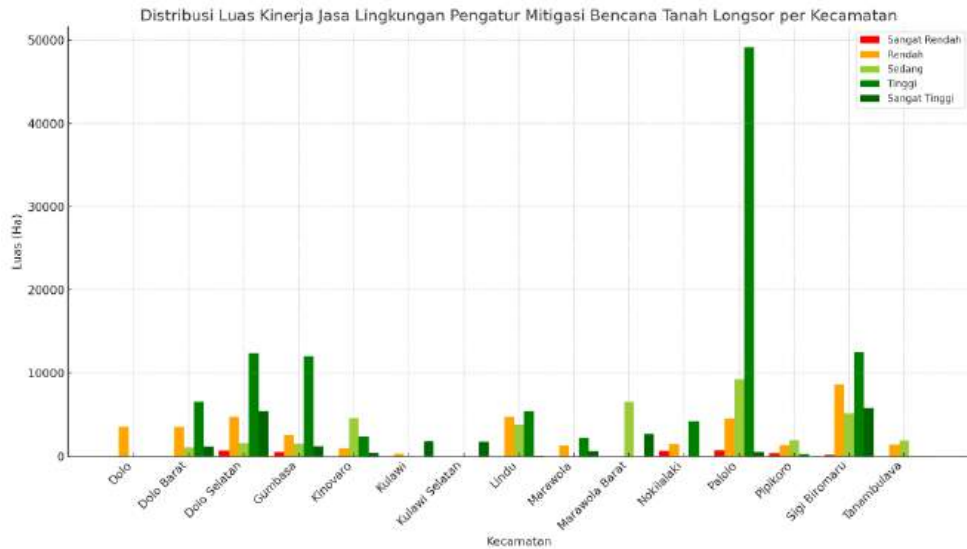
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi memiliki kategori kinerja "Sangat Tinggi" dalam pengaturan iklim, yang mencakup sekitar 77,87% total luas lahan di Kabupaten Sigi (sekitar 406.255,76 Ha). Kecamatan dengan luasan kategori "Sangat Tinggi" terbesar yaitu Kecamatan Kulawi dengan 102.967,73 Ha (19,74% total luas Kabupaten Sigi), Kecamatan Lindu dengan 44.388,90 Ha, Kecamatan Palolo dengan 48.780,93 Ha, Kecamatan Pipikoro dengan 91.557,66 Ha, Kecamatan Marawola dengan 57.269,44 Ha. Kecamatan Kulawi Selatan dan Sigi Biromaru juga memiliki kontribusi signifikan dalam kategori "Sangat Tinggi". Kategori

"Sedang" dan "Tinggi" hanya mencakup sebagian kecil wilayah. Luasan terbesar kategori "Sedang" ada di Kecamatan Palolo (12.094,29 Ha), Kecamatan Marawola Barat (6.573,12 Ha), Kecamatan Lindu (7.269,44 Ha). Kategori "Sangat Rendah" dan "Rendah" memiliki luasan paling kecil, menunjukkan bahwa secara umum, kapasitas pengaturan iklim di Kabupaten Sigi tergolong baik.

Wilayah pegunungan dan hutan (Kulawi, Lindu, Pipikoro, Palolo) mendominasi kategori "Sangat Tinggi". Hal ini mencerminkan peran penting kawasan ini dalam penyimpanan karbon, regulasi suhu mikro, stabilisasi iklim lokal dan regional. Wilayah dataran rendah seperti Dolo, Dolo Barat, Dolo Selatan, Gumbasa cenderung memiliki luasan kategori "Sangat Rendah" dan "Rendah" lebih besar, menandakan keterbatasan kapasitas ekologis untuk pengaturan iklim akibat tingginya aktivitas pemanfaatan lahan, pemukiman, dan tekanan pembangunan. Kategori "Sedang" sebagai zona transisi, terutama di wilayah Palolo, Marawola Barat, dan Marawola, menunjukkan potensi kawasan yang perlu dioptimalkan dengan strategi restorasi dan konservasi.

- c. **Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor**
Ruang lingkup jasa pengaturan mitigasi bencana longsor adalah ekosistem yang didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya tanah longsor. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor atau pergerakan tanah. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana alam.

Gambar 2.19
Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Sigi



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

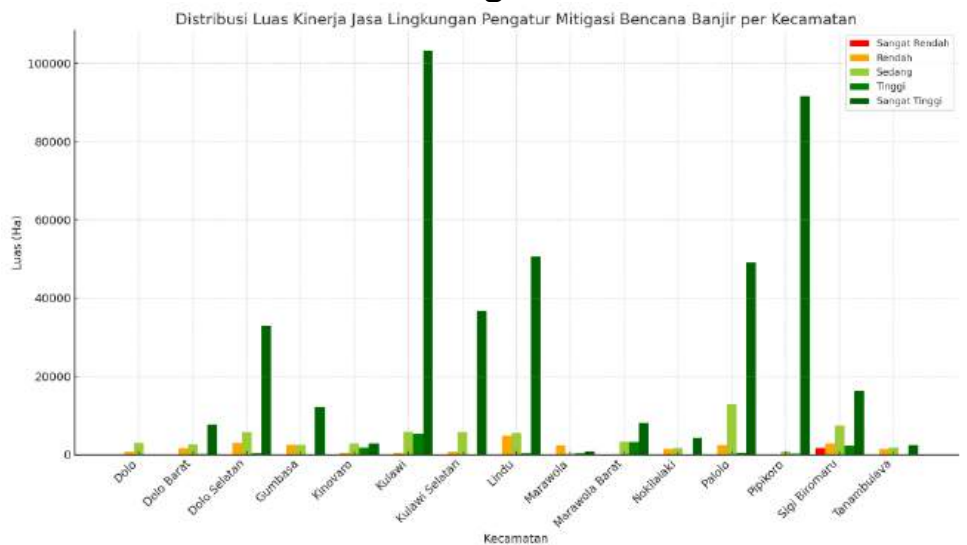
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi memiliki kinerja "Tinggi" dan "Sangat Tinggi" dalam mitigasi bencana tanah longsor. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan memiliki kemampuan ekologis yang baik dalam mengurangi risiko longsor. Kategori "Sangat Tinggi" mendominasi di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kulawi (102.967,73 Ha), Palolo (48.780,93 Ha), Lindu (44.388,90 Ha), Pipikoro (91.557,66 Ha), Sigi Biromaru (5.807,93 Ha), Dolo Selatan (5.411,19 Ha). Kategori "Tinggi" juga signifikan, terutama di Kecamatan Palolo (49.169,41 Ha), Dolo

Selatan (12.405,59 Ha), Gumbasa (12.045,59 Ha), dan Sigi Biromaru (12.559,80 Ha). Kategori "Rendah" dan "Sangat Rendah" lebih terbatas, tersebar di wilayah seperti Kecamatan Dolo Selatan, Nokilalaki, Tanambulava untuk "Sangat Rendah". Kecamatan Dolo, Dolo Barat, Lindu, dan Palolo untuk "Rendah".

Wilayah Pegunungan dan Hulu (Kulawi, Lindu, Palolo, Pipikoro) menunjukkan peran penting sebagai kawasan penyangga mitigasi bencana longsor, dengan dominasi kelas kinerja "Sangat Tinggi". Wilayah dataran rendah seperti Dolo, Dolo Barat, Gumbasa lebih dominan di kelas "Rendah" dan "Sedang", menunjukkan kerentanan lebih tinggi terhadap longsor akibat keterbatasan kapasitas ekologis. Kecamatan dengan dominasi kelas "Sedang" (Palolo, Marawola Barat) perlu diperhatikan sebagai kawasan transisi yang masih perlu diperkuat fungsinya untuk mitigasi.

- d. **Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir**
Fungsi ekosistem yang didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir di hilir. Selain itu bentuklahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan fluvial.

Gambar 2.20
Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Berdasarkan Administrasi Kabupaten Sigi



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

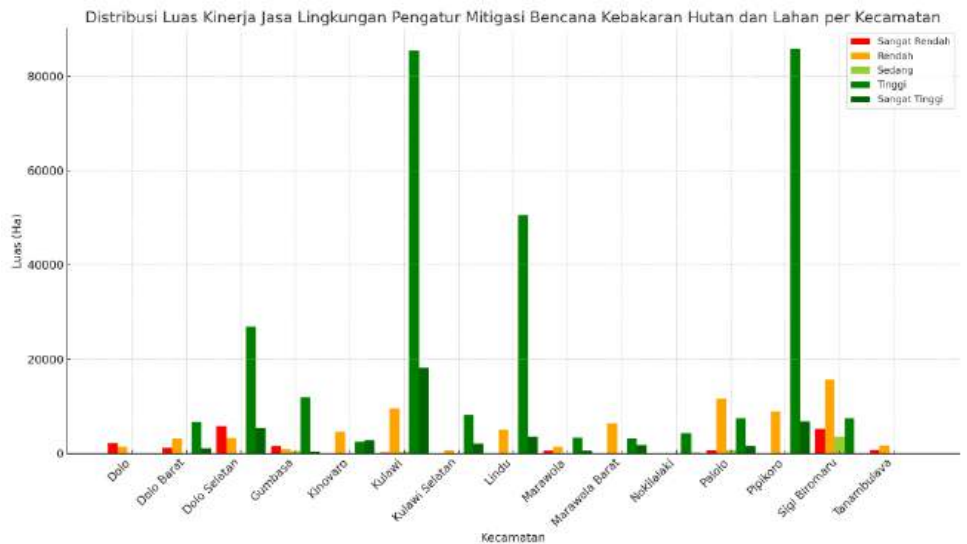
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi memiliki kinerja "Sangat Tinggi" dalam mitigasi bencana banjir. Kategori ini mendominasi luasan di beberapa kecamatan, menunjukkan peran ekologis yang besar dalam meredam potensi bencana banjir. Kecamatan dengan luasan kategori "Sangat Tinggi" terbesar adalah Kecamatan Kulawi: ±103.281,79 Ha (19,8% total luas Kabupaten Sigi), Kulawi Selatan: ±36.653,70 Ha, Lindu: ±50.658,98 Ha, Pipikoro: ±91.623,27 Ha, Sigi Biromaru: ±16.502,35 Ha, Palolo: ±49.601,88 Ha. Kategori "Tinggi" juga signifikan, dengan kecamatan-kecamatan seperti Kecamatan Dolo Selatan: ±393,99 Ha, Gumbasa: ±45,86 Ha, Palolo: ±511,33 Ha, dan Sigi Biromaru: ±2199,09 Ha. Kategori "Sedang" tersebar merata di banyak kecamatan, dengan luasan bervariasi sebagai zona transisi kapasitas mitigasi banjir. Kecamatan seperti

Palolo, Kulawi Selatan, Gumbasa, dan Dolo Selatan menunjukkan luasan kategori ini yang cukup signifikan. Kategori "Rendah" dan "Sangat Rendah" memiliki luasan kecil, yang menunjukkan sebagian kecil wilayah dengan kapasitas mitigasi banjir terbatas. Kategori ini paling banyak terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru ($\pm 1.686,84$ Ha untuk "Sangat Rendah"), Dolo Barat, Dolo Selatan, Gumbasa (untuk "Rendah").

Wilayah Pegunungan dan Hulu (Kulawi, Lindu, Pipikoro, Palolo) mendominasi kategori "Sangat Tinggi", mencerminkan pentingnya fungsi kawasan hulu sebagai penyangga bencana banjir. Wilayah dataran rendah dan berkembang (Dolo, Dolo Barat, Gumbasa, Sigi Biromaru) memiliki luasan "Rendah" dan "Sangat Rendah" yang lebih menonjol, menunjukkan potensi risiko banjir lebih tinggi akibat keterbatasan kapasitas ekologis. Zona transisi di kecamatan seperti Palolo dan Marawola Barat menunjukkan potensi untuk diperkuat kapasitas mitigasi melalui intervensi restorasi dan konservasi.

- e. Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran menunjukkan bahwa ekosistem yang di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dan beberapa tipe bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 2.21
Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Kebakaran hutan dan Lahan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Sigi



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

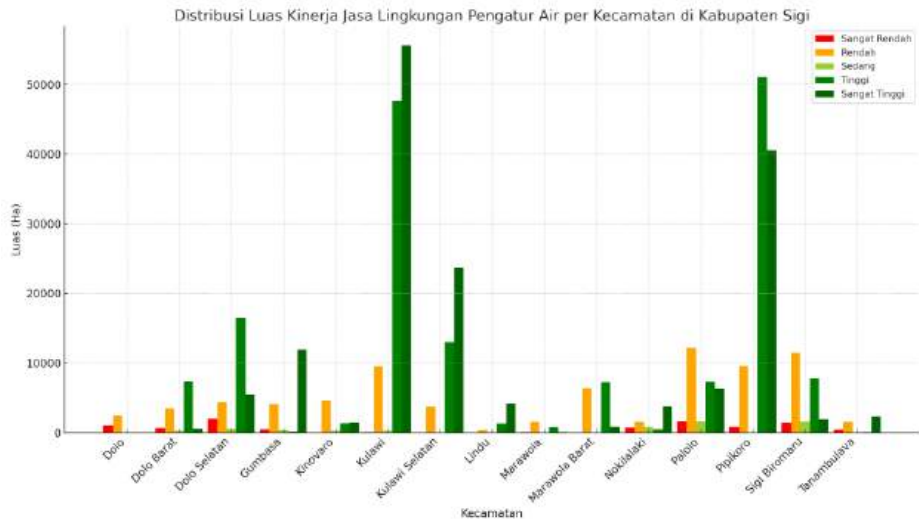
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi memiliki kategori kinerja "Tinggi" dan "Sangat Tinggi" dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Ini mencerminkan kemampuan ekologis yang cukup baik dalam mengurangi risiko kebakaran hutan di sebagian besar wilayah. Kategori "Sangat Tinggi" mendominasi di beberapa kecamatan utama, antara lain: KecamatanKulawi: $\pm 181.517,37$ Ha (34,4% total wilayah), Kulawi Selatan: $\pm 36.653,70$ Ha, Lindu: $\pm 50.589,60$ Ha, Pipikoro: $\pm 85.878,17$ Ha, Sigi Biromaru: $\pm 0,00$ Ha (tidak signifikan), dan Palolo: $\pm 15.817,37$ Ha. Kategori "Tinggi" juga mendominasi di Kecamatan Dolo Selatan: $\pm 26.858,25$ Ha, Gumbasa: $\pm 11.819,22$ Ha, Palolo: $\pm 7.428,04$ Ha, dan Pipikoro: $\pm 85.878,17$ Ha. Kategori "Sedang", "Rendah", dan "Sangat Rendah"

lebih kecil dan tersebar di beberapa kecamatan, menunjukkan sebagian kecil wilayah yang perlu ditingkatkan kapasitas mitigasinya yang paling banyak terdapat di Kecamatan Dolo Selatan: ±5.806,16 Ha, Gumbasa: ±1.608,28 Ha dan Sigi Biromaru: ±5.187,69 Ha.

Kawasan pegunungan, hutan, dan kawasan lindung (Kulawi, Lindu, Pipikoro, Palolo) memiliki kontribusi terbesar pada kelas "Tinggi" dan "Sangat Tinggi". Wilayah dataran rendah dan kawasan permukiman (Dolo, Dolo Barat, Gumbasa, Sigi Biromaru) lebih banyak memiliki kategori "Rendah" hingga "Sangat Rendah", menunjukkan kerentanan lebih tinggi terhadap risiko kebakaran akibat keterbatasan kapasitas ekologis dan tekanan aktivitas manusia. Zona transisi di kecamatan seperti Marawola, Palolo, dan Marawola Barat menunjukkan adanya potensi kawasan yang perlu diperkuat kapasitas mitigasinya melalui pengelolaan lahan berkelanjutan.

- f. Jasa Lingkungan Pengatur Air (Tata Aliran Air)
- Siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Gambar 2.22
Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Sigi



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

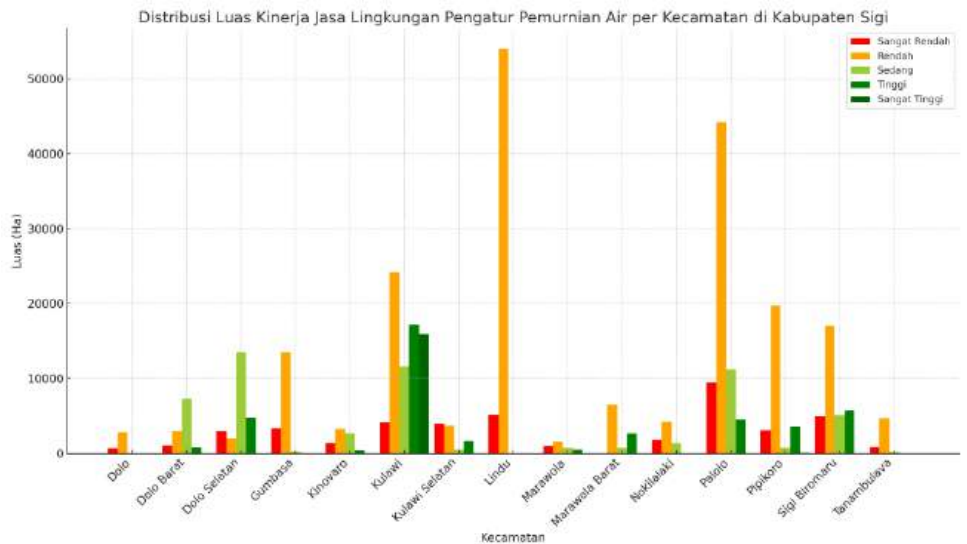
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi memiliki kategori kinerja "Tinggi" dan "Sangat Tinggi" dalam pengaturan air. Ini menunjukkan bahwa banyak kawasan yang memiliki kemampuan ekologis kuat dalam pengaturan sumber daya air untuk mendukung kehidupan dan pembangunan daerah. Kecamatan dengan luasan terbesar kategori "Sangat Tinggi" adalah Kecamatan Kulawi: ±55.595,60 Ha (10,66% total wilayah), Kulawi Selatan: ±23.658,95 Ha, Pipikoro: ±40.541,85 Ha, Lindu: ±41.516,19 Ha, Sigi Biromaru: ±16.502,35 Ha dan Palolo: ±6.267,30 Ha. Kategori "Tinggi" juga signifikan di Kecamatan Pipikoro: ±51.081,93 Ha, Palolo: ±7.322,46 Ha, Dolo Selatan: ±16.501,54 Ha, Kulawi Selatan: ±12.974,84 Ha, dan Kulawi: ±47.695,91 H. Kategori "Sedang", "Rendah", dan "Sangat Rendah" tersebar di beberapa kecamatan. Untuk kategori "Sedang" paling banyak di Kulawi, Palolo, Pipikoro,

dan Sigi Biromaru, menunjukkan potensi kawasan transisi yang perlu diperkuat. Kategori "Rendah" dan "Sangat Rendah" lebih dominan di dataran rendah seperti Dolo, Dolo Barat, Gumbasa, dan sebagian Tanambulava, yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan sumber daya air.

Wilayah hulu, konservasi, dan kawasan ekosistem penting (Kulawi, Kulawi Selatan, Lindu, Pipikoro) mendominasi kinerja tinggi dan sangat tinggi, menegaskan pentingnya kawasan ini dalam mendukung siklus hidrologi. Wilayah dataran rendah, permukiman, dan pengembangan (Dolo, Dolo Barat, Sigi Biromaru) cenderung memiliki kategori kinerja rendah, menunjukkan potensi kerentanan terhadap kekeringan, degradasi lahan, dan krisis air di masa mendatang. Kawasan transisi seperti Palolo dan Marawola Barat perlu intervensi lanjutan untuk memperkuat kapasitas ekosistemnya dalam pengaturan air.

- g. **Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air**
Ekosistem yang memiliki kemampuan untuk "membersihkan" pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

Gambar 2.23
Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Sigi



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

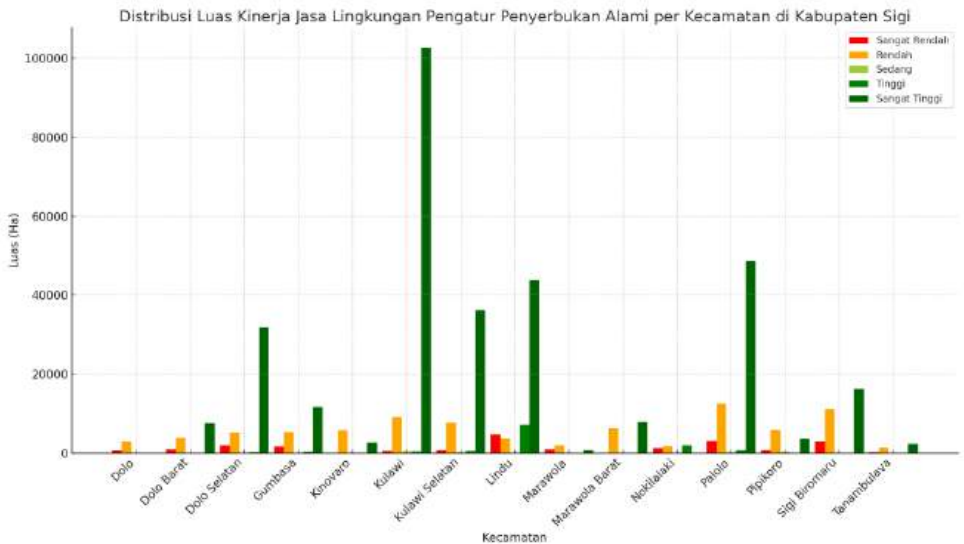
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi didominasi oleh kategori "Rendah" dan "Sedang" dalam kemampuan pemurnian air. Hal ini menunjukkan keterbatasan kapasitas ekologis di beberapa kecamatan dalam mendukung proses pemurnian air alami. Kecamatan dengan luasan kategori "Rendah" terbesar adalah Kecamatan Lindu: ±54.002,17 Ha (10,35% total wilayah Sigi), Kulawi: ±24.027,11 Ha, Palolo: ±44.150,28 Ha, Pipikoro: ±19.705,67 Ha, Sigi Biromaru: ±16.975,49 Ha. Kategori "Sedang" cukup signifikan di beberapa kecamatan Kecamatan Dolo Selatan: ±13.508,96 Ha, Kulawi: ±11.591,22 Ha, Palolo: ±11.210,15 Ha, dan Pipikoro: ±5.745,61 Ha. Kategori "Tinggi" dan "Sangat Tinggi" lebih terbatas, namun penting sebagai kawasan strategis untuk

konservasi. Kategori "Sangat Tinggi" terbesar terdapat di kecamatan Kulawi: ±15.931,87 Ha, Palolo: ±10,54 Ha dan Pipikoro: ±74,91 Ha. Kategori "Sangat Rendah" cukup luas di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Dolo Selatan: ±2.930,98 Ha, Palolo: ±9.467,45 Ha dan Sigi Biromaru: ±4.893,79 Ha.

Wilayah hulu dan konservasi (Kulawi, Kulawi Selatan, Lindu, Pipikoro) memiliki potensi lebih besar untuk pemurnian air (kategori "Tinggi" dan "Sangat Tinggi"), mendukung fungsi ekosistem sebagai penyaring alami air hujan dan air tanah. Wilayah dataran rendah dan pemukiman padat (Dolo, Dolo Barat, Sigi Biromaru) cenderung mendominasi kategori "Rendah" dan "Sangat Rendah", menunjukkan kerentanan terhadap pencemaran air dan penurunan kualitas air. Kawasan transisi di kecamatan seperti Palolo, Marawola, dan Gumbasa memiliki peran penting sebagai penyangga, namun memerlukan penguatan fungsi pemurnian melalui restorasi ekosistem.

- h. **Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami**
Penyerbukan alami (*pollination*) adalah proses penyerbukan (berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat pembantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.

Gambar 2.24
Distribusi Luas Kelas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Berdasarkan Administrasi Kabupaten Kota Kabupaten Sigi



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 (Data diolah)

Kategori "Sangat Tinggi" mendominasi sebagian besar wilayah Sigi, terutama di wilayah hulu dan kawasan konservasi. Kecamatan dengan luasan "Sangat Tinggi" terbesar di Kecamatan Kulawi: ±102.654,99 Ha (19,68% total wilayah), Kulawi Selatan: ±36.171,65 Ha, Lindu: ±43.888,91 Ha, Pipikoro: ±40.541,85 Ha, Palolo: ±48.720,89 Ha, dan Sigi Biromaru: ±16.295,29 Ha. Kategori "Tinggi" cukup signifikan di beberapa wilayah, antara lain Kecamatan Lindu: ±7.200,16 Ha, Palolo: ±818,91 Ha, Kulawi: ±313,78 Ha, dan Kulawi Selatan: ±515,16 Ha. Kategori "Sedang", "Rendah", dan "Sangat Rendah" tersebar secara merata di seluruh kecamatan,

dengan luasan yang relatif lebih kecil dibandingkan kategori "Sangat Tinggi".

Kawasan konservasi dan hulu sungai (Kulawi, Kulawi Selatan, Lindu, Pipikoro, Palolo) merupakan penyumbang terbesar untuk kategori "Sangat Tinggi", yang mencerminkan pentingnya wilayah ini sebagai pusat keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem untuk proses penyerbukan alami. Wilayah dataran rendah dan padat penduduk (Dolo, Dolo Barat, Sigi Biromaru) didominasi kategori "Rendah" dan "Sangat Rendah", menunjukkan keterbatasan dalam mendukung proses penyerbukan alami akibat degradasi ekosistem, perubahan penggunaan lahan, dan aktivitas manusia. Wilayah transisi seperti Gumbasa dan Palolo memiliki potensi sedang hingga tinggi, yang penting untuk diperkuat sebagai zona penyangga antara kawasan konservasi dan kawasan terbangun.

Secara umum, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Sigi menunjukkan kondisi yang belum melampaui batas kemampuan lingkungan, namun terdapat ketimpangan distribusi kemampuan ekosistem antar wilayah kecamatan. Sebagian besar wilayah dengan fungsi ekosistem tinggi berada di kawasan konservasi, hulu sungai, dan kawasan berhutan di kecamatan seperti Kulawi, Kulawi Selatan, Lindu, Pipikoro, dan Palolo, yang mendominasi kategori "Sangat Tinggi" pada aspek pemurnian air, pengaturan air, penyerbukan alami, hingga mitigasi bencana (banjir, longsor, kebakaran). Sebaliknya, wilayah dataran rendah dan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Dolo, Dolo Barat, dan Sigi Biromaru, cenderung memiliki kategori "Rendah" dan "Sangat Rendah", menunjukkan keterbatasan kapasitas ekosistem dalam mendukung pembangunan.

Jika ditelaah lebih dalam dengan pendekatan 4 aspek pembangunan, permasalahan daya dukung dan daya tampung di Kabupaten Sigi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi masih sangat bergantung pada pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- Pemanfaatan lahan untuk aktivitas ekonomi belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas ekosistem, sehingga terjadi tekanan pada kawasan lindung, sempadan sungai, dan lahan produktif.
- Pola pemanfaatan ruang yang belum optimal menyebabkan ketergantungan ekonomi jangka pendek, namun berpotensi menurunkan kapasitas daya dukung jangka panjang, seperti penurunan kualitas air, risiko banjir, dan degradasi lahan.

b. Aspek Sosial

- Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan masih terbatas, terutama di wilayah permukiman padat.
- Akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah masih belum merata, menyebabkan peningkatan beban pencemaran di kawasan "Rendah" dan "Sangat Rendah".
- Ketimpangan antar wilayah terlihat jelas: wilayah hulu (konservasi) mendukung kehidupan masyarakat sekitar, sementara wilayah hilir menjadi wilayah dengan daya tampung rendah akibat aktivitas manusia.

c. Aspek Lingkungan

- Kondisi lingkungan di wilayah hulu cenderung masih terjaga dengan fungsi ekosistem yang kuat (penyerbukan, pemurnian air, mitigasi bencana).
- Namun, terdapat ancaman serius berupa fragmentasi habitat akibat alih fungsi lahan, degradasi kualitas air akibat sedimentasi, limbah, dan perubahan penggunaan lahan, dan risiko bencana hidrometeorologi yang meningkat seiring dengan keterbatasan daya tampung di wilayah hilir.
- Wilayah dengan kategori "Sangat Rendah" dan "Rendah" menunjukkan keterbatasan kemampuan alam untuk menyerap tekanan pembangunan, sehingga memerlukan upaya pemulihan.

d. Aspek Kelembagaan

- Kelembagaan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sigi belum terintegrasi secara optimal dalam perencanaan pembangunan wilayah.
- Keterbatasan kapasitas kelembagaan terlihat dari belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, keterbatasan data dan pemetaan kapasitas ekosistem, kurangnya insentif dan regulasi yang mendukung perlindungan kawasan strategis ekosistem.
- Mekanisme koordinasi antar-sektor (ekonomi, sosial, lingkungan) juga masih lemah, sehingga kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berbasis pada prinsip keberlanjutan lingkungan.

D. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Kondisi energi, air, dan pangan di Kabupaten Sigi perlu dipahami sebagai satu sistem yang saling terhubung yang secara umum dikenal sebagai Nexus Energi-Air-Pangan (*Water-Energy-Food/Nexus WEF*). Keterkaitan erat ketiga sektor ini menentukan ketahanan wilayah, keberlangsungan hidup masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Nexus ini sangat penting bagi keberlanjutan di Kabupaten Sigi karena tanpa air yang cukup, maka aktivitas pertanian dapat mengalami kegagalan dan energi dari mikrohidro terganggu. Tanpa energi, air tidak bisa dipompa/diolah dan pangan sulit dihasilkan dan didistribusikan. Begitu pula tanpa pangan yang cukup, maka ketahanan sosial terganggu dan daya dukung wilayah menurun.

1. Air sebagai sumber kehidupan dan penopang Pangan & Energi

Kabupaten Sigi memiliki sumber daya air yang relatif melimpah dari sungai dan mata air pegunungan (seperti Sungai Palu dan Sungai Miu). Namun, ketersediaan dan distribusi air masih menghadapi tantangan akibat perubahan iklim, deforestasi, dan kerusakan infrastruktur pasca-gempa 2018.

• Keterkaitan:

- Pangan: Air sangat vital untuk irigasi sawah dan hortikultura yang dominan di Sigi.
- Energi: Sumber air potensial untuk mikrohidro, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

2. Pangan sebagai kebutuhan dasar dan penopang stabilitas Sosial

Kabupaten Sigi dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Tengah, terutama untuk padi, jagung, dan hortikultura. Namun, tantangan seperti akses pasar, infrastruktur pertanian terbatas, serta kerentanan terhadap bencana alam (banjir, kekeringan, gempa) menghambat keberlanjutan produksi pangan.

• Keterkaitan:

- Air: Pertanian sangat tergantung pada pengelolaan air (irigasi teknis, tadah hujan).

- Energi: Kebutuhan energi untuk pengolahan hasil, irigasi pompa, dan penyimpanan dingin.
3. Energi sebagai pendorong aktivitas ekonomi dan ketahanan sistem
- Akses listrik cukup merata, tetapi sebagian wilayah pedalaman masih mengandalkan sumber energi alternatif. Potensi energi baru terbarukan (EBT) seperti mikrohidro dan surya cukup besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan investasi dan teknologi.
- Keterkaitan:
 - Pangan: Energi dibutuhkan untuk pasca panen, penggilingan padi, dan transportasi hasil.
 - Air: Energi penting untuk sistem pompa air dan pengolahan air bersih.

Adapun berdasarkan data Cadangan pangan pemerintah yang merupakan instrumen penting dalam menjamin ketersediaan pangan terutama dalam kondisi darurat, bencana, maupun saat terjadi gangguan distribusi pangan. Penyaluran cadangan pangan dilakukan baik oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan daerah. Selama periode 2020–2024, penyaluran cadangan pangan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika kebutuhan pangan darurat di tingkat lokal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga berperan aktif dalam mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Sigi. Data penyaluran cadangan pangan oleh Pemerintah Provinsi di Sigi menunjukkan tren yang menurun drastis di awal, kemudian berfluktuasi. Secara umum, tren penyaluran sebagai berikut.

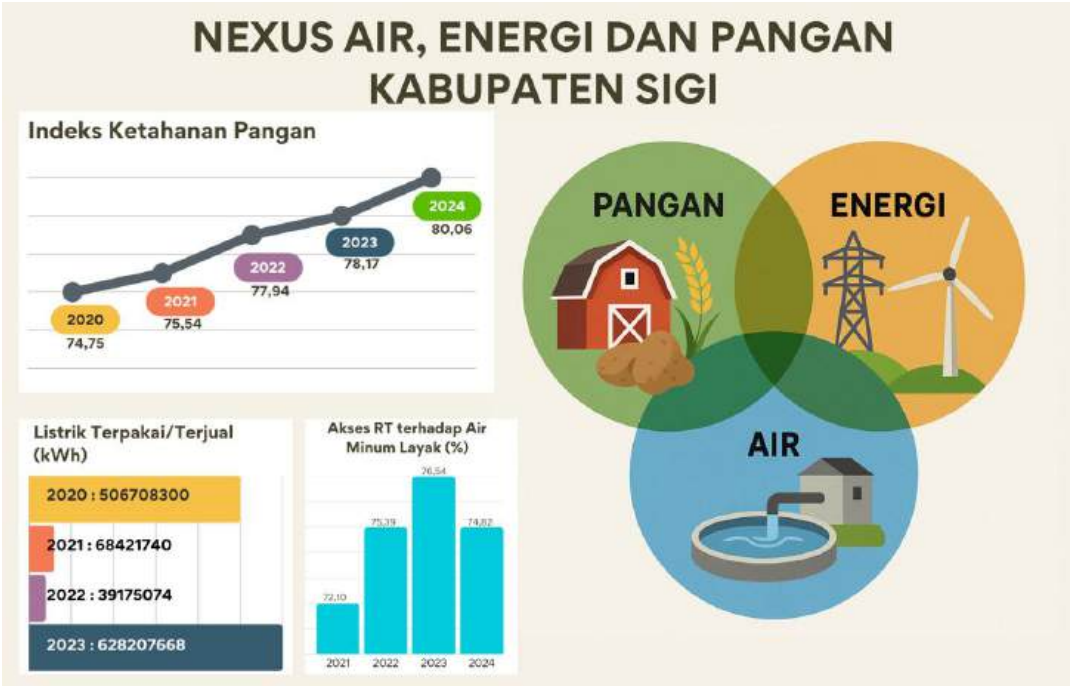
Gambar 2.25
Jumlah Cadangan Pangan Periode 2020-2024 Kabupaten Sigi



Sumber : DKPP Kabupaten Sigi, 2025 (Data diolah)

Data penyaluran cadangan pangan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi secara konsisten melakukan penyaluran dengan fluktuasi yang moderat, menunjukkan peran aktif dalam menjaga stabilitas pangan lokal. Pemerintah Provinsi cenderung melakukan intervensi yang besar pada awal periode (2020) dan bersifat responsif terhadap kondisi darurat. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan penyaluran dari kedua pihak, yang dapat diasumsikan sebagai respons terhadap kejadian luar biasa atau peningkatan jumlah warga yang membutuhkan bantuan pangan. Tahun 2024 menunjukkan tren penurunan penyaluran dari Pemda Sigi dan stabilisasi dari Pemprov, yang bisa diartikan sebagai tanda perbaikan kondisi ketahanan pangan di masyarakat.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang memiliki tujuan untuk mengukur kondisi ketahanan pangan berdasarkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan serta keterkaitannya dengan Nexus Air Energi Pangan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Ketahanan energi, air, dan pangan adalah prasyarat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Ketiganya saling terkait dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan ketahanan sosial-ekonomi, serta perlindungan lingkungan di Kabupaten Sigi. Berikut grafik indeks ketahanan pangan (IKP), Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU), Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak, dan Listrik Terpakai/Terjual.

Gambar 2.26
Indeks Ketahanan Pangan Pangan Kabupaten Sigi



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sigi menunjukkan tren meningkat secara konsisten dalam lima tahun terakhir, dari 74,75 pada tahun 2020 menjadi 80,06 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam tiga dimensi utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, yang menunjukkan peningkatan hasil pertanian lokal dan distribusi logistik. Aksesibilitas pangan, yang turut didorong oleh

infrastruktur dasar dan pasar desa. Stabilitas pasokan, meskipun masih terdapat potensi gangguan akibat bencana.

Gambar 2.27
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Sigi



Sumber : Publikasi BPS, 2025

Data PoU menunjukkan tren naik pada awal periode, yaitu dari 10,66% (2020) meningkat menjadi 14,12% pada 2022, sebelum menurun ke 12,6% pada 2024. Kenaikan PoU pada tahun-tahun awal terjadi meskipun IKP meningkat, menunjukkan adanya *mismatch* antara ketahanan pangan makro dan akses konsumsi pangan mikro.

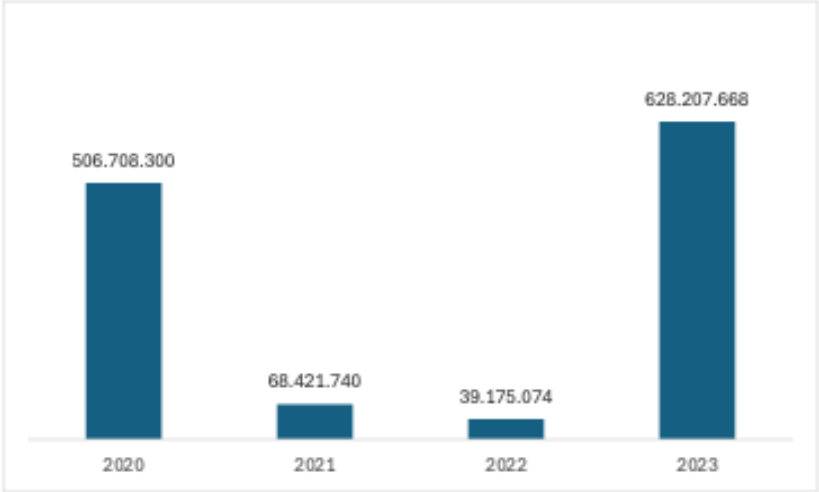
Gambar 2.28
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Kabupaten Sigi



Sumber : Dinas PUTR, 2025

Persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak di Kabupaten Sigi mengalami peningkatan dan cukup stabil di atas 70% dari 72,11% pada tahun 2021 menjadi 74,82% pada tahun 2024.

Gambar 2.29
Listrik Terpakai/Terjual Kabupaten Sigi



Sumber : Publikasi BPS, 2025

Data konsumsi listrik di Kabupaten Sigi menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir dengan titik rendah pada tahun 2022 dan mengalami lonjakan pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pemanfaatan dan distribusi energi yang belum sepenuhnya stabil. Secara struktural, Kabupaten Sigi masih sangat bergantung pada pasokan listrik yang bersumber dari pembangkit listrik yang berada di Kota Palu. Ketergantungan ini menyisakan risiko pasokan apabila terjadi gangguan suplai dari pusat transmisi.

Berdasarkan data-data tersebut, maka dilakukan pendekatan menggunakan 4 aspek Pembangunan (ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan) sebagai berikut.

Berdasarkan aspek ekonomi, Konsumsi listrik terjual menunjukkan fluktuasi signifikan: dari 506,7 juta kWh (2020), turun ke titik terendah 39,2 juta kWh (2022), kemudian melonjak tajam ke 628,2 juta kWh (2023). Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari 74,75 (2020) menjadi 80,06 (2024) mencerminkan perbaikan ekonomi pertanian dan distribusi pangan. Peningkatan akses air minum layak dari 72,11% (2021) menjadi 74,82% (2024) mendukung produktivitas dan menurunkan biaya akses air bersih bagi rumah tangga dan pelaku usaha. Fluktuasi konsumsi listrik mengindikasikan ketergantungan pada sistem energi yang belum stabil; hal ini berisiko menghambat aktivitas ekonomi produktif seperti pengolahan hasil tani, irigasi, dan distribusi pangan. Kenaikan IKP belum sepenuhnya menurunkan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU), yang meningkat dari 10,66% (2020) menjadi 14,12% (2022), baru kemudian menurun ke 12,6% (2024). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif dalam menjangkau kelompok rentan.

Berdasarkan aspek sosial, Akses air minum layak yang membaik secara konsisten berdampak pada peningkatan kualitas hidup rumah tangga, terutama dari sisi kesehatan, waktu produktif, dan beban kerja perempuan dan anak. PoU yang sempat tinggi (2021–2023) menunjukkan bahwa ketimpangan akses konsumsi pangan masih menjadi persoalan sosial utama di beberapa wilayah. Meskipun indikator makro membaik, kerentanan sosial terhadap krisis pangan masih tinggi akibat fluktuasi energi dan belum optimalnya distribusi logistik pangan ke wilayah pedesaan. Intervensi sosial dalam bentuk penguatan cadangan pangan lokal, edukasi gizi keluarga, dan perlindungan sosial berbasis data PoU perlu diperluas untuk mencegah kerentanan berulang.

Berdasarkan aspek lingkungan, Ketahanan pangan dan akses air bersih sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya air, kualitas lingkungan

sekitar (*catchment area*), serta keterjagaan ekosistem irigasi dan mata air. Konsumsi energi yang meningkat di 2023 memerlukan perhatian terhadap sumber energi agar tidak meningkatkan beban emisi atau eksploitasi lingkungan secara berlebihan. Ketergantungan pada energi berbasis fosil atau sistem jaringan yang tidak stabil memperbesar risiko ekologis. Oleh karena itu, perlu dikembangkan energi terbarukan lokal, seperti PLTMH dan tenaga surya untuk irigasi dan rumah tangga. Degradasi hutan dan alih fungsi lahan pertanian ke non-produktif turut memengaruhi stabilitas produksi pangan dan siklus air daerah.

Berdasarkan aspek kelembagaan, Perbaikan data dan pemantauan indikator seperti IKP dan PoU menunjukkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan dalam sistem statistik daerah. Keterlibatan perangkat daerah teknis dalam integrasi perencanaan lintas sektor masih dalam tahap awal, dengan tantangan pada sinkronisasi target pembangunan sektor energi-air-pangan. Diperlukan reformasi kelembagaan yang lebih terstruktur melalui integrasi sistem data sektoral dan spasial, sinergi lintas-PD dan mitra. Tanpa kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif, strategi Nexus berisiko menjadi sektoral dan terfragmentasi.

Pendekatan Nexus di Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa air, energi, dan pangan merupakan sistem yang saling terkoneksi dan tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan pembangunan. Data empiris menunjukkan bahwa ketahanan pangan meningkat, tetapi konsumsi pangan rumah tangga belum merata. Akses air meningkat, memberikan efek positif terhadap kesehatan dan produktivitas masyarakat. Konsumsi energi yang tidak stabil berdampak negatif pada aktivitas ekonomi dan ketahanan pangan. Perlu perencanaan lintas sektor berbasis data, pengembangan energi terbarukan lokal, dan penguatan tata kelola kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan sistem Nexus.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sigi merupakan faktor krusial untuk menjamin kualitas hidup masyarakat, mendukung produktivitas sektor-sektor utama (seperti pertanian dan pariwisata), serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kabupaten Sigi memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun juga menghadapi tantangan ekologis yang serius, terutama setelah bencana alam besar tahun 2018 (gempa, likuefaksi, dan banjir).

Adapun kondisi dan tantangan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sigi sebagai berikut:

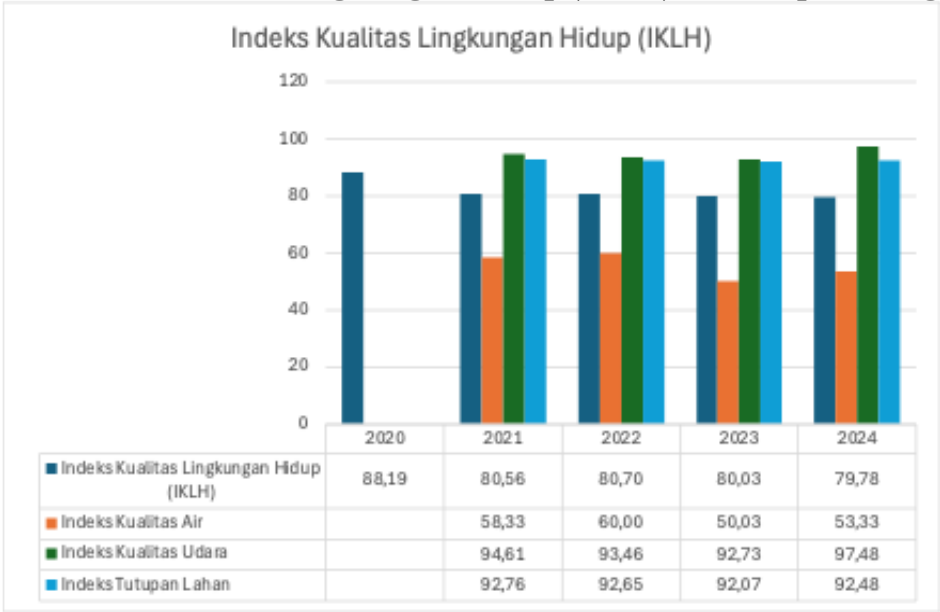
1. Kerusakan Ekosistem Pascabencana
 - Bencana alam tahun 2018 merusak tata ruang dan ekosistem alami, termasuk sungai, hutan, dan lahan produktif.
 - Dampaknya masih terasa dalam bentuk erosi, sedimentasi sungai, dan degradasi kawasan hulu.
2. Kualitas Air dan Limbah
 - Sungai Palu dan anak-anak sungainya menjadi sumber utama air baku, namun kualitasnya terancam oleh limbah domestik, pertanian, dan aktivitas usaha kecil.
 - Kurangnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di tingkat rumah tangga dan komunitas menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan.
3. Alih Fungsi Lahan dan Deforestasi
 - Konversi hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman terus terjadi.
 - Akibatnya, terjadi penurunan daya dukung lingkungan, seperti menurunnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya risiko bencana ekologis (banjir, longsor).

Adapun peran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Sigi sebagai berikut:

1. Untuk Kualitas Hidup
 - Mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah berdampak langsung pada penurunan penyakit berbasis lingkungan (diare, ISPA, dll).
 - Meningkatkan akses terhadap lingkungan sehat akan mendukung kesejahteraan fisik dan mental masyarakat.
2. Untuk Produktivitas Sektor Kunci
 - Sektor pertanian bergantung pada kualitas tanah dan air, sehingga pengendalian erosi, pupuk kimia berlebih, dan limbah pestisida sangat penting.
 - Sektor pariwisata (terutama ekowisata dan wisata alam) sangat ditentukan oleh kondisi lanskap dan kelestarian lingkungan.
3. Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
 - Investasi hijau (*green economy*) seperti energi terbarukan, *agroforestry*, dan pengelolaan sampah terpadu dapat menciptakan lapangan kerja baru.
 - Daerah yang memiliki citra lingkungan bersih dan sehat akan lebih menarik bagi investor dan sektor swasta.

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan Indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah yang mencerminkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat serta data timbulan Sampah terolah di fasilitas Pengolahan Sampah yang menggambarkan jumlah timbulan sampah (dalam ton/hari atau ton/tahun) yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan resmi yang terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.30
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Sigi



Sumber : SIPSN DLH Kabupaten Sigi, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan tren penurunan dari 88,19 pada 2020 menjadi 79,78 pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan lingkungan yang meningkat, terutama dari kualitas air yang fluktuatif dan kecenderungan penurunan pada tahun 2023 meski kualitas udara tetap baik. Penurunan IKLH ini dapat menjadi indikasi adanya pengelolaan lingkungan yang belum optimal, terutama dalam pengendalian pencemaran dan degradasi sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, dan aktivitas pembangunan yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan.

Indeks Kualitas Air mengalami penurunan drastis pada 2023 ke angka 50,03 sebelum naik sedikit menjadi 53,33 pada 2024, dari 58,33 pada 2021. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sumber pencemaran air belum terkelola dengan baik, seperti limbah domestik tanpa pengolahan, aktivitas pertanian tanpa kontrol pupuk dan pestisida, serta sedimentasi akibat degradasi daerah aliran sungai (DAS). Hal ini menjadi tantangan serius dalam penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, yang berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terlayani PDAM atau sistem air minum layak.

Indeks Kualitas Udara tetap berada pada kisaran tinggi (di atas 90), bahkan meningkat menjadi 97,48 pada 2024. Stabilitas kualitas udara ini menunjukkan tingkat pencemaran udara masih terkendali di Kabupaten Sigi, kemungkinan karena rendahnya industri besar yang menghasilkan emisi dan masih luasnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru daerah. Meskipun demikian, dengan peningkatan kendaraan bermotor dan pembangunan permukiman, perlu langkah antisipatif agar kualitas udara tetap terjaga melalui perbaikan tata ruang, penanaman pohon, dan pengendalian emisi kendaraan.

Indeks Tutupan Lahan berada stabil di atas 92% selama periode 2021–2024. Ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan ruang terbuka hijau dan kawasan lindung yang mendukung keseimbangan ekologis. Namun demikian, tekanan dari pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan untuk permukiman, pertanian, dan infrastruktur berpotensi mengancam stabilitas tutupan lahan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang secara tegas.

Gambar 2.31
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
di Kabupaten Sigi



Sumber : DLH Kabupaten Sigi, 2025

Gambar 2.32
Proporsi rumah tangga dengan layanan Sampah
di Kabupaten Sigi



Sumber : DLH Kabupaten Sigi, 2025

Volume timbulan sampah yang terolah meningkat dari 25,64 ton pada 2021 menjadi 37,49 ton pada 2024, menunjukkan peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah. Namun, proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah masih rendah, meski telah meningkat dari 5,84% pada 2023 menjadi 12,12% pada 2024. Hal ini menunjukkan tantangan dalam perluasan layanan pengelolaan sampah rumah tangga, baik dari sisi infrastruktur, pembiayaan, maupun kesadaran masyarakat.

Gambar 2.33
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
di Kabupaten Sigi



Sumber : DPUTR Kabupaten Sigi, 2025

Untuk data rumah tangga dengan akses sanitasi aman rata-rata mengalami kenaikan per tahun sekitar 1,8 poin dengan total peningkatan selama 3 tahun (2021–2024) sebesar 3,78 poin. Kenaikan ini menunjukkan tren positif yang konsisten dan linear, menandakan bahwa upaya peningkatan akses sanitasi aman di Kabupaten Sigi berjalan secara terstruktur.

Berdasarkan data-data tersebut, maka dilakukan pendekatan menggunakan 4 aspek Pembangunan (ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan) sebagai berikut.

Berdasarkan Aspek Ekonomi, peningkatan volume sampah yang terolah (dari 25,64 ton pada 2021 menjadi 37,49 ton pada 2024) mencerminkan perbaikan kapasitas pengelolaan sampah. Hal ini dapat mendukung terciptanya lapangan kerja di sektor jasa kebersihan dan pengelolaan

sampah terpadu, sekaligus membuka peluang usaha ekonomi sirkular, seperti bank sampah dan daur ulang.

Berdasarkan Aspek Sosial, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman masih stagnan di angka 1,52% pada 2022–2024, yang menunjukkan tantangan signifikan dalam pemerataan layanan dasar. Rendahnya akses sanitasi berpotensi meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Berdasarkan Aspek Lingkungan, IKLH menunjukkan tren penurunan dari 88,19 pada 2020 menjadi 79,78 pada 2024. Penurunan kualitas air yang fluktuatif, meskipun kualitas udara relatif stabil dan cenderung baik, menandakan bahwa tekanan terbesar berasal dari degradasi sumber daya air dan perubahan tutupan lahan. Indeks Tutupan Lahan yang stabil di kisaran 92% perlu dijaga agar tidak menurun signifikan akibat alih fungsi lahan.

Berdasarkan Aspek Kelembagaan, Proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah meningkat dari 5,84% pada 2023 menjadi 12,12% pada 2024. Peningkatan ini menjadi indikator perbaikan tata kelola pelayanan publik di sektor persampahan. Namun, capaian ini masih tergolong rendah dan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, regulasi, serta koordinasi anta PD terkait.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan bukan hanya soal pelestarian alam, tapi juga fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup, menjaga keberlanjutan produktivitas sektor ekonomi utama, dan mendukung pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sigi. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama TPB 6 (Air Bersih), TPB 13 (Aksi Iklim), dan TPB 15 (Ekosistem Darat).



F. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kemampuan Kabupaten Sigi untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan berkaitan erat dengan konsep resiliensi wilayah. Resiliensi ini dapat dianalisis dari tiga aspek utama: kemampuan masyarakat, infrastruktur pendukung, dan ekosistem lingkungan.

1. Kemampuan Masyarakat (Sosial-Ekonomi)

Masyarakat Kabupaten Sigi menunjukkan ketahanan sosial-ekonomi yang tangguh, terutama pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang melanda pada tahun 2018. Ketangguhan ini tercermin dalam tingginya solidaritas sosial yang terwujud melalui praktik gotong royong dalam proses pemulihan pascabencana, baik di tingkat komunitas maupun antarwilayah. Kemampuan adaptasi masyarakat juga tampak dalam pergeseran sumber penghidupan, di mana sebagian warga mampu beralih dari sektor pertanian yang terdampak bencana ke sektor informal dan usaha kecil. Dukungan dari berbagai pihak, seperti program pelatihan dan edukasi oleh pemerintah daerah dan *Non Government Organization* (NGO), turut memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami risiko bencana serta strategi mitigasi dan adaptasi yang relevan dengan kondisi lokal. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Tingginya angka kemiskinan, ketergantungan terhadap sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi iklim, dan teknologi menjadi hambatan struktural yang perlu diatasi untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi jangka panjang.

2. Infrastruktur

Upaya rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sigi mengalami kemajuan signifikan sejak 2018. Pemerintah, dengan dukungan berbagai mitra pembangunan, telah membangun hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana. Sarana air bersih dan sanitasi juga mulai dipulihkan, meskipun cakupan layanan ini masih belum merata di seluruh wilayah. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, dan puskesmas telah meningkatkan akses layanan publik. Namun, ketersediaan dan pemerataan infrastruktur penanggulangan bencana masih menjadi tantangan. Sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi belum tersedia secara menyeluruh, khususnya di daerah rawan bencana. Selain itu, ketersediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sistem pengelolaan limbah yang optimal masih terbatas di beberapa kecamatan, yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dalam jangka panjang.

3. Ekosistem

Kabupaten Sigi memiliki kekayaan ekosistem yang penting dalam mendukung ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu serta kawasan pegunungan menyediakan sumber daya air yang vital untuk pertanian dan kebutuhan domestik. Selain itu, kawasan hutan dan konservasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi serta menekan risiko bencana seperti banjir dan longsor. Namun, tekanan terhadap lingkungan terus meningkat. Aktivitas deforestasi, konversi lahan untuk keperluan pertanian dan pemukiman, serta degradasi lahan akibat bencana telah menurunkan fungsi ekologis kawasan ini. Ketidakseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya konservasi menimbulkan risiko ekologis yang dapat memperparah kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologis. Penguatan tata kelola lingkungan berbasis partisipasi masyarakat, pemulihan ekosistem kritis, dan integrasi pendekatan berbasis alam (*nature-based solutions*) dalam pembangunan menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem di Kabupaten Sigi.

Konsep resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sigi. Resiliensi bukan hanya tentang kemampuan untuk pulih setelah terjadi bencana, tetapi juga mencakup kapasitas untuk mengantisipasi, memitigasi, beradaptasi, dan mentransformasikan sistem sosial, ekonomi,

lingkungan, serta kelembagaan agar tetap tangguh dalam menghadapi tekanan dan guncangan akibat bencana dan perubahan iklim.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) yang merupakan indeks yang mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah berdasarkan bahaya, kerentanan, dan kapasitas serta Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan indeks yang mengukur kapasitas suatu daerah dalam menghadapi bencana dengan pendekatan 4 aspek pembangunan sebagai berikut.

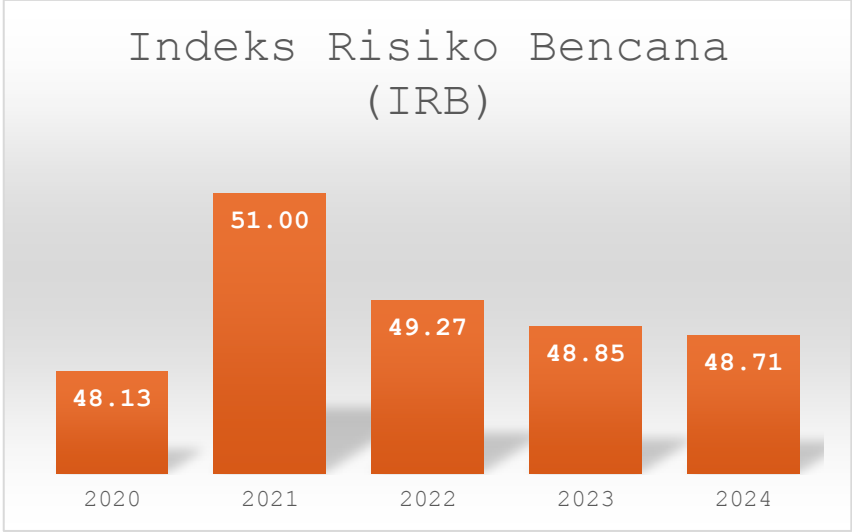
Berdasarkan aspek ekonomi, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sigi berada pada kisaran 48,13 hingga 51,00 dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa risiko bencana masih cukup tinggi dan dapat berdampak pada stabilitas ekonomi daerah. Risiko ini mempengaruhi produktivitas pertanian, infrastruktur ekonomi, dan investasi, terutama di kawasan rawan banjir dan longsor. Namun, seiring dengan meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari 0,20 pada 2020 menjadi 0,47 pada 2024, terdapat indikasi bahwa kapasitas pemulihan ekonomi pascabencana mulai terbangun, memungkinkan aktivitas ekonomi untuk pulih lebih cepat setelah terjadi bencana.

Berdasarkan aspek sosial, risiko bencana yang tinggi mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama pada wilayah terdampak gempa, banjir, dan longsor. Nilai IKD yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan beradaptasi dengan risiko bencana, melalui penyediaan sarana evakuasi, simulasi bencana di sekolah, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial di Kabupaten Sigi perlahan membaik, meskipun risiko bencana masih menjadi tantangan.

Berdasarkan aspek lingkungan, kondisi geografis Kabupaten Sigi yang terletak pada jalur sesar aktif dan memiliki wilayah perbukitan membuat daerah ini rentan terhadap gempa bumi dan longsor, serta banjir di kawasan dataran rendah. Hal ini menjadi penyebab nilai IRB masih tinggi dan cenderung stabil. Namun, terdapat upaya konservasi lingkungan seperti penghijauan, rehabilitasi DAS, dan peningkatan tutupan lahan di beberapa wilayah yang mendukung peningkatan IKD. Upaya ini membantu mengurangi kerentanan lingkungan dan meningkatkan daya dukung alam dalam menghadapi potensi bencana.

Berdasarkan aspek kelembagaan, peningkatan IKD dari 0,20 menjadi 0,47 dalam lima tahun menunjukkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi, termasuk penguatan peran BPBD, penyusunan rencana kontinjensi, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pemutakhiran data dan peta risiko bencana. Sistem peringatan dini dan koordinasi lintas sektor dalam mitigasi dan penanganan bencana juga mulai berjalan dengan baik, mendukung percepatan pemulihan dan pengurangan dampak saat terjadi bencana.

Gambar 2.34
Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Sigi



Sumber : BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sigi menunjukkan nilai relatif tinggi dan cenderung stagnan pada rentang 48,13–51,00 selama periode 2020–2024. Kenaikan IRB pada 2021 menjadi 51,00 diikuti dengan penurunan secara perlahan menjadi 48,71 pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi dan tingkat risiko bencana di Sigi masih signifikan, terutama mengingat kondisi geografis Kabupaten Sigi yang berada pada wilayah rawan gempa, banjir bandang, dan tanah longsor.

Gambar 2.35
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Sigi



Sumber : BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Di sisi lain, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mengalami peningkatan cukup signifikan dari 0,20 pada 2020 menjadi 0,47 pada 2024. Peningkatan IKD ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas daerah dalam kesiapsiagaan, mitigasi, penanganan, dan pemulihan pascabencana. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan implementasi sejumlah kebijakan strategis oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, antara lain melalui penyusunan dokumen rencana kontinjensi sebagai kerangka respons bencana, penguatan sistem peringatan dini berbasis risiko, pelaksanaan pemetaan risiko bencana secara partisipatif di tingkat desa, serta pengembangan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan perangkat daerah lintas sektor yang memiliki fungsi dukungan dalam manajemen risiko bencana.

Fenomena IRB yang masih tinggi meskipun IKD meningkat mengindikasikan bahwa potensi bencana tetap menjadi ancaman nyata di

Kabupaten Sigi, namun kapasitas daerah untuk menghadapi dan pulih dari dampak bencana semakin baik. Peningkatan IKD belum secara langsung berdampak signifikan pada penurunan IRB karena faktor risiko bencana masih terkait dengan kondisi lingkungan dan infrastruktur, seperti alih fungsi lahan pada kawasan rawan, keterbatasan infrastruktur pengendali banjir, serta kondisi tutupan lahan di daerah hulu.

Diagnosis ini menunjukkan bahwa strategi penurunan IRB di Kabupaten Sigi memerlukan penguatan mitigasi struktural dan non-struktural berbasis ekosistem serta perbaikan tata kelola ruang di kawasan rawan bencana. Peningkatan IKD perlu dipertahankan dan ditingkatkan, namun harus diimbangi dengan langkah-langkah penurunan risiko secara nyata agar risiko bencana dapat ditekan dan pembangunan daerah menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.

G. Demografi

Data Demografi memperlihatkan jumlah, struktur, persebaran, dan dinamika penduduk dalam suatu wilayah. Data dan analisis demografi menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan karena penduduk adalah subjek sekaligus objek pembangunan.

Penduduk sebagai subjek pembangunan berarti bahwa manusia menjadi penggerak utama pembangunan daerah, baik melalui kontribusi tenaga kerja, kreativitas, maupun produktivitas ekonomi. Sementara itu, sebagai objek pembangunan, penduduk memerlukan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, serta akses terhadap infrastruktur dan lapangan kerja yang layak agar kualitas hidupnya meningkat.

Urgensi demografi dalam perencanaan pembangunan terletak pada pentingnya pengelolaan pertumbuhan dan persebaran penduduk secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya dukung lingkungan, kapasitas ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur. Data demografi menjadi pijakan dalam memproyeksikan kebutuhan pembangunan daerah ke depan, sehingga perencanaan dapat disusun dengan lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.

Dalam konteks Kabupaten Sigi, pemahaman mengenai karakteristik demografi menjadi sangat penting mengingat wilayah ini memiliki kondisi geografis yang beragam, potensi pertumbuhan penduduk yang moderat, serta keberadaan masyarakat adat yang masih memegang nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Struktur demografi yang khas ini menggambarkan pertumbuhan penduduk, sebaran geografis, dan komposisi masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat adat.

Berdasarkan pendataan Dikbud tahun 2025, masyarakat adat di Sigi mayoritas berakar dari etnis Kaili, yang kemudian bercabang ke dalam berbagai sub-kelompok, antara lain Ledo, Ija, Ado, Tara, Tado, Moma, Uma, Topo Da'a, Ta'a, dan Inde. Setiap kelompok menempati wilayah tertentu seperti dari dataran rendah, lembah, hingga kawasan pegunungan dan sekitar danau yang memperlihatkan keterikatan erat antara identitas etnis dengan kondisi geografis dan ekosistem lokal. Adapun data kelompok etnis sebagai berikut.

Tabel 2.21
Kelompok Etnis dan Lokasinya di Kabupaten Sigi

Kelompok Etnis	Lokasi
Kaili	
Ledo	Sigi Biromaru dan sekitarnya
Ija	Tanambulava, Sigi Kota, Nokilalaki
Ado	Tanambulava, Dolo Selatan, Gumbasa
Tara	Dolo
Tado	Lindu, Palolo
Moma	Kulawi
Uma	Kulawi Selatan, Pipikoro
Topo Da'a	Marawola Barat, Nokilalaki(Pegunungan)
Ta'a	Palolo
Inde	Dolo barat, Dolo Selatan

Sumber : Hasil Pendataan Dikbud Kabupaten Sigi, 2025

Masyarakat adat di dataran rendah seperti Ledo (Sigi Biromaru), Ija (Tanambulava, Sigi Kota, Nokilalaki), Ado (Tanambulava, Dolo Selatan, Gumbasa), dan Tara (Dolo) cenderung berada di wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Wilayah ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan layanan publik, sehingga masyarakat adat di kawasan ini berinteraksi lebih intensif dengan perkembangan modernisasi dan arus migrasi. Hal ini berdampak pada pergeseran pola demografi, dimana komposisi masyarakat tidak lagi homogen, melainkan bercampur dengan pendatang dari daerah lain.

Sebaliknya, kelompok masyarakat adat di wilayah pegunungan dan terpencil seperti Tado (Lindu, Palolo), Moma (Kulawi), Uma (Kulawi Selatan, Pipikoro), Topo Da’a (Marawola Barat, Nokilalaki Pegunungan), dan Ta’a (Palolo) masih relatif homogen. Jumlah penduduk di kawasan ini lebih sedikit dengan kepadatan rendah, namun memiliki peran penting dalam menjaga kawasan hutan, pegunungan, dan Danau Lindu yang menjadi ekosistem vital Sigi. Kondisi demografis di wilayah ini ditandai oleh tantangan aksesibilitas, keterbatasan layanan pendidikan dan kesehatan, serta migrasi keluar daerah yang tinggi terutama pada kelompok usia produktif.

Kelompok Inde dan Ado yang berada di Dolo Barat dan Dolo Selatan menempati wilayah peralihan. Secara demografi, wilayah ini menjadi transisi antara kawasan padat di dataran rendah dan kawasan adat terpencil di pegunungan. Komposisi penduduknya lebih beragam karena mobilitas sosial-ekonomi yang lebih besar, termasuk interaksi dengan jalur perdagangan lokal.

Keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Sigi memiliki dimensi strategis bagi pembangunan demografi. Pertama, masyarakat adat memainkan peran sebagai penjaga identitas lokal sekaligus penopang struktur sosial di wilayah pedesaan. Dengan tingkat fertilitas yang cenderung lebih tinggi di kawasan pedalaman dibanding pusat kota, mereka menjadi bagian penting dalam pertumbuhan penduduk jangka panjang. Kedua, keberadaan masyarakat adat juga terkait erat dengan fenomena migrasi. Banyak generasi muda dari komunitas adat di Kulawi, Pipikoro, atau Lindu yang bermigrasi ke Sigi Kota dan Palu untuk pendidikan atau pekerjaan, sehingga menciptakan pola urbanisasi internal. Hal ini berdampak pada penuaan populasi di desa adat dan potensi melemahnya regenerasi penjaga tradisi. Ketiga, distribusi masyarakat adat memengaruhi kesenjangan demografi antar wilayah. Wilayah dataran rendah yang lebih padat menghadapi tantangan urbanisasi dan kebutuhan layanan publik yang meningkat, sementara wilayah pegunungan dengan populasi lebih sedikit menghadapi keterbatasan akses layanan dasar.

Demografi daerah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan komunitas adat. Mereka bukan hanya bagian dari identitas budaya, tetapi juga penentu dinamika kependudukan, persebaran geografis, serta arah pembangunan daerah. Dengan memperhatikan keterkaitan antara masyarakat adat dan kondisi demografi, Kabupaten Sigi dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, mengintegrasikan perlindungan adat dengan peningkatan kualitas layanan publik, menyeimbangkan pembangunan antara dataran rendah dan pegunungan, serta memanfaatkan kearifan lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan karakter wilayah dan penduduknya.

Komposisi etnis yang beragam ini berjalan beriringan dengan dinamika demografi lainnya, termasuk distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk berdasarkan kelompok umur, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk serta proyeksi penduduk.

Berikut grafik visual komparatif data laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kabupaten Sigi.

Gambar 2.36
Penduduk Kabupaten Sigi Berdasarkan Jenis Kelamin

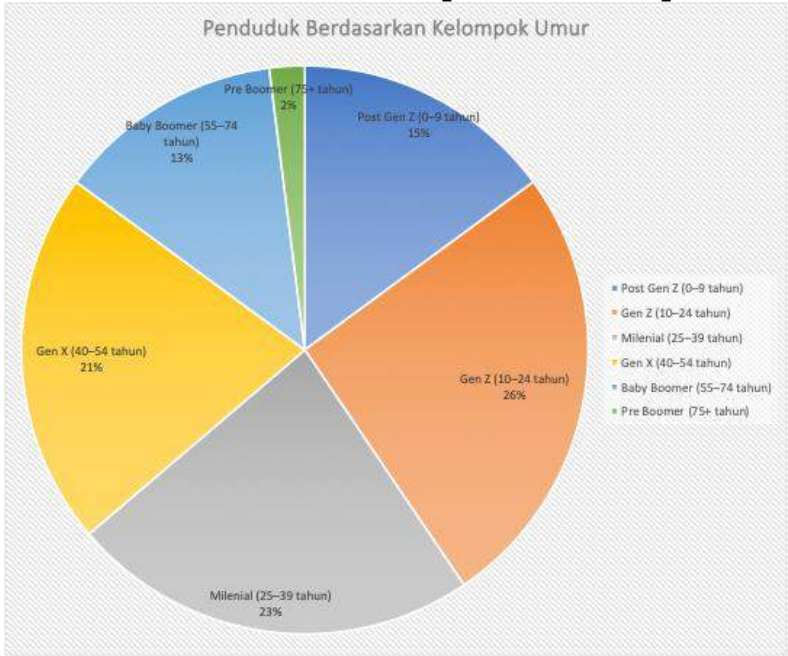


Sumber : Publikasi BPS, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Sigi selama periode 2020–2024 mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 257.585 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 132.317 jiwa dan perempuan sebanyak 125.268 jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk meningkat menjadi 261.676 jiwa dengan rincian 134.233 jiwa laki-laki dan 127.443 jiwa perempuan.

Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk mencapai 266.812 jiwa (laki-laki 136.677 jiwa, perempuan 130.135 jiwa), dan pada tahun 2023 jumlah penduduk sedikit meningkat menjadi 266.660 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 136.520 jiwa dan perempuan 130.140 jiwa. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sigi tercatat sebanyak 270.189 jiwa dengan jumlah laki-laki 138.405 jiwa dan perempuan 131.784 jiwa.

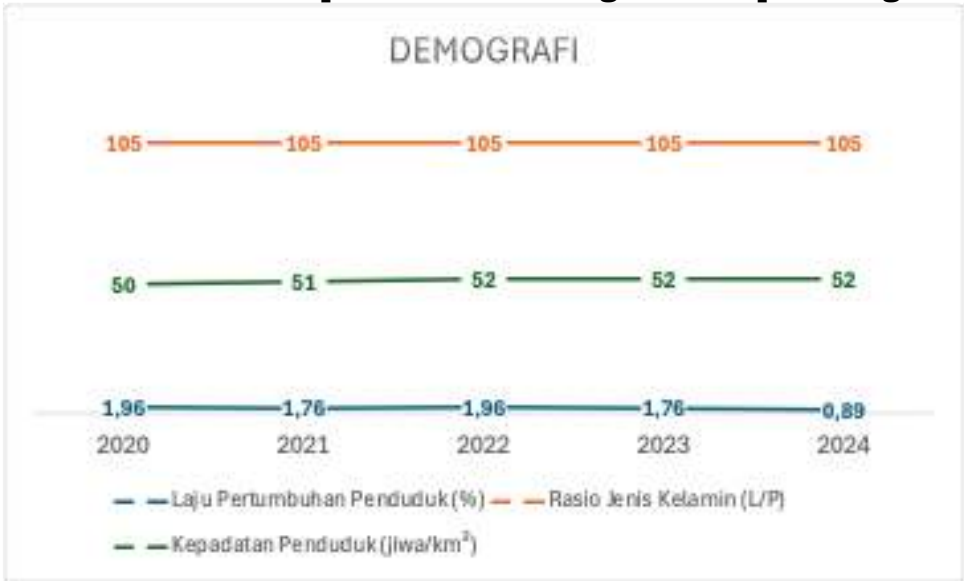
Gambar 2.37
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Sigi



Sumber : Publikasi BPS, 2025 (data diolah)

Kelompok usia produktif mendominasi komposisi penduduk Kabupaten Sigi (Gen Z (10–24 tahun): 25,56%, Milenial (25–39 tahun): 23,28%, Gen X (40–54 tahun): 21,28%). Total penduduk usia produktif ini mencapai 70,12% dari total penduduk, menunjukkan potensi besar bonus demografi untuk mendukung pembangunan daerah jika dioptimalkan dengan penyediaan lapangan kerja, pendidikan keterampilan, dan layanan kesehatan reproduksi yang baik. Penduduk usia anak (0–9 tahun) menunjukkan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan dasar yang memadai, sedangkan penduduk lansia (*Baby Boomer* dan *Pre Boomer*) sebesar 14,94% memerlukan perhatian pada pelayanan kesehatan lansia dan perlindungan sosial untuk mendukung kesejahteraan mereka.

Gambar 2.38
Grafik Visual Komparatif Tren Demografi Kabupaten Sigi



Sumber : Publikasi BPS, 2025

Kabupaten Sigi memiliki karakteristik demografi yang menjadi modal sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data tahun 2020–2024, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sigi menunjukkan tren moderat dengan fluktuasi dari 1,96% pada 2020, turun menjadi 0,89% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan program

pengendalian pertumbuhan penduduk, namun juga perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada potensi stagnasi tenaga kerja produktif di masa depan.

Rasio jenis kelamin Kabupaten Sigi stabil pada angka 105, menunjukkan proporsi penduduk laki-laki yang sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Kepadatan penduduk meningkat secara gradual dari 50 jiwa/km² pada 2020 menjadi 52 jiwa/km² pada 2024, masih menunjukkan kondisi kepadatan rendah sehingga masih terdapat ruang pengelolaan wilayah dan pengembangan kawasan berbasis tata ruang berkelanjutan.

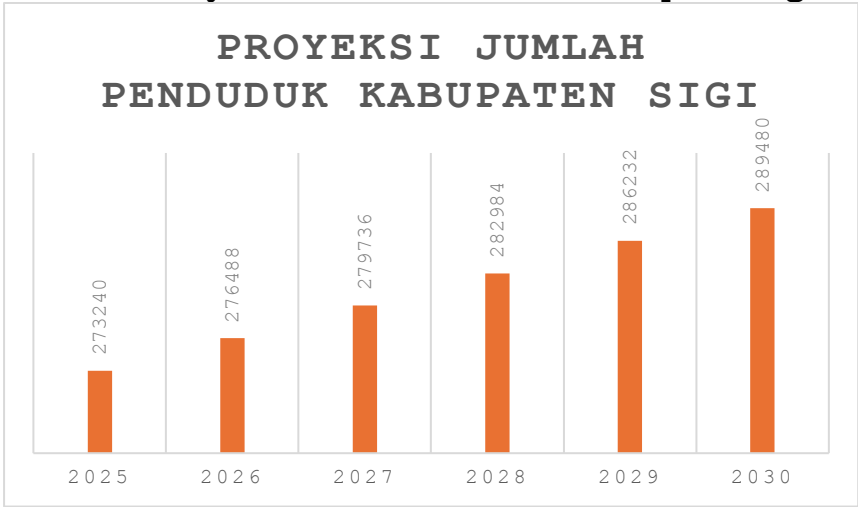
Dari sisi sosial, penduduk Kabupaten Sigi masih didominasi oleh usia produktif, memberikan peluang bonus demografi untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, kondisi geografis Kabupaten Sigi yang didominasi wilayah perbukitan dan sebaran penduduk yang tersebar menyebabkan tantangan dalam pemerataan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar di seluruh wilayah kecamatan.

Dalam aspek lingkungan, rendahnya kepadatan penduduk memberikan ruang untuk pengelolaan tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kearifan lokal masyarakat adat seperti Kaili, Kulawi, dan Moma dalam pengelolaan lahan dan hutan adat menjadi potensi dalam mendukung ketahanan pangan, konservasi lingkungan, serta pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Dari aspek kelembagaan, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan administrasi kependudukan secara digital, serta integrasi perencanaan pembangunan berbasis data proyeksi penduduk. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam mempersiapkan kebutuhan layanan dasar, penyediaan lapangan kerja, dan pengendalian ruang secara terukur.

Berdasarkan data hasil proyeksi pada dokumen RPJPD Kabupaten Sigi 2025-2045, jumlah penduduk Kabupaten Sigi menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan sebesar 273.240 jiwa dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 289.480 jiwa pada tahun 2030. Dengan demikian, dalam kurun waktu enam tahun, jumlah penduduk Kabupaten Sigi diproyeksikan mengalami pertambahan sebanyak 16.240 jiwa.

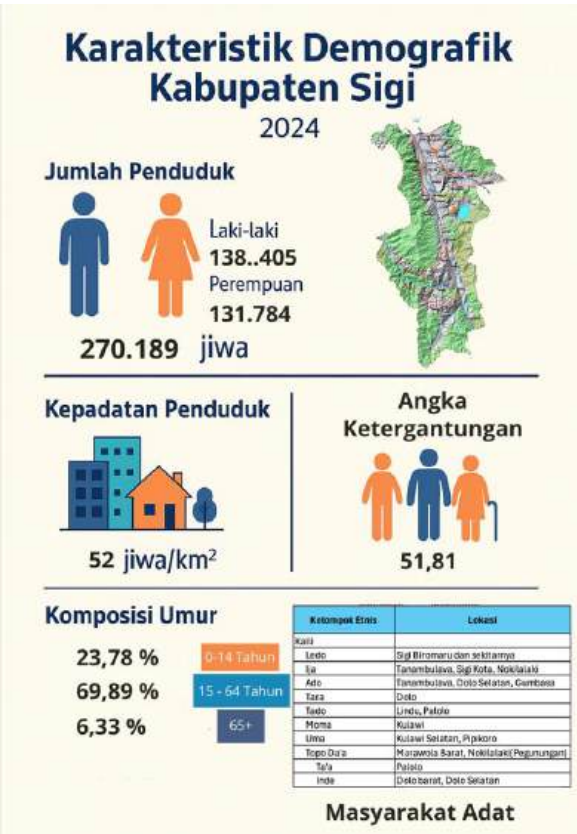
Gambar 2.39
Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi



Sumber : RPJPD Kabupaten Sigi 2025-2045 (Data diolah)

Rata-rata pertumbuhan penduduk tahunan berada pada kisaran 1,13% hingga 1,19%. Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang moderat, namun tetap memberikan implikasi yang signifikan terhadap kebutuhan penyediaan layanan dasar dan perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur penunjang lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sigi perlu mengantisipasi dinamika pertumbuhan penduduk ini dengan kebijakan pembangunan yang responsif dan terukur.

Hal-hal ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan, agar visi “Sigi Maju Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata” dapat tercapai dengan tetap menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang erat. Pertumbuhan ekonomi yang baik cenderung meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan mengurangi, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun Karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi di Kabupaten Sigi dapat dijelaskan dengan mengacu pada beberapa indikator

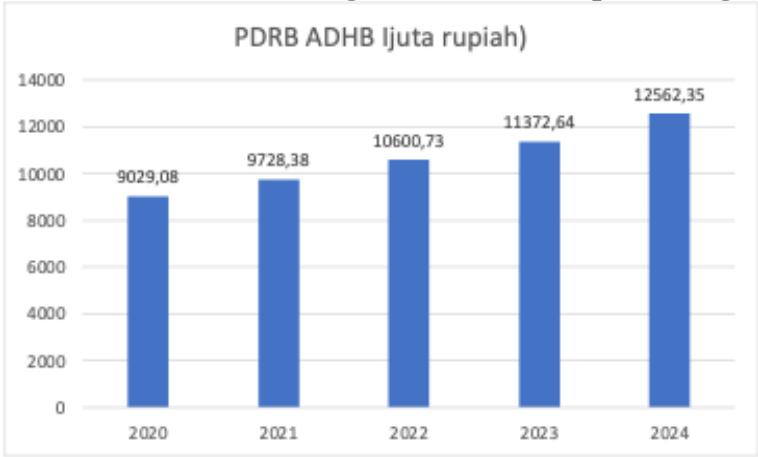
- 1. Pendapatan Regional dan Per Kapita
 - PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan indikator utama yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah tanpa memperhitungkan perubahan harga atau inflasi. PDRB ADHB memberikan gambaran nominal kinerja perekonomian daerah secara menyeluruh dalam satu tahun tertentu.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, nilai PDRB ADHB Kabupaten Sigi menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp9.029,08 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp9.728,38 miliar pada tahun 2021, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,75 persen. Peningkatan ini merupakan awal dari proses pemulihan ekonomi daerah yang sempat berkontraksi akibat dampak pandemi COVID-19, dan mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat serta intervensi kebijakan fiskal daerah. Pertumbuhan positif berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai PDRB mencapai Rp10.600,73 miliar, tumbuh sebesar 8,97 persen dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai PDRB kembali meningkat menjadi Rp11.372,64 miliar dengan laju pertumbuhan 7,28 persen. Tren akselerasi pertumbuhan semakin menguat pada tahun 2024, dengan nilai PDRB ADHB mencapai Rp12.562,35 miliar atau meningkat sebesar 10,45 persen dari tahun sebelumnya, mencerminkan ekspansi aktivitas ekonomi yang lebih luas, terutama dari sisi konsumsi, belanja pembangunan, dan peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis.

Secara kumulatif, dalam kurun waktu lima tahun, nilai PDRB ADHB Kabupaten Sigi mengalami peningkatan sebesar Rp 3.533,27 miliar atau tumbuh 39,14 persen dibandingkan tahun 2020. Capaian ini menjadi indikasi bahwa perekonomian daerah mengalami perbaikan dan penguatan yang stabil dari tahun ke tahun.

Gambar 2.40
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sigi



Sumber : Publikasi BPS, 2025

- **PDRB Per Kapita**
Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita Kabupaten Sigi tercatat sebesar Rp 35,05 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 37,42 juta pada tahun 2021, atau tumbuh sekitar 6,76 persen. Kenaikan ini menunjukkan awal dari pemulihan ekonomi daerah pasca bencana dan pandemi COVID-19, seiring dengan kembalinya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat serta stimulus fiskal pemerintah daerah.

Pertumbuhan positif terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2022, nilai PDRB per kapita mencapai Rp 40,26 juta (naik 7,6 persen dibanding tahun sebelumnya), dan meningkat lagi menjadi Rp 42,65 juta di 2023. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2024, di mana nilai PDRB per kapita mencapai Rp 46,53 juta, atau tumbuh 9,1 persen dibanding 2023. Secara keseluruhan, selama periode 2020–2024, nilai PDRB per kapita Kabupaten Sigi meningkat Rp11,48 juta atau setara dengan 32,76 persen secara kumulatif. Pertumbuhan ini mencerminkan kestabilan dan perbaikan struktur ekonomi daerah, terutama pada sektor-sektor basis seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta meningkatnya kontribusi sektor jasa dan perdagangan.

Gambar 2.41
PDRB Per Kapita Kabupaten Sigi



Sumber : Pulikasi BPS, 2025

2. Pengeluaran Rumah Tangga
 - Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan (2024): Sekitar Rp 1.030.000, didominasi oleh:
 - Makanan dan minuman (lebih dari 60%)
 - Diikuti pengeluaran untuk perumahan, transportasi, dan pendidikan

Hal ini mencerminkan bahwa pengeluaran masyarakat masih banyak diarahkan untuk kebutuhan dasar, menunjukkan kondisi ekonomi yang sedang berkembang.
3. Ketimpangan dan Kerentanan
 - Distribusi kemiskinan tidak merata: kecamatan seperti Pipikoro, Kulawi, dan Lindu umumnya memiliki akses terbatas ke layanan dasar.
 - Sektor pertanian masih dominan dan rawan terhadap fluktuasi iklim serta harga komoditas.
 - Akses terhadap pekerjaan formal masih rendah, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dan pertanian subsisten.
4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik dari sisi pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan yang terdiri dari:

 - Garis Kemiskinan Makanan (GKM): pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan energi minimum sebesar 2.100 kilokalori/kapita/hari.

- Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM): pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan.

Seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan total (GKM + GKNM) yang ditetapkan BPS setiap tahun di masing-masing daerah.

Gambar 2.42
Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sigi



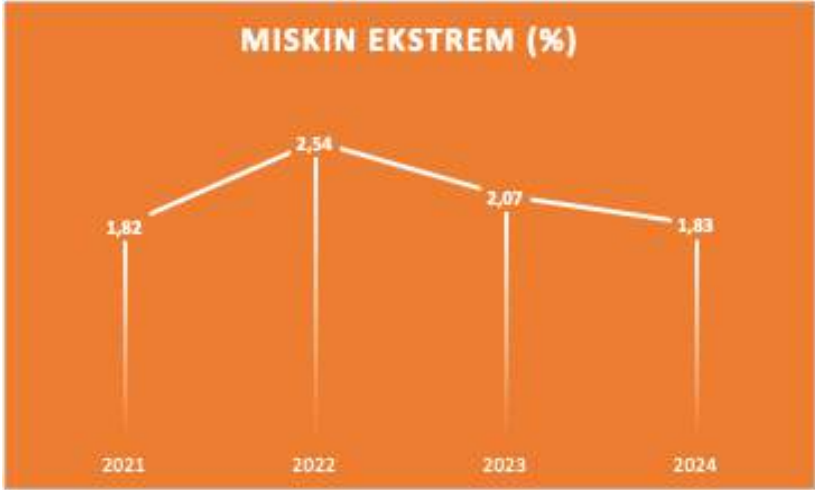
Sumber : Publikasi BPS, 2025

Dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sigi menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 12,45 persen pada tahun 2020 dan sempat mengalami peningkatan menjadi 13,05 persen pada tahun 2021. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang melemahkan kapasitas ekonomi rumah tangga, terutama di sektor informal dan pertanian subsisten. Pada tahun 2022, angka kemiskinan menurun menjadi 12,30 persen, mencerminkan efek positif dari upaya pemulihan ekonomi dan intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, tren tersebut belum sepenuhnya stabil, karena pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 12,83 persen. Baru pada tahun 2024 angka kemiskinan menurun ke level 12,06 persen, menunjukkan adanya perbaikan meskipun belum signifikan jika dibandingkan dengan *baseline* tahun 2020.

Kemiskinan ekstrem adalah bentuk kemiskinan yang paling parah, di mana individu atau rumah tangga tidak hanya hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi berada jauh di bawah standar kelayakan hidup minimum, khususnya dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan dasar. Menurut standar internasional yang digunakan oleh Bank Dunia (World Bank) dan diadopsi oleh Pemerintah Indonesia, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai Kondisi ketika seseorang hidup dengan pengeluaran kurang dari USD 1,90 per orang per hari (setara dengan sekitar Rp. 11.000–12.000 per hari per kapita, tergantung nilai tukar dan paritas daya beli). Di Indonesia, data kemiskinan ekstrem dihimpun melalui pendekatan kombinatif antara:

- Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),
- Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek),
- serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Gambar 2.43
Grafik Persentase Miskin Ekstrem di Kabupaten Sigi



Sumber : Kemenkopm, 2025

Sementara itu, kemiskinan ekstrem, yang mengacu pada penduduk dengan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem nasional juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin ekstrem tercatat sebesar 1,82 persen, kemudian meningkat tajam menjadi 2,54 persen pada tahun 2022. Lonjakan ini mengindikasikan adanya kelompok rentan yang tidak terjangkau oleh perlindungan sosial atau mengalami tekanan ekonomi yang berat. Upaya pemerintah dalam memperluas cakupan intervensi dan verifikasi data pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan hasil positif, dengan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 2,07 persen pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 1,83 persen pada tahun 2024.

Kondisi ini mencerminkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sigi tidak hanya berkaitan dengan aspek pendapatan, tetapi juga dengan dimensi struktural lainnya seperti kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, kerentanan terhadap bencana alam, dan kesenjangan wilayah. Pemerintah Kabupaten Sigi telah mengadopsi berbagai pendekatan strategis melalui program-program pemberdayaan masyarakat, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta integrasi penanganan stunting dan kemiskinan dalam skema program lintas sektor.

Meskipun terjadi tren perbaikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas intervensi, namun angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sigi masih berada di atas target nasional, khususnya target penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen. Oleh karena itu, diperlukan kesinambungan kebijakan berbasis bukti, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, dan inovasi dalam tata kelola program pemberdayaan agar mampu memberikan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah ini.

Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas strategis daerah melalui pendekatan multisektor. Upaya ini diarahkan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang bersifat struktural dan multidimensi, dengan fokus pada penguatan aksesibilitas, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial. Terdapat enam pilar utama kebijakan yang diimplementasikan secara sinergis antara pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan lembaga mitra.

- Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Akses infrastruktur dasar yang memadai menjadi syarat utama untuk mendorong mobilitas penduduk miskin, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi lokal, terutama di wilayah terisolir seperti Kulawi, Lindu, dan Pipikoro.

- **Peningkatan Akses Air Bersih, Perumahan Layak, dan Layanan Publik**
Ketersediaan sarana air bersih, sanitasi, perumahan layak, serta akses listrik masih menjadi kendala utama di desa-desa miskin. Intervensi diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin melalui pembangunan fasilitas dasar.
- **Pemerataan Akses Pendidikan dan Kesehatan**
Pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang bermutu merupakan instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pemerintah daerah berkomitmen menyediakan fasilitas dan insentif bagi kelompok rentan di bidang pendidikan dan layanan kesehatan dasar.
- **Pengembangan Ekonomi Produktif dan Permodalan**
Peningkatan pendapatan rumah tangga miskin didorong melalui penguatan sektor-sektor ekonomi rakyat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, dengan dukungan permodalan yang terjangkau dan pendampingan usaha.
- **Penguatan Perlindungan Sosial dan Asuransi**
Masyarakat miskin rentan terhadap guncangan ekonomi dan sosial, seperti gagal panen, kecelakaan kerja, dan sakit. Oleh karena itu, sistem perlindungan sosial dan asuransi perlu diperluas untuk mencegah kemiskinan kronis.
- **Pengembangan SDM Melalui Pendidikan dan Pelatihan**
Investasi pada sumber daya manusia menjadi fondasi jangka panjang untuk keluar dari kemiskinan. Pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan potensi wilayah.

Strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sigi difokuskan pada transformasi struktural dan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan teknokratik ini menekankan pentingnya *data-driven policy*, kolaborasi multi-aktor, serta evaluasi berkala untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran dan berdaya guna. Keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi lintas sektor dan penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

B. Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sigi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemerataan akses, serta pemenuhan tenaga dan sarana prasarana kesehatan yang memadai. Komitmen terhadap prinsip kesehatan untuk semua tercermin dalam perluasan jaminan kesehatan, peningkatan kinerja tenaga medis, dan pembangunan fasilitas layanan yang menjangkau hingga wilayah terpencil.

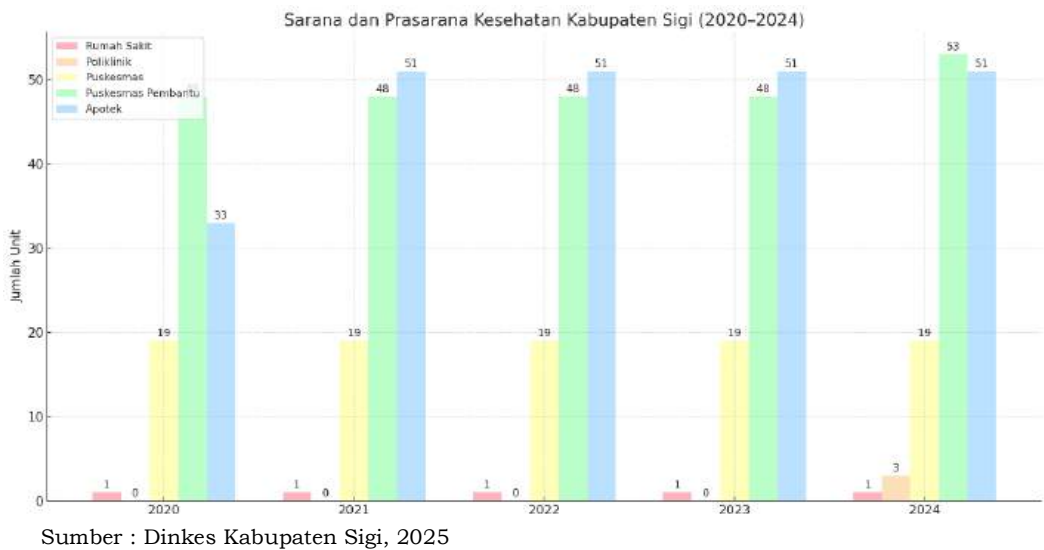
1. Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator derajat kesehatan masyarakat menunjukkan kecenderungan positif selama periode 2021–2024. Usia Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 70,09 tahun pada tahun 2021 menjadi 71,33 tahun pada tahun 2024, menunjukkan perbaikan dalam layanan kesehatan dasar dan peningkatan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Di sisi lain, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 40,7% pada 2021 menjadi 26,4% pada 2023. Meskipun terjadi sedikit kenaikan menjadi 33% pada 2024, capaian ini tetap menandai kemajuan signifikan dalam intervensi gizi masyarakat dan layanan kesehatan ibu dan anak. Tantangan muncul pada cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

yang mengalami fluktuasi. Setelah mencapai 94,67% pada 2022, cakupan turun menjadi 75% pada 2024. Hal ini menuntut peningkatan upaya edukasi publik, penyelarasan data kependudukan, dan integrasi layanan sosial agar seluruh masyarakat dapat kembali terlayani dalam sistem perlindungan kesehatan nasional.

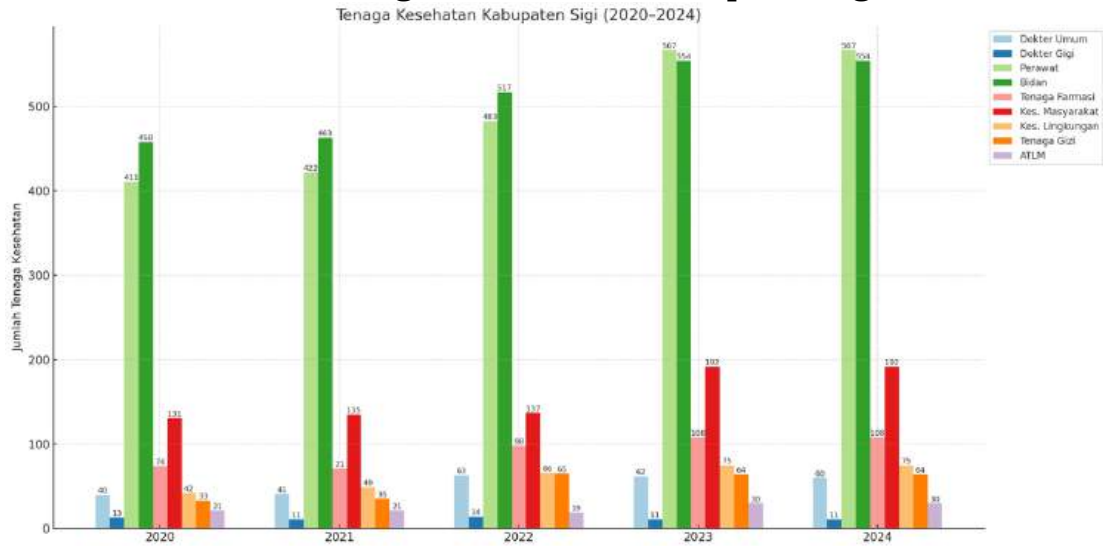
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Secara umum, fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Sigi menunjukkan peningkatan, khususnya pada puskesmas pembantu dan poliklinik. Hingga tahun 2024, Kabupaten Sigi memiliki 1 rumah sakit umum di Sigi Biromaru yang menjadi rujukan utama, serta tambahan 1 rumah sakit baru di Kecamatan Kulawi yang mulai beroperasi pada 2024. Terdapat pula 3 poliklinik, 19 puskesmas, dan 53 puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh wilayah. Jumlah apotek juga menunjukkan tren peningkatan, dari 38 unit pada 2019 menjadi 51 unit pada 2024. Meskipun demikian, wilayah seperti Lindu, Pipikoro, dan Marawola Barat masih menghadapi keterbatasan fasilitas tingkat lanjut, yang menyebabkan kesenjangan akses antar wilayah. Keterpaduan pembangunan infrastruktur kesehatan di wilayah pegunungan dan terpencil menjadi agenda penting dalam lima tahun mendatang.

Gambar 2.44
Grafik Distribusi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sigi



3. Distribusi dan Ketersediaan Tenaga Kesehatan
- Peningkatan signifikan jumlah tenaga kesehatan terjadi dalam kurun waktu 2019–2024. Jumlah dokter umum meningkat dari 24 orang menjadi 60 orang, sementara perawat mencapai 567 orang, dan bidan mencapai 554 orang pada 2024. Tenaga kefarmasian juga bertambah menjadi 108 orang, sedangkan tenaga kesehatan masyarakat meningkat dari 112 menjadi 192 orang. Peningkatan ini menunjukkan hasil dari berbagai program penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan dukungan rekrutmen berbasis wilayah. Namun, ketimpangan distribusi antar kecamatan masih terjadi. Kecamatan seperti Sigi Biromaru, Dolo, dan Palolo mendominasi jumlah tenaga medis, sedangkan wilayah-wilayah terpencil relatif minim tenaga medis, termasuk bidan dan dokter gigi.

Gambar 2.45
Grafik Distribusi Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sigi



Sumber : Dinkes Kabupaten Sigi, 2025

4. Pelayanan Kesehatan Sepanjang Siklus Hidup
- Layanan kesehatan yang berbasis siklus hidup masih menghadapi tantangan. Layanan bagi ibu dan anak telah ditopang oleh puskesmas dan posyandu sebagai lini pelayanan utama, namun keterbatasan rumah sakit bersalin di beberapa kecamatan meningkatkan risiko komplikasi persalinan, khususnya di wilayah pegunungan dan terpencil. Bagi kelompok lanjut usia, belum tersedia fasilitas geriatri atau rumah sakit khusus lansia. Puskesmas masih menjadi tumpuan utama dalam pelayanan rutin penyakit kronis. Sementara itu, kelompok remaja dan dewasa masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan jiwa, termasuk ketiadaan layanan psikologi klinis di tingkat fasilitas dasar.
5. Perspektif Gender dalam Layanan Kesehatan
- Akses terhadap layanan kesehatan dasar seperti puskesmas dan posyandu relatif merata bagi laki-laki dan perempuan. Namun, kesenjangan geografis menyebabkan perempuan di wilayah pegunungan lebih rentan terhadap risiko kesehatan, terutama terkait layanan persalinan dan reproduksi. Keterbatasan jumlah bidan dan sarana transportasi medis di daerah terpencil memperburuk kondisi kerentanan ini.

Salah satu faktor yang patut untuk menjadi perhatian yaitu stunting yang merupakan indikator krusial yang mencerminkan kondisi kekurangan gizi kronis pada anak balita dan berkorelasi langsung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Penurunan stunting menjadi agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Sigi dalam rangka mendukung pembangunan manusia berkelanjutan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya SDGs 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDGs 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan).

Kondisi stunting di Kabupaten Sigi mengalami perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun tetap menunjukkan fluktuasi yang perlu dimaknai secara teknis dan kontekstual. Perbedaan metode survei memengaruhi angka yang tercatat, sehingga evaluasi keberhasilan program perlu didasarkan pada triangulasi data, pemantauan indikator sektoral lainnya, dan penguatan sistem monitoring di tingkat lokal. Konsistensi intervensi lintas sektor dan berbasis komunitas menjadi kunci dalam memastikan tren penurunan stunting yang berkelanjutan menuju target nasional sebesar 18,8% pada tahun 2025.

Gambar 2.46
Grafik Prevalensi Stunting di Kabupaten Sigi
Berdasarkan SSGI-SKI



Sumber : Publikasi SSGI-SKI, 2025

Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan signifikan prevalensi stunting dari 40,70% pada tahun 2021 menjadi 26,40% pada tahun 2023 berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Namun, pada tahun 2024, angka kembali mengalami kenaikan menjadi 33,00% berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Meskipun perbedaan metode survei antara SSGI dan SKI mempengaruhi tren, namun fluktuasi ini tetap menjadi peringatan penting terhadap potensi ketidakkonsistenan dalam intervensi gizi yang berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Selain SSGI dan SKI, terdapat metode lain yaitu Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPBGM) yaitu sistem informasi berbasis digital yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk mencatat status gizi balita secara *real-time* melalui input dari petugas gizi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas dan posyandu. Data ini bersifat administratif, berdasarkan hasil pengukuran langsung di lapangan.

Gambar 2.47
Grafik Prevalensi Stunting di Kabupaten Sigi
Berdasarkan e-PPBGM



Sumber : Data E-PPBGM dari Dinkes Kabupaten Sigi, 2025

Tren lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan angka stunting yang konsisten sejak tahun 2022. Penurunan dari 19,09% (2022) menjadi 15,80% (2023), dan selanjutnya menjadi 13,40% (2024), merupakan capaian positif yang mencerminkan penguatan layanan intervensi gizi spesifik di tingkat komunitas. Kecenderungan penurunan angka stunting dari 18,80% pada tahun 2020 menjadi 13,40% pada tahun 2024 menurut e-PPBGM menunjukkan keberhasilan teknis dalam operasionalisasi layanan gizi dan intervensi langsung berbasis komunitas. Namun demikian, perbedaan angka dengan survei nasional tetap harus diantisipasi dalam penyusunan kebijakan lintas sektor agar tidak menimbulkan bias dalam penilaian kinerja daerah.

Dibandingkan dengan data dari SSGI atau SKI yang berbasis survei nasional, angka dari e-PPBGM cenderung lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metodologi:

- **Sumber Data Langsung Lapangan**
Data dikumpulkan dari hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan anak balita di posyandu, dicatat dan dilaporkan oleh petugas gizi melalui aplikasi e-PPBGM.
- **Cakupan Bersifat Administratif dan Tidak Universal**
Tidak semua balita terdata secara lengkap karena kehadiran di posyandu tidak selalu 100%. Anak-anak yang tidak datang atau berada di wilayah sulit akses bisa tidak terjangkau, sehingga prevalensi bisa *underestimate* (lebih rendah dari kondisi sebenarnya).
- **Berorientasi pada Pemantauan Program**
Data e-PPBGM sangat berguna untuk *early warning system* dan pengambilan keputusan cepat di level operasional puskesmas dan desa, tetapi kurang cocok untuk estimasi makro secara agregat nasional seperti SSGI/SKI.

Data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau Survei Kesehatan Indonesia (SKI), dan data e-PPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) memiliki karakteristik yang berbeda dari sisi metodologi, cakupan, tujuan, serta penggunaan data. Berikut adalah penjelasan perbedaannya:

- **Sumber Data**
SSGI dan SKI merupakan survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). SSGI dilaksanakan hingga tahun 2023, sementara SKI mulai

digunakan pada tahun 2024 sebagai bagian dari penggabungan indikator kesehatan. Sementara itu, e-PPBGM adalah sistem pelaporan rutin berbasis aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan diisi oleh petugas gizi di puskesmas atau posyandu.

- **Jenis dan Metodologi Pengumpulan Data**
Data SSGI/SKI diperoleh melalui survei sampling dengan metodologi terstandar nasional yang mewakili seluruh populasi di tingkat kabupaten/kota. Data dikumpulkan oleh enumerator terlatih yang melakukan pengukuran antropometri sesuai standar WHO. Sebaliknya, data e-PPBGM merupakan data administratif yang dikumpulkan secara rutin oleh petugas gizi di lapangan, berdasarkan hasil pengukuran langsung pada kegiatan posyandu, yang kemudian diinput ke dalam sistem digital.
- **Frekuensi dan Cakupan Data**
SSGI/SKI dilakukan secara periodik (biasanya tahunan), sedangkan e-PPBGM dikumpulkan secara rutin setiap bulan atau triwulan. Cakupan data SSGI/SKI bersifat representatif secara statistik untuk seluruh wilayah, sedangkan cakupan e-PPBGM terbatas pada balita yang hadir saat kegiatan posyandu, sehingga data yang dihasilkan tidak mewakili seluruh populasi anak balita secara menyeluruh.
- **Validitas dan Tujuan Penggunaan**
Data SSGI/SKI memiliki tingkat validitas yang tinggi dan digunakan untuk pemantauan makro, penilaian capaian pembangunan, evaluasi RPJMD, serta pelaporan kinerja daerah. Sementara itu, data e-PPBGM lebih bersifat operasional dan digunakan untuk kebutuhan teknis seperti pemetaan kasus stunting *by name by address*, intervensi spesifik, dan pemantauan langsung di desa.
- **Kelebihan dan Keterbatasan**
SSGI/SKI unggul dari segi validitas, bisa digunakan untuk perbandingan antar wilayah, dan menjadi acuan nasional. Namun, publikasi hasilnya memerlukan waktu yang relatif lama. Di sisi lain, e-PPBGM bersifat *real-time* dan sangat berguna untuk pengambilan keputusan cepat, namun memiliki keterbatasan dari segi representativitas karena bergantung pada kehadiran anak di posyandu dan akurasi petugas dalam pengukuran.

Data SSGI/SKI dan e-PPBGM memiliki peran yang saling melengkapi. SSGI/SKI digunakan untuk pengambilan keputusan strategis dan evaluasi makro, sementara e-PPBGM digunakan untuk pemantauan rutin dan pelaksanaan intervensi teknis di tingkat lapangan. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan keduanya secara simultan dan melakukan validasi silang untuk memastikan akurasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program penurunan stunting secara komprehensif.

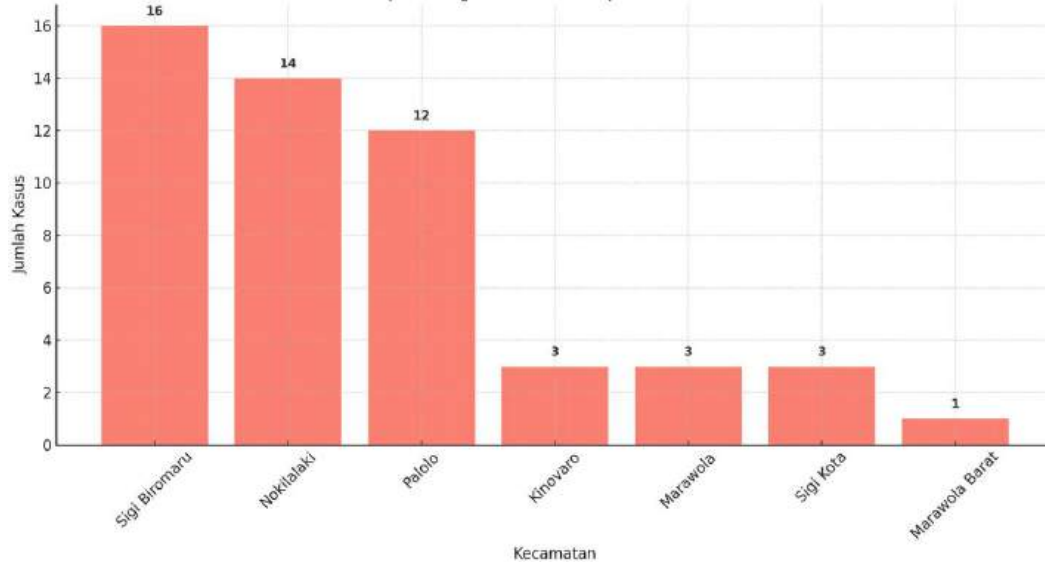
Perkawinan usia anak merupakan salah satu isu krusial yang masih ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Sigi. Berdasarkan data lima tahun terakhir (2020–2024), tercatat total 68 kasus perkawinan usia anak yang tersebar di sejumlah desa dan kecamatan yang terdiri dari 51 perkawinan usia anak hasil laporan/aduan yang mengalami kekerasan dan 17 data registrasi dispensasi kawin.

Adapun data Dispensasi kawin yang bersumber dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Pengadilan Negeri Donggala sebagai berikut.

1. 2023 : 8 registrasi dispensasi kawin
2. 2024 : 9 registrasi dispensasi kawin

Untuk data perkawinan usia anak hasil laporan/aduan yang mengalami kekerasan sebagai berikut.

Gambar 2.48
Data Perkawinan Usia Anak Kabupaten Sigi



Sumber : DP3A Kabupaten Sigi, 2025

Tabel 2.22
Data Perkawinan Usia Anak Kabupaten Sigi

Kecamatan	Desa	2020	2021	2022	2023	2024
Marawola	Bomba		2			
	Binangga					1
Palolo	Ue Rani	2	3	2		
	Rejeki	2				
	Maranata	2				
	Sejahtera					1
Nokilalaki	Kamarora B	1	3	2		
	Bulili		4			
	Kadidia	2	2			
Sigi Kota	Watubula		3			
Sigi Biromaru	Kalukubula	4	4	1		
	Pombewe			2		
	Raranggonau	2				
	Jono Oge	1				
	Maranata					1
Kinovaro	Uve Manje					2
	Balane					1
Marawola Barat	Ongurero					1
		16	21	7	0	7

Sumber : DP3A Kabupaten Sigi , 2025

Sebaran geografis menunjukkan bahwa Kecamatan Nokilalaki, Palolo, dan Sigi Biromaru merupakan wilayah dengan frekuensi kasus tertinggi. Beberapa desa seperti Kalukubula (Sigi Biromaru), Kamarora B (Nokilalaki), dan Ue Rani (Palolo) menjadi lokasi yang paling menonjol dalam hal perkawinan usia anak. Situasi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dan kultural yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Praktik perkawinan usia anak yang disertai kekerasan tidak hanya mengancam hak dasar anak, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya risiko stunting melalui beberapa jalur penyebab berikut:

- a. Risiko Kehamilan pada Usia Anak
Anak perempuan yang hamil di usia dini memiliki risiko tinggi melahirkan bayi dengan berat badan rendah, prematur, serta gangguan tumbuh kembang sejak dalam kandungan. Hal ini merupakan determinan langsung stunting pada anak usia bawah dua tahun (baduta).
- b. Kekerasan dan Lingkungan Pengasuhan Tidak Aman

Kekerasan rumah tangga yang dialami anak perempuan berpotensi menyebabkan trauma berkepanjangan, mengganggu kualitas pengasuhan, menurunkan kemampuan respons emosional ibu, dan menciptakan stres kronis yang berdampak pada status gizi anak.

- c. Rendahnya Akses terhadap Layanan Dasar
Anak perempuan korban perkawinan dini dan kekerasan kerap berasal dari keluarga rentan dan tinggal di wilayah terpencil, yang membuat mereka sulit mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.
- d. Berdampak pada dimensi sosial-ekonomi
Remaja perempuan yang menikah dini cenderung mengalami putus sekolah, terbatas akses terhadap informasi kesehatan, dan menghadapi kesulitan ekonomi rumah tangga. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengasuhan dan pemenuhan gizi balita tidak optimal, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya prevalensi stunting.

Dalam konteks Kabupaten Sigi, strategi penanggulangan stunting perlu disinergikan dengan upaya pencegahan perkawinan usia anak secara lintas sektor. Hal ini meliputi:

- Penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi di tingkat sekolah dan komunitas;
- Peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
- Advokasi dan regulasi lokal untuk membatasi praktik perkawinan usia dini;
- Penyusunan dan implementasi rencana aksi desa ramah anak sebagai bagian dari strategi perlindungan anak berbasis komunitas.

Dengan demikian, pendekatan integratif antara intervensi penurunan stunting dan perlindungan anak harus menjadi bagian dari kerangka kebijakan pembangunan sosial dan kesehatan di Kabupaten Sigi. Penanganan perkawinan usia anak bukan hanya isu perlindungan hak anak, melainkan juga strategi penting dalam menjamin generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif.

Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sigi terus dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan multisektor. Evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi stunting menjadi instrumen penting untuk menilai kinerja lintas perangkat daerah dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting dan meningkatkan cakupan intervensi pada kelompok sasaran. Evaluasi terhadap 29 indikator menunjukkan bahwa terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target, di antaranya layanan kesehatan calon pasangan usia subur, pendampingan reproduksi, PHBS, dan akses sanitasi. Sebaliknya, indikator seperti konsumsi tablet tambah darah oleh ibu hamil dan pendampingan keluarga menunjukkan hasil baik. Adapun fokus intervensi kelompok sasaran sebagai berikut.

Tabel 2.23
Fokus Intervensi Kelompok Sasaran Stunting

Kelompok Sasaran	Jenis Intervensi Utama	Pelaksana/Penanggung Jawab
Remaja putri & calon pengantin	Tablet tambah darah, pemeriksaan anemia, bimbingan perkawinan, edukasi reproduksi	KUA, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
Ibu hamil & menyusui	Pemeriksaan kehamilan, PMT, konsumsi TTD, pelayanan KB, bantuan pangan	TP PKK, Puskesmas, Dinas Kesehatan
Anak 0–59 bulan	IMD, ASI eksklusif, MPASI, pemantauan pertumbuhan, imunisasi, vitamin A, MTBS	Kader Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan
Keluarga miskin/berisiko stunting	Fortifikasi makanan, bantuan pangan, PHBS, sanitasi, air bersih, pemanfaatan pekarangan	Dinkes, Ketahanan Pangan, PMD, Desa, TP PKK, DP2KB
Rumah tangga	Akses air dan sanitasi layak, data kependudukan, edukasi gizi	Dinas PUTR, Disdukcapil, Dinkes, DP2KB

Sumber : Laporan Evaluasi Stunting, 2025

Perangkat daerah diinstruksikan untuk mempercepat pencapaian indikator melalui program yang lebih masif dan berbasis data. Beberapa tanggung jawab antara lain:

- Dinkes: layanan kesehatan PUS, KB pasca persalinan
- DP2KB: Bina Keluarga Balita
- Dinas Pendidikan: Kelas Parenting, PAUD
- Dinas Sosial: FDS bagi KPM PKH
- Distanhorbun: pangan Lestari
- Dinas PUTR: sanitasi dan air bersih

Program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sigi telah menunjukkan hasil positif, namun masih diperlukan peningkatan sinergi, cakupan, dan kualitas intervensi untuk mencapai target penurunan stunting secara berkelanjutan. Komitmen lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan Sigi Bebas Stunting. Maka sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan angka stunting secara terstruktur dan sistematis, Pemerintah Kabupaten Sigi telah mengembangkan Program “Tuntaskan Stunting Menuju Sigi Emas” (TIM GEMAS). Program ini merupakan wujud implementasi kebijakan daerah dalam mempercepat pencegahan dan penurunan stunting yang terintegrasi dengan pendekatan multisektor dan berbasis komunitas. Program ini ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029, dengan target penurunan prevalensi stunting menjadi 30% pada tahun 2025, dari angka 33,0% pada tahun 2024 (berdasarkan SKI).

Pelaksanaan strategi dilakukan berdasarkan prinsip kolaborasi, keterpaduan, partisipatif, prioritas, keterbukaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Fokus intervensi diarahkan kepada kelompok sasaran utama: ibu hamil dan menyusui, anak usia 0–59 bulan, remaja putri dan calon pengantin, serta keluarga dan masyarakat. Program ini diimplementasikan melalui lintas sektor: Dinas P2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PMD, Puskesmas, Pemerintah Kecamatan dan Desa, serta kader-kader Posyandu dan PKK. Intervensi dilakukan baik secara spesifik (gizi, kesehatan ibu-anak, ASI, MP-ASI, imunisasi) maupun sensitif (sanitasi, air bersih, bantuan pangan, edukasi gizi, ketahanan pangan rumah tangga).

Program “Tuntaskan Stunting Menuju Sigi Emas” merupakan bentuk kebijakan strategis berbasis lokal yang mengedepankan sinergi antar-perangkat daerah dan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif, diharapkan penurunan stunting di Kabupaten Sigi dapat dicapai secara signifikan, berkelanjutan, dan inklusif.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan di Kabupaten Sigi telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal partisipasi, fasilitas, dan literasi dasar. Namun tantangan terbesar masih pada jenjang pendidikan menengah dan atas, terutama di wilayah terpencil. Pemerataan guru dan fasilitas sekolah perlu ditingkatkan untuk menjamin keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang gender atau lokasi geografis.

Adapun secara umum mengenai pendidikan di Kabupaten Sigi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Angka Partisipasi Pendidikan

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sigi Periode Tahun 2020-2024

Uraian	Angka Partisipasi Murni (APM)					Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SD / MI / Sederajat	93,1	93,5	93,94	94,09	95,28	102,4	103,37	101,15	102,03	100,67
SLTP / MTs / Sederajat	75,2	75,84	76,6	73,70	77,09	90,87	92,39	93,78	88,98	84,87

Sumber : Publikasi BPS, 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan peningkatan, terutama di tingkat dasar. Hal ini menunjukkan akses terhadap pendidikan semakin meningkat, namun partisipasi di tingkat menengah masih rendah sehingga perlu menjadi perhatian

2. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru

Tabel 2.25
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Sigi Periode Tahun 2020-2024

Tahun Ajaran	Sekolah		Murid		Guru	
	SD / MI	SLTP / MTS	SD / MI	SLTP / MTS	SD / MI	SLTP / MTS
2020	268	67	21.013	6.456	2.293	769
2021	268	67	24.977	9.136	2.312	802
2022	268	67	24.545	8.590	2.340	848
2023	268	67	24.645	8.294	2.460	880
2024	268	67	25653	8283	2691	955

Sumber : Dikbud kabupaten Sigi, 2025

3. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Wilayah

- Dari total 177 desa:
 - 172 memiliki sekolah dasar
 - 60 memiliki SMP
 - Hanya sebagian kecil memiliki SMA atau SMK
- Wilayah seperti Sigi Biromaru, Palolo, dan Dolo memiliki fasilitas pendidikan lengkap.
- Daerah seperti Pipikoro dan Lindu memiliki keterbatasan akses.

4. Tingkat Pendidikan Penduduk

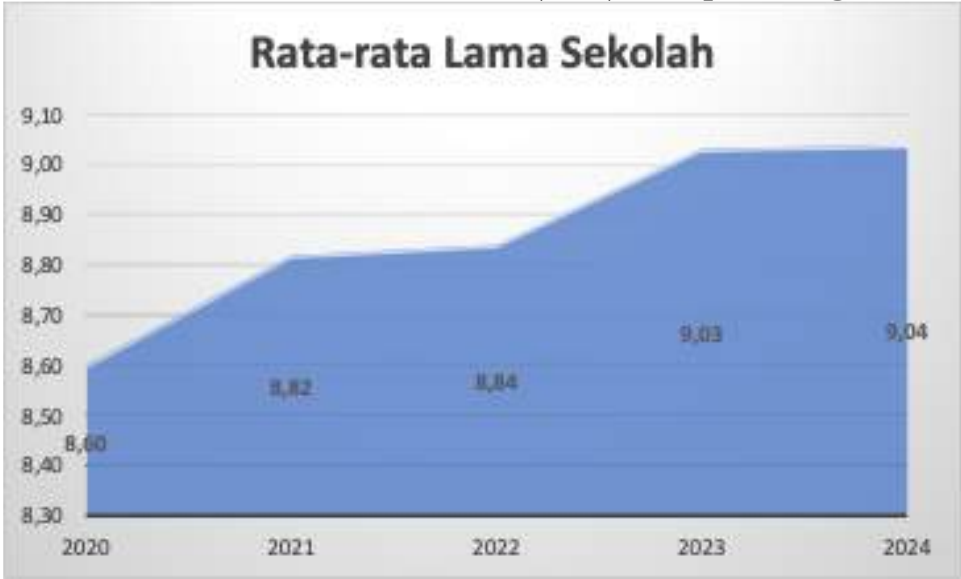
- Penduduk usia 15+ tahun yang menyelesaikan:
 - SD: mayoritas (sekitar 40%)
 - SMP–SMA: bertahap meningkat
 - Perguruan tinggi: masih rendah
- Terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses pendidikan tinggi di beberapa wilayah pedesaan.

5. Melek Huruf

- Angka melek huruf total usia 15+ tahun mencapai 98,26%.
- Laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding perempuan.
- Kelompok lansia (60+) menunjukkan kemajuan, dari 91,39% (2023) menjadi 93,01% (2024)

Berdasarkan Indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan Realisasi aktual lama pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas serta Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merupakan rata-rata tahun sekolah yang diharapkan dijalani anak-anak yang masuk sistem pendidikan saat ini dapat terlihat pada grafik visual komparatif berikut.

Gambar 2.49
Grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sigi



Sumber : Publikasi BPS, 2025

Gambar 2.50
Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sigi



Sumber : Publikasi BPS, 2025

Dari grafik tersebut, dapat terlihat bahwa RLS meningkat stabil dari 8,60 tahun (setara kelas 2 SMP) menjadi 9,04 tahun (setara kelas 3 SMP). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum, penduduk dewasa di Sigi semakin banyak yang menamatkan jenjang pendidikan dasar dan sebagian menengah. Kenaikan RLS mencerminkan hasil dari akses pendidikan masa lalu, dan peningkatannya yang perlahan menandakan perlunya upaya percepatan pendidikan nonformal dan kejar paket bagi warga dewasa.

HLS mendekati 13 tahun, yang berarti anak-anak di Sigi diperkirakan akan menempuh pendidikan hingga kelas 3 SMA. Tren ini positif, menandakan ekspansi akses pendidikan sudah cukup merata, dan ada harapan besar dari sistem pendidikan formal di masa mendatang. Selisih yang besar (4 tahun) antara RLS dan HLS mengindikasikan bahwa generasi muda memiliki peluang pendidikan yang jauh lebih baik daripada generasi

sebelumnya, namun masih ada ketimpangan antar generasi dan wilayah, khususnya di daerah terpencil atau kurang akses.

Namun, terdapat fenomena yaitu banyak anak-anak dan remaja dari Kabupaten Sigi yang melanjutkan sekolah diluar kota, salah satunya di Kota Palu, terutama pada jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi. Ini terjadi karena beberapa faktor:

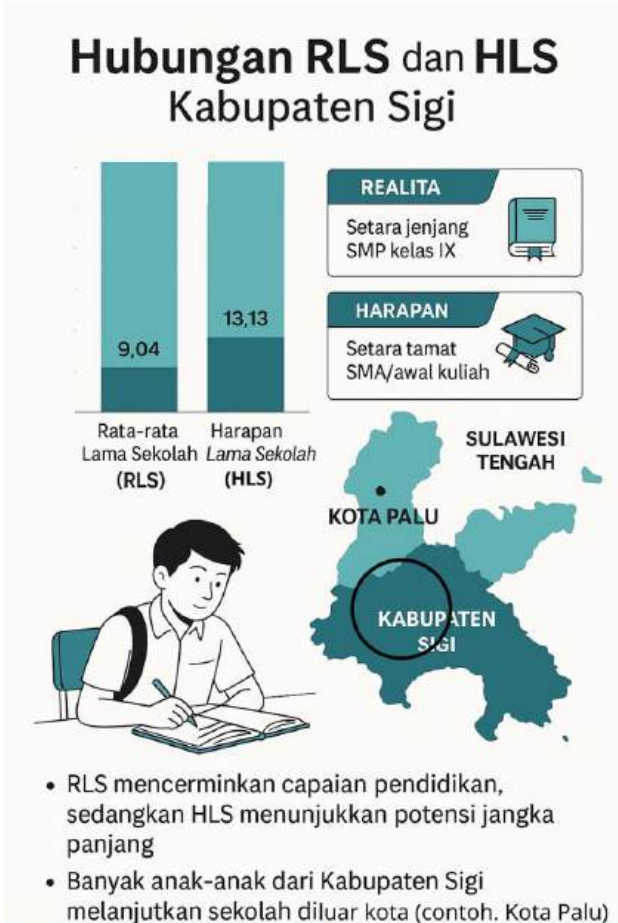
1. Ketersediaan Fasilitas dan Kualitas Pendidikan:
 - Di Kota Palu tersedia lebih banyak sekolah unggulan, SMK kejuruan spesifik, hingga kampus perguruan tinggi.
 - Sarana seperti laboratorium, tenaga pengajar bersertifikasi, dan akses ke teknologi lebih lengkap.
2. Aksesibilitas Wilayah:
 - Jarak Sigi ke Palu relatif dekat (berbatasan langsung), dengan akses transportasi yang terhubung melalui jalan provinsi.
3. Dorongan Aspirasi Pendidikan:
 - Masyarakat Sigi secara kultural dan aspiratif memandang Palu sebagai pusat pendidikan di Sulawesi Tengah, sehingga anak-anak didorong untuk melanjutkan ke Palu.
4. Keterbatasan Sekolah Lanjutan di Wilayah Tertentu di Sigi:
 - Kecamatan-kecamatan di pedalaman atau pegunungan seperti Kulawi dan Pipikoro masih menghadapi tantangan infrastruktur, sehingga siswa mencari pendidikan lanjutan ke kota.

Meskipun tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sigi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, penting untuk dicermati bahwa indikator ini dapat mengandung bias struktural yang perlu dianalisis secara mendalam. Salah satu penyebab utama adalah tingginya proporsi anak-anak Kabupaten Sigi yang melanjutkan pendidikan menengah dan tinggi di luar wilayah, terutama ke Kota Palu.

Fenomena ini menyebabkan capaian tahun sekolah yang diperoleh di luar daerah tetap tercatat dalam data asal penduduk (Kabupaten Sigi), padahal secara nyata akses terhadap layanan pendidikan tersebut berada di luar infrastruktur pendidikan Kabupaten Sigi. Dengan demikian, indikator RLS dan HLS tidak selalu merefleksikan kualitas, ketersediaan, atau pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah administratif Sigi. Atas dasar hal tersebut, maka dapat melahirkan implikasi Kebijakan berikut.

1. Interpretasi hati-hati terhadap indikator pendidikan: Peningkatan angka bukan berarti terjadi secara merata di seluruh kecamatan atau mencerminkan kualitas layanan lokal.
2. Perluasan dan penguatan layanan pendidikan lokal: Perlu intervensi strategis dalam pembangunan sekolah menengah, fasilitas kejuruan, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik di daerah-daerah pinggiran dan pedalaman.
3. Strategi afirmatif bagi pelajar perdesaan: Dukungan berupa beasiswa, transportasi pendidikan, atau pengembangan asrama pelajar dapat membantu menutup kesenjangan akses antarwilayah.
4. Optimalisasi peran data spasial dan longitudinal: Diperlukan pelacakan berbasis wilayah belajar siswa untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih presisi dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kesimpulan ini menjadi pijakan penting bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Sigi dapat menjamin kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak-anak Sigi, tanpa harus bergantung pada urbanisasi pendidikan ke luar daerah.



D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial di Kabupaten Sigi merupakan elemen fundamental dalam pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen untuk memperkuat sistem perlindungan sosial sebagai instrumen utama dalam merespons risiko sosial, mengurangi kerentanan masyarakat, serta mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga, khususnya kelompok miskin, rentan, dan pekerja informal.

Gambar 2.51
Grafik Tenaga Kerja yang memiliki Jaminan Ketenagakerjaan Kabupaten Sigi



Sumber : Disnakertrans Kabupaten Sigi, 2025

Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan perlindungan sosial di bidang ketenagakerjaan adalah cakupan jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja. Berdasarkan data yang tersedia, persentase tenaga kerja yang memiliki jaminan ketenagakerjaan pada tahun 2022 mencapai 96,00%, dan sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 95,62%. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan, yakni hanya sebesar 45,30%. Penurunan ini mencerminkan adanya

tantangan serius dalam menjaga keberlangsungan akses jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Sigi.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain meningkatnya proporsi tenaga kerja di sektor informal yang belum terlindungi oleh skema jaminan ketenagakerjaan, perubahan metode pendataan, atau lemahnya pengawasan dan pelaporan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi rumah tangga yang bergantung pada sektor kerja informal dan tidak memiliki perlindungan dasar terhadap risiko kehilangan pekerjaan, kecelakaan kerja, atau hari tua.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Agama di Kabupaten Sigi berperan sebagai pilar spiritual, moral, dan budaya yang menjadi fondasi pembangunan masyarakat yang bermartabat dan inklusif. Peran agama di Kabupaten Sigi tidak hanya sebagai urusan spiritual pribadi, melainkan telah berkembang menjadi penguat etika publik dan nilai kemanusiaan, sumber solidaritas sosial dalam kondisi krisis, dan medium pelestarian budaya dan identitas lokal untuk pembangunan yang inklusif dan bermartabat. Penguatan sinergi antara lembaga agama, pendidikan, dan budaya sangat penting ke depan.

Adapun secara umum mengenai beragama dan berkebudayaan di Kabupaten Sigi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Keragaman dan Kehidupan Keagamaan

Kabupaten Sigi memiliki masyarakat yang plural secara agama, dengan dominasi pemeluk Islam dan Kristen, serta keberadaan minoritas Katolik dan Hindu.

- Kecamatan Sigi Biromaru, Palolo, dan Kulawi menjadi pusat kegiatan keagamaan dengan jumlah rumah ibadah terbanyak.
- Kerukunan antarumat beragama dijaga melalui kolaborasi tokoh agama, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), dan ormas keagamaan lokal.

2. Agama sebagai Landasan Etika dan Karakter

- Kehadiran lembaga pendidikan berbasis agama seperti madrasah (MI, MTs, MA) dan Raudhatul Athfal (RA) yang dikelola Kementerian Agama menjadi pilar penting dalam pembinaan moral dan spiritual generasi muda.
- Pendidikan agama tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga diperkuat melalui pengajian, sekolah minggu, dan retreat rohani.

3. Agama dan Kearifan Lokal

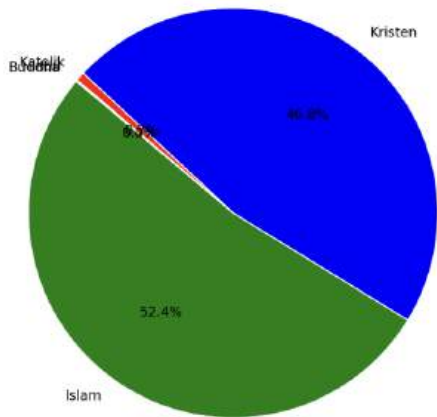
- Dalam masyarakat adat di wilayah Kulawi dan Lindu, ajaran agama sering berintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal, seperti upacara adat yang diselenggarakan dengan nilai religius.
- Penguatan agama secara kontekstual membantu memperkuat jati diri lokal, menciptakan harmoni antara spiritualitas dan budaya.

4. Peran Strategis dalam Ketangguhan Sosial

- Dalam kondisi bencana (gempa 2018 dan banjir tahunan), komunitas keagamaan berperan aktif dalam:
 - Menyediakan dukungan psikososial
 - Mengorganisir bantuan kemanusiaan
 - Menjadi tempat pengungsian (khususnya masjid dan gereja)
- Ini menunjukkan bahwa institusi keagamaan menjadi modal sosial strategis dalam membangun ketahanan komunitas.

Gambar 2.52
Grafik Distribusi Tempat Ibadah berdasarkan Agama
Kabupaten Sigi

Distribusi Tempat Ibadah Berdasarkan Agama
Kabupaten Sigi (2024)



Sumber : Publikasi BPS, 2025

Grafik ini menggambarkan peran besar komunitas agama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sigi dengan Islam dan Kristen mendominasi jumlah rumah ibadah, menunjukkan dua agama utama yang dianut masyarakat. Katolik dan Hindu hadir dalam jumlah kecil, menunjukkan keragaman yang tetap terakomodasi. Tidak terdapat vihara, mengindikasikan minimnya pemeluk Buddha.

F. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

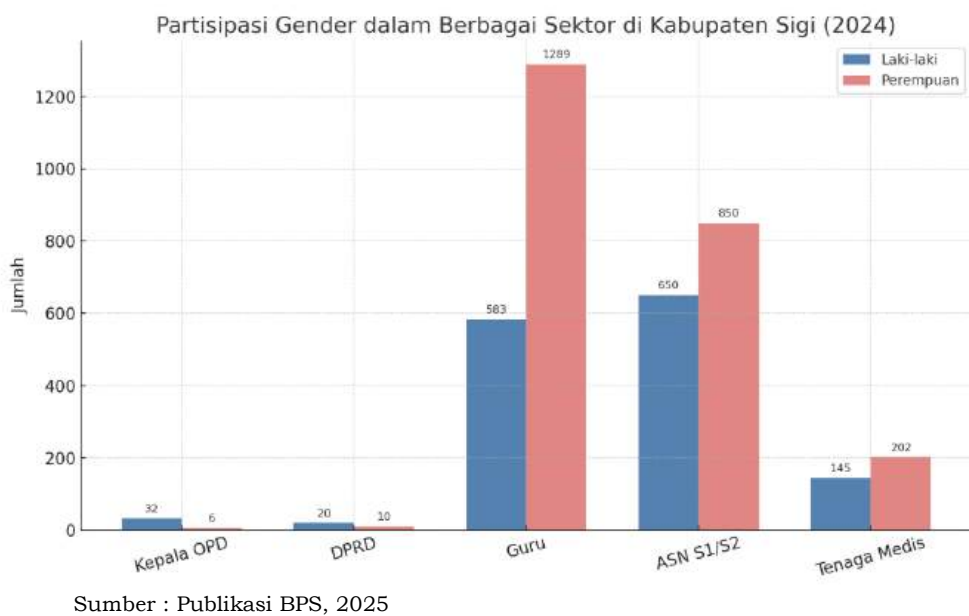
Ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat di Kabupaten Sigi, termasuk strategi pengarusutamaan gender, sebagai fondasi pembentukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan inklusif. Kabupaten Sigi sedang menuju pembangunan yang berbasis ketangguhan masyarakat, namun perlu strategi sistematis untuk mengarusutamakan gender di semua level kebijakan dan program. Perempuan sudah menunjukkan ketangguhan sosial dan ekonomi, tetapi masih perlu penguatan dukungan struktural. Sinergi antar sektor (pendidikan, sosial, pekerjaan, dan politik) penting untuk membentuk SDM unggul yang menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun secara umum mengenai keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif di Kabupaten Sigi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ketangguhan Individu dan Masyarakat
Kabupaten Sigi menunjukkan upaya peningkatan ketangguhan sosial melalui:
 - Partisipasi kerja tinggi: Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 75,92% pada 2024. Sebanyak 97,45% dari angkatan kerja aktif bekerja, menunjukkan kapasitas ekonomi yang kuat di masyarakat.
 - Pekerja keluarga tidak dibayar masih mendominasi, sebanyak 148.749 orang, menandakan masih tingginya ketergantungan ekonomi rumah tangga terutama pada sektor informal.
 - Masyarakat menunjukkan ketahanan pascabencana, khususnya pascagempa 2018, melalui gotong royong, peran komunitas lokal, dan penguatan lembaga desa.
2. Ketangguhan Keluarga
 - Perempuan memainkan peran penting dalam rumah tangga, tercermin dari tingginya jumlah perempuan yang mengurus rumah

- tangga secara penuh, yaitu 25.750 orang, dibanding hanya 1.144 laki-laki.
- Perempuan juga berkontribusi besar dalam sektor informal dan pertanian, meskipun belum sepenuhnya terlindungi oleh sistem jaminan sosial.
3. Ketimpangan dan Pengarusutamaan Gender
- Ketimpangan gender masih terlihat, terutama dalam jabatan struktural dan kepemimpinan:
 - Hanya 6 dari 38 pejabat tinggi pratama (16%) adalah perempuan.
 - Namun, di bidang fungsional seperti guru dan tenaga medis, perempuan mendominasi (1.289 guru perempuan vs 583 laki-laki).
 - Di sektor politik, representasi perempuan di DPRD mencapai 10 dari 30 kursi (33,3%), angka yang relatif tinggi secara nasional (22%) dan menunjukkan komitmen terhadap keterwakilan gender.
4. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)
- Kabupaten Sigi belum memiliki data terbaru mengenai strategi PUG, tetapi distribusi ASN, partisipasi politik, dan peran sosial menunjukkan adanya arah menuju kesetaraan gender fungsional.
 - Perlu penguatan pada:
 - Kebijakan afirmatif bagi perempuan kepala keluarga dan lansia perempuan
 - Akses pelatihan dan permodalan usaha bagi perempuan di sektor informal
 - Peningkatan peran perempuan dalam lembaga adat dan pengambilan keputusan desa
5. Modal Sosial dan Pendidikan
- 98,84% perempuan usia 15+ melek huruf, hampir setara dengan laki-laki (99,57%), menunjukkan potensi SDM perempuan untuk berkontribusi lebih besar.
 - Pendidikan tinggi: Lebih banyak perempuan ASN yang lulus S1 dan S2 dibanding laki-laki.

Gambar 2.53
Grafik Partisipasi Gender dalam berbagai Sektor di Kabupaten Sigi



Dari grafik terlihat bahwa perempuan mendominasi sektor guru, ASN berpendidikan tinggi, dan tenaga medis. Namun, jumlah perempuan pada jabatan struktural (Kepala OPD) masih jauh di bawah laki-laki. Representasi perempuan di DPRD mencapai 33,3%, menunjukkan kemajuan politik yang signifikan. Visual ini memperlihatkan kemajuan

sekaligus tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan ketangguhan sosial.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) berperan sebagai penggerak perekonomian daerah di Kabupaten Sigi. SDM di Kabupaten Sigi memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan struktural, antara lain dominasi pekerjaan informal dan tanpa upah, kesenjangan akses terhadap pendidikan tinggi, serta perlunya pelatihan kerja berbasis keterampilan teknis dan kewirausahaan. Dengan investasi di bidang pendidikan, pelatihan vokasi, dan digitalisasi UMKM, SDM Sigi diharapkan dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

1. Kualitas dan Partisipasi Tenaga Kerja

- Jumlah angkatan kerja: 152.638 orang
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK): 75,92%
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sangat rendah: hanya 2,55%, mencerminkan utilisasi tenaga kerja yang tinggi.

Namun, 148.749 orang (99%) bekerja sebagai buruh keluarga tidak dibayar, menunjukkan dominasi pekerjaan informal yang belum produktif secara ekonomi.

2. Pendidikan dan Kompetensi SDM

Tingkat pendidikan SDM memengaruhi produktivitas kerja:

Lulusan perguruan tinggi memiliki partisipasi kerja tertinggi, menunjukkan pentingnya peningkatan akses pendidikan tinggi untuk memperkuat SDM.

3. Struktur Pekerjaan dan Lapangan Usaha

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai:

- Pekerja keluarga (*unpaid workers*): 148.749 orang
- Buruh/karyawan/pegawai tetap: 33.050 orang
- Pekerja bebas non-pertanian (termasuk UMKM dan jasa informal): 30.617 orang

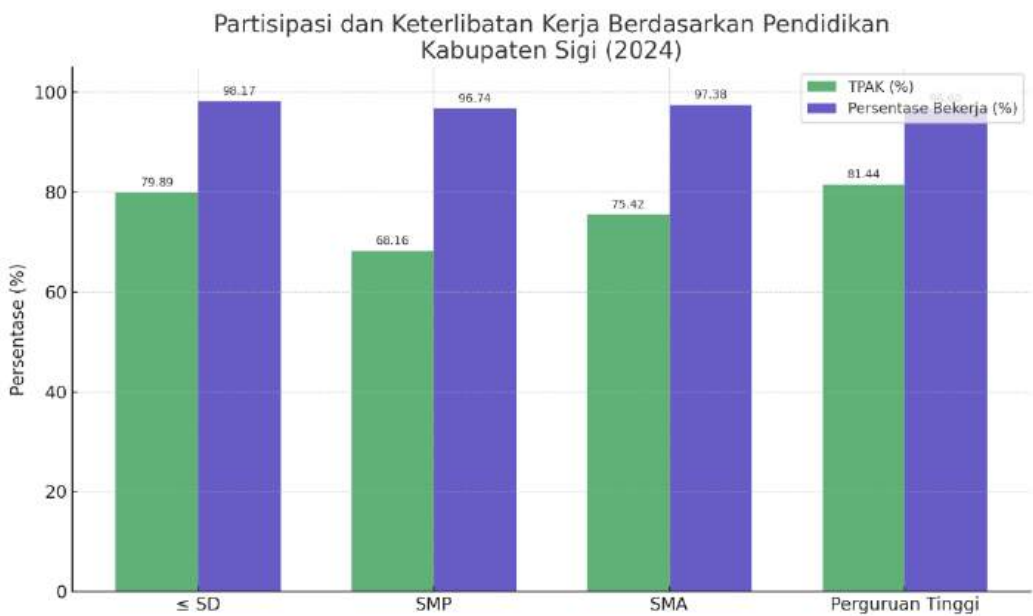
Ini menunjukkan ketergantungan ekonomi pada sektor informal dan rumah tangga yang rentan terhadap perubahan ekonomi dan bencana.

4. Keterkaitan SDM dengan Pertumbuhan Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi tahun 2024 mencapai 3,50%, sedikit membaik dibanding 2023.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 70,90, mencerminkan peningkatan di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas SDM turut mendorong daya saing dan produktivitas daerah.

Gambar 2.54
Grafik Partisipasi dan Keterlibatan Kerja Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Sigi



Sumber : Publikasi BPS, 2025

Berikut adalah grafik yang menunjukkan keterkaitan antara pendidikan dan partisipasi kerja di Kabupaten Sigi:

- TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) tertinggi berada pada lulusan perguruan tinggi, diikuti lulusan SD.
- Persentase yang bekerja tetap tinggi di semua jenjang, menandakan masyarakat Sigi sangat aktif secara ekonomi, meskipun banyak di sektor informal.

Grafik ini menegaskan bahwa peningkatan Pendidikan, terutama ke jenjang tinggi, berbanding lurus dengan ketangguhan dan kontribusi ekonomi SDM.

Pemerintah Kabupaten Sigi terus berupaya mendorong pemerataan pembangunan dan keseimbangan demografis antar wilayah melalui penguatan kebijakan transmigrasi berbasis kawasan. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 115 Tahun 2018, Kawasan Transmigrasi Palolo telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional yang berperan sebagai simpul integrasi sosial-ekonomi berbasis pertanian.

Secara administratif, kawasan ini mencakup 4 kecamatan dan 37 desa, dengan cakupan wilayah seluas 57.570,03 hektare dan total populasi mencapai 62.407 jiwa. Wilayah transmigrasi terbagi ke dalam Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB), dengan struktur pelayanan berbasis Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi (PPLT) di UPT Bulupountu dan Lembantongoa. Dari total 37 desa dalam kawasan, status IDM 2023 mencatat 18 desa berstatus *maju*, 18 *berkembang*, dan 1 *tertinggal*.

Pembangunan transmigrasi di Sigi menggunakan pendekatan kawasan terpadu yang memadukan aspek permukiman, usaha ekonomi, serta akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur wilayah. Pengembangan wilayah ini sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi dan telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Palolo Tahun 2018 sebagai acuan operasional lintas sektor.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta inovasi di Kabupaten Sigi dapat menjadi pendorong produktivitas ekonomi dan penguatan struktur ekonomi jangka Panjang. Meskipun masih berkembang, Iptek di Kabupaten Sigi menunjukkan tren positif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi sektor jasa dan komunikasi, peningkatan kapasitas SMK dan lembaga pendidikan vokasi, serta dukungan lembaga UMKM/koperasi terhadap inovasi komunitas. Namun, penguatan sistem riset dan pengembangan, inkubasi UMKM berbasis teknologi, serta pemerataan akses internet masih menjadi tantangan strategis dalam 5 tahun ke depan.

1. Infrastruktur Iptek dan Pendidikan Vokasi
- Kabupaten Sigi memiliki 11 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (5 negeri dan 6 swasta) yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Sigi Biromaru, Marawola, Dolo, Dolo Barat, Kinovaro, Kulawi Selatan, dan Nokilalaki.
 - SMK menjadi lembaga penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang pertanian, teknik, dan jasa.

Tabel 2.26
Data Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sigi

Nama SMK	Alamat Lengkap	Kecamatan
SMK NEGERI 1 SIGI	JL. RAYA PALU-PALOLO KM. 14 SIDERA, Sidera	Sigibiromaru
SMK NEGERI 2 SIGI	JL. RAYA PALU-GIMPU KM. 102, Gimpu	Kulawi Selatan
SMK NEGERI 3 SIGI	JL. BUKIT INDAH TABINGGA, Porame	Kinovaro
SMK NEGERI 4 SIGI	Desa Bulili, Bulili	Nokilalaki
SMK NEGERI 1 DOLO BARAT	Jl. Poros Palu Bangga, Desa Bobo, Bobo	Dolo Barat
SMK JANUR PERSADA SIGI	JL. Amanah II, Lolu	Sigibiromaru
SMK MUTIARA INSAN SIGI	Desa Kalukubula, Kalukubula	Sigibiromaru
SMKS KRISTEN BK MARANATHA	JL. POROS MARANATHA-PALOLO, Maranata	Sigibiromaru
SMKS MUHAMMADIYAH MARAWOLA	JL. DAHLIA NO. 33, Binangga	Marawola
SMKS PGRI 1 MARAWOLA	JLN. KRAMAT JAYA NO. 20, Tinggede	Marawola
SMKS AL-IKHSAN SIGI	Langaleso	Dolo
Sumber : Basis data sekolah, 2025		

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Peran sektor Informasi dan Komunikasi dalam PDRB Kabupaten Sigi terus meningkat: dari Rp197,85 miliar (2020) menjadi Rp256,48 miliar pada 2024, menunjukkan pertumbuhan infrastruktur digital dan adopsi teknologi.
 - Ini mengindikasikan ekspansi penggunaan internet, media digital, dan potensi *e-commerce* yang berkembang, terutama di sektor jasa dan perdagangan.
3. Inovasi dan Koperasi
- Selama periode tahun 2020 hingga 2024, jumlah koperasi aktif dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sigi mengalami fluktuasi yang menunjukkan kecenderungan menurun. Dinamika ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam penguatan kelembagaan dan daya saing sektor ekonomi kerakyatan di tingkat daerah.

Tabel 2.27
Data Koperasi aktif dan UKM Kabupaten Sigi

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif	82	85	95	53	51
Jumlah UMKM	32.062	22.845	22.845	19.875	18293
Sumber :	Pendataan Dinas Kop UMKM baseline data 2017 survei BPS 2024				

Data menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sigi meningkat dari 82 unit pada tahun 2020 menjadi 95 unit pada 2022, namun kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 53 koperasi pada 2023 dan 51 koperasi pada 2024. Sementara itu, jumlah UMKM mengalami penurunan tajam dari 32.062 pelaku pada tahun 2020 menjadi hanya 18.293 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan tantangan struktural dalam keberlangsungan usaha kecil di daerah, termasuk minimnya akses terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, serta kapasitas kelembagaan yang masih lemah.

Perlu dicermati bahwa dalam kerangka regulasi terbaru, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pengembangan UMKM telah mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan, disebutkan bahwa urusan pengembangan usaha mikro menjadi kewenangan kabupaten/kota, sementara usaha kecil dan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Konsekuensinya, intervensi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi secara langsung saat ini terbatas pada usaha mikro, baik dalam hal pembinaan, fasilitasi bantuan, hingga pelaporan kinerja. Penyesuaian ini juga berdampak terhadap validitas dan cakupan pendataan UMKM, yang pada tahun 2024 mengacu pada data hasil Survei BPS dan bukan lagi *baseline* internal 2017.

Meski demikian, upaya Pemerintah Kabupaten Sigi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dukungan kepada usaha mikro tetap menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 215 penerima bantuan UMKM tahun anggaran 2022 dan 2023 oleh Dinas Koperasi dan UKM, ditemukan bahwa:

- 92,56% pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya, dan
- 93,95% responden menyatakan bantuan berdampak positif terhadap kemajuan usaha mereka.
- Pertumbuhan rata-rata omzet pasca bantuan mencapai ±89%, dengan beberapa usaha bahkan mengalami kenaikan omzet lebih dari 100–300% sesuai data lapangan.

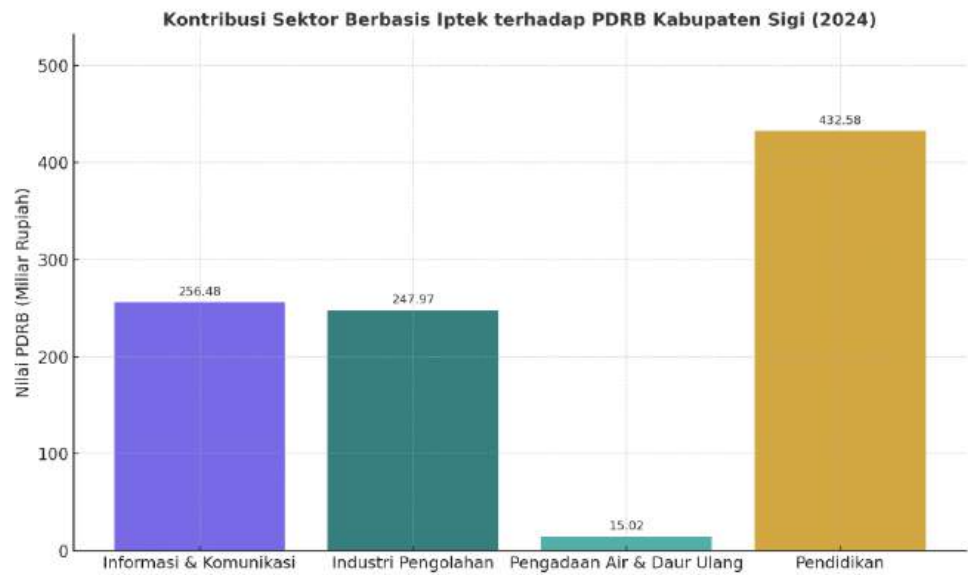
Jenis usaha penerima didominasi oleh sektor perdagangan (83,25%), diikuti oleh jasa (7,9%), industri rumah tangga (5,58%), dan industri kecil dan menengah (3,25%). Bantuan yang diberikan sebagian besar berupa bantuan supermikro sebesar Rp1.500.000, yang digunakan untuk pembelian bahan baku, alat produksi sederhana, serta penguatan modal kerja. Proses pengusulan dan pencairan bantuan dinilai tidak menyulitkan oleh mayoritas penerima, dan tidak ditemukan laporan praktik pungli dalam penyalurannya.

Meskipun data monitoring ini bersifat sampling, cakupan yang melibatkan 12 kecamatan memberi gambaran representatif atas kondisi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sigi. Capaian positif ini menjadi bukti bahwa pemberian bantuan yang tepat sasaran, meskipun dalam skala kecil, dapat menghasilkan dampak signifikan terhadap produktivitas, keberlanjutan, dan kemandirian ekonomi lokal, terutama di masa pasca pandemi dan tekanan inflasi.

Namun, keberhasilan tersebut perlu diikuti dengan kebijakan lanjutan yang bersifat transformatif, seperti pelatihan dan pendampingan manajemen usaha, digitalisasi UMKM, perluasan akses pasar melalui ekosistem *e-commerce* lokal, serta integrasi program pembinaan lintas kewenangan antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Dengan demikian, meskipun secara statistik jumlah UMKM dan koperasi aktif menurun, pendekatan berbasis kualitas, efektivitas intervensi, dan keberlanjutan jangka panjang harus menjadi fokus utama dalam kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sigi ke depan.

4. Kontribusi Iptek terhadap PDRB
- Beberapa sektor yang sangat dipengaruhi oleh teknologi mengalami pertumbuhan nyata:

Gambar 2.55
Grafik Kontribusi Sektor Berbasis Iptek terhadap PDRB di Kabupaten Sigi



Sumber : Publikasi BPS, 2025

Berikut adalah grafik kontribusi sektor berbasis Iptek terhadap PDRB Kabupaten Sigi tahun 2024:

- Sektor Pendidikan memberikan kontribusi terbesar, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi serta Industri Pengolahan, menunjukkan bahwa teknologi mulai mendorong layanan publik dan ekonomi riil.
- Pengadaan Air & Daur Ulang meski kecil, mencerminkan potensi inovasi ramah lingkungan.

Gambar ini menegaskan pentingnya penguatan Iptek untuk mempercepat transformasi ekonomi berkelanjutan.

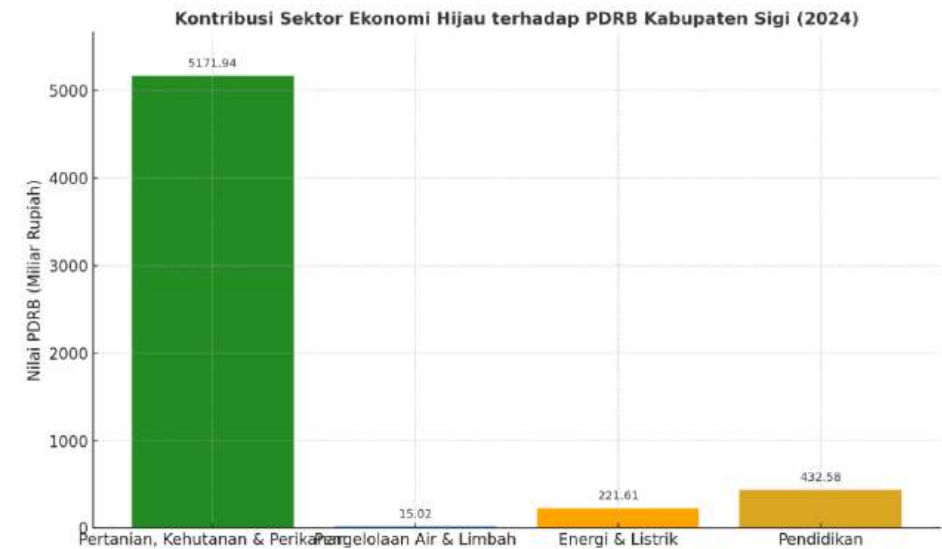
C. Penerapan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Sigi diterapkan sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi yang menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendorong pertumbuhan inklusif jangka panjang. Kabupaten Sigi menunjukkan indikasi awal penerapan ekonomi hijau dan biru melalui pertanian dan perkebunan lestari, optimalisasi sumber daya air dan energi lokal, serta edukasi dan kesadaran publik tentang lingkungan. Namun, agar transformasi ekonomi ini benar-benar berkelanjutan, dibutuhkan peningkatan investasi pada energi terbarukan, digitalisasi UMKM hijau, dan penguatan regulasi daya dukung lingkungan.

1. Ekonomi Hijau di Kabupaten Sigi
- Ekonomi hijau mencakup kegiatan yang ramah lingkungan dan mendukung daya dukung ekologis. Di Kabupaten Sigi, pendekatan ini tampak dalam beberapa sektor:

- a. Pertanian Berkelanjutan
 - Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang Rp 5.171,94 miliar (2024) ke PDRB, merupakan sektor terbesar di Kabupaten Sigi.
 - Luas areal perkebunan rakyat mencapai 41.367 Ha (2024), termasuk komoditas kopi, kakao, kelapa, dan kemiri yang dikelola secara tradisional dan relatif rendah emisi.
 - Biofarmaka dan hortikultura seperti tanaman obat dan sayuran organik juga tumbuh sebagai alternatif ramah lingkungan.
 - b. Pengelolaan Energi
 - Energi listrik dari PLN terdistribusi secara luas, dan terdapat potensi pengembangan energi terbarukan (mikrohidro dan surya) terutama di daerah perbukitan dan pedesaan.
2. Ekonomi Biru
- Kabupaten Sigi, meskipun tidak memiliki laut langsung, berada di DAS Palu dan Sungai Lariang yang penting untuk:
 - Perikanan darat dan kolam rakyat
 - Pengelolaan air irigasi dan konservasi hulu sungai
 - Potensi ekowisata sungai dan hutan (di wilayah Kulawi dan Lindu) juga mendukung konsep ekonomi biru berbasis pelestarian alam.
3. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung
- Penerapan pengelolaan limbah dan air bersih menunjukkan kesadaran terhadap daya tampung lingkungan:
 - PDAM Uwe Lino mendistribusikan air bersih ke berbagai kecamatan, dengan sistem distribusi yang terus diperluas.
 - Pengelolaan daur ulang masih terbatas, namun terdapat kontribusi sektor pengelolaan sampah dan air sebesar Rp 15,02 miliar dalam PDRB, naik dari tahun sebelumnya.
4. Transformasi Ekonomi yang Ramah Lingkungan
- Pertumbuhan sektor lingkungan hidup dan pendidikan menguatkan ekosistem ekonomi hijau:
 - Sektor pendidikan menyumbang Rp 432,58 miliar, menandakan SDM yang makin sadar lingkungan.
 - Peningkatan nilai sektor pengelolaan air dan limbah menunjukkan langkah awal menuju transformasi hijau.

Gambar 2.56
Grafik Kontribusi Sektor Ekonomi Hijau terhadap PDRB di Kabupaten Sigi



Sumber : Publikasi BPS, 2025

Berikut adalah grafik kontribusi sektor-sektor ekonomi hijau terhadap PDRB Kabupaten Sigi tahun 2024:

- Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi hijau daerah.
- Pendidikan berperan penting dalam membentuk SDM sadar lingkungan.
- Pengelolaan air dan limbah serta energi mulai berkontribusi, meskipun masih perlu penguatan investasi dan teknologi.

Gambar ini mencerminkan arah transformasi ekonomi Sigi menuju pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen untuk mengarahkan pembangunan daerah ke arah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) sebagai pendekatan utama dalam pembangunan jangka menengah. Hal ini telah diletakkan fondasinya melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sigi Hijau, yang secara eksplisit mengatur integrasi aspek ekologi ke dalam perencanaan pembangunan dan tata kelola sumber daya alam.

Dalam konteks implementasi, prinsip ekonomi hijau di Kabupaten Sigi diterjemahkan ke dalam berbagai program, antara lain: pengembangan desa wisata alam, penguatan agroforestri dan komoditas unggulan berbasis konservasi (seperti kakao, kopi, bambu, kelor, dan vanili), serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Namun, pelaksanaan program-program tersebut dihadapkan pada tantangan mendasar berupa keterbatasan fiskal daerah, di mana kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dana dari pemerintah pusat belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan pendanaan pembangunan yang berbasis ekologi dan berorientasi jangka panjang.

Sebagai upaya inovatif untuk menjawab keterbatasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi telah menginisiasi dan mengembangkan skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) sejak tahun 2021. TAKE merupakan pendekatan pengalokasian anggaran yang berbasis pada kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di tingkat desa. Skema ini dilakukan melalui reformulasi Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memberikan insentif tambahan bagi desa-desa yang menunjukkan kinerja baik dalam aspek ekologis, sosial, dan tata kelola desa.

Tahun 2021 menandai awal implementasi skema TAKE di Kabupaten Sigi. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kinerja sebesar Rp1.208.805.466. Alokasi ini menjadi dasar untuk membangun sistem insentif yang berbasis kinerja desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Inisiatif ini juga menjadi manifestasi dari kebijakan fiskal yang inovatif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun pertama, Pemerintah Kabupaten Sigi meningkatkan besaran alokasi kinerja menjadi Rp1.833.564.393 atau setara 3% dari total ADD. Peningkatan ini merefleksikan kepercayaan terhadap efektivitas TAKE dalam mendorong perbaikan tata kelola dan kinerja desa, khususnya dalam menjaga ekosistem lokal serta memperbaiki layanan dasar di tingkat desa.

Pada tahun ketiga implementasi, TAKE memberikan dampak yang sangat signifikan. Salah satu capaian penting adalah hilangnya status desa dengan kategori "Sangat Tertinggal" berdasarkan Indeks Desa

Membangun (IDM). Untuk memperkuat momentum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi kembali meningkatkan proporsi alokasi kinerja menjadi 5% dari ADD, dengan total anggaran mencapai Rp3.191.084.490. Skema ini semakin memperkuat ekosistem pembangunan yang inklusif dan lestari di wilayah pedesaan.

Tahun 2024 menjadi tahun keempat pelaksanaan TAKE, yang menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlanjutan program ini. Alokasi kinerja tetap dipertahankan pada proporsi 5% dari total ADD, dengan nilai sebesar Rp3.507.194.880. Skema ini tidak hanya mendorong desa untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian sumber daya alam sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Skema TAKE di Kabupaten Sigi selama periode 2021–2024 merupakan contoh nyata dari inovasi fiskal daerah yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui insentif yang berbasis kinerja ekologis, Pemerintah Kabupaten Sigi telah berhasil meningkatkan partisipasi desa dalam menjaga lingkungan hidup, mengurangi keteringgalan, serta mendorong tata kelola yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim.

Gambar 2.57
Alokasi Kinerja Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Sigi



Sumber : DPMPD Kabupaten Sigi, 2025

Di sisi lain, pendekatan ekonomi hijau yang konsisten dan berbasis kebijakan yang kuat telah meningkatkan daya tarik Kabupaten Sigi sebagai wilayah investasi lestari. Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah berhasil menarik komitmen investasi hijau senilai USD 2,65 juta dalam forum Festival Lestari, yang diarahkan untuk pengembangan hilirisasi produk berbasis alam, lanskap berkelanjutan, dan penguatan kelembagaan lokal. Investasi ini menjadi pelengkap penting bagi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal, sekaligus mengukuhkan posisi Kabupaten Sigi sebagai model yurisdiksi hijau (*green jurisdiction*) yang mampu menjalin sinergi antara kepentingan pembangunan, pelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

D. Transformasi Digital

Transformasi digital di Kabupaten Sigi masih dalam tahap awal namun menunjukkan arah positif melalui inisiatif *e-commerce* sektor pertanian dan promosi wisata digital, peningkatan kapasitas pemasaran digital berbasis komunitas, serta dukungan pengembangan agropolitan dan perhutanan sosial berbasis teknologi. Namun untuk menuju ekonomi digital inklusif dan efisien, diperlukan langkah lanjutan berupa integrasi

super *platform* daerah, infrastruktur digital yang merata, dan investasi pada pelatihan dan produksi talenta digital lokal.

1. Pengembangan Super Platform Digital

Kabupaten Sigi belum secara eksplisit memiliki super platform digital terintegrasi, namun arah ke sana mulai tampak dari beberapa strategi sektor:

- Dalam pengembangan agropolitan, pemerintah daerah merencanakan sistem tata niaga *online* (*e-commerce*) dan digitalisasi layanan petani untuk memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan daya saing komoditas lokal.
- Strategi pemasaran pariwisata juga diarahkan untuk menggunakan teknologi digital dan media publik guna memperluas jangkauan informasi objek wisata berbasis alam dan budaya.
- Implikasinya, dibutuhkan integrasi antarsektor dalam satu ekosistem digital daerah (super platform) yang mencakup pertanian, pariwisata, UMKM, dan layanan publik.

2. Percepatan Transformasi Digital

Transformasi digital di Sigi masih bersifat sektoral dan bertahap:

- Akses komunikasi sudah tersedia melalui kantor pos pembantu dan perangkat desa digital di beberapa wilayah.
- Digitalisasi tata niaga sudah mulai diterapkan di sektor pertanian dan agrowisata, meskipun terbatas pada skala kecil dan belum menyentuh sistem keuangan digital atau integrasi antar layanan.
- Upaya promosi berbasis digital menjadi bagian penting dalam penguatan sektor agroekowisata dan UMKM, namun masih menghadapi kendala SDM dan infrastruktur digital yang tidak merata.
- Dibutuhkan peningkatan infrastruktur jaringan internet dan percepatan sistem layanan digital publik (seperti SIMDA, e-perizinan, dan layanan mandiri desa).

3. Talenta Digital

Pengembangan talenta digital di Sigi masih menjadi tantangan utama:

- Kabupaten Sigi memiliki 11 SMK yang menjadi basis pelatihan vokasional, namun belum spesifik difokuskan pada sektor digital atau teknologi informasi.
- Belum ada indikasi program pelatihan *coding*, *data science*, atau pemrograman tingkat dasar-menengah untuk pemuda desa.
- Strategi peningkatan kapasitas SDM digital baru menyentuh promosi dan edukasi melalui media sosial dan publikasi objek wisata, belum menyentuh ranah transformasi ekonomi digital secara luas.
- Membutuhkan kebijakan berupa:
 - Pendirian pusat pelatihan digital desa atau kerja sama dengan *startup* edukasi
 - Pemanfaatan dana desa untuk membiayai pelatihan digital dan teknologi tepat guna
 - Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan Kemenkominfo untuk program talenta digital

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Kabupaten Sigi memiliki modal dasar kuat untuk integrasi ke dalam ekonomi domestik dan global melalui komoditas unggulan agrikultur yang berorientasi ekspor, pertumbuhan industri pengolahan pangan, serta ekspansi perdagangan ritel dan digitalisasi pasar. Namun, akselerasi integrasi ini membutuhkan standardisasi *Good Agriculture Practice* (GAP) dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) di sektor pertanian, pembentukan agregator ekspor atau perusahaan daerah, promosi produk unggulan ke pasar nasional dan global, dan digitalisasi perdagangan dan sistem informasi logistik.

Adapun beberapa faktor yang relevan dalam mendorong peningkatan produktivitas dan keterlibatan dalam rantai pasok global yang dapat mendukung integrasi ekonomi domestik dan global di Kabupaten Sigi sebagai berikut.

1. Potensi Ekonomi Lokal untuk Integrasi Global

Kabupaten Sigi memiliki basis ekonomi yang kuat di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan darat, dengan komoditas unggulan seperti:

- Kakao, kopi, kemiri, durian, tomat, cabe, dan bawang merah – komoditas dengan permintaan pasar tinggi, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor.
- Produk-produk ini berpeluang besar masuk ke rantai pasok global, terutama jika dilakukan standarisasi budidaya dan pengolahan sesuai GAP dan GMP.

2. Struktur Industri Pengolahan dan Perdagangan

- Kabupaten Sigi memiliki 952 industri pengolahan (2024), didominasi oleh industri makanan-minuman (547 unit), furnitur (87), dan tekstil (38).
- Infrastruktur perdagangan terdiri dari 1.934 sarana (pasar, toko, kios, warung), mendukung distribusi produk domestik, namun sebagian besar masih skala kecil dan belum terkoneksi sistem ekspor.

3. Hambatan dan Peluang Ekspor

- Sistem ekspor-impor Indonesia mencakup pencatatan umum (*general trade*), dan Kabupaten Sigi tercakup dalam sistem kepabeanan nasional.
- Tantangan utama adalah:
 - Keterbatasan SDM, promosi, dan pembiayaan ekspor
 - Minimnya intervensi harga dan tata niaga untuk komoditas strategis
- Namun, terdapat peluang besar melalui strategi:
 - Pengembangan *e-commerce* dan tata niaga *online*
 - Pembentukan perusahaan daerah agribisnis sebagai agregator dan eksportir

4. Keterhubungan Domestik

- Penguatan kawasan agropolitan dan infrastruktur penghubung antarwilayah (*hinterland*–industri–pasar) akan memperkuat keterkaitan ekonomi domestik, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.

F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sigi dalam konteks mewujudkan pusat jasa dan perdagangan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan serta pembangunan perdesaan mandiri.

1. Perkotaan Sebagai Pusat Jasa dan Perdagangan yang Maju dan Inklusif

Kawasan/Wilayah perkotaan di Kabupaten Sigi, terutama di Sigi Biromaru, Dolo, dan sekitarnya, telah berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, jasa, dan perdagangan. Indikator yang menegaskan peran strategisnya mencakup:

- Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa signifikan, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor perdagangan pada 2024 mencapai Rp1,74 triliun dan jasa keuangan Rp387,7 miliar.
- Tersedia 387 unit toko, 27 pasar, dan 424 kios serta warung yang tersebar terutama di pusat kecamatan dan kawasan padat penduduk.
- Kawasan ini memiliki konektivitas dan akses jalan yang lebih baik serta menjadi pusat layanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.
- Namun, tantangan tetap ada:

- Aksesibilitas warga dari wilayah perdesaan ke kota masih terbatas akibat minimnya sarana transportasi dan logistik terintegrasi.
- Keterlibatan kelompok rentan (perempuan, disabilitas, masyarakat adat) dalam ekonomi perkotaan masih belum optimal.
- Belum semua area urban memenuhi prinsip inklusivitas dan keberlanjutan lingkungan.

2. Pembangunan Perdesaan Mandiri dan Berkelanjutan

Kawasan/Wilayah perdesaan di Kabupaten Sigi memiliki peran vital dalam penyediaan pangan, konservasi alam, dan penyangga urban. Wilayah seperti Kulawi, Pipikoro, Lindu, Palolo, dan Nokilalaki dikenal dengan potensi agrikultur dan kehutanan:

- Terdapat komoditas unggulan seperti kakao, kopi, durian, kemiri, dan hasil hutan bukan kayu seperti madu dan gula aren.
- Sebanyak 40 desa di delapan kecamatan berbatasan dengan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), menjadi zona penting untuk pendekatan agroekologi dan ekowisata berbasis masyarakat.
- Program pengembangan kawasan agropolitan diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat produksi desa yang mandiri dan terkoneksi dengan pusat distribusi dan industri.
- Strategi utama pembangunan perdesaan:
 - Penyiapan infrastruktur dasar (jalan, irigasi, penyimpanan hasil pertanian)
 - Digitalisasi tata niaga dan integrasi *e-commerce* untuk petani
 - Pelatihan SDM dan pendampingan kelembagaan tani
 - Penerapan SOP GAP (*Good Agriculture Practice*) dan GMP (*Good Manufacturing Practice*)

3. Integrasi Kota–Desa untuk Keberlanjutan

Kabupaten Sigi memiliki peluang strategis untuk:

- Mengembangkan pusat kota sebagai pusat jasa yang inklusif, dengan memastikan akses transportasi, perlindungan sosial, dan digitalisasi layanan bagi semua.
- Memperkuat perdesaan sebagai basis produksi dan konservasi, melalui kebijakan berbasis wilayah, potensi lokal, dan pendekatan ekonomi hijau.
- Membangun konektivitas dan sistem logistik dari hinterland ke pusat urban dan pasar nasional/internasional.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

Kondisi stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Sigi merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap gejolak eksternal. Upaya ke arah tersebut mencakup tiga aspek utama: kesinambungan fiskal, stabilitas moneter, dan ketahanan sektor keuangan.

1. Kesinambungan Fiskal Daerah

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sigi relatif masih terbatas, yang menyebabkan ketergantungan tinggi pada dana transfer dari pusat (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa).
- Untuk memperkuat kesinambungan fiskal, pemerintah daerah mulai mendorong:
 - Optimalisasi potensi PAD seperti retribusi pasar, pajak daerah, dan hasil bumi.
 - Digitalisasi sistem keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja.
 - Efektivitas belanja modal agar lebih diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan infrastruktur dasar.

2. Stabilitas Moneter Lokal

- Walaupun kebijakan moneter dipegang pemerintah pusat (BI dan OJK), stabilitas harga dan daya beli di Sigi sangat dipengaruhi oleh:
 - Akses logistik dan keterpencilan geografis, yang menyebabkan disparitas harga antar kecamatan.
 - Fluktuasi harga komoditas pertanian yang berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga.
 - Untuk menjaga stabilitas harga, dibutuhkan:
 - Integrasi sistem distribusi barang antar wilayah.
 - Penguatan cadangan pangan lokal serta peningkatan ketahanan produksi.
3. Ketahanan Sektor Keuangan Daerah
- Akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal masih rendah di wilayah perdesaan.
 - UMKM masih mengandalkan pembiayaan informal karena rendahnya literasi keuangan dan agunan.
 - Untuk itu, pemerintah daerah mendorong:
 - Perluasan inklusi keuangan melalui digitalisasi layanan dan edukasi masyarakat.
 - Kemitraan dengan BUMDes, koperasi, dan fintech untuk menjangkau pelaku usaha mikro.
 - Perlindungan keuangan bagi masyarakat rentan, termasuk asuransi tani dan bantuan sosial digital.

Kabupaten Sigi memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata berbasis ekowisata. Namun, analisis KLHS menunjukkan bahwa degradasi lingkungan, deforestasi, dan risiko bencana menjadi hambatan utama peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi daerah akan diarahkan pada penerapan prinsip ekonomi hijau, penguatan ketahanan pangan lokal, pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, dan konservasi ekosistem penting seperti Taman Nasional Lore Lindu.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif

Kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sigi mencerminkan upaya membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperkuat. Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sigi telah menunjukkan arah perbaikan menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Namun, peningkatan kualitas birokrasi, keterbukaan data, kolaborasi lintas sektor, dan penerapan digitalisasi perlu terus didorong agar tata kelola publik lebih efisien dan berkeadilan.

1. Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan

- Efisiensi pengelolaan anggaran masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas fiskal dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
- Beberapa program masih belum sepenuhnya terintegrasi antar sektor, menyebabkan duplikasi kebijakan dan program yang kurang tepat sasaran.
- Implementasi *e-government* mulai dilakukan, namun pemanfaatannya belum merata di seluruh OPD dan wilayah kecamatan.

2. Akuntabilitas dan Transparansi

- Kabupaten Sigi telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan pengawasan internal.
- Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya partisipatif dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan.

- Akses terhadap informasi publik melalui media digital sudah dimulai, namun perlu penguatan literasi digital dan pembaruan data yang rutin.
- 3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi
 - Pemerintah daerah terus mendorong penguatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam tata kelola keuangan, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.
 - Namun masih terdapat kelemahan dalam penegakan regulasi di tingkat lokal, terutama di sektor sumber daya alam dan penggunaan lahan.
- 4. Pemanfaatan Teknologi dalam Tata Kelola
 - Pengembangan aplikasi pelayanan publik digital (seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pengaduan masyarakat) masih berlangsung, tetapi belum terintegrasi dalam satu platform layanan.
 - Tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur TIK di perdesaan dan keterbatasan kapasitas SDM di tingkat pelaksana.
- 5. Kolaborasi Antar Sektor dan Wilayah
 - Tata kelola masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya didukung oleh kolaborasi lintas sektor maupun lintas wilayah.
 - Perlu mendorong pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* agar kebijakan lebih adaptif dan kolaboratif.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kondisi pembangunan hukum dan demokrasi di Kabupaten Sigi mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat fondasi negara hukum dan demokrasi yang inklusif. Meski terdapat berbagai inisiatif positif, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian lintas sektor dan dukungan masyarakat. Pembangunan hukum dan demokrasi di Kabupaten Sigi sedang menuju ke arah yang lebih baik, tetapi memerlukan peningkatan kapasitas lembaga hukum dan aparat, perluasan akses bantuan hukum dan keadilan restoratif, demokrasi yang lebih partisipatif dan substansial, bukan hanya prosedural, pengarusutamaan HAM dan inklusi sosial dalam setiap kebijakan Pembangunan.

1. Pembangunan Hukum di Kabupaten Sigi
 - a. Supremasi Hukum
 - Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, namun penegakan hukum masih belum konsisten, terutama dalam isu konflik agraria, lingkungan, dan perlindungan kelompok rentan.
 - Penegakan hukum masih perlu bebas dari intervensi kepentingan politik dan birokrasi.
 - b. Kepastian dan Keadilan Hukum
 - Akses masyarakat terhadap bantuan hukum belum merata, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok adat.
 - Beberapa sengketa tanah dan sumber daya alam belum memiliki penyelesaian hukum yang berpihak kepada masyarakat adat atau lokal secara adil.
 - c. Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - Upaya integrasi prinsip HAM dalam program pembangunan masih bersifat formal dan belum menyentuh substansi perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
 - Kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi dan memerlukan sistem perlindungan hukum yang lebih kuat.
2. Pembangunan Demokrasi di Kabupaten Sigi
 - a. Demokrasi Substansial

- Proses pemilihan umum dan kepala daerah berjalan secara prosedural, namun partisipasi politik masyarakat masih dominan pada tataran pemilihan, belum sepenuhnya dalam perumusan kebijakan publik.
- Demokrasi masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya reflektif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput.
- b. Amanat Rakyat dan Partisipasi Publik
 - Forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) telah menjadi ruang partisipasi masyarakat, namun keterlibatan kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat adat masih terbatas.
 - Inklusi masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran dan kinerja pemerintahan perlu diperkuat agar lebih representatif.
- c. Pendidikan Demokrasi dan Literasi Hukum
 - Pendidikan politik dan demokrasi masih minim terutama di pedesaan, sehingga partisipasi warga masih rendah dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan publik.
 - Sosialisasi hukum seringkali belum menggunakan pendekatan kultural atau bahasa lokal yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Kabupaten Sigi bukan entitas yang secara langsung menangani diplomasi dan pertahanan dalam konteks hubungan antarnegara, daerah tetap memainkan peran penting dalam mendukung ketangguhan diplomasi dan pertahanan nasional melalui kontribusi terhadap stabilitas kawasan, ketahanan lokal, serta penguatan identitas dan kepentingan nasional. Kabupaten Sigi, meski tidak menjadi aktor utama diplomasi dan pertahanan luar negeri, tetap berperan strategis dalam memperkuat pertahanan berlapis dan diplomasi berbasis identitas dan kepentingan nasional, melalui ketahanan sosial dan lingkungan, pelestarian budaya lokal, kontribusi pangan dan sumber daya alam, pembinaan warga negara sadar bela negara, dukungan terhadap stabilitas keamanan nasional.

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan dalam konteks Kabupaten Sigi sebagai berikut.

1. Pertahanan Berbasis Wilayah: Ketahanan Teritorial
 - Kabupaten Sigi sebagai bagian dari wilayah strategis Sulawesi Tengah berkontribusi terhadap ketahanan nasional melalui:
 - Ketahanan sosial masyarakat yang kuat, ditandai dengan harmoni sosial dan toleransi antarkelompok.
 - Kesiapsiagaan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan banjir sebagai bagian dari pertahanan non-militer.
 - Pengawasan wilayah perbatasan administratif dan hutan lindung, yang mendukung pengamanan sumber daya alam strategis.
2. Peran Daerah dalam Diplomasi Sosial-Budaya
 - Masyarakat adat dan kebudayaan lokal di Sigi (seperti budaya Kaili) menjadi elemen penting dari diplomasi budaya, yakni memperkuat identitas nasional dalam keragaman.
 - Produk lokal dan sektor pariwisata (seperti wisata alam dan budaya) memiliki potensi untuk memperkuat branding Indonesia secara global bila diintegrasikan dalam kebijakan nasional.
3. Kontribusi Ekonomi Lokal terhadap Kepentingan Nasional
 - Ketahanan pangan dan sumber daya pertanian dari Sigi menyumbang pada kedaulatan pangan nasional.
 - Sektor perkebunan dan kehutanan yang lestari juga menunjang reputasi Indonesia dalam diplomasi lingkungan dan komitmen iklim.
4. Pendidikan Bela Negara dan Kesadaran Warga

- Pendidikan karakter dan bela negara di sekolah-sekolah menjadi fondasi pembentukan warga negara yang tangguh dan sadar peran dalam mempertahankan NKRI.
 - Pemuda dan organisasi kemasyarakatan turut memperkuat nilai nasionalisme dan kesadaran geopolitik melalui pelatihan dan kegiatan sosial.
5. Kolaborasi dengan Aparat Pertahanan dan Keamanan
- Pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah, termasuk dalam pengamanan kegiatan nasional dan mencegah potensi konflik sosial.
 - Penguatan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat (siskamling, FKPM, dll) memperkuat stabilitas lokal yang penting bagi ketahanan nasional.

D. Kinerja setiap urusan pemerintah daerah

Secara keseluruhan, kinerja urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Sigi selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, meskipun sempat terdampak oleh pandemi dan bencana alam. Pemulihan ekonomi dan sosial berjalan cukup efektif, ditopang oleh berbagai program strategis dan kolaborasi lintas sektor. Berikut adalah uraian dan penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan pemerintahan daerah selama lima tahun terakhir

1. Pertumbuhan Ekonomi
- Tahun 2020: Mengalami kontraksi akibat pandemi, menjadi -1,50%.
 - Tahun 2021: Menguat menjadi 5,66%.
 - Tahun 2022: Kembali stabil di angka 3,33%
 - Tahun 2023: Tumbuh sebesar 3,37%.
 - Tahun 2024: Tumbuh kembali sebesar 3,50%

Kinerja ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang stabil pasca bencana alam dan pandemi, berkat peningkatan Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Gambar 2.58
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : Publikasi BPS, 2025

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Tahun 2020: 68,48
 - Tahun 2021: 68,84
 - Tahun 2022: 69,40

- Tahun 2023: 70,28
- Tahun 2024: 70,51

IPM meningkat setiap tahun, didorong oleh perbaikan di sektor pendidikan yang tercermin dari meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta peningkatan pengeluaran per kapita dan layanan kesehatan dasar, walau masih di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 2.59
Grafik Indeks Pembangunan Manusia



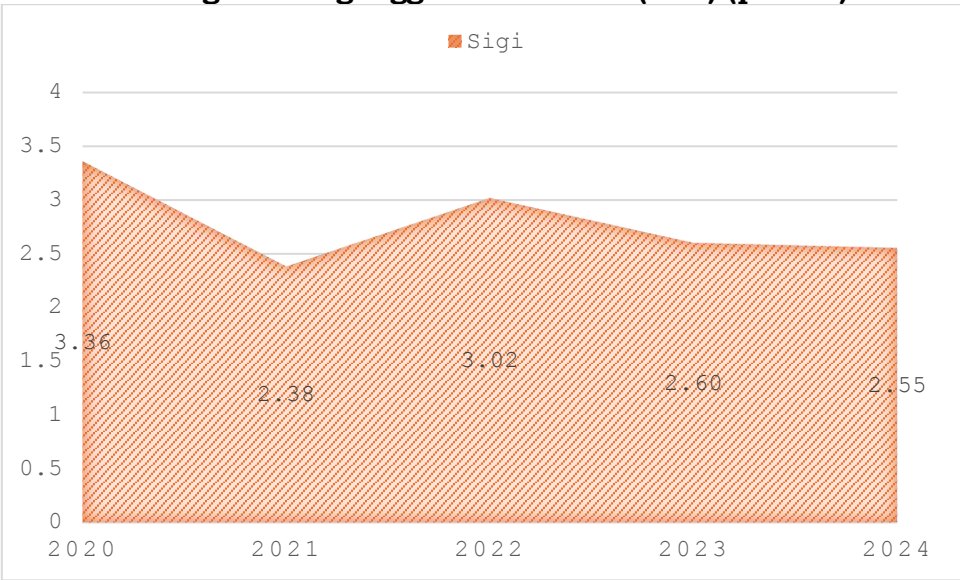
Sumber : Publikasi BPS, 2025

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

- 2020: 3,36%
- 2021: 2,38%
- 2022: 3,02%
- 2023: 2,60%
- 2024: 2,55%

Penurunan TPT menandakan pemulihan pasar kerja dan keberhasilan program pelatihan vokasi serta UMKM.

Gambar 2.60
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)



Sumber : Publikasi BPS, 2025

5. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Beberapa indikator spesifik lainnya pada urusan pemerintahan:

- Kesehatan: Cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap tetap terjaga di atas 90% pada 2024.
- Pendidikan: Angka Partisipasi Murni SD dan SMP stabil di atas 95% hingga tahun 2024.
- Lingkungan Hidup: Rasio rumah tangga pengguna air minum layak meningkat menjadi 85% (2024).
- Infrastruktur: Rasio jalan mantap mencapai 58% pada 2024.

Akses terhadap layanan dasar di Kabupaten Sigi menunjukkan kesenjangan signifikan antarwilayah. Data KLHS menggarisbawahi perlunya prioritas penyediaan infrastruktur layanan dasar di wilayah dengan risiko tinggi dan akses terbatas, terutama di desa-desa pada lereng pegunungan. RPJMD akan mengarahkan program prioritas untuk pemenuhan air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan berbasis inklusi, serta penguatan mitigasi bencana.

2.1.5 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Periode 2021-2026

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD adalah ukuran sejauh mana visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai selama periode 5 tahun masa jabatan kepala daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun), sehingga capaian kinerjanya menjadi cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu tersebut.

RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2021–2026 telah menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020. Seiring berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada tahun 2025 dan akan dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada Serentak Nasional 2024, maka RPJMD 2021–2026 perlu dievaluasi pada tahun 2025. Evaluasi ini dilaksanakan untuk menilai capaian pembangunan daerah, mengukur tingkat ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi dasar penyusunan RPJMD periode berikutnya.

Dengan demikian, evaluasi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2021–2026 yang dilakukan pada tahun 2025 merupakan langkah strategis dan legal untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah serta sinkronisasi arah kebijakan pembangunan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Hal ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sigi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi ke depan.

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sigi Tahun 2021-2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi					Tingkat capaian kinerja
			2021	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,7	8,7	8,8	8,91	9,01	103,56	
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,01	12,87	13,16	13,31	13,46	103,46	
3	Usia Harapan Hidup	tahun	69,99	70,09	70,15	71,11	71,33	101,91	
4	indeks Pembangunan Gender	indeks	93,32	93,38	94,1	94,3	94,37	101,05	
5	Persentase panjang jalan kondisi baik	%	74	69,75	58,25	62,36	26,41	35,69	
6	Persentase Jembatan kondisi baik	%	75	81,58	44,4	62,36	26,41	35,21	
7	Persentase penerima manfaat Rumah Layak huni	%	85	84,32	81,53	83,08	85,12	100,14	
8	Persentase peningkatan layanan areal persawahan	%	49,63	49,58	50,19	62,22	26,41	53,21	
9	Kontribusi sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan	%	58	41,03	41,27	41,2	41,17	70,98	
10	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	107,77	103,51	101,22	108,98		101,12	
11	Skor PPH	skor	85	75,54	77,94	78,17	80,06	94,19	
12	PAD Sektor Pariwisata	juta Rupiah	120161000	219948182	159935227	162759586	218619082	181,94	
13	Pengeluaran Perkapita	ribu rupiah	8.126	8.171	8.498,00	8.891,00	10.442,00	128,5	
14	TPT	%	3,22	2,38	3,02	2,6	2,55	79,19	
15	Persentase Kenaikan Realisasi PMDN	%	4	508,42	132,2	69,06	139,82	3495,5	
16	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	84	84	84,86	80,58	80,57	95,92	
17	Predikat AKIP Pemda	predikat	B	B	B	B	B	100	
18	Indeks Pengelolaan keuangan	indeks	95	100	100	55	78	82,11	
19	Penilaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	ST	ST	ST	ST	ST	100	
20	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	80		100	100	100	125	
21	Persentase penegakan Perda	%	65		73	100	100	153,85	
22	Persentase Budaya dan kearifan lokal yang dilestarikan	%	78	80	81	85	86	110,26	
23	Persentase Penataan ruang sesuai RTRW Kabupaten	%	20	20	20	25.00.00	60	300	
24	Persentase Lahan kritis menurun	%	28	26	30	40,62	57	203,57	
25	Indeks resiko bencana daerah	%	30	51	49.27.00	48,85	48,71	162,37	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama								236,392	

Sumber : Dokumen Evaluasi RPJMD 2021-2026

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja utama Kabupaten menunjukkan tren positif dengan rata-rata capaian yang sangat tinggi, terutama pada aspek peningkatan investasi, penataan ruang, rehabilitasi lahan kritis, dan peningkatan PAD pariwisata. Namun, perlu menjadi perhatian pada aspek infrastruktur jalan dan jembatan yang masih rendah, serta kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang belum optimal. Hal ini menjadi dasar untuk penajaman kebijakan pembangunan ke depan, dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, kelestarian lingkungan, dan penguatan kelembagaan.

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi
Periode 2021-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Ndikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	kondisi Awal tahun	Realisasi Capaian tiap Tahun RPJMD					Tingkat capaian kinerja
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	IPM	indeks	68,12	68,48	69,04,00	70,28	70,51	103,51	
2	Indeks Pendidikan	indeks	71,9	65,1	65,85	66,65	67,35	93,67	
3	Indeks Kesehatan	indeks	67,29	78,26	78,32	78,63	78,97	117,36	
4	Indeks Infrastruktur	indeks	55,83	66,1	53,06	55,57	38,65	69,24	
5	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	%	4,87	5,66	3,33	3,37	3,5	71,87	
6	Kemiskinan	%	12,45	13,05	12,3	12,83	12,06	96,87	
7	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	indeks	0,3399		2,47	2,66	3,27	962,05	
8	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	3,4	0	0	0	0	0	
9	IDM	indeks	0,6046	0,61809	0,65668	0,6849	0,71399	118,09	
10	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	41	46,87	48,43	56,15	70,5	171,95	
11	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	%	68	0	0	0	0	0	
12	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	48,11	IPK Perhitungannya Hanya Ditingkat Propinsi.Tingkat Kabupaten Belum Bisa Melakukan Perhitungan Karena Harus Ada Tim Survey Khusus.	IPK Perhitungannya Hanya Ditingkat Propinsi.Tingkat Kabupaten Belum Bisa Melakukan Perhitungan Karena Harus Ada Tim Survey Khusus.	IPK Perhitungannya Hanya Ditingkat Propinsi.Tingkat Kabupaten Belum Bisa Melakukan Perhitungan Karena Harus Ada Tim Survey Khusus.	IPK Perhitungannya Hanya Ditingkat Propinsi.Tingkat Kabupaten Belum Bisa Melakukan Perhitungan Karena Harus Ada Tim Survey Khusus.	0	
13	Rasio ketaatan terhadap RTRW	Rasio	20	awal penelapan RTRW Kabupaten Sigi	0,05	0,09	0,08	0,4	
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	81,38	80,56	80,7	80,43,00	79,78	98,03	
15	Indeks Ketangguhan Daerah (IKD)	indeks	35	40 -0,4	41 -0,41	46 -0,46	47 -0,47	156,6	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama									137,309

Sumber : Dokumen Evaluasi RPJMD 2021-2026

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten menunjukkan kinerja pembangunan yang cukup baik secara umum, tercermin dari rata-rata capaian indikator yang mencapai 137,31%. Hal ini menunjukkan adanya indikator yang melampaui target, serta menggambarkan adanya kemajuan pembangunan yang dicapai selama periode RPJMD. Beberapa indikator seperti Indeks Kesehatan, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Ketangguhan Daerah (IKD) menunjukkan capaian yang sangat tinggi, menandakan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan daya saing ekonomi, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga menunjukkan capaian yang stabil dan baik, menggambarkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta terjaganya kualitas lingkungan di Kabupaten. Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan ke depan, seperti Indeks Infrastruktur, Indeks Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) yang masih berada di bawah target capaian, serta masih terdapat indikator yang belum terukur seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang memerlukan penguatan sistem pengukuran dan survei secara berkala.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan, dengan tetap mengutamakan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas infrastruktur, pemulihan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

2.2 Keuangan Daerah

2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020-2024

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Sigi Tahun 2020-2024 digambarkan melalui kinerja pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, serta Neraca Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk itulah sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah serta prioritas pembangunan nasional. Struktur APBD Kabupaten Sigi terdiri atas:

- (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan daerah dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 Periode I. Selanjutnya dilakukan analisis kedalaman masalah dengan orientasi tematik yang melibatkan pemangku kepentingan *stakeholder* terkait.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Adapun obyek pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan transfer; Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Sigi Tahun 2020 s.d 2024

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	1.141.165.481.153,54	1.212.982.259.488,25	1.182.841.939.610,80	1.273.640.919.012,62	1.410.150.504.679,44	5,55
1,1	Pendapatan Asli Daerah	65.935.399.097,54	78.737.016.212,25	86.478.763.681,80	81.837.764.024,62	84.824.192.278,39	6,88
1.1.1	Pajak Daerah	12.903.566.856,00	16.050.787.185,00	24.314.374.401,00	29.530.695.706,00	35.118.053.979,00	29,06
1.1.2	Retribusi Daerah	1.946.354.350,00	1.945.614.182,00	1.912.546.327,00	2.579.448.986,00	3.039.618.382,00	12,74
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	865.425.701,00	1.104.070.053,02	1.147.119.789,68	1.654.363.875,00	2.092.871.872,00	25,55
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	50.220.052.190,54	59.636.544.792,23	59.104.723.164,12	48.073.255.457,62	44.573.648.045,39	- 2,02
2	Pendapatan Transfer	1.026.494.998.051,00	1.101.049.984.208,00	1.065.974.351.509,00	1.180.889.116.760,00	1.309.724.872.946,00	6,44
2,1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	996.413.077.661,00	1.065.061.086.398,00	1.022.605.273.722,00	1.136.426.386.465,00	1.256.834.631.489,00	6,16
2.1.1	Dana Perimbangan	826.824.690.661,00	883.142.090.448,00	876.652.876.727,00	956.454.288.465,00	1.070.498.098.163,00	6,78
2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	39.160.067.910,00	56.282.675.276,00	78.823.459.036,00	52.355.648.606,00	117.419.602.500,00	43,62
2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	587.639.413.000,00	578.721.561.000,00	578.754.721.596,00	604.813.950.000,00	655.819.930.339,00	2,86
2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	98.732.356.022,00	146.152.566.117,00	127.000.737.389,00	159.845.498.097,00	144.946.300.321,00	12,87
2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.292.853.729,00	101.985.288.055,00	92.073.958.706,00	139.439.191.762,00	152.312.265.003,00	12,91
2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal	21.542.058.000,00	37.013.835.000,00	3.326.856.000,00	27.805.695.000,00	31.841.897.000,00	182,78
2.1.3	Dana Desa	148.046.329.000,00	144.905.160.950,00	142.625.540.995,00	152.166.403.000,00	154.494.636.326,00	1,13
2,2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.081.920.390,00	35.988.897.810,00	43.369.077.787,00	44.462.730.295,00	52.890.241.457,00	15,40
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	26.983.880.390,00	32.364.197.810,00	43.369.077.787,00	42.262.730.295,00	52.790.241.457,00	19,08
2.2.2	Bantuan Keuangan	3.098.040.000,00	3.624.700.000,00		2.200.000.000,00	100.000.000,00	- 44,61
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	48.735.084.005,00	33.195.259.068,00	30.388.824.420,00	10.914.038.228,00	15.601.439.455,05	- 15,37
3.1	Pendapatan Hibah	48.421.483.547,00	1.184.000.000,00	30.388.824.420,00	-	-	567,27
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	313.600.458,00	32.011.259.068,00	-	10.914.038.228,00	15.601.439.455,05	2.512,65

Sumber : BKAD Kabupaten Sigi, 2025 diolah dari LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi

Tabel 2.31
Neraca Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	232.927.058.026,69	151.806.805.866,12	98.937.702.338,98	64.869.573.344,44	35.079.482.226,88	- 37,50
Kas di Bendahara Penerimaan	2.730.000,00	4.542.000,00	-	847.594,00	53.449,00	- 31,83
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.941.004,82	5.800,00	17.594.505,00	276.346.055,00	59.279.644,00	76.136,41
Kas di BLUD	2.620.613.650,54	16.181.920.229,46	3.858.754.380,84	1.160.706.269,84	2.184.143,84	67,90
Kas di Bendahara FKTP	303.172.003,00	105.111.205,00	29.308.428,00	3.545.495.207,26	6.659.255,10	2.939,98
Kas Di Bendahara Dana BOS	3.547.139.042,52	221.455.195,52	72.942.720,92	112.862.981,92	-	- 51,52
Kas Lainnya	1.494.786.856,00	211.787.182,72	1.539.819.797,00	214.311.749,00	486.970.036,00	145,59
Kas Dana BOSP	-	-	-	-	136.556.837,92	-
Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	-	-	3.816.664.434,00	-
Setara Kas	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Piutang Pajak Daerah	16.609.012.706,00	18.212.873.649,00	20.882.348.786,00	22.820.301.998,00	24.326.696.461,50	10,05
Piutang Pendapatan	30.073.998.342,12	-	-	-	-	- 25,00
Piutang Lainnya	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	-
Piutang lain lain PAD yang sah	10.225.514.185,12	11.684.588.330,08	9.250.920.370,94	9.631.204.510,93	14.675.786.039,12	12,48
Piutang Transfer Antar Daerah	3.239.471.451,00	7.054.409.611,00	5.694.314.161,00	5.465.448.165,00	14.555.133.350,00	65,19
Penyisihan Piutang	- 13.217.402.573,52	- 14.151.362.692,45	- 16.295.282.663,92	- 16.514.307.624,54	- 18.702.589.150,04	9,20
Beban Dibayar Dimuka	292.951.486,13	278.264.194,54	13.252.613.706,72	10.309.212.950,20	23.865.151.491,06	1.191,72
Persediaan	13.298.156.021,00	25.643.881.325,00	20.099.506.132,42	20.321.948.242,77	19.756.608.631,27	17,39
JUMLAH ASET LANCAR	301.532.142.201,42	217.351.281.895,99	157.437.542.663,90	122.310.951.443,82	118.161.636.849,65	- 20,30
INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-	-
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.695.215.606,00	8.695.215.606,00	9.700.000.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	- 18,84
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	7.695.215.606,00	8.695.215.606,00	9.700.000.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	- 18,84
	-	-	-	-	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	7.695.215.606,00	8.695.215.606,00	9.700.000.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	- 18,84

ASET TETAP	-	-	-	-	-	-
Tanah	113.949.967.887,92	119.090.210.087,92	124.216.138.935,17	126.595.441.737,55	127.577.975.759,55	2,88
Peralatan dan Mesin	430.810.015.086,83	480.496.805.057,84	527.974.689.979,84	548.925.595.886,73	581.700.144.892,02	7,84
Gedung dan Bangunan	651.979.619.087,27	666.670.628.497,37	704.466.368.067,86	781.979.044.165,77	837.277.284.002,94	6,50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.130.269.940.570,95	1.206.336.774.186,76	1.238.705.040.506,76	1.368.587.361.003,04	1.496.179.342.888,97	7,31
Aset Tetap Lainnya	29.324.419.310,00	29.279.601.571,00	31.009.421.784,94	35.724.540.648,93	40.004.869.509,95	8,24
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.659.025.519,94	78.275.302.065,94	159.058.019.413,34	165.918.989.535,93	155.163.922.922,36	39,67
Akumulasi Penyusutan	- 1.050.736.384.871,76	- 1.181.639.382.528,07	- 1.268.465.040.065,95	- 1.394.867.523.148,30	- 1.546.973.985.835,17	10,17
JUMLAH ASET TETAP	1.355.256.602.591,15	1.398.509.938.938,76	1.516.964.638.621,96	1.632.863.449.829,65	1.690.929.554.140,62	5,71
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-
Tagihan Jangka Panjang	-	-	89.575.053,00	1.472.614.514,65	1.472.614.514,65	386,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	1.318.179.450,00	-	-	-	25,00
Aset Tidak Berwujud	2.553.527.088,00	3.228.547.088,00	4.918.740.860,00	9.168.630.089,00	11.040.860.760,00	46,40
Aset Lain-lain	195.091.749.639,79	264.293.413.720,31	260.610.865.869,31	259.896.336.101,30	261.523.253.532,56	8,61
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	97.547.298.878,57	96.391.146.836,00	5.661.638.392,00	23,83
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 2.676.226.939,00	- 2.746.103.289,00	- 3.251.805.010,00	- 4.128.974.836,00	- 96.391.146.565,64	570,63
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	8.882.488.606,00	66.547.534.000,00	-	137,30
JUMLAH ASET LAINNYA	194.969.049.788,79	266.094.036.969,31	173.702.566.499,74	236.564.993.032,95	171.983.943.849,57	2,66
JUMLAH ASET	1.859.453.010.187,36	1.890.650.473.410,06	1.857.804.747.785,60	1.991.749.094.306,42	1.981.084.834.839,84	1,65
KEWAJIBAN	-	-	-	-	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.012.530.411,00	201.893.862,00	105.934.248,00	208.262.465,00	239.268.325,00	4,03
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
Utang Beban	21.267.684.705,98	12.761.405.030,98	8.966.020.416,18	11.784.200.352,98	20.732.476.888,98	9,41
Utang Jangka Pendek Lainnya	25.497.920,00	25.497.920,00	25.497.920,00	16.811.424,00	16.811.424,00	8,52
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22.305.713.036,98	12.988.796.812,98	9.097.452.584,18	12.009.274.241,98	20.988.556.637,98	8,76
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	22.305.713.036,98	12.988.796.812,98	9.097.452.584,18	12.009.274.241,98	20.988.556.637,98	8,76
EKUITAS	-	-	-	-	-	-
EKUITAS	1.807.073.298.808,26	1.877.661.676.597,08	1.848.707.298.201,42	1.989.430.120.334,80	1.969.786.578.201,86	2,25
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.829.379.011.845,24	1.890.650.473.410,06	1.857.804.750.785,60	2.001.439.394.576,78	1.990.775.134.839,84	2,20

Sumber : BKAD Kabupaten Sigi, 2025

1. Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah (2020–2024)

Pendapatan Kabupaten Sigi menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan yang cukup stabil selama lima tahun terakhir, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa kategori pendapatan. Berdasarkan data yang tersedia, total pendapatan Kabupaten Sigi mengalami peningkatan yang konsisten dari Rp 1.141,17 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 1.410,15 triliun pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,55%. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan sumber daya pendapatan yang ada.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan komponen penting dalam sumber pendapatan daerah, mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,88% per tahun. PAD meningkat dari Rp 65,94 miliar pada 2020 menjadi Rp 84,82 miliar pada 2024. Kenaikan signifikan pada PAD ini dapat dikaitkan dengan keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah, yang mengalami pertumbuhan luar biasa dengan rata-rata tahunan 29,06%. Pajak Daerah, yang tumbuh dari Rp 12,90 miliar pada 2020 menjadi Rp 35,12 miliar pada 2024, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pajak di masyarakat serta strategi yang efektif dari pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak.

Sektor Retribusi Daerah mencatatkan pertumbuhan moderat dengan rata-rata tahunan 12,74%, meningkat dari Rp 1,95 miliar pada 2020 menjadi Rp 3,04 miliar pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memperbaiki sistem retribusi untuk pelayanan publik yang lebih baik. Komponen lain yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 25,55%, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah meningkat dari Rp 865,43 juta pada 2020 menjadi Rp 2,09 miliar pada 2024, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan aset daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD.

Terdapat kategori yang mencatatkan penurunan, seperti Lain-lain PAD yang Sah, yang mengalami penurunan rata-rata -2,02% per tahun. Pendapatan dari kategori ini berkurang dari Rp 50,22 miliar pada 2020 menjadi Rp 44,57 miliar pada 2024, kemungkinan disebabkan oleh fluktuasi dari sumber pendapatan yang lebih bergantung pada faktor eksternal. Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang baik dengan rata-rata tahunan 6,44%. Dana perimbangan dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat meningkat secara konsisten, yang mencerminkan adanya alokasi anggaran yang lebih besar dari pusat untuk daerah. Dana perimbangan, yang mencakup dana bagi hasil (DBH), tumbuh dari Rp 826,82 miliar pada 2020 menjadi Rp 1,07 triliun pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 6,78% per tahun.

Kategori Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan peningkatan luar biasa dengan rata-rata pertumbuhan 43,62% per tahun. Peningkatan signifikan ini, dari Rp 39,16 miliar pada 2020 menjadi Rp 117,42 miliar pada 2024, menggambarkan adanya peningkatan pendapatan daerah dari sektor yang menjadi bagian dari bagi hasil nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK), baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dana DAK Fisik meningkat dari Rp 98,73 miliar pada 2020 menjadi Rp 144,95 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 12,87% per tahun. Demikian juga, Dana DAK Non Fisik meningkat dari Rp 101,29 miliar menjadi Rp 152,31 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan 12,91%.

Kategori Dana Insentif Daerah (DID) mencatatkan fluktuasi yang sangat tinggi, dengan pertumbuhan rata-rata 182,78% per tahun. Dana DID, yang mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021, menunjukkan kebijakan insentif yang berhasil meskipun terdapat ketidakpastian di beberapa tahun. Pendapatan

Hibah juga menunjukkan lonjakan signifikan pada 2020 dengan kenaikan sebesar 567,27%, meskipun tidak terdata pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan adanya bantuan hibah yang diterima pada tahun tertentu, namun pendapatan hibah tampaknya tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Bantuan Keuangan mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata penurunan -44,61% per tahun. Penurunan ini menggambarkan penurunan dalam ketergantungan daerah terhadap bantuan keuangan yang bersifat sementara. Secara keseluruhan, Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi andalan dengan pertumbuhan yang cukup stabil. Kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, terutama dari sektor pajak daerah, sementara ada sektor-sektor yang perlu diperhatikan seperti Lain-lain PAD yang Sah dan Bantuan Keuangan, yang mengalami penurunan. Meskipun ada beberapa sektor yang perlu perhatian lebih lanjut, secara keseluruhan, pendapatan daerah Kabupaten Sigi menunjukkan tren positif yang dapat terus dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Kinerja Aset Pemerintah Daerah

a. Aset Lancar

Dalam periode lima tahun terakhir, aset lancar Kabupaten Sigi menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan -20,30% per tahun. Penurunan ini mencerminkan penurunan nilai kas yang tersedia untuk operasi daerah, yang berpotensi mempengaruhi likuiditas daerah. Salah satu kategori yang mengalami penurunan tajam adalah Kas di Kas Daerah, yang berkurang dari Rp 232,93 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp 35,08 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan -37,50% per tahun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dalam kas yang tersedia untuk kegiatan operasional daerah, yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya menjaga kestabilan likuiditas daerah. Kategori Kas di Bendahara Penerimaan juga mencatatkan penurunan yang cukup besar, dengan rata-rata pertumbuhan -31,83% per tahun, sementara Kas di Bendahara Pengeluaran justru mengalami lonjakan signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 76.136,41%. Kenaikan ini dapat menunjukkan adanya peningkatan dana yang dipersiapkan untuk pengeluaran daerah yang perlu dikelola dengan bijaksana. Kas Lainnya mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, dengan rata-rata 145,59% per tahun, mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam dana yang tidak teralokasi pada pos kas utama.

b. Piutang Daerah

Piutang daerah juga mengalami fluktuasi yang perlu diperhatikan. Piutang Pajak Daerah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata 10,05% per tahun, yang menggambarkan adanya peningkatan dalam penerimaan pajak yang tertunda. Sementara itu, Piutang Transfer Antar Daerah mengalami lonjakan dengan rata-rata pertumbuhan 65,19% per tahun, yang mencerminkan adanya peningkatan dalam jumlah transfer antar daerah yang masih menunggak dan perlu dikelola dengan hati-hati. Penyisihan Piutang, yang mencatatkan pertumbuhan 9,20% per tahun, menunjukkan adanya upaya yang dilakukan untuk memitigasi risiko piutang yang tidak tertagih. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengelola piutang yang belum tertagih dengan optimal.

c. Aset Tetap

Aset tetap Kabupaten Sigi mengalami pertumbuhan yang lebih stabil dengan rata-rata pertumbuhan 5,71% per tahun. Nilai total aset tetap meningkat dari Rp 1.355 triliun pada 2020 menjadi Rp 1.690 triliun pada 2024. Kategori Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan menunjukkan peningkatan yang stabil, masing-masing dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,88% untuk tanah, 7,84% untuk peralatan dan mesin, serta 6,50% untuk gedung dan bangunan. Ini menunjukkan bahwa

pemerintah daerah terus melakukan investasi pada aset tetap yang mendukung kebutuhan operasional dan pembangunan jangka panjang. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi dengan rata-rata 39,67%, mencerminkan adanya proyek-proyek besar yang sedang berjalan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan penyelesaian proyek-proyek tersebut agar tidak terjadi keterlambatan dalam implementasi. Akumulasi Penyusutan aset tetap juga menunjukkan angka yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan 10,17% per tahun. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun nilai aset tetap meningkat, nilai penyusutan juga semakin besar, yang mengindikasikan perlunya peremajaan aset agar tetap efektif digunakan.

d. Aset Lainnya

Kategori Aset Tidak Berwujud menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi dengan rata-rata 46,40% per tahun, yang mencerminkan adanya investasi pada aset yang mungkin berhubungan dengan hak kekayaan intelektual atau proyek pembangunan jangka panjang. Namun, Aset Lainnya mencatatkan fluktuasi yang signifikan dengan rata-rata 8,61% per tahun, yang perlu mendapat perhatian agar tidak mempengaruhi stabilitas total aset daerah.

e. Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban Jangka Pendek menunjukkan pertumbuhan rata-rata 8,76% per tahun, yang mengindikasikan adanya peningkatan kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka pendek. Utang Beban mencatatkan fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 9,41% per tahun, yang menunjukkan perubahan kewajiban yang harus dibayar dalam waktu singkat. Ekuitas daerah mengalami peningkatan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan 2,25% per tahun, yang menunjukkan peningkatan modal dan posisi keuangan yang lebih kuat untuk mendukung program-program pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, keuangan Kabupaten Sigi menunjukkan perkembangan yang variatif. Sementara aset tetap dan ekuitas menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif, beberapa kategori aset lancar mengalami penurunan signifikan, terutama pada kas daerah dan kas di bendahara penerimaan, yang menunjukkan potensi masalah likuiditas yang perlu diatasi. Selain itu, meskipun ada pertumbuhan yang signifikan dalam piutang pajak daerah dan piutang transfer antar daerah, pengelolaan piutang tersebut masih menjadi tantangan penting yang memerlukan perhatian khusus.

2.2.2 Proyeksi keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, terutama selain belanja wajib dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama, seperti belanja untuk urusan wajib yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar serta belanja untuk urusan pilihan, yang sebagian besarnya merupakan kelompok belanja tidak langsung.

Untuk mendapatkan gambaran terkait kerangka pendanaan, Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan analisa perhitungan terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang didasarkan pada proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan kondisi daerah maka kebijakan penganggaran daerah diharapkan fokus pada area pendanaan yaitu:

A. Reformasi Pendanaan

Reformasi kebijakan di bidang pendapatan, antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan pendapatan untuk percepatan pemulihan transformasi ekonomi.

B. Reformasi Belanja

1. Pendidikan, terkait peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur pendidikan;
2. Kesehatan, terkait pemulihan dan penguatan sistem kesehatan dan infrastruktur kesehatan;
3. Program Perlindungan Sosial, terkait pemulihan dan penguatan program bansos dan hibah;
4. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), terkait kualitas kontrol TKDD, mendorong pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan dan pendidikan;
5. Fokus program prioritas, terkait *money follow program* berorientasi hasil, transparan, efisiensi dan antisipatif.

Proyeksi APBD pemerintah kabupaten Sigi disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Dari sisi pendapatan, dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah sehingga dapat dioptimalkan pada semua lini. Optimalisasi potensi pendapatan daerah tersebut diproyeksi dengan memperhatikan aspek hukum, manfaat bagi masyarakat, dan kemampuan masyarakat dengan tetap berpedoman pada asas akuntabilitas. Dari sisi PAD, peningkatan juga bertujuan untuk meningkatkan rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Sigi. Belanja daerah Tahun 2026–2030 disusun dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku serta pendekatan anggaran berbasis kinerja, dengan memperhatikan program prioritas daerah dan memperhitungkan proyeksi kondisi pada tahun mendatang.

Kerangka pendanaan proyeksi keuangan daerah 5 (Lima) tahun kedepan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, selanjutnya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah pemerintah kabupaten sigi dapat dilihat pada tabel berikut.

KODE REKENIN G	URAIAN	PROYEKSI TAHUN					
		BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3		5	6	7	8
	Perundang-Undangan						
5	BELANJA DAERAH	1.492.902.491.519,00	1.326.787.805.348,00	1.370.799.383.847,00	1.376.839.103.307,00	1.382.937.241.374,00	1.389.094.484.513,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.051.879.809.549,00	949.241.970.120,00	991.592.346.944,00	995.963.555.441,00	1.000.385.841.098,00	1.004.859.858.076,00
5.1.01	Belanja Pegawai	576.285.562.398,00	667.670.785.321,00	670.608.536.776,00	673.559.214.338,00	676.522.874.881,00	679.499.575.531,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.832.047.873,00	249.413.424.646,00	288.684.555.870,00	289.962.970.087,00	291.278.853.168,00	292.632.799.399,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.244.000.000,00	2.253.873.600,00	2.263.790.644,00	2.273.751.323,00	2.283.755.828,00
5.1.05	Belanja Hibah	70.104.199.278,00	29.835.405.685,00	29.966.681.470,00	30.098.534.868,00	30.230.968.421,00	30.363.984.683,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.158.000.000,00	78.354.468,00	78.699.228,00	79.045.504,00	79.393.305,00	79.742.635,00
5.2	BELANJA MODAL	208.915.499.576,00	138.583.439.992,00	139.193.207.127,00	139.805.657.238,00	140.420.802.130,00	141.038.653.660,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.782.534.000,00	1.836.000.000,00	1.844.078.400,00	1.852.192.345,00	1.860.341.991,00	1.868.527.496,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.248.788.883,00	15.950.547.957,00	16.020.730.368,00	16.091.221.582,00	16.162.022.957,00	16.233.135.858,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.404.790.052,00	55.434.985.938,00	55.678.899.876,00	55.923.887.035,00	56.169.952.138,00	56.417.099.928,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.707.903.013,00	59.564.074.749,00	59.826.156.677,00	60.089.391.767,00	60.353.785.091,00	60.619.341.745,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.400.083.628,00	5.298.031.348,00	5.321.342.686,00	5.344.756.593,00	5.368.273.522,00	5.391.893.926,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	371.400.000,00	499.800.000,00	501.999.120,00	504.207.916,00	506.426.431,00	508.654.707,00

KODE REKENIN G	URAIAN	PROYEKSI TAHUN					
		BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3		5	6	7	8
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.249.582.814,00	3.723.000.000,00	3.739.381.200,00	3.755.834.477,00	3.772.360.149,00	3.788.958.534,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.249.582.814,00	3.723.000.000,00	3.739.381.200,00	3.755.834.477,00	3.772.360.149,00	3.788.958.534,00
5.4	BELANJA TRANSFER	227.857.599.580,00	235.239.395.236,00	236.274.448.576,00	237.314.056.151,00	238.358.237.997,00	239.407.014.243,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.124.684.980,00	4.977.492.763,00	4.999.393.731,00	5.021.391.064,00	5.043.485.185,00	5.065.676.519,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	224.732.914.600,00	230.261.902.473,00	231.275.054.845,00	232.292.665.087,00	233.314.752.812,00	234.341.337.724,00
	SURPLUS/DEFISI T	(69.965.831.453,00)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	69.965.831.453,00	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.965.831.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.965.831.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
X	PEMBIAYAAN NETTO	69.965.831.453,00	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
X	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Sigi, 2025

Proyeksi APBD disusun dengan *baseline* tahun 2024 hingga periode tahun 2030 guna menggambarkan arah kebijakan keuangan daerah yang mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah. Setiap tahun, perencanaan APBD memperhatikan kondisi pendapatan dan belanja daerah, serta potensi pembiayaan dan surplus atau defisit anggaran. Berdasarkan proyeksi keuangan daerah Kabupaten Sigi dapat diidentifikasi beberapa kecenderungan strategis baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah yang menggambarkan arah kebijakan fiskal jangka menengah daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi diproyeksikan relatif stabil dengan tren peningkatan moderat pada periode 2026–2030. *Baseline* 2024 tercatat sebesar Rp1,422 triliun, kemudian mengalami fluktuasi ke Rp1,329 triliun pada 2026 dan kembali meningkat hingga Rp1,392 triliun pada 2030. Dinamika ini terutama dipengaruhi oleh komponen Pendapatan Transfer yang mendominasi lebih dari 90% struktur pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berkontribusi relatif kecil meski menunjukkan tren pertumbuhan positif.

PAD diproyeksikan meningkat dari Rp86,5 miliar (2024) menjadi Rp98,5 miliar (2030), dengan kontributor utama berasal dari Pajak Daerah yang mengalami peningkatan signifikan (dari Rp35,9 miliar pada 2024 menjadi Rp50,2 miliar pada 2030). Hal ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan kapasitas fiskal daerah. Namun, pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan justru cenderung stagnan dan bahkan menurun drastis pada tahun proyeksi. Untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan antar daerah tetap menjadi tumpuan utama dengan kisaran Rp1,2–1,27 triliun per tahun. Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat menandakan kerentanan fiskal daerah apabila terjadi perubahan kebijakan nasional.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah diproyeksikan mengalami pergerakan yang relatif linier dengan total belanja sekitar Rp1,3–1,38 triliun per tahun pada periode 2026–2030. Struktur belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi, dengan proporsi sekitar 70–72% dari total belanja. Komponen terbesar berasal dari Belanja Pegawai yang cenderung terus meningkat (Rp576 miliar pada 2024 menjadi Rp679 miliar pada 2030). Hal ini menandakan rigiditas anggaran karena porsi belanja pegawai yang besar berpotensi menekan ruang fiskal untuk belanja pembangunan produktif.

Belanja Modal mengalami penurunan cukup tajam dibanding *baseline* 2024 (Rp208 miliar) dan hanya berkisar Rp138–141 miliar pada periode 2026–2030. Penurunan ini patut menjadi perhatian karena belanja modal merupakan instrumen penting untuk menciptakan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Proporsi belanja modal yang relatif kecil dapat menghambat akselerasi pembangunan daerah jika tidak diimbangi dengan strategi pembiayaan alternatif, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) atau pemanfaatan pendanaan inovatif berbasis ekologi dan keberlanjutan.

Sementara itu, Belanja Transfer kepada desa dan pihak ketiga terus meningkat secara gradual, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis kewilayahan dan kolaboratif. Belanja Tidak Terduga tetap dijaga pada level konservatif (Rp3,7–3,8 miliar), yang relatif rendah dibandingkan potensi risiko bencana di Kabupaten Sigi.

3. Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah

Keseimbangan fiskal menunjukkan adanya defisit struktural pada *baseline* 2024 sebesar Rp69,9 miliar, yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Namun, pada periode 2026–2030, defisit diproyeksikan terkendali pada level Rp3 miliar per tahun dan ditutup melalui mekanisme pembiayaan, khususnya penyertaan modal daerah. Kondisi ini menunjukkan manajemen fiskal yang relatif hati-hati, meski ketergantungan pada pembiayaan non-struktural seperti SiLPA berpotensi menimbulkan volatilitas jika realisasi tidak sesuai proyeksi.

2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan pembangunan daerah

Kabupaten Sigi menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Permasalahan ini muncul sebagai hasil kesenjangan antara kondisi aktual (realita) dengan kondisi ideal (yang seharusnya dicapai). Setiap tantangan pembangunan menunjukkan keterkaitan, hal ini memperlihatkan bahwa banyak permasalahan saling memengaruhi, membentuk sistem kompleks yang menuntut pendekatan lintas sektor, berbasis bukti, dan berkelanjutan untuk menyusun solusi yang tepat dan inklusif.

2. Produktivitas dan Teknologi Rendah

Kabupaten Sigi merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, hingga saat ini, pemanfaatan potensi tersebut masih belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya tingkat produktivitas yang secara langsung berkaitan dengan terbatasnya adopsi teknologi modern dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar praktik pertanian di Kabupaten Sigi masih dijalankan secara tradisional, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga pascapanen. Minimnya penggunaan teknologi pertanian terkini, seperti alat mesin pertanian (alsintan), irigasi tetes, pemupukan presisi, maupun sistem informasi pertanian digital, menghambat peningkatan hasil panen dan efisiensi kerja petani. Kondisi serupa juga terjadi pada pelaku UMKM yang masih mengandalkan metode produksi manual, terbatas pada keterampilan dasar, dan minim diversifikasi produk maupun pemasaran digital.

Keterbatasan akses terhadap teknologi disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, rendahnya tingkat literasi teknologi di kalangan pelaku usaha dan petani. Kedua, kurangnya dukungan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang merata dan lembaga penyedia pelatihan teknologi berbasis kebutuhan lokal. Ketiga, belum optimalnya intervensi kebijakan daerah dalam memfasilitasi pembaruan teknologi secara masif dan terintegrasi. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia lokal juga menjadi tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan teknis menyebabkan pelaku sektor produktif di Sigi belum siap mengadopsi dan mengoperasikan teknologi yang lebih efisien. Hal ini menciptakan siklus stagnasi produktivitas dan ketergantungan pada cara-cara lama yang tidak kompetitif di pasar regional maupun nasional.

Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan adopsi teknologi modern harus menjadi prioritas strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Intervensi kebijakan yang dibutuhkan antara lain:

- a. Penyediaan pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani dan pelaku UMKM.
- b. Penyebarluasan alat dan teknologi pertanian serta manufaktur skala kecil yang sesuai dengan kondisi lokal.

- c. Peningkatan infrastruktur digital dan kerja sama dengan lembaga riset serta perguruan tinggi.
- d. Penguatan ekosistem inovasi daerah yang melibatkan komunitas, sektor swasta, dan pemerintah secara kolaboratif.

Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Sigi memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi produktivitas yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional dan global.

3. Infrastruktur Tidak Terintegrasi

Kabupaten Sigi memiliki potensi besar sebagai daerah agraris dan penghasil komoditas unggulan, seperti kakao, kopi, kemiri, dan hortikultura. Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya dapat dioptimalkan akibat lemahnya dukungan infrastruktur dasar yang terintegrasi, terutama di wilayah-wilayah sentra produksi. Ketimpangan pembangunan infrastruktur telah menjadi penghambat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, distribusi hasil produksi, dan konektivitas antarwilayah. Jaringan jalan usaha tani yang ada saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun jangkauan. Banyak akses jalan ke lahan pertanian maupun sentra UMKM dalam kondisi rusak, belum beraspal, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Akibatnya, distribusi input produksi seperti pupuk dan benih menjadi mahal dan lambat, sementara pengangkutan hasil panen ke pasar mengalami kendala waktu dan biaya. Hal ini secara langsung menurunkan daya saing produk lokal dan margin keuntungan petani maupun pelaku usaha.

Selain itu, sistem irigasi yang seharusnya menjadi penopang utama keberlanjutan produksi pertanian, belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan di tingkat tapak. Sebagian besar irigasi teknis maupun setengah teknis tidak mengalirkan air secara optimal, dan banyak jaringan irigasi yang tidak terhubung langsung dengan kawasan pertanian yang aktif. Akibatnya, produktivitas pertanian sangat bergantung pada curah hujan musiman yang tidak menentu, sehingga rawan terhadap gagal panen. Masalah utama terletak pada belum adanya pendekatan pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berbasis kawasan. Pembangunan jalan, irigasi, pasar, dan fasilitas logistik seringkali dilakukan secara sektoral, tanpa mempertimbangkan konektivitas lintas wilayah dan integrasi antar prasarana. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar kecamatan, keterisolasian beberapa desa produktif, serta tingginya biaya logistik dan transportasi.

Untuk menjawab tantangan ini, Kabupaten Sigi perlu merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur berbasis klaster ekonomi lokal dan kawasan produksi terpadu. Strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- a. Penyusunan peta konektivitas kawasan produktif berbasis spasial;
- b. Pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani serta irigasi dengan skala prioritas;
- c. Integrasi infrastruktur dengan pusat distribusi, pasar rakyat, dan digitalisasi logistik;
- d. Pelibatan multipihak dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur.

Dengan menciptakan jaringan infrastruktur yang saling terhubung dan mendukung produktivitas lokal, Kabupaten Sigi dapat memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi disparitas antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

4. Deforestasi dan Degradasi Lingkungan

Kabupaten Sigi merupakan wilayah dengan kekayaan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati yang penting, baik sebagai penyangga lingkungan hidup maupun sebagai penopang ekonomi masyarakat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap lingkungan mengalami peningkatan akibat praktik alih fungsi lahan dan pembukaan lahan tanpa pendekatan konservasi yang memadai. Fenomena ini menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi lingkungan yang semakin meluas.

Alih fungsi lahan untuk pertanian, pemukiman, dan kegiatan ekonomi lainnya sering kali dilakukan secara masif dan tidak terkendali, tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran atau perambahan hutan telah mengakibatkan hilangnya tutupan vegetasi alami, memperbesar risiko longsor, banjir bandang, dan kekeringan, serta mengancam habitat satwa endemik. Selain itu, meningkatnya lahan kritis berdampak langsung terhadap penurunan kualitas tanah, produktivitas pertanian, dan ketersediaan air bersih.

Kondisi ini juga memperburuk kontribusi Kabupaten Sigi terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang berdampak pada perubahan iklim di tingkat lokal maupun global. Penurunan kualitas hutan sebagai penyerap karbon (*carbon sink*) menjadikan upaya mitigasi iklim semakin sulit tercapai. Sementara itu, rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat serta belum optimalnya pengawasan terhadap kawasan hutan dan konservasi mempercepat laju kerusakan lingkungan. Isu deforestasi ini berkaitan erat dengan lemahnya tata kelola ruang dan perizinan lahan, serta belum terintegrasinya pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan lintas sektor. Kurangnya kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, menyebabkan pelestarian lingkungan masih bersifat parsial dan sporadis.

Oleh karena itu, upaya sistematis perlu dilakukan untuk menghentikan laju deforestasi dan memulihkan lahan terdegradasi di Kabupaten Sigi. Beberapa langkah strategis yang perlu diterapkan antara lain:

- a. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pembukaan lahan dan alih fungsi kawasan hutan;
- b. Peningkatan program rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui skema perhutanan sosial dan agroforestri;
- c. Pengarusutamaan pendekatan berbasis ekosistem dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah;
- d. Pelibatan masyarakat lokal dan adat sebagai penjaga ekosistem melalui insentif hijau dan skema kemitraan konservasi;
- e. Pengembangan data spasial lingkungan dan pemantauan GRK secara transparan dan berbasis teknologi.

Melalui intervensi yang terencana, inklusif, dan berbasis bukti, Kabupaten Sigi dapat mengubah tantangan ekologis ini menjadi peluang pembangunan hijau yang tangguh terhadap iklim, berkeadilan sosial, dan berorientasi pada generasi masa depan.

5. Pemanfaatan Energi Terbarukan (EBT) Rendah

Kabupaten Sigi memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya mikrohidro dan energi surya, yang sangat relevan untuk menunjang kebutuhan energi di kawasan pedesaan dan wilayah-wilayah pertanian terpencil. Potensi ini hadir secara alami melalui sumber daya air yang melimpah dari aliran sungai dan kondisi iklim tropis dengan intensitas penyinaran matahari yang tinggi sepanjang tahun.

Namun, hingga saat ini, pemanfaatan energi terbarukan di Kabupaten Sigi masih tergolong sangat rendah dan belum menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan daerah. Sebagian besar desa terpencil masih bergantung pada pasokan listrik konvensional yang tidak stabil atau bahkan belum terjangkau jaringan listrik nasional. Hal ini berdampak langsung pada keterbatasan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar masyarakat, serta menghambat produktivitas kawasan pertanian yang membutuhkan pasokan energi untuk pengolahan hasil, irigasi, maupun pengawetan produk.

Minimnya pengembangan EBT di daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Pertama, belum adanya peta jalan dan kebijakan yang tegas terkait pemanfaatan energi terbarukan pada tingkat daerah. Kedua, keterbatasan kapasitas teknis dan pendanaan untuk membangun dan mengelola infrastruktur EBT di tingkat komunitas. Ketiga, rendahnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan model energi desa yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. Padahal, implementasi EBT dapat menjadi solusi strategis untuk mempercepat elektrifikasi pedesaan, menurunkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta mendorong kemandirian energi di wilayah yang selama ini terisolasi. Di samping itu, pengembangan EBT secara tepat dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kapasitas teknis masyarakat lokal, dan berkontribusi terhadap target penurunan emisi karbon daerah.

Ke depan, Kabupaten Sigi perlu mengarusutamakan pengembangan energi terbarukan dalam perencanaan pembangunan wilayah, khususnya pada kawasan dengan keterbatasan infrastruktur listrik. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan peta potensi EBT daerah, termasuk mikrohidro dan surya berbasis spasial dan teknis;
- b. Perumusan kebijakan daerah yang mendorong investasi dan insentif EBT skala komunitas;
- c. Pengembangan pilot project energi desa berbasis kebutuhan masyarakat dan model pengelolaan partisipatif;
- d. Penguatan kerja sama multipihak dengan lembaga donor, akademisi, dan pelaku usaha EBT;
- e. Integrasi EBT dalam pembangunan kawasan pertanian terpadu untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan.

Dengan pendekatan yang inovatif, kolaboratif, dan inklusif, pemanfaatan energi terbarukan di Kabupaten Sigi dapat menjadi pendorong transformasi sosial-ekonomi desa, memperkuat ketahanan energi, dan mewujudkan pembangunan yang rendah karbon dan berkelanjutan.

6. Konektivitas dan Logistik Lemah

Kabupaten Sigi merupakan wilayah strategis yang memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat karena lemahnya konektivitas dan sistem logistik antarwilayah. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam mengembangkan daya saing komoditas lokal dan memperluas akses pasar. Keterbatasan sarana transportasi, baik dari sisi infrastruktur jalan maupun moda angkut, menyebabkan proses distribusi barang dan hasil pertanian menjadi tidak efisien. Banyak wilayah penghasil komoditas yang masih sulit dijangkau karena akses jalan yang rusak, tidak terhubung secara langsung ke pusat distribusi, atau hanya bisa dilalui pada musim tertentu. Akibatnya, biaya angkut menjadi tinggi, waktu tempuh menjadi lama,

dan kualitas hasil pertanian sering menurun sebelum sampai ke konsumen atau pasar.

Sistem logistik yang belum memadai juga mencakup minimnya fasilitas penyimpanan, pengepakan, dan pengolahan pascapanen. Hal ini membuat petani dan pelaku UMKM kesulitan mempertahankan kualitas produk dalam skala besar maupun waktu yang lama. Selain itu, tidak tersedianya sistem informasi pasar dan logistik yang terintegrasi menyebabkan pelaku usaha lokal kekurangan informasi tentang harga, permintaan, serta rute distribusi yang efisien. Dampak langsung dari lemahnya konektivitas ini adalah rendahnya nilai tambah yang dinikmati oleh produsen di tingkat desa, serta melemahnya daya saing komoditas lokal baik di pasar domestik maupun ekspor. Ketimpangan harga antara produsen dan konsumen pun makin lebar, dan menjadikan pelaku usaha lokal rentan terhadap fluktuasi pasar.

Untuk mengatasi persoalan ini, Kabupaten Sigi perlu mengembangkan strategi pembangunan konektivitas dan logistik berbasis kawasan ekonomi lokal. Beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan antara lain:

- a. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan penghubung antar sentra produksi dan pasar;
- b. Penyediaan fasilitas logistik desa seperti cold storage, rumah kemas, dan gudang komunal;
- c. Digitalisasi sistem logistik lokal yang terhubung dengan platform informasi harga dan distribusi;
- d. Penguatan peran agregator lokal atau BUMDesa dalam konsolidasi dan distribusi hasil pertanian;
- e. Mendorong sinergi antar daerah dalam membangun konektivitas regional berbasis potensi komoditas.

Dengan memperkuat konektivitas dan sistem logistik, Kabupaten Sigi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi rantai pasok dan distribusi barang, tetapi juga membuka peluang ekspansi ekonomi lokal yang lebih luas dan inklusif, serta memperkuat peran daerah dalam rantai nilai nasional dan global.

7. Akses Terbatas dan Promosi Lemah

Kabupaten Sigi dianugerahi keindahan alam yang memukau serta kekayaan budaya lokal yang autentik, menjadikannya daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, produk unggulan berbasis pertanian dan UMKM seperti kopi, kakao, kemiri, serta kerajinan tangan memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya tarik khas. Namun, potensi ini belum tergarap maksimal akibat dua tantangan utama: aksesibilitas yang terbatas dan lemahnya promosi daerah. Sebagian besar destinasi wisata alam di Kabupaten Sigi, termasuk kawasan perbukitan, air terjun, dan ekowisata desa, belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai. Jalan menuju lokasi wisata kerap sulit dilalui, fasilitas umum belum tersedia, dan informasi digital mengenai lokasi maupun atraksi wisata sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kawasan wisata sulit dijangkau oleh wisatawan, baik lokal maupun luar daerah, serta menyulitkan pelaku usaha untuk mengembangkan paket wisata yang menarik.

Di sisi lain, promosi terhadap destinasi wisata dan produk unggulan daerah belum terstruktur dan belum menyasar pasar potensial secara efektif. Minimnya penggunaan media digital, kurangnya branding destinasi, serta lemahnya strategi komunikasi publik membuat Kabupaten Sigi kurang dikenal sebagai tujuan wisata dan pusat produk khas daerah. Rendahnya keterlibatan sumber daya manusia

pendamping yang memiliki keahlian di bidang pariwisata, pemasaran digital, maupun pengelolaan usaha turut memperburuk kondisi ini. Akses yang terbatas dan promosi yang lemah menyebabkan sektor pariwisata Sigi belum mampu bersaing dengan daerah lain, serta belum berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Padahal, bila dikelola dengan baik, pariwisata dapat menjadi penggerak pertumbuhan inklusif, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat identitas dan kebanggaan lokal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kabupaten Sigi perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses infrastruktur menuju kawasan wisata prioritas melalui kolaborasi antar OPD dan dukungan dana pembangunan daerah;
- b. Pengembangan platform digital pariwisata untuk promosi destinasi, produk, dan layanan berbasis komunitas;
- c. Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku pariwisata lokal, pelaku UMKM, dan pemuda kreatif;
- d. Penetapan kawasan wisata unggulan yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi lokal dan program desa wisata;
- e. Kemitraan dengan pelaku industri pariwisata, media, dan platform digital untuk memperluas jangkauan promosi daerah.

Dengan memperkuat aksesibilitas dan strategi promosi berbasis digital dan komunitas, Kabupaten Sigi dapat memanfaatkan potensi wisata dan produk unggulannya sebagai motor baru pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan memberdayakan masyarakat lokal.

8. Minim Pelatihan dan Pengangguran Terselubung

Kabupaten Sigi menghadapi tantangan serius dalam sektor ketenagakerjaan, terutama terkait dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan tingginya tingkat pengangguran terselubung. Meskipun data menunjukkan sebagian besar penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, kenyataannya banyak di antara mereka bekerja dalam kondisi yang tidak produktif, khususnya sebagai buruh keluarga tidak dibayar di sektor pertanian tradisional dan usaha rumah tangga.

Fenomena ini mencerminkan masalah struktural dalam pasar tenaga kerja, yaitu dominasi pekerjaan informal, rendahnya upah, dan minimnya kesempatan untuk peningkatan keterampilan. Tenaga kerja muda, yang seharusnya menjadi tulang punggung produktivitas daerah, belum sepenuhnya memperoleh akses terhadap pelatihan kerja, pendidikan vokasi, maupun program wirausaha berbasis potensi lokal. Akibatnya, banyak pemuda terjebak dalam pekerjaan tidak layak, atau mengalami frustrasi sosial karena merasa tidak memiliki arah masa depan yang jelas.

Kondisi ini diperparah oleh belum terintegrasinya pelatihan kerja dengan kebutuhan riil pasar dan dunia usaha. Fasilitas pelatihan yang tersedia masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh kecamatan. Selain itu, belum ada sistem yang kuat untuk memetakan kebutuhan keterampilan (*skills mapping*) secara berkala, maupun mekanisme kemitraan antara pemerintah daerah, dunia industri, dan lembaga pendidikan vokasi.

Dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat: produktivitas tenaga kerja stagnan, mobilitas ekonomi rendah, dan inovasi usaha minim. Hal ini juga menghambat laju pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata, karena sebagian besar potensi generasi muda belum teraktualisasi secara optimal. Untuk menjawab tantangan ini, Kabupaten Sigi perlu mengembangkan strategi

penguatan kapasitas SDM yang menyeluruh dan berkelanjutan. Beberapa langkah prioritas yang dapat diambil antara lain:

- a. Pengembangan pusat pelatihan kerja berbasis potensi lokal dan teknologi tepat guna di setiap kecamatan;
- b. Program pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan manajemen usaha bagi generasi muda;
- c. Penguatan kerja sama dengan sektor swasta untuk program magang, penempatan kerja, dan inkubasi bisnis;
- d. Peningkatan *database* tenaga kerja dan integrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan daerah;
- e. Pendekatan inklusif yang melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam pelatihan dan peluang kerja.

Dengan mengatasi pengangguran terselubung melalui investasi pada peningkatan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja produktif, Kabupaten Sigi dapat menciptakan lompatan besar dalam kualitas pembangunan manusia, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan mewujudkan daerah yang berdaya dan mandiri.

9. Partisipasi Masyarakat Belum Bermakna

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat terlibat secara aktif dan bermakna dalam proses perencanaannya. Namun, di Kabupaten Sigi, partisipasi masyarakat—terutama dari kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas—masih tergolong rendah dan bersifat simbolik. Keterlibatan mereka lebih sering terbatas pada pelibatan formal semata, tanpa memiliki ruang yang cukup untuk mempengaruhi pengambilan keputusan secara nyata.

Forum-forum perencanaan pembangunan seperti Musrenbang tingkat desa hingga kabupaten masih didominasi oleh suara elite lokal dan kelompok tertentu, sementara kebutuhan, aspirasi, dan perspektif kelompok rentan sering kali terpinggirkan. Rendahnya literasi perencanaan, kurangnya akses informasi, serta terbatasnya ruang dialog yang setara menjadi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi bermakna masyarakat. Situasi ini berdampak pada rendahnya relevansi kebijakan pembangunan terhadap kebutuhan nyata masyarakat akar rumput, serta memperkuat ketimpangan sosial dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Ketidakterlibatan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas juga menyebabkan hilangnya potensi kontribusi sosial, inovasi lokal, dan kontrol sosial terhadap pembangunan yang seharusnya menjadi kekuatan demokrasi partisipatif.

Partisipasi yang tidak bermakna juga mencerminkan lemahnya mekanisme konsultasi publik, minimnya fasilitator atau pendamping masyarakat yang sensitif terhadap inklusi, serta belum terintegrasinya prinsip partisipatif dalam sistem perencanaan berbasis data dan bukti. Akibatnya, program-program pembangunan yang dijalankan kerap bersifat *top-down*, tidak berkelanjutan, dan kurang mendapat dukungan dari masyarakat luas.

Untuk itu, Kabupaten Sigi perlu membangun ekosistem partisipasi publik yang inklusif, representatif, dan berdaya guna. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

- a. Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam memahami proses perencanaan dan penganggaran partisipatif;
- b. Pembentukan forum-forum komunitas berbasis kelompok rentan sebagai kanal aspirasi dan advokasi;
- c. Peningkatan peran pendamping lokal, kader pemberdayaan masyarakat, dan fasilitator desa yang memahami prinsip inklusi;

- d. Pengembangan sistem perencanaan digital yang transparan dan memungkinkan partisipasi daring;
 - e. Integrasi prinsip-prinsip inklusif dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
- Dengan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi bermakna semua elemen masyarakat, Kabupaten Sigi tidak hanya akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan responsif, tetapi juga memperkuat legitimasi pembangunan dan membangun fondasi sosial yang kokoh menuju daerah yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan sosial.

10. Distribusi Layanan Dasar Tidak Merata

Akses terhadap layanan dasar yang berkualitas merupakan hak fundamental setiap warga negara dan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Namun, di Kabupaten Sigi, penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi masih menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perdesaan. Ketimpangan distribusi layanan dasar tampak jelas dalam ketersediaan fasilitas dan tenaga pendukung. Banyak desa dan dusun di daerah pegunungan atau sulit dijangkau yang belum memiliki puskesmas pembantu, sekolah layak, maupun jaringan air bersih yang memadai. Di sisi lain, fasilitas yang tersedia di wilayah pusat justru seringkali mengalami kelebihan beban, baik dari sisi kapasitas layanan maupun jumlah pengguna. Wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Sigi mengalami kekurangan tenaga medis, guru, dan petugas layanan lainnya. Kurangnya insentif dan sarana pendukung membuat tenaga profesional enggan ditempatkan di lokasi-lokasi sulit. Akibatnya, masyarakat di daerah-daerah tersebut harus menempuh jarak jauh untuk mengakses layanan dasar atau bahkan tidak terlayani sama sekali. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, rendahnya angka partisipasi sekolah, serta tingginya risiko penyakit berbasis lingkungan.

Distribusi yang tidak merata ini diperparah oleh lemahnya perencanaan spasial dan alokasi anggaran berbasis kebutuhan riil wilayah. Pendekatan pembangunan yang belum sepenuhnya berbasis data dan tidak mempertimbangkan kondisi geografis serta sebaran penduduk menyebabkan ketimpangan semakin melebar. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi pelayanan publik membuat proses penjangkauan layanan ke daerah terpencil menjadi lamban dan tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kabupaten Sigi perlu merumuskan strategi distribusi layanan dasar yang adil, terukur, dan adaptif terhadap kondisi wilayah. Beberapa langkah strategis antara lain:

- a. Pemetaan kebutuhan layanan dasar berbasis spasial dan demografi secara berkala;
- b. Pengembangan layanan bergerak (*mobile service*) untuk daerah sulit dijangkau;
- c. Insentif khusus dan skema afirmatif bagi tenaga kesehatan, guru, dan teknisi untuk bertugas di daerah terpencil;
- d. Pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi berbasis komunitas;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring, pengaduan, dan evaluasi layanan publik secara *real time*.

Dengan memastikan distribusi layanan dasar yang lebih merata dan responsif, Kabupaten Sigi akan dapat memperkecil kesenjangan antardaerah, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan.

11. Minimnya Mitigasi dan Adaptasi Iklim

Kabupaten Sigi merupakan wilayah dengan topografi yang kompleks dan rentan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Selain itu, dampak perubahan iklim global telah memperparah frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem di wilayah ini, mengancam keberlanjutan ekosistem, produktivitas pertanian, serta keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam di Kabupaten Sigi masih sangat terbatas.

Sebagian besar wilayah rawan longsor, kekeringan musiman, serta banjir tahunan belum memiliki sistem peringatan dini yang fungsional maupun manajemen risiko berbasis komunitas. Banyak desa yang belum memiliki rencana kontinjensi, peta risiko bencana, atau infrastruktur pelindung seperti tanggul, drainase, dan resapan air. Akibatnya, ketika bencana terjadi, respons cenderung reaktif dan darurat, bukan preventif dan adaptif.

Selain itu, kapasitas institusi daerah dalam pengelolaan risiko bencana dan perubahan iklim masih belum optimal. Koordinasi lintas sektor dan data iklim spasial belum tersedia secara terpadu. Sementara itu, edukasi publik mengenai adaptasi iklim dan ketangguhan bencana belum menyentuh masyarakat secara luas, terutama di wilayah terpencil. Rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pengurangan risiko bencana juga menjadi kendala dalam membangun ketahanan daerah secara menyeluruh.

Minimnya upaya mitigasi dan adaptasi juga berdampak langsung pada sektor-sektor vital seperti pertanian dan infrastruktur. Pola tanam tidak lagi sesuai musim, hasil panen merosot karena ketidakaturan iklim, dan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan mudah rusak akibat cuaca ekstrem. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi, menurunkan kualitas hidup masyarakat, dan memperluas kesenjangan pembangunan.

Untuk menghadapi tantangan ini, Kabupaten Sigi perlu segera memperkuat sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui strategi sebagai berikut:

- a. Penyusunan peta kerentanan dan risiko iklim berbasis wilayah secara partisipatif;
- b. Pengembangan sistem peringatan dini berbasis komunitas dan teknologi;
- c. Integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RTRW, KLHS);
- d. Rehabilitasi dan perlindungan ekosistem penyangga seperti hutan lindung, DAS, dan daerah tangkapan air;
- e. Penguatan kapasitas masyarakat dalam manajemen risiko dan adaptasi berbasis lokal melalui pelatihan dan sekolah lapang iklim;
- f. Kolaborasi dengan lembaga riset, BMKG, BNPB, dan mitra pembangunan untuk program inovatif berbasis data.

Dengan membangun sistem mitigasi dan adaptasi iklim yang lebih kuat, Kabupaten Sigi tidak hanya akan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, tetapi juga melindungi modal sosial-ekologis jangka panjang dan memastikan pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.

12. Sanitasi dan Gizi Buruk

Sanitasi yang layak dan akses terhadap makanan bergizi merupakan fondasi utama dalam menciptakan kualitas hidup yang sehat dan produktif. Namun, di Kabupaten Sigi, masih banyak wilayah—terutama perdesaan—yang menghadapi keterbatasan dalam hal sanitasi aman dan pemenuhan gizi, khususnya pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil. Masalah ini menjadi tantangan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas kesehatan generasi masa depan dan keberlanjutan pembangunan manusia di daerah.

Banyak rumah tangga di desa-desa terpencil belum memiliki akses terhadap jamban sehat, fasilitas air bersih yang layak, maupun sistem pengelolaan limbah domestik. Praktik buang air besar sembarangan (BABS) masih ditemukan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum merata. Hal ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi saluran pencernaan, hingga stunting yang kronis.

Di sisi lain, angka gizi buruk dan kurang gizi masih mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak bawah lima tahun (balita) dan ibu hamil. Minimnya variasi konsumsi makanan, ketergantungan pada pangan pokok karbohidrat, serta rendahnya edukasi gizi menjadikan kebutuhan zat gizi mikro dan makro tidak terpenuhi dengan baik. Situasi ini diperparah oleh faktor ekonomi rumah tangga, terbatasnya fasilitas layanan gizi di puskesmas atau posyandu, serta belum optimalnya program intervensi lintas sektor seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan edukasi gizi berbasis komunitas. Kombinasi antara sanitasi yang buruk dan gizi yang tidak memadai menciptakan lingkaran masalah kesehatan yang berulang, seperti tingginya angka stunting, anemia pada ibu hamil, dan meningkatnya beban pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa.

Untuk mengatasi tantangan ini secara terintegrasi, Kabupaten Sigi perlu melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan cakupan akses sanitasi aman melalui pembangunan jamban sehat, sistem air bersih berbasis komunitas, dan infrastruktur sanitasi terpadu;
- b. Program percepatan Open Defecation Free (ODF) dengan pendekatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat);
- c. Penguatan layanan gizi di tingkat puskesmas dan posyandu, serta pelibatan kader dan ibu-ibu PKK dalam edukasi gizi seimbang;
- d. Intervensi gizi spesifik untuk balita dan ibu hamil, termasuk pemberian suplemen zat besi, makanan tambahan bergizi, dan pendampingan keluarga 1.000 hari pertama kehidupan;
- e. Kolaborasi lintas sektor dalam pengarusutamaan gizi dan sanitasi di setiap program pembangunan desa.

Dengan memperbaiki akses terhadap sanitasi dan gizi secara simultan, Kabupaten Sigi tidak hanya dapat menurunkan angka stunting dan penyakit berbasis lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh sebagai fondasi pembangunan jangka panjang yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

13. Pertanian Ekstensif Tanpa Konservasi

Kabupaten Sigi memiliki sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, dengan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian rumah tangga di pedesaan. Namun, pola pengelolaan pertanian yang masih bersifat ekstensif dan belum mengintegrasikan prinsip konservasi tanah dan air kini menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah ini. Kegiatan perluasan lahan pertanian, terutama di lereng bukit dan kawasan hulu, umumnya dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Pembukaan lahan dilakukan dengan cara yang merusak vegetasi penyangga, tanpa menerapkan teknik konservasi seperti terasering, guludan, atau penanaman penutup tanah. Akibatnya, laju erosi tanah meningkat tajam, kesuburan tanah menurun, dan potensi sedimentasi di sungai dan irigasi menjadi semakin tinggi.

Praktik pertanian tanpa konservasi juga berdampak langsung pada penurunan kualitas air dan kuantitas sumber daya air. Limbah pertanian dan pupuk kimia yang digunakan secara berlebihan tanpa kontrol mencemari badan air, memperburuk kondisi Daerah Aliran

Sungai (DAS), serta mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Kondisi ini tidak hanya mengancam produktivitas jangka panjang, tetapi juga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Rendahnya kesadaran petani akan pentingnya konservasi tanah dan air diperparah oleh minimnya penyuluhan, kurangnya akses terhadap teknologi pertanian berkelanjutan, dan terbatasnya insentif bagi pelaku usaha tani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Selain itu, belum optimalnya kebijakan tata ruang dan zonasi pertanian menyebabkan tumpang tindih antara kawasan lindung dan budidaya, serta lemahnya pengawasan atas praktik perambahan kawasan rawan lingkungan.

Untuk mencegah kerusakan sumber daya alam yang lebih parah dan mendorong keberlanjutan sektor pertanian, Kabupaten Sigi perlu segera mengambil langkah-langkah strategis berikut:

- a. Promosi dan pelatihan intensif praktik konservasi tanah dan air di lahan pertanian, seperti agroforestri, terasering, dan pemupukan organik;
- b. Rehabilitasi kawasan kritis melalui reboisasi dan penerapan sistem pertanian terpadu berbasis konservasi;
- c. Insentif bagi petani yang menerapkan pertanian ramah lingkungan, termasuk akses kredit hijau dan subsidi alat konservasi;
- d. Integrasi prinsip konservasi dalam perencanaan tata ruang, zonasi lahan, dan program pengembangan kawasan pertanian;
- e. Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, akademisi, LSM lingkungan, dan kelompok tani dalam menjaga kelestarian lahan dan air.

Dengan mengarahkan transformasi pertanian menuju sistem yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Sigi dapat menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi aset ekologis yang menjadi fondasi utama pembangunan jangka panjang.

14. Koordinasi Pembangunan Belum Sinkron

Pembangunan yang efektif dan berdampak hanya dapat terwujud melalui perencanaan yang terintegrasi, kolaboratif, dan sinkron antar sektor maupun wilayah. Namun, di Kabupaten Sigi, koordinasi pembangunan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta antar kecamatan dan desa masih menghadapi tantangan serius. Perencanaan yang berjalan sektoral dan fragmentaris telah menyebabkan tumpang tindih program, inefisiensi anggaran, dan capaian pembangunan yang kurang optimal. Ketidadaan mekanisme koordinasi yang kuat dan terpadu menyebabkan banyak program pembangunan yang dirancang tanpa memperhatikan keterkaitan antar sektor maupun kesinambungan antar wilayah. Misalnya, pembangunan infrastruktur pertanian tidak terhubung dengan strategi pengembangan pasar atau pelatihan SDM, program pengentasan kemiskinan tidak sinergis dengan intervensi gizi dan pendidikan, atau perencanaan pembangunan desa yang tidak selaras dengan arah pembangunan kabupaten secara makro.

Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya sistem berbagi data dan informasi antar instansi, serta kurangnya platform koordinasi reguler yang melibatkan perencana dari berbagai sektor. Sering kali, perencanaan dan pelaksanaan program berlangsung secara paralel, tanpa sinkronisasi waktu, lokasi, dan sasaran penerima manfaat. Akibatnya, potensi tumpang tindih intervensi di satu wilayah atau justru kekosongan intervensi di wilayah lain kerap terjadi. Dampak langsung dari ketidaksinkronan ini adalah rendahnya efektivitas penggunaan anggaran, hilangnya peluang sinergi lintas sektor, dan tidak tercapainya target pembangunan strategis secara menyeluruh.

Lebih jauh, hal ini menciptakan persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap proses perencanaan.

Untuk mengatasi persoalan ini, Kabupaten Sigi perlu memperkuat sistem koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Penguatan peran Bappeda sebagai koordinator lintas sektor dan fasilitator sinkronisasi rencana kerja OPD;
- b. Penerapan sistem perencanaan terpadu berbasis data spasial dan tematik untuk menyatukan arah pembangunan sektoral dan kewilayahan;
- c. Pelaksanaan forum koordinasi teknis secara berkala yang melibatkan OPD, kecamatan, desa, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pengembangan *dashboard monitoring* pembangunan daerah berbasis digital untuk deteksi dini potensi tumpang tindih dan kekosongan program;
- e. Mendorong pendekatan perencanaan berbasis kawasan strategis dan klaster ekonomi lokal.

Dengan membangun tata kelola perencanaan yang lebih terkoordinasi dan responsif, Kabupaten Sigi akan mampu memaksimalkan dampak pembangunan, menghindari pemborosan sumber daya, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, adil, dan inklusif.

15. Kelompok Rentan Tidak Dilibatkan Secara Bermakna

Pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, mendapatkan akses dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan mendapatkan manfaat. Namun, di Kabupaten Sigi, kelompok rentan seperti perempuan, lansia, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan. Partisipasi kelompok rentan selama ini cenderung bersifat simbolik atau administratif, bukan substantif. Mereka jarang terwakili secara efektif dalam forum musyawarah pembangunan, kelembagaan desa, maupun dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat kabupaten. Padahal, kelompok-kelompok ini memiliki kebutuhan khusus, perspektif yang kaya, serta pengetahuan lokal yang sangat penting untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan kontekstual.

Ketiadaan akses setara ini diperparah oleh berbagai hambatan struktural, seperti rendahnya literasi pembangunan, keterbatasan mobilitas fisik, ketimpangan gender, serta belum adanya pendekatan khusus dalam kebijakan daerah yang memastikan partisipasi bermakna kelompok rentan. Masyarakat adat, misalnya, kerap tidak dilibatkan dalam diskusi tata ruang atau pengelolaan sumber daya alam, meskipun mereka merupakan penjaga kawasan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Demikian pula penyandang disabilitas yang sering tidak terlayani oleh desain infrastruktur publik dan sistem layanan sosial yang inklusif. Akibat dari tidak dilibatkannya kelompok rentan secara bermakna ini adalah ketimpangan sosial yang semakin melebar, kebijakan yang tidak berpihak, serta lemahnya rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Hal ini juga menciptakan potensi konflik sosial dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah.

Untuk menjawab tantangan ini, Kabupaten Sigi perlu mengarusutamakan inklusi sosial dalam seluruh tahap pembangunan daerah melalui langkah-langkah strategis berikut:

- a. Penyusunan kebijakan afirmatif daerah yang menjamin pelibatan kelompok rentan dalam forum-forum perencanaan dan pengambilan keputusan;
- b. Penguatan kapasitas kelompok rentan untuk dapat menyampaikan aspirasi secara aktif dan mandiri;
- c. Pengembangan data terpilah dan sistem pendataan kelompok rentan untuk memastikan program tepat sasaran;
- d. Penerapan prinsip *Universal Design* dalam infrastruktur publik untuk memastikan akses fisik dan layanan dasar yang ramah bagi disabilitas dan lansia;
- e. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok rentan dalam menyusun dan mengawal kebijakan.

Dengan menjadikan kelompok rentan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek, Kabupaten Sigi dapat mewujudkan tata kelola yang lebih adil, merangkul semua suara, dan memperkuat ketahanan sosial sebagai fondasi pembangunan daerah yang manusiawi dan berkelanjutan.

16. Akses Lahan Tidak Legal dan Minim Pendampingan

Kepastian akses terhadap lahan merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan kawasan hutan. Di Kabupaten Sigi, program perhutanan sosial dan berbagai upaya redistribusi lahan sejatinya memberikan harapan bagi masyarakat, terutama petani kecil, kelompok masyarakat adat, dan komunitas lokal. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, utamanya terkait legalitas hak kelola dan minimnya pendampingan teknis serta akses pasar.

Banyak kelompok masyarakat telah membuka dan mengelola lahan secara turun-temurun di dalam dan sekitar kawasan hutan, namun belum memiliki legalitas formal atas lahan yang digarap. Tanpa sertifikat atau surat keputusan hak kelola yang sah, posisi masyarakat menjadi rentan terhadap konflik lahan, penggusuran, dan kehilangan sumber penghidupan. Situasi ini juga menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses pembiayaan formal, bantuan program pemerintah, maupun pengakuan hukum atas praktik pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal.

Di sisi lain, pelaksanaan program perhutanan sosial yang telah dimulai masih belum disertai dengan pendampingan teknis yang memadai. Banyak kelompok tani hutan dan pemegang izin perhutanan sosial kesulitan dalam menyusun rencana kerja, mengembangkan usaha hutan berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta menjangkau pasar. Lemahnya akses terhadap teknologi, pelatihan, dan koneksi ke rantai nilai menyebabkan potensi ekonomi dari lahan yang dikelola tidak berkembang secara optimal.

Minimnya sinergi antara instansi teknis, lembaga pendamping, dan sektor swasta dalam mendorong keberhasilan perhutanan sosial juga menghambat perwujudan tujuan program: yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Ketidakterpaduan ini diperburuk oleh belum adanya kebijakan daerah yang memperkuat tata kelola perhutanan sosial berbasis kawasan dan potensi lokal. Untuk menjawab permasalahan ini, Kabupaten Sigi perlu mengambil langkah strategis sebagai berikut:

- a. Mempercepat proses legalisasi akses lahan melalui fasilitasi percepatan sertifikasi hak kelola masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal;
- b. Menyediakan pendampingan teknis berkelanjutan bagi kelompok perhutanan sosial, termasuk pelatihan budidaya, pengolahan hasil hutan, dan manajemen usaha;

- c. Membangun kemitraan dengan sektor swasta, koperasi, dan lembaga keuangan mikro untuk memperluas akses pasar dan pembiayaan inklusif;
- d. Mengembangkan basis data perhutanan sosial dan sistem monitoring terpadu untuk memastikan keberlanjutan dan evaluasi program;
- e. Mendorong kebijakan afirmatif daerah yang mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial berbasis masyarakat dan ekosistem lokal.

Dengan memperkuat aspek legalitas dan pendampingan teknis, Kabupaten Sigi dapat mendorong transformasi tata kelola lahan yang adil, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat secara nyata, sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan hutan secara jangka panjang.

17. Emisi dari Transportasi, Lahan dan Sektor Pertanian

Kabupaten Sigi tengah menghadapi tekanan lingkungan yang meningkat akibat tingginya emisi gas rumah kaca (GRK), yang bersumber utama dari tiga sektor: pembukaan lahan dengan cara pembakaran, penggunaan transportasi berbahan bakar fosil, serta kegiatan pertanian yang belum ramah iklim. Ketiga sumber emisi ini belum tertangani secara sistematis, sehingga berdampak pada penurunan kualitas udara, risiko kesehatan masyarakat, serta kontribusi terhadap krisis iklim global.

Di sektor lahan, praktik pembukaan lahan dengan membakar vegetasi masih banyak ditemukan, terutama di kawasan pertanian dan lahan hutan yang tidak memiliki sistem tata kelola yang kuat. Pembakaran dilakukan karena dianggap sebagai cara cepat dan murah untuk membuka lahan, terutama di kalangan petani kecil. Namun, dampaknya sangat merugikan seperti pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer, hilangnya biodiversitas, gangguan kesehatan, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sulit dikendalikan.

Sementara itu, sektor transportasi di Kabupaten Sigi masih didominasi oleh kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, baik untuk mobilitas individu maupun angkutan barang. Jumlah kendaraan pribadi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akses antarwilayah. Minimnya sistem transportasi umum yang efisien serta belum tersedianya alternatif transportasi rendah emisi turut memperburuk situasi ini.

Di sektor pertanian, emisi GRK terutama berasal dari kegiatan pertanian lahan basah (padi sawah) yang menghasilkan gas metana (CH_4) melalui proses fermentasi anaerobik, penggunaan pupuk kimia sintetis yang melepaskan dinitrogen oksida (N_2O), serta manajemen limbah peternakan yang belum optimal. Pengelolaan limbah organik pertanian dan kotoran ternak yang tidak ramah lingkungan berkontribusi terhadap pelepasan emisi dalam jumlah signifikan. Selain itu, praktik penggunaan lahan secara ekstensif dan konversi hutan untuk lahan pertanian turut memperbesar jejak karbon sektor ini. Rendahnya adopsi praktik pertanian berkelanjutan, terbatasnya edukasi dan insentif, serta belum optimalnya integrasi kebijakan pertanian dan lingkungan menjadi tantangan besar dalam menurunkan emisi dari sektor ini.

Hingga saat ini, belum ada sistem inventarisasi emisi GRK daerah yang komprehensif maupun kebijakan mitigasi yang terstruktur untuk menekan emisi dari ketiga sektor tersebut. Kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pentingnya pengendalian emisi juga

masih rendah, dan dukungan regulasi maupun insentif ramah lingkungan masih minim. Tanpa intervensi yang terencana dan konsisten, emisi dari pembukaan lahan, transportasi, dan pertanian akan terus meningkat, mempercepat degradasi lingkungan, serta mengancam keberlanjutan pembangunan daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, Kabupaten Sigi perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan, serta menyediakan alternatif pembukaan lahan ramah lingkungan
- b. Mendorong adopsi praktik pertanian tanpa bakar melalui pelatihan dan insentif bagi petani
- c. Mempromosikan praktik pertanian rendah emisi, seperti pertanian organik, manajemen air sawah yang efisien, dan pengelolaan limbah peternakan berbasis *bioenergy*
- d. Menyusun inventarisasi emisi GRK daerah sebagai dasar kebijakan mitigasi dan adaptasi lintas sektor
- e. Mengembangkan sistem transportasi umum yang efisien dan rendah emisi, serta mendorong konversi kendaraan dinas dan layanan publik ke energi listrik atau *bioenergy*
- f. Melakukan kampanye publik dan edukasi lingkungan mengenai dampak emisi GRK dan pentingnya transisi menuju ekonomi hijau dan pertanian berkelanjutan.

Dengan mengendalikan emisi dari sektor lahan, transportasi, dan pertanian secara terintegrasi, Kabupaten Sigi dapat memperkuat ketahanan iklim, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta komitmen iklim nasional (NDC).

18. Keterbatasan Fiskal dan Investasi Hijau

Kabupaten Sigi menghadapi tantangan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, terutama yang bersumber dari keterbatasan kapasitas fiskal daerah, minimnya investasi hijau, serta belum optimalnya implementasi Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).

Struktur APBD Kabupaten Sigi saat ini masih didominasi oleh belanja rutin dan belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sementara itu, alokasi anggaran untuk sektor lingkungan hidup, adaptasi perubahan iklim, pengendalian emisi, serta pengembangan energi terbarukan masih tergolong sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan fiskal daerah belum diarahkan secara sistematis untuk mendukung agenda pembangunan hijau dan transisi energi bersih. Ekosistem pendukung investasi hijau di daerah masih belum terbentuk secara memadai. Tidak tersedianya kerangka regulasi, insentif fiskal, maupun kemudahan perizinan yang berpihak pada kegiatan ramah lingkungan menyebabkan rendahnya partisipasi sektor swasta, BUMDesa, dan mitra pembangunan dalam mendukung inisiatif hijau. Peluang pendanaan inovatif seperti *green bonds*, *climate finance*, *carbon trading*, dan *blended finance* belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kapasitas kelembagaan dan teknis dalam mendesain serta mengelola proyek hijau yang layak didanai.

Dalam upaya untuk mendorong penguatan tata kelola lingkungan di tingkat desa, Kabupaten Sigi telah menginisiasi kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), yakni mekanisme insentif fiskal kepada pemerintah desa berdasarkan capaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan. TAKE diarahkan untuk meningkatkan komitmen desa dalam konservasi sumber daya alam, pengelolaan sampah, perlindungan kawasan lindung, serta upaya rehabilitasi

ekosistem lokal. Namun pelaksanaan TAKE di Kabupaten Sigi belum sepenuhnya optimal, antara lain disebabkan oleh:

- Skala anggaran yang masih terbatas, belum mencerminkan prioritas ekologis desa;
- Indikator ekologi yang digunakan belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan desa secara menyeluruh;
- Monitoring dan evaluasi kinerja ekologis belum berjalan secara sistemik dan berbasis data;
- Pemanfaatan insentif TAKE masih bersifat administratif, belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan lingkungan.

Keterbatasan implementasi TAKE ini menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kerangka insentif ekologis, namun peran TAKE dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan masih belum maksimal. Hal ini diperparah dengan belum adanya integrasi antara kebijakan TAKE dengan perencanaan penganggaran daerah secara holistik (*green budgeting*), serta belum terdapat mekanisme pengarusutamaan indikator hijau dalam evaluasi kinerja perangkat daerah.

Permasalahan fiskal dan lemahnya insentif terhadap investasi hijau menghambat akselerasi Kabupaten Sigi menuju pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kebijakan yang bersifat transformatif dan progresif, antara lain:

- a. Peningkatan porsi anggaran untuk program lingkungan hidup, energi bersih, dan ketahanan iklim secara bertahap dan terukur;
- b. Perluasan skema insentif fiskal hijau untuk pelaku usaha dan masyarakat desa yang melakukan praktik ramah lingkungan;
- c. Pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti *green bonds*, dana lingkungan daerah, dan kemitraan publik-swasta berbasis proyek hijau;
- d. Integrasi indikator hijau dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah (*Green Planning and Budgeting*);
- e. Penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk PD teknis dan pemerintah desa, dalam merancang, mengakses, dan mengelola proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.

Dengan memperkuat instrumen fiskal seperti TAKE dan menciptakan iklim investasi yang mendukung ekonomi hijau, Kabupaten Sigi dapat menjawab tantangan krisis lingkungan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

19. Pendekatan Pertumbuhan Belum Berkelanjutan

Kabupaten Sigi tengah berada pada fase penting dalam perjalanan pembangunannya, dengan berbagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi pertanian, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi kegiatan ekonomi lokal. Namun, arah pembangunan yang dominan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek masih mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan, khususnya dalam aspek daya dukung lingkungan dan ketahanan sumber daya alam.

Pembangunan yang hanya berfokus pada percepatan output ekonomi, tanpa mempertimbangkan batas ekologis, telah menimbulkan berbagai tekanan terhadap sistem alamiah. Ekspansi lahan pertanian, eksploitasi sumber daya alam, pembukaan permukiman baru, serta pembangunan infrastruktur secara masif sering kali dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai. Akibatnya, kualitas tutupan lahan menurun, sumber daya air terancam, serta frekuensi bencana ekologis seperti banjir dan longsor meningkat secara signifikan. Pendekatan ini

tidak hanya menciptakan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, tetapi juga melemahkan ketahanan jangka panjang daerah terhadap risiko perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Ketika pembangunan berjalan dengan mengorbankan fungsi ekologis, maka biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan dalam jangka menengah dan panjang dapat jauh lebih besar dari manfaat pertumbuhan yang dicapai saat ini.

Selain itu, arah pembangunan yang belum berkelanjutan cenderung gagal menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Ketimpangan wilayah, kerentanan mata pencaharian berbasis sumber daya alam, serta ketergantungan pada sektor informal menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, resilien, dan berbasis keadilan antar generasi. Untuk mengatasi persoalan ini dan mendorong transisi menuju pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Sigi perlu segera mengubah paradigma pembangunan melalui langkah-langkah strategis berikut:

- a. Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam seluruh tahapan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD);
- b. Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara konsisten untuk memastikan kesesuaian antara rencana pembangunan dan daya dukung lingkungan;
- c. Penguatan indikator pembangunan yang tidak hanya berfokus pada PDRB, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan, kesejahteraan sosial, dan indeks ketahanan daerah;
- d. Pengembangan ekonomi restoratif berbasis agroekologi, ekowisata, dan energi terbarukan yang menjaga keseimbangan antara produksi dan pelestarian;
- e. Pelibatan multipihak, termasuk masyarakat adat, generasi muda, akademisi, dan sektor swasta, dalam merancang model pembangunan berwawasan lingkungan dan sosial.

Dengan menggeser pendekatan pembangunan dari orientasi pertumbuhan jangka pendek menuju model yang berkelanjutan dan berkeadilan, Kabupaten Sigi dapat memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tidak merusak fondasi alam dan sosial yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, kini dan di masa depan.

20. Minimnya Kebijakan Berbasis Bukti

Pengambilan keputusan yang efektif dan berdampak menuntut adanya landasan data yang akurat, sistematis, dan relevan. Namun, di Kabupaten Sigi, proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan masih menghadapi tantangan serius dalam hal pemanfaatan data dan sistem monitoring-evaluasi (monev). Banyak kebijakan yang disusun belum sepenuhnya berbasis pada bukti atau analisis mendalam, sehingga rawan tidak tepat sasaran, tumpang tindih, atau tidak menjawab permasalahan riil di lapangan.

Salah satu penyebab utama adalah belum optimalnya ketersediaan dan kualitas data sektoral yang terintegrasi. Data yang ada sering kali tersebar di berbagai PD, tidak terbaru secara berkala, dan belum tersedia dalam format yang mudah diakses dan digunakan untuk analisis. Keterbatasan kapasitas SDM dalam pemanfaatan data, serta minimnya sistem pendukung digitalisasi informasi publik, semakin memperbesar kesenjangan antara kebutuhan data dan proses perencanaan yang seharusnya berbasis bukti. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi terhadap program-program pembangunan belum berjalan optimal. Evaluasi sering dilakukan hanya sebagai formalitas administratif, bukan sebagai alat refleksi untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Akibatnya, banyak program yang terus direplikasi tanpa kajian efektivitas, efisiensi, atau dampak sosial-lingkungan yang terukur.

Minimnya kebijakan berbasis bukti menyebabkan pemborosan sumber daya, program tidak tepat sasaran, serta lemahnya akuntabilitas publik terhadap pembangunan. Lebih jauh, hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, serta memperlambat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang berbasis bukti, Kabupaten Sigi perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Membangun sistem manajemen data daerah yang terintegrasi, mutakhir, dan mudah diakses lintas sektor;
- b. Meningkatkan kapasitas PD dan perencana daerah dalam analisis data, penggunaan *evidence-based tools*, dan penerapan kebijakan adaptif;
- c. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dan dampak, yang tidak hanya berfokus pada output administratif;
- d. Mendorong kemitraan dengan lembaga riset, universitas, dan LSM untuk memperkuat ekosistem data dan inovasi kebijakan;
- e. Menjadikan praktik kebijakan berbasis bukti sebagai bagian dari budaya kerja dan standar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan memperkuat landasan data dan sistem evaluasi, Kabupaten Sigi akan mampu menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Ini merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

21. *Good Governance* Belum Optimal

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan landasan penting bagi tercapainya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas seharusnya menjadi pedoman dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Namun di Kabupaten Sigi, penerapan *good governance* masih belum optimal dan belum merata di seluruh sektor dan wilayah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi publik yang bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Forum-forum konsultasi seperti Musrenbang belum sepenuhnya berjalan secara inklusif, dan seringkali didominasi oleh kelompok tertentu tanpa representasi yang adil dari masyarakat rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan masyarakat adat. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, meskipun berbagai instrumen seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan portal keterbukaan informasi telah mulai diterapkan, aksesibilitas informasi publik dan keterlibatan warga dalam mengawasi jalannya program pembangunan masih terbatas. Beberapa wilayah terpencil belum tersentuh oleh program literasi tata kelola dan pengawasan sosial, sehingga potensi penyimpangan dan inefisiensi masih terjadi. Selain itu, kualitas layanan publik dan kinerja birokrasi belum merata di seluruh sektor. Masih terdapat kesenjangan pelayanan antara wilayah pusat dan pelosok, serta rendahnya budaya kinerja berbasis hasil di sejumlah perangkat daerah. Koordinasi antar-PD pun seringkali berjalan sektoral, menghambat efisiensi dan sinergi kebijakan lintas sektor.

Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sigi, dibutuhkan komitmen kuat dan langkah-langkah terukur, antara lain:

- a. Penguatan kapasitas aparat sipil negara dalam menerapkan prinsip *good governance* secara konsisten, mulai dari desa hingga kabupaten;
- b. Pengembangan mekanisme partisipasi publik yang inklusif dan berbasis komunitas lokal dalam seluruh siklus kebijakan;
- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem keterbukaan data, pelibatan masyarakat sipil, dan digitalisasi layanan publik;
- d. Evaluasi berkala terhadap standar layanan publik dan kinerja PD dengan melibatkan masukan dari pengguna layanan;
- e. Penerapan reward and punishment system berbasis kinerja dalam birokrasi, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal yang independen.

Dengan memperkuat *good governance* secara menyeluruh, Kabupaten Sigi tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

22. Ketimpangan Antarwilayah

Kabupaten Sigi memiliki wilayah geografis yang sangat beragam, mulai dari daerah dataran di pusat pemerintahan seperti Sigi Biromaru dan Dolo, hingga kawasan perbukitan dan pegunungan di wilayah terpencil seperti Kulawi, Lindu, dan Pipikoro. Keanekaragaman wilayah ini seharusnya menjadi kekuatan pembangunan daerah. Namun, realitasnya justru mencerminkan ketimpangan yang cukup besar dalam hal aksesibilitas, infrastruktur dasar, dan layanan publik. Wilayah pusat seperti Sigi Biromaru dan Dolo menikmati akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, jaringan komunikasi, dan pelayanan administrasi publik. Sementara itu, wilayah-wilayah terpencil seperti Kulawi, Lindu, dan Pipikoro masih menghadapi berbagai keterbatasan. Banyak desa di kawasan ini sulit dijangkau, terutama saat musim hujan, karena jalan yang rusak atau belum tersambung. Layanan dasar seperti air bersih, listrik, pendidikan berkualitas, serta layanan kesehatan masih belum merata.

Kesenjangan ini tidak hanya memperlambat laju pembangunan di wilayah tertinggal, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin dalam. Masyarakat di wilayah terpencil memiliki peluang ekonomi yang terbatas, ketergantungan tinggi terhadap sektor primer yang rentan, serta hambatan besar dalam mengakses program pemerintah, pelatihan, maupun pasar. Ketimpangan antarwilayah ini diperparah oleh pola perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemerataan. Sebagian besar alokasi anggaran dan intervensi program masih terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau dan lebih berkembang, sementara daerah-daerah yang paling membutuhkan justru kurang tersentuh secara optimal. Kurangnya data spasial yang detail dan perencanaan berbasis wilayah memperkuat tantangan ini.

Untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah secara sistemik dan berkelanjutan, Kabupaten Sigi perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan pembangunan berbasis kawasan yang memprioritaskan wilayah terpencil dan tertinggal;
- b. Meningkatkan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan komunikasi di daerah sulit akses;
- c. Mengembangkan layanan publik bergerak dan digital untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki fasilitas tetap;
- d. Memberikan afirmasi anggaran yang adil dan berbasis kebutuhan riil dalam perencanaan APBD;

- e. Mendorong pembangunan ekonomi lokal berbasis potensi khas wilayah terpencil, seperti ekowisata, pertanian organik, dan produk unggulan desa.

Dengan komitmen pada pemerataan pembangunan, Kabupaten Sigi dapat memperkuat integrasi antarwilayah, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang lokasi geografisnya, mendapatkan hak dan peluang yang setara dalam proses pembangunan.

Tabel 2.33
Rumusan Permasalahan

No	Permasalahan	Rumusan Permasalahan
1	Produktivitas rendah, teknologi rendah	SDM dan kelembagaan pertanian belum mampu beradaptasi dengan pertanian modern berbasis Iptek; akses teknologi pertanian rendah.
2	Infrastruktur pertanian dan jalan tidak terintegrasi	Keterbatasan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan dan jalan penghubung antar area produksi menyebabkan tingginya biaya distribusi dan rendahnya konektivitas.
3	Deforestasi dan degradasi lingkungan	Alih fungsi lahan, pembukaan lahan tanpa konservasi, dan lemahnya pengawasan menyebabkan degradasi hutan primer dan sekunder serta potensi peningkatan emisi GRK.
4	Rendahnya pemanfaatan EBT	Potensi energi baru terbarukan (EBT) belum dikembangkan secara optimal untuk mendukung transisi energi bersih di kawasan terpencil dan pertanian.
5	Konektivitas dan logistik belum optimal	Fasilitas transportasi pertanian, irigasi, dan pengolahan hasil belum terintegrasi sehingga membatasi pengembangan rantai nilai dan agroindustri.
6	Akses terbatas, promosi rendah	Infrastruktur agrowisata dan ekowisata belum memadai, ditambah minim promosi dan SDM pendamping wisata.
7	Pengangguran dan minim pelatihan kerja	Minimnya pelatihan vokasional dan pendampingan usaha menyebabkan keterbatasan peluang kerja khususnya bagi generasi muda.
8	Belum terlibat dalam proses pembangunan	Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, pemuda, dan komunitas adat masih bersifat simbolik dan belum bermakna dalam perencanaan pembangunan.
9	Distribusi layanan tidak merata, kualitas buruk	Layanan dasar (kesehatan, pendidikan, air bersih) belum merata secara geografis; kualitas fasilitas dan SDM belum memadai di wilayah terpencil.
10	Minim mitigasi dan adaptasi bencana	Kawasan rawan bencana seperti longsor dan kekeringan belum memiliki sistem mitigasi terpadu; kesadaran perubahan iklim masih rendah.
11	Sanitasi dan gizi buruk	Akses sanitasi aman dan gizi seimbang masih rendah, terutama di desa-desa yang jauh dari layanan kesehatan.
12	Pertanian ekstensif tanpa konservasi	Praktik pertanian konvensional yang intensif menyebabkan degradasi tanah dan emisi N2O; sistem pertanian organik belum meluas.

No	Permasalahan	Rumusan Permasalahan
13	Koordinasi pembangunan belum sinkron	Kelembagaan lintas sektor belum berjalan sinergis; integrasi perencanaan spasial dan sektoral masih lemah.
14	Kelompok rentan tidak dilibatkan secara bermakna	Perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas belum terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa dan lingkungan.
15	Akses belum legal, belum ada pendampingan	Kawasan perhutanan sosial dan hutan adat belum memiliki kepastian hukum dan pendampingan teknologi serta pasar yang memadai.
16	Emisi dari transportasi, pembukaan lahan	Emisi GRK dari pembakaran lahan dan penggunaan energi fosil masih tinggi, tanpa kompensasi melalui konservasi dan energi bersih.
17	Keterbatasan fiskal dan investasi hijau rendah	Dukungan fiskal untuk kegiatan ramah lingkungan masih terbatas; insentif bagi pelaku ekonomi hijau belum tersedia.
18	Pertumbuhan belum menyentuh keberlanjutan	Pendekatan pertumbuhan belum mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ketahanan sosial-ekonomi jangka panjang.
19	Minim <i>evidence-based policy</i>	Kurangnya data mutakhir, sistem monitoring evaluasi, dan riset lokal menyebabkan kebijakan tidak berbasis bukti.
20	<i>Good governance</i> belum optimal	Tata kelola pemerintahan partisipatif dan transparan belum kuat; kolaborasi multipihak belum maksimal.
21	Ketimpangan antarwilayah	Perbedaan signifikan dalam akses layanan dasar, ekonomi, dan infrastruktur antara wilayah pusat (Biromaru-Dolo) dan wilayah terpencil (Kulawi-Pipikoro-Lindu).

Sumber : Hasil Analisa, 2025

- 2.3.2 Isu strategis daerah
- Teknik penyimpulan isu strategis disusun berdasarkan pendekatan komprehensif dengan memperhatikan potensi daerah, permasalahan pembangunan, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), isu-isu global, nasional, dan regional, dokumen Teknokratik, serta kebutuhan spesifik daerah. Isu-isu strategis ini akan menjadi dasar dalam penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Tabel berikut menyajikan sintesis dari teknik penyimpulan isu strategis Kabupaten Sigi:

1. Peranan Baru Sektor Pertanian

Kabupaten Sigi memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan lahan subur dan komoditas unggulan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas pertanian akibat minimnya penerapan teknologi modern. Hal ini memperkuat urgensi transformasi sektor pertanian ke arah yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan lingkungan dan pasar global. Maka dari itu, peranan baru sektor pertanian menjadi isu strategis utama untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing wilayah melalui modernisasi teknologi, peningkatan SDM petani, dan integrasi dengan pasar.

Selain itu, terdapat persoalan besar terkait keterhubungan antara ruang produksi dan jaringan infrastruktur. Infrastruktur pertanian dan jalan yang belum terintegrasi menyebabkan alih fungsi lahan dan

tekanan terhadap ruang produksi pangan. Dalam konteks ini, penguatan konektivitas wilayah dan perlindungan terhadap ruang-ruang strategis untuk pertanian menjadi krusial. Oleh karena itu, isu peranan baru sektor pertanian juga mencakup strategi untuk meningkatkan efisiensi logistik, pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN), serta kebijakan tata ruang yang konsisten terhadap perlindungan lahan pertanian.

2. Perubahan Iklim

a. Perubahan Iklim dan Konservasi Ekosistem

Kabupaten Sigi merupakan wilayah dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan kawasan hutan yang menopang kehidupan masyarakat, serta berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem DAS Palu dan Lariang. Namun, aktivitas deforestasi dan degradasi lingkungan menyebabkan penurunan kualitas ekosistem yang signifikan. Perubahan iklim global memperburuk tekanan ini, mendorong kebutuhan mendesak untuk melaksanakan konservasi sumber daya alam dan penguatan daya dukung lingkungan. Strategi ini penting untuk menjaga kelestarian fungsi ekologis dan memperkuat kapasitas adaptasi wilayah terhadap bencana hidrometeorologis.

b. Transisi Energi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan

Meski memiliki potensi energi terbarukan dari air dan matahari, pemanfaatan energi tersebut di Kabupaten Sigi masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap energi fosil yang berdampak pada emisi tinggi dan keterbatasan akses energi di daerah terpencil. Oleh karena itu, penguatan pemanfaatan energi terbarukan untuk desa dan wilayah terpencil menjadi strategi utama dalam mendukung transisi energi bersih yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat inklusi energi di seluruh lapisan masyarakat.

c. Ketangguhan terhadap Bencana dan Tata Ruang Responsif

Kabupaten Sigi merupakan daerah rawan bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Sayangnya, kapasitas mitigasi dan adaptasi masih minim. Perubahan iklim turut memperburuk intensitas dan frekuensi bencana. Oleh karena itu, perlu penguatan terhadap sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk penataan ruang yang responsif terhadap risiko bencana. Ini akan mendorong peningkatan ketangguhan wilayah dan masyarakat, serta menurunkan potensi kerugian akibat bencana di masa depan.

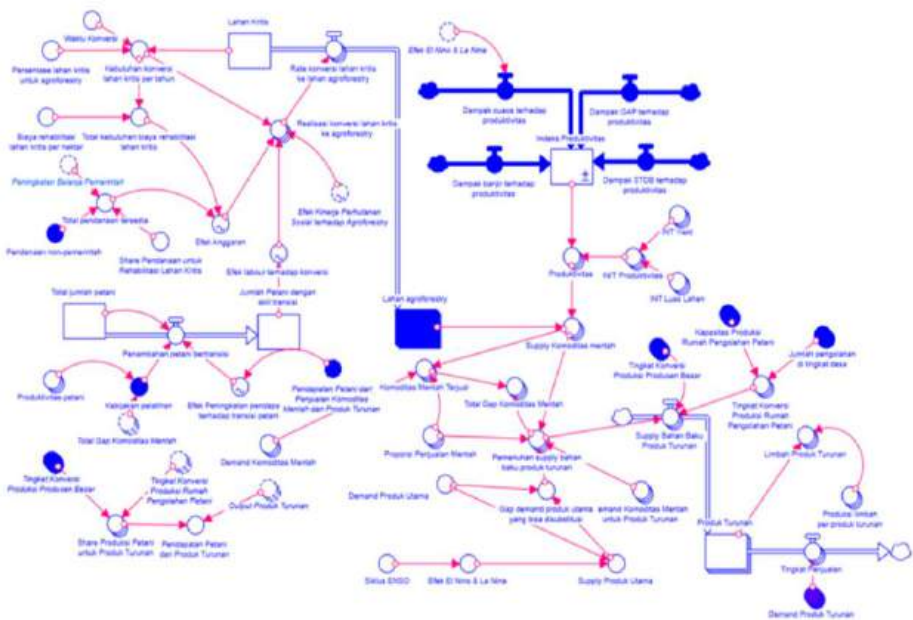
d. Rehabilitasi Lahan Kritis dan Agroforestri

Sigi juga menghadapi tantangan pertanian ekstensif tanpa memperhatikan konservasi lingkungan. Akibatnya, banyak lahan mengalami degradasi dan produktivitas tanah menurun. Untuk menjawab tantangan ini, perlu dilakukan rehabilitasi lahan kritis dan pengembangan sistem agroforestri yang berkelanjutan, khususnya di wilayah DAS Lariang dan Palu. Pendekatan ini akan menjaga keseimbangan ekologis sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Lahan kritis merupakan salah satu permasalahan utama yang memerlukan upaya rehabilitasi secara menyeluruh. Salah satu faktor yang mendasari terbentuknya lahan kritis adalah rendahnya potensi pendapatan petani, yang mendorong terjadinya deforestasi sebagai upaya memperoleh sumber penghidupan tambahan. Aktivitas deforestasi ini selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, membentuk siklus yang memperparah degradasi lingkungan. Interaksi antara permintaan dan pasokan komoditas mentah maupun produk olahan/turunannya juga menunjukkan kompleksitas sistem produksi yang berlaku saat ini.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, praktik agroforestri perlu ditempatkan sebagai intervensi utama dalam upaya rehabilitasi lahan kritis. Pelaksanaan agroforestri dapat didorong melalui pemanfaatan lahan yang tersedia dalam skema perhutanan sosial serta meningkatnya minat petani yang memiliki keterampilan di bidang ini. Kondisi tersebut mendorong bertambahnya jumlah petani yang beralih ke sistem agroforestri, yang pada gilirannya memperkuat pasokan tenaga kerja terampil dan mengurangi kesenjangan keterampilan di sektor ini. Peningkatan praktik agroforestri diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan komoditas mentah, yang akan mendukung peningkatan pendapatan petani. Kenaikan pendapatan ini menjadi elemen kunci dalam memutus siklus degradasi lingkungan, karena berpotensi menurunkan laju deforestasi dan emisi. Di samping itu, peningkatan pasokan komoditas mentah turut memperkuat produktivitas produk olahan/turunan, sehingga mampu memenuhi permintaan pasar secara menyeluruh.

Gambar 2.61
Loop Rehabilitasi Lahan Kritis dan Agroforestri



Sumber: Dokumen Kajian Ekonomi Lestari Berbasis Alam, 2025

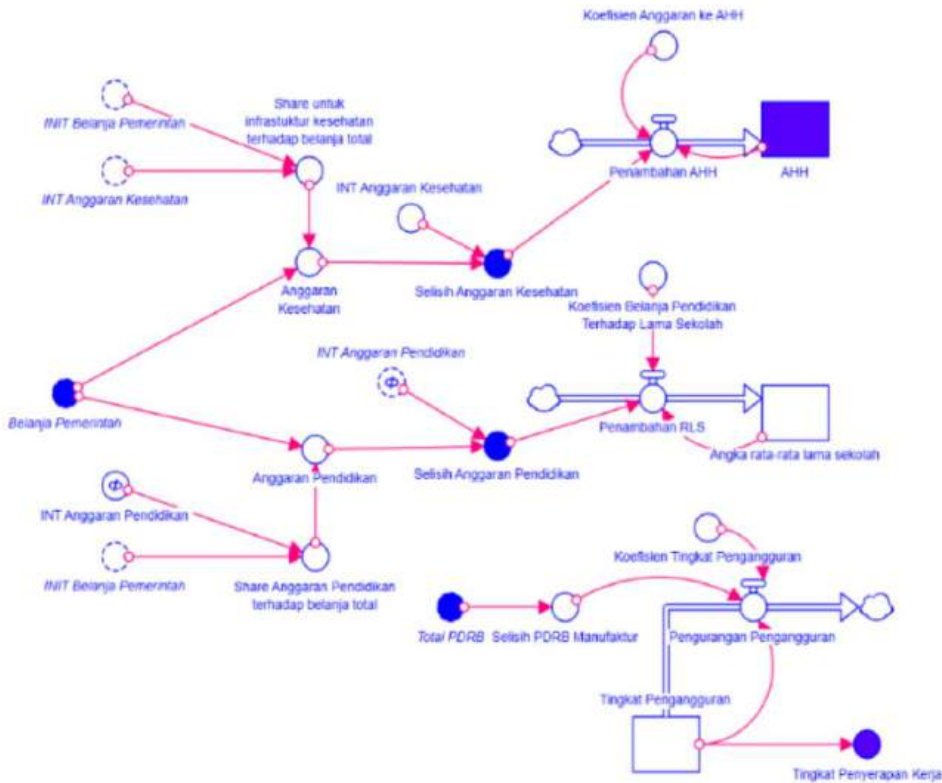
- e. Penguatan Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
Akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan adat dan perhutanan sosial di Sigi masih belum optimal akibat belum legalnya akses dan kurangnya pendampingan. Dalam konteks keadilan ekologis dan pemberdayaan masyarakat lokal, penguatan kelembagaan perhutanan sosial dan hutan adat menjadi langkah strategis. Upaya ini mendukung reforma agraria dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
- f. Penurunan Emisi dan Pembangunan Rendah Karbon
Sektor energi dan lahan di Sigi menyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan akibat pembukaan lahan dan emisi transportasi. Untuk menjawab tantangan target pembangunan rendah karbon nasional dan global, perlu disusun dan diterapkan pengendalian GRK dan pembangunan rendah karbon berbasis wilayah. Ini termasuk penyusunan roadmap pengurangan emisi sektor energi dan kehutanan secara terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

Fenomena lingkungan di Kabupaten Sigi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi, perubahan iklim, dan kondisi ekosistem. Deforestasi menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada peningkatan emisi AFOLU (*Agriculture, Forestry, and Other Land Use*). Deforestasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk desakan untuk mendapatkan pendapatan petani, yang mungkin terjadi ketika produktivitas komoditas rendah atau ada kesenjangan antara pasokan dan permintaan komoditas mentah.

Lingkaran umpan balik yang perlu diantisipasi adalah bagaimana intensitas banjir dapat memengaruhi produktivitas komoditas melalui "dampak cuaca terhadap produktivitas", yang pada gilirannya dapat menekan pendapatan petani. Kondisi ini dapat mendorong aktivitas yang mempercepat deforestasi. Di sisi lain, deforestasi dan emisi AFOLU juga berkontribusi pada emisi global, yang pada gilirannya dapat memicu dampak cuaca ekstrem dan intensitas banjir, menciptakan siklus yang memperparah kondisi lingkungan.

Namun, terdapat juga potensi intervensi positif. Peningkatan produktivitas komoditas dapat meningkatkan pendapatan petani, yang diharapkan dapat menekan tingkat deforestasi dan mengurangi emisi AFOLU. Selain itu, "efek kinerja perhutanan sosial" memiliki potensi untuk secara langsung mengurangi deforestasi. Konversi lahan kritis ke agroforestri juga diharapkan dapat menurunkan emisi AFOLU. Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk mengelola produktivitas dan pendapatan petani secara berkelanjutan guna menekan deforestasi, mengurangi emisi, dan pada akhirnya meningkatkan Indeks Kehati Kabupaten, yang mencerminkan kesehatan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Gambar 2.62
Loop Lingkungan



Sumber: Dokumen Kajian Ekonomi Lestari Berbasis Alam, 2025

3. Pemindahan Ibukota Negara (IKN)

Penguatan Konektivitas dan Kesiapan sebagai Hinterland IKN

Kabupaten Sigi memiliki posisi strategis yang potensial dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari kawasan penyangga (hinterland). Jalur logistik dan konektivitas wilayah Sigi dapat menjadi simpul penting dalam distribusi barang, jasa, serta mobilitas manusia menuju dan dari IKN. Namun demikian, saat ini konektivitas dan infrastruktur logistik masih belum optimal. Permasalahan aksesibilitas yang belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, menjadi hambatan dalam memaksimalkan peran strategis ini.

Selain itu, pembangunan ruang yang tidak terkelola dengan baik menimbulkan tekanan terhadap tata ruang, alih fungsi lahan, dan kerentanan lingkungan. Dalam konteks urbanisasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN, Kabupaten Sigi dihadapkan pada tuntutan kesiapan infrastruktur, penataan ruang yang adaptif, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, isu strategis yang harus dihadapi adalah penguatan konektivitas dan kesiapan sebagai hinterland IKN, dengan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, logistik, serta sistem transportasi antarwilayah. Strategi ini juga harus diintegrasikan dengan perlindungan ruang produktif dan lingkungan, agar transformasi wilayah menuju pusat penyangga IKN tidak justru memperparah degradasi lingkungan dan ketimpangan antarwilayah.

4. Basis Kearifan Lokal

a. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Budaya dan Lokalitas

Kabupaten Sigi memiliki kekayaan wisata alam dan budaya yang belum tergarap secara optimal. Keindahan alam, situs budaya, serta keunikan kearifan lokal menjadi aset penting untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, hingga kini masih terdapat keterbatasan aksesibilitas ke destinasi wisata serta rendahnya upaya promosi yang menyebabkan sektor ini belum mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

Di sisi lain, tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan homogenisasi budaya akibat globalisasi menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan ekowisata dan budaya lokal. Dalam konteks ini, strategi yang diperlukan adalah pengembangan pariwisata yang mengedepankan keberlanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk komunitas adat sebagai pelaku utama pariwisata berbasis kearifan lokal.

b. Pemberdayaan Komunitas Adat dan Kearifan Lokal dalam Pembangunan

Komunitas adat di Kabupaten Sigi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, lingkungan, dan budaya melalui nilai-nilai serta praktik kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun temurun. Namun, peran strategis ini belum sepenuhnya diakui dan terlibat secara bermakna dalam proses pembangunan daerah. Ketimpangan dalam inklusi sosial dan budaya menjadikan potensi mereka belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam konteks transformasi pembangunan yang berkeadilan dan inklusif, perlu dilakukan pengarusutamaan partisipasi komunitas adat dan pelestarian kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas daerah, memastikan pembangunan berakar pada nilai-nilai lokal, serta meningkatkan keberdayaan sosial

budaya masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keberagaman dan keadilan sosial.

5. Bonus Demografi

Penguatan SDM dan Penciptaan Lapangan Kerja Produktif

Kabupaten Sigi tengah menghadapi tantangan besar sekaligus peluang dari struktur demografi dengan populasi usia produktif yang tinggi. Kondisi ini dapat menjadi kekuatan penggerak pembangunan daerah apabila dikelola dengan strategi yang tepat. Sayangnya, tingkat pengangguran masih cukup tinggi dan kesempatan kerja produktif belum mampu menampung seluruh angkatan kerja, terutama generasi muda.

Minimnya akses terhadap pelatihan keterampilan kerja, rendahnya sertifikasi kompetensi, serta kurangnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha menambah kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dan kapasitas tenaga kerja lokal. Hal ini mencerminkan ketimpangan pembangunan SDM yang tidak hanya bersifat lokal, namun juga merupakan refleksi dari tantangan ketimpangan SDM secara global.

Sebagai respons strategis, Kabupaten Sigi perlu mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, penyediaan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, serta penciptaan lapangan kerja produktif berbasis potensi lokal dan teknologi. Langkah ini tidak hanya bertujuan mengurangi pengangguran, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

6. Fasilitas Pelayanan Dasar

a. Peningkatan Cakupan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Desa

Kabupaten Sigi memiliki potensi sumber daya air bersih yang cukup melimpah, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Tantangan utama yang dihadapi adalah distribusi layanan yang tidak merata serta kualitas air yang belum memenuhi standar kesehatan di beberapa wilayah. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air bersih ini menjadi isu mendesak dalam konteks pembangunan berkelanjutan, apalagi di tengah ancaman krisis air global.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin hak dasar masyarakat, strategi peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi berbasis desa perlu dikedepankan, khususnya untuk wilayah terpencil dan pedesaan. Intervensi berbasis komunitas, integrasi layanan sanitasi, dan penguatan tata kelola air bersih akan menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan layanan dasar yang adil dan berkelanjutan.

b. Percepatan Penurunan Stunting dan Penguatan Sistem Kesehatan Dasar

Prevalensi stunting di Kabupaten Sigi, terutama di wilayah-wilayah terpencil, masih tergolong tinggi. Hal ini berkorelasi dengan buruknya sanitasi, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta rendahnya kesadaran gizi di tingkat keluarga. Tantangan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan jangka pendek, tetapi juga menurunkan potensi kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan langkah percepatan penurunan stunting yang komprehensif melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan akses layanan kesehatan dasar, serta

penguatan peran kader dan fasilitas kesehatan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan agenda nasional dan global dalam membangun masyarakat yang sehat dan produktif.

c. Pemerataan Layanan Dasar dan Afiriasi Wilayah Pinggiran

Masih terdapat kesenjangan akses terhadap infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan di wilayah Kabupaten Sigi, khususnya antara daerah pusat dan pinggiran. Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan dasar yang diterima oleh masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil.

Isu ini mencerminkan tantangan global dalam pemerataan layanan dasar dan perlu direspons dengan kebijakan afirmatif yang memastikan distribusi anggaran dan infrastruktur lebih merata. Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan kapasitas pelayanan publik di daerah pinggiran menjadi strategi utama untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah.

7. Ekonomi Hijau

Penguatan Ekonomi Restoratif Berbasis Komunitas dan Lingkungan

Kabupaten Sigi tengah menghadapi tantangan besar dalam pemulihan ekonomi pasca bencana dan pandemi, yang hingga kini belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berbasis ekosistem dan keberlanjutan. Model pertumbuhan ekonomi yang dominan masih menitikberatkan pada peningkatan output tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan. Hal ini memunculkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologi, sehingga berisiko memperburuk kerentanan wilayah terhadap bencana dan degradasi sumber daya alam.

Dalam konteks global, transformasi menuju ekonomi hijau dan restoratif menjadi agenda utama dalam menghadapi krisis iklim dan ketimpangan pembangunan. Sementara itu, di tingkat nasional dan regional, pengarusutamaan ekonomi hijau dan inklusif telah menjadi kebijakan strategis untuk menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Potensi besar Kabupaten Sigi dalam sektor pertanian, kehutanan sosial, serta ekowisata berbasis budaya dan alam perlu dimanfaatkan sebagai basis pengembangan ekonomi restoratif. Penguatan UMKM hijau, pengembangan produk berbasis sumber daya lokal yang lestari, serta pemberdayaan komunitas dalam tata kelola lingkungan adalah langkah konkret yang bisa dikedepankan. Dengan pendekatan ini, pemulihan ekonomi di Sigi dapat menjadi lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Di Kabupaten Sigi, fenomena ekonomi dan sosial saling terkait dalam sebuah sistem yang kompleks. Pendapatan rumah tangga, sebagai salah satu pendorong utama, memiliki dampak langsung terhadap daya beli dan tingkat konsumsi rumah tangga. Apabila pendapatan rumah tangga meningkat, daya beli dan konsumsi juga cenderung meningkat. Sebaliknya, pendapatan rumah tangga juga memengaruhi tingkat tabungan rumah tangga.

Kondisi ekonomi makro tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk produktivitas dan investasi. Produktivitas yang lebih tinggi akan mendorong peningkatan PDRB, dan pada gilirannya, PDRB dapat memengaruhi pendapatan daerah. Pajak daerah, sebagai bagian dari pendapatan daerah, juga dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan penjualan produk/turunan.

sering kali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini berkontribusi pada kesenjangan akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi, serta memperlemah daya jangkauan program pembangunan terhadap kelompok yang paling membutuhkan.

Secara global, pembangunan inklusif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip dasar dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di tingkat nasional dan regional, inklusi sosial telah menjadi komponen penting dalam upaya menekan ketimpangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selain itu, Kabupaten Sigi juga dihadapkan pada keterbatasan fiskal daerah dan rendahnya investasi dalam infrastruktur berkelanjutan dan program sosial. Minimnya inisiatif kemitraan publik-swasta (PPP), serta belum berkembangnya badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai motor investasi lokal, mempersempit ruang fiskal daerah untuk mendukung pertumbuhan hijau dan pembangunan inklusif.

Sebagai respon strategis, perlu dilakukan penguatan peran masyarakat inklusi dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini perlu disertai dengan pengembangan skema pembiayaan inovatif seperti *blended finance*, *green finance*, dan kemitraan multipihak, termasuk keterlibatan sektor swasta dan BUMDes dalam pembiayaan infrastruktur hijau dan layanan dasar. Pendekatan ini akan memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus memperluas basis partisipasi masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

9. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi untuk Pembangunan Terpadu

Kabupaten Sigi menghadapi tantangan dalam hal fragmentasi pembangunan antar wilayah dan antar instansi. Lemahnya koordinasi lintas sektor menyebabkan perencanaan ruang dan pembangunan sosial berjalan secara parsial, yang berdampak pada ketimpangan wilayah dan inefisiensi program pembangunan. Hal ini juga memperlemah kemampuan daerah dalam menyelaraskan pembangunan dengan arah kebijakan nasional dan konektivitas kawasan seperti Sulawesi Tengah dan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di sisi lain, minimnya kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Sistem riset daerah belum berkembang optimal, dan integrasi data antar sektor belum memadai untuk mendukung kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi dan lingkungan.

Tantangan lainnya adalah kualitas pelayanan publik dan birokrasi yang masih jauh dari prinsip *good governance*. Keterbatasan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), rendahnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta belum optimalnya transparansi dan partisipasi publik menjadi perhatian utama.

Untuk itu, isu strategis yang perlu diurusutamakan adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas ASN, integrasi SPBE, serta pembentukan sistem riset dan perencanaan berbasis data. Upaya ini perlu ditopang oleh penguatan kolaborasi lintas wilayah dan

antar instansi guna mewujudkan pembangunan yang terpadu dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.

Tabel 2.34
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah
Kabupaten Sigi

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Keterkaitan SDGs	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Daerah	Isu Strategis Daerah (cluster RPJMD Tekno)
1	Lahan pertanian subur, komoditas unggulan	Produktivitas rendah, teknologi rendah	Transformasi Ekonomi Inklusif (Daya dukung dan ketahanan pangan terancam)	SDG 1, 2, 8, 9, 12	Krisis pangan dan degradasi lahan	Transformasi pertanian berkelanjutan	Produksi pangan belum stabil di Sulteng	Modernisasi pertanian dan penguatan ketahanan pangan	Peranan baru sektor pertanian
2	Ruang pertanian dan konektivitas wilayah	Infrastruktur pertanian dan jalan tidak terintegrasi	Transformasi Ekonomi Inklusif (Alih fungsi lahan dan tekanan ruang)	SDG 9, 11, 12	Urbanisasi dan tekanan ruang global	Penguatan kawasan penyangga IKN	Jalur konektivitas belum optimal	Penguatan konektivitas wilayah dan perlindungan ruang produksi	Peranan baru sektor pertanian
3	Keanekaragaman hayati, hutan, DAS	Deforestasi dan degradasi lingkungan	Penguatan Tata Kelola Wilayah yang Berkelanjutan (Penurunan kualitas ekosistem)	SDG 13, 15	Perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman	Pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Deforestasi di DAS Palu dan Lariang	Konservasi sumber daya alam dan penguatan daya dukung lingkungan	perubahan iklim
4	Potensi energi terbarukan (air, surya)	Rendahnya pemanfaatan EBT	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Ketergantungan energi fosil)	SDG 7, 13	Krisis energi dan transisi global	Transisi energi bersih	Infrastruktur listrik desa terbatas	Pemanfaatan energi terbarukan untuk desa dan wilayah terpencil	perubahan iklim
5	Jalur strategis ke IKN	Konektivitas dan logistik belum optimal	Penguatan Tata Kelola Wilayah yang Berkelanjutan (Tekanan pembangunan ruang)	SDG 9, 11, 17	Urbanisasi dan pembangunan kawasan penyangga	Konektivitas wilayah IKN	Akses jalan belum merata di Sigi	Penguatan konektivitas dan kesiapan sebagai hinterland IKN	IKN
6	Wisata alam dan budaya	Akses terbatas, promosi rendah	Transformasi Ekonomi Inklusif (Daya dukung wisata dan budaya terancam)	SDG 8, 12	Homogenisasi budaya, degradasi ekowisata	Pariwisata berbasis budaya dan alam	Potensi wisata belum tergarap maksimal	Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis budaya dan lokalitas	Basis kearifan lokal

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Keterkaitan SDGs	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Daerah	Isu Strategis Daerah (cluster RPJMD Tekno)
7	Populasi usia produktif tinggi	Pengangguran dan minim pelatihan kerja	Transformasi Ekonomi Inklusif (Kesenjangan ekonomi dan sosial)	SDG 4, 8, 10	Ketimpangan SDM secara global	Optimalisasi bonus demografi	SDM belum tersertifikasi	Penguatan SDM dan penciptaan lapangan kerja produktif	bonus demografi
8	Komunitas adat aktif dan kearifan lokal	Belum terlibat dalam proses pembangunan	Penguatan Ketahanan Sosial (Ketimpangan peran sosial dan budaya)	SDG 5, 10, 16	Inklusi sosial dan budaya	Pengarusutamaan budaya lokal	Partisipasi komunitas adat terbatas	Pemberdayaan komunitas adat dan kearifan lokal dalam pembangunan	Basis kearifan lokal
9	Air bersih melimpah namun belum optimal	Distribusi layanan tidak merata, kualitas buruk	Penyediaan Aksesibilitas Dasar (Ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan)	SDG 3, 6, 11	Krisis air global dan kelangkaan sumber air	Layanan dasar air dan sanitasi	Akses air bersih terbatas di beberapa kecamatan	Peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi berbasis desa	Fasilitas pelayanan dasar
10	Wilayah rawan bencana	Minim mitigasi dan adaptasi bencana	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Risiko bencana tinggi dan berulang)	SDG 11, 13	Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana	Ketangguhan dan kesiapsiagaan bencana	Wilayah rawan di Sulawesi Tengah	Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta tata ruang responsif	perubahan iklim
11	Tingginya prevalensi stunting	Sanitasi dan gizi buruk, pelayanan tidak merata	Penguatan Ketahanan Sosial (Beban kesehatan jangka panjang)	SDG 2, 3, 6	Ketimpangan layanan kesehatan global	Percepatan penurunan stunting	Angka stunting tinggi di desa terpencil	Percepatan penurunan stunting dan penguatan sistem kesehatan dasar	Fasilitas pelayanan dasar
12	Lahan kritis dan potensi agroforestri	Pertanian ekstensif tanpa konservasi	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Daya dukung tanah menurun)	SDG 2, 13, 15	Degradasi tanah dan krisis ketahanan ekosistem	Rehabilitasi DAS dan konservasi tanah	DAS Lariang dan Palu terancam erosi	Rehabilitasi lahan kritis dan pengembangan sistem agroforestri	perubahan iklim
13	Fragmentasi antar wilayah dan instansi	Koordinasi pembangunan belum sinkron	Penguatan Tata Kelola Wilayah yang Berkelanjutan (Ketidakterpaduan perencanaan ruang dan sosial)	SDG 16, 17	Ketimpangan wilayah	Perencanaan lintas sektor dan wilayah	Isu konektivitas antar kabupaten	Kolaborasi dan sinergi pembangunan wilayah terpadu	Tata kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Keterkaitan SDGs	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Daerah	Isu Strategis Daerah (cluster RPJMD Tekno)
14	Minimnya pelibatan masyarakat inklusi	Kelompok rentan tidak dilibatkan secara bermakna	Penguatan Ketahanan Sosial (Kesenjangan akses sosial dan program pembangunan)	SDG 5, 10, 16	Isu hak asasi dan partisipasi global	Pembangunan inklusif dan setara	Representasi kelompok rentan masih terbatas	Penguatan peran masyarakat inklusi dalam pembangunan	Kemitraan multipihak
15	Potensi hutan adat dan perhutanan sosial	Akses belum legal, belum ada pendampingan	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Ketimpangan akses dan distribusi pemanfaatan hutan)	SDG 15, 16	Ketidakadilan ekologis dan sosial	Reforma agraria dan perhutanan sosial	Masih rendahnya implementasi di daerah	Penguatan kelembagaan perhutanan sosial dan hutan adat	perubahan iklim
16	Emisi GRK sektor lahan dan energi tinggi	Emisi dari transportasi, pembukaan lahan	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Gas rumah kaca dan pemanasan global)	SDG 13, 15	Target <i>net-zero</i> dan pembangunan rendah karbon	Penurunan emisi sektor energi dan kehutanan	Belum adanya <i>roadmap</i> GRK daerah	Pengendalian GRK dan pembangunan rendah karbon berbasis wilayah	perubahan iklim
17	Terbatasnya inovasi pembiayaan pembangunan	Keterbatasan fiskal dan investasi hijau rendah	Penguatan Tata Kelola Wilayah yang Berkelanjutan (Keterbatasan pembiayaan infrastruktur dan sosial)	SDG 8, 9, 17	<i>Green finance</i> dan <i>blended finance global</i>	Skema KPBU dan pembiayaan alternatif	Minimnya inisiatif PPP dan BUMDes investasi	<i>Blending finance</i> dan pembiayaan berkelanjutan untuk infrastruktur hijau	Kemitraan multipihak
18	Pemulihan ekonomi belum berbasis ekosistem	Pendekatan pertumbuhan belum menyentuh keberlanjutan	Transformasi Ekonomi Inklusif (Ketidakseimbangan antara ekonomi dan lingkungan)	SDG 8, 12, 13	Ekonomi restoratif dan ekonomi hijau	Ekonomi hijau dan inklusif	UMKM hijau belum berkembang optimal	Penguatan ekonomi restoratif berbasis komunitas dan lingkungan	ekonomi hijau
19	Riset dan pengambilan kebijakan	Minim <i>evidence-based policy</i>	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Tidak berbasis data lingkungan)	SDG 16, 17	<i>Evidence-based global governance</i>	<i>Data driven planning</i> & kebijakan	Belum terbangun sistem riset daerah	Penguatan riset dan inovasi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan publik	Tata kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi
20	Kualitas pelayanan publik dan birokrasi	<i>Good governance</i> belum optimal	Penguatan Tata Kelola Wilayah yang Berkelanjutan (Tata kelola tidak transparan)	SDG 16	Agenda transparansi global	Reformasi birokrasi dan SPBE	Kapasitas ASN daerah terbatas	Tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel	Tata kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Keterkaitan SDGs	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Daerah	Isu Strategis Daerah (cluster RPJMD Tekno)
21	Infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan	Ketimpangan antarwilayah	Penguatan Ketahanan Sosial (Ketimpangan layanan dasar)	SDG 10, 11, 17	Akses layanan dasar global tidak merata	Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	Akses pedesaan rendah	Pemerataan layanan dasar dan afirmasi wilayah pinggiran	Faslitas pelayanan dasar

Sumber : Hasil Analisa, 2025

KLHS RPJMD Kabupaten Sigi telah mengidentifikasi berbagai isu strategis pembangunan yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk memastikan arah pembangunan daerah yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), perlu integrasi komprehensif antara hasil analisis KLHS ke dalam dokumen RPJMD 2025-2029.

Adapun permasalahan utama seperti daya dukung dan ketahanan pangan terancam akibat produktivitas rendah dan pertanian ekstensif, ketimpangan layanan dasar dan kualitas kesehatan serta pendidikan masyarakat yang belum merata, tingginya risiko bencana dan perubahan iklim serta lemahnya sistem mitigasi dan adaptasi, ketimpangan peran sosial, budaya, dan rendahnya inklusi komunitas adat serta kelompok rentan dan keterbatasan pembiayaan pembangunan, tata kelola belum transparan, serta minimnya data berbasis bukti. KLHS mengelompokkan isu ke dalam lima kluster utama:

1. Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berbasis Ekosistem

Kabupaten Sigi dihadapkan pada tantangan rendahnya produktivitas sektor ekonomi utama, ketergantungan pada energi fosil, serta meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan ekologis. Tantangan ini mengancam ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Untuk menjawab isu ini, arah pembangunan daerah difokuskan pada *transformasi ekonomi inklusif* yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem. Pertimbangan ini mencakup modernisasi sistem pertanian melalui teknologi tepat guna, penguatan UMKM hijau yang ramah lingkungan dan inklusif, serta optimalisasi energi terbarukan seperti tenaga air dan surya di wilayah terpencil. Inisiatif ini selaras dengan tujuan SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), 2 (Tanpa Kelaparan), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 9 (Infrastruktur dan Inovasi), 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan), dan 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

2. Ketahanan Sosial dan Layanan Dasar:

Permasalahan sosial dasar seperti tingginya prevalensi stunting, buruknya sanitasi, serta ketimpangan distribusi layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi hambatan utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Sigi. Masalah ini diperparah oleh akses yang belum merata, terutama di wilayah terpencil. Melalui pendekatan berbasis inklusi dan keadilan spasial, pertimbangan ini diarahkan pada pemenuhan layanan dasar seperti penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan berbasis desa, serta afirmasi untuk wilayah marginal. Strategi ini mendukung pencapaian SDGs 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), 4 (Pendidikan Berkualitas), 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), 10 (Mengurangi Ketimpangan), dan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan).

3. Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim:

Deforestasi, degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan tantangan besar yang memengaruhi daya dukung lingkungan dan meningkatkan kerentanan bencana di Kabupaten Sigi. Ditambah dengan belum optimalnya sistem mitigasi dan adaptasi bencana, kondisi ini menuntut kebijakan lingkungan yang lebih progresif dan berbasis risiko. Pertimbangan ini difokuskan pada perlindungan ekosistem kritis melalui tata kelola DAS secara berkelanjutan, pengendalian GRK di sektor lahan dan energi, serta penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana. Upaya ini mendukung SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan 15 (Ekosistem Daratan).

4. Keadilan Sosial dan Budaya:

Ketimpangan sosial yang masih terjadi, terutama pada peran komunitas adat dan kelompok rentan, menunjukkan minimnya inklusi dalam pembangunan. Lemahnya partisipasi masyarakat adat dan kelompok difabel, serta rendahnya representasi perempuan dan pemuda, menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan. Hasil ini dijadikan pertimbangan untuk mendorong pemberdayaan komunitas lokal dan adat melalui pendekatan partisipatif, pengakuan hak, dan

pendampingan kapasitas. Strategi ini juga mencakup pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta peningkatan sertifikasi dan pengembangan kompetensi SDM. Inisiatif ini sejalan dengan SDGs 5 (Kesetaraan Gender), 10 (Mengurangi Ketimpangan), dan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh).

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Pembiayaan Inovatif:

Masalah keterbatasan fiskal daerah, belum optimalnya transparansi pemerintahan, serta rendahnya pengambilan kebijakan berbasis data menjadi tantangan dalam efektivitas pembangunan daerah. Untuk itu, tata kelola yang partisipatif, transparan, dan berbasis bukti menjadi landasan penting dalam reformasi birokrasi. Pertimbangan ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas perencanaan berbasis riset dan data, implementasi kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta penguatan mekanisme pembiayaan inovatif untuk mendukung pembangunan hijau dan inklusif. Hal ini akan memperkuat pencapaian SDGs 16 (Institusi yang Tangguh dan Akses Keadilan) dan 17 (Kemitraan untuk Tujuan Pembangunan).

Pembangunan Kabupaten Sigi dihadapkan pada tantangan kompleks yang saling terkait, mencerminkan kesenjangan antara kondisi aktual dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Analisis keterkaitan isu strategis daerah dengan TPB/SDGs menunjukkan bahwa isu-isu strategis yang diidentifikasi bukan hanya permasalahan sektoral, melainkan masalah lintas sektor yang membutuhkan pendekatan terintegrasi berbasis 4 dimensi pembangunan: ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan.

1. Dimensi Ekonomi

Isu-isu seperti rendahnya produktivitas sektor pertanian dan UMKM (SDG 1, 2, 8, 9, 12), konektivitas dan logistik yang lemah (SDG 9, 11, 17), minimnya pemanfaatan energi terbarukan (SDG 7, 13), serta pendekatan pertumbuhan ekonomi yang belum berkelanjutan (SDG 8, 12, 13) menyoroti masalah mendasar dalam struktur ekonomi Sigi. Keterbatasan teknologi, infrastruktur, dan kapasitas SDM menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah belum inklusif dan tidak responsif terhadap perubahan pasar maupun krisis iklim. Keterkaitan ini menjadi cerminan tantangan dalam mencapai SDGs di bidang pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan penguatan infrastruktur berkelanjutan. Kabupaten Sigi perlu mendorong transformasi produktivitas melalui modernisasi pertanian, diversifikasi ekonomi hijau, pengembangan energi terbarukan, dan konektivitas yang inklusif agar daya saing ekonomi lokal meningkat dan berkontribusi langsung terhadap target SDGs.

2. Dimensi Sosial

Ketimpangan akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan (SDG 3, 4, 6, 10, 11, 17), tingginya prevalensi stunting (SDG 2, 3), serta minimnya pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan (SDG 5, 10, 16) menunjukkan rendahnya inklusi sosial di Kabupaten Sigi. Partisipasi masyarakat adat, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas belum bermakna, sementara keterbatasan kapasitas SDM dan akses pelatihan kerja menyebabkan bonus demografi tidak terkelola optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya capaian target SDGs di bidang pengurangan ketimpangan, penguatan kapasitas SDM, dan inklusi sosial. Oleh karena itu, pengarusutamaan hak kelompok rentan, pemerataan layanan dasar, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, dan penguatan peran komunitas lokal menjadi strategi krusial untuk memastikan pembangunan yang adil dan setara.

3. Dimensi Lingkungan

Permasalahan seperti deforestasi, degradasi ekosistem, emisi GRK dari transportasi dan lahan, pertanian ekstensif tanpa konservasi, dan minimnya mitigasi-adaptasi bencana (SDG 13, 15) menjadi tantangan utama dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kabupaten Sigi berkontribusi pada emisi GRK dan degradasi lingkungan melalui praktik pembukaan lahan tanpa konservasi, pembakaran hutan, dan

ketergantungan pada energi fosil. Hal ini menghambat pencapaian target pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim (SDG 13), pengelolaan ekosistem daratan (SDG 15), serta keberlanjutan kawasan hutan dan DAS. Selain itu, ketidakterpaduan tata ruang dan lemahnya pengawasan memperburuk risiko bencana. Oleh sebab itu, penguatan konservasi, rehabilitasi lahan kritis, transisi energi terbarukan, serta integrasi mitigasi-adaptasi iklim ke dalam kebijakan dan tata ruang menjadi prioritas aksi yang mendesak.

4. Dimensi Kelembagaan

Isu minimnya kebijakan berbasis bukti, lemahnya koordinasi antarwilayah dan antarinstansi, serta keterbatasan inovasi pembiayaan hijau (SDG 16, 17) menunjukkan perlunya reformasi tata kelola pemerintahan. Kabupaten Sigi belum optimal dalam menerapkan prinsip good governance, dengan keterbatasan integrasi data, lemahnya kapasitas ASN, dan terbatasnya sistem monitoring-evaluasi berbasis kinerja. Selain itu, kemitraan multipihak, termasuk peran BUMDes, sektor swasta, dan lembaga riset, belum terjalin secara strategis. Tantangan ini menghambat pencapaian target SDGs di bidang institusi yang kuat, transparansi, akuntabilitas, dan kemitraan global. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi data perencanaan, digitalisasi tata kelola, dan pembiayaan inovatif seperti *green finance* harus menjadi fokus prioritas.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 VISI DAN MISI

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan 2 tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka Visi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, yaitu

KABUPATEN SIGI MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS
PERTANIAN DAN PARIWISATA

Visi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Sigi selama 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
KABUPATEN SIGI MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA	MAJU	Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten yang moderen, menjunjung tinggi kearifan lokal, membangun sesuai karakteristik wilayah, mampu bersaing di kancah regional maupun nasional, memiliki ketahanan yang tangguh dalam mewujudkan masyarakat “masagena”
	BERKELANJUTAN	Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan hijau berkelanjutan dan ramah lingkungan serta pengembangan Infrstruktur, pertanian, pariwisata, dan Usaha Mikro (UMKM), yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan tetap mengedepankan pelayanan

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		dasar, Pendidikan dan Kesehatan.
	BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA	Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten yang tumbuh dan berkembang dalam sektor pertanian dan pariwisata melalui peningkatan produktivitas inovasi teknologi pertanian dan peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata.

Dalam upaya mengukur pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, maka ditetapkan Sasaran Visi Kabupaten Sigi 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten sigi Tahun 2025-2045 tahap pertama sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

			TARGET/SASARAN	
NO	SASARAN VISI RPJMD	SATUAN	Baseline 2025	Sasaran 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)
I	Peningkatan Pendapatan Perkapita			
	1 PDRB Perkapita (ADHB)	Rp. Juta	51,03-51,53	71,03-71,53
	2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Angka	17,20	19,09
	3 Indek Ekonomi Hijau (IEHD)	Angka	72,78	77,24
	4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	1,98	2,10
II	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang			
	1 Tingkat Kemiskinan	%	11,0-11,5	8,88-9,38
	2 Rasio Gini	Angka	0,250-0,240	0,217-0,215
	3 Kontribusi PDRB Kabupaten	%	3,92	5,70
	4 Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,10 – 4,15	6,75 – 6,80
III	Kepemimpinan dan Pengaruh di provinsi Meningkat			
	1 Indeks Inovasi Daerah	Angka	40,05	48,68
	2 Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,50	3,88
IV	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			
	1 Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,50-72,00	76,13-76,62
V	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission			
	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	82,48	83,54

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Rumusan Misi yang dimaksud untuk pencapaian Visi 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

No	Misi	Penjelasan Misi RPJMD
1	MEWUJUDKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN LAYANAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA DAN BERKEADILAN	Merupakan upaya dalam peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi, perumahan layak bagi masyarakat miskin dan penerapkan praktik infrastruktur ramah lingkungan dan berwawasan pembangunan hijau yang berkelanjutan serta menjamin ketersediaan jaringan telekomunikasi dipelosok.
2	MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEJAHTERA	Merupakan upaya dalam Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter, dan berdaya saing dalam peningkatan kualitas, pengetahuan, ketrampilan bagi masyarakat luas. SDM yang berkualitas merupakan pondasi penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3	MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA	Membangun ekonomi yang berdaya saing dengan mendorong inovasi kewirausahaan, pertanian dan pariwisata.
4	MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, KETAHANAN BENCANA DAN HARMONI SOSIAL	Merupakan upaya dalam peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta mengurangi resiko bencana. Melanjutkan perlindungan sosial dengan masagena plus serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
5	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance dalam semua aspek pelayanan public melalui partisipasi aktif masyarakat.

Adapun keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sigi Periode 2025–2029, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025 – 2029

VISI	MISI
Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata	1. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan.
	2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sejahtera.
	3. Mewujudkan Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata.
	4. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial.
	5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan Dan Partisipatif.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sigi Periode 2025–2029, di samping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sigi 2025–2045, perlu juga memperhatikan RPJM Nasional, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi bagian integral dari program nasional. Dengan demikian, maka Misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah kabupate Sigi yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional sesuai tabel berikut:

Tabel 3.5
Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, Misi RPJMN (Asta Cita/Prioritas Nasional) Tahun 2025-2029 dan Misi /Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

No	Misi RPJMN (Asta Cita / Prioritas Nasional)	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah	Misi RPJMD Kabupaten Sigi
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;	(M.4) - Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	(M.4) - Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;	(M.4) - Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	(M.4) - Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;	(M.3) - Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antarsektor	(M.1) - Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;	(M.1) - Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja	(M.2) - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera

No	Misi RPJMN (Asta Cita / Prioritas Nasional)	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah	Misi RPJMD Kabupaten Sigi
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;	(M.2) - Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	(M.3) - Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata.
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;	(M.2) - Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	(M.3) - Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;	(M.4) - Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	(M.5) - Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;	(M.3) - Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antarsektor	(M.4) - Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial

3.1.2 TUJUAN dan SASARAN RPJMD TAHUN 2025 – 2029

Permendagri nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa **tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sementara definisi dalam Inmendagri nomor 2 tahun 2025 menyebutkan bahwa Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi 5 tahun. Sedangkan sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya tujuan RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, maka perencanaan terintegrasi melalui desain kerangka berpikir logis sederhana dituangkan ke dalam rumusan Tujuan dan Sasaran. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, untuk lebih dipertajam menggunakan cascading kinerja dengan pendekatan *logic* model mulai dari visi Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan *outcome* prioritas dalam menentukan urusan prioritas serta program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Dalam mekanisme cascading tersebut, sangat dimungkinkan pemanfaatannya untuk menjelaskan kerangka pikir logis dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi sebagai alat bantu.

Persandingan Agenda Nasional, prioritas Sulawesi Tengah, Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sigi 2025-2045, dan dipadukan dengan makna visi misi Bupati terpilih, menjadi bahan menyusun kerangka tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2025–2026.

Dengan mempertimbangkan analisis berbagai persandingan mandat, isu strategis, dan prioritas nasional, provinsi, dan Kabupaten, maka turunan Misi ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

A. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DARI MISI 1

Misi 1: Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan

Misi ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan layanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Sigi, dengan memperhatikan kebutuhan seluruh wilayah, baik yang terletak di pusat kota maupun daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mengurangi ketimpangan, memberikan akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas hidup, ekonomi, dan kesejahteraan Masyarakat. Secara keseluruhan, misi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sigi untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, tanpa memandang lokasi atau status sosial mereka. Misi ini diturunkan menjadi tujuan dan sasaran berikut ini:

TUJUAN	SASARAN
(1.1)	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas
	(1.1.1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
	(1.1.2) Meningkatkanya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
	(1.1.3) Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
	(1.1.4) Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Logframe Tujuan 1 dan Sasaran Misi 1

Misi 1	 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan			
Tujuan	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas			
Indikator Tujuan	 Indeks infrastruktur daerah			
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yanga berkualitas	Meningkatkanya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
Indikator Sasaran Strategis	1.Indeks Kemantapan Jalan 2.Indeks Kemantapan Irigasi 3.Kapasitas Air Baku 4.Indeks Akses Air Minum 5.Indeks Akses Sanitasi 	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 	 Rasio Konektivitas	Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi 
Urusan	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 	Perumahan dan Kawasan Permukiman 	Perhubungan 	Komunikasi dan Informatika 

Tujuan "**Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas**" merupakan bagian penting dari misi "**Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan**" di Kabupaten Sigi. Tujuan ini memiliki fokus utama untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dengan memastikan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur, Kabupaten Sigi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya serta menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih adil.

B. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DARI MISI 2

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sejahtera

Misi ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang sejahtera di Kabupaten Sigi melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesejahteraan sosial, guna mendukung perkembangan daerah yang lebih baik. Misi ini diturunkan menjadi tujuan dan sasaran berikut ini:

TUJUAN	SASARAN
(2.1) Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing	
	(2.1.1) Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
	(2.1.2) Meningkatnya literasi masyarakat
	(2.1.3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	(2.1.3) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga
(2.2) Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	
	(2.2.1) Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
	(2.2.2) Meningkatnya keluarga yang berkualitas
	(2.2.3) Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien
	(2.2.4) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga
(2.3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
	(2.3.1) Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
	(2.3.2) Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
	(2.3.3) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
	(2.3.4) Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
	(2.3.5) Meningkatnya kesejahteraan transmigran

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Logframe Tujuan 1 dan Sasaran Misi 2

Misi 2	 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sejahtera		
Tujuan 1	Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing		
Indikator Tujuan	 Indek Pembangunan Manusia		
Sasaran Strategis	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatnya literasi masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	1. Skor Literasi 2. Skor Numerasi 3. Rata-rata Lama Sekolah 4. Harapan Lama Sekolah 	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun) 2. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) 3. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita) 
Urusan	 Pendidikan	 Perpustakaan	 Kesehatan

TUJUAN 1: Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing

Tujuan ini berfokus pada pengembangan masyarakat Kabupaten Sigi yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Masyarakat yang berpendidikan diharapkan mampu mengakses dan memanfaatkan pengetahuan serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, sementara kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas dan kualitas hidup yang optimal. Selain itu, pembentukan karakter yang kuat akan menciptakan individu yang memiliki integritas dan etika yang baik, sementara daya saing akan mendorong masyarakat untuk berkompetisi secara positif, baik di tingkat lokal maupun global. Semua ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang sejahtera, yang tidak hanya siap menghadapi tantangan zaman, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Gambar 3.3
Logframe Tujuan 2 dan Sasaran Misi 2

Misi 2	 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sejahtera			
Tujuan 2	Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender			
Indikator Tujuan	 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		 Indeks Pembangunan Gender	
Sasaran Strategis	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya keluarga yang berkualitas	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga
Indikator Sasaran Strategis	1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 	1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan 	1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2. Indeks Partisipasi Olahraga 
Urusan	 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	 Kepemudaan dan Olahraga

TUJUAN 2: Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender

Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Sigi dengan memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi setiap anggota keluarga. Selain itu, fokus pada kesetaraan gender menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan ini berperan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup mereka, sekaligus memperkuat fondasi sosial di Kabupaten Sigi.

Gambar 3.4
Logframe Tujuan 3 dan Sasaran Misi 2
TUJUAN 3: Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Misi 2	 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sejahtera				
Tujuan 3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Indikator Tujuan	 Tingkat Kemiskinan	 Tingkat Pengangguran Terbuka	 Indeks Gini Rasio		
Sasaran Strategis	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Kesejahteraan Sosial 	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 	Indeks Desa Membangun (IDM) (Persentase Desa Mandiri) 	Rasio Penduduk Bekerja 	Pendapatan Perkapita di Wilayah Transmigrasi 
Urusan	1. Sosial 2. Bagian Kesra 	Pangan 	Pemberdayaan Masyarakat Desa 	Tenaga Kerja 	Transmigrasi 

Tujuan ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi melalui berbagai program yang mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang sejahtera, yang memiliki kemampuan dan kesejahteraan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah secara lebih efektif. Tujuan ini menekankan pentingnya pemerataan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan Masyarakat.

C. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DARI MISI 3

MISI 3: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata

Misi ini bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sigi dengan mengoptimalkan potensi sektor pertanian dan pariwisata. Dengan memprioritaskan kedua sektor tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. Fokusnya adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan untuk kemajuan daerah. Misi ini diturunkan menjadi tujuan dan sasaran berikut ini:

TUJUAN	SASARAN
(3.1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah	
	(3.1.1) Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah
	(3.1.2) Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian
	(3.1.3)Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif
	(3.1.4) Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah
	(3.1.4) Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Sektoral

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.5
Logframe Tujuan 1 dan Sasaran Misi 3

Misi 3	 Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata				
Tujuan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah				
Indikator Tujuan	Pertumbuhan ekonomi (%)				
Sasaran Strategis	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah	Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Sektoral
	1.PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB) 2.PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.PDRB Sektor Ekonomi Kreatif 4.PDRB Sektor Industri Pengolahan 5.PDRB Sektor Perdagangan	1.Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB 2.Rasio Kewirausahaan Daerah 	Persentase Peningkatan Investasi 	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 	1.Indeks Daya Saing Daerah 2.Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 3.Indeks Ekonomi Hijau Daerah 
Urusan	1.Pertanian 2.Pariwisata 3.perindustrian 4.Perdagangan 	Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro 	Penanaman Modal 	Unsur Keuangan (Pendapatan Daerah) 	Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tujuan ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi dengan mengoptimalkan produktivitas unggulan daerah. Dengan memaksimalkan potensi sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi kekuatan utama daerah, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kemajuan ekonomi yang merata. Tujuan ini juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan, di mana pemanfaatan sumber daya alam dan kekayaan budaya dilakukan secara bijak dan berwawasan lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa mengorbankan keberlanjutan daerah.

D. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DARI MISI 4

MISI 4: Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial

Misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperkuat ketahanan terhadap bencana, dan menciptakan harmoni sosial di Kabupaten Sigi. Dengan fokus pada pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi risiko bencana serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan harmonis bagi semua lapisan masyarakat, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Misi ini diturunkan menjadi tujuan dan sasaran berikut ini:

TUJUAN	SASARAN
(4.1) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	
	(4.1.1) Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	(4.1.2) Menurunkan Intensitas GRK menuju Net Zero Emission
	(4.1.3) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan yang Tertangani

TUJUAN	SASARAN
	(4.1.4) Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan
	(4.1.5) Meningkatnya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
(4.2) Meningkatkan Keamanan Daerah dan ketahanan bencana serta perubahan Iklim	
	(4.2.1) Meningktanya ketenteraman dan ketertiban umum
	(4.2.2) Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana
(4.3) Meningkatkan harmoni sosial	
	(4.3.1) Meningkatnya harmoni sosial secara inklusif
	(4.3.2) Meningkatnya berkebudayaan maju

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.6
Logframe Tujuan 1 dan Sasaran Misi 4

Misi 4	 Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial				
Tujuan 1	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup				
Indikator Tujuan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)				
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Menurunya Intensitas GRK menuju Net Zero Emission	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan yang Tertangani	Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan	Meningkatnya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 	1.Penurunan Intensitas Emisi GRK (%): 2.Persentase Penurunan Emisi GRK: Kumulatif 3.Persentase Penurunan Emisi GRK: Tahunan 	1.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 2.Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 	Rasio ketaatan terhadap RTRW 	Tertib Administrasi Pertanahan 
Urusan	Lingkungan Hidup 	Lingkungan Hidup 	Lingkungan Hidup 	Tata Ruang 	Pertanahan 

TUJUAN 1: Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sigi dengan fokus pada keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah, dan kualitas lahan. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, daerah ini akan mampu mempertahankan ekosistem yang sehat dan seimbang, yang mendukung sektor pertanian dan pariwisata. Pengelolaan sampah yang efektif akan mengurangi pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan, sementara perhatian terhadap kualitas lahan akan memastikan kesuburan tanah tetap terjaga untuk mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan

dengan upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam.

Gambar 3.7
Logframe Tujuan 2 dan Sasaran Misi 4

Misi 4	 Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial	
Tujuan 2	Meningkatkan Keamanan Daerah dan ketahanan bencana serta perubahan iklim	
Indikator Tujuan	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban umum	Indeks Risiko Bencana
Sasaran Strategis	Meningktanya ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas 	Indeks Ketahanan Daerah 
Urusan	Satpol PP 	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan) 

TUJUAN 2: Meningkatkan Keamanan Daerah dan ketahanan bencana serta perubahan Iklim

Tujuan ini berfokus pada peningkatan keamanan daerah dan ketahanan terhadap bencana serta perubahan iklim di Kabupaten Sigi. Dengan memperhatikan ketenteraman dan ketertiban umum, tujuan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman, stabil, dan teratur bagi seluruh masyarakat. Ketenteraman ini tidak hanya mencakup keamanan fisik, tetapi juga mencakup pengelolaan potensi konflik sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, fokus pada ketahanan bencana dan perubahan iklim memastikan bahwa daerah ini siap menghadapi ancaman bencana alam dan dampak perubahan iklim melalui mitigasi yang tepat, perencanaan yang matang, serta penguatan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

Gambar 3.8
Logframe Tujuan 3 dan Sasaran Misi 4

Misi 4	 Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial	
Tujuan 3	Meningkatkan harmoni sosial	
Indikator Tujuan	 Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	
Sasaran Strategis	Meningkatnya harmoni sosial secara inklusif	Meningkatnya berkebudayaan maju
Indikator Sasaran Strategis	 -Nilai Kesetaraan -Nilai Toleransi Nilai Kerjasama	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK) 
Urusan	 Unsur Sekretariat Daerah (Kesejahteraan Rakyat)	 Kebudayaan

TUJUAN 3: Meningkatkan harmoni sosial

Tujuan ini berfokus pada peningkatan harmoni sosial dan kebudayaan di Kabupaten Sigi, dengan menekankan nilai kesetaraan, toleransi, dan kerjasama. Meningkatkan harmoni sosial secara inklusif berarti menciptakan masyarakat yang saling menghargai, tanpa memandang perbedaan sosial, budaya, atau ekonomi, serta menjunjung tinggi nilai kesetaraan di setiap aspek kehidupan. Nilai toleransi mendorong penerimaan terhadap perbedaan, baik itu dalam hal agama, suku, maupun pandangan, sehingga tercipta lingkungan yang damai. Selain itu, nilai kerjasama menjadi fondasi untuk menciptakan kerja tim yang solid antar masyarakat, yang berkontribusi pada tercapainya tujuan bersama. Fokus pada kebudayaan maju bertujuan untuk mengembangkan budaya lokal yang relevan dengan perkembangan zaman, sambil tetap menjaga nilai-nilai tradisional, memperkuat identitas budaya Kabupaten Sigi, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memelihara dan memajukan warisan budaya mereka.

E. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DARI MISI 5

MISI 5: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif di Kabupaten Sigi dengan fokus pada peningkatan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi yang menjamin kualitas layanan publik dan meningkatkan efisiensi administratif. Melalui upaya ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sigi akan lebih efektif dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, mendukung

pembangunan daerah yang berkelanjutan. Misi ini diturunkan menjadi tujuan dan sasaran berikut ini:

TUJUAN	SASARAN
(5.1) Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat	
	(5.1.1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
	(5.1.2) Meningkatnya keamanan informasi
	(5.1.3) Meningkatnya tata kelola arsip
	(5.1.4) Meningkatnya profesionalitas ASN
	(5.1.5) Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
	(5.1.6) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
	(5.1.7) Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
	(5.1.8) Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
	(5.1.9) Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
	(5.1.10) Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
	(5.1.11) Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.9
Logframe Tujuan 1 dan Sasaran (sasaran 1/6) Misi 5

Misi 5	 Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif					
Tujuan	Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat					
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi					
Sasaran Strategis 1 s.d 6	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya Tata Kelola Berbasis Elektronik	Meningkatnya tata kelola arsip	Meningkatnya profesionalitas ASN	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Indikator Sasaran Strategis	1.Indeks Pelayanan Publik 2.Indeks Reformasi Hukum 3.Nilai Sakip 4.Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks SPBE	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan	1.Unsur Sekretariat Daerah 2.Unsur Perencanaan	Komunikasi dan Informatika	Kearsipan	Unsur Kepegawaian	Unsur Sekretariat DPRD	Unsur Perencanaan

Gambar 3.10
Logframe Tujuan 1 dan Sasaran (sasaran 7/11) Misi 5

Misi 5	 Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif					
Tujuan	Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat					
Indikator Tujuan	 Indeks Reformasi Birokrasi			 Indeks Demokrasi Indonesia		
Sasaran Strategis 7 s.d 11	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indek Inovasi Daerah	1.Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 3.Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks Demokrasi Indonesia	
Urusan	Statistik	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Unsur Keuangan	Unsur Pengawasan	Pemerintahan Umum	

TUJUAN 1: Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat

Tujuan ini berfokus pada pencapaian pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Sigi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pemerintahan. Ini mencakup peningkatan berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, seperti layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan yang berbasis data. Selain itu, penguatan riset dan inovasi juga menjadi fokus untuk mendorong pengembangan daerah yang lebih baik.

Tujuan ini juga mencakup peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel, serta pengawasan

yang lebih efektif untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan. Masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM akan semakin menguat, menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif. Selain itu, peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta penerapan sistem elektronik dalam tata kelola pemerintahan, akan mempercepat proses administratif dan meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan arsip yang lebih baik, profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), serta dukungan maksimal dari DPRD akan memperkuat kinerja pemerintahan. Terakhir, kualitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tepat sasaran dan dapat menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat.

RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SIGI

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (SMART-C).

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Perumusan Tujuan dan sasaran dengan indikator disajikan pada Tabel Tabel 3.6, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Teknik Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030	URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
MISI 1	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan									
	(1.1) Meningkatkan 1 kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas		Indeks infrastruktur daerah	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	
		1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas	1. Indeks Kemantapan Jalan	0,26	0,33	0,39	0,46	0,53	0,60	Pekerjaan Umum
			2. Indeks Kemantapan Irigasi	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	
			3. Indeks Akses Air Minum	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	
			4. Indeks Akses Sanitasi	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,85	
		2 Meningkatkanya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	85.43	86.28	87.14	88.01	88.89	89.78	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3 Meningkatnya layanan transportasi yang	Rasio Konektivitas	54,06	55,14	56,24	57,37	58,52	59,69	Perhubungan

		nyaman, aman dan terjangkau								
		4 Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	0,25	0,27	0,28	0,29	0,31	0,33	Komunikasi dan Informatika
MISI 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sejahtera										
	(2.1) Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	71,50-72,00	72,65-73,15	73,80-74,30	74,96-75,46	76,13-76,62	77,28-77,78	
		1 Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	1. Skor Literasi	60,00	60,50	70,00	70,50	80,00	80,50	Pendidikan
			2. Skor Numerasi	60,00	60,25	60,50	60,75	70,00	70,25	
			3. Rata-rata Lama Sekolah	9,04	9,05	9,07	9,09	9,11	9,13	
			4. Harapan Lama Sekolah	13,21	13,29	13,37	13,45	13,53	13,61	
		2 Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	62,75	63,00	63,50	63,70	64,00	64,50	Perpustakaan
		3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	71.69	72.05	72.41	72.77	73.13	73.50	Kesehatan
			2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	30,00	27,00	24,00	21,00	18,00	15,00	

			3. Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	122,00	109,00	97,00	86,00	77,00	68,00	
	(2.2) Meningkatkan 2 keluarga berkualitas dan kesetaraan gender		1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,00	61,20	62,42	63,67	64,95	66,24	
		1 Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,43	0,42	0,41	0,40	0,38	0,35	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,03	65,68	66,34	67,00	67,67	68,35	
		2 Meningkatnya keluarga yang berkualitas	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,24-61,30	62,35-62,45	63,50-63,60	64,70-64,80	65,88-65,95	66,95-67,05	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3 Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	82,18	83,83	85,50	87,21	88,96	90,73	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	20,0	21,00	21,00	22,00	22,00	23,00	Kepemudaan dan Olahraga
			2. Indeks Partisipasi Olahraga	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	
	3 (2.3)		1. Tingkat Kemiskinan	10,47	11,0-11,5	10,47-10,97	9,94-10,44	9,25-8,88	9,41-9,91	

	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat									
			2. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,40	2,37	2,35	2,32	2,30	2,27	
			3. Indeks Gini Rasio	0,250-0,240	0,239-0,234	0,233-0,228	0,227-0,222	0,217-0,215	0,210-0,205	
		1 Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	71	71.71	72.43	73.15	73.88	74.62	Sosial
		2 Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80,86	81,67	82,49	83,31	84,14	84,99	Pangan
		3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	14	16	18	19	21	23	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Rasio Penduduk Bekerja	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	Tenaga Kerja
		5 Meningkatkan kesejahteraan transmigran	Pendapatan Perkapita di Kawasan transmigrasi	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	Transmigrasi
MISI 3 Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata										
	(3.1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah		1. Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	4,10-4,15	4,64-4,69	5,18-5,23	5,72-5,77	6,75-6,80	7,25-7,30	

			2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEB)	17,20	17,68	18,15	18,62	19,09	19,57	
			3. Indeks Ekonomi Hijau (IEH)	72,78	73,89	75,01	76,12	77,24	78,35	
		1. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	1. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)	40,76	40,35	39,95	39,55	39,15	38,76	Pertanian
			2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	0,51	0,76	1,01	1,26	2,00	2,25	Pariwisata
			3. PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	0,66	0,67	0,67	0,68	0,70	0,71	
			4. Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	Perindustrian
			5. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,05	14,19	14,33	14,47	14,62	14,77	Perdagangan
		2. Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	1. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	18,75	19,80	21,37	23,48	26,10	29,25	Koperasi
			2. Rasio Kewirausahaan Daerah	0,026	0,027	0,028	0,030	0,031	0,032	Usaha Kecil dan Mikro
		3. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	50	55	60	60	65	70	Penanaman Modal

		4 Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,45	7,49	7,53	7,58	7,67	7,69	Unsur Keuangan (Pendapatan Daerah)
MISI 4 Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial										
	Meningkatkan 1 kelestarian lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,48	82,75	83,01	83,28	83,54	83,81	
		1 Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	Lingkungan Hidup
		2 Menurunnya Intensitas GRK menuju Net Zero Emission	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%):	28,00	29,05	31,00	33,00	33,88	34,00	
			2. Persentase Penurunan Emisi GRK: Kumulatif	565655,11	632143,26	709986,93	798376,67	884431,12	980969,40	
			3. Persentase Penurunan Emisi GRK: Tahunan	32,00	32,64	33,29	33,96	34,64	35,33	
		3 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan yang Tertangani	1. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	39,36	41,33	43,40	45,57	47,85	50,24	
			2. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	12,73	13,36	14,03	14,73	15,47	16,24	

	1	Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat		1. Indeks Reformasi Birokrasi	70,5	72,26	74,07	75,92	77,82	79,76	
				2. Indeks Inovasi Daerah (IID)	40,05	42,05	44,15	46,36	48,68	51,11	
		1	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Indeks Pelayanan Publik	3,54-3,60	3,63-3,69	3,73-3,79	3,82-3,88	3,92-3,98	4,01-4,02	Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi, Bagian PBJ dan Bagian Tata Pemerintahan)
				2. Indeks Reformasi Hukum	87,83	88,71	89,59	90,49	91,40	92,31	Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
				3. Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
				4. Indeks Kualitas Kebijakan	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Unggul	Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
				5. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3,38	3,4	3,43	3,46	3,5	3,53	Unsur Sekretariat Daerah
		2	Meningkatnya Tata Kelola Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,35	2,50	2,65	2,75	2,85	3,00	Komunikasi dan Informatika
		3	Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada	B	B	B	B	B	B	Kearsipan

			Lingkungan Pemerintah Daerah								
		4	Meningkatnya rofesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	74,68	74,81	74,86	74,92	74,95	75,00	Unsur Kepegawaian
		5	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD*	95,00	95,95	96,91	97,88	98,86	99,85	Unsur Sekretariat DPRD
		6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Unsur Perencanaan
		7	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,60	2,50	3,15	3,46	3,50	4,19	Statistik
		8	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	75	80	85	90	95	100	Unsur Penelitian & Pengembangan
		9	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	2,27	2,34	2,42	2,49	2,57	2,61	Unsur Keuangan (UMKM)
				2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80	81,2	82,42	83,65	84,91	86,18	Unsur Keuangan (BKAD)

			3. Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2	2,20	2,42	2,66	2,93	3,22	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,32	3,36	3,39	3,42	3,46	3,49	Unsur Pengawasan
		Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia	84,0	86,5	89,0	91,5	94,0	96,5	Unsur Kesbangpol

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang dapat ditindaklanjuti. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis, perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Di samping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Berikut uraian sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

1. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD

Pentahapan Pembangunan adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan Pembangunan dapat disajikan seperti pada table dibawah ini :

Tabel 3.7
Penahapan Pembangunan RPJMD Misi 1

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan						
	(1.1) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas						
		(1.1.1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas					
			Pemetaan kondisi jalan dan jembatan eksisting serta identifikasi wilayah dengan akses terbatas.	Penyusunan rencana teknis dan prioritas pembangunan/pemeliharaan berdasarkan konektivitas antar desa dan kecamatan.	Pembangunan dan peningkatan jalan strategis serta jembatan penghubung wilayah pertanian dan permukiman	Pemeliharaan berkala jalan dan jembatan serta peningkatan akses menuju kawasan sentra produksi dan layanan dasar.	Evaluasi dampak konektivitas terhadap mobilitas warga dan ekonomi lokal, serta perencanaan lanjutan wilayah yang belum terjangkau.
			Pemetaan irigasi rusak, sungai kritis (Palu, Bangga, Kulawi), dan lahan pertanian belum terairi.	Penyusunan rencana teknis pembangunan/rehabilitasi irigasi dan normalisasi sungai prioritas.	Pelaksanaan pembangunan irigasi baru, rehabilitasi jaringan rusak, dan normalisasi sungai	Pembangunan tanggul, drainase, dan pengendali banjir; pelibatan P3A dalam pemeliharaan.	Evaluasi efektivitas pengelolaan air dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi (P3A/GHIPA).
			Pemetaan desa dan kawasan permukiman yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi layak, khususnya di wilayah pascabencana dan relokasi.	Penyusunan rencana teknis pembangunan sarana berbasis pendekatan PAMSIMAS dan desain ruang publik desa.	Pembangunan sistem air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) serta ruang terbuka publik di desa sasaran	Penguatan kelembagaan pengelola (KPSP/KPP) dan pelatihan pengoperasian serta pemeliharaan sarana.	Evaluasi keberlanjutan layanan air minum, sanitasi, dan ruang publik serta replikasi ke desa prioritas lainnya.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
		(1.1.2) Meningkatkannya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan					
			Menyusun rencana pembangunan dan perbaikan rumah. Identifikasi lokasi dan penerima bantuan.	Pembangunan infrastruktur dasar untuk rumah baru. Penyaluran bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.	Pembangunan rumah terjangkau. Perbaikan rumah tidak layak huni.	Penyelesaian pembangunan rumah baru. Lanjutan perbaikan rumah tidak layak huni. Peningkatan fasilitas umum.	Evaluasi program pembangunan dan perbaikan. Perencanaan perluasan dan pengembangan program rumah layak huni.
			Penyusunan rencana penataan kawasan permukiman dan kajian kelayakan.	Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi). Peningkatan akses transportasi antar kawasan.	Penataan fisik permukiman dan fasilitas umum. Peningkatan layanan dasar pendukung (kesehatan, pendidikan).	Pengembangan ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Pengelolaan sampah dan drainase.	Evaluasi dampak penataan kawasan. Perencanaan pengembangan kawasan berkelanjutan.
		(1.1.3) Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau					
			Penyusunan rencana pengembangan angkutan umum dan pemetaan kebutuhan transportasi.	Pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi (terminal, halte, jalan).	Peningkatan jumlah armada angkutan umum dan peningkatan kualitas layanan.	Pengembangan sistem transportasi terintegrasi dan aksesibilitas ke daerah terpencil.	Evaluasi layanan angkutan umum dan perencanaan pengembangan jangka panjang.
			Penyusunan rencana perbaikan terminal dan penataan trayek kendaraan. Pemetaan lokasi terminal dan trayek yang perlu diperbaiki.	Renovasi dan pembangunan fasilitas terminal. Penataan ulang trayek kendaraan untuk efisiensi.	Peningkatan fasilitas terminal (keamanan, penerangan, fasilitas umum). Pengoptimalan trayek kendaraan.	Pengembangan sistem transportasi terintegrasi. Penambahan armada dan rute baru.	Evaluasi dan monitoring perbaikan terminal dan trayek. Perencanaan pengembangan jangka panjang.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
		(1.1.4) Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital					
			Perencanaan Strategi: Melakukan pemetaan wilayah, menyusun masterplan digitalisasi, dan menjalin kemitraan dengan penyedia layanan teknologi.	Pembangunan Infrastruktur: Membangun jaringan internet dasar (BTS, fiber optik) dan menyediakan akses internet di fasilitas publik.	Perluasan dan Literasi Digital: Memperluas jangkauan internet ke daerah terpencil dan melaksanakan pelatihan literasi digital untuk masyarakat.	Optimalisasi Layanan Digital: Mengintegrasikan sistem informasi desa dan membangun pusat komunitas belajar teknologi.	Evaluasi dan Keberlanjutan Program: Melakukan evaluasi menyeluruh, mendokumentasikan hasil, dan membentuk tim pengelola desa digital untuk kesinambungan program.
			Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Sistem: Melakukan identifikasi kebutuhan layanan publik yang paling dibutuhkan masyarakat serta menyusun rancangan sistem aplikasi dan website yang terintegrasi.	Pengembangan Platform Digital Awal: Membangun prototipe awal aplikasi dan website layanan publik, dimulai dari fitur-fitur dasar seperti informasi layanan, pengaduan online, dan formulir digital.	Integrasi dan Penyempurnaan Layanan: Mengintegrasikan berbagai layanan lintas OPD (seperti kependudukan, perizinan, bantuan sosial) ke dalam satu platform digital terpadu yang mudah diakses.	Uji Coba dan Pelatihan Pengguna: Melakukan uji coba sistem di beberapa kecamatan, sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi operator dan edukasi masyarakat terkait penggunaan aplikasi dan website.	Implementasi Penuh dan Evaluasi Layanan: Meluncurkan aplikasi dan website secara resmi untuk seluruh Kabupaten Sigi serta melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Pemetaan Kebutuhan dan Perencanaan: Melakukan asesmen kemampuan digital ASN serta menyusun kurikulum dan modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tiap perangkat daerah.	Pelatihan Dasar Teknologi Digital: Menyelenggarakan pelatihan dasar teknologi digital bagi seluruh ASN, mencakup penggunaan aplikasi perkantoran, email resmi, dan sistem administrasi berbasis digital.	Pelatihan Lanjutan dan Spesifik: Melaksanakan pelatihan lanjutan sesuai bidang kerja, seperti e-Government, manajemen data, dan layanan publik digital.	Sertifikasi dan Evaluasi Kompetensi: Memberikan sertifikasi kompetensi digital bagi ASN serta mengevaluasi efektivitas pelatihan terhadap kinerja dan pelayanan.	Pembentukan Tim Penggerak Transformasi Digital: Membentuk tim ASN terlatih di setiap OPD sebagai agen perubahan yang mendorong implementasi teknologi digital secara berkelanjutan.
			Merancang rencana kampanye edukasi digital yang selaras dengan program pembangunan infrastruktur TIK, dengan identifikasi target kelompok masyarakat dan media yang digunakan.	Mengembangkan konten edukatif berbasis lokal dalam bentuk video, infografis, dan tutorial, serta menyiapkan platform digital resmi untuk menyebarluaskan informasi layanan publik.	Mengadakan sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan layanan digital di desa-desa yang telah memiliki akses internet, mendukung adopsi teknologi yang telah dibangun	Menggerakkan komunitas lokal, guru, dan ASN sebagai agen literasi digital desa untuk memperluas jangkauan kampanye dan memperkuat penggunaan aplikasi layanan publik.	Melakukan evaluasi keterjangkauan dan penggunaan layanan digital masyarakat serta membentuk pusat informasi digital mandiri di desa sebagai warisan program berkelanjutan.

Tabel 3.8
Penahapan Pembangunan RPJMD Misi 2

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera						
	(2.1) Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing						
		(2.1.1) Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah					
			Penyusunan rencana integrasi nilai budaya lokal dan pendidikan karakter dalam kurikulum. Pemetaan potensi budaya lokal yang relevan untuk pendidikan.	Pengembangan materi pembelajaran berbasis budaya lokal dan karakter. Pelatihan guru dalam penerapan nilai budaya lokal dan pendidikan karakter.	Implementasi materi pembelajaran berbasis budaya lokal dan karakter di sekolah. Evaluasi awal pelaksanaan integrasi kurikulum.	Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran berbasis budaya lokal dan karakter. Penguatan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan karakter.	Evaluasi dan monitoring keberhasilan integrasi nilai budaya lokal dan pendidikan karakter. Penyusunan rencana pengembangan kurikulum jangka panjang.
			Penyusunan rencana program beasiswa Sigi Masagena. Identifikasi kriteria penerima beasiswa dan sumber dana.	Sosialisasi program beasiswa kepada masyarakat. Pembukaan pendaftaran dan seleksi penerima beasiswa.	Penyaluran beasiswa kepada penerima yang terpilih. Monitoring dan evaluasi penggunaan beasiswa.	Peningkatan jumlah penerima beasiswa dan perluasan cakupan. Pembinaan dan pendampingan penerima beasiswa selama masa studi.	Evaluasi dampak program beasiswa dan rencana pengembangan jangka panjang

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Penyusunan rencana peningkatan layanan pendidikan di wilayah terpencil. Pemetaan sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan infrastruktur dan kualitas pengajaran,	Pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan di wilayah terpencil (termasuk sekolah dasar dan menengah). Penyediaan sarana pendidikan seperti buku, alat tulis, dan perangkat pendukung pembelajaran	Pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan fokus pada keterampilan mengajar di daerah terpencil. Peningkatan akses internet dan teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (terutama di desa-desa yang sulit dijangkau).	Penyediaan beasiswa untuk siswa di daerah terpencil dan kurang terlayani. Pengembangan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan institusi swasta untuk mendukung pendidikan di wilayah tersebut.	Evaluasi keberhasilan program pendidikan di wilayah terpencil dan kurang terlayani. Penyusunan rencana pengembangan pendidikan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal Kabupaten Sigi.
			Penyusunan rencana pengembangan sekolah unggulan. Identifikasi sekolah potensial di jenjang SD, SMP, dan SMA di wilayah perbatasan.	Pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah unggulan. Penyediaan perangkat pembelajaran modern.	Pelatihan guru dan penguatan kurikulum. Kerjasama dengan institusi pendidikan di wilayah perbatasan	Peningkatan layanan pendidikan dan program ekstrakurikuler. Menyediakan jalur akses pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi.	Evaluasi dan monitoring program sekolah unggulan. Perencanaan pengembangan jangka panjang sekolah unggulan.
		(2.1.2) Meningkatnya literasi masyarakat					
			Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan Literasi :Melakukan pendataan wilayah minim akses literasi, serta memetakan potensi mitra lokal untuk mendukung pendirian perpustakaan desa dan taman baca.	Pengembangan Infrastruktur Literasi Dasar, perpustakaan desa dan taman baca komunitas di wilayah prioritas serta menyiapkan sarana pendukung seperti rak buku, koleksi bacaan, dan alat peraga.	Meluncurkan layanan perpustakaan keliling ke wilayah-wilayah terpencil untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki fasilitas literasi tetap.	Pemberdayaan Relawan dan Komunitas Literasi Lokal, relawan literasi, termasuk kader desa, guru, dan pemuda, untuk mengelola taman baca dan mengadakan kegiatan literasi secara berkala.	Melakukan evaluasi program literasi yang telah berjalan, memperluas cakupan ke desa lain, dan memperkuat kolaborasi antar perpustakaan desa dan komunitas baca.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Mengidentifikasi potensi kearifan lokal dan aktor literasi di setiap desa sebagai dasar perencanaan program literasi berbasis budaya lokal.	Mengembangkan dan mengintegrasikan materi literasi berbasis kearifan lokal ke dalam kegiatan sekolah, forum pemuda, dan aktivitas adat.	Melaksanakan pelatihan fasilitator literasi lokal dari kalangan guru, pemuda, dan tokoh adat untuk memperkuat kapasitas penyelenggara literasi masyarakat.	Mendorong pelaksanaan gerakan literasi masyarakat berbasis desa yang melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan literasi tematik dan partisipatif.	Mendokumentasikan praktik baik dan mereplikasi gerakan literasi berbasis lokal ke desa-desa lain untuk memperluas dampak dan keberlanjutan program.
		(2.1.3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
			Penyusunan rencana peningkatan layanan kesehatan dasar di wilayah terpencil. Pemetaan lokasi puskesmas dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan peningkatan.	Pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Pengadaan peralatan medis dan obat-obatan yang diperlukan di puskesmas.	Pelatihan tenaga medis untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah terpencil. Peningkatan akses transportasi untuk memudahkan pasien ke fasilitas kesehatan.	Peningkatan program kesehatan masyarakat (posyandu, vaksinasi, pemeriksaan rutin). Pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi (telemedicine) untuk daerah yang sulit dijangkau	Evaluasi dan monitoring efektivitas layanan kesehatan dasar. Penyusunan rencana pengembangan layanan kesehatan berkelanjutan di wilayah terpencil.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Penyusunan rencana program edukasi kesehatan dan PHBS. Pemetaan komunitas dan wilayah yang membutuhkan fokus edukasi kesehatan dan PHBS. Termasuk penyakit endemik	Sosialisasi dan kampanye PHBS kepada masyarakat melalui berbagai saluran (media, posyandu, sekolah, dll). Pengembangan materi edukasi kesehatan yang relevan dengan kondisi lokal (termasuk pencegahan penyakit endemik) Schistosomiasis	Pelatihan bagi kader kesehatan dan tenaga medis untuk meningkatkan keterampilan edukasi PHBS. Penyediaan fasilitas untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (misalnya, penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai).	Penerapan program PHBS di sekolah, puskesmas, dan komunitas dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Pemantauan dan evaluasi dampak program edukasi PHBS terhadap perilaku masyarakat.	Evaluasi hasil program edukasi kesehatan dan PHBS. Penyusunan rencana pengembangan jangka panjang untuk program PHBS di seluruh wilayah termasuk Pencegahan Schistosomiasis
			Penyusunan rencana program pencegahan dan penanganan stunting serta kesehatan ibu dan anak. Pemetaan wilayah rentan stunting.	Edukasi gizi dan perilaku hidup bersih kepada ibu hamil dan balita. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak di posyandu dan puskesmas.	Pelatihan kader kesehatan dan tenaga medis dalam deteksi stunting. Penyediaan sumber daya gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.	Peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kehamilan. Program gizi seimbang di sekolah dan komunitas.	Evaluasi dampak program stunting dan layanan kesehatan ibu dan anak. Penyusunan rencana pengembangan jangka panjang
			Penyusunan kebijakan dan peraturan daerah (Perda) terkait layanan kesehatan gratis. Pemetaan daerah sasaran berdasarkan tingkat kemiskinan. Pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan (puskesmas, peralatan medis)	Sosialisasi program kepada masyarakat. Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga medis.	Pelaksanaan layanan kesehatan gratis di fasilitas yang telah dipersiapkan. Pengawasan dan evaluasi program.	Kerjasama dengan lembaga swasta dan NGO. Penguatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.	Penguatan sistem pendanaan berkelanjutan. Perluasan akses layanan kesehatan ke daerah lain.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
		(2.1.3) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga					
			Menyusun kurikulum pelatihan kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Membentuk kelompok pemuda di tingkat desa dan kecamatan.	Implementasi proyek pembangunan daerah berbasis pemuda (mis. sarana air bersih). Kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta.	Implementasi proyek pembangunan daerah berbasis pemuda (mis. sarana air bersih). Kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta	Kerjasama dengan NGO, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Organisasi forum pemuda untuk berbagi pengalaman.	Evaluasi dampak program terhadap pembangunan daerah. Penyusunan rencana pendanaan berkelanjutan untuk program pemuda.
			Melakukan pemetaan kebutuhan dan kondisi sarana olahraga di setiap kecamatan sebagai dasar pembangunan dan revitalisasi fasilitas olahraga.	Membangun dan merehabilitasi sarana olahraga yang representatif dan dapat diakses oleh masyarakat di wilayah strategis dan padat penduduk.	Melaksanakan program pembinaan atlet usia dini dan komunitas olahraga melalui kerja sama dengan sekolah, klub lokal, dan organisasi kepemudaan.	Menyelenggarakan kompetisi olahraga tingkat desa dan kecamatan secara rutin sebagai ajang partisipasi dan pencarian bibit unggul.	Membangun sistem apresiasi dan pengembangan berkelanjutan bagi atlet dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi olahraga daerah.
	(2.2) Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender						
		(2.2.1) Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan identifikasi potensi perempuan di desa-desa untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi yang relevan dengan kondisi lokal.	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk perempuan, guna meningkatkan kemampuan dan akses mereka terhadap peluang ekonomi lokal.	Mendorong peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan kebijakan pembangunan lokal.	Mengoptimalkan peran perempuan dalam ekonomi lokal melalui fasilitasi akses ke pasar, pembiayaan, dan jaringan bisnis, serta memberikan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh perempuan.	embangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan, serta mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial perempuan di tingkat desa dan kabupaten.
			Melakukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui pembentukan dan pengaktifan kelompok kerja gender (Pokja PUG) di tingkat kabupaten dan perangkat daerah.	Menyusun dan mengintegrasikan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran program daerah melalui penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur pemerintah daerah dalam penerapan perspektif gender pada kebijakan dan layanan publik.	Mendorong penerapan layanan publik responsif gender di sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.	Melakukan evaluasi pelaksanaan PUG secara menyeluruh serta menyusun strategi keberlanjutan dan replikasi praktik baik PUG di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Membangun dan mengintegrasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan keberlanjutan perlindungan anak.	Mengembangkan dan memperkuat layanan ramah anak di fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan ruang publik lainnya, serta memastikan aksesibilitas layanan yang inklusif bagi anak-anak dengan berbagai latar belakang.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi aparatur pemerintah dan lembaga terkait dalam hal perlindungan anak, pengenalan hak-hak anak, dan pencegahan kekerasan terhadap anak.	Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan keluarga dan komunitas untuk mencegah kekerasan terhadap anak, serta melibatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.	Melakukan evaluasi terhadap implementasi Kabupaten Layak Anak dan penguatan perlindungan anak, serta menyusun langkah-langkah perbaikan dan pengembangan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah anak.
		(2.2.2) Meningkatnya keluarga yang berkualitas					
			Pendataan keluarga sasaran dan pemetaan isu utama terkait fungsi keluarga, pola asuh, dan kesehatan keluarga.	Edukasi dasar tentang pola asuh anak, komunikasi dalam keluarga, dan peran ayah/ibu dalam pengasuhan.	Pelatihan kesehatan keluarga, gizi seimbang, dan penguatan peran keluarga dalam pencegahan stunting dan kekerasan.	Penguatan kelembagaan kampung keluarga (Kampung KB) dan kader ketahanan keluarga tingkat desa.	Evaluasi dampak intervensi terhadap kualitas hidup keluarga dan pengintegrasian program keluarga ke dalam kebijakan pembangunan desa.
			Pendataan keluarga rentan dan pemetaan potensi usaha rumah tangga.	Pelatihan kewirausahaan dan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE).	Fasilitasi sarana produksi dan akses pembiayaan mikro keluarga.	Pendampingan produksi dan perluasan akses pasar produk rumah tangga.	Evaluasi dampak ekonomi keluarga dan penguatan jejaring usaha komunitas.
		(2.2.3) Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Menyusun rencana pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk administrasi kependudukan, termasuk penilaian kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Memulai pembaruan infrastruktur teknologi dasar untuk mendukung sistem digital yang lebih efisien, serta merancang modul pelatihan untuk petugas.	Melakukan implementasi pembaruan perangkat lunak untuk sistem administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi. Menyediakan pelatihan kepada petugas terkait penggunaan perangkat lunak baru serta cara pemrosesan data secara lebih efisien dan transparan.	Memperkuat infrastruktur teknologi informasi untuk memastikan konektivitas yang stabil dan aman. Melakukan uji coba dan pengujian sistem digital yang telah diterapkan untuk memastikan fungsionalitas dan kesiapan sistem dalam melayani masyarakat.	Mengintegrasikan sistem administrasi kependudukan dengan layanan digital lainnya untuk mempermudah akses data kependudukan oleh masyarakat. Meningkatkan aksesibilitas sistem dengan menyediakan platform online atau aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memproses data.	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem digital dalam administrasi kependudukan, mengevaluasi kemudahan akses, efisiensi layanan, dan kendala yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyempurnaan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan penilaian terhadap keterampilan dan kompetensi petugas administrasi untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan. Merancang rencana pelatihan rutin dan sertifikasi bagi petugas serta merencanakan pembangunan pusat layanan terpadu untuk administrasi kependudukan.	Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas administrasi secara berkala, dengan fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan publik. Memulai pembangunan fasilitas untuk layanan terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan di satu lokasi.	Menyelesaikan pembangunan layanan terpadu yang mencakup berbagai jenis administrasi kependudukan dalam satu titik layanan. Mengintegrasikan sistem digital yang memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.	Melanjutkan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas, dengan menambahkan pelatihan tentang layanan berbasis teknologi dan layanan masyarakat yang lebih responsif. Memperkuat pengawasan kualitas layanan di pusat layanan terpadu untuk memastikan standar pelayanan yang tinggi.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dan kualitas layanan terpadu, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyempurnaan terhadap sistem pelatihan, penguatan kapasitas petugas, dan pengoptimalan proses pelayanan terpadu untuk memastikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas bagi masyarakat.
		(2.2.4) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga					
			Menyusun kurikulum pelatihan kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Membentuk kelompok pemuda di tingkat desa dan kecamatan.	Implementasi proyek pembangunan daerah berbasis pemuda (mis. sarana air bersih). Kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta.	Implementasi proyek pembangunan daerah berbasis pemuda (mis. sarana air bersih). Kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta	Kerjasama dengan NGO, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Organisasi forum pemuda untuk berbagi pengalaman.	Evaluasi dampak program terhadap pembangunan daerah. Penyusunan rencana pendanaan berkelanjutan untuk program pemuda.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan kebutuhan dan kondisi sarana olahraga di setiap kecamatan sebagai dasar pembangunan dan revitalisasi fasilitas olahraga.	Membangun dan merehabilitasi sarana olahraga yang representatif dan dapat diakses oleh masyarakat di wilayah strategis dan padat penduduk.	Melaksanakan program pembinaan atlet usia dini dan komunitas olahraga melalui kerja sama dengan sekolah, klub lokal, dan organisasi kepemudaan.	Menyelenggarakan kompetisi olahraga tingkat desa dan kecamatan secara rutin sebagai ajang partisipasi dan pencarian bibit unggul.	Membangun sistem apresiasi dan pengembangan berkelanjutan bagi atlet dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi olahraga daerah.
	(2.3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat						
		(2.3.1) Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif					
			Pemetaan dan identifikasi kelompok masyarakat rentan di Kabupaten Sigi, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, KAT serta kebutuhan mereka dalam hal pendidikan, keterampilan, dan layanan sosial.	Penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan keterampilan untuk kelompok rentan di wilayah Kabupaten Sigi, termasuk keterampilan kerja, kewirausahaan, dan keterampilan teknis yang relevan dengan potensi lokal.	Memperluas akses pendidikan untuk kelompok rentan, terutama anak perempuan dan penyandang disabilitas, dengan menyediakan fasilitas pendidikan inklusif dan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin.	Meningkatkan akses terhadap layanan sosial dan kesehatan untuk masyarakat rentan, dengan membangun fasilitas layanan kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan memperkuat program bantuan sosial.	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan program pemberdayaan berdasarkan dampak yang terukur terhadap kesejahteraan kelompok rentan, serta memperkuat kebijakan dan kemitraan untuk memastikan keberlanjutan program.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan infrastruktur sosial yang mendukung inklusi sosial di Kabupaten Sigi, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang aksesibel bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan kurang berkembang.	Membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, klinik, dan posyandu, dengan memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah yang sulit dijangkau, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar.	Meningkatkan dan membangun fasilitas pendidikan yang ramah akses, seperti sekolah inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang komputer dan perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.	Memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat kegiatan sosial dan ekonomi, serta memastikan sarana transportasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.	elakukan evaluasi terhadap infrastruktur sosial yang telah dibangun, mengidentifikasi kekurangan dan melakukan penyempurnaan untuk memastikan bahwa semua fasilitas (kesehatan, pendidikan, transportasi) dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat
		(2.3.2) Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau					
			Identifikasi lahan pertanian yang terdampak bencana dan potensi untuk pencetakan sawah baru, merancang program rehabilitasi, penyediaan sarana produksi, serta penguatan lumbung pangan desa untuk mendukung ketahanan pangan.	Melaksanakan rehabilitasi lahan pertanian terdampak dan memulai pencetakan sawah baru di area potensial, serta menyediakan sarana produksi seperti benih unggul dan pupuk, sambil memberikan pelatihan kepada petani.	Memberikan pendampingan teknis kepada petani dalam mengelola lahan dan hasil pertanian, serta memperkuat pengelolaan lumbung pangan desa untuk penyimpanan cadangan pangan lokal yang dapat digunakan saat diperlukan.	Meningkatkan infrastruktur pertanian dan mendorong petani untuk melakukan diversifikasi tanaman pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, sambil memperkuat sistem distribusi dan pasar lokal.	Melakukan evaluasi terhadap program rehabilitasi dan pencetakan sawah baru, memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan pengelolaan cadangan pangan yang efisien.
		(2.3.3) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan survei kebutuhan masyarakat dan merancang kurikulum pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta literasi digital yang relevan dengan potensi lokal.	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dasar, kewirausahaan, dan literasi digital untuk masyarakat desa serta memperkenalkan platform digital untuk akses informasi pembangunan.	Melakukan pelatihan lanjutan dalam kewirausahaan dan manajemen usaha serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan	Mendorong pembentukan kelompok usaha mandiri, memperkuat jejaring pasar produk lokal, dan menjamin keberlanjutan program melalui kebijakan pemerintah daerah	Mengevaluasi efektivitas peningkatan kapasitas pemberdayaan desa berdasarkan umpan balik dan kebutuhan masyarakat.
			Analisis kebutuhan infrastruktur dan usaha desa, serta merencanakan pembangunan infrastruktur dan penguatan BUMDesa.	Membangun infrastruktur dasar, mendirikan BUMDesa, dan memulai kolaborasi dengan sektor swasta untuk akses modal dan pasar.	Memperkuat kapasitas BUMDesa dan usaha masyarakat melalui pelatihan, serta memperluas kemitraan dengan sektor swasta.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan kinerja BUMDesa, serta memperkuat kolaborasi untuk akses modal dan pasar	Evaluasi Capaian kemandirian ekonomi desa melalui BUMDesa yang efektif, memastikan keberlanjutan program, dan memperkuat akses pasar.
		(2.3.4) Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan riset untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja di Kabupaten Sigi. Menyusun rencana program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi yang relevan, serta mengidentifikasi sektor industri yang berpotensi menyerap tenaga kerja.	Menyusun kurikulum pelatihan yang berbasis pada kebutuhan pasar dan meningkatkan keterampilan sesuai dengan standar industri. Membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lokal dan nasional untuk menciptakan peluang magang dan penyerapan tenaga kerja.	Melaksanakan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi di berbagai bidang, seperti teknologi, manufaktur, pariwisata, dan pertanian, sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan pasar kerja. Memberikan pelatihan dengan metode praktis dan berbasis industri.	Memperluas peluang magang dan penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama yang lebih intens dengan perusahaan dan industri besar di Kabupaten Sigi. Mengoptimalkan program magang untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja dalam dunia industri.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dan magang dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan untuk menanggapi perubahan kebutuhan pasar kerja dan memperkuat konektivitas antara pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja.
		(2.3.5) Meningkatnya kesejahteraan transmigran					
			survei untuk mengidentifikasi potensi lahan yang cocok untuk komoditas unggulan. Petani transmigran akan diberikan pelatihan dasar mengenai teknik budidaya dan pengolahan hasil pertanian. Pembentukan kelompok tani dan pemetaan infrastruktur dasar seperti jalan tani dan irigasi juga menjadi prioritas	memberikan penyuluhan teknis lebih lanjut tentang budidaya modern dan sistem irigasi hemat air. Pembangunan infrastruktur pertanian dimulai, dan akses permodalan melalui koperasi atau lembaga keuangan mikro difasilitasi untuk mendukung operasional petani.	pelatihan lanjutan tentang pengelolaan pascapanen dan pengolahan produk dilakukan. Teknologi pertanian lebih efisien diperkenalkan untuk meningkatkan hasil produksi. Petani juga didorong untuk memperoleh sertifikasi produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi	memperkenalkan petani pada strategi pemasaran, termasuk penggunaan platform digital dan penajakan kemitraan dengan pasar regional. Sistem distribusi yang efisien dikembangkan untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal	Melakukan evaluasi terhadap hasil program untuk mengukur dampaknya. Berdasarkan evaluasi, dilakukan penyempurnaan terhadap model budidaya, pemasaran, dan distribusi. Kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan tinggi diperluas untuk

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
							mendukung keberlanjutan dan inovasi
			Identifikasi potensi usaha lokal yang dapat dikembangkan, seperti industri pengolahan hasil pertanian (misalnya: olahan jagung, kakao) dan kerajinan tangan berbasis bahan lokal. Pemerintah akan memulai dengan pelatihan dasar kewirausahaan bagi transmigran dan mendirikan pusat pelatihan usaha. Pemetaan potensi pasar dan kolaborasi dengan BUMDes serta pelaku usaha di Biromaru juga dimulai untuk membangun jaringan kemitraan.	pelatihan keterampilan lebih lanjut, termasuk teknik pengolahan produk, pembuatan kerajinan, dan layanan jasa lokal. Pendampingan usaha diberikan kepada pelaku usaha baru untuk membantu mereka dalam menyusun rencana bisnis, mengelola keuangan, dan memulai usaha secara mandiri. Selain itu, akses ke permodalan melalui koperasi dan lembaga keuangan mikro difasilitasi agar usaha dapat berkembang	penguatan infrastruktur usaha seperti lokasi produksi, peralatan, dan distribusi menjadi prioritas. Pemerintah bersama BUMDes mendirikan fasilitas produksi dan penyimpanan produk. Program pemasaran baik melalui media sosial maupun pasar fisik akan diperkenalkan, serta memfasilitasi produk-produk lokal untuk dijual di pasar regional dan melalui platform digital	ekspansi pasar dengan memanfaatkan kemitraan dengan pelaku usaha lokal dan regional. Petani dan pengusaha lokal didorong untuk mengembangkan produk mereka dan menjualnya di pasar yang lebih luas, baik di Sigi Biromaru maupun secara daring. Kerjasama dengan sektor swasta dan pengembangan pasar berbasis teknologi digital juga difasilitasi untuk memperluas jangkauan pemasaran	evaluasi terhadap perkembangan usaha dilakukan untuk mengukur dampak peningkatan pendapatan transmigran. Berdasarkan hasil evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan kapasitas industri pengolahan, model usaha dilakukan, termasuk inovasi produk, efisiensi distribusi, dan penguatan jaringan pemasaran. Kolaborasi kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan usaha jangka panjang

Tabel 3.9
Penahapan Pembangunan RPJMD Misi 3

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
3	Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata						
	(3.1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah						
		(3.1.1) Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah					
			Urusan Perikanan				
			Pendataan pelaku dan potensi perikanan, serta pelatihan dasar budidaya.	Penyediaan sarana produksi dan peningkatan kapasitas teknis pembudidaya.	Penerapan teknologi budidaya dan penangkapan ramah lingkungan.	Penguatan kelembagaan usaha dan pengembangan akses pasar lokal.	Hilirisasi produk perikanan dan perluasan pemasaran berbasis digital.
			Pendataan pelaku budidaya ikan air tawar dan pemetaan potensi kolam/empang desa, serta kebutuhan sarana produksi dasar seperti benih, pakan, dan peralatan sederhana.	Penyediaan sarana produksi secara bertahap (melalui program bantuan dan swadaya) dan pelatihan teknis budidaya ikan air tawar berbasis lokal (lele, nila, patin).	Introduksi teknologi budidaya ramah lingkungan seperti bioflok, sistem kolam terpal, dan pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan alternatif.	Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) untuk meningkatkan efisiensi produksi, akses bahan baku, dan distribusi hasil panen.	Evaluasi hasil produksi, pelatihan pengolahan hasil perikanan (abon, kerupuk, fillet), dan fasilitasi sertifikasi mutu untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
			Pendataan pelaku usaha perikanan, pemetaan rantai pasok, dan sosialisasi program kemitraan dan koperasi.	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi perikanan serta pelatihan manajemen usaha dan pemasaran.	Fasilitasi perizinan usaha dan legalitas produk hasil perikanan serta peningkatan akses ke lembaga pembiayaan.	Pengembangan kemitraan dengan pelaku industri, hotel, restoran, dan pasar lokal/regional.	Evaluasi kinerja kelembagaan, penguatan sistem perlindungan usaha, dan ekspansi akses pasar berbasis digital.
			Urusan Pariwisata				

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Identifikasi dan pemetaan potensi wisata serta kesiapan sosial masyarakat.	Perencanaan dan penyusunan desain kawasan wisata terpadu.	Pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung destinasi.	Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penguatan usaha akomodasi dan kuliner.	Promosi, pemasaran digital, dan evaluasi dampak ekonomi terhadap PDRB.
			Pendataan dan pemetaan pelaku UMKM serta potensi lokal.	Pelatihan teknis, manajerial, dan peningkatan kualitas produk.	Fasilitasi akses permodalan dan peningkatan kapasitas produksi.	Digitalisasi promosi dan perluasan pasar.	Evaluasi, pendampingan lanjutan, dan penguatan skala usaha.
			Urusan pertanian				
			Pemetaan komoditas unggulan per kecamatan berdasarkan agroklimate dan data produksi, Identifikasi lahan potensial dan kelompok tani yang aktif.	Penetapan kawasan sentra komoditas (padi, jagung, cabai, kakao, kopi, dll). Penyusunan rencana pengembangan dan zonasi komoditas di tingkat desa.	Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan teknis budidaya spesifik komoditas. Fasilitasi bantuan sarana produksi dan perluasan lahan tanam komoditas unggulan.	Pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, dan gudang hasil panen. Penguatan kelembagaan petani dan pembentukan koperasi komoditas berbasis wilayah.	Evaluasi produktivitas dan dampak ekonomi kawasan sentra komoditas. Replikasi model pengembangan ke kecamatan potensial lainnya dan integrasi dengan program hilirisasi.
			Identifikasi komoditas prioritas dan kebutuhan sarana produksi per wilayah. Pendataan petani dan lahan serta sosialisasi teknologi budidaya ramah lingkungan	Penyaluran sarana produksi (benih unggul, pupuk, alat pertanian sederhana). Pelatihan dasar budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Penerapan teknologi tepat guna (mulsa, irigasi tetes, sistem tanam jajar legowo, dll). Demonstrasi plot (demplot) pertanian ramah lingkungan di tiap kecamatan	Pendampingan intensif budidaya, pengendalian hama terpadu, dan manajemen lahan. Evaluasi peningkatan hasil dan kualitas produk pertanian	Penguatan kapasitas pascapanen dan penanganan mutu hasil (grading, packaging). Skulasi praktik terbaik ke wilayah lain serta integrasi ke pengembangan agribisnis desa

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Identifikasi tanaman tua/rusak dan pemetaan lokasi prioritas peremajaan kakao, kopi, dan hortikultura	Pengadaan dan distribusi benih/bibit unggul serta pelatihan teknik peremajaan dan sambung pucuk	Implementasi peremajaan tanaman dan intensifikasi lahan melalui praktik budidaya baik (GAP)	Pengembangan varietas unggul tanaman pangan dan hortikultura sesuai kondisi agroklimat lokal	Evaluasi hasil peremajaan, pelatihan lanjutan, dan perluasan ke wilayah lain berbasis keberhasilan
			Pendataan kelembagaan tani, sosialisasi pentingnya kelompok tani, koperasi, dan STDB di wilayah sentra pertanian	Pembentukan atau reaktivasi kelompok tani dan gapoktan, legalisasi kelembagaan, serta pelatihan manajemen dasar	Fasilitasi akses pembiayaan usaha tani (KUR, dana bergulir) dan asuransi pertanian (AUTP)	Penguatan tata kelola koperasi tani dan pengembangan kemitraan dengan lembaga pasar dan keuangan	Fasilitasi penerbitan STDB per komoditas dan integrasi kelembagaan ke sistem pembangunan pertanian daerah
			Identifikasi dan pemetaan lahan pertanian produktif serta kajian potensi alih fungsi lahan	Penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi perlindungan usaha tani dan lahan pertanian berkelanjutan	Penetapan regulasi daerah (Perda/Perbup) dan penetapan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Sosialisasi dan integrasi regulasi ke dalam perencanaan desa, kecamatan, dan OPD teknis terkait	Pengawasan implementasi regulasi dan evaluasi perlindungan lahan serta perlindungan hak usaha tani secara periodik

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Persiapan dan Perencanaan: Menganalisis kebutuhan peternak dan merancang kurikulum sekolah peternakan dan Mendirikan infrastruktur Sekolah Peternakan Rakyat di beberapa kecamatan	Pelatihan Awal dan Implementasi: Menyelenggarakan pelatihan dasar untuk peternak dan Memulai kelas pertama di sekolah peternakan dan memberikan pendampingan teknologi.	Penguatan dan Perluasan: Memperluas sekolah peternakan dan memperkenalkan pelatihan lanjutan serta teknologi peternakan baru.	Penguatan dan Perluasan: Memperluas sekolah peternakan dan memperkenalkan pelatihan lanjutan serta teknologi peternakan baru.	Evaluasi dan Peningkatan: Melakukan evaluasi program dan memperbaiki kurikulum berdasarkan umpan balik lapangan.dan Memastikan kelangsungan program dengan dukungan pemerintah dan masyarakat
			Melakukan pemetaan terhadap produk unggulan Kabupaten Sigi dan menentukan standar mutu yang dibutuhkan untuk setiap jenis produk. Menyusun rencana peningkatan kualitas produk dengan merujuk pada standar nasional dan internasional	Menyelenggarakan pelatihan kepada produsen lokal mengenai penerapan standar kualitas, manajemen produksi yang efisien, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Fokus pada penguatan kapasitas produsen dalam menjaga konsistensi kualitas produk	Membantu produsen lokal untuk memperoleh sertifikasi produk yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan	Membangun sistem pengawasan kualitas yang terintegrasi untuk memastikan produk unggulan selalu memenuhi standar mutu. Melakukan audit berkala terhadap produk yang telah disertifikasi dan memastikan kelancaran penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam seluruh proses produksi	Melakukan evaluasi terhadap peningkatan kualitas dan penerapan standar produk yang telah dilakukan, serta dampaknya terhadap daya saing produk di pasar. Memperkuat promosi produk berkualitas tinggi dan meningkatkan hubungan dengan pasar internasional melalui sertifikasi dan teknologi ramah lingkungan yang digunakan

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan identifikasi terhadap produk berbasis alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk turunan, seperti olahan makanan, kosmetik, atau bahan baku industri. Menyusun rencana diversifikasi produk dengan fokus pada peningkatan nilai tambah dan eksplorasi pasar baru	Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi pelaku usaha lokal mengenai teknik inovatif dalam pengolahan produk berbasis alam, termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Memperkenalkan konsep R&D (riset dan pengembangan) untuk menciptakan varian produk baru	Mengembangkan prototipe produk turunan berbasis alam, seperti olahan makanan atau kosmetik, dan melakukan uji pasar untuk mengukur daya tarik produk terhadap konsumen. Menyempurnakan produk berdasarkan feedback pasar untuk memastikan kesesuaian dengan preferensi konsumen	Meningkatkan skala produksi untuk produk turunan yang telah terbukti diterima pasar. Membangun kemitraan dengan industri besar atau distributor untuk memperluas jangkauan pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional, serta memperkenalkan produk ke berbagai platform e-commerce	Melakukan evaluasi terhadap dampak diversifikasi produk terhadap perekonomian lokal dan daya saing produk. Memperluas pasar dengan memanfaatkan jaringan distribusi internasional, serta mengembangkan lebih banyak varian produk berdasarkan tren pasar dan inovasi terbaru
			Urusan Perindustrian				

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan terhadap produk unggulan Kabupaten Sigi dan menentukan standar mutu yang dibutuhkan untuk setiap jenis produk. Menyusun rencana peningkatan kualitas produk dengan merujuk pada standar nasional dan internasional	Menyelenggarakan pelatihan kepada produsen lokal mengenai penerapan standar kualitas, manajemen produksi yang efisien, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Fokus pada penguatan kapasitas produsen dalam menjaga konsistensi kualitas produk	Membantu produsen lokal untuk memperoleh sertifikasi produk yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan	Membangun sistem pengawasan kualitas yang terintegrasi untuk memastikan produk unggulan selalu memenuhi standar mutu. Melakukan audit berkala terhadap produk yang telah disertifikasi dan memastikan kelancaran penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam seluruh proses produksi	Melakukan evaluasi terhadap peningkatan kualitas dan penerapan standar produk yang telah dilakukan, serta dampaknya terhadap daya saing produk di pasar. Memperkuat promosi produk berkualitas tinggi dan meningkatkan hubungan dengan pasar internasional melalui sertifikasi dan teknologi ramah lingkungan yang digunakan
			Melakukan identifikasi terhadap produk berbasis alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk turunan, seperti olahan makanan, kosmetik, atau bahan baku industri. Menyusun rencana diversifikasi produk dengan fokus pada peningkatan nilai tambah dan eksplorasi pasar baru	Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi pelaku usaha lokal mengenai teknik inovatif dalam pengolahan produk berbasis alam, termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Memperkenalkan konsep R&D (riset dan pengembangan) untuk menciptakan varian produk baru	Mengembangkan prototipe produk turunan berbasis alam, seperti olahan makanan atau kosmetik, dan melakukan uji pasar untuk mengukur daya tarik produk terhadap konsumen. Menyempurnakan produk berdasarkan feedback pasar untuk memastikan kesesuaian dengan preferensi konsumen	Meningkatkan skala produksi untuk produk turunan yang telah terbukti diterima pasar. Membangun kemitraan dengan industri besar atau distributor untuk memperluas jangkauan pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional, serta memperkenalkan produk ke berbagai platform <i>e-commerce</i>	Melakukan evaluasi terhadap dampak diversifikasi produk terhadap perekonomian lokal dan daya saing produk. Memperluas pasar dengan memanfaatkan jaringan distribusi internasional, serta mengembangkan lebih banyak varian produk berdasarkan tren pasar dan inovasi terbaru

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan riset pasar domestik dan internasional untuk mengidentifikasi peluang dan tren yang relevan dengan produk unggulan Kabupaten Sigi. Menyusun strategi pemasaran digital, termasuk pembuatan platform e-commerce dan konten promosi yang menarik untuk memperkenalkan produk ke pasar global	Menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku usaha lokal tentang pemasaran digital, penggunaan media sosial, serta optimasi platform <i>e-commerce</i> untuk meningkatkan visibilitas produk. Memberikan bimbingan terkait branding produk yang dapat menarik perhatian pasar internasional	Meningkatkan partisipasi dalam pameran domestik dan internasional untuk memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Sigi kepada audiens yang lebih luas. Mengembangkan kemitraan dengan jaringan distribusi dan sektor swasta untuk memperluas akses pasar dan memperkuat saluran distribusi produk unggulan	Meningkatkan kerjasama dengan distributor besar dan platform internasional untuk memperluas jangkauan pasar. Menyusun kampanye pemasaran yang terintegrasi untuk mempromosikan produk unggulan di berbagai kanal distribusi, baik online maupun <i>offline</i>	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi pemasaran dan promosi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap peningkatan penjualan produk. Memperbaiki dan mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan hasil evaluasi untuk mengakses lebih banyak pasar domestik dan internasional
			Urusan Perdagangan				

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan potensi produk unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan lokal. Menyusun perencanaan pengembangan kapasitas produksi dan pengolahan produk unggulan serta strategi distribusi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk.	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi pelaku usaha lokal dalam pengolahan produk unggulan, manajemen usaha, dan standar kualitas produk. Membantu pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.	Membangun kemitraan dengan industri pengolahan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendukung proses hilirisasi produk unggulan daerah. Menyusun skema kerjasama antara pelaku usaha lokal dengan industri besar dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan.	Meningkatkan infrastruktur distribusi, seperti jaringan logistik dan transportasi, untuk memastikan produk unggulan dapat dengan mudah dipasarkan dan didistribusikan ke pasar domestik maupun internasional. Mengoptimalkan kanal distribusi melalui kemitraan dengan pengecer dan platform e-commerce.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengolahan dan distribusi produk unggulan serta melakukan perbaikan untuk meningkatkan daya saing produk. Memperluas pasar dengan melakukan promosi aktif, membuka akses ke pasar internasional, dan memperkenalkan produk unggulan ke berbagai platform pemasaran global.
			Menyusun rencana strategis pemasaran dan branding produk unggulan Kabupaten Sigi, termasuk identifikasi produk unggulan, pembuatan identitas merek daerah, dan pemetaan pasar domestik serta internasional. Melakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen dan potensi pasar.	Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku usaha lokal tentang pemasaran digital, branding produk, dan strategi penetrasi pasar global. Membantu pelaku usaha memahami cara memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk memperkenalkan produk unggulan mereka.	Meningkatkan pemasaran produk unggulan melalui platform digital, seperti situs web, media sosial, dan marketplace online. Memperkuat keberadaan online dengan konten yang menarik dan mengoptimalkan SEO untuk menjangkau pasar yang lebih luas.	Mengikuti pameran dan expo baik domestik maupun internasional untuk memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Sigi. Membangun kemitraan dengan distributor dan pengecer di pasar domestik dan internasional untuk memperluas jangkauan pasar.	Melakukan evaluasi terhadap dampak pemasaran dan branding terhadap peningkatan penjualan produk unggulan. Memperkuat citra merek daerah melalui kampanye yang konsisten dan mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk unggulan Kabupaten Sigi.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
		(3.1.2) Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian					
			Melakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk koperasi terkait manajemen bisnis, keuangan, dan pemasaran produk. Menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi aktif dan pengembangan program koperasi merah putih	Menyelenggarakan pelatihan dasar untuk pengelola koperasi mengenai manajemen bisnis dan keuangan, serta memperkenalkan teknologi yang mendukung efisiensi operasional, seperti aplikasi akuntansi dan platform pemasaran digital	Memberikan pelatihan lanjutan mengenai pemasaran produk, pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, dan strategi pengembangan pasar. Mendorong koperasi untuk mengimplementasikan praktik terbaik dalam operasional mereka	Melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan dan memberikan pendampingan intensif kepada koperasi yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan operasional dan daya saing. Memberikan feedback dan solusi berbasis kebutuhan spesifik koperasi	Menghubungkan koperasi dengan sektor swasta dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kemitraan dan peluang bisnis. Membantu koperasi mengembangkan jaringan distribusi dan akses pasar yang lebih luas
			Melakukan pemetaan kebutuhan pembiayaan koperasi dan mengidentifikasi lembaga keuangan, sektor swasta, dan pemerintah yang dapat menjadi mitra potensial dalam menyediakan pembiayaan yang terjangkau	Membangun program pembiayaan yang terjangkau untuk koperasi, seperti pinjaman dengan bunga rendah atau akses ke dana hibah. Memfasilitasi kerjasama antara koperasi, sektor swasta, dan pemerintah untuk mendukung pembiayaan dan memperkuat jaringan distribusi.	Memberikan insentif bagi koperasi yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan pengembangan pasar. Menyediakan akses modal kerja untuk koperasi agar mereka dapat mengembangkan produk dan memperluas pasar, dengan dukungan dari mitra sektor swasta dan lembaga keuangan	Memperkuat kolaborasi dengan bank, lembaga keuangan mikro, dan sektor swasta untuk memberikan pembiayaan yang lebih fleksibel bagi koperasi. Menyusun program pelatihan untuk koperasi agar dapat mengakses pembiayaan secara efektif dan efisien	Melakukan evaluasi terhadap akses pembiayaan yang telah diberikan kepada koperasi dan memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga keuangan dan sektor swasta lainnya. Mengintegrasikan koperasi ke dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas dengan kemitraan jangka panjang

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sigi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam manajemen usaha, pemasaran digital, dan akses permodalan. Menyusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM untuk meningkatkan kapasitas mereka.	Menyelenggarakan pelatihan dasar mengenai manajemen usaha yang meliputi perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran. Memberikan pembekalan tentang pentingnya pemasaran digital dan cara memanfaatkan platform online untuk memperluas pasar	Memberikan pendampingan langsung kepada UMKM dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam penyusunan proposal untuk mendapatkan permodalan. Memfasilitasi akses UMKM ke lembaga keuangan atau investor untuk mendukung pengembangan usaha mereka	Melakukan pelatihan lanjutan mengenai inovasi produk dan penggunaan teknologi dalam operasional usaha, seperti penggunaan perangkat lunak untuk manajemen inventaris dan pemasaran online. Mendorong UMKM untuk berinovasi dalam produk dan layanan mereka agar tetap kompetitif	Melakukan evaluasi terhadap akses pembiayaan yang telah diberikan kepada koperasi dan memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga keuangan dan sektor swasta lainnya. Mengintegrasikan koperasi ke dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas dengan kemitraan jangka panjang

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang bagi UMKM dalam sektor distribusi, serta menyusun rencana kemitraan dengan retail besar dan platform digital. Menyusun strategi untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.	Menyelenggarakan pelatihan bagi UMKM tentang cara memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka, seperti pembuatan toko online, penggunaan media sosial, dan pemasaran digital. Membekali pelaku UMKM dengan keterampilan untuk mengoptimalkan penjualan <i>online</i>	Membangun dan mengembangkan platform <i>e-commerce</i> lokal untuk memfasilitasi UMKM dalam memasarkan produk mereka secara online. Menyediakan sistem pembayaran yang aman dan mudah diakses oleh pelaku usaha dan konsumen. Menghubungkan UMKM dengan retail besar dan jaringan distribusi.	Memfasilitasi partisipasi UMKM dalam pameran produk lokal, baik secara fisik maupun virtual, untuk memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas. Membangun kemitraan dengan retail besar untuk meningkatkan saluran distribusi produk unggulan UMKM ke pasar nasional dan internasional	
		(3.1.3) Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan kajian potensi wilayah dan analisis kebutuhan infrastruktur (transportasi, energi, komunikasi) serta pemetaan kawasan industri berbasis sektor pertanian dan pariwisata. Menyusun perencanaan jangka panjang dan regulasi yang mendukung pengembangan kawasan industri.	Menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dan mengidentifikasi sumber pendanaan dari sektor swasta dan lembaga keuangan. Memulai diskusi dengan investor dan sektor swasta untuk merancang insentif pajak dan kemudahan perizinan.	Memulai pembangunan infrastruktur dasar, seperti peningkatan jalan utama, penyediaan fasilitas energi (listrik dan air), serta penguatan jaringan komunikasi di kawasan industri yang dipilih. Mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak swasta untuk pendanaan dan implementasi proyek	Mengembangkan kawasan industri berbasis keunggulan wilayah (pertanian dan pariwisata) dengan membangun fasilitas pendukung seperti gudang, pusat distribusi, dan fasilitas pariwisata. Menyediakan pelatihan untuk pengelola kawasan industri dan masyarakat setempat.	Menyelesaikan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta memastikan kelancaran operasional kawasan industri. Melakukan evaluasi terhadap dampak pembangunan terhadap perekonomian lokal, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja, serta mempersiapkan rencana pengelolaan jangka panjang kawasan industri

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan kajian terhadap peraturan dan kebijakan perizinan yang ada, serta menyusun rencana perbaikan untuk mempermudah proses perizinan dan meningkatkan transparansi regulasi. Membentuk tim khusus untuk menyusun kebijakan terkait layanan perizinan satu pintu (<i>One-Stop Service</i>) dan insentif fiskal.	Menyusun dan mengesahkan kebijakan perizinan yang lebih mudah dan transparan. Membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung sistem perizinan satu pintu (<i>One-Stop Service</i>) dan mempersiapkan platform digital untuk akses layanan secara online.	Meluncurkan layanan perizinan satu pintu (<i>One-Stop Service</i>) yang terintegrasi dengan sistem digital untuk mempermudah proses perizinan. Menyediakan pelatihan kepada aparatur pemerintah dan pelaku usaha tentang prosedur baru dan cara mengakses layanan tersebut.	Melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat, pelaku usaha, dan calon investor mengenai kemudahan perizinan dan insentif fiskal yang tersedia. Menyebarluaskan informasi tentang potensi investasi daerah melalui seminar, pameran, dan kampanye digital.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan perizinan satu pintu dan kebijakan yang diterapkan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Memperkuat kerjasama dengan lembaga investasi nasional dan regional untuk menarik lebih banyak investasi ke Kabupaten Sigi.
		(3.1.4) Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Identifikasi Potensi Sumber Pendapatan Dengan Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi potensi sumber pendapatan daerah, termasuk pajak daerah, retribusi, dan PAD lainnya yang belum terkelola secara maksimal.	Pemetaan dan Penguatan Sistem Pengelolaan Dengan Meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan penerapan teknologi untuk mempermudah pemantauan dan pengumpulan, serta memperbaiki sistem administrasi PAD.	Implementasi Kebijakan Pengoptimalan Pendapatan Dengan Menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendukung optimalisasi sumber pendapatan, termasuk revisi regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Sosialisasi Dengan Melakukan pelatihan bagi aparatur daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembayaran pajak dan retribusi.	Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan Dengan Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan sistem yang telah diterapkan, serta melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.
			Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Dengan Merancang sistem teknologi yang terintegrasi untuk pemungutan, pelaporan, dan pengawasan pendapatan daerah, serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.	Implementasi Sistem dan Pelatihan Pengguna Dengan Menerapkan sistem berbasis teknologi pada beberapa unit pemerintah daerah untuk pemungutan dan pelaporan pendapatan, serta melaksanakan pelatihan bagi aparat untuk memastikan pemahaman dan penguasaan sistem.	Penguatan Fitur Pengawasan dan Transparansi Dengan Menambahkan fitur pengawasan yang memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap pencapaian target pendapatan serta meningkatkan transparansi sistem dengan akses yang lebih luas bagi masyarakat.	Evaluasi dan Optimalisasi Sistem Dengan Melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem dan mengoptimalkan fitur untuk mengurangi risiko kebocoran serta meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan pengawasan.	Penyempurnaan dan Keberlanjutan Pengelolaan Pendapatan Dengan Menyempurnakan sistem dengan fitur tambahan yang mendukung analisis dan evaluasi kinerja, serta memastikan keberlanjutan sistem dengan pembaruan teknologi dan peningkatan kapasitas aparat.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Pemetaan Kebutuhan Sosialisasi dan Penyusunan Program Dengan Melakukan riset untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dan potensi kontribusi terhadap pendapatan daerah. Menyusun program sosialisasi yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.	Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat Dengan Menyelenggarakan program sosialisasi yang melibatkan berbagai saluran komunikasi, seperti seminar, media sosial, dan kegiatan langsung, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan.	Kolaborasi dengan Sektor Swasta Dengan Meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta melalui kemitraan yang mendukung kontribusi mereka dalam pembangunan daerah, serta memperkenalkan insentif untuk mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan.	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dengan Mengaktifkan forum-forum masyarakat untuk memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan daerah, serta memastikan masyarakat terlibat langsung dalam proses pengawasan agar penggunaan anggaran lebih akuntabel.	Evaluasi dan Penyempurnaan Program Dengan Melakukan evaluasi terhadap dampak sosialisasi dan kolaborasi yang telah dilakukan, serta melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
		(3.1.4) Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Sektoral					
			Melakukan penilaian menyeluruh terhadap infrastruktur yang ada, seperti fasilitas transportasi, pengolahan hasil, dan teknologi yang digunakan dalam sektor perikanan budidaya dan pertanian hijau. Menyusun rencana peningkatan yang mencakup kebutuhan teknis, anggaran, dan waktu pelaksanaan.	Memperbaiki dan membangun infrastruktur transportasi untuk memudahkan distribusi produk perikanan dan pertanian hijau ke pasar. Meningkatkan fasilitas pengolahan hasil dengan membangun pabrik pengolahan yang ramah lingkungan dan efisien guna	Menerapkan teknologi modern dalam proses budidaya perikanan dan pertanian hijau, seperti sistem akuaponik, pertanian presisi, dan teknologi pengolahan berbasis energi terbarukan. Memberikan pelatihan kepada petani dan nelayan untuk menggunakan teknologi ini dalam operasional mereka	Mengintegrasikan teknologi dalam rantai pasok untuk memantau kualitas dan kuantitas produk dari hulu hingga hilir. Implementasi sistem informasi untuk manajemen produksi dan distribusi, serta memperkenalkan platform pemasaran digital untuk meningkatkan akses pasar	Menyempurnakan dan mengoptimalkan infrastruktur dan teknologi yang telah diterapkan. Fokus pada pemeliharaan berkelanjutan serta pengembangan inovasi baru yang dapat lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor perikanan budidaya dan pertanian hijau di Kabupaten Sigi

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
				meningkatkan kualitas dan daya saing produk			
			Melakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk petani dan nelayan terkait teknik budidaya berkelanjutan dan teknologi hijau. Menyusun kurikulum pelatihan yang relevan dengan kondisi lokal dan kebutuhan pasar, serta menyiapkan materi pelatihan yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan	Menyelenggarakan pelatihan dasar mengenai prinsip-prinsip budidaya berkelanjutan dan penerapan teknologi hijau. Fokus pada peningkatan pengetahuan dasar dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung di lapangan oleh petani dan nelayan	Menawarkan pelatihan lanjutan untuk mengajarkan teknik-teknik terbaru dalam budidaya berkelanjutan dan teknologi hijau. Mendorong peserta untuk mengimplementasikan hasil pelatihan dalam kegiatan usaha mereka dan memberikan pendampingan untuk memastikan keberhasilan penerapannya	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan umpan balik dari peserta, penyempurnakan materi pelatihan dan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan praktis di lapangan	Mengimplementasikan program pelatihan berkelanjutan dengan memberikan sertifikasi kepada petani dan nelayan yang telah menyelesaikan pelatihan, sebagai bentuk pengakuan atas keterampilan mereka dalam budidaya berkelanjutan dan penggunaan teknologi hijau. Menyediakan pelatihan rutin agar pengetahuan dan keterampilan

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Menyusun strategi pemasaran digital untuk produk ekonomi biru dan hijau, termasuk pengembangan website, media sosial, dan platform e-commerce. Juga dimulai dengan identifikasi potensi mitra sektor swasta dan pemerintah untuk kemitraan strategis	Meluncurkan kampanye pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas produk daerah. Mulai membangun kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah untuk mendapatkan dukungan investasi dan promosi produk	Memperluas jangkauan pemasaran dengan mengoptimalkan platform digital dan memperkenalkan produk di pasar nasional dan internasional. Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah untuk memperluas akses pasar dan investasi.	Meningkatkan saluran pemasaran dengan memperkenalkan produk melalui pameran internasional, festival, dan kerja sama distribusi. Menambah kemitraan dengan lebih banyak investor dan mitra untuk meningkatkan produksi dan distribusi	Melakukan evaluasi dan optimalisasi strategi pemasaran berdasarkan hasil yang dicapai, serta menjaga keberlanjutan kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah untuk terus memperluas pasar dan mendatangkan investasi yang berkelanjutan

Tabel 3.10
Penahapan Pembangunan RPJMD Misi 4

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
4	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial						
	(4.1) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup						
		(4.1.1) Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					
			Melakukan survei dan pemetaan untuk mengidentifikasi kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan konservasi. Menyusun rencana pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati.	Membangun infrastruktur pendukung di kawasan konservasi, seperti pusat informasi, jalur pengamatan, dan fasilitas edukasi. Meluncurkan program edukasi untuk masyarakat dan sekolah mengenai pentingnya konservasi spesies dan habitat alami.	Membentuk tim patroli yang terdiri dari masyarakat lokal dan petugas konservasi untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan perlindungan spesies serta habitatnya. Memberikan pelatihan tentang teknik patroli dan pengawasan yang efektif.	Meningkatkan kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi lingkungan, dan sektor swasta untuk mendukung upaya konservasi. Menyusun kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung pelestarian kawasan konservasi dan perlindungan spesies terancam punah	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program konservasi yang telah dilaksanakan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam patroli dan perlindungan habitat. Menyempurnakan strategi dan memperluas kawasan konservasi yang baru berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan ekosistem yang terancam
			Melakukan survei untuk mengidentifikasi area ekosistem yang terdegradasi, seperti hutan dan lahan basah. Menyusun	Menerapkan teknik restorasi ekosistem, seperti penanaman pohon, pengendalian erosi, dan rehabilitasi lahan basah	Mendorong petani dan nelayan untuk mengadopsi praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan yang	Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil restorasi ekosistem yang telah dilakukan.	Memperluas program restorasi ke wilayah yang lebih luas dengan memperkuat kolaborasi antara

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			rencana restorasi yang berbasis teknologi, termasuk penggunaan metode restorasi berbasis bioengineering, untuk memulihkan fungsi ekosistem	menggunakan teknologi terbaru. Membangun infrastruktur pendukung, seperti sumur resapan dan sistem irigasi untuk mendukung keberhasilan restorasi.	mendukung restorasi ekosistem, seperti agroforestry, pertanian organik, dan budidaya ikan ramah lingkungan. Memberikan pelatihan dan insentif bagi mereka yang mengimplementasikan metode ini	Menilai dampak terhadap keanekaragaman hayati, kualitas tanah, dan sumber daya air. Mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan teknik restorasi.	pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Mengembangkan kemitraan untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya restorasi ekosistem jangka panjang
			Melakukan pemetaan kawasan hutan dan identifikasi potensi serta kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Menyusun rencana program perhutanan sosial yang berfokus pada pengelolaan hutan berbasis sosial, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat tentang teknik pengelolaan hutan ramah lingkungan, seperti agroforestry, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, dan konservasi alam. Menyediakan pendampingan teknis untuk memastikan masyarakat dapat mengimplementasikan praktik-praktik ini dengan baik	Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan hasil hutan non-kayu dan produk hutan berkelanjutan lainnya, seperti tempat pengolahan dan penyimpanan produk. Menyediakan akses pasar bagi produk-produk hutan melalui kemitraan dengan sektor swasta dan memperkenalkan produk ke pasar lokal, nasional, dan internasional	Memfasilitasi kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga pemerintah untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Menyusun insentif bagi pelaku usaha yang mendukung praktik perhutanan sosial, serta mendorong kebijakan yang menguntungkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan	Melakukan evaluasi terhadap hasil program perhutanan sosial, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Menyempurnakan program berdasarkan hasil evaluasi, memperluas skala program ke kawasan lainnya, dan terus memperkuat kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk keberlanjutan program jangka panjang

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
		(4.1.2) Menurunkan Intensitas GRK menuju Net Zero Emission					
			Melakukan kajian potensi energi terbarukan di Kabupaten Sigi, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Menyusun rencana pengembangan energi terbarukan yang mencakup sektor industri, perumahan, dan pertanian, serta memperkenalkan konsep efisiensi energi kepada masyarakat	Memulai proyek percontohan dengan menginstalasi panel surya, turbin angin kecil, dan sistem biomassa untuk kebutuhan perumahan dan pertanian. Melakukan distribusi peralatan hemat energi, seperti lampu LED dan perangkat rumah tangga efisien, di masyarakat dengan insentif atau subsidi	Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung distribusi energi terbarukan, termasuk pembangunan sistem jaringan energi terbarukan yang menghubungkan rumah tangga, industri, dan pertanian dengan sumber energi terbarukan. Memperkenalkan sistem penyimpanan energi untuk mendukung ketahanan energi di daerah terpencil	Menyelenggarakan program pelatihan dan edukasi untuk masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan energi terbarukan serta efisiensi energi. Mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal	evaluasi terhadap implementasi sistem energi terbarukan dan efisiensi energi, serta dampaknya terhadap penghematan biaya dan pengurangan emisi. Memperluas program ke lebih banyak wilayah, terutama daerah terpencil, dan meningkatkan kapasitas produksi energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Menyusun kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang ketat di sektor transportasi, industri, dan pertanian. Melakukan pemetaan sumber emisi utama dan mengidentifikasi area yang membutuhkan tindakan segera, seperti kendaraan bermotor dan pembakaran terbuka di sektor pertanian.	Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung penggunaan transportasi umum, seperti penyediaan jalur transportasi umum yang efisien. Mendorong sektor transportasi untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan melalui insentif dan peraturan.	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan memperkenalkan kebijakan pemisahan sampah, daur ulang, dan pengurangan sampah organik di tingkat rumah tangga dan industri. Mengembangkan fasilitas daur ulang dan pengomposan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mengurangi emisi metana	Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebijakan pengelolaan emisi dan pengelolaan sampah, dengan memberikan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengurangan emisi, penggunaan kendaraan listrik, dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan emisi dan sampah, serta dampaknya terhadap pengurangan emisi GRK dan pengelolaan sampah. Menyempurnakan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan memperluas implementasi program pengurangan sampah dan penggunaan transportasi umum ke wilayah yang lebih luas
		(4.1.3) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan yang Tertangani					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan kondisi infrastruktur pengelolaan sampah yang ada, termasuk fasilitas pengumpulan, pemilahan, dan pembuangan sampah. Menyusun rencana pembangunan fasilitas baru yang mencakup tempat pemilahan sampah, fasilitas daur ulang, dan pengolahan sampah organik menjadi kompos atau biogas	Membangun fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan, seperti tempat pemilahan sampah di tingkat kelurahan, pusat daur ulang sampah, dan fasilitas pengolahan sampah organik. Memperkenalkan sistem pengumpulan sampah terpisah (organik, anorganik, dan B3) di tingkat rumah tangga dan komunitas	Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan cara mengelola sampah organik. Mendorong masyarakat untuk aktif dalam program daur ulang dan pengolahan sampah melalui kegiatan berbasis komunitas seperti bank sampah atau kelompok pengelola sampah	Menguatkan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan mendukung pembentukan dan pengelolaan bank sampah di setiap kelurahan. Memberikan insentif bagi masyarakat yang aktif dalam daur ulang dan pengelolaan sampah organik serta memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola hasil daur ulang	Evaluasi terhadap efektivitas infrastruktur dan program pengelolaan sampah yang telah diterapkan. Menyempurnakan sistem pengelolaan sampah dengan memperluas jangkauan fasilitas dan memperkenalkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan sampah, serta mengintegrasikan program pengelolaan sampah dengan kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan kesadaran lingkungan

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan wilayah rawan banjir dan genangan air untuk menentukan prioritas pembangunan sistem drainase dan sumur resapan. Menyusun rencana desain infrastruktur pengendalian banjir yang meliputi drainase, sumur resapan, dan penghijauan di area kritis	Memulai pembangunan dan perbaikan sistem drainase di daerah rawan banjir untuk memperlancar aliran air. Membangun sumur resapan di titik-titik strategis untuk meningkatkan penyerapan air hujan dan mengurangi genangan air di permukaan.	Melakukan penghijauan di kawasan rawan banjir dengan menanam pohon-pohon yang memiliki daya serap air tinggi, seperti pohon pelindung dan tanaman hutan. Mendorong program penghijauan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan lingkungan	Meningkatkan sistem pemantauan aliran air dan kondisi drainase dengan menggunakan teknologi digital dan sensor untuk mendeteksi potensi banjir. Melakukan evaluasi dan perbaikan pada infrastruktur drainase dan sumur resapan berdasarkan hasil pemantauan dan feedback masyarakat	Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program pengendalian banjir yang telah diterapkan dan mengidentifikasi area yang masih rawan genangan. Memperluas dan menyempurnakan jaringan drainase dan sumur resapan, serta memperkenalkan teknologi inovatif
		(4.1.4) Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan dan analisis terhadap potensi sumber daya alam, penggunaan lahan, serta kawasan yang perlu dilindungi, seperti hutan lindung, lahan pertanian, dan kawasan konservasi. Menyusun kajian awal untuk mengidentifikasi zona-zona penting dan potensi kerusakan lingkungan.	Menyusun rencana tata ruang yang berfokus pada pemanfaatan ruang yang efisien dan ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Melibatkan masyarakat, ahli, dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan	Melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pihak terkait dalam penyempurnaan rencana tata ruang. Memfinalisasi rencana tata ruang berdasarkan hasil masukan dan pertimbangan hukum serta mendukung keputusan yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.	Menerapkan kebijakan tata ruang dengan mendirikan struktur pengawasan dan regulasi yang mendukung penggunaan lahan sesuai rencana. Melaksanakan pemantauan untuk memastikan zona yang dilindungi, seperti kawasan hutan lindung dan lahan pertanian, terjaga dan tidak berubah fungsi tanpa izin yang sah.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi rencana tata ruang dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial-ekonomi. Menyusun rencana penyesuaian atau revisi jika diperlukan, untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang terus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sigi.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Menyusun dan memperbaharui kebijakan pengawasan dan penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Melakukan pelatihan untuk aparat penegak hukum dan petugas pengawasan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menanggulangi pelanggaran tata ruang.	Melakukan pemetaan terhadap area yang rawan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, seperti pembangunan ilegal atau perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Mengidentifikasi lokasi yang memerlukan pengawasan lebih intensif dan menetapkan prioritas tindakan.	Mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi, seperti pemantauan satelit dan drone, untuk mendeteksi pelanggaran pemanfaatan ruang. Memperkenalkan sistem pelaporan pelanggaran secara online bagi masyarakat untuk mendukung pengawasan yang lebih transparan.	Meningkatkan penegakan hukum dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, termasuk pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan tindakan hukum berjalan efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan tata ruang.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian pemanfaatan ruang. Menyusun rekomendasi untuk penguatan regulasi dan prosedur penegakan hukum guna meningkatkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang di masa mendatang.
		(4.1.5) Meningkatnya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan terhadap status kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Sigi, serta mengidentifikasi kebutuhan untuk pengakuan hak masyarakat lokal dan adat. Menyusun kebijakan awal yang menjamin distribusi tanah yang adil dan transparan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak masyarakat adat dan tujuan konservasi.	Menyelenggarakan sosialisasi mengenai kebijakan pembagian tanah yang adil kepada masyarakat dan kelompok adat. Memperkuat kelembagaan yang mengelola hak tanah adat dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam proses pembagian tanah yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan.	Memulai implementasi kebijakan pembagian tanah dengan prioritas pada pengakuan hak masyarakat lokal dan adat, serta memastikan tanah yang dibagikan digunakan untuk tujuan yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti pertanian berkelanjutan dan kawasan konservasi.	Mendorong masyarakat untuk menggunakan tanah yang diterima secara berkelanjutan melalui program pelatihan dan pendampingan dalam pertanian berkelanjutan, agroforestry, dan pengelolaan kawasan konservasi. Mengintegrasikan penggunaan lahan untuk konservasi alam dalam kebijakan pengelolaan tanah.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembagian tanah dan dampaknya terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan. Menyusun rencana penyesuaian atau pembaruan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pengaturan dan pembagian tanah di masa mendatang.
	(4.2) Meningkatkan Keamanan Daerah dan ketahanan bencana serta perubahan Iklim						
		(4.2.1) Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan area rawan bencana dan kebutuhan pos keamanan serta unit pemadam kebakaran. Menyusun program pelatihan dasar dan lanjutan untuk aparat keamanan dan pemadam kebakaran, serta mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan respons.	Membangun atau memperbanyak pos keamanan dan unit pemadam kebakaran di daerah rawan bencana dan titik strategis. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional petugas dalam situasi darurat, serta menambah armada pemadam kebakaran	Meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan, pemadam kebakaran, dan instansi terkait melalui rapat koordinasi rutin dan pembentukan tim tanggap darurat. Melaksanakan simulasi kebakaran dan bencana secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam menghadapi situasi darurat.	Melakukan evaluasi terhadap pelatihan dan kinerja unit keamanan serta pemadam kebakaran. Menyempurnakan sistem pelatihan dengan teknologi terbaru dan memperkuat koordinasi antarlembaga terkait untuk memastikan respons yang lebih efektif dan efisien	Mengintegrasikan teknologi terbaru seperti sistem pemantauan berbasis digital dan aplikasi pemantauan kebakaran untuk meningkatkan respons petugas. Melakukan pelatihan berkelanjutan serta menambah sumber daya manusia dan peralatan untuk memastikan kesiapsiagaan maksimal dalam menghadapi situasi darurat

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Menyusun materi sosialisasi tentang ketertiban umum dan keselamatan lingkungan yang relevan dengan kondisi lokal. Mengidentifikasi target audiens seperti masyarakat umum, pelajar, dan pemuda yang akan menjadi sasaran utama sosialisasi	Melaksanakan kampanye sosialisasi melalui berbagai media (radio, TV, media sosial) dan kegiatan komunitas seperti seminar, lokakarya, atau pameran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketertiban dan keselamatan lingkungan	Mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pembersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas umum, dan patroli lingkungan. Menyediakan insentif atau penghargaan bagi individu atau kelompok yang berkontribusi aktif dalam menjaga ketertiban	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program sosialisasi dan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keterlibatan mereka. Mengembangkan program atau materi baru yang lebih relevan dan menarik untuk berbagai kelompok masyarakat	Mengintegrasikan kesadaran ketertiban umum dan keselamatan lingkungan dalam kurikulum pendidikan dan kebijakan lokal, sehingga dapat menciptakan budaya peduli terhadap lingkungan yang berkelanjutan
			Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah terkait kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum melalui media, pertemuan komunitas, dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum	Membentuk tim pengawasan dan patroli masyarakat yang terdiri dari warga setempat, yang dilatih untuk memantau dan melaporkan pelanggaran terkait kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan mereka. Memberikan pelatihan tentang tata cara yang efektif dan humanis dalam penegakan peraturan	Melaksanakan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran peraturan daerah melalui tindakan yang jelas, seperti denda atau sanksi administratif, sambil memastikan bahwa masyarakat terus dilibatkan dalam proses pengawasan	Melakukan evaluasi efektivitas patroli dan pengawasan masyarakat serta perbaikan sistem penegakan hukum yang ada. Meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperbaiki respon terhadap pelanggaran	Meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti pemasangan kamera pengawas di titik-titik strategis dan pengembangan aplikasi pelaporan pelanggaran yang melibatkan masyarakat, guna meningkatkan efektivitas penegakan peraturan dan ketertiban

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
		(4.2.2) Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana					
			Melakukan pemetaan risiko bencana di Kabupaten Sigi, termasuk identifikasi daerah rawan gempa, banjir, dan tanah longsor. Menyusun rencana rinci untuk pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti rumah tahan gempa, penguatan tebing, serta sistem peringatan dini yang sesuai dengan karakteristik daerah.	Memulai pembangunan infrastruktur tahan bencana di wilayah rawan, seperti rumah tahan gempa, penguatan tebing di area longsor, dan perbaikan saluran drainase untuk mitigasi banjir. Membangun fasilitas umum yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi darurat.	Membangun dan menguji sistem peringatan dini untuk bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Menyediakan pelatihan dan simulasi untuk masyarakat dan petugas terkait prosedur evakuasi dan respons terhadap peringatan dini.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur yang sudah ada dan memperluas cakupan sistem peringatan dini ke wilayah yang belum terjangkau. Melakukan sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat mengenai prosedur darurat dan pemanfaatan sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini dalam mengurangi dampak bencana. Mengidentifikasi potensi kelemahan dan memperkuat infrastruktur serta sistem peringatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan terhadap kondisi pertanian dan sektor lain yang rentan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Sigi. Mengidentifikasi teknik pertanian yang dapat diadaptasi dan teknologi ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal	Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan kepada petani mengenai teknik pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti pertanian organik, pengelolaan air yang efisien, serta teknik konservasi tanah untuk mengurangi dampak perubahan iklim	Mendorong petani untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pupuk organik, dan sistem irigasi efisien. Memberikan bantuan teknis dan fasilitas untuk memudahkan penerapan teknologi baru yang dapat meningkatkan ketahanan pangan	Mendorong penerapan model pertanian berkelanjutan yang berbasis agroforestry dan diversifikasi tanaman untuk meningkatkan ketahanan pangan. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas teknologi yang diterapkan, termasuk dampaknya terhadap hasil pertanian dan keberlanjutan lingkungan	Meningkatkan infrastruktur pendukung seperti penyediaan akses pasar bagi produk pertanian ramah lingkungan, serta memperluas jaringan kerjasama antara petani, lembaga riset, dan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Kabupaten Sigi
			Penguatan Fondasi Koordinasi, kelembagaan dan konsolidasi aktor lintas sektor. Forum kolaborasi multipihak dibentuk untuk menyatukan visi dan menyusun mekanisme koordinasi. Pemetaan risiko bencana dan kerentanan iklim dilakukan secara komprehensif sebagai dasar perencanaan terpadu	Integrasi Perencanaan Lintas Sektor, melalui Penyusunan dokumen perencanaan strategis yang terintegrasi, seperti Rencana Aksi dan penguatan keterkaitan dengan RPJMD serta Renstra OPD. Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal	Implementasi Program Prioritas Kolaboratif, melalui implementasikan program prioritas secara lintas sektor, mencakup pelatihan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan kapasitas desa tangguh, rehabilitasi ekosistem, serta pengembangan praktik adaptasi berbasis lokal. Dunia usaha dan perguruan tinggi dilibatkan dalam	Penguatan Kelembagaan & Replikasi Model, Fokus diarahkan pada penguatan kelembagaan forum kolaborasi dan replikasi model desa tangguh ke wilayah lain. Sistem peringatan dini berbasis komunitas mulai diintegrasikan ke dalam sistem informasi daerah. Advokasi kebijakan dan penguatan alokasi	Evaluasi Kinerja & Reformulasi Strategi, fokus pada evaluasi capaian program berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Audit sosial dan pelaporan partisipatif dilakukan untuk menilai efektivitas koordinasi dan kolaborasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar reformulasi strategi jangka menengah berikutnya, serta

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
				untuk memastikan relevansi dan keberterimaan program.	mendukung inovasi dan pembiayaan program.	anggaran responsif iklim menjadi bagian dari strategi keberlanjutan.	diseminasi praktik baik ke tingkat provinsi dan nasional.
	(4.3) Meningkatkan harmoni sosial						
		(4.3.1) Meningkatnya harmoni sosial secara inklusif					
			Melakukan pemetaan terhadap keberagaman agama dan budaya di Kabupaten Sigi, serta mengidentifikasi isu-isu sensitif yang perlu dibahas dalam forum dialog. Menyusun rencana untuk melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, budaya, dan pemerintah setempat	Menyelenggarakan forum dialog antar agama dan budaya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk membahas pentingnya toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan. Menyediakan penyuluhan tentang prinsip-prinsip dasar toleransi dan keberagaman yang sesuai dengan konteks lokal	Membangun jaringan kerjasama antara kelompok agama dan budaya untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Menyusun mekanisme kolaborasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan bersama yang mendukung harmoni sosial	Mendorong pelaksanaan kegiatan bersama antar kelompok agama dan budaya, seperti acara budaya, bakti sosial, dan kegiatan keagamaan, untuk memperkuat hubungan antar kelompok dan meningkatkan rasa saling menghormati. Mengadakan kegiatan yang melibatkan generasi muda untuk memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya kerukunan	Melakukan evaluasi terhadap dampak forum dialog yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kerukunan umat beragama dan hubungan antar kelompok masyarakat. Mengembangkan program dialog yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan dialog antar agama dan budaya

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pemetaan terhadap potensi dan kebutuhan komunitas di Kabupaten Sigi, serta mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial. Menyusun program kegiatan sosial yang melibatkan semua lapisan masyarakat, dengan fokus pada kegiatan gotong royong, seni budaya, dan olahraga	Menyelenggarakan kegiatan sosial pertama yang melibatkan semua kelompok masyarakat, seperti gotong royong untuk membersihkan lingkungan, pameran seni budaya lokal, dan turnamen olahraga. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga dan membangun rasa kebersamaan.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial melalui pembentukan kelompok kerja sosial di tingkat desa dan kelurahan. Kelompok ini akan bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kegiatan sosial secara berkelanjutan, serta memperluas jangkauan ke lebih banyak masyarakat	Mendorong integrasi kegiatan sosial seperti gotong royong, seni budaya, dan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Membuat kegiatan sosial sebagai bagian dari rutinitas sosial dan budaya di setiap desa untuk menciptakan kebersamaan yang lebih kuat	Melakukan evaluasi terhadap dampak kegiatan sosial dalam mempererat hubungan antar warga dan meningkatkan rasa kebersamaan. Memperkuat jaringan antar komunitas dan memfasilitasi kolaborasi antara desa untuk kegiatan sosial bersama yang lebih besar dan berdampak jangka panjang
		(4.3.2) Meningkatnya berkebudayaan maju					
			Melakukan inventarisasi dan pendokumentasian warisan budaya, termasuk adat istiadat, seni tradisi, bahasa daerah, dan situs budaya di seluruh wilayah	Menghidupkan kembali praktik-praktik adat dan kesenian yang mulai ditinggalkan melalui pelatihan, pendampingan seniman lokal, dan penguatan balai budaya desa.	Melaksanakan festival budaya berbasis komunitas secara rutin sebagai ruang ekspresi dan promosi seni tradisi, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal masyarakat Sigi	Mendorong masuknya materi budaya lokal dalam kurikulum sekolah serta menjadikan potensi budaya sebagai daya tarik pariwisata berbasis komunitas.	Membentuk forum budaya daerah dan memperkuat kolaborasi antara pelaku budaya, pemerintah, serta mitra eksternal untuk keberlanjutan pelestarian budaya lokal

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan pendataan pelaku seni, komunitas budaya, dan ruang ekspresi yang tersedia di sekolah, desa, dan fasilitas publik sebagai dasar perencanaan pembinaan seni budaya	Membangun atau merevitalisasi ruang budaya terbuka di sekolah, balai desa, dan taman publik untuk digunakan sebagai tempat latihan, pertunjukan, dan kegiatan seni masyarakat	Menyelenggarakan program pembinaan seniman lokal, guru seni, dan komunitas budaya melalui pelatihan rutin, program mentoring, serta pelibatan dalam kegiatan seni edukatif	Mengintegrasikan seni budaya lokal dalam kegiatan sekolah dan desa, seperti ekstrakurikuler seni, pentas budaya bulanan, dan kegiatan budaya rutin berbasis komunitas	Menyelenggarakan pameran karya dan festival seni sebagai ajang apresiasi, sekaligus membangun jejaring antar pelaku seni lokal dengan mitra regional dan nasional

Tabel 3.11
Penahapan Pembangunan RPJMD Misi 5

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
5	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif						
	(5.1) Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat						
		(5.1.1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien					
			Penyusunan Infrastruktur dan Kebijakan SPBE Fokus pada penyusunan kebijakan dan infrastruktur dasar untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk pemetaan kebutuhan digitalisasi layanan pemerintahan. Melakukan pelatihan awal untuk ASN terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan publik.	Penyusunan Infrastruktur dan Kebijakan SPBE Fokus pada penyusunan kebijakan dan infrastruktur dasar untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk pemetaan kebutuhan digitalisasi layanan pemerintahan. Melakukan pelatihan awal untuk ASN terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan publik.	Implementasi SPBE dan Penguatan Layanan Digital Mengimplementasikan sistem SPBE di beberapa layanan pemerintahan utama, seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan pengelolaan anggaran. Menyediakan pelatihan lebih lanjut untuk ASN dalam penggunaan platform digital dan memastikan aksesibilitas layanan publik berbasis teknologi.	Peningkatan Transparansi dan Efisiensi Anggaran Memperkuat transparansi anggaran dengan mengintegrasikan data anggaran daerah ke dalam sistem digital yang dapat diakses publik. Mengoptimalkan sistem untuk mempercepat proses pengajuan dan pelaporan anggaran, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.	Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Digital Melakukan evaluasi terhadap implementasi SPBE dan transparansi anggaran untuk mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu perbaikan. Menyempurnakan sistem berdasarkan feedback dari masyarakat dan ASN, serta mengembangkan fitur baru untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pemerintahan lebih lanjut.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Penataan Struktur Organisasi Melakukan evaluasi dan penyusunan ulang struktur organisasi pemerintahan untuk menciptakan organisasi yang lebih efisien dan responsif terhadap perubahan. Menyusun rencana pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis indikator yang terukur dan sesuai dengan visi pemerintahan yang adaptif.	Merancang dan menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis indikator yang jelas di setiap unit kerja. Menyediakan pelatihan untuk ASN tentang penerapan sistem kinerja dan penerapan budaya kerja inovatif serta kolaboratif untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas birokrasi.	Implementasi Sistem Manajemen Kinerja dan Budaya Kerja Inovatif Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis indikator secara menyeluruh di setiap unit kerja, serta mendorong kolaborasi antar unit kerja untuk menciptakan solusi kreatif dan responsif terhadap masalah daerah.	Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Birokrasi Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan penerapan sistem kinerja berjalan sesuai rencana. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta menggunakan teknologi untuk memantau kinerja birokrasi secara real-time	Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Birokrasi Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem manajemen kinerja dan struktur organisasi, serta memperbaiki dan menyempurnakan sistem berdasarkan hasil evaluasi. Memastikan keberlanjutan budaya kerja inovatif dan kolaboratif melalui penguatan komitmen ASN dan peningkatan pengawasan serta akuntabilitas
		(5.1.2) Meningkatnya keamanan informasi					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan penilaian terhadap infrastruktur keamanan siber yang ada di instansi pemerintah Kabupaten Sigi, serta mengidentifikasi potensi risiko dan celah dalam sistem keamanan data. Menyusun rencana strategis untuk penguatan infrastruktur keamanan siber yang mencakup kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, serta kebijakan keamanan yang diperlukan.	Memulai penerapan sistem keamanan dasar di seluruh instansi pemerintah, termasuk firewall, enkripsi data, dan perlindungan terhadap jaringan internal. Melakukan pelatihan awal untuk pegawai pemerintah terkait penggunaan dan pentingnya sistem keamanan siber.	Mengintegrasikan teknologi keamanan yang lebih canggih, seperti enkripsi end-to-end dan multi-factor authentication (MFA), untuk melindungi data sensitif. Memperkuat sistem pemantauan dan deteksi ancaman untuk merespon potensi serangan siber secara lebih efektif dan cepat.	Melakukan uji coba dan audit keamanan siber secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang telah diterapkan. Memastikan bahwa setiap instansi pemerintah memiliki mekanisme pengawasan yang dapat mendeteksi potensi ancaman atau celah dalam sistem keamanan dengan segera.	Berdasarkan hasil audit dan evaluasi, melakukan pembaruan dan penyempurnaan terhadap infrastruktur keamanan siber untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Melakukan pelatihan lanjutan dan simulasi serangan siber untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman di masa depan.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan penilaian terhadap keterampilan dan pengetahuan aparatur pemerintah di bidang keamanan informasi. Menyusun kurikulum pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan perlindungan data, serta pengenalan dasar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Menyelenggarakan pelatihan dasar untuk aparatur pemerintah mengenai pengelolaan data, perlindungan informasi, serta pengenalan sistem SPBE yang aman. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya keamanan informasi dan penerapan teknologi digital dalam pemerintahan.	Menyelenggarakan program sertifikasi bagi aparatur pemerintah di bidang keamanan informasi, dengan fokus pada pengelolaan data sensitif dan penerapan SPBE secara aman. Melakukan ujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap peserta memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola data dan sistem secara efektif dan aman.	Menyediakan pelatihan lanjutan terkait ancaman dunia maya dan teknik mitigasi risiko, serta memperkenalkan konsep pengawasan dan audit sistem keamanan. Melakukan simulasi ancaman dunia maya untuk meningkatkan kesiapan aparatur dalam menghadapi potensi serangan siber.	Melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan dan sertifikasi yang telah dilaksanakan, serta menyesuaikan kurikulum dan materi pelatihan dengan perkembangan teknologi dan ancaman siber terkini. Melanjutkan program pelatihan dan sertifikasi secara berkala untuk memastikan aparatur pemerintah selalu siap dalam menjalankan SPBE dengan aman dan efektif.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Menyusun kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait dengan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Kebijakan ini mencakup aspek pengelolaan, pemrosesan, dan perlindungan data di seluruh instansi pemerintah daerah, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam perancangannya.	Menyebarluaskan kebijakan dan SOP keamanan informasi kepada seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Sigi melalui pelatihan, seminar, dan sosialisasi. Pastikan setiap instansi memahami dan mengimplementasikan kebijakan serta standar yang telah ditetapkan.	Mulai menerapkan kebijakan dan SOP secara menyeluruh di semua instansi pemerintahan daerah, serta melakukan pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Menyusun mekanisme pengawasan dan audit untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan mendeteksi potensi pelanggaran atau celah dalam keamanan.	Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan keamanan dan perlindungan data pribadi. Menerapkan sanksi atau tindakan korektif bagi instansi yang tidak mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan, guna menjaga integritas dan keamanan data.	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan dan SOP yang telah diterapkan. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan revisi atau penyempurnaan kebijakan dan SOP untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan terkini, serta memperkuat implementasi di masa depan.
		(5.1.3) Meningkatnya tata kelola arsip					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan penilaian terhadap sistem arsip yang ada di setiap instansi pemerintahan Kabupaten Sigi untuk mengidentifikasi kebutuhan digitalisasi dan area yang memerlukan perbaikan. Menyusun rencana strategis untuk implementasi sistem manajemen arsip elektronik terintegrasi, termasuk pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat.	Mengimplementasikan sistem manajemen arsip elektronik di beberapa instansi pemerintahan utama, dengan memastikan infrastruktur teknologi yang mendukung digitalisasi dan penyimpanan data secara terintegrasi. Memulai pelatihan bagi petugas arsip di setiap instansi mengenai penggunaan sistem baru.	Mengintegrasikan sistem manajemen arsip elektronik antar instansi pemerintah di Kabupaten Sigi, sehingga memungkinkan akses data arsip yang lebih mudah dan efisien. Menyusun prosedur operasional standar (SOP) terkait pengelolaan dan pencarian arsip untuk memastikan keseragaman dalam setiap instansi.	Melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem arsip elektronik untuk mengidentifikasi masalah teknis dan operasional. Mengoptimalkan sistem berdasarkan hasil evaluasi, serta meningkatkan kapasitas petugas dalam pengelolaan arsip digital dan memastikan kelancaran proses pengarsipan di seluruh instansi.	Penyempurnaan dan Peningkatan Aksesibilitas Arsip berdasarkan evaluasi dan pengoptimalan, melakukan penyempurnaan sistem arsip elektronik untuk meningkatkan fungsionalitas dan aksesibilitas arsip Memperkuat kebijakan keamanan arsip digital, serta memperluas akses masyarakat terhadap arsip elektronik yang relevan, untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan arsip pemerintahan.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan penilaian terhadap tingkat keterampilan dan pemahaman pegawai pemerintah daerah mengenai pengelolaan arsip. Menyusun kurikulum pelatihan yang mencakup prinsip dasar pengarsipan, keamanan arsip, dan pemeliharaan arsip yang sesuai dengan standar yang berlaku.	Menyelenggarakan pelatihan dasar bagi pegawai pemerintah daerah mengenai pengelolaan arsip, termasuk pengenalan sistem pengarsipan, prinsip keamanan arsip, serta teknik pemeliharaan arsip untuk memastikan kualitas tata kelola arsip yang baik di setiap instansi.	Melakukan pelatihan lanjutan mengenai sistem pengelolaan arsip digital dan penerapan teknologi dalam pengarsipan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip di instansi pemerintah daerah. Fokus pada integrasi pengelolaan arsip fisik dan elektronik dengan teknologi yang lebih modern.	Mengadakan pelatihan pengawasan pengelolaan arsip dan penerapan audit internal untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan arsip di setiap instansi. Mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan prinsip pengarsipan yang baik dan memberikan solusi serta pembaruan pelatihan yang diperlukan.	Melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan dan implementasi pengelolaan arsip di instansi pemerintah daerah. Menyempurnakan program pelatihan dengan menambahkan modul sertifikasi bagi pegawai yang sudah terlatih, untuk memastikan pengelolaan arsip yang lebih profesional, aman, dan efisien.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan penilaian terhadap praktik pengelolaan arsip yang ada di seluruh dinas dan lembaga di Kabupaten Sigi untuk mengidentifikasi kebutuhan kebijakan dan prosedur baku. Menyusun rencana strategis untuk penyusunan kebijakan pengelolaan arsip yang jelas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.	Menyusun dan merumuskan kebijakan serta prosedur baku pengelolaan arsip yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip, dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman dalam tata kelola arsip di seluruh instansi pemerintah daerah.	Mensosialisasikan kebijakan dan prosedur baku pengelolaan arsip kepada seluruh dinas dan lembaga di Kabupaten Sigi melalui pelatihan dan pertemuan rutin. Mulai mengimplementasikan kebijakan di seluruh instansi untuk memastikan keseragaman dalam pengelolaan arsip.	Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan prosedur baku pengelolaan arsip di setiap dinas dan lembaga. Menyusun mekanisme evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.	Melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan dan prosedur pengelolaan arsip yang telah diimplementasikan, serta melakukan penyempurnaan kebijakan berdasarkan temuan dan rekomendasi dari evaluasi tersebut. Memastikan bahwa kebijakan pengelolaan arsip terus diperbarui dan relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengelolaan arsip yang lebih efisien.
		(5.1.4) Meningkatnya profesionalitas ASN					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Melakukan penilaian terhadap kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Sigi, dengan fokus pada keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Menyusun program pelatihan yang terstruktur dan sertifikasi yang sesuai dengan tuntutan tugas ASN dan tujuan pembangunan daerah.	Menyelenggarakan pelatihan dasar bagi ASN di berbagai tingkatan, dengan fokus pada keterampilan teknis yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Mulai melaksanakan program sertifikasi untuk memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Melakukan pelatihan lanjutan yang fokus pada pengembangan keterampilan manajerial dan kepemimpinan bagi ASN yang memiliki potensi untuk memimpin unit kerja atau proyek. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas ASN dalam mengambil keputusan dan memimpin tim secara efektif.	Menyediakan pelatihan berbasis teknologi untuk memfasilitasi ASN dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi terbaru yang mendukung efisiensi kerja. Selain itu, mengimplementasikan pelatihan manajerial berbasis sistem untuk meningkatkan kinerja unit kerja secara keseluruhan.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyempurnaan dan pembaruan materi pelatihan serta meningkatkan kualitas sertifikasi untuk memastikan ASN di Kabupaten Sigi terus berkembang dan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan efisien.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Menyusun sistem penilaian kinerja yang jelas, objektif, dan berbasis indikator yang terukur. Menetapkan kriteria penilaian yang mencakup aspek kinerja individu, tim, serta pencapaian tujuan organisasi. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.	Mengimplementasikan sistem penilaian kinerja di seluruh instansi pemerintahan Kabupaten Sigi dengan fokus pada penggunaan indikator yang telah ditetapkan. Melakukan sosialisasi kepada ASN mengenai sistem penilaian yang baru serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi kinerja.	Melaksanakan penilaian kinerja secara rutin dan objektif, serta memberikan penghargaan bagi ASN yang mencapai kinerja terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penghargaan ini dapat berupa pengakuan, promosi, atau insentif lainnya untuk memotivasi kinerja ASN.	Melakukan evaluasi bagi ASN yang belum memenuhi standar kinerja, dengan memberikan tindakan korektif berupa pelatihan tambahan, pembinaan, atau penyesuaian tugas. Sistem penilaian harus memberikan umpan balik konstruktif agar ASN dapat meningkatkan kinerjanya.	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian kinerja yang diterapkan, termasuk keefektifan dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan motivasi ASN. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyempurnaan pada sistem dan prosedur penilaian untuk memastikan bahwa sistem tersebut tetap relevan dan transparan, serta mendukung perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
			Penilaian Kebutuhan dan Penyusunan Kurikulum dengan menilai kebutuhan pelatihan ASN di bidang teknis dan manajerial, serta menyusun kurikulum pelatihan yang relevan, bekerja sama dengan lembaga pelatihan profesional.	Implementasi Pelatihan Dasar dan Sertifikasi dengan menyelenggarakan pelatihan dasar untuk ASN dan memulai program sertifikasi untuk memastikan kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah.	Pelatihan Lanjutan dan Pengembangan Kepemimpinan dengan menyelenggarakan pelatihan lanjutan fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dan manajerial untuk ASN yang berpotensi memimpin.	Kolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Profesional dengan memperkuat kerjasama dengan lembaga pelatihan untuk pembaruan materi yang sesuai perkembangan kebutuhan daerah, termasuk pelatihan berbasis teknologi.	Mengevaluasi efektivitas pelatihan yang telah dilakukan, dan melakukan penyempurnaan program pelatihan untuk tetap relevan dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Penilaian Kebutuhan dan Pengembangan Infrastruktur dengan menilai kebutuhan sumber belajar ASN dan mengembangkan infrastruktur untuk e-learning, seminar, dan pusat informasi.	Implementasi Platform E-Learning dan Sumber Belajar Digital dengan mengimplementasikan platform e-learning dan menyediakan materi pembelajaran digital yang relevan bagi ASN.	Penguatan Pusat Informasi dan Pembaruan Materi dengan membangun pusat informasi untuk menyediakan materi terkini dan memastikan pembaruan sesuai perkembangan teknologi dan kebijakan.	Peningkatan Partisipasi ASN dalam Pembelajaran dengan mendorong ASN untuk aktif mengakses materi e-learning dan seminar, serta mengevaluasi tingkat partisipasi mereka.	Evaluasi dan Penyempurnaan Akses Sumber Belajardengan mengevaluasi efektivitas sumber belajar dan melakukan penyempurnaan untuk memastikan akses yang relevan dan up-to-date.
			Menilai kebutuhan pengembangan karir ASN berdasarkan kompetensi yang relevan dan menyusun sistem pengembangan karir yang jelas, termasuk jalur karir dan indikator kompetensi yang dibutuhkan.	Mengimplementasikan jalur karir yang jelas bagi ASN dan melaksanakan ujian kompetensi awal untuk mengukur tingkat keahlian dan keterampilan ASN sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya.	Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan ASN dan melakukan penyesuaian jalur karir atau pelatihan tambahan berdasarkan hasil ujian kompetensi dan evaluasi kinerja.	Memperkuat sistem penilaian kompetensi dengan memperkenalkan pelatihan lanjutan dan peningkatan ujian kompetensi untuk mendukung pengembangan karir ASN di berbagai level.	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengembangan karir berbasis kompetensi, serta menyempurnakan sistem tersebut untuk memastikan bahwa jalur karir ASN jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
		(5.1.5) Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota DPRD terkait kebijakan, peraturan, dan isu strategis daerah. Menyusun program pelatihan dan workshop rutin yang relevan untuk meningkatkan pemahaman mereka.	Implementasi Pelatihan dan Workshop bagi Anggota DPRD dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop rutin untuk anggota DPRD dengan fokus pada kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, serta isu-isu strategis daerah yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.	Membangun forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan DPRD dan pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi dan sinergi, guna mempercepat proses pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah.	Mendorong kolaborasi lebih erat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah melalui kerja sama dalam komite atau kelompok kerja yang melibatkan kedua belah pihak.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dan forum diskusi yang telah dilaksanakan, serta menyempurnakan program pelatihan dan mekanisme kolaborasi untuk meningkatkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
		(5.1.6) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Penguatan SDM dan Pemahaman Perencanaan Fokus pada pelatihan dasar aparat pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan.	Pengembangan Kolaborasi dan Implementasi Perencanaan Workshop lanjutan untuk aparat, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta memastikan perencanaan dilaksanakan tepat waktu.	Sinkronisasi Perencanaan dan Koordinasi Pemerintahan Evaluasi dan perbaikan koordinasi antar pemerintahan, penyusunan jadwal pembangunan yang jelas, serta meningkatkan pengawasan melalui kolaborasi masyarakat.	Penyempurnaan Proses dan Pengawasan Memperkuat kolaborasi pemerintah-masyarakat, meningkatkan kemampuan aparat melalui pelatihan lanjutan, dan mempercepat implementasi proyek dengan koordinasi yang lebih baik.	Optimalisasi dan Keberlanjutan Evaluasi keseluruhan program, penyusunan rencana perbaikan, dan memastikan keberlanjutan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
			Penyusunan Rencana Sistem Informasi Dengan menyusun kerangka kerja pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk transparansi anggaran pembangunan dan mengidentifikasi riset serta inovasi yang relevan.	Pengembangan Infrastruktur dan Basis Data Dengan Membangun infrastruktur sistem informasi dan menyusun basis data riset untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Implementasi dan Pengujian Sistem Dengan Mengimplementasikan dan menguji sistem informasi terintegrasi serta menerapkan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan.	Penguatan Kapasitas dan Evaluasi Kebijakan Dengan Meningkatkan kapasitas pengguna sistem dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dihasilkan berbasis riset dan inovasi.	Optimalisasi Sistem dan Penyempurnaan Kebijakan Dengan Mengoptimalkan sistem informasi dan memperbarui basis data riset, serta menyempurnakan kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan masa depan.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
		(5.1.7) Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan					
			Penyusunan Rencana Penguatan Sistem Dengan Menyusun rencana penguatan sistem pengumpulan dan pengolahan data, serta identifikasi kebutuhan pelatihan petugas statistik.	Pengembangan Infrastruktur dan Pelatihan Dengan Membangun infrastruktur untuk pengumpulan data dan melaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas statistik.	Integrasi Data dan Penerapan Teknologi Dengan Mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan menerapkan teknologi untuk mempermudah akses dan verifikasi data.	Penyempurnaan Pengolahan dan Verifikasi Data Dengan Menyempurnakan proses pengolahan dan verifikasi data untuk meningkatkan keakuratan dan validitasnya.	Evaluasi dan Optimalisasi Sistem Dengan Mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem data statistik untuk memastikan akurasi dan keterbaruan data dalam perencanaan pembangunan.
		(5.1.8) Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah					
			Penguatan Kolaborasi Dengan Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga riset, dan universitas untuk merumuskan solusi berbasis riset sesuai kebutuhan daerah.	Implementasi Solusi Inovatif Dengan Menerapkan solusi inovatif hasil riset dalam pembangunan, serta menggunakan teknologi untuk efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran.	Optimalisasi Teknologi Dengan Mengintegrasikan riset dalam perencanaan pembangunan dan memperkuat sistem teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.	Evaluasi Dampak Dengan Mengevaluasi dampak riset dan inovasi serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan.	Keberlanjutan Inovasi Dengan Menyebarkan hasil riset dan memastikan keberlanjutan kolaborasi serta penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.
		(5.1.9) Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Perencanaan dan Persiapan Dengan Merancang dan mempersiapkan infrastruktur sistem keuangan terintegrasi serta pelatihan awal untuk aparat pemerintah.	Implementasi Awal Dengan Menerapkan sistem di beberapa unit pemerintahan untuk pengujian dan evaluasi fungsionalitas.	Penyempurnaan dan Perluasan Dengan Menyempurnakan sistem dan menerapkannya secara luas di seluruh instansi pemerintah daerah.	Penguatan Pengawasan Dengan Memanfaatkan sistem untuk pengawasan dan evaluasi real-time atas anggaran dan aset daerah.	Optimalisasi dan Keberlanjutan Dengan Melakukan evaluasi, optimasi sistem, dan merencanakan pembaruan serta keberlanjutan penggunaan sistem.
			Identifikasi Kebutuhan dan Perencanaan Pelatihan Dengan Melakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk aparat daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset, serta merancang program pelatihan berbasis standar akuntansi yang tepat.	Pelaksanaan Pelatihan Dasar Dengan Menyelenggarakan pelatihan dasar tentang pengelolaan keuangan, aset, dan standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Pelatihan Lanjutan dan Pengembangan Kompetensi Dengan Mengadakan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparat dalam pengelolaan keuangan dan aset, serta memperkenalkan teknologi untuk efisiensi.	Penerapan Praktis dan Evaluasi Dengan Mendorong penerapan hasil pelatihan di lapangan, diikuti dengan evaluasi untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar dan peraturan.	Penyempurnaan dan Keberlanjutan Pengembangan Dengan Melakukan evaluasi akhir terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan, serta menyusun program pengembangan berkelanjutan untuk menjaga kompetensi aparat daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Sosialisasi dan Pembentukan Forum Publik Dengan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengawasan keuangan dan aset daerah serta membentuk forum publik untuk diskusi dan pengawasan.	Pengembangan Saluran Pelaporan yang Transparan Dengan Membangun saluran pelaporan yang mudah diakses dan transparan, memungkinkan masyarakat untuk melaporkan temuan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Penguatan Partisipasi Masyarakat Dengan Menyelenggarakan kegiatan rutin yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, serta meningkatkan kapasitas forum publik untuk memberikan masukan yang konstruktif.	Penguatan Kontrol Sosial Dengan Memperkuat mekanisme kontrol sosial dengan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Pengawasan Dengan Melakukan evaluasi terhadap efektivitas saluran pelaporan dan forum publik, serta menyempurnakan sistem untuk memastikan pengawasan yang lebih akuntabel dan transparan.
		(5.1.10) Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan					
			Identifikasi Kebutuhan dan Perencanaan Program Pelatihan Dengan Melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam kapasitas pengawas dan aparatur pemerintahan terkait pengawasan. Merancang program pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme dan prosedur pengawasan yang transparan.	Pelaksanaan Pelatihan Dasar Pengawasan Dengan Menyelenggarakan pelatihan dasar bagi aparatur pengawas dan pejabat terkait tentang prinsip-prinsip pengawasan yang efektif, standar pengawasan, serta peraturan yang berlaku untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.	Pengembangan Kompetensi Lanjutan Dengan Menyelenggarakan pelatihan lanjutan dengan fokus pada teknik-teknik pengawasan yang lebih spesifik dan penggunaan teknologi dalam pengawasan untuk meningkatkan efektivitas kontrol.	Implementasi Praktis dan Evaluasi Kinerja Dengan Mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan ke dalam praktik sehari-hari, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pengawas dan aparat untuk memastikan pengawasan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.	Penyempurnaan dan Keberlanjutan Pengembangan Kompetensi Dengan Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelatihan dan program pengembangan yang telah dilakukan, serta merancang program pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas pengawasan dengan efektif dan transparan.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Perencanaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Dengan Merancang sistem pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan pemantauan kinerja pemerintahan secara real-time. Menyusun kebutuhan infrastruktur dan melakukan kajian terkait teknologi yang paling sesuai.	Implementasi Sistem Pengawasan Real-Time Dengan Menerapkan sistem pengawasan dengan fitur pelaporan instan dan pemantauan langsung, serta mengadakan pelatihan bagi aparatur pemerintahan terkait penggunaan sistem ini.	Integrasi dengan Proses Pemerintahan Dengan Mengintegrasikan sistem pengawasan dengan berbagai sektor pemerintahan dan memastikan semua kegiatan pemerintahan dapat dipantau dengan transparansi yang lebih tinggi.	Evaluasi dan Penguatan Pengawasan Dengan Melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem dalam meningkatkan pengawasan dan transparansi, serta memperbaiki sistem berdasarkan umpan balik dari pengguna.	Optimalisasi dan Keberlanjutan Dengan Menyempurnakan sistem dengan fitur tambahan yang lebih canggih dan memastikan keberlanjutan pengawasan berbasis teknologi dengan pembaruan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat pemerintahan.
			Sosialisasi dan Penyusunan Saluran Komunikasi Dengan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemerintahan. Menyusun saluran komunikasi yang mudah diakses, seperti forum publik dan aplikasi pelaporan.	Pelaksanaan Forum Publik dan Aplikasi Pelaporan Dengan Mengimplementasikan forum publik sebagai wadah untuk diskusi dan aplikasi pelaporan untuk memudahkan masyarakat melaporkan temuan terkait pemerintahan.	Penguatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat Dengan Memperkenalkan lebih banyak fitur interaktif dalam forum publik dan aplikasi pelaporan, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.	Kolaborasi dengan Masyarakat dan Pemerintah Dengan Meningkatkan kolaborasi antara masyarakat dan aparat pemerintahan dalam pengawasan. Menyusun mekanisme umpan balik masyarakat digunakan dalam pengambilan keputusan.	Evaluasi dan Pengembangan Keberlanjutan Partisipasi Dengan Melakukan evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan mengembangkan rencana keberlanjutan untuk meningkatkan pengawasan secara transparan dan akuntabel.
		(5.1.11) Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM					

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Menyusun kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) untuk dimasukkan dalam pendidikan formal dan non-formal. Merencanakan program sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum, organisasi, dan lembaga pendidikan	Memulai implementasi kurikulum di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Melakukan pelatihan bagi guru, pengajar, dan fasilitator lainnya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dengan metode yang menarik dan relevan bagi peserta didik	Menyelenggarakan kampanye sosial melalui berbagai media (seperti radio, media sosial, dan seminar) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM. Melibatkan organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh lokal dalam kegiatan tersebut	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pendidikan dan sosialisasi yang telah berjalan, termasuk pengukuran dampaknya terhadap pemahaman masyarakat. Mengumpulkan umpan balik dari peserta dan pengajar untuk penyempurnaan materi, metode, dan pelaksanaan program	Memperkuat kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperluas jangkauan pendidikan Pancasila, demokrasi, dan HAM. mengintegrasikan program tersebut dalam kebijakan daerah untuk memastikan keberlanjutan dan pengaruhnya terhadap pembangunan masyarakat secara keseluruhan

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Menyusun kebijakan dan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk pemilihan umum dan musyawarah desa. Membuat pedoman yang jelas bagi warga untuk memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan publik	Melakukan sosialisasi yang intensif melalui berbagai media, pelatihan, dan seminar untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan publik. Mengedukasi masyarakat tentang cara berpartisipasi secara efektif, termasuk melalui pemilihan umum, musyawarah desa, dan forum-forum komunitas	Membentuk dan memperkuat forum-forum komunitas yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Menyediakan fasilitas yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa, forum kebijakan publik, dan kegiatan lainnya	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan. Mengumpulkan data dan feedback dari masyarakat untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang ada, serta memperbaiki cara-cara untuk mendorong partisipasi lebih lanjut	Mengintegrasikan hasil evaluasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Memastikan bahwa partisipasi masyarakat menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan di semua tingkat pemerintahan dan pembangunan daerah

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
			Menyusun kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat lokal, termasuk menetapkan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Membentuk lembaga atau unit khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan HAM	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak asasi mereka, termasuk kebebasan berpendapat dan hak-hak dasar lainnya. Menyediakan materi edukasi tentang cara melaporkan pelanggaran HAM dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelindungannya	Membuka saluran pengaduan untuk masyarakat terkait pelanggaran HAM dan memastikan sistem pengaduan ini mudah diakses serta dilindungi kerahasiaannya. Mengembangkan prosedur yang cepat dan tepat waktu untuk menangani setiap laporan pelanggaran HAM dengan adil dan transparan	Melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait mengenai prinsip-prinsip HAM, prosedur penanganan kasus pelanggaran HAM, dan penerapan keadilan yang adil. Meningkatkan kapasitas lembaga pengawas untuk melakukan pemantauan secara efektif dan independen	Melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan penanganan kasus HAM yang ada, serta menyempurnakan kebijakan dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional untuk mendukung pelaksanaan dan perlindungan HAM

Tabel 3.12
Arah Kebijakan Pencapaian RPJMD Misi 1

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan		
	(1.1)		
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas		
		(1.1.1)	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	
			Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan
			Mengoptimalkan pengelolaan air melalui pembangunan irigasi, normalisasi sungai, dan pengendalian banjir
			Memperluas akses layanan dasar permukiman melalui pengembangan air minum, sanitasi, dan ruang publik
		(1.1.2)	
		Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	
			Meningkatkan ketersediaan rumah layak dan terjangkau melalui pembangunan hunian baru dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni
			Mendorong penataan kawasan permukiman berbasis lingkungan berkelanjutan dan aksesibilitas layanan dasar
		(1.1.3)	
		Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	
			Penataan dan peningkatan layanan angkutan umum untuk memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi masyarakat
			Peningkatan keselamatan transportasi melalui pengujian kendaraan bermotor dan penyediaan sarana prasarana pendukung
		(1.1.4)	
		Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	
			Memperluas jaringan internet dan akses teknologi di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.
			Membangun aplikasi dan website yang terintegrasi untuk layanan publik yang mudah diakses masyarakat.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital
			Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan publik berbasis digital

Tabel 3.12
Arah Kebijakan Pencapaian RPJMD Misi 2

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera		
	(2.1)		
	Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing		
		(2.1.1)	
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	
			Integrasi nilai budaya lokal dan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah
			Pemberian beasiswa melalui Program Sigi Masagena untuk mendukung akses pendidikan
			Peningkatan layanan pendidikan di wilayah terpencil dan kurang terlayani
			Pengembangan dan penguatan sekolah unggulan di berbagai jenjang di wilayah perbatasan dengan kota palu
			Fasilitasi pengembangan program makan bergizi gratis
		(2.1.2)	
		Meningkatnya literasi masyarakat	
			Peningkatan akses dan pemerataan layanan literasi di wilayah terpencil melalui pengembangan perpustakaan desa, taman baca berbasis komunitas, dan layanan perpustakaan keliling
			Penguatan budaya literasi berbasis kearifan lokal melalui melibatkan sekolah, organisasi pemuda, dan tokoh adat dalam program gerakan literasi masyarakat
		(2.1.3)	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
			Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar di wilayah terpencil.
			Penguatan edukasi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak
			Pelaksanaan Program Sigi Masagena untuk mendukung layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
			Optimalisasi dukungan peran serta Masyarakat secara swadaya mulai dari desa, posyandu, puskesmas, layanan pratama, layanan rujukan untuk menjawab permasalahan SPM dasar bidang Kesehatan guna mendukung derajat Kesehatan perorangan dan lingkungan di kabupaten sigi semakin membaik.
		(2.1.3) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	
			Penguatan pembangunan pemuda melalui pelatihan, kepemimpinan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah
			Peningkatan partisipasi dan prestasi olahraga melalui pembangunan sarana olahraga serta pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi tingkat lokal
	(2.2) Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender		
		(2.2.1) Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	
			Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, penguatan peran dalam ekonomi lokal, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa dan kabupaten
			Penurunan ketimpangan gender melalui integrasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam seluruh kebijakan, program, dan layanan publik daerah
			Penguatan perlindungan anak melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak, penyediaan layanan ramah anak, serta penguatan peran keluarga dan komunitas dalam pencegahan kekerasan terhadap anak
		(2.2.2) Meningkatnya keluarga yang berkualitas	
			Pembangunan keluarga berkualitas melalui penguatan fungsi keluarga, edukasi pola asuh, dan kesehatan keluarga
			Pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis komunitas untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		(2.2.3) Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi dengan upaya meningkatkan dan mengintegrasikan sistem digital untuk administrasi kependudukan, guna mempercepat dan mempermudah layanan. Langkah ini mencakup pembaruan perangkat lunak, pelatihan bagi petugas, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memproses data kependudukan secara efisien
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Terpadu dengan menyelenggarakan pelatihan rutin dan sertifikasi bagi petugas administrasi untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka dalam memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, memperkenalkan layanan terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan di satu lokasi, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan mudah
		(2.2.4) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	
			Penguatan pembangunan pemuda melalui pelatihan, kepemimpinan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah
			Peningkatan partisipasi dan prestasi olahraga melalui pembangunan sarana olahraga serta pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi tingkat lokal
	(2.3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
		(2.3.1) Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	
			Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Kelompok Marginal melalui program pemberdayaan untuk kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, dengan menyediakan pelatihan keterampilan, pendidikan, serta akses ke layanan sosial yang lebih baik
			Pengembangan Infrastruktur Sosial yang Aksesibel bagi Semua dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung inklusi sosial, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana transportasi yang mudah diakses oleh Masyarakat.
			Fasilitasi pengembangan program sekolah rakyat.
		(2.3.2) Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Optimalisasi dan rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana dan pencetakan sawah baru di wilayah potensial didukung penyediaan sarana produksi, pendampingan petani, serta penguatan lumbung pangan desa, untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan berkualitas yang terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat
		(2.3.3) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	
			Penguatan Kapasitas Masyarakat melalui Pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan literasi digital dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
			Peningkatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa melalui Meningkatkan infrastruktur dasar dan pengembangan usaha masyarakat , BUMDesa dan Kolaborasi multi pihak dengan sektor swasta untuk akses modal dan pasar.
		(2.3.4) Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	
			Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Kerja: Menyediakan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Sigi, serta memperkuat kerjasama dengan perusahaan untuk menciptakan peluang magang dan penyerapan tenaga kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan daya saing di pasar kerja
		(2.3.5) Meningkatnya kesejahteraan transmigran	
			Mengoptimalkan lahan dengan komoditas unggulan seperti Kopi, kakao, jagung, dan hortikultura khas Palolo. Upaya dilakukan melalui pelatihan budidaya, penguatan kelompok tani, akses permodalan, dan pembangunan infrastruktur pertanian sederhana. Distribusi hasil panen diarahkan ke pasar regional seperti Sigi Biromaru untuk meningkatkan nilai jual dan jangkauan pemasaran.
			Mendorong usaha mandiri seperti industri pengolahan hasil pertanian, kerajinan, dan jasa lokal. Pemerintah memfasilitasi pelatihan, pendampingan usaha, dan akses pemasaran, baik digital maupun fisik. Kolaborasi dengan BUMDes dan pelaku usaha di Biromaru dibangun untuk memperkuat ekosistem ekonomi transmigran yang berkelanjutan

Tabel 3.13
Arah Kebijakan Pencapaian RPJMD Misi 3

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata		
	(3.1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah		
		(3.1.1) Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	
			Urusan Perikanan
			Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan melalui pemanfaatan teknologi budidaya dan penangkapan yang ramah lingkungan, penguatan kapasitas produksi, serta pengembangan akses pasar dan kelembagaan usaha perikanan
			Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil perikanan melalui penyediaan sarana produksi, pelatihan teknis, serta akses teknologi budidaya dan penangkapan yang ramah lingkungan
			Penguatan akses pasar dan perlindungan usaha nelayan serta pembudidaya melalui kemitraan, koperasi perikanan, dan fasilitasi perizinan serta pembiayaan usaha.
			Urusan Pariwisata
			Pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, ekowisata, dan agrowisata yang terintegrasi dengan usaha akomodasi dan kuliner lokal guna meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB
			Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM melalui pelatihan, penguatan kapasitas usaha, serta digitalisasi promosi untuk mendorong pertumbuhan sektor makan minum dan ekonomi lokal
			Optimalisasi rencana induk pariwisata daerah dan perencanaan Kawasan pariwisata terintegrasi.
			Urusan pertanian
			Pengembangan wilayah sentra komoditas unggulan tanaman pangan (padi, jagung), hortikultura (cabai, bawang putih, sayuran), dan perkebunan (kakao, kopi, vanili, kelapa, durian, kemiri) sesuai potensi wilayah
			Peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian melalui penyediaan sarana produksi, teknologi tepat guna, dan pelatihan teknis budidaya ramah lingkungan.
			Peremajaan dan intensifikasi pada komoditas strategis seperti kakao dan kopi, serta pengembangan varietas unggul untuk tanaman pangan dan hortikultura.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi, kelompok tani, akses pembiayaan, asuransi usaha tani, dan fasilitasi penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).
			Penyusunan dan pelaksanaan regulasi perlindungan usaha tani, termasuk perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dari alih fungsi lahan.
			Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Peternak Melalui Program Pelatihan, Pendampingan Teknologi, dan Pengembangan Sekolah Peternakan Rakyat
			Peningkatan Kualitas dan Standar Produk: Meningkatkan kualitas produk unggulan dengan memastikan penerapan standar mutu yang tinggi melalui pelatihan kepada produsen lokal dan sertifikasi produk, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi
			Diversifikasi Produk dan Inovasi: Mendorong inovasi dalam pengolahan produk berbasis alam untuk menciptakan produk turunan yang bernilai tambah tinggi, seperti olahan makanan, kosmetik, atau bahan baku industri, guna memperluas pasar dan menarik lebih banyak konsumen. Mendorong nilai tambah produksi bahan baku komoditi bioprospeksi memanfaatkan keberlimpahan alam untuk menaikkan pendapatan per kapita petani.
			Urusan Perindustrian
			Peningkatan Kualitas dan Standar Produk: Meningkatkan kualitas produk unggulan dengan memastikan penerapan standar mutu yang tinggi melalui pelatihan kepada produsen lokal dan sertifikasi produk, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi.
			Diversifikasi Produk dan Inovasi: Mendorong inovasi dalam pengolahan produk berbasis alam untuk menciptakan produk turunan yang bernilai tambah tinggi, seperti olahan makanan, kosmetik, atau bahan baku industri, guna memperluas pasar dan menarik lebih banyak konsumen.
			Peningkatan Akses Pasar dan Promosi: Meningkatkan akses pasar domestik dan internasional melalui strategi pemasaran digital, partisipasi dalam pameran, serta kerjasama dengan jaringan distribusi dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan produk unggulan daerah.
			Optimalisasi pengembangan industri melalui rencana industri daerah terintegrasi Kawasan
			Urusan Perdagangan
			Pengembangan Rantai Pasok dan Pengolahan Produk Unggulan: Meningkatkan kapasitas produksi dan pengolahan produk unggulan daerah, seperti hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan lokal, melalui pelatihan dan pembinaan kepada pelaku usaha lokal. Membangun kemitraan dengan industri

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			pengolahan dan memperkuat distribusi untuk memastikan produk unggulan memiliki nilai tambah yang kompetitif di pasar
			Pemasaran dan Branding Produk Unggulan: Meningkatkan promosi dan pemasaran produk unggulan Kabupaten Sigi melalui platform digital, pameran, dan kerjasama dengan pasar domestik maupun internasional. Mengembangkan merek daerah untuk meningkatkan citra dan daya tarik produk unggulan, serta memberikan pelatihan kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang pasar global.
			Optimalisasi pengembangan perdagangan komoditi basis alam bernilai ekspor melalui meningkatkan kapasitas pasar desa, pasar daerah, aktivasi Perusahaan daerah dan pengembangan Kawasan pergudangan skala Kawasan strategis ekonomi ibukota provinsi sesuai tata ruang wilayah.
		(3.1.2)Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	
			Penguatan Kapasitas Koperasi. Memberikan pelatihan manajemen bisnis, keuangan, dan pemasaran produk untuk meningkatkan daya saing koperasi di pasar
			Fasilitasi Pengembangan program koperasi merah putih
			Peningkatan Akses Pembiayaan dan Kemitraan. Memperluas akses pembiayaan dan mendorong kerjasama antara koperasi, sektor swasta, dan pemerintah untuk memperkuat jaringan distribusi
			Pemberdayaan dan Pendampingan UMKM: Menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam hal manajemen usaha, pemasaran digital, serta akses terhadap permodalan dan teknologi. Ini akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka
			Fasilitasi Akses Pasar dan Jaringan Distribusi: Meningkatkan akses pasar bagi UMKM melalui platform digital, kerjasama dengan retail besar, serta pameran produk lokal. Pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan industri besar untuk memperluas distribusi dan meningkatkan pendapatan per kapita.
		(3.1.3)Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	
			Peningkatan infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi, serta mengembangkan kawasan industri berbasis keunggulan wilayah, seperti sektor pertanian dan pariwisata. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan akan mendukung pendanaan infrastruktur dan memberikan insentif pajak bagi investor

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Penguatan Kebijakan yang memudahkan perizinan, transparansi regulasi, dan membentuk layanan perizinan satu pintu (One-Stop Service). Sosialisasi potensi investasi dan insentif fiskal akan menarik investor, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga investasi regional dan nasional
		(3.1.4) Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	
			Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya
			Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Pendapatan. Mengimplementasikan sistem berbasis teknologi untuk mempermudah proses pemungutan, pelaporan, dan pengawasan pendapatan daerah. Sistem ini akan memastikan transparansi, mengurangi risiko kebocoran, dan memudahkan pemantauan serta evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan
			Sosialisasi dan Kolaborasi dengan Masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan dan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui program sosialisasi. Selain itu, melakukan kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan pendapatan daerah secara akuntabel
		(3.1.4) Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Sektoral	
			Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi. Meningkatkan fasilitas pendukung sektor perikanan budidaya dan pertanian hijau, termasuk transportasi, pengolahan hasil, dan penerapan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas
			Pengembangan SDM dan Pelatihan. Memberikan pelatihan kepada petani dan nelayan untuk mengadopsi teknik budidaya berkelanjutan dan teknologi hijau guna meningkatkan kapasitas produksi yang ramah lingkungan
			Pemasaran dan Kerja Sama Strategis. Meningkatkan promosi produk ekonomi biru dan hijau melalui pemasaran digital dan membangun kemitraan dengan sektor swasta serta pemerintah untuk menarik investasi dan memperluas pasar

Tabel 3.14
Arah Kebijakan Pencapaian RPJMD Misi 4

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial		
	(4.1) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup		
		(4.1.1) Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Peningkatan Konservasi dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dengan Mengidentifikasi dan mengembangkan kawasan konservasi, serta melibatkan masyarakat dalam program perlindungan spesies dan habitatnya melalui edukasi dan patroli bersama
			Pengembangan Program Restorasi Ekosistem Melakukan restorasi ekosistem yang terdegradasi dengan teknik berbasis teknologi, serta mendorong praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati
			Pengembangan Program Perhutanan Sosial Berkelanjutan dengan Fokus Meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan hutan berbasis sosial yang berkelanjutan. Mendorong masyarakat untuk mengelola hutan dengan praktik ramah lingkungan, seperti agroforestry, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, dan konservasi alam. Menyediakan akses pasar bagi produk-produk hutan berkelanjutan serta memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah
		(4.1.2) Menurunkan Intensitas GRK menuju Net Zero Emission	
			Pengembangan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi Mendorong penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, di sektor industri, perumahan, dan pertanian. Melakukan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi energi, termasuk mengganti lampu dan peralatan rumah tangga dengan teknologi hemat energi serta memperkenalkan sistem energi terbarukan berbasis komunitas di daerah-daerah terpencil.
			Implementasi Kebijakan Pengelolaan Emisi dan Pengurangan Sampah Menyusun kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang ketat di sektor transportasi, industri, dan pertanian, serta mendorong transportasi umum yang ramah lingkungan. Selain itu,

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan mengutamakan daur ulang dan pengurangan sampah organik untuk mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan akhir (TPA)
		(4.1.3)	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan yang Tertangani	
			Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, termasuk daur ulang dan pemanfaatan sampah organik, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan berbasis komunitas
			Penanganan Genangan dan Pengendalian Banjir Memperbaiki sistem drainase, membangun sumur resapan, dan melakukan penghijauan di daerah rawan banjir untuk mengurangi genangan air
		(4.1.4)	
		Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan	
			Penyusunan dan Implementasi Rencana Tata Ruang yang Berkelanjutan: Menyusun dan menerapkan rencana tata ruang yang berfokus pada pemanfaatan ruang yang efisien dan ramah lingkungan, dengan mengidentifikasi zona-zona yang harus dilindungi, seperti kawasan hutan lindung, lahan pertanian, dan sumber daya alam vital lainnya.
			Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai: Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, termasuk pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar aturan untuk memastikan kelestarian lingkungan terjaga.
		(4.1.5)	
		Meningkatnya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
			Pengaturan dan Pembagian Tanah yang Adil dan Berkelanjutan: Menyusun kebijakan yang memastikan distribusi tanah yang adil dan transparan, dengan prioritas pada pengakuan hak masyarakat lokal dan adat, serta mendorong penggunaan tanah untuk tujuan yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti pertanian berkelanjutan dan kawasan konservasi.
	(4.2)	Meningkatkan Keamanan Daerah dan ketahanan bencana serta perubahan Iklim	
		(4.2.1)	
		Meningktanya ketenteraman dan ketertiban umum	

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Penguatan Keamanan dan Pemadam Kebakaran Meningkatkan pelatihan dan koordinasi antar aparat keamanan dan pemadam kebakaran, serta memperbanyak pos keamanan dan unit pemadam untuk respon cepat dalam situasi darurat
			Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melakukan sosialisasi tentang ketertiban umum dan keselamatan lingkungan melalui berbagai media dan kegiatan komunitas untuk membangun kesadaran bersama
			Penegakan Peraturan dan Ketertiban Memperkuat penegakan hukum terkait kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum serta melibatkan masyarakat dalam patroli dan kegiatan pengawasan lingkungan
		(4.2.2) Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	
			Penguatan Infrastruktur dan Sistem Peringatan Dini Bencana: Membangun dan memperkuat infrastruktur tahan bencana seperti rumah tahan gempa, penguatan tebing, serta sistem peringatan dini untuk bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, guna mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat
			Optimalisasi Pengelolaan risiko bencana berbasis Kawasan atau landscape juga menguatkan koordinasi kolaborasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim antar desa, kecamatan, kabupaten/kota
			Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim: Menyediakan pelatihan kepada masyarakat tentang teknik pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta menerapkan teknologi ramah lingkungan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim.
	(4.3) Meningkatkan harmoni sosial		
		(4.3.1) Meningkatnya harmoni sosial secara inklusif	
			Fasilitasi Dialog Antar Agama dan Budaya: Menyelenggarakan forum dialog antar agama dan budaya untuk meningkatkan pemahaman, saling menghormati, dan memperkuat hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda, guna membangun kerukunan umat beragama

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pemberdayaan Komunitas melalui Kegiatan Sosial Bersama: Mengorganisir kegiatan sosial bersama yang melibatkan semua kelompok masyarakat, seperti kegiatan gotong royong, seni budaya, dan olahraga, untuk mempererat hubungan antar warga dan mendorong rasa kebersamaan dalam keberagaman.
		(4.3.2) Meningkatnya berkebudayaan maju	
			Pelestarian dan pengembangan budaya lokal melalui revitalisasi adat, seni tradisi, dan festival budaya berbasis komunitas.
			Peningkatan akses masyarakat terhadap ruang ekspresi budaya dan pembinaan pelaku seni lokal di sekolah, desa, dan ruang publik.

Tabel 3.15
Arah Kebijakan Pencapaian RPJMD Misi 5

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif		
	(5.1) Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat		
		(5.1.1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	
			Penguatan Sistem Pemerintahan Digital dan Transparansi diupayakan. Mendorong digitalisasi layanan pemerintahan melalui SPBE. Meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik. Memperkuat transparansi anggaran dan informasi publik. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan teknologi.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Reformasi Birokrasi Berbasis Kinerja dan Adaptif diupayakan Menata struktur organisasi agar lebih efisien dan responsif. Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis indikator. Membangun budaya kerja inovatif dan kolaboratif. Memperkuat pengawasan dan akuntabilitas birokrasi.
		(5.1.2) Meningkatnya keamanan informasi	
			Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber: Membangun dan memperkuat infrastruktur keamanan teknologi informasi di seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Sigi, termasuk penerapan sistem keamanan jaringan yang lebih baik, seperti enkripsi data dan firewall, guna melindungi data sensitif dari potensi ancaman siber.
			Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Keamanan Informasi: Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk aparatur pemerintah dalam hal pengelolaan dan perlindungan data, agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman dunia maya, serta dapat menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara aman.
			Implementasi Kebijakan dan Standar Keamanan yang Ketat: Menetapkan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait keamanan informasi dan perlindungan data pribadi, serta memastikan penerapannya secara konsisten di seluruh lapisan pemerintahan daerah untuk mendukung keberhasilan pembangunan SPBE yang aman dan efektif.
		(5.1.3) Meningkatnya tata kelola arsip	
			Digitalisasi dan Integrasi Sistem Arsip: Mengimplementasikan sistem manajemen arsip elektronik yang terintegrasi di seluruh instansi pemerintahan Kabupaten Sigi, untuk mempermudah pengelolaan, pencarian, dan penyimpanan arsip secara efisien, serta mengurangi ketergantungan pada arsip fisik.
			Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Arsip: Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi pegawai pemerintah daerah mengenai pengelolaan arsip yang baik, termasuk prinsip pengarsipan, keamanan, dan pemeliharaan arsip agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola arsip di setiap instansi.
			Penyusunan Kebijakan dan Standar Pengelolaan Arsip: Menyusun dan menerapkan kebijakan serta prosedur baku terkait tata kelola arsip yang jelas dan terstruktur, guna memastikan keseragaman dan kepatuhan dalam pengelolaan arsip di seluruh dinas dan lembaga di Kabupaten Sigi.
		(5.1.4) Meningkatnya profesionalitas ASN	

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN: Menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan untuk ASN di Kabupaten Sigi, yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih profesional dan efisien.
			Penerapan Sistem Penilaian Kinerja yang Transparan: Mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja yang jelas dan objektif, dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian, serta memberikan penghargaan bagi ASN yang berprestasi dan tindakan korektif bagi yang belum memenuhi standar kinerja.
			Program Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan: Menyusun dan melaksanakan program pelatihan rutin yang mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis serta manajerial bagi ASN, dengan melibatkan lembaga pelatihan profesional untuk memastikan kualitas materi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
			Peningkatan Akses terhadap Sumber Belajar dan Informasi: Meningkatkan akses ASN terhadap sumber belajar, seperti e-learning, seminar, dan workshop, serta membangun pusat informasi yang menyediakan materi pembelajaran terkini guna memperbaharui pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru.
			Penerapan Sistem Pengembangan Karir Berbasis Kompetensi: Mengembangkan dan menerapkan sistem pengembangan karir yang fokus pada kompetensi, dengan menyediakan jalur karir yang jelas dan mengukur kemajuan ASN berdasarkan peningkatan keahlian serta keterampilan melalui ujian kompetensi dan evaluasi berkala.
		(5.1.5) Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	
			Peningkatan Kapasitas dan Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah: Mengadakan pelatihan dan workshop rutin bagi anggota DPRD untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta isu-isu strategis daerah. Selain itu, memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah melalui forum diskusi dan konsultasi, guna mempercepat pengambilan keputusan yang mendukung pembangunan daerah.
		(5.1.6) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	
			Peningkatan Kapasitas SDM, Kolaborasi Masyarakat, dan Sinkronisasi Perencanaan yang Tepat Waktu. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah melalui pelatihan dan workshop untuk

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			merancang perencanaan pembangunan yang lebih efektif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Selain itu, memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan tepat waktu dan terkoordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan agar setiap program dapat terlaksana sesuai jadwal.
			Penerapan Teknologi dan Perencanaan Berbasis Riset dan Inovasi. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk transparansi dan pengawasan anggaran pembangunan, serta mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Pendekatan berbasis riset dan inovasi ini bertujuan untuk menghadapi tantangan pembangunan secara lebih adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
		(5.1.7) Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	
			Penguatan Sistem Data Statistik yang Akurat dan Dapat Diandalkan, meliputi penguatan sistem pengumpulan dan pengolahan data statistik dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber data (sangu data). Memperkuat kapasitas petugas statistik melalui pelatihan berkelanjutan, memastikan integrasi data dari berbagai sumber untuk memperoleh data yang lebih akurat dan terupdate, serta menerapkan teknologi yang mempermudah akses dan verifikasi data
		(5.1.8) Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	
			Peningkatan Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah meliputi penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan universitas untuk menghasilkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, hasil riset akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan kebijakan berbasis data. Penggunaan teknologi juga didorong untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta layanan publik, mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.
		(5.1.9) Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Implementasi Sistem Keuangan Terintegrasi, Menerapkan sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk memastikan transparansi, mempermudah pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pengelolaan aset.
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset, untuk memastikan penerapan standar akuntansi yang tepat dan pengelolaan yang lebih efisien serta sesuai peraturan.
			Meningkatkan Partisipasi dan Pengawasan Publik, Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan dan aset daerah melalui forum publik dan saluran pelaporan yang transparan, guna memperkuat kontrol sosial dan mendorong pengelolaan yang lebih akuntabel.
		(5.1.10) Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	
			Meningkatan Kapasitas Pengawas dan Aparatur Pemerintahan. Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pengawas dan pejabat terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang mekanisme pengawasan yang efektif, serta standar dan prosedur pengawasan yang transparan.
			Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan Real-Time. Mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau kinerja pemerintahan secara real-time. Sistem ini memungkinkan pelaporan instan, pengawasan yang lebih efektif, dan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan.
			Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dengan membuka saluran komunikasi yang mudah diakses, seperti forum publik dan aplikasi pelaporan, sehingga masyarakat dapat turut berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih transparan dan akuntabel.
		(5.1.11) Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	
			Peningkatan Pendidikan dan Sosialisasi Pancasila, Demokrasi, dan HAM Menyelenggarakan program pendidikan yang berkelanjutan mengenai nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) di seluruh lapisan masyarakat, dengan mengintegrasikan materi tersebut ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan masyarakat
			Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi dan Pengambilan Keputusan Memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi, termasuk

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			pemilihan umum, musyawarah desa, serta pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, guna memastikan representasi yang lebih baik dan penghormatan terhadap hak-hak warga
			Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tingkat lokal dengan membangun sistem pengawasan yang transparan, mendukung kebebasan berpendapat, serta menanggapi setiap pelanggaran HAM secara adil dan tepat waktu

**Tabel 3.16 Keselarasan Antara Misi, Janji Politik dengan Implementasi Program
dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
VISI :									
KABUPATEN SIGI MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA									
MISI I :									
Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan									
	Tujuan 1.1:								
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas			Indeks Infrastruktur Daerah					
		Sasaran 1.1.1:							
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas			Indeks Kemantapan Jalan				
						Indeks Kemantapan Irigasi			
						Kapasitas Air Baku (m3/detik)			
						Indeks Akses Air Minum			
						Indeks Akses Sanitasi			
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman			Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi			Persentase luas layanan irigasi	%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan Penanganan sungai rawan banjir (Km)	%		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase masyarakat yang menerima akses terhadap layanan SPAM (SR)	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase masyarakat yang menerima akses pengolahan air limbah (%)	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
		Sasaran 1.1.2:					
		Meningkatkannya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan			
			meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi jumlah kawasan kumuh	Persentase Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Sasaran 1.1.3:					
		Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
MISI II :			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%			
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi Sungai / Danau	Konektifitas Sungai / Danau	Angka/ Rp	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
				Jumlah retribusi sektor penyebrangan danau				
		Sasaran 1.1.4:						
		Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital		Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi				
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	%	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
				Indeks SPBE (terkait keamanan)	%			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera							
	Tujuan 2.1:						
	Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia			
		Sasaran 2.1.1:					
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	1. Skor Literasi				
			2. Skor Numerasi				
			3. Rata-rata Lama Sekolah				
			4. Harapan Lama Sekolah				
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	%		
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	%	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	%	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
		Sasaran 2.1.2:					
		Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)			
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
		Sasaran 2.1.3:					
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)			
				2. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)			
				3. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)			
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Fasyankes Yang Terpenuhi SDM	%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				Kesehatan Sesuai Standar					
				Persentase Meningkatnya SDM Rumah Sakit yang Berkompeten	%				
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Proporsi Faskes Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	%	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kecamatan Sehat	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Fasyankes Terakreditasi paripurna	%	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN			
		Tujuan 2.2:							
		Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender			1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga				
			Sasaran 2.2.1:						
			Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)				
					2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)				
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			
		Sasaran 2.2.2:					
		Meningkatnya keluarga yang berkualitas		1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka		
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern)	%	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	%		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga	Angka	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Sasaran 2.2.3:				
			Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%		
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%		
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Sasaran 2.2.4:				

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga		1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2. Indeks Partisipasi Olahraga				
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (POPDA)	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
	Tujuan 2.3:							
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		1.Tingkat Kemiskinan					
			2. Tingkat Pengangguran Terbuka					
			3. Indeks Gini Rasio					
		Sasaran 2.3.1:						
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial				
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%		
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana	%		
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%		
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	%	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	%		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%		
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%		
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan	%		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	%		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	%		
				Indeks Peranan Sosial	%		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%		
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%		
				Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	%		
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	%		
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan	%		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan			
		Sasaran 2.3.2:					
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)			
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		Sasaran 2.3.3:					
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		1. Indeks Desa Membangun (IDM) 2. Presentase Desa mandiri (%)			
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	PROGRAM PENATAAN DESA	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%		
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%		
		Sasaran 2.3.4:					
		Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		1. Rasio Penduduk Bekerja			
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	%	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
		Sasaran 2.3.5:							
		Meningkatnya kesejahteraan transmigran		1. Pendapatan perkapita dikawasan trasmigrasi					
			Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	%	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
		MISI III :							
		Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata							
	Tujuan 3.1:								
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah		1. Pertumbuhan ekonomi (%)						

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sasaran 3.1.1:					
		Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah		PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)			
				PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			
				PDRB Sektor Ekonomi Kreatif			
				Persentasi Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah			
				PDRB Sektor Perdagangan			
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Angka	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura	Angka		
				Peningkatan Produksi Perkebunan	Angka		
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Angka		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Angka	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Angka	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%		
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	%	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	%	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya kelestarian laut, Sungai, Danau dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi	%	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	%	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		Sasaran 3.1.2:					
		Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian		Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB			
				Rasio Kewirausahaan Daerah			
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha	%		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	
		Sasaran 3.1.3:					
		Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi			
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Angka	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
		Sasaran 3.1.4:					
		Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah			
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%		
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%		
		Sasaran 3.1.5:					
		Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Sektoral		Indeks Daya Saing Daerah			
				Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)			
				Indeks Ekonomi Hijau Daerah			
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			pengembangan potensi unggulan daerah					
MISI IV :								
Mewujudkan lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial								
	Tujuan 4.1:							
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup			1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)				
		Sasaran 4.1.1:						
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	Indeks Kualitas Air	%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
				Indeks Kualitas Udara	%			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH	%	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sasaran 4.1.2:					
		Menurunya Intensitas GRK menuju Net Zero Emission		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%):			
				Persentase Penurunan Emisi GRK: Kumulatif			
				Persentase Penurunan Emisi GRK: Tahunan			
		Sasaran 4.1.3:					
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan yang Tertangani		1. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 2. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah			
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		Sasaran 4.1.4:					
		Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan		Rasio ketaatan terhadap RTRW			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase perizinan kegiatan pemanfaatan ruang	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang memiliki dokumen teknis yang telah diverifikasi	%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Jumlah kawasan yang ditata sesuai dengan standar teknis	Angka	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat (SKK) (orang)	Angka	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
		Sasaran 4.1.5:						
		Meningkatnya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Tertib Administrasi Pertanahan				
	Tujuan 4.2:							
	Meningkatkan Keamanan Daerah dan ketahanan bencana serta perubahan Iklim			1. Indeks Resiko Bencana 2. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban umum				
		Sasaran 4.2.1:						
		Meningktanya ketenteraman dan ketertiban umum		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas				
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%			
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%			
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya cakupan layanan pencegahan kebakaran	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%		
		Sasaran 4.2.2:					
		Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah			
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%		
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	%			
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%			
	Tujuan 4.3:							
	Meningkatkan harmoni sosial			1. Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)				
		Sasaran 4.1.1:						
		Meningkatnya harmoni sosial secara inklusif		1. Nilai Kesetaraan 2. Nilai Toleransi 3. Nilai Kerjasama				
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Produk Hukum	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
				Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%			
				Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	%			
		Sasaran 4.1.2:						
		Meningkatnya berkebudayaan maju		Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)				

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%		
MISI V :							
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif							
	Tujuan 5.1:						
	Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat			Indeks Reformasi Birokrasi			
		Sasaran 5.1.1:					

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		1. Indeks Pelayanan Publik 2. Indeks Reformasi Hukum 3. Nilai Sakip 4. Indeks Kualitas Kebijakan			
			Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Pelayanan pengadaan barang dan Jasa	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%		
				Tingkat Kematangan UKPBJ	%		
					-		
		Sasaran 5.1.2:					
		Meningkatnya Tata Kelola Berbasis Elektronik		Indeks SPBE			
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Indeks SPBE (terkait keamaan)			
		Sasaran 5.1.3:					

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya tata kelola arsip		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintah Daerah			
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
		Sasaran 5.1.4:					
		Meningkatnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN*			
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%		
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader,	%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			dasar, kader, manajerial dan fungsional	manajerial dan fungsional			
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%		
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%		
		Sasaran 5.1.5:					
		Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD*			
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%		
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%		
		Sasaran 5.1.6:					
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%		
		Sasaran 5.1.7:					
		Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)			
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sasaran 5.1.8:					
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		Indeks Inovasi Daerah			
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%		
		Sasaran 5.1.9:					
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 3. Indeks Pengelolaan Aset Daerah			
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%		
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%		
				Persentase Penurunan SILPA	%		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sasaran 5.1.10:					
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level		
		Sasaran 5.1.11:					
		Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia			
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	

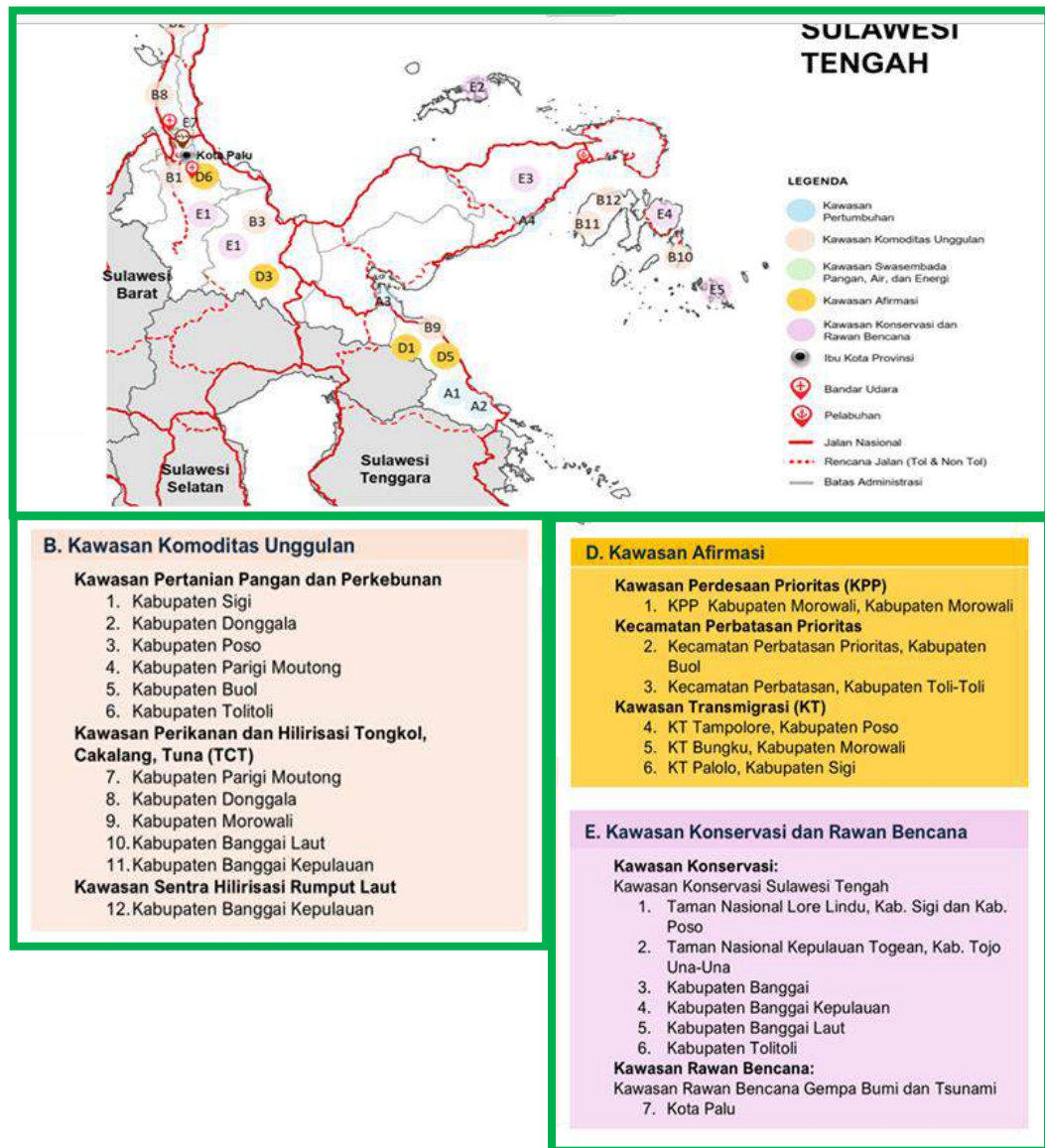
3.2.2 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

I. Arah Pembangunan Wilayah Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran IV dari Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025, bahwa arah Pembangunan kewilayahan Sulawesi Tengah dan termasuk didalamnya kabupaten sigi, maka arah Pembangunan kewilayahan Kabuten Sigi Tahun 2025 – 2029 dalam RPJM Nasional Tahun 2025 - 2029 dapat mendukung arah kewilayahan secara Nasional maupun Provinsi dalam mendukung aspek pertumbuhan dan pemerataan wilayah, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan kemandirian Kawasan kedepannya. Berdasarkan identifikasi pusat pertumbuhan wilayah beserta kawasannya, maka kabupaten Sigi ditetapkan sebagai pendorong pertumbuhan Kawasan di Sulawesi Tengah, antara lain :

1. Kabupaten Sigi diarahkan sebagai Kawasan Komoditi Unggulan (B) – Kawasan pertanian Pangan, dan Perkebunan (B.1);
2. Kabupaten Sigi diarahkan sebagai Kawasan Afirmasi (D) – Kawasan Transmigrasi (KT) Palolo (D.6)
3. Kabupaten Sigi diarahkan sebagai Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana (E) – Kawasan Konservasi Taman Nasional Lore Lindu (E.1)

Berdasarkan arahan tersebut, maka secara khusus tema arah Pembangunan wilayah di kabupaten sigi yang dapat langsung mendukung kawasan prioritas nasional adalah sebagai **Kawaasan komoditi Unggulan, Kawasan Afirmasi, dan Kawasan Konservasi**, seperti disajikan pada gambar 3.1 dan Tabel 3.17 berikut ini :



Gambar 3.11
Arah Pembangunan Kewilayahan, Kawasan dan
Lokasi Prioritas Kabupaten Sigi dalam RPJMN
Tahun 2025-2029

Berdasarkan Gambaran tersebut, maka dapat disajikan penjelasan secara Highlight indikasi yang akan diintervensi pendorong keselarasan antara Nasional, Provinsi sampai Level Kabupaten Sigi, sehingga tercapai kemajuan secara berkelanjutan basis Pembangunan Kawasan komoditi unggulan dan konservasi alam dan ketahanan bencana di kabupaten Sigi. Tabel Berikut ini disajikan penjelasan singkat yang dapat mengarahkan prioritas, indikasi intervensi sebagai koridor Pembangunan Kawasan prioritas di Kabupaten Sigi

Tabel 3.17
Highlight Indikasi Intervensi Lokasi Prioritas
Kabupaten Sigi Dalam RPJMN
Tahun 2025-2029

NO.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
B.1	Kawasan pertanian Pangan dan Perkebunan Sulawesi Tengah B1: Kabupaten Sigi	Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Sigi, melalui :
		a) Pemanfaatan sarana prasarana pendukung produksi pertanian, dengan output: penyediaan sarana prasarana pascapanen pertanian serta alat dan mesin pertanian pra panen
		b) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI), dan gangguan lainnya, dengan output: Pelatihan kelompok tani dan pembentukan regu pengendali OPT
		c) Peningkatan mutu produk, dengan output: sertifikasi produk mutu pestisida dan pelatihan kelompok tani
		d) Penguatan regenerasi petani, dengan output: pelatihan vokasi pertanian bagi aparat, pelatihan pertanian bagi non aparat, sertifikasi profesi bidang pertanian, serta pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian
		e) Pelaksanaan bantuan langsung petani, dengan output: pemberian bantuan langsung petani untuk pembelian pupuk serta layanan validasi dan verifikasi pupuk
		f) Teknologi pertanian, dengan output: pembangunan irigasi perpipaan pertanian, pembangunan irigasi perpompaan pertanian, pengembangan jaringan irigasi pertanian, serta Pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim
		g) Akses pembiayaan inklusif, dengan output: fasilitasi/pembinaan/pendampingan akses pembiayaan, penyediaan asuransi pertanian, serta fasilitasi dan pembinaan investasi
		h) Efisiensi rantai nilai, dengan output: fasilitasi pembinaan dan pendampingan efisiensi rantai nilai
		i) Pengembangan hilirisasi kelapa, dengan output: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditas perkebunan, sarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan, neraca komoditas kelapa dan produk turunannya, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa, inkubasi koperasi, pengembangan industri pengolahan kelapa, restrukturisasi mesin/peralatan industri, dan pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro
D.6	Kawasan Transmigrasi (KT) D6: KT Palolo, Kabupaten Sigi	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, melalui:
		a) Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan output: pembangunan dan pengembangan jalan nonstatus, jembatan, system drainase, dan Sarana permukiman
		b) Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output: bantuan sarana produksi pertanian Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi
		c) Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan output: perpindahan dan penempatan transmigran
E.1	Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah E1: Lore Lindu, Kabupaten Sigi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Nasional (TN) Lore Lindu, melalui:
		Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan output: penyusunan kebijakan penguatan pengelolaan areal dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), fasilitasi pengelolaan taman keanekaragaman hayati untuk peningkatan efektivitas pengelolaan, serta pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Palu E7: Kota Palu	Pengelolaan kawasan rawan bencana gempa Palukoro, Matano, dan Saluki di Kota Palu, melalui:

		a) Pelayanan peringatan dini multiancaman bencana dan peningkatan infrastruktur, dengan output: penguatan instrument peringatan dini dan sistem informasi bidang kebencanaan
		b) Peningkatan kemampuan adaptif masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan output: peningkatan kapasitas masyarakat dalam penguatan tanggap bencana, fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam, serta pembinaan penguatan respond system peringatan dini bencana berbasis masyarakat
		c) Peningkatan infrastruktur, dengan output: penataan bangunan dan Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik

II. Arah Pembangunan Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Arah Pembangunan provinsi Sulawesi Tengah telah diatur dalam ketetapan perencanaan berbasis klaster perwilayahan sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 – 2042. Sebagai bagian integrasi secara fungsi ruang maupun administrasi maka kabupaten sigi akan mendorong arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berbasis klaster perwilayahan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Sulawesi Tengah emas. Berdasarkan tahapan identifikasi penyelarasan perencanaan pendukung konteks Pembangunan kewilayahan di kabupaten sigi sebagaimana akan diselaraskan dengan pembangunan kewilayah di level provinsi diarahkan sebagai koridor prioritas yang mendukung Visi, Misi dan program BERANI Tahun 2025-2029. Berdasarkan Gambaran diatas, kabupaten Sigi adalah bagian dari Klaster Perkotaan Pasigala dan Agropolitas Kawasan Pangan Nusantara (KPN). Gambar 3.2 dan Gambar 3.3, dibawah ini menjelaskan arah kebijakan pengembangan wilayah di kabupaten Sigi dengan harapan kedepannya kabupaten sigi sebagai gerbong pendukung kemajuan provinsi di masa akan datang.

1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah PASIGALA (Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi)

Arahan konsep pengembangan perkotaan Pasigala adalah sebagai berikut:

 - a. Pembatasan Pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana tinggi dan sangat tinggi
 - b. Pengembangan kawasan pemukiman penyangga disebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala
 - c. Peningkatan sistem jaringan regional pada kawasan rawan bencana rendah dan kawasan bencana sedang
 - d. Peningkatan sistem jaringan pergerakan regional
 - e. Pengembangan kota palu sebagai kota taman bumi atau Palu Geoprak city dengan fungsi utama perdagangan, jasa dan industri, pendidikan dan riset kebencanaan, unggulan pariwisata berbasis geowisata dengan mitigasi bencana (Ripparkot Palu)
 - f. Pengembangan sarana dan parasarana pemukiman regional di Kabupaten Donggala
 - g. Pengembangan jaringan sumberdaya air sebagai pengurangan resiko bencana likuifaksi

Gambar 3.12
Arah Pembangunan Kewilayahan PASIGALA



PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN SIGI 2025-2045
	penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi layanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum • Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan • Konektivitas, infrastruktur, sarana prasarana • Wilayah perkotaan sebagai bagian dari Metropolitan PASIGALA: Pusat Perdagangan dan jasa global • Agropolitan KPN berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perdagangan internasional, dan jasa lingkungan • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi <i>smart farming</i> dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata PASIGALA skala global • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	KABUPATEN SIGI MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA. Perdagangan dan jasa: kesehatan, pendidikan, pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Lingkungan (PERKOTAAN PASIGALA); Produksi: Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, hutan produksi, pariwisata (Agropolitan KPN).
3	KABUPATEN SIGI SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan sebagai kota dan wilayah yang tangguh, Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat terintegrasi dengan rencana <i>Geopark</i> PASIGALA; Penanganan eks area bencana • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA. • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan Kebun Raya Sigi • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Gambar 3.13
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Sigi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 Kabupaten Sigi, Sebagai berikut:

I. PILAR 1

Kabupaten Sigi Mendukung Sulawesi Tengah Sebagai Pusat Ekonomi Global KTI (Perdagangan Dan Jasa - Agropolitan KPN: AGRIBISNIS dan AGROINDUSTRI; PARIWISATA):

- Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional)
- Pengurangan sampai 100% kemiskinan
- Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
- Pengembangan kawasan pertanian modern berbasis riset dan teknologi.
- Penuntasan kemiskinan
- Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Terintegrasi
- Digitalisasi layanan publik
- Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum
- Tata Kelola Pemerintahan

- Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi
- Stabilisasi keamanan, dan ekonomi makro daerah
- Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan
- Konektivitas, infrastruktur, sarana prasarana
- Wilayah perkotaan sebagai bagian dari Metropolitan PASIGALA: Pusat Perdagangan dan jasa global
- Agropolitan KPN berbasis pertanian modern: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lainnya
- EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO
- Layanan kesehatan dan RS berstandar internasional
- Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional
- Kerjasama riset investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perdagangan internasional
- Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi smart farming dan lingkungan
- Layanan jasa pariwisata PASIGALA skala global
- Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif
- Penataan dan pengelolaan pasar tradisional

II. PILAR 2

Kabupaten Sigi Mendukung Sulawesi Tengah Sebagai Penunjang Ekonomi IKN dan Industri Berbasis SDA:

Perdagangan dan Jasa:

- Kesehatan, pendidikan, pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Lingkungan (PERKOTAAN PASIGALA);

Produksi:

- Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, hutan produksi, pariwisata (Agropolitan KPN).

III. PILAR 3

Kabupaten Sigi Sebagai Wilayah Sulawesi Tengah Yang Hijau, Ekologis, dan Produktif:

- Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi
- Pengembangan sebagai kota dan wilayah yang tangguh, Pengembangan Taman Bumi (Geopark): kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat terintegrasi dengan rencana Geopark PASIGALA
- Penanggulangan akses bencana
- Penerapan mitigasi bencana melalui program pembangunan berbasis adaptasi perubahan iklim dan arsitektur ramah lingkungan
- Pengembangan arsitektur kota yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan ramah wisatawan
- Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan konsumsi rumah tangga
- Transportasi publik yang lingkungan terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA

- Peningkatan rencana RTH Publik, kualitas kawasan hijau, kelestarian hutan
- Peningkatan rencana RTH Privatisasi
- Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan
- Kontribusi pada pengurangan dampak *climate change* dan ERK.

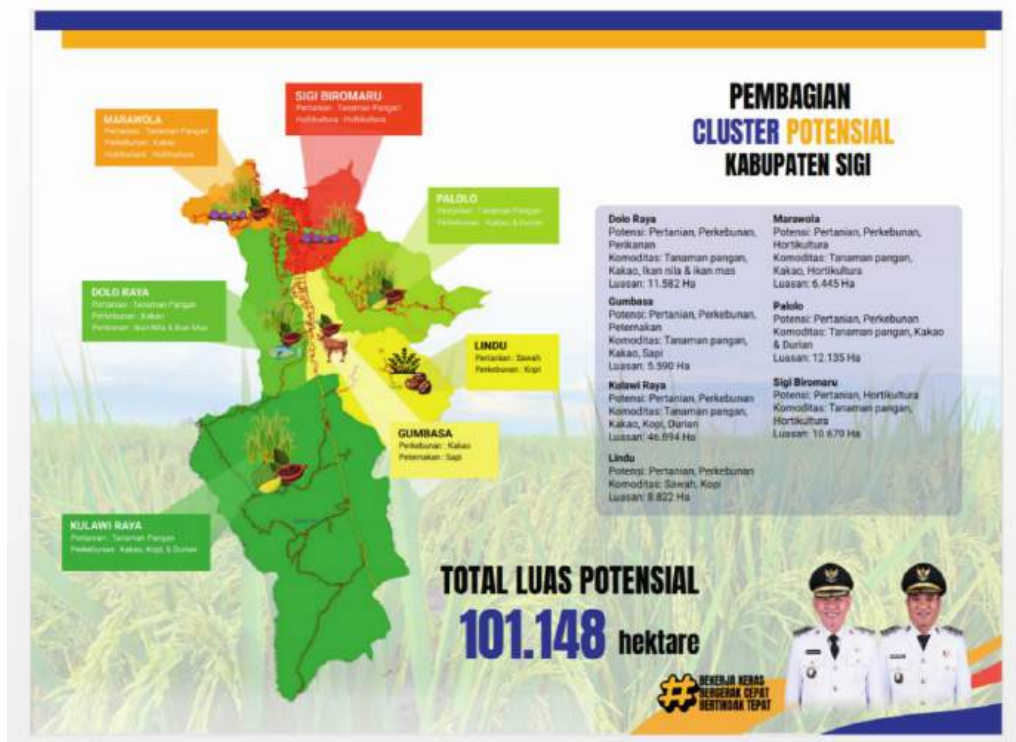
Gambaran diatas adalah berisi panduan dan arahan kebijakan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Sigi, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, perdagangan, pendidikan, pariwisata, serta pemanfaatan potensi ekonomi berbasis sumber daya alam dan inovasi lingkungan berkelanjutan.

III. Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Tahun 2025-2029 Dalam RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041

Arah Pembangunan Wilayah RPJMD disusun dengan melakukan penelaahan RTRW Tahun 2021-2041. Permendagri 87 tahun 2017 memberi pedoman bahwa Perencanaan Pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana Pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJPD dan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dan RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi (secara geografis) arah pengembangan wilayah, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun kedepan.

Gambar 3.14
Arah Pembangunan CLUSTER POTENSIAL Pertanian dalam
RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029



Bersasarkan data potensial diatas dapat dijelaskan pembagian cluster Kawasan potensial dikabupaten sigi tersebar di 7 kawasan seluas 101.148 hektare, sebagai berikut:

1. Cluster Sigi Biromaru
 - Komoditi Potensial : Pertanian: Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Cluster Gumbasa
 - Komoditi Potensial: Perkebunan: Kakao, dan Peternakan: Sapi;
3. Cluster Palolo
 - Komoditi Potensial: Pertanian: Tanaman Pangan, dan Perkebunan: Kakao dan Durian;
4. Cluster Lindu
 - Komoditi Potensial: Pertanian: Sawah, dan Perkebunan: Kopi;
5. Cluster Marawola
 - Komoditi Potensial: Pertanian: Tanaman Pangan, Perkebunan: Kakao, dan Hortikultura;
6. Cluster Dolo Raya
 - Komoditi Potensial: Pertanian: Tanaman Pangan, Perkebunan: Kakao, dan Perikanan: Ikan Nila, Mas dan Lele;
7. Cluster Kulawi Raya
 - Komoditi Potensial: Tanaman Pangan dan Perkebunan: Kakao, Kopi & Durian;

Pengembangan cluster potensial di kabupaten sigi sebagai mana gambaran tersebut menjadi dasar penting mendukung keberhasilan mencapai visi berbasis pertanian dan pariwisata. Berikut ini sektor unggulan yang akan dikembangkan sebagai barisan terdepan mewujudkan kemajuan dan keberlanjutan kabupaten Sigi, mendukung prioritas nasional ASTA CITA maupun program BERANI Provinsi Sulawesi Tengah.

1) Sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Arah pengembangan wilayah dalam bidang Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui berbagai program strategis. Di antaranya, penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian, serta program cetak sawah yang mencakup 3000 hektar di kawasan Lindu dan Palolo, yang bertujuan memperluas lahan pertanian. Selain itu, peningkatan produksi padi di lahan LP2B sebesar 5% menjadi prioritas, diikuti dengan program peningkatan pendapatan petani miskin melalui pendampingan dan akses pasar yang lebih baik. Untuk melindungi petani dari risiko bencana, asuransi pertanian akan diperkenalkan di daerah rawan bencana. Program panen raya untuk komoditas utama seperti padi dan jagung juga akan didorong untuk memastikan kecukupan pangan daerah. Pengembangan komoditas perkebunan seperti kakao, kopi, kelapa, durian, dan kemiri juga menjadi fokus utama, yang akan dilakukan secara agroforestri dengan penerapan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Selain itu, program pewilayahan komoditas akan didorong untuk memetakan dan mengoptimalkan kawasan berdasarkan potensi terbaik setiap komoditas. Revitalisasi lahan kritis dan lahan yang terdampak bencana juga akan menjadi prioritas, dengan rekondisi dan pemulihan tanah untuk kembali produktif, mendukung keberlanjutan produksi pertanian dan perkebunan. Penerapan pertanian cerdas iklim akan diintensifkan, dengan mengadaptasi teknologi dan praktik pertanian yang dapat menanggapi perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tahan iklim ekstrim, efisiensi penggunaan air, dan teknik konservasi tanah. Semua langkah ini diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani.

2) Sektor perikanan

Arah pengembangan wilayah dalam bidang perikanan berfokus pada peningkatan produksi perikanan, keberlanjutan sumber daya alam, dan kesejahteraan nelayan. Salah satu prioritas utama adalah perluasan lahan baku perikanan, yang akan

dilakukan dengan membuka lahan baru yang potensial untuk pengembangan budidaya ikan, dengan target mencapai luas lahan tertentu, seluas 100 hektar. Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, akan dilakukan peningkatan produksi perikanan di kawasan Lindu, dengan target produksi yang lebih tinggi, produksi perikanan tangkap sebanyak 88,30 Ton pada tahun 2030, produksi perikanan budidaya sebanyak 1.037,18 Ton pada tahun 2030, yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi budidaya ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peningkatan produksi perikanan di Dolo/Dolo Raya juga menjadi bagian dari strategi, dengan menargetkan peningkatan volume hasil tangkapan ikan dan budidaya, serta memperkuat infrastruktur pendukung, seperti fasilitas pengolahan dan distribusi hasil perikanan. Salah satu tantangan yang perlu diatasi adalah predator ikan lele di Lindu, yang dapat mengganggu kelangsungan budidaya ikan. Oleh karena itu, penanganan terhadap predator ikan lele melalui pengelolaan ekosistem yang baik dan pemantauan secara rutin akan dilakukan. Untuk mendukung peningkatan hasil perikanan, penting juga untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui program pelatihan, peningkatan akses permodalan, serta penyediaan fasilitas yang mendukung kelancaran aktivitas perikanan. Semua program ini diharapkan dapat mendorong produktivitas sektor perikanan, sekaligus memperbaiki taraf hidup nelayan.

3) Sektor peternakan

Arah pengembangan wilayah dalam bidang peternakan berfokus pada peningkatan produksi ternak yang berkualitas, serta mendukung kesejahteraan peternak melalui berbagai kebijakan dan program yang terintegrasi. Salah satu strategi utama adalah penerapan pola integrasi, yang menggabungkan antara usaha pertanian dan peternakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta penerapan inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas populasi ternak secara lebih terkontrol dan selektif. Program peningkatan produksi daging sapi juga menjadi prioritas, dengan target produksi 80 Ton daging sapi di seluruh kecamatan, yang sebelumnya hanya mencapai 40 ton, melalui perbaikan manajemen pemeliharaan dan pemberian pakan yang lebih baik. Peningkatan populasi kambing juga menjadi fokus, dengan target peningkatan dari 30.000 menjadi 40.000-50.000 ekor, untuk mendukung kebutuhan konsumsi daging kambing di daerah tersebut. Dalam upaya pengembangan komoditas lokal, karava tandau dan bulupontu akan terus dikembangkan sebagai bagian dari diversifikasi produk ternak. Untuk memperkuat sistem distribusi dan pemrosesan hasil ternak, akan dilakukan pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) dan pasar hewan di kawasan Beka, yang dapat mendukung

kelancaran pasokan dan distribusi produk hewan yang lebih terjamin kualitasnya. Selain itu, pengembangan produksi daging secara keseluruhan akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas dengan memanfaatkan teknologi dalam pemeliharaan ternak dan pengolahan produk olahan daging. Tak kalah penting, peningkatan produksi telur untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) akan menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan, dengan meningkatkan akses dan ketersediaan produk pangan hewani yang bergizi. Semua inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas peternakan yang berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan peternak di wilayah ini.

4) Sektor pariwisata

Arah pengembangan wilayah dalam sektor pariwisata berfokus pada peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan destinasi wisata unggulan, dan penciptaan paket-paket wisata yang menarik serta beragam. Salah satu target utama adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan manca negara, yang diharapkan naik dari 20 orang/tahun 2025 menjadi 40 orang/tahun, 2030 melalui promosi yang lebih intensif dan peningkatan kualitas pelayanan di destinasi wisata. Destinasi Lindu, Wayu, dan Bora akan menjadi kawasan unggulan yang akan terus dikembangkan, dengan fokus pada keberagaman alam, budaya, dan potensi wisata yang dimiliki masing-masing daerah. Untuk mendukung diversifikasi pariwisata, akan dibuat paket agrowisata di wilayah seperti Dolo Barat, Mantikole, Pisang, Langsat, dan Balumpewa, yang menggabungkan keindahan alam dengan potensi pertanian lokal, memberikan pengalaman wisata yang edukatif sekaligus menyenangkan. Selain itu, kegiatan paralayang dan motor cross akan dipromosikan di daerah yang memiliki potensi alam untuk kegiatan olahraga ekstrem, sedangkan durian montong yang terkenal di daerah ini akan dijadikan daya tarik kuliner yang unik. Pariwisata alam, budaya, dan pertanian akan menjadi tiga pilar utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, akan dikembangkan wisata pada ruang terbuka hijau yang dapat menawarkan pengalaman wisata alam yang nyaman di tengah kota, seperti taman, hutan kota, dan jalur hijau. Ruang terbuka hijau akan menjadi tempat bagi pengunjung untuk menikmati udara segar, rekreasi, serta kegiatan outdoor seperti jogging, piknik, dan bersepeda, yang akan menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang menginginkan suasana yang lebih alami dan rileks. Semua langkah ini diharapkan dapat menjadikan wilayah ini sebagai tujuan wisata utama yang menarik, berkelanjutan, dan dapat diandalkan dalam jangka panjang, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat dalam bentuk lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal.

5) Sektor Pekerjaan Umum

Sektor Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) memainkan peran penting dalam mendukung komoditas unggulan pertanian dan pariwisata. Perbaikan irigasi akan memastikan ketersediaan air untuk pertanian, khususnya untuk komoditas unggulan seperti padi, kakao, kopi, dan kelapa di daerah seperti Palolo, kulawi, Lindu, Marawola Barat, Pipikoro dan Kawasan lainnya. Menyusun perencanaan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) untuk pengembangan jaringan irigasi akan mempermudah pengelolaan sumber daya air secara lebih efisien. Untuk sektor pariwisata, penyediaan air bersih dan perbaikan jalan menuju destinasi wisata seperti Lindu, Wayu, dan Bora akan mempermudah akses dan meningkatkan kenyamanan wisatawan. Revitalisasi lahan terdampak bencana juga menjadi fokus untuk memastikan lahan kembali produktif. Selain itu, penyediaan air baku yang cukup akan mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat serta sektor pertanian dan pariwisata. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Sigi diharapkan dapat berkembang menjadi kawasan yang unggul dalam pertanian berkelanjutan dan pariwisata alam.

3.2.3 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

1. Program Unggulan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Program Unggulan merupakan program yang diprioritaskan untuk dapat memberikan dampak signifikan bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sigi, yang merupakan Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Adapun Program Unggulan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas.
Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, serta pembukaan akses jalan di daerah terisolir guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menggerakkan ekonomi lokal serta pembangunan infrastruktur perkantoran.
2. Akses Air Bersih, Perumahan Layak dan Layanan Publik untuk Masyarakat Kurang Mampu.
Meningkatkan akses air bersih, sanitasi, perumahan layak, serta menyediakan layanan meteran air dan meteran listrik gratis bagi

masyarakat kurang mampu untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

3. Seragam Gratis Bagi Siswa Baru dari Masyarakat Kurang Mampu. Peningkatan Sarana Pendidikan dan Kesehatan yang Terintegrasi Penyediaan Seragam Gratis Bagi dari Masyarakat Kurang Mampu, membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang unggul di setiap kecamatan, melanjutkan program "1 (satu) kecamatan 1 (satu) dokter" dan menciptakan sekolah unggulan di setiap kecamatan guna meningkatkan kualitas SDM.
4. Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM yang Berdaya Saing, Bantuan Permodalan dengan Hibah 1 (satu) Juta – 10 (sepuluh) Juta Rupiah dan KUR 0%.
Mengoptimalkan sektor pertanian melalui fasilitasi ketersediaan bibit, pupuk, alat mesin pertanian (ALSINTAN) dan subsidi bahan bakar bagi petani, Penyediaan Ternak dan Perikanan serta meningkatkan akses keuangan dan permodalan untuk UMKM guna mendorong produktivitas dan daya saing lokal, PERUSDA dan Koperasi berbasis pertanian, koperasi lain atas kebijakan pemerintah memfungsikan kembali Terminal serta pembangunan Pasar Induk Modern Tambuli dan Pembangunan Rumah Potong Hewan dan Pasar Ikan Air Tawar.
5. Penerapan Infrastruktur Hijau dan Mitigasi Bencana.
Menerapkan praktik pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, sambil memperkuat mitigasi bencana di daerah rawan bencana.
6. Pengembangan SDM melalui Pelatihan, Pendidikan Formal serta Non Formal dan Layanan beasiswa, bantuan biaya Pendidikan dan biaya personal Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Beasiswa Siswa Berprestasi.
Meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat, memperkuat sekolah-sekolah swasta, serta memberikan layanan beasiswa bagi masyarakat Kurang Mampu dan beasiswa siswa, mahasiswa berprestasi.
7. Penguatan Ekonomi dan Perlindungan Sosial bagi Petani, Lembaga Adat, Majelis Adat, Dewan Adat dan Masyarakat Kurang Mampu.
Mengembangkan program asuransi pertanian, peternakan dan ketenaga kerjaan bagi petani dan peternak yang terdata dalam DTKS. Penyediaan asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan bagi lembaga adat, majelis adat dan dewan adat, serta melanjutkan perlindungan sosial untuk tenaga honor daerah dengan program seperti "Masagena Plus" untuk mendukung kesehatan dan pemberdayaan masyarakat rentan.
8. Pengembangan Pariwisata, Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Meningkatkan layanan pariwisata di Danau Lindu, Paralayang dan Air Panas Bora serta mendorong Desa Wisata, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Binangga, Kalukubula,

Lolu, dan Kabobona, dan Kawasan lainya guna mendukung pariwisata lokal sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.

9. Penerapan Teknologi dalam Bisnis dan Pemerintahan.
Mendorong digitalisasi dalam UMKM dan sektor bisnis untuk meningkatkan efisiensi serta menerapkan sistem e-government guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan.
10. Peningkatan Harmoni Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
Memperkuat harmoni sosial melalui program "Sigi Religi" melanjutkan Umroh Gratis bagi Imam Masjid dan Pegawai Syarah serta Wisata Religi bagi Opsir/Pendeta, kegiatan Festifal Maulid, Festival Rohani bagi umat Nasrani dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan. Mendorong terbentuknya Kampung Religi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi kemasyarakatan.

Tabel 3.17
Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Cerdas” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
Pendidikan	Rata rata lama sekolah	9,04 (2024) 9,80 (2025) 10,38 (2030)	9,03 (2024) 9,12 (2025) 9,59 (2030)	-Tidak terdapat pungutan bagi SMA/SMK/SLB Negeri dan swasta	-Seragam Gratis Bagi Siswa Baru dari Masyarakat Kurang Mampu	P3
				-Gratis Pembiayaan SPP SMA/SMK/SLB swasta (khusus siswa Miskin)	-Peningkatan Sarana Pendidikan dan Kesehatan yang Terintegrasi	
				-Memberikan bantuan Seragam Sekolah dan sepatu sekolah SMA/SMK/SLB bagi siswa miskin	-Penyediaan Seragam Gratis Bagi dari Masyarakat Kurang Mampu, membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang unggul di setiap kecamatan	
				-Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C 25 Tahun ke atas	-program "1 (satu) kecamatan 1 (satu) dokter"	
				-Pembangunan Satuan Pendidikan Menengah Atas	-menciptakan sekolah unggulan di setiap kecamatan guna meningkatkan kualitas SDM	
	Harapan Lama Sekolah	13,34 (2024) 13,50 (2025) 13,64 (2030)	13,13(2024) 13,26 (2025) 13,94 (2030)	-Pembiayaan biaya prakerin untuk SMK	-Pengembangan SDM melalui Pelatihan, Pendidikan Formal serta Non Formal	P6
				-Biaya Uji Kompetensi untuk SMK	-Layanan Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang Mampu	
				-Beasiswa Perguruan Tinggi bagi mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi	-Beasiswa Siswa Berprestasi 'BERANI CERDAS'	
				-Menyiapkan makan minum di SLB		

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
Pelatihan Vokasional Siap Kerja Bagi Milenial Gen Z	Wira Usaha Baru	1.500 WUB		-Peningkatan Pelatihan Kompetensi Bagi tamatan SMA yang tidak ingin kuliah dan akan bekerja di BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas)	Meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat, memperkuat sekolah-sekolah swasta, serta memberikan layanan beasiswa bagi masyarakat Masyarakat Kurang Mampu dan beasiswa siswa berprestasi.	P6
				-Peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)		
				-Mendorong Penciptaan Wirausaha Baru (WUB)		
				-Job Fair di satuan pendidikan SMK		

Tabel 3.18

Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Sehat” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
Kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi	98 (2024) 99.5 (2025) 99.5 (2030) 80 % keaktifan		-Membiayai peserta Jaminan Kesehatan dalam pembiayaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Provinsi Dan Provinsi Membiayai iuran PBI	-Penyediaan asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan bagi lembaga adat, majelis adat dan dewan adat, serta melanjutkan perlindungan sosial untuk tenaga honor daerah dengan program seperti "Masagena Plus" untuk mendukung kesehatan dan pemberdayaan masyarakat rentan	P7
	-Usia Harapan Hidup	69,98 (2024) 71,64 (2025) 73 (2030)	71,33 (2024) 71,69 (2025) 73,50 (2030)	-Pembinaan dan pelatihan tenaga kesehatan		
				-Pelatihan Kompetensi Dasar yang wajib dilakukan oleh Kader Posyandu (di Kabupaten).		
				-Pelatihan Peningkatan SDM bagi Petugas UGD penanganan Bayi dan Balita di Fasilitas Kesehatan Layanan Tingkat Pertama (FKLTP).		
				-Pengadaan alat Antropometri.		

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
	-Stunting	26,1 (2024) 23,9 (2025) 21,9 (2030)	33 (2024) 30 (2025) 15 (2030)	-Mendorong komitmen penurunan stunting dengan melaksanakan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui aksi konvergensi tingkat kecamatan, kabupaten dan Provinsi melalui perencanaan, implementasi melalui penandaan dalam SIPD serta melakukan inovasi lintas sektor -Intervensi Sensitif: Pemenuhan Jamban Keluarga.		
	-SPM Kesehatan	89% (2024) 100% (2025) 100% (2030)		1.Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana daerah provinsi, dan 2.Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.		
	Ketersediaan Sumberdaya Kesehatan di Rumah Sakit/puskesmas	Lengkap (Rumah Sakit Provinsi)		Melakukan Fasilitasi Kekurangan Tenaga Kesehatan Ke kementerian Kesehatan.		

Tabel 3.19

Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Sejahtera” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
Sosial	Tingkat Kemiskinan	11,04 (2024) 11,06 – 11,56 (2025) 6,10-7,00 (2030)	12,06 (2024) 11,8-11,5 (2025) 9,2-9,0 (2030)	-Program Bantuan Sosial Pangan Daerah (Bansos bertujuan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam konsumsi pangan di Sulawesi Tengah. Penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia dalam keluarga miskin menggunakan data DTSEN.	Penguatan Ekonomi dan Perlindungan Sosial bagi Petani, Lembaga Adat, Majelis Adat, Dewan Adat dan Masyarakat Kurang Mampu.	P4
				Target		
				Desil 1-2 Kemiskinan ekstrem (2026- 2030)		
				UEP Graduasi		
				-Intervensi melalui Bantuan usaha Ekonomi Produktif UEP Graduasi dimana merupakan bantuan intervensi melalui sasaran Masyarakat miskin, penyandang disabilitas produktif dan lanjut usia potensial dalam mengembangkan usaha menuju kemandirian ekonomi dan keluar dari kemiskinan Besar Bantuan bantuan sarana usaha perorangan atau keluarga rentan miskin (desil 4)		
				Target		
				Desil 4 (2026-2030)		
				KUBE (Kelompok Usaha Bersama)		
				Target Desil 3-4 (2026-2030)		

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
				Guru dan tenaga pendidik SMA disiapkan oleh Provinsi		
Berani Satu Harga	Pengendalian Inflasi	1,29 (2024) 3,6-4,6 (2025) 3,00-3,10 (2030)		-Menyiapkan Pelaksanaan Pasar Murah (Operasi Pasar)/Bahan Pangan Murah -Memfasilitasi berkaitan dengan pembangunan gudang Bulog		

Tabel 3.20

Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Makmur” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produktivitas Gabah 5-6 Ton/ Ha			Pemenuhan target Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Se Sulteng seluas 251.858 Ha berkoordinasi intensif dengan pihak Danrem 132/Tadulako dan KOREM 132/Tadulako	-Mengoptimalkan sektor pertanian melalui ketersediaan bibit, pupuk, alat mesin pertanian (ALSINTAN) -subsidi bahan bakar bagi petani, Penyediaan Ternak dan Perikanan serta meningkatkan akses keuangan dan permodalan untuk UMKM guna mendorong produktivitas dan daya saing lokal	P4
	ekstenfikasi			Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Percetakan lahan sawah baru	-PERUSDA dan Koperasi berbasis pertanian, memfungsikan kembali Terminal serta pembangunan Pasar Induk Modern Tambuli	
	ekstenfikasi			Melakukan pengawasan dan pembinaan luasan kawasan pertanian nasional sebagai berikut: Komoditas Padi seluas 5.000 Ha, Komoditas Jagung seluas 25.000 Ha, dan Komoditas Kacang Tanah seluas 1.100 Ha, Komoditas Durian seluas 1.620 Ha, Komoditas Alpokat seluas 810 Ha, Komoditas Manggis seluas 300 Ha, Komoditas Mangga seluas 150 Ha, Komoditas Bawang Merah seluas 50 Ha, Komoditas Cabai seluas 100 Ha, Komoditas Sayuran Lainnya seluas 20 Ha, dan Komoditas Buah lainnya seluas 30 Ha,		

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
	ekstenfikasi			Pemenuhan target Luas Tambah Tanam (LTT) Jagung se Sulteng seluas 5.000 Ha berkoordinasi intensif dengan Polda Sulteng.		
	Intensifikasi	64.873 Ha		Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan Pupuk Urea sebanyak 568.800 Kg, Pupuk NPK sebanyak 711.000 Kg, Pupuk organik sebanyak 22.752 Liter, Benih Unggul sebanyak 3.550 Kg, pestisida 2.844 Liter dan Alsintan untuk mendukung produktivitas 5-6 Ton Gabah.		
	Intensifikasi			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Dinas Cipta karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan berfungsinya irigasi Kewenangan Provinsi di Kabupaten Sigi yaitu Daerah Irigasi Paneki		

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
Tenaga Kerja	BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan bagi Petani dan Nelayan	3.491 Kepala RT		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Berani Makmur pada Program BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan bagi Petani dan Nelayan budidaya	Penyediaan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi lembaga adat, majelis adat dan dewan adat, serta melanjutkan perlindungan sosial untuk tenaga honor daerah dengan program seperti "Masagena Plus" untuk mendukung kesehatan dan pemberdayaan masyarakat rentan.	P7
Kelautan dan Perikanan	Perikanan Budidaya	(2025) 791156,47 TON - (2030) 919668,72 TON	(2025) 894.71 TON - (2030) 1.037.18 TON	(2026-2030) Pengadaan sarana prasarana budidaya perikanan dan kapasitas kelompok dan koperasi usaha bersama berbasis perikanan	Pasar Ikan Air Tawar; Penyediaan bibit Perikanan serta meningkatkan akses keuangan dan permodalan untuk UMKM guna mendorong produktivitas dan daya saing lokal	P4
Lingkungan Hidup	IKLH	79,74 (2024) 81,79 (2025) 85,97 (2030)	79,78 (2024) 70,00 (2025) 71,77 (2030)	Alokasi Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) 2026-2030	Menerapkan praktik pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, sambil memperkuat mitigasi bencana di daerah rawan bencana.	P5
PERKEBUNAN				Mendukung kawasan Perkebunan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (bibit kakao dan kelapa)	Mengoptimalkan sektor pertanian melalui ketersediaan bibit, pupuk, alat mesin pertanian (ALSINTAN) dan subsidi bahan bakar bagi petani, Penyediaan	P4
PETERNAKAN	Berani 159 Excellent			Pengadaan Straw Semen Beku dan indukan Sapi Eksotik		

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
				Pelatihan Petugas Inseminator Buatan dan Petugas Kebuntingan	Ternak dan Perikanan serta meningkatkan akses keuangan dan permodalan untuk UMKM guna mendorong produktivitas dan daya saing lokal, PERUSDA dan Koperasi berbasis pertanian, memfungsikan kembali Terminal serta pembangunan Pasar Induk Modern Tambuli dan Pembangunan Rumah Potong Hewan dan Pasar Ikan Air Tawar	

Tabel 3.21

Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Harmoni” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
PARIWISATA	Berani Harmoni dengan topik berani Desa Wisata	13	5	Tahun 2026	-Meningkatkan layanan pariwisata di Danau Lindu, Paralayang dan Air Panas Bora serta mendorong Desa Wisata -pengembangan (RTH), guna mendukung pariwisata lokal sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan	P8
				Pemerintah Provinsi Dinas Pariwisata melakukan Penyusunan Dokumen Kajian Potensi Desa Wisata.		
				Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan dan melakukan promosi Desa Wisata.		
				Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan hak intelektual ekonomi kreatif.		
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaaan Gender (IDG)	77,52 (2023) 78,00 (2025) 83,00 (2030)	94,37 (2023) 91,95 (2025) 94,27 (2030)	Wira Usaha Baru '-Melakukan pelatihan tata rias kepada perempuan (Siswa lulus SMA/SMK yang tidak melanjutkan kuliah) di kembangkan skill dan akan diberikan sertifikat sebagai modal wirausaha baru : Target 50 orang (2026) 100 orang (2027) 150 orang (2028) 200 orang (2030)	Meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat,	P6

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	60,00 (2024) 61,15 (2025) 70,39 (2030)	20,00 (2025) 21,00 (2030)	Wira Usaha Baru -Melakukan pelatihan dan bimtek kepada pemuda usia 16-30 tahun sesuai dengan UU nomor 9 tahun 2020 tentang Pemuda di kembangkan skill dan akan diberikan sertifikat sebagai modal wirausaha baru Target 200 pemuda (2026-2030)		
PERINDUSTRIAN	-Wirausaha Baru	300		-Penumbuhan wira usaha baru melalui pelatihan vokasi		
				-Melakukan pelatihan untuk Pemberdayaan Sentra Industri Kecil Menengah,		
				-Memfasilitasi peluang kemitraan antara IKM dgn Industri besar		
				-Melaksanakan kegiatan pemasaran produk dan promosi produk sentra IKM		
				-Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil Pelatihan Motif Batik Khas Daerah		
KOPERASI dan UMKM	"berani Akses Pembiayaan"			-Memberikan subsidi bunga pinjaman kepada UMKM sebanyak 6% pada program KUR sehingga mendapatkan kemudahan dalam pengembalian pinjaman akan di suport dengan tenaga pendamping KUR untuk kegiatan sosialisasi dalam rangka kelancaran	-Mendorong digitalisasi dalam UMKM dan sektor bisnis untuk meningkatkan efisiensi serta menerapkan sistem e-government guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam administrasi	P4 dan P9

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
					pemerintahan. -KUR 0%	

Tabel 3.22

Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Lancar” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
Pekerjaan Umum	Persentase Kemantapan Jalan	64,98% (2024) 65% (2025) 73% (2030)		-Peningkatan Fungsi dan pemantapan Jaringan Jalan menjadi jalan nasional JKP-1 ruas: 1. Kalukubula – Kalawara 2. Kalawara – Kulawi 3. Sp. Kulawi – Gimpu 4. Gimpu – Peana 5. Peana – Kalamanta – Seko (Bts Sulsel). -Pembangunan Jalan Desa dan rabat beton -Pembangunan dan Pemantapan Jalan Kolektor Primer JKP-3 kewenangan provinsi ruas Tanggarawa – Batas (Wugaga); -Pemantapan Jalan Kolektor Primer (JKP-2) ruas: 1. Karanja Lemba II (Sigi) 2. Palolo – Dongidongi (Bts. Kab. Poso) 3. Biromaru – Paneki – Pombewe – Oloboju – Bora – Palolo	-Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi -Pembukaan akses jalan di daerah terisolir guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menggerakkan ekonomi lokal -pembangunan infrastruktur perkantoran -Meningkatkan akses air bersih, sanitasi, perumahan layak -menyediakan layanan meteran air dan meteran listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu (DTKS)	P1
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	64,94 %(2024) 65,95 % (2025) 71,00 % (2030)		-Penanganan peningkatan irigasi Paneki (peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dari saluran tanah menjadi pasangan batu; -Operasi/Pemeliharaan irigasi Paneki berupa parasan saluran, galian endapan dan pemeliharaan;		

Tabel 3.23

Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Menyala” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
Energi dan Sumber Daya Mineral	Konsumsi Listrik Perkapita	582 KWh (2024) 612 KWh (2025) 801 KWh (2030)		-Pengadaan/Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, di Ruas Jalan Provinsi: -Bantuan pemasangan meteran Listrik gratis; -Sesuai usulan proposal;	menyediakan layanan meteran air dan meteran listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu (DTKS) untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik.	P 2
Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	3,00 poin (2024) 3,15 poin (2025) 3,40 poin (2030)	0,37 (2025) 3,00 (2030)	Pelatihan untuk Operator dari Diskominfo santik bagi desa-desa yang belum memiliki jaringan internet yang ada di Kabupaten Sigi :	Mendorong digitalisasi dalam UMKM dan sektor bisnis untuk meningkatkan efisiensi serta menerapkan sistem e-government guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan.	P 9
	Indeks PTIK	5,77 (2024) 5,77 (2025) 6,09 (2030)	5,70 (2025) 7,27 (2030)	-Pemerintah Provinsi mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui BPKAD		

Tabel 3.24

Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berkah” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi

URUSAN	Sasaran	Target		Program Intervensi		Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,66-77,81 (2025) 80,00-81,25 (2030)	75,00 (2025) 76,89 (2030)	-Memberikan Insentif bagi Guru Mengaji, Marbot, Pendeta/Tokoh Agama dan Pemangku Adat Target 2026-2030 Berdasarkan usulan Kabupaten Sigi -Penyetaraan Status Pesantren, Madrasah dan Sekolah Keagamaan -Perbaikan sarana prasarana keagamaan -Memperkuat peran FKUB dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Memperkuat harmoni sosial melalui program "Sigi Religi" melanjutkan Umroh Gratis bagi Imam Masjid dan Pegawai Syarah serta Wisata Religi bagi Opsir/Pendeta, kegiatan Festifal Maulid, Festival Rohani bagi umat Nasrani dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan.	P10

Tabel 3.25

Keselarsan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Berintegrasi” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi

URUSAN	Sasaran	Program Intervensi				Keterangan
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	
BPKAD	Indeks Pelayanan Publik	3,48 (2025) 3,88 (2030)	79,5 (2024) 80,30 (2025) 84,39 (2030)	Pemberian bantuan keuangan sebesar 5 Milyar per Kabupaten untuk Mengakomodir urusan pelayanan publik yang telah diusulkan dalam musrenbang namun tidak diakomodir	-Penerapan Teknologi dalam Bisnis dan Pemerintahan -Mendorong digitalisasi. -meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan.	P 9

3.2.4 PROGRAM LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN KEWILAYAHAN

A. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERINTEGRASI

Kemiskinan bersifat multidimensional. Karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan dimensi ketidakberdayaan karena kemelaratan yang akut, dimensi ketimpangan struktural, dan kemunduran perekonomian yang mengancam kesejahteraan, semua pelaku ekonomi. Pada dimensi pertama, orang miskin hanya dapat keluar dari kemiskinan bila negara atau pihak lain memberi pertolongan (*charity*) dengan jaminan sosial dan pelayanan publik yang murah. Pada dimensi kedua, orang miskin dapat keluar dari jerat kemiskinan jika semua hambatan struktural “dibereskan” sehingga mereka memiliki akses pada berbagai kebutuhan dasar, memiliki kesempatan kerja, dan bekerja keras untuk dapat lebih mandiri. Pada dimensi ketiga, perlu adanya pertumbuhan ekonomi melalui investasi sehingga terbentuk sektor produksi dan struktur ekonomi yang kuat, muncul hubungan sinergis antara usaha skala kecil, menengah, dan besar, serta terbuka kesempatan kerja yang lebih luas.

Program penanggulangan kemiskinan di kabupaten sigi berpedoman kepada pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Mengambil Langkah yang diperlukan dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat. Melaksanakan strategi kebijakan meliputi: a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat; b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat.

Intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sigi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran visi RPJMD tahun 2025–2029, yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Salah satu indikator keberhasilannya diukur melalui proyeksi tingkat kemiskinan pada tahun 2030, yang ditargetkan berada pada kisaran 9,00–9,20 persen.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas tim koordinasi secara terarah, serta pelaksanaan aksi konvergensi program lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut mencakup pemerintah pusat, kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, LSM/NGO, serta forum kelompok masyarakat. Seluruh pihak berperan secara

terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut. Skema cross cutting program sebagai berikut.

GAMBAR 3.15

Cross Cutting Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029



Cross cutting program dilakukan untuk memudahkan aksi konvergensi yang harus terlaksana secara multi sektoral dengan menggambarkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Program dan kegiatan sesuai Perangkat Daerah yang menangani berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.26
Cross Cutting Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

NO	Nama OPD	Nama dan Narasi Program	Indikator Program
1	2	3	4
1	DIKBUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase terlaksananya SPM Pendidikan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi
2	DINSOS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya yang berkualitas
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang berkualitas
3	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Yang Dilegal Formalkan
4	DISPERINDAG	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana yang Memenuhi Standar Teknis
6	DISTANHORBUN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana yang Memenuhi Standar teknis
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana yang Memenuhi Standar teknis
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Yang Berkualitas Sesuai Standar Teknis
7	DISDUKCAPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi Adminduk yang tersaji
8	DPPKB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
9	DPMD	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
10	DPKP	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan

NO	Nama OPD	Nama dan Narasi Program	Indikator Program
			Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 9sepuluh) Ha
11	DPUTR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum yang layak
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi yang layak
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang ditindaklanjuti OPD
13	DKPP	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Neraca Bahan Makanan (NBM)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	NTN Perikanan Budidaya
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	NTN Perikanan Tangkap
14	DISNAKERTRANS	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Angka Partisipasi angkatan kerja
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap di sektor formal dan informal
15	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Kesehatan
16			

B. Cross Cutting Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, produktif, sejahtera dan mandiri harus dilakukan semenjak masa emas (golden ages) manusia yaitu di 1000 Hari Pertama Kehidupan (270 hari dimasa kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupannya). Hal tersebut sejalan dengan upaya percepatan penanggulangan stunting yang dilakukan secara konvergensi dan terintegrasi. Konvergensi berarti aksi atau gerakan yang mengarah atau ditujukan pada tujuan yang diinginkan. Secara harafiah konvergensi berarti “mengumpulkan sesuatu yang berserakan” dan jika diterapkan pada Perangkat Daerah/Instansi berarti mengarahkan (mengumpulkan) program dan kegiatan regular yang sudah ada di Perangkat Daerah/Instansi untuk diarahkan pada tujuan yang diinginkan sehingga tercipta harmonisasi kerja, sedangkan integrasi yaitu keterpaduan gerakan, kesamaan ritme atau langkah yang seirama oleh perangkat daerah kepada tujuan dan sasaran bersama melalui aksi program dan kegiatannya yang sesuai dengan tugas fungsi masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Stunting atau sering disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK di samping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan keterlambatan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan aktivitas anak di masa depan. Stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan produk domestik bruto (PDB) sekitar 3% per tahun (World Bank, 2014; Better Growth Through Improved Sanitation and Hygiene Practices. WB: Indonesia).

Aksi Konvergensi Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi dilakukan dengan 2 intervensi yaitu intervensi gizi spesifik (bidang kesehatan) dan intervensi gizi sensitif (non bidang kesehatan). Stunting tidak bisa diselesaikan dengan satu sektor saja tetapi harus multi sektor atau dilakukan dengan lintas perangkat daerah. Mendorong strategi dan kebijakan terintegrasi melalui kolaborasi dari tingkat Desa, Kecamatan, Kelompok Perempuan, PKK, Polindes, Posyandu, PUSTU, Puskesmas, NGO, Akademisi, Media sampai pada tingkat lintas dinas terkait. Untuk memudahkan pelaksanaan lintas perangkat daerah maka dibuat skema cross cutting program sebagaimana yang tersaji pada Gambar 3.16 sebagai panduan pelaksanaan aksi percepatan penurunan stunting yang dilakukan secara konvergensi dan terintegrasi.

Gambar 3.16

Cross Cutting Program Aksi Konvergensi Perecepatan Penurunan Stunting Terintegrasi



Cross cutting program dilakukan untuk memudahkan aksi konvergensi yang harus terlaksana secara multi sektoral dengan menggambarkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun arahan program dan kegiatan serta perangkat daerah yang menangani dan disesuaikan dengan program perangkat daerah yang sudah disesuaikan dengan Kepmendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.27

**Cross Cutting Program Konvergensi Stunting Terintegrasi
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029**

No.	Dinas Terkait	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Dinas PPKB	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Di Kampung Keluarga Berkualitas
2	Dinas KES	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi
3	Dinas TANHORBUN	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pemanfaatan Pekarangan Pangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Dan Keberlanjutan Program
4	Dinas PMD	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di 30 Desa Lokus	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
5	Dinas KPP	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota
		Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

No.	Dinas Terkait	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
6	Dinas DIKBUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting Di Kampung Keluarga Berkualitas	Pembinaan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesehatan Ber-Kb

C. Cross Cutting Program Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana setiap individu atau masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman, untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan untuk hidup sehat dan aktif. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, ketersediaan pangan mencakup pasokan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dapat diperoleh baik melalui produksi lokal maupun impor. Akses terhadap pangan mengacu pada kemampuan masyarakat, terutama rumah tangga, untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan melalui berbagai saluran, termasuk pendapatan, bantuan sosial, atau sistem distribusi yang efisien. Pemanfaatan pangan melibatkan cara pangan dikelola, disajikan, dan dikonsumsi agar dapat menyuplai gizi yang optimal bagi tubuh, yang juga tergantung pada faktor-faktor seperti sanitasi, kebersihan, dan kondisi kesehatan. Stabilitas pangan menyangkut ketahanan pasokan pangan dari waktu ke waktu, yang tidak boleh terganggu oleh krisis ekonomi, bencana alam, atau faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi harga atau ketersediaan pangan.

Gambar 3.17

Cross Cutting Program Ketahanan Pangan



Adapun Logframe perencanaan dan pembagian tugas perangkat daerah dalam melaksanakan program ketahanan pangan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.28
Cross Cutting Program Ketahanan Pangan Terintegrasi
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

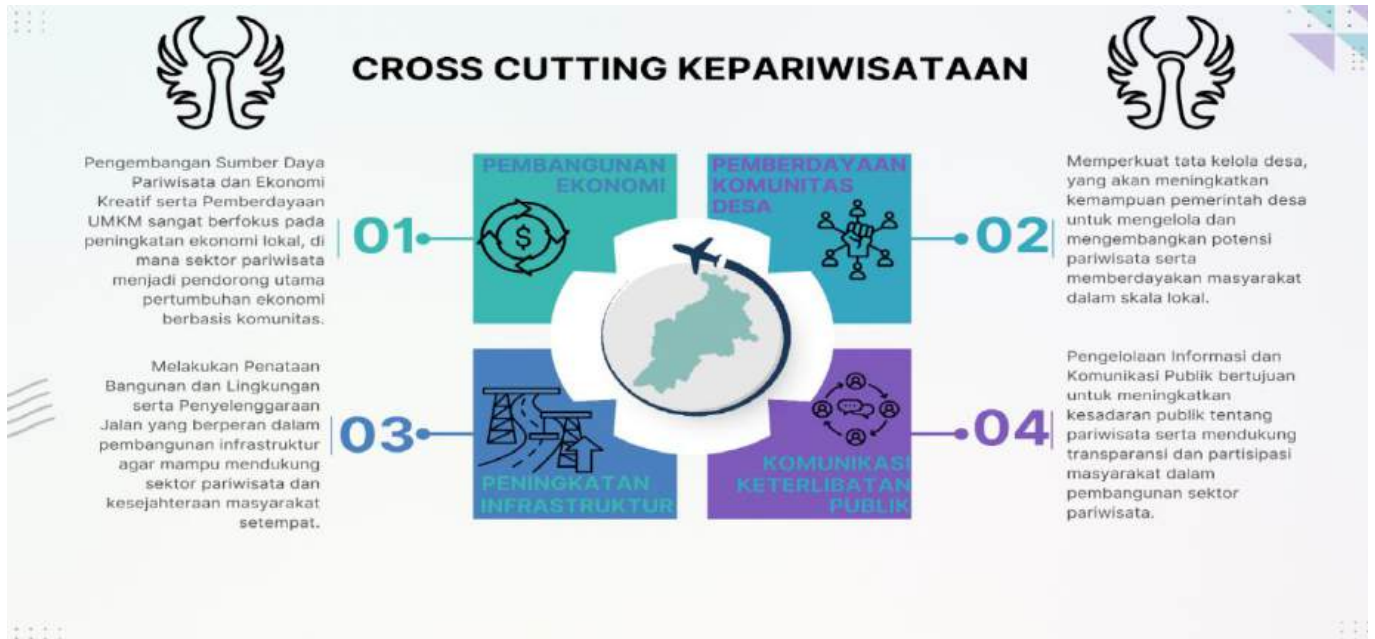
No.	Dinas Terkait	Program
1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Program Peningkatan dan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian

D. Cross Cutting Program Pengembangan Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi alam, budaya, dan sumber daya lainnya di suatu daerah. Tujuan utama dari pengembangan ini adalah untuk menciptakan destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan, yang mampu mendatangkan wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Proses ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari perencanaan, pembangunan infrastruktur, pemasaran, hingga pelaksanaan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pariwisata. Pengembangan kepariwisataan biasanya dimulai dengan identifikasi dan pemetaan potensi wisata, baik itu alam, budaya, sejarah, maupun kegiatan khusus yang dapat menarik perhatian wisatawan. Setelah itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti transportasi, akomodasi, fasilitas umum, dan aksesibilitas, perlu dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi para wisatawan. Selain itu, promosi dan pemasaran yang tepat menjadi kunci dalam memperkenalkan destinasi wisata kepada pasar domestik maupun internasional. Pengembangan kepariwisataan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan, agar tidak merusak lingkungan atau budaya lokal, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal.

Keberhasilan pengembangan kepariwisataan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung, sementara masyarakat lokal diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya dan lingkungan mereka. Sektor swasta, termasuk pelaku industri pariwisata, berperan dalam investasi dan penyediaan layanan yang berkualitas. Dengan pendekatan yang tepat, pengembangan kepariwisataan dapat meningkatkan daya tarik daerah, menciptakan peluang ekonomi, dan menjaga kelestarian sumber daya alam serta budaya yang ada.

Gambar 3.18
Cross Cutting Pengembangan Pariwisata



Adapun Logframe perencanaan dan pembagian tugas perangkat daerah dalam melaksanakan program ketahanan pangan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.29

**Cross Cutting Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029**

No.	DinaS Terkait	Program
1	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
		Program penyelenggaraan Jalan
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program perencanaan dan pembangunan industri
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

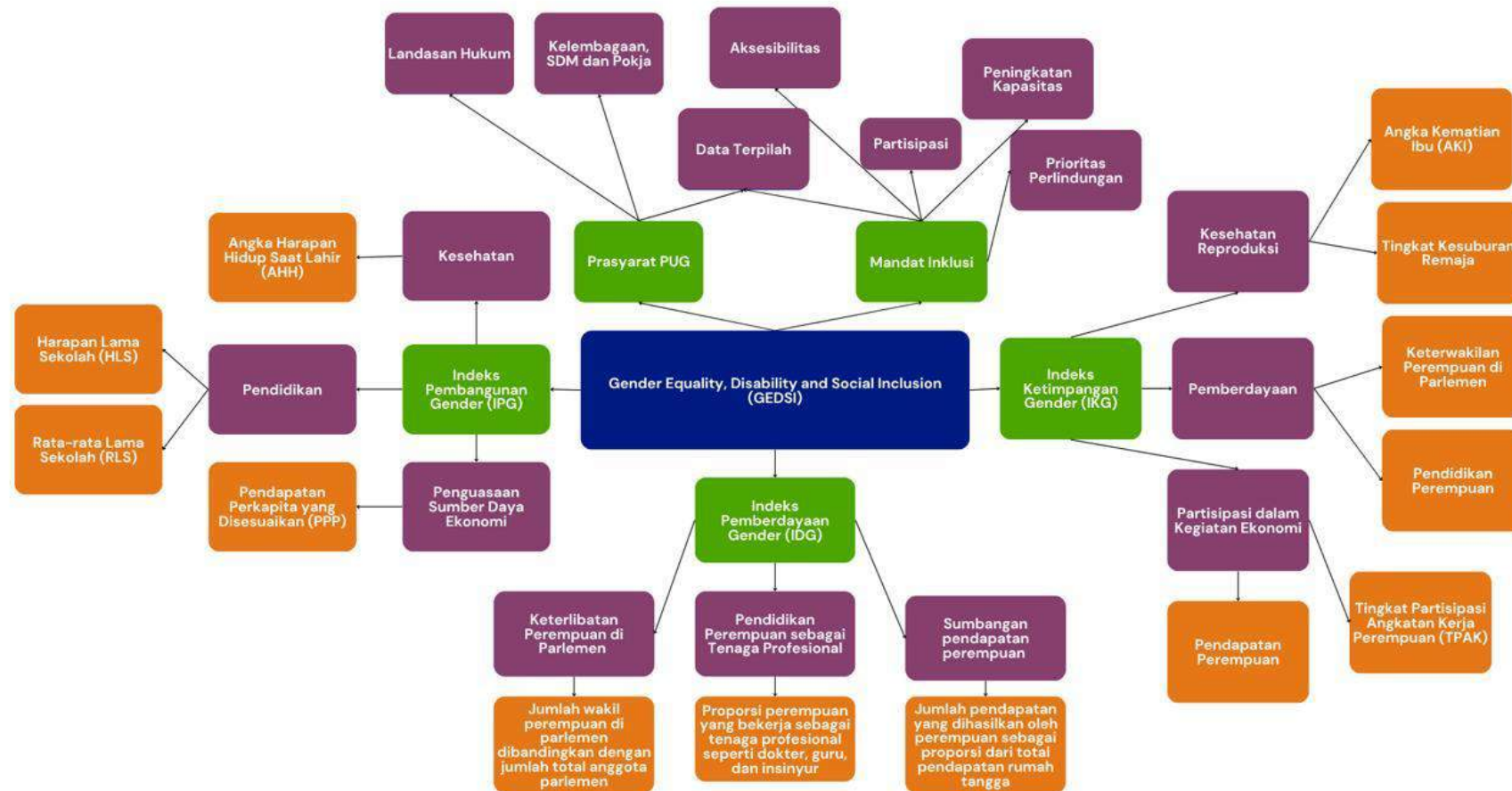
E. Cross Cutting Program Pengarusutamaan GEDSI

Pengarusutamaan GEDSI adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip kesetaraan gender, inklusivitas penyandang disabilitas, dan keadilan sosial terintegrasi dalam seluruh kebijakan, program, dan layanan publik. Di Kabupaten Sigi, pengarusutamaan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan adil dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat, khususnya perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

Dalam praktiknya, pengarusutamaan GEDSI berarti bahwa setiap perencanaan dan pelaksanaan program harus mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan hambatan yang dihadapi oleh kelompok rentan. Pemerintah daerah bersama lembaga mitra perlu memastikan bahwa pelayanan publik—mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga perlindungan sosial—terakses secara setara dan bebas dari diskriminasi.

Pengarusutamaan GEDSI bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial di Kabupaten Sigi dengan pendekatan berbasis data dan kebijakan yang mendukung kesetaraan. Dengan memastikan akses yang setara dalam pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, serta meningkatkan partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas, GEDSI diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 3.19
Cross Cutting Program Pengarusutamaan GEDSI



Cross Cutting diatas menggambarkan indikasi berbagai aspek yang mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan indikator yang relevan untuk kondisi di Kabupaten Sigi. Fokus utama adalah pemberdayaan perempuan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan inklusi sosial, yang memastikan bahwa semua kelompok, terutama yang terpinggirkan, dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Gambaran Pemetaan berbagai area yang berkontribusi pada pengarusutamaan GEDSI, dengan masing-masing area terkait dengan indikator-indikator yang dapat memantau kemajuan. Fokus utamanya adalah pada keterkaitan antara gender, disabilitas, dan inklusi sosial, dengan indikator-indikator yang mencakup kesehatan, pendidikan, partisipasi sosial, keterlibatan ekonomi, dan kerangka hukum. Konsep inti GEDSI mengintegrasikan semua area ini melalui hasil-hasil yang dapat diukur, dengan tujuan memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Adapun Komponen utama Pengarusutamaan GEDSI antara lain:

1. Landasan Hukum dan Kebijakan:
 - Landasan Hukum: Mendorong adanya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan hak disabilitas di tingkat daerah.
 - Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia: Memastikan adanya struktur kelembagaan yang kuat untuk implementasi kebijakan GEDSI.
2. Kesehatan:
 - Angka Harapan Hidup: Memonitor kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan akses kesehatan untuk perempuan dan penyandang disabilitas.
 - Kesehatan Reproduksi: Menjamin akses perempuan, terutama di daerah pedesaan, pada layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau.
3. Pendidikan:
 - Harapan Lama Sekolah: Menargetkan peningkatan akses pendidikan untuk anak-anak perempuan dan penyandang disabilitas di Kabupaten Sigi.
 - Pendidikan Inklusif: Menyusun kebijakan pendidikan yang memungkinkan partisipasi semua kelompok, terutama perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Partisipasi Ekonomi:
 - Pendapatan Perempuan: Memperhatikan pendapatan perempuan dan menciptakan peluang ekonomi yang setara di sektor informal dan formal.
 - Partisipasi Ekonomi: Mengurangi hambatan bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut.
5. Inklusi Sosial dan Perlindungan:
 - Aksesibilitas: Meningkatkan aksesibilitas fisik dan sosial, termasuk transportasi dan fasilitas umum yang ramah disabilitas.
 - Mandat Inklusi: Mewajibkan kebijakan inklusif dalam berbagai sektor, dari pendidikan hingga pekerjaan, untuk memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan.

Tabel 3.30
Cross Cutting Program Pengarusutamaan GEDSI Terintegrasi
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

DINAS TERKAIT	URAIAN PROGRAM
DINAS SOSIAL	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
DINAS P3A	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
DINAS KOPERASI DAN UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)
DINAS KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
DINAS DIKBUD	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
DINAS DUKCAPIL	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
DINAS PPKB	Program Pembinaan Keluarga Berencana
DINAS PMD	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
DINAS KPP	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Peme rintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat)
BAGIAN HUKUM	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Fasilitasi dan Koordinasi Hukum)

F. Cross Cutting Kontribusi Kabupaten Sigi terhadap pencapaian Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru (IEB) merupakan alat ukur komposit yang dikembangkan secara nasional untuk menilai kinerja pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya air, perairan darat, pesisir, dan laut secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Indeks ini mengukur sejauh mana aktivitas ekonomi berbasis air (perikanan, budidaya, wisata air, irigasi, energi, transportasi perairan, dan pengelolaan ekosistem) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem perairan. IEB menjadi instrumen strategis dalam RPJMN 2025–2045, sejalan dengan agenda ekonomi hijau dan biru, serta diturunkan dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten Sigi,

indeks ini relevan karena memiliki Danau Lindu, DAS Gumbasa, serta potensi perikanan darat, wisata air, dan energi terbarukan berbasis air.

Indeks Ekonomi Biru disusun berdasarkan sejumlah indikator lintas sektor yang dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama:

- a. Ekologi dan Kualitas Lingkungan
- b. Ekonomi dan Daya Saing Daerah
- c. Sosial, Kesehatan, dan Inklusivitas
- d. Kelembagaan dan Tata Kelola

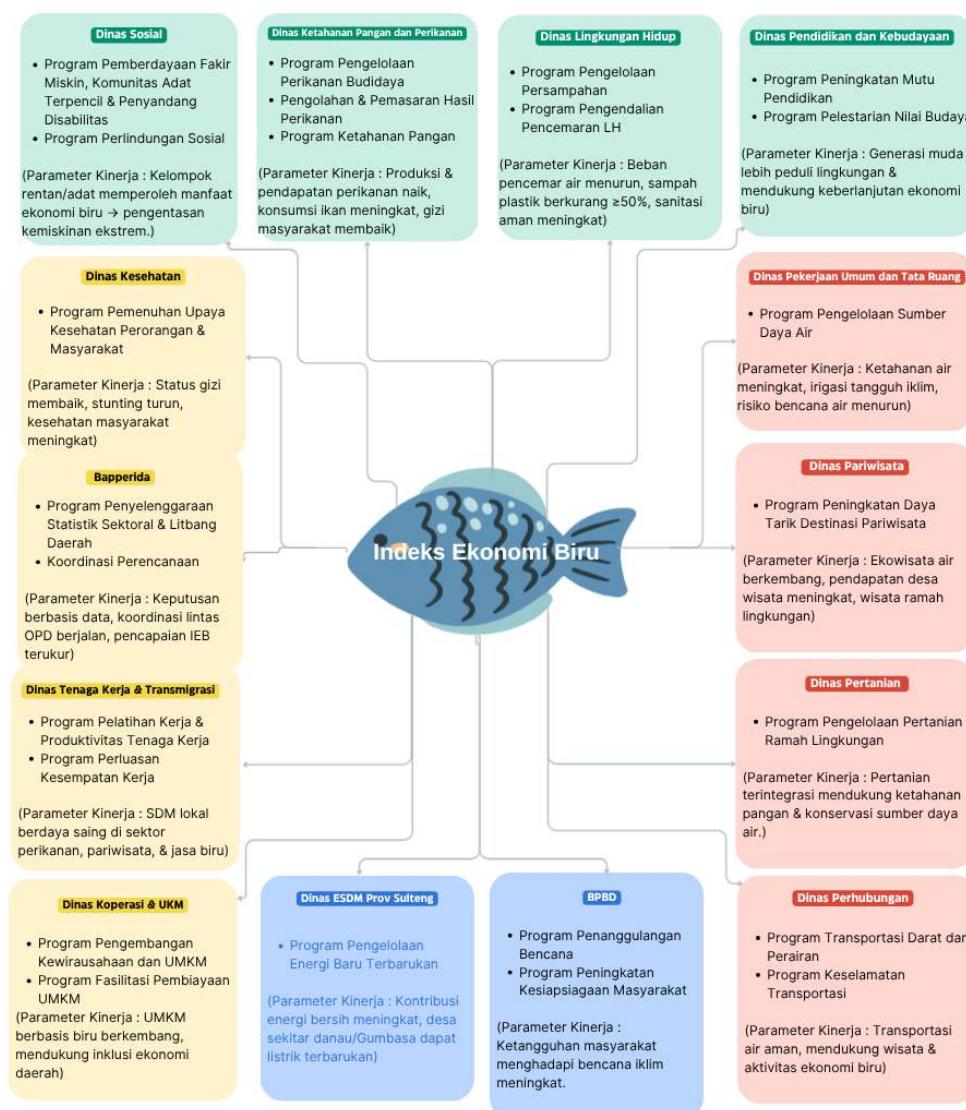
Kabupaten Sigi memiliki peran penting dalam pencapaian Indeks Ekonomi Biru (IEB) melalui pelaksanaan program lintas perangkat daerah (OPD) yang saling terintegrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi biru tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tata kelola berbasis data.

- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berkontribusi melalui peningkatan kualitas air, sanitasi, serta pengelolaan sampah dan limbah. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan ketangguhan irigasi Gumbasa serta restorasi daerah riparian untuk menjaga daya dukung ekosistem perairan.
- Bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan berperan melalui peningkatan produksi ikan air tawar, penguatan budidaya, dan program konsumsi ikan guna memperbaiki status gizi masyarakat. Kontribusi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani-ikan, tetapi juga berhubungan erat dengan penurunan prevalensi stunting.
- Sektor pariwisata turut mendorong pencapaian IEB melalui pengembangan ekowisata Danau Lindu dan wisata berbasis sungai dengan prinsip ramah lingkungan. Hal ini sekaligus meningkatkan pendapatan desa wisata dan memperluas lapangan kerja.
- Di bidang energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat transisi menuju energi bersih dengan memperluas pemanfaatan energi terbarukan berbasis mikrohidro dan sumber daya air. Hal ini mendukung akses listrik bagi desa-desa sekitar danau dan memperkuat ketahanan energi lokal.
- Dinas Kesehatan mengambil peran dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui intervensi gizi berbasis ikan, disertai peningkatan cakupan layanan kesehatan di wilayah pesisir dan sekitar danau.
- Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan tata kelola serta forum koordinasi lintas PD yang memungkinkan evaluasi secara terpadu.
- Perangkat daerah lain turut memperkuat kontribusi terhadap IEB. Dinas Sosial memberdayakan masyarakat adat serta kelompok rentan agar terlibat dalam usaha berbasis biru. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperluas pelatihan keterampilan tenaga kerja di sektor perikanan, wisata, dan pengolahan hasil. Dinas Koperasi dan UKM mendorong tumbuhnya UKM biru melalui fasilitasi akses pembiayaan hijau. Dinas Pertanian mengembangkan integrasi

pertanian-perikanan (mina padi) dan agroforestri DAS untuk menjaga ketahanan pangan serta keberlanjutan sumber daya air. Dinas Perhubungan meningkatkan keselamatan transportasi air dan pembangunan dermaga ramah lingkungan, sementara BPBD memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan desa siaga dan sistem peringatan dini (EWS). Tidak kalah penting, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menumbuhkan kesadaran generasi muda melalui sekolah adiwiyata, kurikulum muatan lokal berbasis konservasi, serta pendidikan lingkungan hidup.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Kabupaten Sigi memperkuat posisinya dalam pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi program PD mendukung peningkatan kualitas ekosistem, pertumbuhan ekonomi lokal, penguatan sosial masyarakat, serta tata kelola yang berbasis data, sehingga mendorong pencapaian Indeks Ekonomi Biru pada periode RPJMD 2025–2029. Adapun pola *crosscutting* kontribusi Kabupaten Sigi terhadap pencapaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) untuk setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan dan logical framework terlihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 3.20
Cross Cutting kontribusi Kabupaten Sigi
terhadap pencapaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)



Sumber : Hasil Analisa, 2025

Tabel 3.31
Logic Framework kontribusi Kabupaten Sigi
terhadap pencapaian Indeks Ekonomi Biru (IEB)

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Immendagri	Indikator Immendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11	Meningkatny a tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.0 1	Beban pencemar air menurun, sampah plastik berkurang ≥50%, sanitasi aman meningkat

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.0 1	
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.0 2	
Dinas PUPR	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1.03.02	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.0 1	Ketahanan air meningkat, irigasi tangguh iklim, risiko bencana air menurun
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.0 2	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.25.04	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.0 2	Produksi & pendapatan perikanan naik, konsumsi ikan meningkat, gizi masyarakat membaik
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.0 4	
					Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.0 1	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.0 2	
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.0 3	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.0 1	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
Dinas Pariwisata					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.0 2	Ekowisata air berkembang, pendapatan desa wisata meningkat, wisata ramah lingkungan
					Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	2.09.03.2.0 3	
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.0 4	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.26.02	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.0 1	
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.0 2	
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.0 3	
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	3.26.02.2.0 4	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	Program Pemasaran Pariwisata	3.26.03	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.0 1	Kontribusi energi bersih meningkat, desa sekitar danau/Gumbasa dapat listrik terbarukan
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3.29.05	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.29.05.2.0 1	
					Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.	3.29.05.3.0 2	
					Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.	3.29.05.3.0 3	
					Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.	3.29.05.3.0 4	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
					Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.	3.29.05.3.0 5	
					Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	3.29.05.3.0 6	
					Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	3.29.05.3.0 7	
					Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	3.29.05.3.0 8	
					Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	3.29.05.3.0 9	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
					Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.	3.29.05.4.0 2	
					Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.	3.29.05.4.0 3	
					Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota	3.29.05.4.0 4	
					Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.	3.29.05.4.0 5	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
					Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	3.29.05.4.06	
					Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	3.29.05.4.07	
					Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonser vasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	3.29.05.4.08	
					Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	3.29.05.4.09	
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01	Status gizi membaik, stunting turun, kesehatan masyarakat meningkat

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.0 2	
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.0 3	
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.0 4	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.0 1	
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.0 2	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.0 3	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.0 1	
					Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1.02.04.2.0 2	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.02.04	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.0 3	
					Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.2.0 4	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
					Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04.2.05	
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.06	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01	
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02	
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
Bapperida	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01.02	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.0 1	Keputusan berbasis data, koordinasi lintas OPD berjalan, pencapaian IEB terukur
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.0 2	
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.0 3	
					Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5.01.02.2.0 4	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.0 1	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.0 2	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01	Generasi muda lebih peduli lingkungan & mendukung keberlanjutan ekonomi biru.
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04	
	Program Pengembangan Kurikulum	1.01.03	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01	
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
Dinas Sosial	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	2:22:05	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.0 1	Kelompok rentan/adat memperoleh manfaat ekonomi biru → pengentasan kemiskinan ekstrem.
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.0 2	
	Program Pemberdayaan Sosial	1:06:02	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial c. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar 4. Persentase SDM	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.0 2	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
				Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial			
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
	Program Rehabilitasi Sosial	1:06:04	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 8. Indeks Peranan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01	
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1:06:05	Meningkatny a perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi 3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin 4. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar 5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi 6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	2:07:02	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.2.01	SDM lokal berdaya saing di sektor perikanan, pariwisata, & jasa biru.
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2:07:03	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01	
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.2.02	
					Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.2.03	
					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	2.07.03.2.04	
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.07.03.2.05	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	2:07:04	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
					Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.0 2	
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.0 3	
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.0 4	
	Program Hubungan Industrial	2:07:05	Meningkatkan ya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.0 1	
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.0 2	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
Dinas Koperasi & UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17.07	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01	UMKM berbasis biru berkembang, mendukung inklusi ekonomi daerah.
	Program Pengembangan UMKM	2.17.08	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01	
Dinas Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01	Pertanian terintegrasi mendukung ketahanan pangan & konservasi sumber daya air.
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02	
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.03	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
					Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	3.27.02.2.0 4	
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.0 5	
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.0 6	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3:27:03	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.0 1	
					Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.0 2	
					Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.27.03.2.0 3	
					Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	3.27.03.2.0 4	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian 2. Persentase Penanganan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.0 1	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
	Program Perizinan Usaha Pertanian	3.27.06	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.2.0 1	
					Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	3.27.06.2.0 2	
					Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	3.27.06.2.0 3	
	Program Penyuluhan Pertanian	3.27.07	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	1. Persentase SDM Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan .2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.0 1	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.15.02	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.0 2	Transportasi air aman, mendukung wisata & aktivitas ekonomi biru.
Dinas Perhubungan					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.0 3	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Program Penanggulangan Bencana	1.05.03	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05	Ketangguhan masyarakat menghadapi bencana iklim meningkat.
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.2.08	
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03	
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	

Perangkat Daerah	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome Inmendagri	Indikator Inmendagri	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmenda gri 900.1-2850 Tahun 2025	Parameter Kinerja IEB
	Program Penanganan Bencana	1.06.06	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Beccaria 2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Beccaria yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya 3. Persentase Korban Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01	
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02	

Sumber : Hasil Analisa, 2025

G. Cross Cutting Kontribusi Kabupaten Sigi terhadap pencapaian Indeks Ekonomi Hijau

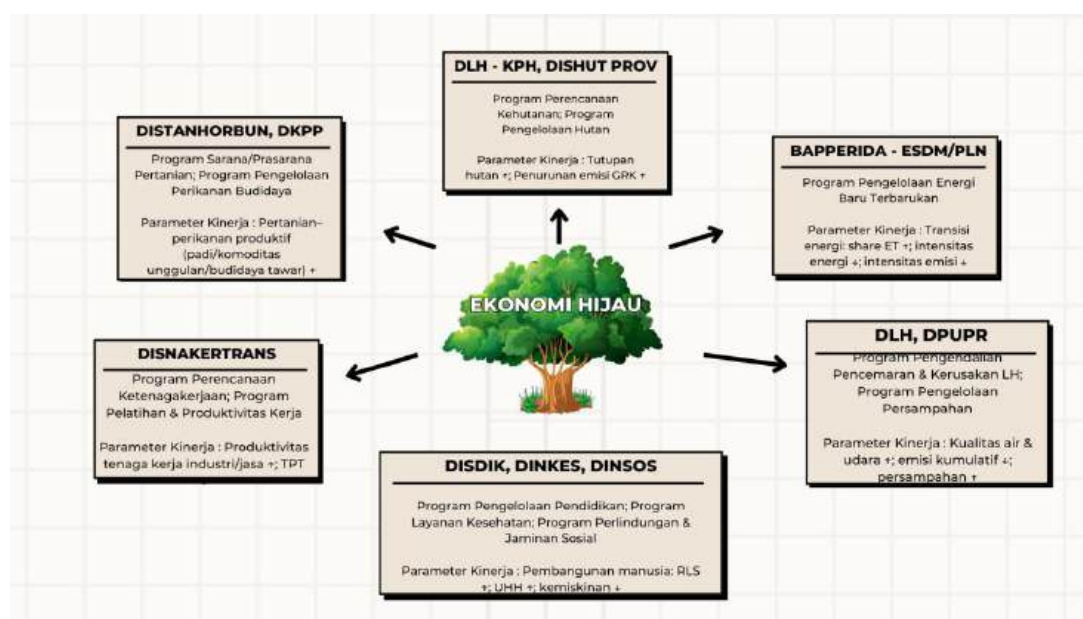
Indeks Ekonomi Hijau (IEH/*Green Economy Index*) adalah ukuran komposit untuk menilai kinerja pembangunan berkelanjutan suatu daerah melalui tiga pilar yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang terukur dalam 15 indikator. IEH berfungsi sebagai instrumen manajemen kinerja yang mengintegrasikan capaian lintas-OPD ke dalam satu skor daerah, memantau arah transformasi menuju ekonomi rendah emisi dan berketahanan, sekaligus menjadi dasar objektif bagi perencanaan, penganggaran (*green budget tagging*), dan evaluasi SAKIP agar alokasi sumber daya publik tepat sasaran.

Adapun pilar lingkungan mencakup indikator tutupan hutan, pangsa energi terbarukan, sampah terkelola, penurunan emisi GRK, intensitas emisi, dan intensitas energi akhir. Pilar ekonomi menilai PDRB per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri, dan produktivitas tenaga kerja jasa. Sementara pilar sosial melihat mengenai rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, kemiskinan, serta

pengangguran terbuka. Melalui kerangka ini, pemerintah daerah memperoleh gambaran menyeluruh dan terstandar tentang kemajuan pembangunan hijau, yang dapat diturunkan ke Renstra PD, dioperasionalkan dalam RKPD, serta dikonsolidasikan dalam pelaporan kinerja daerah secara periodik.

Cross cutting ekonomi hijau dan mekanisme keterpaduan pelaksanaan (*logical framework*) ekonomi hijau ditampilkan pada gambar-tabel berikut.

Gambar 3.21
Cross Cutting kontribusi Kabupaten Sigi
terhadap pencapaian Indeks Ekonomi Hijau



Sumber : Hasil Analisa, 2025

Tabel 3.32
Logicl Framework kontribusi Kabupaten Sigi
terhadap pencapaian Indeks Ekonomi Hijau (IEH)

Parameter Kinerja IEH	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome	Indikator	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025
Restorasi Lanskap & Agroforestri DAS	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indes Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.01

Parameter Kinerja IEH	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome	Indikator	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025
Pengendalian Pencemaran & Persampahan Sirkular	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di	1.03.02.2.02
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indes Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.01
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.02
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01

Parameter Kinerja IEH	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome	Indikator	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025
Transisi Energi Publik & UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02	Meningkatnya Pemberdayaan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.2.01
				y=a Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.02.2.02
				4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.02.2.03

Parameter Kinerja IEH	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome	Indikator	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025
Pertanian Tahan Iklim (CSA) – Padi & Pangan				Pelayanan Sosial		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.09.02.2.01
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01

Parameter Kinerja IEH	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome	Indikator	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	2.09.03.2.02
					Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	2.09.03.2.03
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04	Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.09.04.2.02
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	2.09.05.2.01
Hilirisasi & Pascapanen Hijau (UMKM Agribisnis)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.02.2.01

Parameter Kinerja IEH	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome	Indikator	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025
Akuakultur Air Tawar Berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha		
Green Jobs & Penempatan Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	2.07.04.2.01
					Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPKTS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.07.04.2.02
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	2.07.04.2.04
	Pendidikan & Literasi Hijau	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Parameter Kinerja IEH	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome	Indikator	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025
Kesehatan Lingkungan, Air & Sanitasi				Muatan Lokal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.11.08.2.01
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.05.2.02
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.05.2.03

Parameter Kinerja IEH	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome	Indikator	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025
Perlindungan Sosial Adaptif Iklim & Pemberdayaan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi 3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin 4. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar 5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi 6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.17.06.2.01
Tata Kelola Data IEH, MRV & Green Budget Tagging	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.01
					Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.03.2.02

Parameter Kinerja IEH	Program (Kepmendagri)	Kode Program Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Outcome	Indikator	Kegiatan	Kode Kegiatan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025
					Kota	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.01
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.02

Sumber : Hasil Analisa, 2025

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Sigi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					333.074.728.1 80,00		339.736.222.7 44,00		341.436.709.1 26,00		342.769.262.8 57,00		344.724.243.6 00,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					273.944.909.0 00,00		279.423.807.1 80,00		279.918.045.2 52,00		280.020.225.7 04,00		280.720.225.7 04,00	
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan					273.944.909.0 00,00		279.423.807.1 80,00		279.918.045.2 52,00		280.020.225.7 04,00		280.720.225.7 04,00	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					53.105.900.68 0,00		54.168.018.69 4,00		55.251.379.06 7,00		56.356.406.64 9,00		57.483.534.78 2,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	69,19	71,69	74,19	53.105.900.68 0,00	76,69	54.168.018.69 4,00	79,19	55.251.379.06 7,00	81,69	56.356.406.64 9,00	84,19	57.483.534.78 2,00	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	98,83	98,93	99,03		99,13		99,23		99,33		99,43		1.01.2.22.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi	92,82	93,02	93,22		93,42		93,62		93,82		94,02		1.01.2.22.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dalam pendidikan menengah pertama (%)													
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	43,00	45,00	47,00	500.000.000,0 0	49,00	510.000.000,0 0	51,00	520.200.000,0 0	53,00	530.604.000,0 0	55,00	541.216.080,0 0	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					5.223.918.500 ,00		5.328.396.870 ,00		5.434.964.807 ,00		5.543.664.104 ,00		5.654.537.386 ,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0,12	0,10	0,08	5.223.918.500 ,00	0,06	5.328.396.870 ,00	0,04	5.434.964.807 ,00	0,02	5.543.664.104 ,00	0,00	5.654.537.386 ,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	32,25	35,50	38,75		42,00		46,00		50,00		55,00		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	83,00	85,00	87,00	300.000.000,0 0	89,00	306.000.000,0 0	91,00	312.120.000,0 0	93,00	318.362.400,0 0	95,00	324.729.648,0 0	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					172.292.344.0 00,00		175.738.190.8 78,00		177.029.491.5 57,00		178.344.618.2 45,00		179.684.047.4 68,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					96.587.082.94 2,00		98.518.824.60 1,00		98.265.737.95 2,00		98.005.589.56 8,00		97.738.238.21 8,00	
Mengkatnya Kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	5.761.965,00	100	5.877.205,00	100	5.994.749,00	100	6.114.644,00	100	6.236.936,00	1.02.0.00.0.00.01. 0017 - Puskesmas Towulu
Meningkatnya Kelancaraan administrasi Kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	10.852.700,00	100	11.069.754,00	100	11.291.149,00	100	11.516.972,00	100	11.747.311,00	1.02.0.00.0.00.01. 0012 - Puskesmas Kulawi
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	53.519.811.05 7,00	100	54.590.207.27 5,00	100	53.458.548.28 1,00	100	52.302.256.10 3,00	100	51.120.838.08 4,00	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	0	100	100	18.767.859,00	100	19.143.216,00	100	19.526.080,00	100	19.916.602,00	100	20.314.934,00	1.02.0.00.0.00.01. 0002 - Puskesmas Biromaru

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	13.164.767,00	100	13.428.063,00	100	13.696.624,00	100	13.970.557,00	100	14.249.968,00	1.02.0.00.0.00.01.0003 - Puskesmas Dolo
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	17.445.796,00	100	17.794.712,00	100	18.150.607,00	100	18.513.619,00	100	18.883.891,00	1.02.0.00.0.00.01.0005 - Puskesmas Marawola
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	12.479.432,00	100	12.729.021,00	100	12.983.601,00	100	13.243.273,00	100	13.508.139,00	1.02.0.00.0.00.01.0006 - Puskesmas Kaleke
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	13.792.597,00	100	14.068.449,00	100	14.349.818,00	100	14.636.814,00	100	14.929.550,00	1.02.0.00.0.00.01.0007 - Puskesmas Baluase
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	8.104.002,00	100	8.266.083,00	100	8.431.404,00	100	8.600.032,00	100	8.772.033,00	1.02.0.00.0.00.01.0008 - Puskesmas Kinovaro
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program,	100	100	100	6.253.613,00	100	6.378.686,00	100	6.506.259,00	100	6.636.384,00	100	6.769.112,00	1.02.0.00.0.00.01.0009 - Puskesmas Dombusoi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	keuangan, umum dan kepegawaian (%)													
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	7.545.979,00	100	7.696.899,00	100	7.850.837,00	100	8.007.853,00	100	8.168.011,00	1.02.0.00.0.00.01. 0010 - Puskesmas Kamaipura
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	11.747.545,00	100	11.982.496,00	100	12.222.146,00	100	12.466.589,00	100	12.715.921,00	1.02.0.00.0.00.01. 0011 - Puskesmas Panderee
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	0	100	100	9.153.972,00	100	9.337.051,00	100	9.523.792,00	100	9.714.268,00	100	9.908.553,00	1.02.0.00.0.00.01. 0013 - Puskesmas Gimpu
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	6.266.592,00	100	6.391.923,00	100	6.519.762,00	100	6.650.157,00	100	6.783.160,00	1.02.0.00.0.00.01. 0014 - Puskesmas Lindu
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	6.838.438,00	100	6.975.207,00	100	7.114.711,00	100	7.257.005,00	100	7.402.145,00	1.02.0.00.0.00.01. 0015 - Puskesmas Kantewu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	4.843.557,00	100	4.940.428,00	100	5.039.236,00	100	5.140.021,00	100	5.242.822,00	1.02.0.00.0.00.01. 0016 - Puskesmas Banasu
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	14.670.395,00	100	14.963.803,00	100	15.263.079,00	100	15.568.341,00	100	15.879.708,00	1.02.0.00.0.00.01. 0018 - Puskesmas Palolo
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	7.272.968,00	100	7.418.427,00	100	7.566.796,00	100	7.718.132,00	100	7.872.495,00	1.02.0.00.0.00.01. 0019 - Puskesmas Banpres
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	6.119.452,00	100	6.241.842,00	100	6.366.678,00	100	6.494.012,00	100	6.623.892,00	1.02.0.00.0.00.01. 0020 - Puskesmas Nokilalaki
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	510.000.000,0 0	100	520.200.000,0 0	100	530.604.000,0 0	100	541.216.080,0 0	100	552.040.402,0 0	1.02.0.00.0.00.01. 0021 - RSUD PRATAMA KAURIA KABUPATEN SIGI
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan					42.369.528.11 1,00		43.216.918.67 3,00		44.081.257.04 7,00		44.962.882.18 8,00		45.862.139.83 1,00	1.02.0.00.0.00.01. 0001 - RSUD TORABELO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														KABUPATEN SIGI
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	6.662.145,00	100	6.795.388,00	100	6.931.296,00	100	7.069.922,00	100	7.211.320,00	1.02.0.00.0.00.01. 0004 - Puskesmas Tinggede
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					70.684.351.71 2,00		72.098.038.74 4,00		73.539.999.52 1,00		75.010.799.51 2,00		76.511.015.50 2,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	11.126.065.60 7,00	79	11.348.586.91 9,00	79,5	11.575.558.66 1,00	80	11.807.069.83 5,00	80,5	12.043.211.23 1,00	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR) (%)	58,98	60	65	18.050.000.00 0,00	70	18.411.000.00 0,00	75	18.779.220.00 0,00	80	19.154.804.40 0,00	85	19.537.900.48 8,00	1.02.0.00.0.00.01. 0001 - RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	3.706.920.061 ,00	79	3.781.058.462 ,00	79,5	3.856.679.631 ,00	80	3.933.813.224 ,00	80,5	4.012.489.488 ,00	1.02.0.00.0.00.01. 0002 - Puskesmas Biomaru
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	2.593.205.001 ,00	79	2.645.069.100 ,00	79,5	2.697.970.482 ,00	80	2.751.929.891 ,00	80,5	2.806.968.490 ,00	1.02.0.00.0.00.01. 0003 - Puskesmas Dolo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	1.305.530.325,00	79	1.331.640.931,00	79,5	1.358.273.750,00	80	1.385.439.225,00	80,5	1.413.148.010,00	1.02.0.00.0.00.01.0004 - Puskesmas Tinggede
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	3.448.082.749,00	79	3.517.044.404,00	79,5	3.587.385.292,00	80	3.659.132.998,00	80,5	3.732.315.658,00	1.02.0.00.0.00.01.0005 - Puskesmas Marawola
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	2.457.501.655,00	79	2.506.651.688,00	79,5	2.556.784.722,00	80	2.607.920.416,00	80,5	2.660.078.824,00	1.02.0.00.0.00.01.0006 - Puskesmas Kaleke
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	2.717.789.318,00	79	2.772.145.104,00	79,5	2.827.588.006,00	80	2.884.139.766,00	80,5	2.941.822.561,00	1.02.0.00.0.00.01.0007 - Puskesmas Baluase
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	1.588.204.408,00	79	1.619.968.497,00	79,5	1.652.367.867,00	80	1.685.415.224,00	80,5	1.719.123.528,00	1.02.0.00.0.00.01.0008 - Puskesmas Kinovaro
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	1.221.799.885,00	79	1.246.235.882,00	79,5	1.271.160.599,00	80	1.296.583.812,00	80,5	1.322.515.488,00	1.02.0.00.0.00.01.0009 - Puskesmas Dombusoi
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	1.479.598.803,00	79	1.509.190.780,00	79,5	1.539.374.595,00	80	1.570.162.087,00	80,5	1.601.565.329,00	1.02.0.00.0.00.01.0010 - Puskesmas Kamaipura

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	2.313.536.624,00	79	2.359.807.356,00	79,5	2.407.003.504,00	80	2.455.143.574,00	80,5	2.504.246.445,00	1.02.0.00.0.00.01.0011 - Puskesmas Panderee
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	1.224.072.316,00	79	1.248.553.762,00	79,5	1.273.524.837,00	80	1.298.995.334,00	80,5	1.324.975.241,00	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Lindu
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	1.337.901.198,00	79	1.364.659.222,00	79,5	1.391.952.406,00	80	1.419.791.454,00	80,5	1.448.187.283,00	1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Kantewu
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	943.299.755,00	79	962.165.750,00	79,5	981.409.065,00	80	1.001.037.246,00	80,5	1.021.057.991,00	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Banasu
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	1.125.982.962,00	79	1.148.502.621,00	79,5	1.171.472.673,00	80	1.194.902.127,00	80,5	1.218.800.169,00	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Towulu
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	2.896.164.212,00	79	2.954.087.496,00	79,5	3.013.169.246,00	80	3.073.432.631,00	80,5	3.134.901.284,00	1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Palolo
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	1.425.253.361,00	79	1.453.758.429,00	79,5	1.482.833.597,00	80	1.512.490.269,00	80,5	1.542.740.075,00	1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Banpres

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	1.196.532.681,00	79	1.220.463.335,00	79,5	1.244.872.601,00	80	1.269.770.053,00	80,5	1.295.165.454,00	1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Nokilalaki
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	4.590.000.000,00	79	4.681.800.000,00	79,5	4.775.436.000,00	80	4.870.944.720,00	80,5	4.968.363.614,00	1.02.0.00.0.00.01.0021 - RSUD PRATAMA KAURIA KABUPATEN SIGI
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	1.800.141.115,00	79	1.836.143.937,00	79,5	1.872.866.816,00	80	1.910.324.152,00	80,5	1.948.530.635,00	1.02.0.00.0.00.01.0013 - Puskesmas Gimpu
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan (%)	76,5	77	78	2.136.769.676,00	79	2.179.505.069,00	79,5	2.223.095.171,00	80	2.267.557.074,00	80,5	2.312.908.216,00	1.02.0.00.0.00.01.0012 - Puskesmas Kulawi
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3.786.976.726,00		3.862.716.261,00		3.939.970.586,00		4.018.769.997,00		4.099.145.397,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar (%)	21	21	26	3.000.000.000,00	34	3.000.000.000,00	43	3.000.000.000,00	53	3.060.000.000,00	64	3.121.200.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Pemenuhan SDM Spesialis KJSU sesuai standar minimal (%)	0	40	45	786.976.726,00	50	862.716.261,00	55	939.970.586,00	60	958.769.997,00	65	977.945.397,00	1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					400.000.000,0 0		408.000.000,0 0		416.160.000,0 0		424.483.200,0 0		432.972.864,0 0	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Proporsi faskes dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar (%)	83	83	86	400.000.000,0 0	89	408.000.000,0 0	92	416.160.000,0 0	95	424.483.200,0 0	98	432.972.864,0 0	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					833.932.620,0 0		850.611.272,0 0		867.623.498,0 0		884.975.968,0 0		902.675.487,0 0	
Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	22.669.169,00	30,75	23.122.552,00	36,75	23.585.003,00	42,75	24.056.703,00	48,75	24.537.837,00	1.02.0.00.0.00.01. 0009 - Puskesmas Dombusoi
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kecamatan Sehat (%)	0	18,75	24,75	391.207.353,0 0	30,75	399.031.504,0 0	36,75	407.012.134,0 0	42,75	415.152.376,0 0	48,75	423.455.423,0 0	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	27.883.791,00	30,75	28.441.467,00	36,75	29.010.296,00	42,75	29.590.502,00	48,75	30.182.312,00	1.02.0.00.0.00.01. 0002 - Puskesmas Biromaru
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	26.583.725,00	30,75	27.115.399,00	36,75	27.657.707,00	42,75	28.210.861,00	48,75	28.775.078,00	1.02.0.00.0.00.01. 0003 - Puskesmas Dolo
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	20.236.571,00	30,75	20.641.302,00	36,75	21.054.128,00	42,75	21.475.211,00	48,75	21.904.715,00	1.02.0.00.0.00.01. 0004 - Puskesmas Tinggede

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	23.630.723,00	30,75	24.103.337,00	36,75	24.585.404,00	42,75	25.077.112,00	48,75	25.578.654,00	1.02.0.00.0.00.01.0005 - Puskesmas Marawola
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	25.905.323,00	30,75	26.423.429,00	36,75	26.951.898,00	42,75	27.490.935,00	48,75	28.040.754,00	1.02.0.00.0.00.01.0006 - Puskesmas Kaleke
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	26.937.435,00	30,75	27.476.184,00	36,75	28.025.707,00	42,75	28.586.222,00	48,75	29.157.946,00	1.02.0.00.0.00.01.0007 - Puskesmas Baluase
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	24.492.087,00	30,75	24.981.929,00	36,75	25.481.567,00	42,75	25.991.199,00	48,75	26.511.023,00	1.02.0.00.0.00.01.0008 - Puskesmas Kinovaro
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	22.051.049,00	30,75	22.492.069,00	36,75	22.941.911,00	42,75	23.400.749,00	48,75	23.868.764,00	1.02.0.00.0.00.01.0010 - Puskesmas Kamaipura
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	24.224.898,00	30,75	24.709.396,00	36,75	25.203.584,00	42,75	25.707.656,00	48,75	26.221.809,00	1.02.0.00.0.00.01.0011 - Puskesmas Panderee
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	22.979.402,00	30,75	23.438.990,00	36,75	23.907.769,00	42,75	24.385.925,00	48,75	24.873.643,00	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Lindu
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	22.948.011,00	30,75	23.406.971,00	36,75	23.875.111,00	42,75	24.352.613,00	48,75	24.839.665,00	1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Kantewu
Meningkatnya kualitas pemberdayaan	Desa Sehat (%)	0	18,35	24,75	20.568.045,00	30,75	20.979.406,00	36,75	21.398.994,00	42,75	21.826.974,00	48,75	22.263.513,00	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Banasu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
masyarakat bidang kesehatan														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	20.648.115,00	30,75	21.061.077,00	36,75	21.482.299,00	42,75	21.911.945,00	48,75	22.350.184,00	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Towulu
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	23.244.423,00	30,75	23.709.311,00	36,75	24.183.498,00	42,75	24.667.168,00	48,75	25.160.511,00	1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Palolo
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	22.067.292,00	30,75	22.508.638,00	36,75	22.958.811,00	42,75	23.417.987,00	48,75	23.886.347,00	1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Banpres
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	21.238.364,00	30,75	21.663.131,00	36,75	22.096.393,00	42,75	22.538.321,00	48,75	22.989.088,00	1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Nokilalaki
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	22.917.590,00	30,75	23.375.941,00	36,75	23.843.460,00	42,75	24.320.329,00	48,75	24.806.736,00	1.02.0.00.0.00.01.0012 - Puskesmas Kulawi
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Desa Sehat (%)	0	18,75	24,75	21.499.254,00	30,75	21.929.239,00	36,75	22.367.824,00	42,75	22.815.180,00	48,75	23.271.485,00	1.02.0.00.0.00.01.0013 - Puskesmas Gimpu
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					79.104.262.00 0,00		95.342.169.63 5,00		97.249.013.02 8,00		99.193.993.28 7,00		101.282.197.0 14,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.167.615.840 ,00		8.330.968.157 ,00		8.497.587.520 ,00		8.667.539.270 ,00		8.840.890.056 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	8.167.615.840 ,00	100	8.330.968.157 ,00	100	8.497.587.520 ,00	100	8.667.539.270 ,00	100	8.840.890.056 ,00	1.03.1.04.0.00.01. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					9.174.338.270 ,00		9.357.825.035 ,00		9.544.981.536 ,00		9.735.881.167 ,00		9.930.598.790 ,00	
Meningkatnya Perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Cakupan Penanganan sungai rawan banjir (%)	12,95	12,95	15	9.174.338.270 ,00	18	9.357.825.035 ,00	21,6	9.544.981.536 ,00	26	9.735.881.167 ,00	31	9.930.598.790 ,00	1.03.1.04.0.00.01. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase luas layanan irigasi (%)	69,27	69,27	69,42		69,56		69,71		69,85		70		1.03.1.04.0.00.01. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					9.878.841.350 ,00		10.076.418.17 7,00		10.277.946.54 1,00		10.483.505.47 1,00		10.693.175.58 1,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase masyarakat yang menerima akses terhadap layanan SPAM (%)	75	75	75,26	9.878.841.350 ,00	75,69	10.076.418.17 7,00	76,13	10.277.946.54 1,00	76,56	10.483.505.47 1,00	77,00	10.693.175.58 1,00	1.03.1.04.0.00.01. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN					1.000.000.000 ,00		1.020.000.000 ,00		1.040.400.000 ,00		1.061.208.000 ,00		1.082.432.160 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah	Persentase masyarakat yang menerima akses pengolahan air limbah (%)	82,01	82,01	82,61	1.000.000.000 ,00	83,21	1.020.000.000 ,00	83,80	1.040.400.000 ,00	84,40	1.061.208.000 ,00	85	1.082.432.160 ,00	1.03.1.04.0.00.01. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM DRAINASE					900.000.000,0 0		918.000.000,0 0		936.360.000,0 0		955.087.200,0 0		974.188.944,0 0	
Meningkatnya kualitas sistem drainase dalam perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	900.000.000,0 0	100	918.000.000,0 0	100	936.360.000,0 0	100	955.087.200,0 0	100	974.188.944,0 0	1.03.1.04.0.00.01. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang memiliki dokumen teknis yang telah diverifikasi (%)	100	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	1.03.1.04.0.00.01. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A					1.687.300.000 ,00		11.721.046.00 0,00		11.955.466.92 0,00		12.194.576.25 8,00		12.438.467.78 4,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Jumlah kawasan yang ditata sesuai	9	9	9	1.687.300.000 ,00	9	11.721.046.00 0,00	9	11.955.466.92 0,00	9	12.194.576.25 8,00	9	12.438.467.78 4,00	1.03.1.04.0.00.01. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dengan standar teknis (Angka)													
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN					46.996.166.54 0,00		52.591.912.26 6,00		53.643.750.51 1,00		54.716.625.52 1,00		55.810.958.03 2,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	-	26,41	33,13	46.996.166.54 0,00	39,85	52.591.912.26 6,00	46,56	53.643.750.51 1,00	53,28	54.716.625.52 1,00	60	55.810.958.03 2,00	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi kompetensi (Angka)	310	100	100	500.000.000,0 0	100	510.000.000,0 0	100	520.200.000,0 0	100	530.604.000,0 0	100	541.216.080,0 0	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		645.539.939,0 0	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase perizinan kegiatan pemanfaatan ruang (%)	0,09	0,09	0,12	500.000.000,0 0	0,16	510.000.000,0 0	0,20	520.200.000,0 0	0,24	530.604.000,0 0	0,28	645.539.939,0 0	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					11.127.220.00 0,00		11.349.764.40 0,00		11.576.759.68 8,00		11.808.294.88 2,00		12.044.460.77 9,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.982.620.000 ,00		3.042.272.400 ,00		3.103.117.848 ,00		3.165.180.205 ,00		3.228.483.809 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	2.982.620.000 ,00	100	3.042.272.400 ,00	100	3.103.117.848 ,00	100	3.165.180.205 ,00	100	3.228.483.809 ,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN					4.250.000.000 ,00		4.335.000.000 ,00		4.421.700.000 ,00		4.510.134.000 ,00		4.600.336.680 ,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	0	3,35	22,68	4.250.000.000 ,00	42,01	4.335.000.000 ,00	61,34	4.421.700.000 ,00	80,67	4.510.134.000 ,00	100	4.600.336.680 ,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.04.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.387.200.000 ,00		1.414.944.000 ,00		1.443.242.880 ,00		1.472.107.738 ,00		1.501.549.892 ,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	6,82	7,42	1.387.200.000 ,00	8,02	1.414.944.000 ,00	8,72	1.443.242.880 ,00	9,55	1.472.107.738 ,00	10,55	1.501.549.892 ,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi jumlah kawasan kumuh	Persentase Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya a Permukiman Kumuh di Luar Kawasan PermukimanÂ K umuh (%)	0	0	20	300.000.000,0 0	40	306.000.000,0 0	60	312.120.000,0 0	80	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.907.400.000 ,00		1.945.548.000 ,00		1.984.458.960 ,00		2.024.148.139 ,00		2.064.631.102 ,00	
Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0	18,26	20,51	1.907.400.000 ,00	22,76	1.945.548.000 ,00	25,01	1.984.458.960 ,00	27,26	2.024.148.139 ,00	29,51	2.064.631.102 ,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksnakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.461.851.00 0,00		11.691.088.02 0,00		11.924.909.78 0,00		12.163.407.97 6,00		12.406.676.13 6,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					4.981.825.539 ,00		5.081.462.050 ,00		5.183.091.291 ,00		5.286.753.117 ,00		5.392.488.179 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	2.583.813.957 ,00	100	2.635.490.236 ,00	100	2.688.200.041 ,00	100	2.741.964.042 ,00	100	2.796.803.323 ,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan					2.398.011.582,00		2.445.971.814,00		2.494.891.250,00		2.544.789.075,00		2.595.684.856,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					800.000.000,00		816.000.000,00		832.320.000,00		848.966.400,00		865.945.728,00	
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	400.000.000,00	100	416.000.000,00	100	432.320.000,00	100	448.966.400,00	100	465.945.728,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Persentase Penyelenggaraa n Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4.013.339.418,00		4.093.606.206,00		4.175.478.330,00		4.258.987.897,00		4.344.167.655,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan	100	100	100	3.163.723.568,00	100	3.188.998.039,00	100	3.314.778.000,00	100	3.341.073.560,00	100	3.467.895.031,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bencana (Persentase)													
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	470.000.000,0 0	100	470.000.000,0 0	100	470.000.000,0 0	100	470.000.000,0 0	100	470.000.000,0 0	1.05.0.00.0.00.04. 0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	379.615.850,0 0	100	434.608.167,0 0	100	390.700.330,0 0	100	447.914.337,0 0	100	406.272.624,0 0	1.05.0.00.0.00.04. 0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.666.686.043 ,00		1.700.019.764 ,00		1.734.020.159 ,00		1.768.700.562 ,00		1.804.074.574 ,00	
Meningkatnya cakupan layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	0	80	83	666.686.043,0 0	85	700.019.764,0 0	87	734.020.159,0 0	88	768.700.562,0 0	90	804.074.574,0 0	1.05.0.00.0.00.03. 0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	0	81	83	1.000.000.000 ,00	85	1.000.000.000 ,00	86	1.000.000.000 ,00	88	1.000.000.000 ,00	90	1.000.000.000 ,00	1.05.0.00.0.00.03. 0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.457.818.182 ,00		5.566.974.545 ,00		5.678.314.037 ,00		5.791.880.317 ,00		5.907.717.924 ,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					2.658.762.269 ,00		2.711.937.514 ,00		2.766.176.265 ,00		2.821.499.790 ,00		2.877.929.786 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	2.658.762.269 ,00	100	2.711.937.514 ,00	100	2.766.176.265 ,00	100	2.821.499.790 ,00	100	2.877.929.786 ,00	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	0	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Sosial
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	-	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	-	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	-	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.599.055.913 ,00		1.631.037.031 ,00		1.663.657.772 ,00		1.696.930.927 ,00		1.730.869.546 ,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	0	100	100	1.599.055.913 ,00	100	1.631.037.031 ,00	100	1.663.657.772 ,00	100	1.696.930.927 ,00	100	1.730.869.546 ,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks)	-	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks)	-	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Indeks Peranan Sosial (Indeks)	-	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan	0	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Dasar (Persentase)													1.06.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Sosial		
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	100	100				100				100				100
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	-	100	100				100				100				100
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	-	100	100				100				100				100
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (%)	-	100	100				100				100				100
	Rasio Gini (Indeks)	-	100	100				100				100				100
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0			
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap	0	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Sosial		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Darurat Bencana (Persentase)													
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaann ya (%)	-	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	-	100	100		100		100		100		100		
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.461.117.000 ,00		4.550.339.340 ,00		4.641.346.127 ,00		4.734.173.049 ,00		4.828.856.510 ,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					2.390.985.656 ,00		2.438.805.369 ,00		2.487.581.477 ,00		2.537.333.106 ,00		2.588.079.768 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase Efektifitas administrasi kesekretariatan (%)	-	100	100	2.390.985.656 ,00	100	2.438.805.369 ,00	100	2.487.581.477 ,00	100	2.537.333.106 ,00	100	2.588.079.768 ,00	2.07.3.32.0.00.02. 0000 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	-	2,10	2,11	300.000.000,00	2,17	306.000.000,00	2,25	312.120.000,00	2,30	318.362.400,00	2,30	324.729.648,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.170.131.344,00		1.193.533.971,00		1.217.404.650,00		1.241.752.743,00		1.266.587.798,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	-	69,00	70,00	1.170.131.344,00	72,00	1.193.533.971,00	74,00	1.217.404.650,00	76,00	1.241.752.743,00	78,00	1.266.587.798,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	-	16,00	20,00	300.000.000,00	24,00	306.000.000,00	28,00	312.120.000,00	32,00	318.362.400,00	36,00	324.729.648,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	-	8	9,68	300.000.000,00	12,90	306.000.000,00	16,13	312.120.000,00	19,35	318.362.400,00	22,58	324.729.648,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN					6.413.250.000,00		3.481.514.999,00		3.551.145.299,00		3.622.168.204,00		3.694.611.569,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					4.671.114.018 ,00		1.704.536.297 ,00		1.738.627.023 ,00		1.773.399.563 ,00		1.808.867.555 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	0	95	96	4.671.114.018 ,00	97	1.704.536.297 ,00	98	1.738.627.023 ,00	98	1.773.399.563 ,00	98	1.808.867.555 ,00	2.08.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					200.000.000,0 0		204.000.000,0 0		208.080.000,0 0		212.241.600,0 0		216.486.432,0 0	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	0	0,03	0,04	200.000.000,0 0	0,05	204.000.000,0 0	0,06	208.080.000,0 0	0,07	212.241.600,0 0	0,08	216.486.432,0 0	2.08.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	-	55,76	56,34		56,92		57,50		58,07		58,65		2.08.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					200.000.000,0 0		204.000.000,0 0		208.080.000,0 0		212.241.600,0 0		216.486.432,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	0	0,09	0,092	200.000.000,0 0	0,093	204.000.000,0 0	0,094	208.080.000,0 0	0,095	212.241.600,0 0	0,096	216.486.432,0 0	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaran gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	20	25	300.000.000,0 0	30	306.000.000,0 0	35	312.120.000,0 0	40	318.362.400,0 0	45	324.729.648,0 0	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					200.000.000,0 0		204.000.000,0 0		208.080.000,0 0		212.241.600,0 0		216.486.432,0 0	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	2	2	200.000.000,0 0	2	204.000.000,0 0	2	208.080.000,0 0	2	212.241.600,0 0	2	216.486.432,0 0	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					542.135.982,0 0		552.978.702,0 0		564.038.276,0 0		575.319.041,0 0		586.825.422,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya Pemenuhan Hak semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	142,64	143,64	542.135.982,0 0	145,65	552.978.702,0 0	146,65	564.038.276,0 0	147,65	575.319.041,0 0	148,66	586.825.422,0 0	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	0	0,3105	0,32	300.000.000,0 0	0,34	306.000.000,0 0	0,35	312.120.000,0 0	0,36	318.362.400,0 0	0,37	324.729.648,0 0	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	0	100	100		100		100		100		100		2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					5.684.271.807,00		8.797.957.242,00		5.913.916.387,00		6.032.194.715,00		6.152.838.609,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.484.271.807,00		7.573.957.242,00		4.665.436.387,00		4.758.745.115,00		4.853.920.017,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	4.484.271.807,00	100	7.573.957.242,00	100	4.665.436.387,00	100	4.758.745.115,00	100	4.853.920.017,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	2.09.3.25.0.00.01. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	86,50	85,80	88,60	300.000.000,0 0	91,50	306.000.000,0 0	94,30	312.120.000,0 0	95,00	318.362.400,0 0	100,00	324.729.648,0 0	2.09.3.25.0.00.01. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	100	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	2.09.3.25.0.00.01. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					750.000.000,0 0		765.000.000,0 0		780.300.000,0 0		795.906.000,0 0		811.824.120,0 0	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					250.000.000,0 0		255.000.000,0 0		260.100.000,0 0		265.302.000,0 0		270.608.040,0 0	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan (%)	49,21	49,70	50,20	250.000.000,0 0	50,70	255.000.000,0 0	51,21	260.100.000,0 0	51,72	265.302.000,0 0	52,24	270.608.040,0 0	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					250.000.000,0 0		255.000.000,0 0		260.100.000,0 0		265.302.000,0 0		270.608.040,0 0	
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan (%)	49,21	49,70	50,20	250.000.000,0 0	50,70	255.000.000,0 0	51,21	260.100.000,0 0	51,72	265.302.000,0 0	52,24	270.608.040,0 0	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH					250.000.000,0 0		255.000.000,0 0		260.100.000,0 0		265.302.000,0 0		270.608.040,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE														
Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan (%)	49,21	49,70	50,20	250.000.000,0 0	50,70	255.000.000,0 0	51,21	260.100.000,0 0	51,72	265.302.000,0 0	52,24	270.608.040,0 0	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					7.474.623.000 ,00		7.624.115.460 ,00		7.776.597.769 ,00		7.932.129.725 ,00		8.090.772.319 ,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					2.586.106.143 ,00		2.637.828.266 ,00		2.690.584.831 ,00		2.744.396.528 ,00		2.799.284.458 ,00	
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan					2.586.106.143 ,00		2.637.828.266 ,00		2.690.584.831 ,00		2.744.396.528 ,00		2.799.284.458 ,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	70	70	70	300.000.000,0 0	75	306.000.000,0 0	80	312.120.000,0 0	85	318.362.400,0 0	90	324.729.648,0 0	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53	53	53,1	300.000.000,0 0	53,2	306.000.000,0 0	53,3	312.120.000,0 0	53,4	318.362.400,0 0	53,5	324.729.648,0 0	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	97,48	93,93	94,05		94,1		94,17		94,2		94,25		2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	5	8	8	300.000.000,0 0	9	306.000.000,0 0	10	312.120.000,0 0	11	318.362.400,0 0	12	324.729.648,0 0	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	38	75	75	300.000.000,0 0	75	306.000.000,0 0	80	312.120.000,0 0	80	318.362.400,0 0	80	324.729.648,0 0	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	70	70	70	300.000.000,0 0	75	306.000.000,0 0	80	312.120.000,0 0	85	318.362.400,0 0	90	324.729.648,0 0	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	20	20	300.000.000,0 0	30	306.000.000,0 0	40	312.120.000,0 0	50	318.362.400,0 0	60	324.729.648,0 0	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkait Dengan PPLH														
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	50	50	500.000.000,0 0	55	510.000.000,0 0	60	520.200.000,0 0	65	530.604.000,0 0	70	541.216.080,0 0	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	40	40	300.000.000,0 0	45	306.000.000,0 0	55	312.120.000,0 0	60	318.362.400,0 0	65	324.729.648,0 0	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	50	50	300.000.000,0 0	55	306.000.000,0 0	60	312.120.000,0 0	65	318.362.400,0 0	70	324.729.648,0 0	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.988.516.857 ,00		2.028.287.194 ,00		2.068.852.938 ,00		2.110.229.997 ,00		2.152.434.597 ,00	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0	40	45	1.988.516.857 ,00	50	2.028.287.194 ,00	55	2.068.852.938 ,00	60	2.110.229.997 ,00	65	2.152.434.597 ,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.873.079.000 ,00		5.990.540.580 ,00		6.110.351.392 ,00		6.232.558.419 ,00		6.357.209.588 ,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					4.898.919.895 ,00		4.996.898.293 ,00		5.096.836.259 ,00		5.198.772.984 ,00		5.302.748.444 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	4.898.919.895 ,00	100	4.996.898.293 ,00	100	5.096.836.259 ,00	100	5.198.772.984 ,00	100	5.302.748.444 ,00	2.12.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	-	3	5	300.000.000,0 0	6	306.000.000,0 0	7	312.120.000,0 0	8	318.362.400,0 0	10	324.729.648,0 0	2.12.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (%)	-	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIIL					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	-	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	2.12.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					274.159.105,0 0		279.642.287,0 0		285.235.133,0 0		290.939.835,0 0		296.758.632,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	-	100	100	274.159.105,0 0	100	279.642.287,0 0	100	285.235.133,0 0	100	290.939.835,0 0	100	296.758.632,0 0	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2	2	2	100.000.000,0 0	2	102.000.000,0 0	2	104.040.000,0 0	2	106.120.800,0 0	2	108.243.216,0 0	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.264.926.000 ,00		5.370.224.520 ,00		5.477.629.011 ,00		5.587.181.591 ,00		5.698.925.222 ,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					5.531.505.483 ,00		2.582.135.593 ,00		2.633.778.305 ,00		2.686.453.871 ,00		2.740.182.948 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	5.531.505.483 ,00	100	2.582.135.593 ,00	100	2.633.778.305 ,00	100	2.686.453.871 ,00	100	2.740.182.948 ,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi	-	30	43	300.000.000,0 0	57	306.000.000,0 0	71	312.120.000,0 0	85	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penataan Desa (Persentase)													Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Kualitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	-	60	68	300.000.000,0 0	75	306.000.000,0 0	81	312.120.000,0 0	87	318.362.400,0 0	93	324.729.648,0 0	2.13.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	20	40	300.000.000,0 0	60	306.000.000,0 0	80	312.120.000,0 0	95	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	2.13.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	-	20	40		60		80		95		100		2.13.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.833.420.517 ,00		1.870.088.927 ,00		1.907.490.706 ,00		1.945.640.520 ,00		1.984.553.330 ,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarkatan,	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata	-	65	70	1.833.420.517 ,00	75	1.870.088.927 ,00	80	1.907.490.706 ,00	85	1.945.640.520 ,00	90	1.984.553.330 ,00	2.13.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lembaga Adat Desa	n Desa (LKD) (Persentase)													
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	-	65	70		75		80		85		90		2.13.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					12.400.906.00 0,00		9.588.924.119 ,00		9.780.702.601 ,00		9.976.316.653 ,00		10.175.842.98 7,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					5.482.457.502 ,00		2.532.106.651 ,00		2.582.748.784 ,00		2.634.403.760 ,00		2.687.091.835 ,00	
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keseekretariatan					5.482.457.502 ,00		2.532.106.651 ,00		2.582.748.784 ,00		2.634.403.760 ,00		2.687.091.835 ,00	2.14.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					675.563.722,0 0		689.074.996,0 0		702.856.496,0 0		716.913.626,0 0		731.251.899,0 0	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,31	2,3	2,29	675.563.722,0 0	2,28	689.074.996,0 0	2,28	702.856.496,0 0	2,27	716.913.626,0 0	2,26	731.251.899,0 0	2.14.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	42,5	41.9-41.9	41.2-41.2		40.6-40.6		40-40		39.4-39.4		38.8-38.8		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	60,00	61,30	62,70		64,00		65,30		66,30		66,70		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					5.942.884.776,00		6.061.742.472,00		6.182.977.321,00		6.306.636.867,00		6.432.769.605,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	16,1	15,1	14,2	5.942.884.776,00	13,3	6.061.742.472,00	12,5	6.182.977.321,00	11,7	6.306.636.867,00	11	6.432.769.605,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	63,55	63,36	63,67		63,68		63,69		63,70		63,71		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern (%)	81,3	81,4	81,5		81,6		81,8		81,9		82		2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	61,8	62,5	63,2	300.000.000,0 0	63,9	306.000.000,0 0	64,6	312.120.000,0 0	65,3	318.362.400,0 0	66	324.729.648,0 0	2.14.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	84,5	85,5	86,5		87,4		88,5		89,5		90,5		2.14.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kampung KB Mandiri (%)	5,5	5,9	6,4		6,9		7,4		8		8,6		2.14.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					6.025.235.000 ,00		6.145.739.700 ,00		9.268.654.494 ,00		6.394.027.584 ,00		6.521.908.136 ,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					4.601.174.397 ,00		4.693.197.885 ,00		7.787.061.843 ,00		4.882.803.080 ,00		4.980.459.142 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan					4.601.174.397 ,00		4.693.197.885 ,00		7.787.061.843 ,00		4.882.803.080 ,00		4.980.459.142 ,00	2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN					1.124.060.603 ,00		1.146.541.815 ,00		1.169.472.651 ,00		1.192.862.104 ,00		1.216.719.346 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	-	54	55	1.124.060.603 ,00	56	1.146.541.815 ,00	57	1.169.472.651 ,00	58	1.192.862.104 ,00	59	1.216.719.346 ,00	2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	-	25	30		35		40		45		50		2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatkan kualitas layanan transportasi Sungai / Danau	Konektifitas sungai/danau (%)	-	65	70	300.000.000,0 0	75	306.000.000,0 0	80	312.120.000,0 0	85	318.362.400,0 0	90	324.729.648,0 0	2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan
	Jumlah retribusi sektor penyeberangan danau (Angka)	-	100.000 .000	100.000 .000		100.000 .000		100.000 .000		100.000 .000		100.000 .000		2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.949.369.000 ,00		5.048.356.380 ,00		5.149.323.507 ,00		5.252.309.977 ,00		5.357.356.177 ,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					4.406.718.103 ,00		4.494.852.465 ,00		4.584.749.514 ,00		4.676.444.504 ,00		4.769.973.394 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan.	100	100	100	4.406.718.103 ,00	100	4.494.852.465 ,00	100	4.584.749.514 ,00	100	4.676.444.504 ,00	100	4.769.973.394 ,00	2.16.2.20.2.21.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	umum dan kepegawaian (%)													
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					200.000.000,0 0		204.000.000,0 0		208.080.000,0 0		212.241.600,0 0		216.486.432,0 0	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	75	80	200.000.000,0 0	85	204.000.000,0 0	90	208.080.000,0 0	95	212.241.600,0 0	100	216.486.432,0 0	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					342.650.897,0 0		349.503.915,0 0		356.493.993,0 0		363.623.873,0 0		370.896.351,0 0	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (%)	0	2,25	2,35	342.650.897,0 0	2,45	349.503.915,0 0	2,60	356.493.993,0 0	2,75	363.623.873,0 0	3,00	370.896.351,0 0	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	0	0,37	1,20		1,50		2,60		2,75		3,00		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.130.883.000 ,00		5.233.500.660 ,00		8.338.170.673 ,00		5.444.934.087 ,00		5.878.562.417 ,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.429.028.894 ,00		2.477.609.472 ,00		5.527.161.661 ,00		2.577.704.895 ,00		2.953.988.641 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	2.429.028.894 ,00	100	2.477.609.472 ,00	100	5.527.161.661 ,00	100	2.577.704.895 ,00	100	2.953.988.641 ,00	2.17.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	0	2,39	5,61	300.000.000,0 0	7,96	306.000.000,0 0	9,83	312.120.000,0 0	11,19	318.362.400,0 0	12,08	324.729.648,0 0	2.17.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0	30	34,08	300.000.000,0 0	37,88	306.000.000,0 0	56,82	312.120.000,0 0	75,76	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	2.17.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	30,00	51,00	53,03	300.000.000,0 0	56,82	306.000.000,0 0	75,76	312.120.000,0 0	87,12	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	2.17.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	20	22,73	300.000.000,0 0	24,62	306.000.000,0 0	28,41	312.120.000,0 0	37,88	318.362.400,0 0	47,35	324.729.648,0 0	2.17.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	0	32	34,09	500.000.000,0 0	37,88	510.000.000,0 0	56,82	520.200.000,0 0	75,76	530.604.000,0 0	100	541.216.080,0 0	2.17.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					701.854.106,0 0		715.891.188,0 0		730.209.012,0 0		744.813.192,0 0		759.709.456,0 0	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0	38,07	40,02	701.854.106,0 0	41,97	715.891.188,0 0	43,93	730.209.012,0 0	45,88	744.813.192,0 0	47,83	759.709.456,0 0	2.17.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0	5,41	5,13		4,88		4,65		4,45		4,26		2.17.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	0,24	0,38	300.000.000,0 0	0,52	306.000.000,0 0	0,65	312.120.000,0 0	0,79	318.362.400,0 0	0,92	324.729.648,0 0	2.17.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.365.337.000 ,00		5.472.643.740 ,00		5.582.096.615 ,00		5.693.738.547 ,00		5.807.613.318 ,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					4.123.454.172 ,00		4.205.923.255 ,00		4.290.041.721 ,00		4.375.842.555 ,00		4.463.359.406 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	0	100	100	4.123.454.172 ,00	100	4.205.923.255 ,00	100	4.290.041.721 ,00	100	4.375.842.555 ,00	100	4.463.359.406 ,00	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL					241.882.828,0 0		246.720.485,0 0		251.654.894,0 0		256.687.992,0 0		261.821.752,0 0	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	0	100	100	241.882.828,0 0	100	246.720.485,0 0	100	251.654.894,0 0	100	256.687.992,0 0	100	261.821.752,0 0	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	100	100	500.000.000,0 0	100	510.000.000,0 0	100	520.200.000,0 0	100	530.604.000,0 0	100	541.216.080,0 0	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					200.000.000,0 0		204.000.000,0 0		208.080.000,0 0		212.241.600,0 0		216.486.432,0 0	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	0	100	100	200.000.000,0 0	100	204.000.000,0 0	100	208.080.000,0 0	100	212.241.600,0 0	100	216.486.432,0 0	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					200.000.000,0 0		204.000.000,0 0		208.080.000,0 0		212.241.600,0 0		216.486.432,0 0	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	0	100	100	200.000.000,0 0	100	204.000.000,0 0	100	208.080.000,0 0	100	212.241.600,0 0	100	216.486.432,0 0	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INFORMASI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	0	100	100	100.000.000,0 0	100	102.000.000,0 0	100	104.040.000,0 0	100	106.120.800,0 0	100	108.243.216,0 0	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.831.560.000 ,00		5.948.191.200 ,00		6.067.155.024 ,00		6.188.498.125 ,00		6.312.268.087 ,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					2.191.541.116 ,00		2.235.371.938 ,00		2.280.079.377 ,00		2.325.680.965 ,00		2.372.194.584 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	2.191.541.116 ,00	100	2.235.371.938 ,00	100	2.280.079.377 ,00	100	2.325.680.965 ,00	100	2.372.194.584 ,00	2.19.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	-	75	80	300.000.000,0 0	85	306.000.000,0 0	90	312.120.000,0 0	95	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	2.19.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGA					3.040.018.884 ,00		3.100.819.262 ,00		3.162.835.647 ,00		3.226.092.360 ,00		3.290.614.207 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	-	19	20	3.040.018.884 ,00	21	3.100.819.262 ,00	22	3.162.835.647 ,00	23	3.226.092.360 ,00	24	3.290.614.207 ,00	2.19.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS KEPRAMUKAAN					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	-	65	70	300.000.000,0 0	75	306.000.000,0 0	80	312.120.000,0 0	85	318.362.400,0 0	90	324.729.648,0 0	2.19.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	1,44	1,60	2,50	100.000.000,0 0	3,15	102.000.000,0 0	3,46	104.040.000,0 0	3,50	106.120.800,0 0	4,19	108.243.216,0 0	2.16.2.20.2.21.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	0	0,37	1,20	100.000.000,0 0	1,50	102.000.000,0 0	2,60	104.040.000,0 0	2,75	106.120.800,0 0	3,00	108.243.216,0 0	2.16.2.20.2.21.01. 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.186.489.820 ,00		3.250.219.616 ,00		3.315.224.008 ,00		3.381.528.489 ,00		3.449.159.058 ,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN					1.771.298.500 ,00		1.806.724.470 ,00		1.842.858.959 ,00		1.879.716.139 ,00		1.917.310.461 ,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	65,00	70,00	75,00	1.771.298.500 ,00	80,00	1.806.724.470 ,00	82,50	1.842.858.959 ,00	85,00	1.879.716.139 ,00	90,00	1.917.310.461 ,00	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL					965.191.320,0 0		984.495.146,0 0		1.004.185.049 ,00		1.024.268.750 ,00		1.044.754.125 ,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	65,00	70,00	75,00	965.191.320,0 0	80,00	984.495.146,0 0	85,00	1.004.185.049 ,00	90,00	1.024.268.750 ,00	95,00	1.044.754.125 ,00	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					200.000.000,0 0		204.000.000,0 0		208.080.000,0 0		212.241.600,0 0		216.486.432,0 0	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan	65,00	70,00	72,50	200.000.000,0 0	75,00	204.000.000,0 0	77,50	208.080.000,0 0	80,00	212.241.600,0 0	82,50	216.486.432,0 0	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sejarah Lokal (Persentase)													
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					250.000.000,0 0		255.000.000,0 0		260.100.000,0 0		265.302.000,0 0		270.608.040,0 0	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	65,00	70,00	85,00	250.000.000,0 0	87,50	255.000.000,0 0	90,00	260.100.000,0 0	92,50	265.302.000,0 0	95,00	270.608.040,0 0	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	65,00	70,00	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00		1.01.2.22.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.046.888.000 ,00		3.107.825.760 ,00		3.169.982.275 ,00		3.233.381.921 ,00		3.298.049.559 ,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					1.983.055.578 ,00		2.022.716.690 ,00		2.063.171.023 ,00		2.104.434.444 ,00		2.146.523.133 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	1.983.055.578 ,00	100	2.022.716.690 ,00	100	2.063.171.023 ,00	100	2.104.434.444 ,00	100	2.146.523.133 ,00	2.23.2.24.0.00.02. 0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM					763.832.422,0 0		779.109.070,0 0		794.691.252,0 0		810.585.077,0 0		826.796.778,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														
Meningkatkan Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	63,00	64,00	65,00	763.832.422,0 0	65,50	779.109.070,0 0	66,00	794.691.252,0 0	67,00	810.585.077,0 0	68,00	826.796.778,0 0	2.23.2.24.0.00.02. 0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatkan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	5	10	10	300.000.000,0 0	10	306.000.000,0 0	10	312.120.000,0 0	10	318.362.400,0 0	10	324.729.648,0 0	2.23.2.24.0.00.02. 0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					900.000.000,0 0		918.000.000,0 0		936.360.000,0 0		955.087.200,0 0		974.188.944,0 0	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	58,58	59,00	59,25	300.000.000,0 0	59,50	306.000.000,0 0	59,75	312.120.000,0 0	60,00	318.362.400,0 0	60,25	324.729.648,0 0	2.23.2.24.0.00.02. 0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan	6	6	6	300.000.000,0 0	6	306.000.000,0 0	6	312.120.000,0 0	6	318.362.400,0 0	6	324.729.648,0 0	2.23.2.24.0.00.02. 0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Arsip (Persentase)													
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	10	10	10	300.000.000,0 0	10	306.000.000,0 0	10	312.120.000,0 0	10	318.362.400,0 0	10	324.729.648,0 0	2.23.2.24.0.00.02. 0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.554.557.193 ,00		3.625.648.337 ,00		3.698.161.304 ,00		3.772.124.530 ,00		3.847.567.020 ,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					2.054.557.193 ,00		2.095.648.337 ,00		2.137.561.304 ,00		2.180.312.530 ,00		2.223.918.780 ,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	-	87,05	87,25	2.054.557.193 ,00	87,50	2.095.648.337 ,00	87,75	2.137.561.304 ,00	88,01	2.180.312.530 ,00	88,30	2.223.918.780 ,00	2.09.3.25.0.00.01. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	-	894,71	921,55	500.000.000,0 0	949,19	510.000.000,0 0	977,66	520.200.000,0 0	1.006,9 8	530.604.000,0 0	1.037,1 8	541.216.080,0 0	2.09.3.25.0.00.01. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatnya kelestarian laut, Sungai, Danau dan keanekaragama n hayati	Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)	4,00	4,10	5,00	500.000.000,0 0	6,00	510.000.000,0 0	6,10	520.200.000,0 0	6,30	530.604.000,0 0	6,50	541.216.080,0 0	2.09.3.25.0.00.01. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	-	67,43	69,12	500.000.000,0 0	70,89	510.000.000,0 0	72,15	520.200.000,0 0	74,23	530.604.000,0 0	76,18	541.216.080,0 0	2.09.3.25.0.00.01. 0000 - Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					7.457.283.000 ,00		10.606.428.66 0,00		7.004.480.102 ,00		7.144.569.704 ,00		7.178.861.098 ,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					3.220.147.910 ,00		6.284.550.868 ,00		2.596.164.754 ,00		2.648.088.049 ,00		2.592.449.810 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	3.220.147.910 ,00	100	6.284.550.868 ,00	100	2.596.164.754 ,00	100	2.648.088.049 ,00	100	2.592.449.810 ,00	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.487.135.090 ,00		2.536.877.792 ,00		2.587.615.348 ,00		2.639.367.655 ,00		2.692.155.008 ,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	28.363	55.000	55.000	2.487.135.090 ,00	75.625	2.536.877.792 ,00	96.250	2.587.615.348 ,00	116.875	2.639.367.655 ,00	137.500	2.692.155.008 ,00	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	2	2	3	500.000.000,0 0	4	510.000.000,0 0	4	520.200.000,0 0	5	530.604.000,0 0	5	541.216.080,0 0	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	27	30	500.000.000,0 0	33	510.000.000,0 0	35	520.200.000,0 0	38	530.604.000,0 0	42	541.216.080,0 0	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA					750.000.000,0 0		765.000.000,0 0		780.300.000,0 0		795.906.000,0 0		811.824.120,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	30	50	70	750.000.000,0 0	90	765.000.000,0 0	100	780.300.000,0 0	100	795.906.000,0 0	100	811.824.120,0 0	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					47.668.359.00 0,00		54.621.726.17 9,00		49.594.160.70 1,00		50.586.043.91 7,00		51.347.764.79 4,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					26.588.465.56 2,00		33.120.234.87 3,00		27.662.639.56 9,00		28.215.892.36 1,00		28.530.210.20 8,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	96,83	100	100	16.597.504.08 5,00	100	21.134.052.48 5,00	100	18.496.733.53 4,00	100	18.866.668.20 5,00	100	18.994.001.56 9,00	3.27.0.00.0.00.09. 0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	9.990.961.477 ,00	100	11.986.182.38 8,00	100	9.165.906.035 ,00	100	9.349.224.156 ,00	100	9.536.208.639 ,00	3.27.0.00.0.00.08. 0000 - Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA					13.154.879.14 2,00		13.417.976.72 5,00		13.686.336.25 9,00		13.960.062.98 5,00		14.239.264.24 4,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
N SARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Padi (Ton)	108.17 0	109.792	110.890	8.430.986.778 ,00	111.999	8.599.606.514 ,00	113.119	8.771.598.644 ,00	114.251	10.147.030.61 7,00	115.393	8.349.971.229 ,00	3.27.0.00.0.00.09. 0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	51.048	51.814	52.332		52.856		53.384		53.918		54.457		3.27.0.00.0.00.09. 0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Ton)	739	753	768		780		792		804		816		3.27.0.00.0.00.09. 0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	3.271	3.336	3.403		3.454		3.506		3.558		3.612		3.27.0.00.0.00.09. 0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis Durian (Ton)	5.044	5.145	5.248		5.327		5.407		5.488		5.570		3.27.0.00.0.00.09. 0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (Ton)	19.499	19.694	19.989		20.189		20.391		20.595		20.801		3.27.0.00.0.00.09. 0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (Ton)	3.069	3.100	3.147		3.178		3.210		3.242		3.274		3.27.0.00.0.00.09. 0000 - Dinas Tanaman Pangan,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Hortikultura dan Perkebunan
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	508	513	521		526		531		537		542		3.27.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Daging Sapi) (Kg)	0	571.720	640.800	4.723.892.364,00	745.120	4.818.370.211,00	860.920	4.914.737.615,00	1.013.140	3.813.032.368,00	1.183.100	5.889.293.015,00	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Daging Kambing) (Kg)	0	170.400	199.470		232.917		272.098		317.331		370.422		3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Daging Babi) (Kg)	0	262.823	312.180		372.345		442.469		526.659		626.404		3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Daging Unggas) (Kg)	0	3.830.335	4.204.440		4.405.381		4.616.407		4.605.836		4.817.127		3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Telur Unggas) (Kg)	0	7.376.585	8.621.711		10.084.723		11.803.835		13.823.961		16.197.893		3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN					4.449.049.659,00		4.538.030.652,00		4.628.791.265,00		4.721.367.091,00		4.815.794.432,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	15.280	15.280	15.280	2.633.318.659 ,00	15.280	2.665.985.032 ,00	15.280	2.699.304.733 ,00	15.280	2.933.290.828 ,00	15.280	2.726.590.807 ,00	3.27.0.00.0.00.09. 0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Padang Pengembalaan Â yangÂ Dikelol a (%)	25	25	25	1.815.731.000 ,00	25	1.872.045.620 ,00	25	1.929.486.532 ,00	25	1.788.076.263 ,00	25	2.089.203.625 ,00	3.27.0.00.0.00.08. 0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	1	500.000.000,0 0	1	510.000.000,0 0	1	520.200.000,0 0	1	530.604.000,0 0	1	541.216.080,0 0	3.27.0.00.0.00.08. 0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	75	75		75		75		75		100		3.27.0.00.0.00.08. 0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
AN BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	10	10	10	250.000.000,0 0	10	255.000.000,0 0	10	260.100.000,0 0	10	265.302.000,0 0	10	270.608.040,0 0	3.27.0.00.0.00.09. 0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	10	10	10				10				10		
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	10	10	250.000.000,0 0	10	255.000.000,0 0	10	260.100.000,0 0	10	265.302.000,0 0	10	270.608.040,0 0	3.27.0.00.0.00.08. 0000 - Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	250.000.000,0 0	100	255.000.000,0 0	100	260.100.000,0 0	100	265.302.000,0 0	100	270.608.040,0 0	3.27.0.00.0.00.09. 0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	0	100	100	250.000.000,0 0	100	255.000.000,0 0	100	260.100.000,0 0	100	265.302.000,0 0	100	270.608.040,0 0	3.27.0.00.0.00.08. 0000 - Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.975.964.637 ,00		2.015.483.929 ,00		2.055.793.608 ,00		2.096.909.480 ,00		2.138.847.670 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	50	50	50	1.481.973.478,00	50	1.511.612.947,00	50	1.541.845.206,00	50	1.572.682.110,00	50	1.604.135.752,00	3.27.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	5	5	5				5				5		
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	50	50	493.991.159,00	50	503.870.982,00	50	513.948.402,00	50	524.227.370,00	50	534.711.918,00	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	5	5				5				5		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.614.155.000,00		5.726.438.100,00		8.840.966.863,00		5.957.786.201,00		6.076.941.925,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.981.674.530,00		3.041.308.021,00		6.102.134.182,00		3.164.176.866,00		3.227.460.404,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	2.981.674.530,00	100	3.041.308.021,00	100	6.102.134.182,00	100	3.164.176.866,00	100	3.227.460.404,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	57,79	60,32	62,85	100.000.000,0 0	65,40	102.000.000,0 0	67,95	104.040.000,0 0	70,50	106.120.800,0 0	73,05	108.243.216,0 0	3.31.3.30.0.00.02. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					508.893.300,0 0		519.071.166,0 0		529.452.589,0 0		540.041.641,0 0		550.842.474,0 0	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	90,91	95,45	100	508.893.300,0 0	100	519.071.166,0 0	100	529.452.589,0 0	100	540.041.641,0 0	100	550.842.474,0 0	3.31.3.30.0.00.02. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.523.587.170 ,00		1.554.058.913 ,00		1.585.140.092 ,00		1.616.842.894 ,00		1.649.179.751 ,00	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	41,67	62,50	83,33	1.523.587.170 ,00	100	1.554.058.913 ,00	100	1.585.140.092 ,00	100	1.616.842.894 ,00	100	1.649.179.751 ,00	3.31.3.30.0.00.02. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGA N EKSPOR					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	54.000. 000	60.000. 000	66.000. 000	100.000.000,0 0	72.600. 000	102.000.000,0 0	79.860. 000	104.040.000,0 0	87.846. 000	106.120.800,0 0	87.846. 000	108.243.216,0 0	3.31.3.30.0.00.02. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	3.31.3.30.0.00.02. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	75	100	100	100.000.000,0 0	100	102.000.000,0 0	100	104.040.000,0 0	100	106.120.800,0 0	100	108.243.216,0 0	3.31.3.30.0.00.02. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					500.000.000,0 0		510.000.000,0 0		520.200.000,0 0		530.604.000,0 0		541.216.080,0 0	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	53,86	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	3.31.3.30.0.00.02. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	49,00	58,00	60,00	100.000.000,0 0	62,00	102.000.000,0 0	64,00	104.040.000,0 0	66,00	106.120.800,0 0	68,00	108.243.216,0 0	3.31.3.30.0.00.02. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	88	90	100	100.000.000,0 0	100	102.000.000,0 0	100	104.040.000,0 0	100	106.120.800,0 0	100	108.243.216,0 0	3.31.3.30.0.00.02. 0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					900.000.000,0 0		918.000.000,0 0		936.360.000,0 0		955.087.200,0 0		974.188.944,0 0	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	-	20	20	300.000.000,0 0	20	306.000.000,0 0	20	312.120.000,0 0	20	318.362.400,0 0	20	324.729.648,0 0	2.07.3.32.0.00.02. 0000 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	-	20	20	300.000.000,0 0	20	306.000.000,0 0	20	312.120.000,0 0	20	318.362.400,0 0	20	324.729.648,0 0	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	-	20	20	300.000.000,0 0	20	306.000.000,0 0	20	312.120.000,0 0	20	318.362.400,0 0	20	324.729.648,0 0	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					50.749.976.00 0,00		51.764.975.52 1,00		52.800.275.03 2,00		53.856.280.53 1,00		54.633.406.14 1,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.990.986.48 4,00		28.550.806.21 4,00		29.121.822.33 8,00		29.704.258.78 5,00		29.998.343.96 0,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	27.990.986.48 4,00	100	28.550.806.21 4,00	100	29.121.822.33 8,00	100	29.704.258.78 5,00	100	29.998.343.96 0,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					22.166.877.94 1,00		22.610.215.50 0,00		23.062.419.81 0,00		23.523.668.20 6,00		23.994.141.57 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	-	70	75	16.368.493.21 8,00	80	16.467.263.44 7,00	85	16.568.060.23 1,00	90	16.670.873.00 4,00	95	16.775.742.03 1,00	4.01.0.00.0.00.01. 0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan (Persentase)	-	70	75	4.926.586.308 ,00	80	5.123.386.308 ,00	85	5.324.190.508 ,00	90	5.529.010.864 ,00	95	5.737.927.624 ,00	4.01.0.00.0.00.01. 0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Produk Hukum	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	-	70	75	871.798.415,0 0	80	1.019.565.745 ,00	85	1.170.169.071 ,00	90	1.323.784.338 ,00	95	1.480.471.915 ,00	4.01.0.00.0.00.01. 0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					592.111.575,0 0		603.953.807,0 0		616.032.884,0 0		628.353.540,0 0		640.920.611,0 0	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	-	70	75	168.081.137,0 0	80	171.081.137,0 0	85	174.081.137,0 0	90	177.081.137,0 0	95	180.081.136,0 0	4.01.0.00.0.00.01. 0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	-	6	7	300.143.530,0 0	8	302.985.762,0 0	9	306.064.839,0 0	9	309.385.496,0 0	9	312.952.567,0 0	4.01.0.00.0.00.01. 0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	-	70	75	123.886.908,0 0	80	129.886.908,0 0	85	135.886.908,0 0	90	141.886.907,0 0	95	147.886.908,0 0	4.01.0.00.0.00.01. 0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					25.948.199.00 0,00		26.467.162.98 0,00		26.996.506.24 0,00		27.536.436.36 5,00		27.987.165.09 2,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					19.415.071.90 7,00		19.803.373.34 5,00		20.199.440.81 2,00		20.603.429.62 9,00		20.915.498.22 1,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	19.415.071.90 7,00	100	19.803.373.34 5,00	100	20.199.440.81 2,00	100	20.603.429.62 9,00	100	20.915.498.22 1,00	4.02.0.00.0.00.01. 0000 - Sekretariat DPRD Kab. Sigi
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					6.533.127.093 ,00		6.663.789.635 ,00		6.797.065.428 ,00		6.933.006.736 ,00		7.071.666.871 ,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang undangan	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	-	95,00	95,95	6.533.127.093 ,00	96,91	6.663.789.635 ,00	97,88	6.797.065.428 ,00	98,86	6.933.006.736 ,00	99,85	7.071.666.871 ,00	4.02.0.00.0.00.01. 0000 - Sekretariat DPRD Kab. Sigi
5.01 - PERENCANAAN					9.969.836.000 ,00		10.169.232.72 3,00		10.372.617.37 4,00		10.580.069.72 3,00		10.687.347.25 6,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					6.469.836.000 ,00		6.599.232.723 ,00		6.731.217.374 ,00		6.865.841.723 ,00		6.898.834.696 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	6.469.836.000 ,00	100	6.599.232.723 ,00	100	6.731.217.374 ,00	100	6.865.841.723 ,00	100	6.898.834.696 ,00	5.01.5.05.0.00.02. 0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.500.000.000 ,00		1.530.000.000 ,00		1.560.600.000 ,00		1.591.812.000 ,00		1.623.648.240 ,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	1.500.000.000 ,00	100	1.530.000.000 ,00	100	1.560.600.000 ,00	100	1.591.812.000 ,00	100	1.623.648.240 ,00	5.01.5.05.0.00.02. 0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02. 0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.000.000.000 ,00		2.040.000.000 ,00		2.080.800.000 ,00		2.122.416.000 ,00		2.164.864.320 ,00	
Meningkatnya kualitas peerencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	500.000.000,0 0	100	520.000.000,0 0	100	540.400.000,0 0	100	561.208.000,0 0	100	582.432.160,0 0	5.01.5.05.0.00.02. 0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kualitas peerencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	100	100	100	1.000.000.000 ,00	100	1.020.000.000 ,00	100	1.040.400.000 ,00	100	1.061.208.000 ,00	100	1.082.432.160 ,00	5.01.5.05.0.00.02. 0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Manusia (Persentase)													
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	500.000.000,0 0	100	500.000.000,0 0	100	500.000.000,0 0	100	500.000.000,0 0	100	500.000.000,0 0	5.01.5.05.0.00.02. 0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN					422.337.995.1 66,00		430.784.755.0 69,00		426.335.960.3 00,00		433.385.679.0 98,00		428.113.629.0 00,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					189.339.433.5 62,00		193.126.222.2 33,00		185.924.256.8 07,00		191.165.741.5 36,00		184.049.292.6 86,00	
MENINGKATNYA KELANCARAN ADMINISTRASI KESEKRATARIAT AN	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	181.051.300.3 46,00	100	184.672.326.3 53,00	100	177.301.283.0 09,00	100	182.370.308.2 62,00	100	175.077.950.7 47,00	5.02.0.00.0.00.02. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keseekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	8.288.133.216 ,00	100	8.453.895.880 ,00	100	8.622.973.798 ,00	100	8.795.433.274 ,00	100	8.971.341.939 ,00	5.02.0.00.0.00.03. 0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					231.542.631.8 20,00		236.173.484.4 56,00		238.896.954.1 46,00		240.674.893.2 28,00		242.488.391.0 93,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA TATA KELOLA AKUNTANSI PELAPORAN	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	-	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	5.02.0.00.0.00.02. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	-	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	5.02.0.00.0.00.02. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERBENDAHARA AN	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	-	100	100	230.942.631.8 20,00	100	235.561.484.4 56,00	100	238.272.714.1 46,00	100	240.038.168.4 28,00	100	241.838.931.7 97,00	5.02.0.00.0.00.02. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					300.000.000,0 0		306.000.000,0 0		312.120.000,0 0		318.362.400,0 0		324.729.648,0 0	
MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	-	100	100	300.000.000,0 0	100	306.000.000,0 0	100	312.120.000,0 0	100	318.362.400,0 0	100	324.729.648,0 0	5.02.0.00.0.00.02. 0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN					1.155.929.784 ,00		1.179.048.380 ,00		1.202.629.347 ,00		1.226.681.934 ,00		1.251.215.573 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDAPATAN DAERAH														
Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	6,01	7,45	7,49	1.155.929.784 ,00	7,53	1.179.048.380 ,00	7,58	1.202.629.347 ,00	7,67	1.226.681.934 ,00	7,69	1.251.215.573 ,00	5.02.0.00.0.00.03. 0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					6.080.289.491 ,00		6.201.895.281 ,00		6.325.933.186 ,00		6.452.451.850 ,00		6.581.500.887 ,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					5.382.513.550 ,00		5.490.163.821 ,00		5.599.967.097 ,00		5.711.966.439 ,00		5.826.205.768 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	5.382.513.550 ,00	100	5.490.163.821 ,00	100	5.599.967.097 ,00	100	5.711.966.439 ,00	100	5.826.205.768 ,00	5.03.5.04.0.00.01. 0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					697.775.941,0 0		711.731.460,0 0		725.966.089,0 0		740.485.411,0 0		755.295.119,0 0	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	-	2	2	196.944.211,0 0	3	177.932.865,0 0	3	181.716.526,0 0	3	185.121.352,0 0	3	188.846.282,0 0	5.03.5.04.0.00.01. 0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	-	90	91	166.943.910,0 0	92	177.932.865,0 0	93	181.416.521,0 0	94	185.121.353,0 0	95	188.816.279,0 0	5.03.5.04.0.00.01. 0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	-	29,87	38,91	166.943.910,0 0	39,73	177.932.865,0 0	40,80	181.416.521,0 0	41,94	185.121.353,0 0	43,14	188.816.279,0 0	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	-	60	60	166.943.910,0 0	61	177.932.865,0 0	62	181.416.521,0 0	63	185.121.353,0 0	64	188.816.279,0 0	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.211.657.509 ,00		1.235.890.659 ,00		1.260.608.472 ,00		1.285.820.642 ,00		1.311.537.055 ,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.211.657.509 ,00		1.235.890.659 ,00		1.260.608.472 ,00		1.285.820.642 ,00		1.311.537.055 ,00	
Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	-	88,89	77,78	100.000.000,0 0	77,78	100.000.000,0 0	77,78	100.000.000,0 0	77,78	100.000.000,0 0	77,78	100.000.000,0 0	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, Manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	-	30,42	37,95	419.177.230,0 0	38,75	427.560.774,0 0	39,80	436.111.989,0 0	40,90	444.834.230,0 0	42,07	453.730.915,0 0	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya layanan Penjaminan mutu, Pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	-	100	20,29	692.480.279,0 0	22,62	708.329.885,0 0	26,53	724.496.483,0 0	33,65	740.986.412,0 0	47,32	757.806.140,0 0	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN					900.000.000,0 0		918.000.000,0 0		936.360.000,0 0		955.087.200,0 0		974.188.944,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGA N														
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH					450.000.000,0 0		459.000.000,0 0		468.180.000,0 0		477.543.600,0 0		487.094.472,0 0	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	70	75	80	225.000.000,0 0	85	234.000.000,0 0	90	243.180.000,0 0	95	252.543.600,0 0	100	262.094.472,0 0	5.01.5.05.0.00.02. 0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daeah dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	70	75	80	75.000.000,00	85	75.000.000,00	90	75.000.000,00	95	75.000.000,00	100	75.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02. 0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Menigkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	70	75	80	75.000.000,00	85	75.000.000,00	90	75.000.000,00	95	75.000.000,00	100	75.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02. 0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	70	75	80	75.000.000,00	85	75.000.000,00	90	75.000.000,00	95	75.000.000,00	100	75.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					450.000.000,00		459.000.000,00		468.180.000,00		477.543.600,00		487.094.472,00	
Menigkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	70	75	80	330.000.000,00	85	331.000.000,00	90	332.020.000,00	95	333.260.400,00	100	334.121.608,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	70	75	80	120.000.000,00	85	128.000.000,00	90	136.160.000,00	95	144.283.200,00	100	152.972.864,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					13.339.593.000,00		13.606.384.860,00		13.878.512.557,00		14.156.082.808,00		14.439.204.465,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					10.166.239.728,00		10.369.564.523,00		10.576.955.813,00		10.788.494.929,00		11.004.264.828,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KABUPATEN/KOT A														
meningkatnya efektifitas administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	10.166.239.72 8,00	100	10.369.564.52 3,00	100	10.576.955.81 3,00	100	10.788.494.92 9,00	100	11.004.264.82 8,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat Kab. Sigi
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN					2.723.353.272 ,00		2.777.820.337 ,00		2.833.376.744 ,00		2.890.044.279 ,00		2.947.845.165 ,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenanga	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	74	75	76	2.723.353.272 ,00	77	2.777.820.337 ,00	78	2.833.376.744 ,00	79	2.890.044.279 ,00	80	2.947.845.165 ,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat Kab. Sigi
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					450.000.000,0 0		459.000.000,0 0		468.180.000,0 0		477.543.600,0 0		487.094.472,0 0	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistens	Persentase pendampingan, asistensi dan konsultasi yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	450.000.000,0 0	100	459.000.000,0 0	100	468.180.000,0 0	100	477.543.600,0 0	100	487.094.472,0 0	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat Kab. Sigi
7.01 - KECAMATAN					27.490.915.00 0,00		28.040.733.30 0,00		28.601.547.96 5,00		29.173.578.92 6,00		29.757.050.50 5,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					27.490.915.00 0,00		28.040.733.30 0,00		28.601.547.96 5,00		29.173.578.92 6,00		29.757.050.50 5,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOT A														
meningkatkan Kelancaran Administrasi Kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	0	100	100	1.837.300.000 ,00	100	1.874.046.000 ,00	100	1.911.526.920 ,00	100	1.949.757.458 ,00	100	1.988.752.608 ,00	7.01.0.00.0.00.08. 0000 - Kecamatan Marawola Barat
Meningkatnya Kelancaran Admiistrasi Kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	1.954.854.000 ,00	100	1.993.951.080 ,00	100	2.033.830.102 ,00	100	2.074.506.704 ,00	100	2.115.996.838 ,00	7.01.0.00.0.00.10. 0000 - Kecamatan Palolo
meningkatkan kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	2.166.791.000 ,00	100	2.210.126.820 ,00	100	2.254.329.356 ,00	100	2.299.415.944 ,00	100	2.345.404.262 ,00	7.01.0.00.0.00.09. 0000 - Kecamatan Kinovaro
meningkatkan kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	1.657.545.000 ,00	100	1.690.695.900 ,00	100	1.724.509.818 ,00	100	1.759.000.014 ,00	100	1.794.180.015 ,00	7.01.0.00.0.00.15. 0000 - Kecamatan Sigi Biomaru
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	1.530.145.000 ,00	100	1.560.747.900 ,00	100	1.591.962.858 ,00	100	1.623.802.115 ,00	100	1.656.278.157 ,00	7.01.0.00.0.00.03. 0000 - Kecamatan Dolo Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	1.748.201.000 ,00	100	1.783.165.020 ,00	100	1.818.828.320 ,00	100	1.855.204.887 ,00	100	1.892.308.985 ,00	7.01.0.00.0.00.05. 0000 - Kecamatan Kulawi
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)		100	100	1.867.555.000 ,00	100	1.904.906.100 ,00	100	1.943.004.222 ,00	100	1.981.864.306 ,00	100	2.021.501.593 ,00	7.01.0.00.0.00.07. 0000 - Kecamatan Marawola
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	1.604.818.000 ,00	100	1.636.914.360 ,00	100	1.669.652.647 ,00	100	1.703.045.700 ,00	100	1.737.106.614 ,00	7.01.0.00.0.00.11. 0000 - Kecamatan Nokilalaki
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	1.444.225.000 ,00	100	1.473.109.500 ,00	100	1.502.571.690 ,00	100	1.532.623.124 ,00	100	1.563.275.586 ,00	7.01.0.00.0.00.13. 0000 - Kecamatan Gumbasa
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	1.478.291.000 ,00	100	1.507.856.820 ,00	100	1.538.013.956 ,00	100	1.568.774.236 ,00	100	1.600.149.720 ,00	7.01.0.00.0.00.16. 0000 - Kecamatan Sigi Kota
Meningkatnya kelancaran Administrasi Kesekretariatan	Persentase Efektifitas administrasi	100	100	100	2.110.509.000 ,00	100	2.152.719.180 ,00	100	2.195.773.564 ,00	100	2.239.689.035 ,00	100	2.284.482.816 ,00	7.01.0.00.0.00.02. 0000 - Kecamatan Dolo Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kesekretariatan (%)													
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	2.154.931.000,00	100	2.198.029.620,00	100	2.241.990.212,00	100	2.286.830.017,00	100	2.332.566.617,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Dolo
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	-	100	100	1.120.366.000,00	100	1.142.773.320,00	100	1.165.628.786,00	100	1.188.941.362,00	100	1.212.720.189,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Lindu
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	1.771.630.000,00	100	1.807.062.600,00	100	1.843.203.852,00	100	1.880.067.929,00	100	1.917.669.288,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Tanambulava
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	1.505.489.000,00	100	1.535.598.780,00	100	1.566.310.756,00	100	1.597.636.971,00	100	1.629.589.710,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Pipikoro
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase Efektifitas administrasi kesekretariatan (%)	100	100	100	1.538.265.000,00	100	1.569.030.300,00	100	1.600.410.906,00	100	1.632.419.124,00	100	1.665.067.507,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Kulawi Selatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.588.832.000,00		4.680.608.640,00		7.774.220.813,00		4.869.705.229,00		4.967.099.334,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					2.837.112.703 ,00		2.893.854.957 ,00		5.951.732.056 ,00		3.010.766.697 ,00		3.070.982.031 ,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	2.837.112.703 ,00	100	2.893.854.957 ,00	100	5.951.732.056 ,00	100	3.010.766.697 ,00	100	3.070.982.031 ,00	8.01.0.00.0.00.05. 0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					724.000.000,0 0		738.480.000,0 0		753.249.600,0 0		768.314.592,0 0		783.680.884,0 0	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	70	70	75	724.000.000,0 0	80	738.480.000,0 0	85	753.249.600,0 0	90	768.314.592,0 0	100	783.680.884,0 0	8.01.0.00.0.00.05. 0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					302.324.877,0 0		308.371.375,0 0		314.538.802,0 0		320.829.578,0 0		327.246.170,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	60	60	65	302.324.877,0 0	70	308.371.375,0 0	75	314.538.802,0 0	80	320.829.578,0 0	85	327.246.170,0 0	8.01.0.00.0.00.05.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	80	80	85	100.000.000,0 0	90	102.000.000,0 0	100	104.040.000,0 0	100	106.120.800,0 0	100	108.243.216,0 0	8.01.0.00.0.00.05.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					100.000.000,0 0		102.000.000,0 0		104.040.000,0 0		106.120.800,0 0		108.243.216,0 0	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang	65	65	70	100.000.000,0 0	80	102.000.000,0 0	90	104.040.000,0 0	100	106.120.800,0 0	100	108.243.216,0 0	8.01.0.00.0.00.05.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dilaksanakan (Persentase)													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					525.394.420,0 0		535.902.308,0 0		546.620.355,0 0		557.552.762,0 0		568.703.817,0 0	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	90	90	95	525.394.420,0 0	100	535.902.308,0 0	100	546.620.355,0 0	100	557.552.762,0 0	100	568.703.817,0 0	8.01.0.00.0.00.05. 0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.326.787.805 .348,00		1.370.799.383 .847,00		1.376.839.103 .307,00		1.382.937.241 .374,00		1.389.094.484 .513,00	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2025-2030 dapat diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKD berfokus pada pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, sedangkan IKK menilai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Adapun indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. IKU, IKD, dan IKK pada tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggungjawab kepala daerah periode berikutnya.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah dipilih dari indikator tujuan dan/atau sasaran pembangunan daerah dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Adapun IKU tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab.Sigi Tahun 2025-2029

No	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	Peningkatan Pendapatan Perkapita				2,01-2,16	2,23-2,38	2,61-2,74	3,13-3,28	3,96-4,11	4,78-4,93
	1	PDRB Perkapita (ADHB)	Rp. Juta	46,53	51,03-51,53	56,03-56,53	61,03-61,53	66,03-66,53	71,03-71,53	76,03-76,53
	2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEB)	Angka	16,73	17,20	17,68	18,15	18,62	19,09	19,57
	3	Indeks Ekonomi Hijau (IEH)	Angka	N/A	72,78	73,89	75,01	76,12	77,24	78,35
	4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	1,97	1,98	2,01	2,03	2,05	2,1	2,15
II	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang									
	1	Tingkat Kemiskinan	%	12,06	11,0-11,5	10,47-10,97	9,94-10,44	9,41-9,91	8,88-9,38	8,35-8,85
	2	Rasio Gini	Angka	0,25	0,250-0,240	0,239-0,234	0,233-0,228	0,227-0,222	0,217-0,215	0,210-0,205
	3	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	3,69	3,92	4,22	4,58	5,01	5,70	6,13
	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,50	4,10-4,15	4,64-4,69	5,18-5,23	5,72-5,77	6,75-6,80	7,25-7,30
	5	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka	58,8	60,00	61,20	62,42	63,67	64,95	66,24
	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,55	2,40	2,37	2,35	2,32	2,30	2,27
	7	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	0,63	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73
III	Kepemimpinan dan Pengaruh di provinsi Meningkat									

	1	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	38,14	40,05	42,05	44,15	46,36	48,68	51,11
	2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,27	3,50	3,59	3,69	3,78	3,88	3,97
	3	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	N/A	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
	4	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	70,5	72,26	74,07	75,92	77,82	79,76	81,76
IV	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia									
	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,51	71,50-72,00	72,65-73,15	73,80-74,30	74,96-75,46	76,13-76,62	77,28-77,78
	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	N/A	75,00	75,38	75,75	76,13	76,51	76,89
	3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	N/A	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50
V	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission									
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Angka	79,78	82,48	82,75	83,01	83,28	83,54	83,81
	2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	N/A	162,50	157,32	152,14	146,96	141,77	136,59

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah dan perangkat daerah untuk mengukur kinerja spesifik dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun IKD tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029

No	Sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					IUP
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Aspek Geografi dan Demografi									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,89	0,90	0,99	1,09	1,20	1,32	1,45	
2	Rasio Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin)	%	105	105,11	105,21	105,32	105,42	105,53	105,63	
3	Kepadatan Penduduk	Orang/km	52	52,52	53,05	53,58	54,11	54,65	55,20	
4	Rasio ketaatan terhadap RTRW	Angka	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
5	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase	49,21	49,70	50,20	50,70	51,21	51,72	52,24	
6	Angka Ketergantungan	%	51,81	51,55	51,29	51,04	50,78	50,53	50,27	
7	Rasio Konektivitas	Angka	NA	54,06	55,14	56,24	57,37	58,52	59,69	
8	Indeks Desa	Persentase	12,5	14	16	18	19	21	23	23

No	Sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					IUP
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persentase	65,78	70,38	75,31	80,58	86,22	92,26	98,72	
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,47	0,47	0,49	0,51	0,55	0,59	0,63	
11	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	60,00	61,30	62,70	64,00	65,30	66,30	66,70	
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
A.	Kesejahteraan Kesehatan									
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,33	71,69	72,05	72,41	72,77	73,13	73,50	1
3	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	NA	122	109	97	86	77	68	2
4	Prevalensi Stunting	%	33,00	30,00	27,00	24,00	21,00	18,00	15,00	2
5	Cakupan penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	%	NA	44,00	52,00	59,00	65,00	70,00	75,00	3
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)	%	NA	30,00	50,00	65,00	78,00	90,00	92,00	3
7	Prevalensi Schistosomiasis	%	≤ 0,80	≤ 0,80	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,00 (Eliminasi)	0,00	
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Angka	NA	98,60	98,70	98,80	98,90	99,00	99,10	4

No	Sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					IUP
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,50	0,50	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	40
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	N/A	65,03	65,68	66,34	67,00	67,67	68,35	
3	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	
4	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka		61,24-61,30	62,35-62,45	63,50-63,60	64,70-64,80	65,88-65,95	66,95-67,05	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	N/A	82,18	83,83	85,50	87,21	88,96	90,73	
6	-Nilai Kesetaraan	Angka	N/A	70,00	70,30	70,50	70,80	70,80	71,00	
7	-Nilai Toleransi	Angka	N/A	70,00	70,50	71,00	71,50	71,50	72,00	
8	-Nilai Kerjasama	Angka	N/A	70,00	70,30	70,60	70,90	70,90	71,20	
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	49,95	50,20	50,45	50,70	50,96	51,21	51,47	37
10	Indeks Partisipasi Olahraga	Angka	N/A	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	
11	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	N/A	71,00	71.71	72.43	73.15	73.88	74.62	
12	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	N/A	20,00	21,00	21,00	22,00	22,00	23,00	
13	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52	
D.	Kesejahteraan Lingkungan dan Ekonomi									
1	Kategori Penghargaan ADIPURA	Predikat/ Nilai	N/A	Setifikat 71	Setifikat 71	Setifikat 71	ADIPURA 73	ADIPURA 74	ADIPURA KENCANA 75	
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	37,49	39,36	41,33	43,40	45,57	47,85	50,24	42

No	Sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					IUP
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	12,12	12,73	13,36	14,03	14,73	15,47	16,24	42
4	Persentase Penurunan Emisi GRK: Kumulatif	%	N/A	28,00	29,05	31,00	33,00	33,88	34,00	
5	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun (Ton CO2 eq)	Ton CO2 Eq	N/A	565.655,11	632.143,26	709.986,93	798.376,67	884.431,12	980.969,40	45
6	Persentase Penurunan Emisi GRK: Tahunan	%	N/A	32	32,64	33,29	33,96	34,64	35,33	45
7	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	80,06	80,86	81,67	82,49	83,31	84,14	84,99	
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	12,6	11,97	11,37	10,80	10,26	9,75	9,26	43
9	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	N/A	30,12	31,62	33,20	34,86	36,61	38,44	43
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	84,58	85,43	86,28	87,14	88,01	88,89	89,78	23
11	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	N/A	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	41
12	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	2,11	2,27	2,34	2,42	2,49	2,57	2,61	
III	Aspek Daya Saing Daerah									
A.	Ekonomi Makro									
1	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp Juta	26,47	27,79	29,18	30,64	32,18	33,78	35,47	

No	Sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					IUP
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Peningkatan Investasi	%	N/A	50	55	60	60	65	70	
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,48	0,54	1,17	1,80	2,43	3,04	3,67	31
4	Tingkat Inflasi	%	N/A	5,00	4,90	4,80	4,71	4,61	4,52	32
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	6,01	7,45	7,49	7,53	7,58	7,67	7,69	
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	25	75-100	150-200	250-300	450-500	600-700	800-900	12
7	Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	N/A	503	578	665	765	880	1012	
8	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	28000	29000,00	30000,00	31000,00	32000,00	33000,00	34000,00	
B.	Ketenagakerjaan dan Produktivitas									
1	Rasio Penduduk Bekerja	Angka	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,92	76,68	80,51	84,54	88,77	93,20	97,86	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	5,04	5,29	5,55	5,83	6,12	6,43	6,75	
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	9
5	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal, diusulkan untuk menggunakan proksi:	%	0,6	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	

No	Sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					IUP
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	a) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	5	5	5	5	5	5	5	10
7	b) Proxy: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10
8	Proporsi Penciptaan Lapangan kerja Formal	Angka	3,67	3,67	3,71	3,92	4,14	4,37	4,56	15
9	Rasio Kewirausahaan Daerah	Angka	N/A	0,026	0,027	0,028	0,030	0,031	0,032	14
10	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persentase	N/A	69,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	
11	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	N/A	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	
12	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	N/A	18,75	19,80	21,37	23,48	26,10	29,25	14
13	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan	%	N/A	55,76	56,34	56,92	57,50	58,07	58,65	
14	Jumlah Koperasi Aktif	Angka	27	51	100	150	200	230	264	
15	Jumlah UMKM Yang Memiliki NIB	Angka	7018	7043	7068	7093	7123	7153	7183	

No	Sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					IUP
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
16	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Angka	Rp 5.613.636	Rp5.714.681	Rp5.815.727	Rp5.916.722	Rp6.017.818	Rp6.118.863	Rp6.219.909	
C.	Inovasi dan Sektor Unggulan									
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	N/A	0,25	0,27	0,28	0,29	0,31	0,33	19
2	Indeks Kemantapan Jalan	Angka	0,26	0,26	0,33	0,39	0,46	0,53	0,60	
3	Indeks Kemantapan Irigasi	Angka	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	
4	Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	5,28	5,35	5,42	5,52	5,58	5,60	
5	Indeks Akses Air Minum	Angka	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	
6	Indeks Akses Sanitasi	Angka	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,85	
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	N/A	5-7,5	5,84-9,37	6,68-11,25	7,52-13,12	8,36-15	9,2-16,87	
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,65	0,66	0,67	0,67	0,68	0,70	0,71	13
9	PDRB Sektor Unggulan	%	70,09	70,79	71,50	72,21	73,29	74,39	75,88	
10	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,1	2,21	2,32	2,43	2,55	2,68	2,81	
11	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	%	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	
12	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (ADHB)	%	0,49	0,49	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52	12
13	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Milyar Rp)	Angka	34,45	35,80	37,65	39,50	41,35	43,20	45,05	

No	Sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					IUP
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
14	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	41,17	40,76	40,35	39,95	39,55	39,15	38,76	11
15	1. NTP Pertanian	Angka	N/A	109,00	109,11	109,22	109,33	109,44	109,55	
16	2. NTN Perikanan Tangkap	Angka	N/A	105,00	105,11	105,21	105,32	105,42	105,53	
17	3. NTN Perikanan Budidaya	Angka	N/A	104,00	104,10	104,21	104,31	104,42	104,52	
18	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	N/A	87,05	87,25	87,50	87,75	88,01	88,30	
19	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	N/A	894,71	921,55	949,19	977,66	1006,98	1037,18	
20	Angka Konsumsi Ikan	Ton	N/A	67,43	69,12	70,89	72,15	74,23	76,18	
21	Kontribusi PDRB Pariwisata	%	0,49	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	
22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,91	14,05	14,19	14,33	14,47	14,62	14,77	
23	Return on Asset (ROA) BLUD/BUMD	%	N/A	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	
IV	Aspek Pelayanan Umum									
A.	Pelayanan Publik dan Elektronisasi									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,19	2,35	2,50	2,65	2,75	2,85	3,00	25
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka		3,54-3,60	3,63-3,69	3,73-3,79	3,82-3,88	3,92-3,98	4,01-4,02	26
3	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	20	30	40	65	75	85	90	
4	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD*	Angka	N/A	95,00	95,95	96,91	97,88	98,86	99,85	

No	Sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					IUP
			2024		2026	2027	2028	2029	2030	
5	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	N/A	80,00	81,20	82,42	83,65	84,91	86,18	
7	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)	Angka	N/A	2,00	2,20	2,42	2,66	2,93	3,22	
8	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
9	Rasio PAD (Bapenda)	Persentase	6,01	7,45	7,49	7,53	7,58	7,67	7,69	
10	Persentase Kepemilikan NPWP	Persentase	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B.	Demokrasi, Hukum dan HAM									
1	Persentase Penegakan Perda	%	N/A	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	76,58	28
2	Indeks Demokrasi Indonesia	%	N/A	84,00	86,50	89,00	91,50	94,00	96,50	30
3	Indeks Reformasi Hukum	Angka	86,96	87,83	88,71	89,59	90,49	91,40	92,31	24
4	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	N/A	76,00	80,56	85,39	90,52	95,95	100,00	
5	Indeks Kualitas Kebijakan	Predikat	N/A	2,52 Baik	2,73 Baik	3,20 Baik	3,30 Sangat Baik	3,50 Sangat Baik	3,80 Unggul	
C.	Reformasi Birokrasi & Pengawasan									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,29	3,32	3,36	3,39	3,42	3,46	3,49	
2	Persentase MCP KPK	%	43	65,01	65,66	66,32	66,98	67,65	68,33	
3	Kapabilitas APIP	Level	3	3,20	3,30	3,33	3,36	3,40	3,43	

No	Sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					IUP
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Nilai Sakip	Predikat/ Angka	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintah Daerah	Predikat	C	CC	B	B	B	B	B	
6	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	N/A	74,68	74,81	74,86	74,92	74,95	75,00	
7	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Angka	N/A	24,49	24,51	24,58	25,03	25,21	25,36	
8	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	1,44	1,60	2,50	3,15	3,46	3,50	4,19	
9	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Rapat-Rapat yang Difasilitasi Tepat Waktu, Tepat Tindak Lanjut, dan Tepat Sasaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Angka	3,35	3,38	3,4	3,43	3,46	3,5	3,53	
12	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	N/A	75	80	85	90	95	100	

Keterangan:

IUP* : Penyelarasan Indikaator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD dan RPJMN 2025-2029;

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja yang ditetapkan lebih fokus pada hasil dan dampak dari kebijakan serta program yang dilaksanakan untuk mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Adapun IKK tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Pendidikan									
1	Literasi Membaca	Angka	49,27	60	60,5	70	70,5	80	80,5	
2	Numerasi	Angka	44,27	60	60,25	60,5	60,75	70	70,25	
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	13,13	13,21	13,29	13,37	13,45	13,53	13,61	
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	9,01	9,04	9,05	9,07	9,09	9,11	9,13	
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (PAUD)	Angka	69,19	71,69	74,19	76,69	79,19	81,69	84,19	
6	Angka Partisipasi Sekolah (7-15) (SD-SMP)	Angka	95,82	95,97	96,12	96,27	96,42	96,57	96,72	
7	Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 tahun (Angka)	Angka	N/A	98,16	98,36	98,56	98,76	98,96	99,16	
8	Persentase guru memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional	Persentase	60	65	66	68	70	73	75	
II	Kesehatan									
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,33	71,69	72,05	72,41	72,77	73,13	73,50	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	NA	122,00	109,00	97,00	86,00	77,00	68,00	
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persentase	33,00	30,00	27,00	24,00	21,00	18,00	15,00	
4	Insidensi TB	Per 100.000 penduduk	329,00	329,00	252,00	231,00	211,00	190,00	170,00	
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase	75,00	98,60	98,70	98,80	98,90	99,00	99,10	
6	Persentase Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	Persentase	N/A	35	50,00	65,00	75,00	85,00	90,00	
7	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Persentase	8,00	8,00	7,70	7,00	6,50	5,00	4,50	
8	Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar	Persentase	78,00	79,40	80,80	82,20	83,60	85,00	87,00	
9	Kabupaten Sehat (KS)	Angka	N/A	51-60	51-60	51-60	51-60	61-70	61-70	
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	26,41	26,67	26,94	27,21	27,48	27,76	28,03	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	69,27	69,96	70,66	71,37	72,08	72,80	73,53	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase	74,82	75,57	76,32	77,09	77,86	78,64	79,42	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Angka	82,01	82,83	83,66	84,49	85,34	86,19	87,06	
5	Rasio ketaatan terhadap RTRW	Angka	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Persentase	23,02	23,25	23,48	23,71	23,95	24,19	24,43	
7	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	Hektar	151	152,51	154,04	155,58	157,13	158,7	160,29	
8	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	69,66	70,36	71,06	71,77	72,49	73,22	73,95	
9	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	6,75	6,82	6,89	6,96	7,03	7,1	7,17	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase perizinan kegiatan pemanfaatan ruang	Persentase	0,09	0,09	0,12	0,16	0,2	0,24	0,28	
IV	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase	84,58	85,43	86,28	87,14	88,01	88,89	89,78	
2	Persentase Pembangunan Baru dan atau Rehabilitasi serta Relokasi Program Pemerintah untuk Rumah Layak Huni Kabupaten Sigi	Persentase	N/A	9,63	10,25	10,75	11,88	12,56	13,18	
3	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase	N/A	18,26	20,51	22,76	25,01	27,26	29,51	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
V	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	N/A	76,00	80,56	85,39	90,52	95,95	100,00	
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
VI	Sosial									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Angka	N/A	71,00	71,71	72,43	73,15	73,88	74,62	
2	Persentase keluarga miskin yang meningkat ekonominya secara mandiri	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase keluarga yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Layanan Sosial bagi PPKS	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Peningkatan PSKS yang berperan Aktif dalam penanganan PPKS	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
VII	Tenaga Kerja									
1	Rasio penduduk bekerja	Rasio	N/A	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	80,06	80,86	81,67	82,49	83,31	84,14	84,99		
2	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan	Persentase	101,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
X	Urusan Pertanahan										
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	49,21	49,70	50,20	50,70	51,21	51,72	52,24		
2	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan	persentase	23,82	24,08	24,30	24,54	24,79	25,04	25,29		
XI	Lingkungan Hidup										
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Angka	N/A	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45		
2	Persentase Penurunan Emisi GRK: Kumulatif	%	N/A	28,00	29,05	31,00	33,00	33,88	34,00		
3	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun (Ton CO2 eq)	Ton CO2 Eq	N/A	565.655,11	632.143,26	709.986,93	798.376,67	884.431,12	980.969,40		
4	Persentase Penurunan Emisi GRK: Tahunan	%	N/A	32,00	32,64	33,29	33,96	34,64	35,33		
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	37,49	39,36	41,33	43,40	45,57	47,85	50,24		
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	12,12	12,73	13,36	14,03	14,73	15,47	16,24		

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	0	35	40	45	50	55	60	
8	Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi (km2)	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
9	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan <i>National Communications</i>	Angka	0	0	1	1	1	1	1	
10	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	7.842,21	7900,00	8100,00	8300,00	8500,00	8700,00	8900,00	
11	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Persentase	24	22,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	
12	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase	37,49	39,00	41,00	43,00	45,00	47,00	49,00	
XII	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	80,57	82,18	83,83	85,50	87,21	88,96	90,73	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase	95,23	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase	56,73	62,00	68,00	72,00	76,00	78,00	80,00	
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase	80,57	82,18	83,83	85,50	87,21	88,96	90,73	
XIII	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Indeks Desa	Persentase	12,0	14	16	18	19	21	23	
2	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	N/A	30	43	57	71	85	100	
3	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persentase	N/A	60	68	75	81	87	93	
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	N/A	20	40	60	80	95	100	
5	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persentase	N/A	20	40	60	80	95	100	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	N/A	65	70	75	80	85	90	
7	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	N/A	65	70	75	80	85	90	
XIV	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka		61,24-61,30	62,35-62,45	63,50-63,60	64,70-64,80	65,88-65,95	66,95-67,05	
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	60,00	61,3	62,70	64,00	65,30	66,30	66,70	
3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Persentase	2,31	2,3	2,29	2,28	2,28	2,27	2,26	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	Angka	42,5	41,9	42,10	40,60	40,00	39,40	38,80	
5	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/ Cara KB Modern	Persentase	81,40	81,40	81,50	81,60	81,80	81,90	82,00	
6	Indeks Lansia Berdaya	Angka	61,8	62,50	63,20	63,90	64,60	65,30	66,00	
7	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Angka	84,5	85,50	86,50	87,40	88,50	89,50	90,50	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Per	16,10	15,1	14,20	13,30	12,50	11,70	11,00	
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	5,50	5,90	6,40	6,90	7,40	8,00	8,60	
10	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR)	Persentase	63,55	63,36	63,67	63,68	63,69	63,70	63,71	
XV	Perhubungan									
1	Rasio Konektivitas	Rasio	53,00	54,06	55,14	56,24	57,37	58,52	59,69	
2	Konektivitas Darat	Persentase	N/A	54	55	56	57	58	59	
3	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	N/A	25	30	35	40	45	50	
4	Konektivitas Sungai/Danau	Persentase	N/A	65	70	75	80	85	90	
5	Jumlah retribusi sektor penyeberangan danau	Rupiah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
XVI	Komunikasi dan Informatika									
1	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Angka	N/A	0,25	0,27	0,28	0,29	0,31	0,33	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,19	2,35	2,50	2,65	2,75	2,85	3,00	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Persentase aplikasi umum SPBE digunakan Pemda	Persentase	N/A	50	55	65	75	85	95		
4	Persentase Layanan Publik online dan terintegrasi	Persentase	N/A	50	55	65	75	85	95		
XVII	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Persentase		18,75	19,80	21,37	23,48	26,10	29,25		
2	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persentase		2,61	2,73	2,84	2,96	3,08	3,20		
3	Persentase Volume Usaha Koperasi (%)	Persentase		9,52	10,05	10,86	11,92	13,26	14,86		
4	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha (%)	Persentase		21,76	22,44	23,72	24,71	25,69	26,68		
XVIII	Penanaman Modal										
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persentase	39	50	55	60	60	65	70		
2	Jumlah Investor Penanaman Modal Berskala Nasional (PMDM/PMA)	Angka	38	48	55	62	68	75	80		
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Angka	451.140.000.000	518.811.000.000	596.632.000.000	686.127.000.000	789.046.000.000	907.403.000.000	1.043.514.000.000		
XIX	Kepemudaan dan Olahraga										
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	N/A	20,00	21,00	21,00	22,00	22,00	23,00		
2	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Angka	N/A	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53		

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	N/A	10	15	20	25	30	35	
4	Tingkat Pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	N/A	10	15	20	25	30	35	
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase	N/A	2	3	4	5	6	7	
6	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional/Internasional)	Persentase	N/A	5	6	7	8	9	10	
7	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	N/A	2	3	4	5	6	7	
XX	Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	1,44	1,60	2,50	3,15	3,46	3,50	4,19	
2	Persentase OPD menggunakan data statistik untuk perencanaan pembangunan	Persentase	N/A	0	50	65	75	85	95	
3	Persentase OPD menggunakan data statistik untuk evaluasi pembangunan	Persentase	N/A	50,00	55	65	75	85	95	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	Persentase	N/A	0	30	35	40	50	60	
XXI	Persandian									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Tingkat keamanan informasi pemerintah (%))	Angka	N/A	0,37	1,20	1,50	2,60	2,75	3,00	
2	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	N/A	0,00	1	1	1	1	1	
XXII	Kebudayaan									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	50,2	50	50,45	50,7	50,96	51,21	51,47	
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	80	82	84	85	87	92	95	
3	Persentase Kebudayaan Lokal yang dikembangkan	Persentase	75	80	82	85	87	90	95	
4	Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	Persentase	85	87	89	90	92	94	96	
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (ADHB)	%	0,49	0,49	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52	
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persentase	0,65	0,66	0,67	0,67	0,68	0,7	0,71	
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	25	75-100	150-200	250-300	450-500	600-700	800-900	
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	20	25	20	20	6,06	8,57	10,53	
XXVII	Pertanian,Peternakan, dan Perkebunan									
1	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Peternakan, perkebunan, perikanan	Persentase	N/A	40,76	40,35	39,95	39,55	39,15	38,76	
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	101,51	101,87	102,34	102,8	103,28	103,75	104,23	
3	a. NTP Tanaman Pangan	Angka	101,51	101,86	102,22	102,58	102,94	103,30	103,66	
4	b. NTP Tanaman Hortikultura	Angka	97,84	98,42	99,02	99,61	100,21	100,81	101,41	
5	c. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat	Angka	100,16	100,91	101,67	102,43	103,20	103,98	104,76	
6	d. NTP Peternakan	Angka	106,12	106,28	106,44	106,60	106,76	106,92	107,08	
7	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Angka	26.010	28.586	32.040	37.256	43.406	50.657	59.205	
8	Jumlah Populasi Ternak Kambing	Angka	14.218	16.599	19.380	22.626	26.416	30.840	36.006	
9	Jumlah Populasi Ternak Babi	Angka	13.489	14.703	17.496	20.821	24.776	29.484	35.086	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Jumlah Populasi Ternak Unggas	Angka	568.819	2.982.805	3.295.425	3.505.934	3.736.484	3.838.184	4.103.149	
11	Jumlah Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	50,5	51,26	52,03	52,81	53,6	54,41	55,22	
12	Jumlah Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	40,95	41,76	42,6	43,45	44,32	45,21	46,11	
13	Jumlah Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	Ku/Ha	42,02	42,23	42,44	42,65	42,86	43,08	43,29	
14	Jumlah Produktivitas Cabai (Ku/Ha)	Ku/Ha	62,43	62,69	62,95	63,21	63,47	63,74	64	
15	Jumlah Produktivitas Durian (Kg/Pohon)	Kg/Pohon	122,02	122,61	123,01	123,61	124	124	125	
16	Jumlah Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	Kg/Ha	968,18	968,37	968,57	968,76	968,95	969,15	969,34	
17	Jumlah Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	Kg/Ha	715,99	716,35	716,71	717,06	717,42	717,78	718,14	
18	Jumlah Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	Kg/Ha	444,36	444,81	445,25	445,7	446,14	446,59	447,03	
XXVIII	Perdagangan									
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	13,91	14,05	14,19	14,33	14,47	14,62	14,77	
2	Persentase Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi (Unit)	Angka	1	3	3	3	3	3	3	
XXIX	Perindustrian									
1	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	%	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Produk IKM yang Tersertifikasi	Persentase	N/A	9,00	14,00	18,00	22,00	25,00	30,00	
3	Jumlah Produk Industri Pengolahan yang dipromosikan	Angka	108	98	108	119	131	144	159	
XXX	Transmigrasi									
1	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Angka	Rp 5.613.636	Rp 5.714.681	Rp 5.815.727	Rp 5.916.722	Rp 6.017.818	Rp 6.118.863	Rp 6.219.909	
2	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	N/A	20	20	20	20	20	20	
3	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembangan	Persentase	N/A	20	20	20	20	20	20	
4	Persentase Transmigran yang Dibina dan diberdayakan	Persentase	N/A	20	20	20	20	20	20	
XXXI	Sekretariat Daerah									
1	Nilai SAKIP	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka		3,54-3,60	3,63-3,69	3,73-3,79	3,82-3,88	3,92-3,98	4,01-4,02	
3	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Angka	86,96	87,83	88,71	89,59	90,49	91,40	92,31	
4	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Angka	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
5	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Angka	3,35	3,38	3,4	3,43	3,46	3,5	3,53	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	2,11	2,27	2,34	2,42	2,49	2,57	2,61		
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	N/A	80	81,2	82,42	83,65	84,91	86,18		
3	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Angka	N/A	2	2,2	2,42	2,66	2,93	3,22		
4	Penetapan APBD Tepat Waktu	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100		
5	Persentase Dokumen dan Laporan penatausahaan administrasi keuangan daerah sesuai standar regulasi	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100		
6	Persentase dokumen laporan dan pertanggungjawaban APBD tepat waktu sesuai regulasi	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100		
7	Persentase Kepemilikan NPWP	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100		
8	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100		
XXXV	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	N/A	74,68	74,81	74,86	74,92	74,95	75,00		
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Angka	N/A	24,49	24,51	24,58	25,03	25,21	25,36		

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan	Angka	N/A	74,68	74,81	74,86	74,92	74,95	75	
4	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Angka	N/A	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	
5	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Angka	N/A	24,20	24,22	24,23	24,24	24,25	24,26	
XXXVI	Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	N/A	75	80	85	90	95	100	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan Implementasi Pembangunan	Persentase	N/A	75	80	85	90	95	100	
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	N/A	75	80	85	90	95	100	
4	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	N/A	75	80	85	90	95	100	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	N/A	84,00	86,50	89,00	91,50	94,00	96,50	
2	Persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Persentase	72	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	
XXXIX	Perizinan									
1	Survey Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Perizinan	Persentase	92,09	92,75	93,00	94,00	95,00	96,50	97,00	
2	Jumlah Penerbitan NIB	Angka	3258	3584	3942	4336	4770	5247	5772	
XL	Penanggulangan Bencana Daerah									
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	N/A	0,47	0,49	0,51	0,55	0,59	0,63	
2	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
XLI	Pendapatan Daerah									
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	N/A	7,45	7,49	7,53	7,58	7,67	7,69	
2	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Persentase	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	Persentase	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Persentase	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	

No.	Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Capaian Awal	Baseline	Target/Sasaran					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Realisasi Penerimaan PAD Lain-lain yang Sah	Persentase	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Sigi secara tahunan dalam lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga merupakan penjabaran tahap I (pertama) RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan kebijakan lainnya yang berlaku.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan untuk menyusun perencanaan perangkat daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Kabupaten Sigi. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sigi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu "Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata".

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik dengan dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program prioritas pembangunan, serta peran para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Kabupaten Sigi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sigi yang semakin sejahtera.


BUPATI SIGI
MOHAMAD RIZAL INTJENAE

